RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023

RKPD 2023

Kabupaten Indragiri HIlir

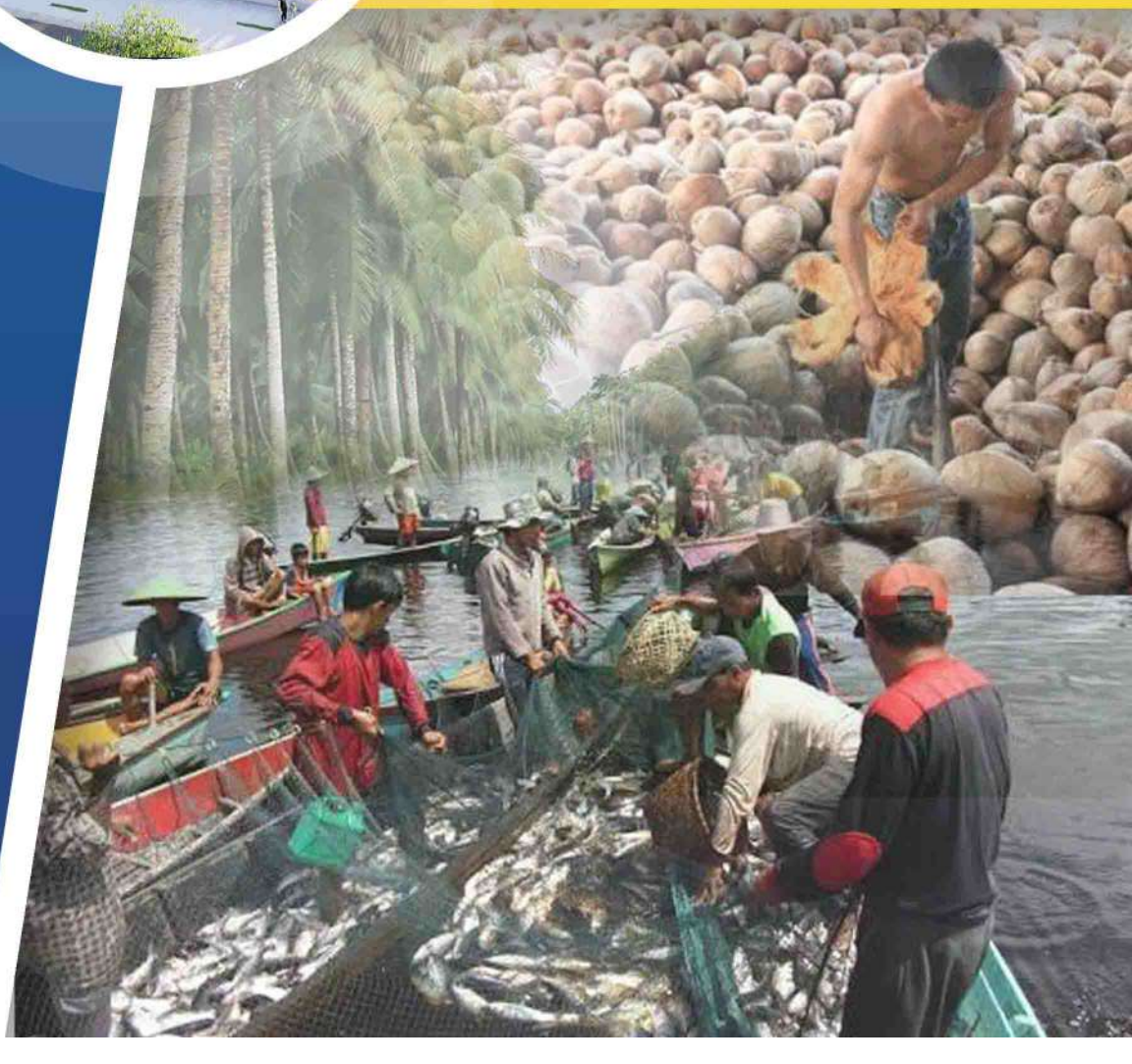

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran serta untuk mengakomodir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil dari proses pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6757);

9. Peraturan Pemeritah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1027);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Indragiri Hilir.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Indragiri Hilir serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.
(2) RKPD Tahun 2023 digunakan sebagai bahan evaluasi penyusunan evaluasi penyusunan Rancangan KUA dan PPAS sebagai bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan daerah APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2023 terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII PENUTUP

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Indragiri Hilir ini.

BAB IV
PENYUSUNAN RKPD
Pasal 4

RKPD Tahun 2023 mengacu pada :
(1) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD Provinsi.
(2) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD Kabupaten/kota; dan
(3) Peraturan Daerah mengenai Perangkat Daerah.

Pasal 5

RKPD Tahun 2023 merupakan hasil pembahasan dalam Musrenbang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 yang dirumuskan pada minggu ketiga bulan Maret 2022.

Pasal 6

RKPD Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Indragiri Hilir serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 4 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 27

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-8

1.4 Maksud Tujuan I-9

1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR II-1

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana II-16

2.1.1.3 Kondisi Demografi II-18

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-24

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-24

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB II-25

2.1.2.1.2. Inflasi II-31

2.1.2.1.3. PDRB Per Kapita II-33

2.1.2.1.4 Kemiskinan..... II-35
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial..... II-42
2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia..... II-42
2.1.2.2.2. Harapan Lama Sekolah..... II-44
2.1.2.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah..... II-46
2.1.2.2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)..... II-48
2.1.2.2.5 Angka Harapan Hidup..... II-52
2.1.2.2.6. Prevalensi Balita Gizi Buruk..... II-54
2.1.2.2.7. Tingkat Pengangggguran Terbuka..... II-55
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... II-57
2.1.2.3.1. Seni Budaya..... II-57
2.1.2.3.2. Olahraga..... II-60
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum..... II-61
2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar..... II-61
2.1.3.1.1. Pendidikan..... II-61
2.1.3.1.2. Kesehatan..... II-83
2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-104
2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Permukiman II-118
2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-125
2.1.3.1.6. Sosial..... II-133
2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar..... II-145
2.1.3.2.1. Tenaga Kerja..... II-145
2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-150

2.1.3.2.3. Pangan..... II-155
2.1.3.2.4. Pertanahan..... II-159
2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup..... II-160
2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-168
2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masayarakat dan Desa II-173
2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-180
2.1.3.2.9. Perhubungan..... II-184
2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informatika..... II-192
2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. II-197
2.1.3.2.12. Penanaman Modal..... II-200
2.1.3.2.13. Statistik..... II-203
2.1.3.2.14. Persandian..... II-207
2.1.3.2.15. Kebudayaan..... II-208
2.1.3.2.16. Perpustakaan..... II-210
2.1.3.2.17. Kearsipan II-213
2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan..... II-214
2.1.3.3.1 Pariwisata..... II-215
2.1.3.3.2. Pertanian..... II-216
2.1.3.3.3. Perdagangan..... II-228
2.1.3.3.4. Perindustrian..... II-230
2.1.3.3.5. Transmigrasi..... II-233
2.1.3.3.5. Kelautan dan Perikanan..... II-233
2.1.3.4 Urusan Penunjang..... II-236

2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan..... II-236
2.1.3.4.2. Keuangan..... II-240
2.1.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan ……... II-242
2.1.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan..... II-244
2.1.3.4.5. Pengawasan..... II-246
2.1.3.4.6. Sekretariat Dewan..... II-247
2.1.3.4.7. Kesatuan Bangsa dan Politik..... II-248
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah..... II-250
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah..... II-250
2.1.4.1.1. Pengeluaran Per Kapita..... II-250
2.1.4.1.2. Nilai Tukar Petani..... II-252
2.1.4.2 Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur..... II-253
2.1.4.3 Iklim Investasi..... II-253
2.1.4.3.1. Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi..... II-256
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia..... II-260
2.2 Permaslaahan Pembangunan Daerah Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD..... II-286
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah …… II-348
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... II-351
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah..... II-355

2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan..... II-355
2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan……. II-357
2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang …….. II-358
2.3.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman……. II-358
2.3.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat …… II-359
2.3.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial …… II-360
2.3.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja …… II-360
2.3.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak …… II-361
2.3.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan …….. II-361
2.3.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup ……. II-361
2.3.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil…… II-362
2.3.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa …….. II-362
2.3.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ……. II-363
2.3.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan…… II-363
2.3.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika …… II-364

2.3.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah …….. II-364

2.3.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal…….. II-364

2.3.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga …… II-365

2.3.2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik …… II-365

2.3.2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian ……... II-366

2.3.2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan ……. II-366

2.3.2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan …... II-366

2.3.2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan ……. II-366

2.3.2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan ……... II-366

2.3.2.25 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata …… II-367

2.3.2.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian …….. II-367

2.3.2.27 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan …… II-368

2.3.2.28 Urusan Pemerintahan Pemerintahan Bidang Perindustrian …… II-368

2.3.2.29 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi …… II-368

2.3.2.30 Penunjang Urusan …… II-368

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.... III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-2

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi..... III-4

.

3.1.2 Kemiskinan, IPM, Gini Ratio dan Pengangguran Terbuka III-8

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-10
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-10
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah..... III-16
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... III-19

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran..... IV-4
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023..... IV-12
4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 IV-12
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023 IV-14
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023..... IV-19

BAB V RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... VI-1
BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 2020	II-3
Tabel 2.2	Luas Satuan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir	II-13
Tabel 2.3	Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-14
Tabel 2.4	Banyaknya Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2021	II-17
Tabel 2.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2021	II-19
Tabel 2.6	Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023 terkait kebencanaan di Kabupaten Indragiri Hilir	II-20
Tabel 2.7	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-22
Tabel 2.8	Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	II-24
Tabel 2.9	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	II-27
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	II-28
Tabel 2.11	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Pendidikan	II-79
Tabel 2.12	Permasalahan /Hambatan Dalam Penerapan Serta Solusi dalam Pencapai SPM Bidang Pendidikan Di Kabupaten Indragiri Hilir	II-80
Tabel 2.13	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan	II-97
Tabel 2.14	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang	II-100

	Kesehatan Berdasarkan Permenkes No : 43/MENKES/PER/VIII/2016	
Tabel 2.15	Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan tahun 2017-2021	II-102
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Penangan Terkait Tuberculosis (TB)	II-103
Tabel 2.17	Grafik Penurunan Prevlensi Stunting Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 dan 2021	II-104
Tabel 2.18	Status Daerah Irigasi Yang Menjadi Wewnang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	II-111
Tabel 2.19	Data D.I.R Tertangani dan Pagu Anggaran	II-113
Tabel 2.20	Data Capaian Sarana Prasarana Persediaan Air Bersih dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	II-115
Tabel 2.21	Data Sambungan Rumah Sarana dan Prasarana Persediaan Air Bersih dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	II-116
Tabel 2.22	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan terjangkau	II-116
Tabel 2.23	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM bidang PU-PR	II-117
Tabel 2.24	Permasalahan/Hambatan Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang PU-PR di Kabupaten Indragiri Hilir	II-118
Tabel 2.25	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat	II-124
Tabel 2.26	Permasalahan Dalam Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir	II-124
Tabel 2.27	Pencapaian Indikator SPM Bidang Tratntibumlinmas Kabupaten Indragiri hilir Tahun 2018-2021	II-130
Tabel 2.28	Permasalahan/Hambatan Dalam Penerpaan dan pencapaian SPM Bidang Trantibunlinmas Kabupaten Indragiri Hilir	II-132
Tabel 2.29	Rekapitulasi DTKS Kabupaten Indragiri hilir Tahun 2022	II-137
Tabel 2.30	Data Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2021	II-138

Tabel 2.31	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	II-139
Tabel 2.32	Jumlah Data Komunitas Adat Terpencil (KAT)	II-141
Tabel 2.33	Jenis Pelayanan, Indikator dan Capaian Bidang Sosial	II-143
Tabel 2.34	Permasalahan/hambatan Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Indragiri Hilir	II-143
Tabel 2.35	Capaian Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2019 s.d 2021	II-163
Tabel 2.36	Perkembangan Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun (IDM)	II-175
Tabel 2.37	Jumlah Unit Usaha BUMdesa di Inhil	II-176
Tabel 2.38	Data Kelembagaan Desa	II-177
Tabel 2.39	Data Sarana Prasarana Kantor Desa Kabupaten Indragiri Hilir	II-177
Tabel 2.40	Data Angkutan Penumpang Umum dan Berizin Tahun 2019-2021	II-186
Tabel 2.41	Data Penumpang Laut Tahun 2019-2021	II-186
Tabel 2.42	Jumlah Arus Lalu Lintas Angkutan Udara di Bandara Udara Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2021	II-187
Tabel 2.43	Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2021	II-187
Tabel 2.44	Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2021	II-188
Tabel 2.45	Indikator Kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2019-2021	II-193
Tabel 2.46	Indikator Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	II-196
Tabel 2.47	Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Indragiri Hilir	II-196
Tabel 2.48	Buku PDRB	II-206

Tabel 2.49	Sistem Data dan Statistik Terintegrasi	II-207
Tabel 2.50	Program Kegiatan Tanda Tangan Elektronik	II-208
Tabel 2.51	Produksi Ternak Kabupaten Indragiri Hilir 2017-2021	II-220
Tabel 2.52	Perkembangan Realisasi, target dan capaian kinerja indikator Opini BPK Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-241
Tabel 2.53	Indeks Profesinalitas ASN dan Indeks Sistem Merit Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2021	II-243
Tabel 2.54	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2021 Kabupaten Indragiri Hilir	II-244
Tabel 2.55	Kinerja Indeks Inoveasi daerah Kabupaten Indragiri hilir Tahun 2020-2021	II-245
Tabel 2.56	Capaian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Indragiri Hilir Tahun 2021	II-249
Tabel 2.57	Daftar Investor PMA Dan PMDM Masih Beroperasi Berdasarkan IP Yang Bernvetasi Di kabupaten Indragiri Hilir s/d Tahun 2018	II-254
Tabel 2.58	Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Yang Mendukung Iklim Usaha	II-257
Tabel 2.59	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-261
Tabel 2.60	Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2021 dan realisasi RPJMD	II-286
Tabel 2.61	Pencapaian Indikator Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Indonesia Tahun 2021	II-363
Tabel 3.1	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Indragiri Hilir	III-3
Tabel 3.2	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017-2021	III-4

Tabel 3.3	IHK dan Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Tembilahan April 2022, Tahun Kalender 2022, dan tahun ke tahun menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	III-7
Tabel 3.4	Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir	III-8
Tabel 3.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir	III-8
Tabel 3.6	Gini Ratio Kabupaten Indragiri Hilir	III-9
Tabel 3.7	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir	III-9
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024	III-15
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024	III-17
Tabel 3.10	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024	III-21
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Stretegi dan Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023	IV-6
Tabel 4.2	Strategi Arah Kebijakan RPJMD dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV-26
Tabel 4.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023	IV-33
Tabel 4.4	Urusan Pemerintahan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir	IV-38
Tabel 4.5	Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir	IV-40
Tabel 4.6	Sandingan Antara Sasaran/Indikator Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV-45
Tabel 4.7	Sinkronisasi Prioritas Nasional, Prioritas Propinsi dan Prioritas Kabupaten Tahun 2023	IV-81
Tabel 4.8	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2023 dengan PN RKP 2023	IV-82

Tabel 4.9	Konsistensi Prioritas Dan Sasaran Pembangunan pada RKPD tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi 2023	IV-102
Tabel 4.10	Sandingan Program Prioritas Dengan Program Penanggulangan Kemisikinan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023	IV-138
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pagu Menurut Urusan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023	V-2
Tabel 5.2	Rekapitulasi Pagu Prioritas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023	V-4
Tabel 5.3	Sandingan Prioritas Daerah dan Indikator Kinerja Program Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023	V-5
Tabel 5.4	Sandingan Prioritas Daerah Untuk Indikator Sasaran Dan Indikator Kinerja program Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023	V-19
Tabel 5.5	Data Program/Kegiatan APBD Kab. Inhil Tahun 2023 Penunjang Program/Kegiatan APBD Prov. Riau Tahun 2023	V-27
Tabel 5.6	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023	V-34
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-9
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Indragiri Hilir	II-2
Gambar 2.2	Distribusi Lahan Basah dan Lahan Kering Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-16
Gambar 2.3	Perkembangan Nilai Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-22
Gambar 2.4	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2021	II-26
Gambar 2.5	Kinerja Indikator Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-30
Gambar 2.6	Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-31
Gambar 2.7	Perkembangan Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Pekanbaru, Dumai dan Riau Tahun 2017-2021	II-32
Gambar 2.8	Kinerja Indikator Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-33
Gambar 2.9	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Pelalawan Tahun 2017-2021	II-33
Gambar 2.10	Kinerja Indikator PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-35
Gambar 2.11	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2017-2021	II-36
Gambar 2.12	Kinerja Indikator Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-37
Gambar 2.13	Perkembangan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2017-2021	II-38

Gambar 2.14	Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-39
Gambar 2.15	Perkembangan Angka Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-40
Gambar 2.16	Perkembangan angka Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-41
Gambar 2.17	Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-42
Gambar 2.18	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2017-2021	II-43
Gambar 2.19	Kinerja Indikator IPM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-44
Gambar 2.20	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2017-2021	II-45
Gambar 2.21	Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-46
Gambar 2.22	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2017-2021	II-47
Gambar 2.23	Kinerja Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-48
Gambar 2.24	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2017-2021	II-49
Gambar 2.25	Kinerja Indikator APK SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-50
Gambar 2.26	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMP/Mts Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2017-2021	II-51

Gambar 2.27	Kinerja Indikator APK SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-52
Gambar 2.28	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2017-2021	II-53
Gambar 2.29	Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-54
Gambar 2.30	Kinerja Indikator Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Indragiri hilir 2017-2021	II-55
Gambar 2.31	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2017-2021	II-56
Gambar 2.32	Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-57
Gambar 2.33	Perkembangan Cakupan Fasilitasi Seni Budaya di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-58
Gambar 2.34	Perkembangan Group Kesenian di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-58
Gambar 2.35	Kinerja Indikator Cakupa Fasilitasi Seni Budaya Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-59
Gambar 2.36	Kinerja Indikator Jumlah Lapangan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-60
Gambar 2.37	Perkembangan APM SD/MTs dan APM SMP/MTs di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-62
Gambar 2.38	Kinerja Indikator APM SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-63
Gambar 2.39	Kinerja APM SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-64
Gambar 2.40	Perkembangan APS 7-12 Tahun dan APS 13-15 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-65

Gambar 2.41	Kinerja indikator APS 7-12 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-66
Gambar 2.42	Kinerja Indikator APS 13-15 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-67
Gambar 2.43	Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-68
Gambar 2.44	Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-69
Gambar 2.45	Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-70
Gambar 2.46	Perkambangan Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-71
Gambar 2.47	Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usuia 7-12 Tahun Kabupaten Indragiiri Hilir Tahun 2017-2021	II-72
Gambar 2.48	Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-73
Gambar 2.49	Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-74
Gambar 2.50	Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-75
Gambar 2.51	Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-76
Gambar 2.52	Perkembangan Guru Berdiskualifikasi S1/D.IV Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-77
Gambar 2.53	Kinerja Indikator Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-78
Gambar 2.54	Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2016-2020	II-84
Gambar 2.55	Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per.1000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-85

Gambar 2.56	Perkembangan Rasio Puskesmas Per 1.0000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016-2020	II-86
Gambar 2.57	Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-87
Gambar 2.58	Perkembangan Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahu 2016-2020	II-88
Gambar 2.59	Kinerja Indikator rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-89
Gambar 2.60	Perkembangan Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016-2020	II-90
Gambar 2.61	Kinerja Indikator Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-91
Gambar 2.62	Perkembangan Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016-2020	II-92
Gambar 2.63	Kinerja Indikator Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-93
Gambar 2.64	Perkembangan Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016-2020	II-94
Gambar 2.65	Kinerja Indikator Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-95
Gambar 2.66	Perkembangan Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2020	II-96
Gambar 2.67	Kinerja Indikator Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-97
Gambar 2.68	Jenis Permukaan Jalan Baik di Kabupaten Indrgairi Hiilr Tahun 2017-2021	II-105
Gambar 2.69	Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-106
Gambar 2.70	Perkembangan Jalan dengan Kondisi Mantap di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-107

Gambar 2.71	Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Mantap di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-108
Gambar 2.72	Perkembangan Jembatan dengan Kondisi Baik dan Mantap di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2021	II-109
Gambar 2.73	Perkembangan Kondisi Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-110
Gambar 2.74	Kinerja Indikator Luas Irigasi Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-111
Gambar 2.75	Persentase RTH yang terpelihara di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-114
Gambar 2.76	Kinerja Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-115
Gambar 2.77	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir 2017-2021	II-119
Gambar 2.78	Kinerja Indikator Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-120
Gambar 2.79	Kinerja Indikator Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-121
Gambar 2.80	Persentase Ketersediaan PSU Lingkungan Peruamahn Kabupaten Indragiri Hihlir Tahun 2019-2021	II-122
Gambar 2.81	Kinerja Indikator Rasio Rumah Ber IMB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-126
Gambar 2.82	Kinerja Indikator Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-127
Gambar 2.83	Kinerja Indikator Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-128
Gambar 2.84	Kinerja Indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-129

Gambar 2.85	Kinerja Indikator Cakupan Penerima Jaminan Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-134
Gambar 2.86	Kinerja Indikator PPKS yang Menerima Bantuan Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-136
Gambar 2.87	Perkembangan TPAK Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2017 – 2021	II-146
Gambar 2.88	Kinerja Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-147
Gambar 2.89	Kinerja Indikator Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-148
Gambar 2.90	Kinerja Indikator Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-149
Gambar 2.91	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2017-2021	II-151
Gambar 2.92	Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-152
Gambar 2.93	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2017-2021	II-153
Gambar 2.94	Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-154
Gambar 2.95	Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-155
Gambar 2.96	Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016-2020	II-156
Gambar 2.97	Kinerja Indikator Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-157
Gambar 2.98	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016 – 2020	II-158

Gambar 2.99	Kinerja Indikator Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-159
Gambar 2.100	Kinerja Indikator Luas tanah bersertifikat di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-160
Gambar 2.101	Kinerja Indikator Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-161
Gambar 2.102	Kinerja Indikator Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-141
Gambar 2.103	Peta Rawan Bencana Kebakaran Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir	II-168
Gambar 2.104	Kinerja Indikator Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-169
Gambar 2.105	Kinerja Indikator Kepemilikan KTP di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-170
Gambar 2.106	Kinerja Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-172
Gambar 2.107	Kinerja Indikator Cakupan Program “Desa Maju Inhil Jaya” di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-174
Gambar 2.108	Kinerja Indikator PKK Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-179
Gambar 2.109	Kinerja Indikator Posyandu Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-180
Gambar 2.110	Kinerja Indikator Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-181
Gambar 2.111	Kinerja Indikator PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber-KB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-183
Gambar 2.112	Kinerja Indikator Ratio PPKBD Satu Petugas Di Setiap Desa/kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-184
Gambar 2.113	Kinerja Indikator Tersedianya Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang telah tersedia Jaringan Jalan Untuk	II-185

	Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	
Gambar 2.114	Kinerja Indikator Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penerangan Jalan Umum pada Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-190
Gambar 2.115	Kinerja Indikator Tersedianya Kapal Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Atau Trayek Dalam Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-191
Gambar 2.116	Kinerja Indikator Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Website di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-194
Gambar 2.117	Kinerja Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-195
Gambar 2.118	Kinerja Koperasi Aktif di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-198
Gambar 2.119	Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-199
Gambar 2.120	Kinerja Indikator Realisasi PMDN di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-201
Gambar 2.121	Kinerja Indikator PMA di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-203
Gambar 2.122	Kinerja Indikator Buku Indragiri Hilir Dalam Angka di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-204
Gambar 2.123	Kinerja Indikator Kecamatan Dalam Angka di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-205
Gambar 2.124	Kinerja Indikator Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-209
Gambar 2.125	Kinerja Indikator Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-210

Gambar 2.126	Kinerja Indikator Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021	II-211
Gambar 2.127	Kinerja Indikator Koleksi Buku Yang tersedia di Perpustakaan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-212
Gambar 2.128	Kinerja Indikator Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-213
Gambar 2.129	Kinerja Indikator Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-214
Gambar 2.130	Kinerja Indikator Kunjungan Wisatawan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-125
Gambar 2.131	Kinerja Indikator Produktivitas Padi di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-127
Gambar 2.132	Kinerja Indikator Produksi Beras di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-128
Gambar 2.133	Produktivitas Kelapa (Ton Koppa/Hektar) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-221
Gambar 2.134	Kinerja Indikator Produktivitas Kelapa di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-222
Gambar 2.135	Produktivitas Kelapa sawit Indragiri hilir 2017-2021 (Ton)	II-225
Gambar 2.136	Produktivitas Kelapa Sawit (Ton CPO/Hektar) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-225
Gambar 2.137	Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-227
Gambar 2.138	Kinerja Indikator Nilai Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-229
Gambar 2.139	Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-230
Gambar 2.140	Perkembangan Nilai Produksi Usaha Industri Menengah Kecil di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-231

Gambar 2.141	Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-232
Gambar 2.142	Kinerja Indikator Produksi Perikanan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-234
Gambar 2.143	Kinerja Indikator Konsumsi Ikan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-235
Gambar 2.144	Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-237
Gambar 2.145	Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-239
Gambar 2.146	Kinerja Indikator Penjabaran RPJMD kedalam RKPD di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-240
Gambar 2.147	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pemanfaatan 2017-2021	II-245
Gambar 2.148	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Indikator Persentase Temuan APIP Yang Ditindaklanjuti di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-246
Gambar 2.149	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Indikator Rasio Pembahasan Prolegda di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-247
Gambar 2.150	Perkembangan Pengeluaran Per kapita Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-251
Gambar 2.151	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-252
Gambar 2.152	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-252

Gambar 2.153	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Rumah tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-253
Gambar 2.154	Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Magrib Mengaji melalui Program DMIJ 2017-2021	II-259
Gambar 2.155	Jumlah Dana yang Sudah Disalurkan melalui Program DMIJ 2017-2021	II-259
Gambar 2.156	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Rasio Ketergantungan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021	II-260

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan memperhatikan Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Daerah.

Dalam menyusun RKPD digunakan 4 (empat) pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top down)* dan bawah-atas *(bottom up)*. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan

dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas bawah *(top down)* dan bawah atas *(bottom up)* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD tahun 2023 ini mengacu kepada RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2025, Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2023. Selanjutnya, setiap Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan mengacu RKPD 2023 ini untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang pada akhirnya menjadi

pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023. Sebagai dokumen perencanaan daerah, maka RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 merupakan tahun kelima atau terakhir dari pelaksanaan RPJMD 2018-2023 mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Tahapan penyusunan RKPD dimulai dari persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, selanjutnya penyusunan rancangan RKPD, Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan pada akhirnya adalah penetapan RKPD. Perumusan RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi Covid Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005- 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan dimaksud telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, yang juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Provinsi dan Nasional.

Dokumen RKPD sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Sedangkan dokumen Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD.

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran dari target kinerja program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;
2. RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
3. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023, telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018–2023.
4. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah

disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

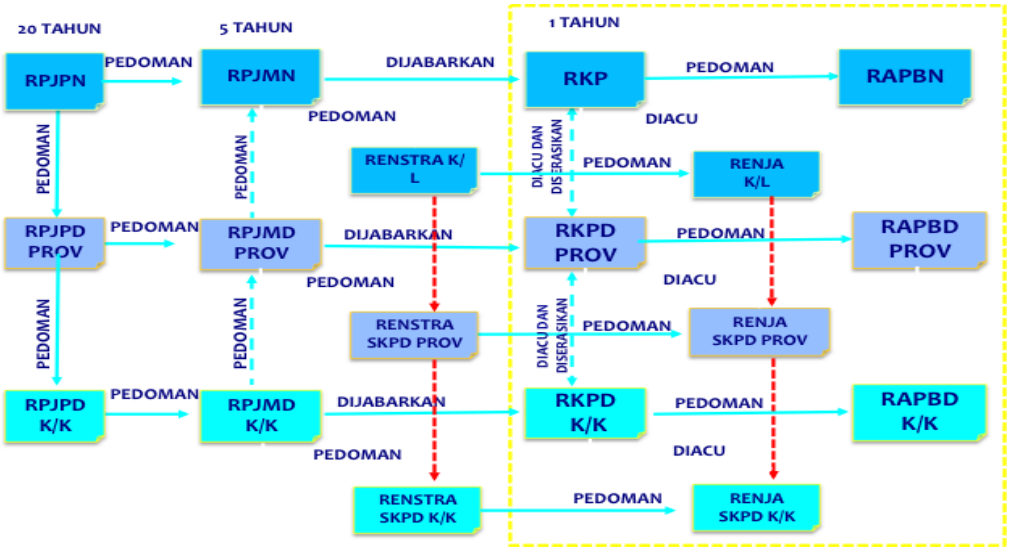

Gambar 1.1.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023.
2. Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah tahun 2023 guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 sesuai Perubahan RPJMD periode tahun 2018-2023.

Tujuannya adalah:

1. Menyediakan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam pasal 79 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Pemerintah daerah diamanahkan untuk melakukan Persiapan Penyusunan RKPD. Adapun tahap dalam Persiapan Penyusunan RKPD adalah :

a. Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD;
b. Orientasi mengenai RKPD;
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan RKPD Kabupaten disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten, RKPD Propinsi, RKP, Program Strategis Nasional dan pedoman Penyusunan RKPD.

Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 mencakup :

a. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah;
b. Analisis Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah;
c. Analisis Kapasitas Riil Keuangan Daerah;
d. Penelaahan Renja Perangkat Daerah;
e. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah;
f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
j. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Dalam penyusunan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan

kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD, disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAPPEDA.

Sistematika Penyusunan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Permendagri ini memuat :

a. Pendahuluan, dimana dalam bab ini memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan sistematika dokumen RKPD.
b. Gambaran Umum Kondisi Daerah, dimana dalam bab ini memuat tentang :
    - Kondisi umum serta kondisi daerah yang disini tercakup didalamnya adalah aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
    - Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan realisasi RPJMD.
    - Permasalahan pembangunan daerah yang terdiri dari permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, dimana dalam bab ini berisi tentang Arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, dibab ini berisi tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023.
e. Rencana kerja dan pendanaan Daerah.
f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
g. Penutup.

BAB

2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Indragiri Hilir dianalisis dari 3 aspek utama yaitu aspek Kondisi Umum Kondisi Daerah, aspek Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD dan aspek Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.1. Kondisi Umum Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Indragiri Hilir dianalisis dari 4 aspek yaitu aspek Geografi dan Demografi, aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi menggambarkan mengenai karakterisitik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek demografi menggambarkan perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat.

2.1.1.1. Karakterisitik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah menggambarkan mengenai letak, luas dan batas wilayah administrasi, Kondisi geografis, Kondisi topografi, Kondisi geologi, Kondisi Hidrologi, Jenis Tanah, Daya Dukung Lahan, dan Kondisi klimatologi.

a. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir berada pada posisi 0°36′ Lintang Utara – 1°07′ Lintang Selatan dan 102°32′ Bujur Timur – 104°10′ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 11.605,97 KM². Batas-batas wilayah kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan,
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau.

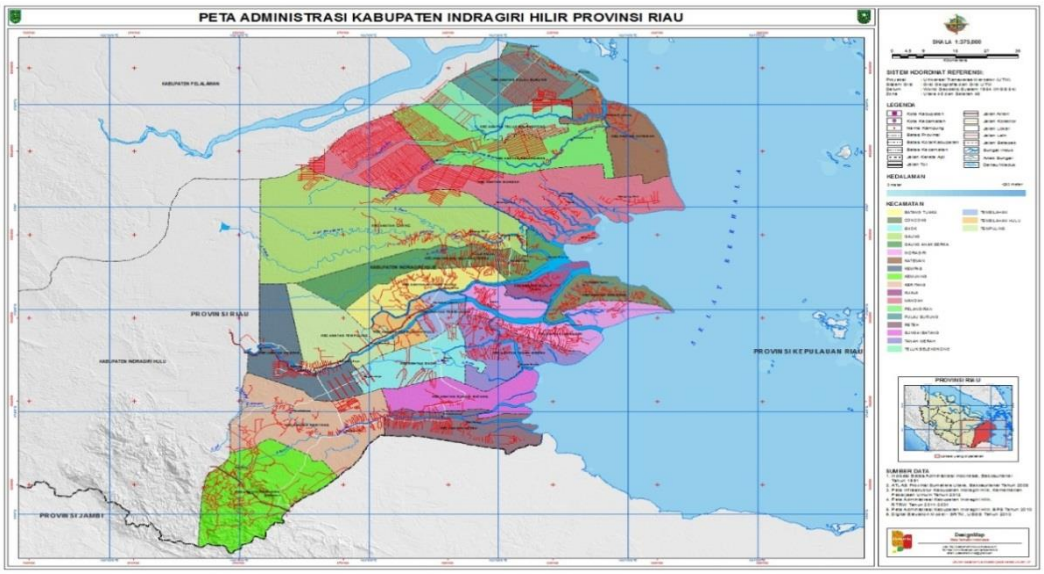

Gambar 2.1.
Peta Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Sumatera yang merupakan gerbang selatan Provinsi Riau. Posisi Kabupaten Indragiri yang strategis yaitu dekat dengan Selat Melaka dan sejak dulu telah melakukan perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Disisi timur yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau

menjadikan produksi hasil-hasil pertanian Indragiri Hilir dengan mudah dan cepat dibawah ke Kepulauan Riau khususnya Batam. Disisi selatan, Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan Provinsi Jambi dan sekaligus dilintasi 'oleh jalan Nasional 'Lintas Timur'. Posisi kabupaten yang strategis dapat menjadi modal dalam pertumbuhan ekonominya.

Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan dan 197 Desa dan 39 Kelurahan. Luas wilayah, jumlah desa dan jumlah kelurahan menurut kecamatan ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 2021

No	Kecamatan	Luas		Jumlah	
		Km²	%	Desa	Kelurahan
1	Keritang	918,96	6,79	16	1
2	Kemuning	907,17	6,71	11	1
3	Reteh	529,29	3,91	11	3
4	Sungai Batang	413,35	3,06	7	1
5	Enok	457,76	3,38	10	4
6	Tanah Merah	502,07	3,71	9	1
7	Kuala Indragiri	814,34	6,02	7	1
8	Concong	280,38	2,07	5	1
9	Tembilahan	169,57	1,25	-	8
10	Tembilahan Hulu	148,71	1,10	4	2
11	Tempuling	586,62	4,34	5	4
12	Kempas	576,60	4,26	10	2
13	Batang Tuaka	406,22	3,00	12	1
14	Gaung Anak Serka	671,48	4,96	9	3
15	Gaung	2.093,52	15,48	15	1
16	Mandah	1.747,39	12,92	16	1
17	Kateman	491,90	3,64	8	3
18	Pelangiran	865,16	6,40	15	1
19	Teluk Belengkong	412,92	3,05	13	-
20	Pulau Burung	531,68	3,93	14	-
	Jumlah	**13.525,10**	**100,00**	**197**	**39**

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

b. Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), dan daerah hutan payau (mangrove). Selain itu, wilayahnya juga terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya.Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang. Selat/Terusan Concong. Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata memiliki ketinggian 0 – 3 Meter di atas permukaan laut. Daerah yang landai ini sebagian besar terletak di dekat pantai atau sungai. Sedangkan sebagian kecilnya 6.69 % berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6 - 35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh, Kecamatan Keritang. Daerah ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).

Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kemiringan lereng wilayah Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh kemiringan 0 – 2 % seluas 1.298.763 Ha (94.97 %), kemiringan 3 - 5 % seluas 9.710 Ha (0.71 %), kemiringan 16 - 40% seluas 21.197 Ha (1.55 %) dan kemiringan di atas 40 % seluas 37.744 Ha (2.76 %). Sedangkan khusus kondisi topografi untuk Kawasan Kuala Enok didominasi oleh lahan dengan kemiringan 0 – 8 %.

c. Kondisi Geologi

Wilayah kabupaten Indragiri Hilir merupakan jalur cekungan sebagai akibat adanya peningkatan kegiatan tektonik bumi yang menyebar luas dan berbentuk morfologi pendataran. Morfologi pendataran ini biasanya memiliki bentuk sungai berbelok-belok dan membawa pasokan material sedimen dari hulu ke hilir. Sedimen-sedimen tersebut akhirnya terperangkap bersama media air pada cekungan-cekungan. Tanah pada cekungan tersebut ditumbuhi oleh mangrove (hutan bakau) sebagai sumber daya hayati pada ekosistem rawa dan hutan dataran rendah. Dalam jangka waktu skala geologi, cekungan-cekungan dan sumber daya hayati diatasnya mengalami penurunan untuk mencari keseimbangan akibat adanya gaya-gaya tektonik dan pembenanan. Cekungan-cekungan ini tertutup kembali oleh sedimen yang terus memasoknya dimana kejadian ini berulang terus hingga sekarang.

Sumber daya hayati yang terperangkap dan tertutup sedimen pada masa muda akhirnya membentuk suatu endapan rawa pada tanah gambut. Sementara proses-proses ini terus berlangsung, endapan gambut yang sudah berumur lebih dewasa dapat disebut sebagai batu bara muda. Jadi gambut dapat dianggap sebagai tahapan awal pembentukan batubara. Endapan batubara yang mengalami pembebanan hingga jangka

waktu skala geologi sampai suatu saat berubah menjadi lempung hitam dapat dianggap sebagai sumber minyak bumi yang mengalami pencucian atau *leaching*. Hasil pencucian ini akhirnya terjebak dalam suatu batuan perangkap minyak bumi

Wilayah kabupaten Indragiri Hilir dibentuk oleh sebagian dari dataran alluvium Sumatera Timur yang sangat luas. Dataran alluvium tersebut sebagian berupa rawa yang terbentuk sebagai akibat kenaikan muka air laut pada zaman es. Perubahan ini merupakan awal proses pembentukan gambut di dataran alluvium Sumatera Timur. Ketika zaman es berakhir, air laut kembali surut, tetapi proses pembentukan gambut dan akumulasi sedimen di daerah rawa dan sepanjang pantai wilayah kabupaten Indragiri Hilir tetap berlangsung terus. Batuan yang tersingkap di permukaan kawasan pesisir kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari jenis alluvium, endapan pantai (Qac) dan endapan rawa (Qs) yang keduanya mempunyai umur Kuarter. Tanah dan batuan yang tampak dipermukaan terdiri dari gambut, lumpur, lempung dan pasir. Gambut terletak di atas lumpur dan lempung, serta pasir didapatkan sebagai sisipan pada lumpur dan lempung. Sedangkan kedalaman batuan dasar sangat beragam, dimana ke arah pantai semakin dalam.

Tanah dan batuan di kawasan dataran pantai merupakan alluvium dan endapan pantai (Qac) yang disusun oleh pasir, lanau, lempung, lumpur, kerikil dan kerakal, sisa tumbuhan setempat dan lapisan gambut dengan tebal mencapai 5 meter. Tanah di dataran pantai terdiri dari lumpur berwarna abu-abu (terdapat dalam keadaan cair, sangat lunak, sangat plastik, memiliki rekah kerut tinggi, kadang-kadang mengandung bahan organik kurang dari 10% dan nilai *unconfined strength* kurang dari 0.5 kg/cm^2).

Dalam keadaan kering sifat lumpur sulit dibedakan dengan lempung. Lumpur abu-abu memiliki sifat keteknikan buruk, kurang teguh dan stabil. Batuan dasar, diperkirakan terdapat pada kedalaman

lebih dari 60 meter. Karena batuan dasar, diperkirakan satu-satunya batuan keras di wilayah kabupaten Indragiri Hilir dapat ditafsirkan sebagai lapisan keras yang mampu menahan bangunan berat dan berada pada kedalaman lebih dari 60 meter. Tanah dan batuan di dataran limbah banjir dan rawa tepian sungai merupakan endapan rawa (Qs) yang disusun oleh lempung, lanau, pasir dan gambut. Tanah di kawasan ini terutama terdiri dari lempung abu-abu atau abu - abu dengan bercak kuning. Di beberapa lokasi kadang-kadang di atas lempung ditemukan gambut dengan ketebalan beragam, berkisar antara 50-300 cm.

- **Lempung abu-abu**, terdapat dalam keadaan liat, bersifat plastis, mengotori tangan/*sticky*, dan kadang - kadang mengandung bahan organik kurang dari 10%, rekah kerutnya tinggi, mudah mencair dan memiliki nilai *unconfined strength* kurang dari 2 kg/cm².Selain itu, dalam keadaan kering dapat mencapai 4 kg/cm² dan menjadi bersifat rapuh/*brittle* (Rajiyowiryono, 1986).
- **Pasir**, terdapat sebagai sisipan tipis pada lempung dan lumpur. Komposisi utamanya berupa kuarsa yang belum terikat kuat dan masih bersifat lepas.
- **Batuan dasar**, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 40 meter.
- **Gambut,** bersifat sangat higroskopis, mampu menghisap dan melepas air dengan cepat, butirannya tidak terlalu kuat karena hanya terikat oleh tegangan pori dari air yang mengisi rongga antar butiran. Dalam keadaan kering akan kehilangan tegangan pori hingga mudah lepas, tetapi dalam kondisi kelewat jenuh air, gambut bersifat cair dan daya dukungnya bertambah lemah, sehingga gambut memiliki sifat keteknikan yang buruk. Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (90%) merupakan lahan dengan karakteristik tanah gambut ini.

Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat delapan Kecamatan yang berlokasi di wilayah pesisir atau wilayah kecamatan berada di wilayah pesisir, yang meliputi 50 Desa. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan kateman, Pulau Burung, Mandah, gaung Anak Serka, Kuala Indragiri, Tanah Merah, Sungai Batang dan Reteh. Kecamatan-Kecamatan tersebut sebagian masih belum bisa disentuh melalui jalan darat seperti Pulau Burung, kateman, Kula Indragiri, sementara lima Kecamatan lainnya sudah dapat dihubungi melalui jalan darat (roda 4 atau roda 2).

Kompleknya permasalahan pesisir Kabupaten Indrgiri Hilir menyebabkan pembangunan pesisir daerah ini agak lambat . permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan wilayah pesisir adalah keterbatasan infrastruktur dasar seeprti jalan/jerambah, dermaga, air bersih, PLN dan telekomunikasi. Selain itu yang menjadi permasalahan adalah perambahan/penebangan hutan mangrove, illegal fishing dan minimnya sarana prasarana penangkapan dan pengolahan hasil perikanan.

d. Kondisi Hidrologi

Pada umumnya keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan oleh perbedaan topografi terutama antara perbukitan, dataran maupun perairan. Keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya mempunyai potensi perairan yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik di bidang penangkapan khususnya di perairan lepas pantai dan dibidang budidaya perikanan (tambak, keramba, budidaya kerang Anadara dan kolam).

Disamping sungai-sungai dan selat, di Kabupaten Indragiri Hilir banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia, sehingga Kabupaten Indragiri Hilir disamping

terkenal dengan julukan Negeri Sri Gemilang, juga di kenal sebagai Negeri Seribu Parit. Sumber daya air di wilayah kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi air rawa, air sungai dan parit. Air tanah terdiri dari air tanah bebas/*unconfined ground water* dan air tanah agak tertekan/*semiconfined groundwater*. Penentuan potensi ditentukan berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas sumber daya air terutama ditentukan berdasarkan pengamatan lapangan di samping dari data yang terhimpun dari penelitian terdahulu. Di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) dari pesisir Selatan ke arah Utara, yaitu DAS Reteh Gangsal, DAS Indragiri Tuaka, DAS Gaung Anak Serka, DAS Batangtumu, dan DAS Guntung Kateman.

e. Jenis Tanah

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir (80%) memiliki struktur tanah berupa tanah Organosol (Histosol), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Lapisan tanah gambut mencapai ketebalan lebih dari 100 cm. Tanah ini dominan di daratan rendah diantara aliran sungai. Jenis tanah ini berasal dari akumulasi humus atas permukaan hutan yang melapuk pada permukaan tanah. Di Kabupaten Indragiri Hilir, jenis tanah ini hampir menyebar di semua kecamatan.

Di sepanjang aliran sungai pada umumnya terdapat formasi tanggul alam *Natural River Leves* yang terdiri dari tanah-tanah Aluvial (*Entisol*) dan Gley Humus (*Inceptisol*). Selain itu, juga terdapat jenis tanah Podsolik merah-kuning dan bahan induk batuan endapan dengan fisiografi dataran. Jenis ini hanya terdapat di bagian barat ke arah selatan (Kecamatan Keritang). Di samping itu, sebagian wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan daerah muara sungai. Lapisan atas batuan permukaannya terdiri dari endapan alluvial lunak yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa oleh sungai, sehingga sebagian

besar lapisan permukaan tanah yang dilewati oleh aliran sungai adalah deposit sabuk meander. Secara teknis lapisan permukaan alluvial lunak (lapisan sabuk meander, organik dan gambut) mempunyai sifat kompresitasnya yang tinggi, sehingga menyebabkan mudahnya penurunan lapisan tanah.

Penurunan lapisan tanah diakibatkan oleh adanya aliran air pori menuju ke butir tanah karena pembebanan struktur yang bersifat konstan baik secara vertikal maupun horisontal. Dengan demikian akan diperlukan biaya yang lebih besar terutama dari material dan teknik pembangunan untuk mendapatkan struktur bangunan yang baik di atas tanah tersebut. Berdasarkan Peta Zonasi Kerentanan Tanah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, Zona Kerentanan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah (ZKGTSR) dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah (ZKGTR). ZKGTSR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai. ZKGTR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai.

Daerah Indragiri Hilir bagian Selatan disekitar Kecamatan Keritang terdapat tanah Podsolik merah kuning (Ultisol). Potensi tanah Orgasol ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut atau bahan organiknya. Daerah-daerah yang mempunyai ketebalan gambut lebih dari 1 (satu) meter pada umumnya tidak sesuai untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Kesuburan tanah-tanah gleihumus dan organosol termasuk sedang

sampai tinggi, sehingga tanah-tanah di daerah ini cukup baik untuk pengembangan komoditi pertanian dalam arti luas.

Nilai ekonomis tanah gambut untuk lahan pertanian ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut. Semakin tebal lapisan gambut, maka semakin kurang baik tanah itu untuk pertanian. PH tanah gambut sangat rendah, yaitu antara 3,5 – 6, sehingga bersifat asam. Di daerah Reteh, lapisan mineral di bawah gambut berwarna kelabu. Ditempat-tempat dengan tebal bahan organik 100 - 200 cm, pada umumnya telah ditanami dengan tanaman keras seperti kelapa, karet, kopi, buah-buahan dan tanaman-tanaman tahunan lainnya.

Tanah gambut yang tebal diidentifikasi memiliki bahan organiknya lebih dari 200 cm. Sampai dengan saat ini praktis belum terolah dan kalaupun ada masih sangat terbatas luasnya. Karena masalah yang dihadapi dari tanah gambut, maka diperlukan adanya usaha reklamasi tanah dengan pembuatan drainase, akan tetapi berakibat bahwa akan terjadi aksinasi yang cepat dari bahan organik. Oleh sebab itu, pembuatan parit harus memperhatikan agar pengaturan kedalaman air tanah sampai pada batas yang dikehendaki sehingga tidak mempercepat terjadinya pengerutan tanah. Sebagaimana halnya dengan gleihumus tanah organosol yang peka terhadap peristiwa penurunan atau pengerutan tanah, sehingga juga perlu usaha reklamasi.

f. Daya Dukung Lahan

Secara umum jenis tanah di Kabupaten Indragiri Hilir digolongkan menjadi dua yaitu tanah mineral dan tanah organik. Tanah mineral yaitu tanah yang dihasilkan dari proses pelapukan batuan seperti tanah latosol (merah) dan tanah andosol (hitam). Sedangkan tanah dari hasil pematangan sisa-sisa tanaman akan membentuk tanah organik seperti tanah gambut. Keadaan fisiografi, bentuk wilayah dan sifat-sifat tanah menggambarkan karakteristik yang membedakan satuan lahan. Kualitas

lahan sangatlah dipengaruhi oleh kualitas jenis tanahnya yang juga sangat tergantung pada kondisi geologis, iklim maupun topografinya. Secara umum di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 5 (lima) kelompok satuan lahan fisiografi, yaitu: kelompok marin, kubah gambut, alluvial, dataran dan perbukitan.

1. Kelompok Marin, terletak disepanjang pantai dengan ini merupakan hasil proses sedimentasi dan secara jelas terlihat dengan adanya pelebaran pantai yang terjadi karena penambahan bahan endapan dan proses pengangkatan. Satuan lahan pada kelompok ini dapat dibedakan antara lain beting pasir, dataran pasang surut, rawa belakang pantai, dan endapan delta. Kelompok ini luasnya mencapai 17.09% dari luas lahan di Kabupaten Indragiri Hilir dan umumnya adalah berupa dataran pasang-surut dengan kemiringan lahan yang umumnya kurang dari 3%.
2. Kelompok Kubah Gambut, terbentuk dari endapan organik yang berasal dari endapan permukaan muda dan tua. Secara umum ketebalan gambut akan meningkat semakin jauh dari sungai. Dengan pengendalian tata air yang baik, daerah ini sebenarnya memiliki potensi untuk perkebunan. Namun miskinnya kandungan hara dapat menjadi penghambat utama. Tanah organosol atau tanah gambut ini merupakan jenis tanah yang paling dominan terdapat di kabupaten Indragiri Hilir, mencapai 75.32% dari luas wilayahnya dan umumnya mempunyai ketebalan lebih dari 2 meter.
3. Kelompok Alluvial, terbentuk dari endapan alluvial sungai dan terletak di sepanjang jalur- jalur aliran sungai. Pada umumnya daerah ini cukup potensial untuk lahan persawahan, tentunya dengan memperhatikan jalur hijau yang harus dipertahankan. Kelompok ini merupakan satuan fisiografi yang terkecil di Indragiri Hilir, yaitu hanya sekitar 0.57% dari luas wilayah.

Tabel 2.2.
Luas Satuan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Satuan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)	Keterangan
1	Marin	233.714	17,09	Umumnya kelerengan < 3% dan sebagian kecil < 8%
2	Kubah Gambut	1.030.039	75,32	Didominasi oleh oligotrofik air tawar dengan kedalaman > 2 meter
3	Alluvial	7.795	0,57	Umumnya Kelerengan < 3%
4	Dataran	58.121	4,25	Umumnya Kelerengan < 3% dan terdapat di bagian selatan
5	Perbukitan	37.881	2,77	Umumnya kelerengan 16-25% dan terdapat dibagian selatan
Total		1.367.551	100	

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir

4. Kelompok Dataran, berkembang dari batuan sedimen dan tur intermedier dan mafik. Kelompok ini juga hanya ditemui pada bagian selatan Indragiri Hilir dengan kelerengan umumnya <3%. Luasnya mencapai 4.25% dari luas wilayah.

5. Kelompok Perbukitan, seperti halnya kelompok dataran, kelompok perbukitan berkembang dari batuan sedimen dan tur intermedier dan mafik. Kelompok ini juga hanya ditemui pada bagian selatan Indragiri Hilir dengan kelerengan umumnya 16-25%, terutama yang berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hulu dan provinsi Jambi (TNBT). Luasnya mencapai 2.77% dari luas total wilayah kabupaten Indragiri Hilir.

g. Klimatologi

Klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan sifat iklim. Iklim dalam konteks ini membahas tentang perkembangan curah hujan dan hari hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh

dipermukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dalam satuan tinggi (mm) di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, *run off* dan infiltrasi. Sifat hujan dibagi kedalam tiga kategori yaitu (i) diatas normal, jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap rata-ratanya, (ii) normal, jika nilai curah hujan antara 85 -115% terhadap rata-ratanya dan (iii) dibawah normal, jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap rata-ratanya. Curah hujan normal sekitar 150 mm/bulan dengan kisaran antara 2.000 – 3.000 mm/tahun.

Selama periode 2015 - 2019, rata-rata hari hujan di Kabupaten Indragiri Hilir berkisar antara 93 - 149 hari hujan per tahunnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata hari hujan kabupaten Indragiri Hulu yang berkisar antara 171 – 210 hari hujan per tahun. Rata-rata hari hujan menurun tajam pada tahun 2015 yang hanya sebanyak 93 hari hujan dengan curah hujan yang rendah yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang disertai kabut kabut asap.

Tabel 2.3.
Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan di
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

No.	Bulan	2017		2018		2019		2020		2021	
		Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)
1	Januari	10	137,7	9	123,4	11	171,8	9	124,5	12	209,5
2	Februari	11	169	10	141,8	9	138,2	7	98	4	22,1
3	Maret	14	226,4	14	215,9	10	170	9	134	11	177,6
4	April	12	183,1	13	214,1	12	188,7	12	198,9	13	291,3
5	Mei	10	120,8	11	154	9	142,5	12	234,1	10	164,3
6	Juni	8	98,7	8	91,2	8	88	9	154,2	9	114,8
7	Juli	6	86,8	7	99,1	5	62,1	8	129,5	6	101,2

8	Agustus	9	142,1	7	102,1	6	84,5	9	147,8	12	218,5
9	September	11	183,7	10	169,7	5	79,9	13	229,6	12	211,0
10	Oktober	10	184,8	12	226,6	8	110,9	11	236,5	11	223,1
11	November	13	240,6	13	264,4	11	169,7	13	263,2	12	236,2
12	Desember	13	191,9	13	218,8	12	162,9	11	210,2	14	214,7
Jumlah		127	1965,6	127	2021,1	106	1569,2	123	2160,5	126	2184,3

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id , BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2022

Selama periode 2017 – 2021, rata-rata hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi atau musim penghujan, umumnya mulai terjadi pada bulan Juni hingga bulan September. Sejalan dengan hari hujan, curah hujan di Kabupaten Indragiri Hilir juga dibawah normal dengan kisaran sebesar 1.307 mm/tahun – 2.021 mm/tahun dengan rata-rata sebesar 1.744 mm/tahun, lebih rendah dibanding curah hujan di kabupaten Indragiri Hulu yang rata-ratanya sebesar 2.292 mm/tahun.

h. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi pengembangan pertanian khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki total luas lahan kering dan lahan basah Kabupaten Indragiri terluas di Riau yaitu seluas 1.355.095,84 hektar atau 15,25% dari total luas lahan kering dan lahan basah di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki lahan basah seluas 1.321.623,13 hektar atau 15,18% dari total lahan basah di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki total luas lahan kering seluas 33,457,33 hektar atau 18,63% dari total lahan kering Provinsi Riau.

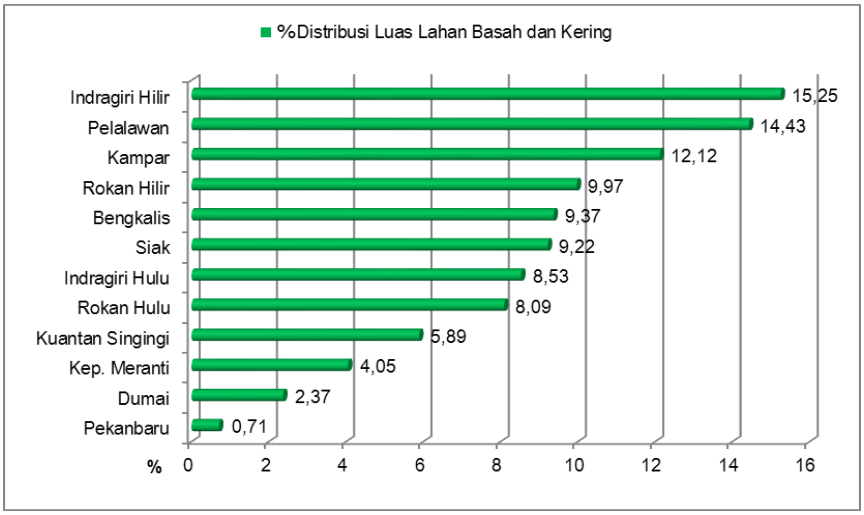

Sumber: BPS Provinsi Riau (Provinsi Riau Dalam Angka, 2017)

Gambar 2.2.
Distribusi Lahan Basah dan Lahan Kering
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Potensi lahan basah dan lahan kering yang sebagian telah dikembangkan menjadi perkebunan kelapa, kelapa sawit dan tanaman pangan. Produksi hasil perkebunan kelapa dan kelapa sawit ini perlu didukung dengan industri hilir sehingga nilai tambah dapat diperoleh oleh daerah. Oleh karena itu, meneruskan untuk mewujudkan kawasan industri Kuala Enok perlu terus dilakukan.

2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana alam yang umumnya terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah bencana banjir dan gelombang pasang surut, longsor tepi sungai, dan kebakaran hutan/lahan. Bencana banjir di kabupaten Indragiri Hilir terjadi karena perubahan musim khususnya musim hujan yang disertai dengan gelombang pasang surut yang juga cukup besar. Bencana tanah longsor umumnya terjadi dikawasan tepi sungai yang merupakan kawasan sempadan sungai yang penggunaan untuk budidaya atau perumahan. Potensi bencana longsor di Kabupaten Indragiri Hilir berada di kawasan sempadan sungai yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Indragiri Hilir. Selama periode 2016 – 2020, bencana tanah longsor terjadi sebanyak 35 kali yang terjadi di sembilan kecamatan yaitu di kecamatan Reteh sebanyak 1 kali, Tanah Merah sebanyak 15

kali, Kuala Indragiri sebanyak 6 kali, Tembilahan sebanyak 2 kali, Tembilahan Hulu sebanyak 5 kali, Tempuling sebanyak 3 kali, Kempas sebanyak 1 kali, Batang Tuaka Sebanyak 1 kali, Gaung sebanyak 1 kali.

Bencana gelombang pasang surut terjadi sebanyak 2 kali didua kecamatan yaitu kecamatan Concong dan Kateman. Bencana puting beliung terjadi sebanyak 19 kali yaitu di kecamatan Reteh, Tanah Merah, Kuala Indragiri, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Kateman, dan Mandah yang masing-masingnya sebanyak 2 kali dan Concong, Batang Tuaka, Gaung dan Planggiran yang masingnya-masingnya terjadi sekali. Bencana banjir terjadi tujuh yaitu di kecamatan Tempuling sebanyak 3 kali dan kecamatan Tembilahan sebanyak 4 kali. Meski Kabupaten Indragiri Hilir bukan daerah dengan potensi bencana yang besar namun antisipasi terhadap kejadian bencana longsor, gelombang pasang surut, angin puting beliung dan bencana banjir perlu terus dilakukan.

Tabel 2.4.
Banyaknya Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2021

No	Kecamatan	Tanah Longsor	Banjir	Gelombang Pasang Surut	Angin Puting Beliung	Kebakaran Hutan dan Lahan
1	Keritang	2	12	-	1	31
2	Kemuning	-	11	-	-	5
3	Reteh	1	1	-	4	2
4	Sungai Batang	-	2	-	2	4
5	Enok	2	4	-	1	7
6	Tanah Merah	20	-	-	4	1
7	Kuala Indragiri	6	-	-	2	1
8	Concong	2	2	2	1	2
9	Tembilahan	2	6	-	4	10
10	Tembilahan Hulu	5	-	-	2	5
11	Tempuling	3	3	-	-	37
12	Kempas	2	1	-	-	26
13	Batang Tuaka	1	9	-	1	17
14	Gaung Anak Serka	-	1	-	-	5
15	Gaung	1	5	-	1	19
16	Mandah	-	-	-	3	17
17	Kateman	-	1	2	3	8
18	Pelangiran	-	2	-	1	6
19	Teluk Belengkong	-	-	-	-	5
20	Pulau Burung	-	5	-	-	12
	Kab. Indragiri Hilir	**47**	**65**	**4**	**30**	**220**

Sumber : BPBD Kabupaten Indragiri Hilir (2022), Indragiri Hilir dalam Angka, 2022

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang banyak terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2016 – 2021. Kebakaran hutan dan lahan yang ditunjukkan dari jumlah titik api di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat. Kondisi ini perlu perhatian serius untuk diantisipasi karena saat ini dan kedepan, pembukaan lahan gambut pasang surut di Kabupaten Indragiri Hilir akan terus terjadi. Menurut data BPBD Indragiri Hilir tahun 2022, selama periode 2016 – 2021, Kecamatan Tempuling, Keritang dan Kempas adalah 3 kecamatan dengan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan terbanyak. Bencana tanah longsor merupakan bencana kedua yang sering terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir setelah kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, Kecamatan Tanah Merah adalah daerah yang paling sering mengalami bencana tersebut.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari rawa serta sebagian gambut dan berada di pinggiran sungai, termasuk daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti, tanah longsor/ abrasi, kebakaran hutan dan lahan, Angin Putting Beliung, Gelombang Pasang dan Banjir. Daerah rawan Longsor berada pada sepanjang bantaran sungai Indragiri antara lain Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, dan Kecamatan Kateman. Daerah rawan kebakaran Lahan adan Hutan berada pada daerah Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, Keritang, Kemuning,Kempas, Tempuling, Gaung, Enok, Kateman, Gaung Anak Serka, Pelangiran, Concong, Reteh, dan Tanah Merah.

Bencana non alam yang rawan terjadi adalah epidemis dan wabah penyakit berupa Covid-19 Selain itu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dengan heterogenitas suku, agama dan sosial budaya juga sangat

rentan terhadap bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas. Pada pelaksanaan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam SK Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 341/III/HK-2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kabupaten Indragiri Hilir kepala Pelaksana Badan Penangglangan Bencana Daerah bertugas menjadi Sekretaris Umum Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang bertugas menyusun regulasi – regulasi pendukung dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran Civod-19 seperti, SK Bupati, Instruksi Bupati, Keputusan Ketuah Gusus Tugas, Surat Edaran dan Lain-lain.

Tabel 2.5.
Bencana Alam Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2021

Tahun	Jenis Bencana				
	Longsor / Abrasi	Puting Beliung	Banjir	Gelombang Pasang	Karlahut
2018	10	4	-	-	32
2019	4	2	3	-	67
2020	10	6	3	1	51
2021	8	12	20	3	49
Jumlah	**37**	**24**	**29**	**5**	**213**

Dari tabel rekap kejadian bencana yang sering terjadi Kabupaten Indragiri Hilir terdapat kawasan – kawasan yang memiliki tingkat kerentanan terjadi nya bencana, seperti bencana banjir dan gelombang pasang surut, longsor tepi sungai, dan kebakaran hutan/lahan, namun selama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum dapat memetakan kawasan tersebut di setiap kecamatan di Kab. Indragiri Hilir dan hanya 4 kecamatan terdapat Peta daerah rawan bencana dari 20 kecamatan di Kab. Inhil kecamatan Tembilahan, Kecamatan Kateman,

Kecamatan Tempuling, dan Kecamatan Tanah Merah.

Dari permasalahan di atas untuk Tahun Anggaran 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah merencanakan pembuatan Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) untuk menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan Penanggulangan bencana yang sering terjadi di Kabupaten indragiri Hilir sehingga lebih tepat sasaran dan terencana sesuai dengan SOP penanggulangan bencana.

Tabel 2.6.
Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023 terkait Kebencanaan di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Keterangan
I	Program Penanggulangan Bencana		
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota		
	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	649.999.850	Pembuatan Dokumen Kajian Resiko Bencana Di Kab. Inhil Pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana Di Kab. Inhil
2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	361.250.000	Melaksanakan Penyululuhan Kawasan Bencana 10 Kecamatan Di Kab. Inhil
	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.361.768.000	Pembelian 10 Unit Mesin Mini Striker Penanggulangan Kebakaran Lahan Dan Hutan Pembelian 97 Roll Selang Pemadam Penanggulangan Kebakaran Lahan Dan Hutan Pembelian Mesin Speed Boat 2 Unit Pembelian Perahu Karet 1 Unit
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	346.762.050	Kegiatan Pemulihan Kondisi Psikologis Korban Bencana
	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	258.250.000	Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana Di 10 Kecamatam
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	706.290.050	Pembuatan DED Di 3 Lokasi Rawan Bencana
	Pengembangan Kapasitas Tim	25.000.000	Peningkatan Kapasitas TRC

	Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Dengan Pelaksanaan Kesemaptaan
3	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana		
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2.004.287.350	Kegiatan Honorarium TRC BPBD Kab. Inhil 45 Orang Pelaksanaan Operasional Penanggulangan Bencana
	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	602.034.000	Pengadaan Logistik Korban Bencana 300 Paket

2.1.1.3. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 654.909 jiwa yang terdiri atas 339.599 jiwa penduduk laki-laki dan 315.310 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107,7. Meningkat pada tahun 2021 menjadi 658.025 jiwa yang terdiri atas 315.310 jiwa penduduk laki-laki dan 317.111 jiwa penduduk perempuan atau naik 0,36% dari tahun 2020.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 mencapai 48,65 jiwa/Km^2. Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tembilahan sebesar 463,55 jiwa/ Km^2 dan kepadatan terendah di Kecamatan Kuala Indragiri sebesar 18,05 jiwa/ Km^2.

Kondisi lebih rendahnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir karena Kabupaten Indragiri Hilir "belum" menjadi 'sasaran' migrasi penduduk luar Provinsi Riau. Dimasa yang akan datang dengan semakin berkembangnya perekonomian dan khususnya industri kelapa sawit dan kelapa, akan menarik migrasi penduduk ke Indragiri Hilir.

Tabel 2.7.
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Keritang	66.823	67.616	61.203	63.103	63.567
2	Kemuning	33.643	34.388	35.893	38.499	38.782
3	Reteh	45.601	46.077	34.970	35.974	36.006
4	Sungai Batang	12.763	12.892	10.098	10.066	10.080
5	Enok	35.664	36.470	33.999	33.846	33.959
6	Tanah Merah	32.147	32.470	24.916	25.236	25.268
7	Kuala Indragiri	20.226	20.435	14.345	14.679	14.697
8	Concong	13.988	14.156	11.660	11.764	11.780
9	Tembilahan	76.122	77.135	75.864	77.862	78.605
10	Tembilahan Hulu	46.921	47.585	45.781	46.662	47.108
11	Tempuling	32.187	32.569	31.848	31.633	31.866
12	Kempas	35.725	36.194	37.574	38.671	38.955
13	Batang Tuaka	28.787	29.139	26.727	27.190	27.289
14	Gaung Anak Serka	22.977	23.221	22.476	22.591	22.744
15	Gaung	41.886	42.367	36.930	38.367	38.407
16	Mandah	41.127	41.520	33.416	34.531	34.578
17	Kateman	48.051	48.711	37.007	39.284	39.320
18	Pelangiran	46.777	47.604	28.718	35.318	35.354
19	Teluk Belengkong	17.735	17.604	8.579	9.229	9.237
20	Pulau Burung	23.084	17.987	17.837	20.404	20.423
	Kab. Indragiri Hilir	722.234	731.396	740.598	654.909	658.025

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id, Kab. Indragiri Hilir dalam angka 2022

Selama periode 2017 – 2019, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir meningkat yaitu dari 713.034 orang menjadi 740.598 orang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,95% per tahun. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir ini lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau pada periode yang sama yang masing-masingnya 1,41% per tahun, 3,74% per tahun dan 1,76% per tahun.
Namun, pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan menjadi 654.909 orang atau menurun 11,60% dari tahun 2019. Dan Kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 658.025 orang atau naik 0,36% dari tahun 2020.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut tingkat kepadatannya selama periode 2017 – 2021 berkisar antara 48 – 64 jiwa/Km^2 dan masih tergolong rendah. Pada tahun 2021, penduduk terpadat menurut kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat di kecamatan Tembilahan yang merupakan Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 463 jiwa/Km^2 diikuti oleh Kecamatan Tembilahan Hulu sebanyak 316 jiwa/Km^2, Kecamatan Kateman dengan 79 jiwa/Km^2 dan Kecamatan Keritang 69 jiwa/Km^2. Sedangkan untuk kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kuala Indragiri dan Kecamatan Gaung dengan 18 jiwa/Km^2. Tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan ini berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi dan keterbukaan wilayah.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut kelompok umur data tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 69,40% terkategori umur produktif dan 30,60% terkategori tidak produktif. Hal yang mendapat perhatian adalah bahwa Kabupaten Indragiri Hilir sudah mulai mendapat '*baby boom*' yang ditunjukkan dari porsi penduduk usia muda (0 - 14 tahun) yang saat ini sedang sekolah yaitu sebesar 25,90%. Oleh karena itu, penguatan program keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan

pembukaan kesempatan bekerja dan berusaha harus lebih mendapat perhatian lebih dalam pembangunan ke depan.

Tabel 2.8.
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No.	Kelompok Umur	Penduduk		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	28. 216	26.739	54 .955
2	5 - 9	29.143	27.883	57.026
3	10 - 14	29.916	28.531	58.447
4	15 - 19	29.001	27.379	56.380
5	20 - 24	30.299	28.395	58.694
6	25 - 29	28.671	26.350	55.021
7	30 - 34	28.041	26.044	54.085
8	35 - 39	26.268	24.994	51.262
9	40 - 44	25.547	24.322	49.869
10	45 – 49	22.942	21.387	44.329
11	50 - 54	18.962	17.574	36.536
12	55 - 59	14.971	13.503	28.474
13	60 - 64	11.681	10.371	22.052
14	65 - 69	8.931	7.248	16.179
15	70 - 74	5.013	3.903	8.916
16	75+	3.212	2.488	5.800
Indragiri Hilir		**340.914**	**317.111**	**658.025**

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id, Kab. Indragiri Hilir dalam angka 2022.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 3 fokus yaitu (i) fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (ii) fokus kesejahteraan sosial dan (iii) fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita harga konstan

tahun 2010, indeks ketimpangan Williamson, jumlah penduduk miskin dan kemiskinan.

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Selama periode 2017-2021, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Idragiri Hilir atas dasar harga konstan dengan trend meningkat. Pertumbuhan PDRB ini memiliki tren berfluktuatif meningkat pada tahun 2021. Peningkatan pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir ini dapat dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2020 yang erat kaitannya dengan kelembaban ekonomi dunia, diperparah oleh wabah covid-19 pada tahun 2020 sehingga aktifitas ekonomi masyarakat menjadi terhambat dan menurun pada tahun tersebut dan kembali meningkat pada tahun 2021 ini.

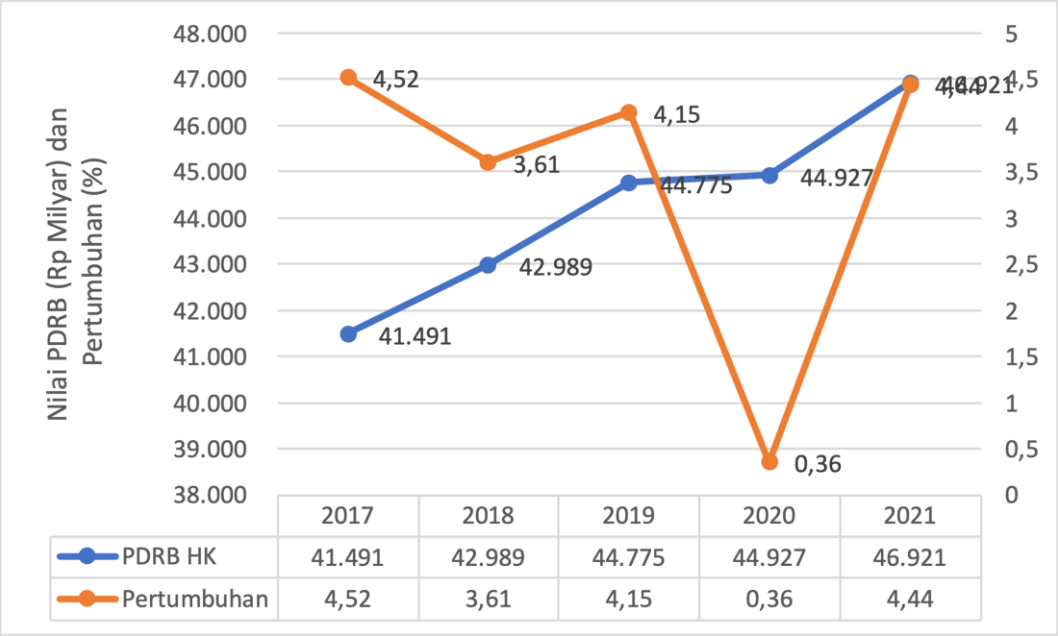

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.3.
Perkembangan Nilai Pertumbuhan PDRB Harga Konstan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir lebih baik dibanding Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau. Pada tahun 2020, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau mengalami penurunan pertumbuhan

ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Hanya Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan yang mengalami pertumbuhan positif yaitu 0,34% dan 2,24%. Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau mengalami pertumbuhan ekonomi minus 0,12% dan minus 1,13%. Kabupaten Indragiri Hilir masih ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi 46,78% terhadap PDRB. Sedangkan Kabupaten Pelalawan ditopang oleh kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masing – masing sebesar 48,65% dan 40,62%. Pada Tahun 2021 Pertumbuhan Ekonomi Indragiri Hilir kembali meningkat menjadi 4,44%, nilai ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau dan Kabupeten Pelalawan, yaitu sebesar 3,36% dan 4,07%.

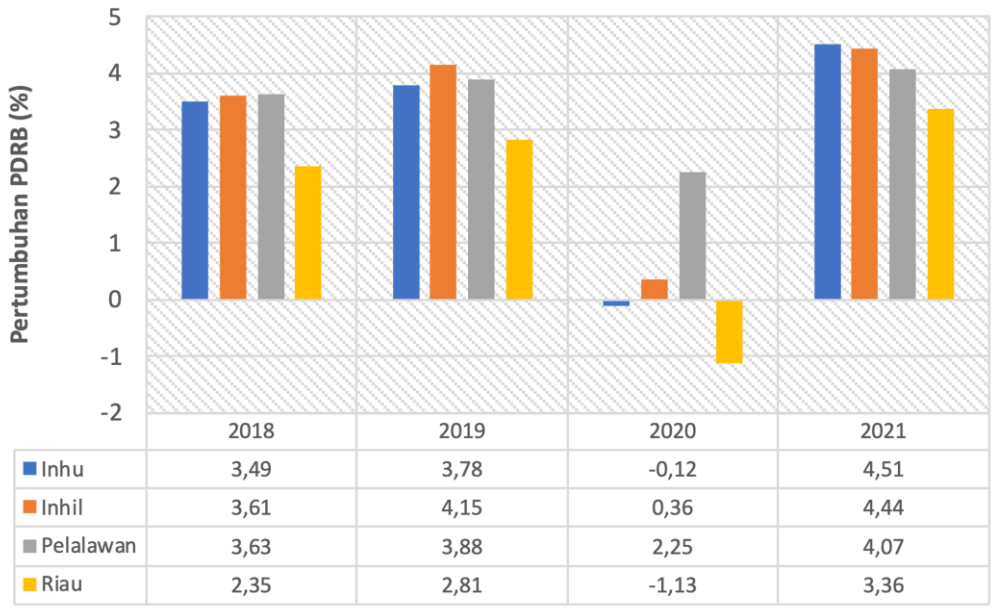

	2018	2019	2020	2021
Inhu	3,49	3,78	-0,12	4,51
Inhil	3,61	4,15	0,36	4,44
Pelalawan	3,63	3,88	2,25	4,07
Riau	2,35	2,81	-1,13	3,36

Sumber: Kabupaten Indragiri Hilir dan Riau Dalam Angka 2022

Gambar 2.4.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2021

Selama periode 2017 – 2021, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Indragiri Hilir terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan kontruksi. Lapangan usaha pertanian memberikan kontribusi terbesar

pada dengan tren kontribusinya semakin menurun yaitu dari 48,03% pada tahun 2017 menjadi 44,68% pada tahun 2019, kemudian kembali mengalami peningkatan sebesar 47,54% pada 2021. Meski kontribusi lapangan usaha pertanian cenderung menurun pada tahun 2019 namun kontribusi pertanian yang besar telah menyakinkan semua pihak bahwa Pertanian adalah sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga kembali meningkat di tahun 2021.

Penurunan kontribusi lapangan usaha pertanian yang seharusnya diimbangi dengan meningkatnya tren kontribusi industri pengolahan. Namun kenyataannya kontribusi industri pengolahan berfluktuatif menurun yaitu dari 23,65% pada tahun 2017 menurun menjadi 23,63% pada tahun 2019. Kondisi ini menggambarkan telah mulai terjadi kemunduran dalam transformasi ekonomi di kabupaten Indragiri Hilir dari pertanian ke industri. Namun Pada tahun 2021 Industri pengolahan kembali meningkat menjadi 24,65%.

Tabel 2.9.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021

LAPANGAN USAHA/INDUSTRI		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48,03	44,74	44,68	46,78	47,54
B	Pertambangan dan Penggalian	0,83	1,27	0,96	0,79	1,03
C	Industri Pengolahan	23,65	24,13	24,07	24,07	24,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	5,58	6,12	6,28	5,88	5,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,50	16,92	17,55	16,11	14,99
H	Transportasi dan Pergudangan	1,08	1,14	1,15	0,93	0,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,44	0,48	0,47	0,38	0,39

J	Informasi dan Komunikasi	0,56	0,56	0,61	0,64	0,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,55	0,60	0,59	0,58	0,56
L	Real Estat	0,80	0,86	0,88	0,86	0,79
M,N	Jasa Perusahaan	-	-	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib	1,74	1,78	1,76	1,66	1,53
P	Jasa Pendidikan	0,56	0,61	0,63	0,62	0,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,15	0,16	0,18	0,18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,46	0,52	0,54	0,42	0,39
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022

Selama periode 2017 – 2021, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan kontruksi yang merupakan lapangan usaha terbesar ketiga dan keempat pembentuk Produk Domestik Regional Bruto Indragiri Hilir. Relatif terbatasnya sumber - sumber lapangan usaha yang hanya mengandalkan pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan kontruksi maka dipandang perlu upaya - upaya menggerakkan lapangan usaha potensial yang belum tersentuh dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar dalam pembentukan PBRB Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.10.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

LAPANGAN USAHA/INDUSTRI		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,64	2,04	4,00	3,49	4,01
B	Pertambangan dan Penggalian	43,54	47,89	0,45	-7,76	5,32
C	Industri Pengolahan	3,73	3,22	4,27	1,89	4,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,33	6,40	0,28	6,98	4,83
E	Pengadaan Air, Pengolaan Sampah, Limbah dan Daur	15,71	-1,90	1,62	0,40	4,83

	Ulang					
F	Konstruksi	6,66	4,04	4,87	-3,22	6,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,12	6,90	4,87	-8,30	4,57
H	Transportasi dan Pergudangan	3,88	2,16	2,23	-18,42	5,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,79	4,51	2,54	-17,99	14,23
J	Informasi dan Komunikasi	6,57	5,42	6,81	8,18	7,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,87	3,88	0,17	1,63	4,68
L	Real Estat	5,84	4,31	6,03	0,95	3,01
M,N	Jasa Perusahaan	8,03	9,10	2,67	-20,83	1,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib	1,60	0,72	1,18	-3,29	3,01
P	Jasa Pendidikan	3,46	5,87	4,64	1,56	3,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,92	6,30	9,96	12,36	11,38
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,13	8,61	6,06	-20,66	4,20
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**4,52**	**3,61**	**4,15**	**0,34**	**4,44**

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Lapangan usaha yang perlu mendapat perhatian untuk didorong agar dapat memberikan kontribusi yang besar pada Produk Domestik Regional Bruto dapat dilihat dari pertumbuhannya yang tinggi dari rata-rata pertumbuhan lapangan usaha lainnya. Pada tahun 2020, dimana pandemi COVID-19 melanda, lapangan usaha jasa perusahaan dan jasa lainnya mengalami kontraksi cukup dalam yaitu 20,83% dan 20,66%. Lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 12,36%. Lapangan usaha informasi dan komunikasi juga mengalami peningkatan cukup tinggi seiring dengan pembatasan interaksi yang diberlakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat bekerja dari rumah (WFH) dan sekolah juga dilakukan secara daring. Lapangan usaha ini adalah

sektor perlu mendapat perhatian, namun demikian, sektor pertanian dan industri pengolahan tetap menjadi prioritas utama.

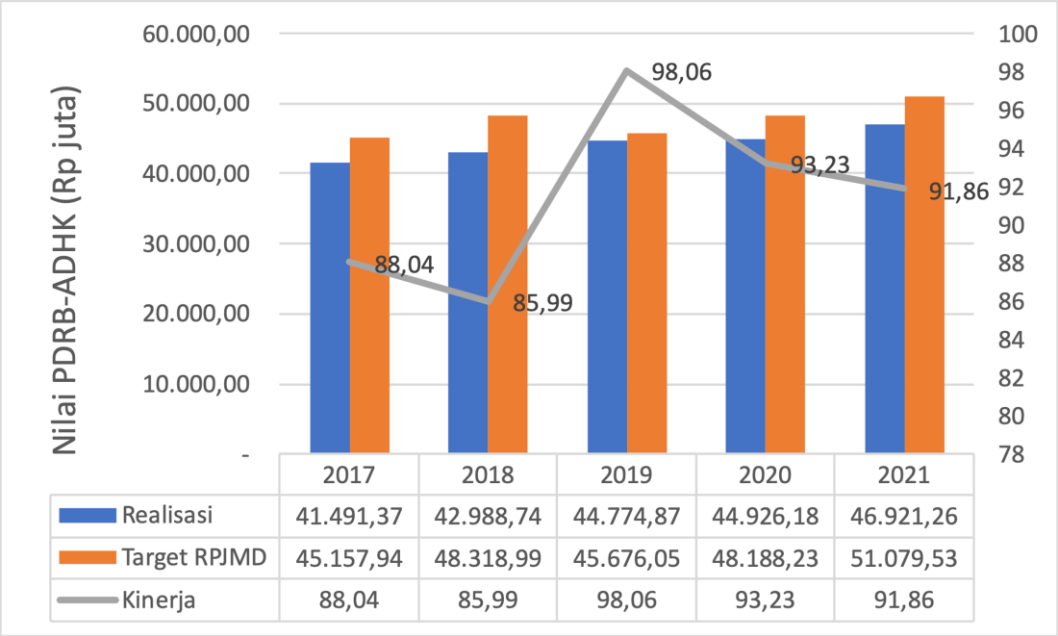

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	41.491,37	42.988,74	44.774,87	44.926,18	46.921,26
Target RPJMD	45.157,94	48.318,99	45.676,05	48.188,23	51.079,53
Kinerja	88,04	85,99	98,06	93,23	91,86

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.5.
Kinerja Indikator Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 - 2021

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun telah ditargetkan bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2017 sebesar Rp 45.157,94 (juta), meningkat menjadi Rp 48.318,99 (juta) pada tahun 2018. Kemudian target RPJMD untuk tahun 2019 dan 2020 disesuaikan menjadi Rp 45.676,05 (juta) dan Rp 48.188,23 (juta), sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023. Realisasi nilai PDRB tahun 2017 sebesar Rp 41.491,37 (juta) dan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,44% maka nilai PDRB 2021 Rp 46.921,26 (juta). Realisasi kinerja selama periode 2017 – 2021 berkisar antara 88,04% - 98,06% yang terkategori dari Tinggi - Sangat Tinggi. Selama periode 2017 – 2018, rata-rata kinerja indikator nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 91,44% yang terkategori Sangat Baik.

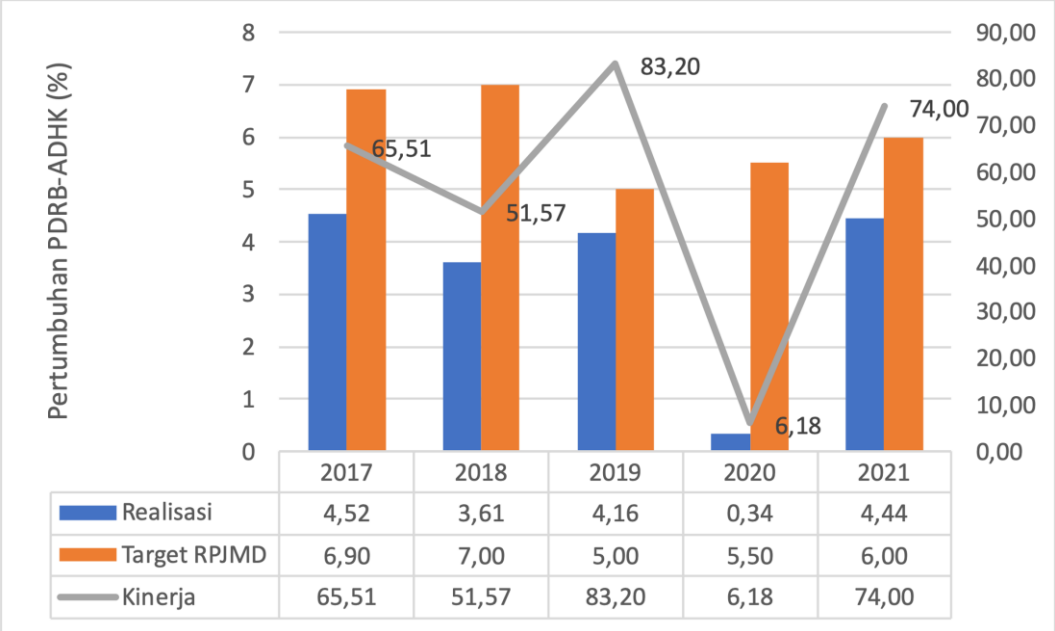

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	4,52	3,61	4,16	0,34	4,44
Target RPJMD	6,90	7,00	5,00	5,50	6,00
Kinerja	65,51	51,57	83,20	6,18	74,00

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.6.
Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 - 2021

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2017 – 2018, pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan ditarget berkisar antara 6,70% hingga 7,00%. Pada tahun 2019-, realisasi pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Indragiri Hilir terus mengalami penurunan dari 4,16% menjadi 0,34% Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir mulai pulih Kembali di tahun 2021 sebesar 4,44%,sehingga realisasi kinerja nya juga meningkat sebesar 74,00% yang terkategori tinggi. Penyebab rendahnya realisasi pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat dari pandemi COVID-19 menjadi 0,34% dengan realisasi kinerja hanya 6,18%.

2.1.2.1.2. Inflasi

Selama periode 2017 – 2021, inflasi di Tembilahan – Indragiri Hlir berada terkategori inflasi ringan, kecuali tahun 2017 yang terkategori inflasi sedang. Bila dibandingkan daerah lain, secara umum inflasi di Tembilahan relatif lebih rendah. Pada tahun 2021, Kota Tembilahan

mengalami Inflasi sebesar 1,10% lebih rendah dari tahun sebelumnya tahun 2020 sebesar 3,24%. Penurunan tekanan Inflasi bersumber dari deflasi pada kelompok makanan minuman dan tembakau, dan kelompok penyediaan makanan dari minuman/restoran, hal ini terlihat nilai inflasi kota tembilahan lebih rendah dibandingakan Kota Pekanbaru. Pada riwulan ke IV tahun 2021 Kota Pekanbaru mengalami inflasi sebesar 1,56%, dimana tekanan inflasi Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh kelompok Kesehatan, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok rekreasi olahraga dan budaya, dan kelompok Pendidikan. Inflasi Kota Tembilahan dan Pekanbaru lebih rendah dibandingkan dengan Kota Dumai, dimana kota Dumai mengalami Inflasi 1,66% pada triwulas IV tahun 2021, dimana sumber penurunan tekanan inflasi kota dumai bersumber dari kelompok makanan minuman dan tembakau, dan kelompok Pendidikan. Untuk Provinsi Riau sendiri menagalami Inflasi pada triwulan ke IV tahun 2021 sebesar 1,54%.

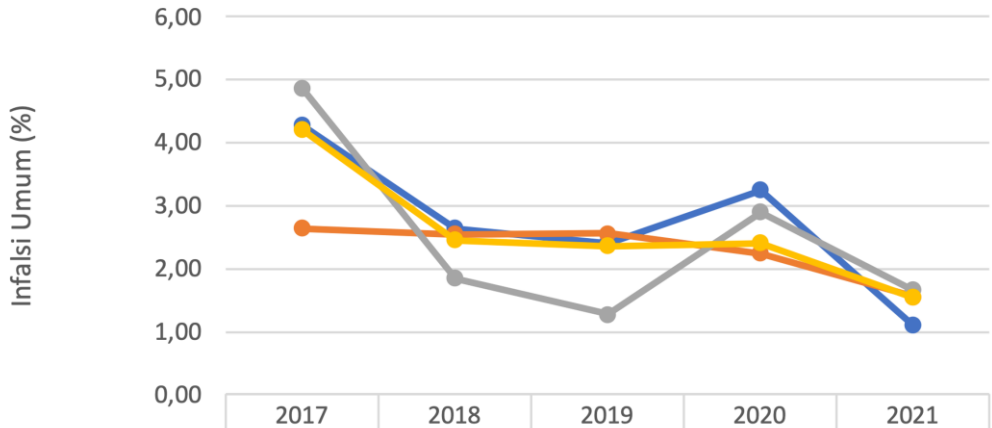

	2017	2018	2019	2020	2021
Tembilahan	4,27	2,64	2,40	3,24	1,10
Pekanbaru	2,64	2,54	2,56	2,24	1,56
Dumai	4,85	1,85	1,28	2,89	1,66
Riau	4,20	2,45	2,36	2,40	1,54

Sumber: BPS Prov. Riau (Provinsi Riau Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.7.
Perkembangan Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Pekanbaru, Dumai dan Riau Tahun 2017 – 2021

Pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2018 telah ditargetkan inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 7,0% serta untuk tahun 2020 dan 2021 sebesar 3,70% dan 3,60% yang masih terkategori inflasi ringan. Selama periode 2017 – 2020, Realisasi inflasi di Indragiri Hilir berkisar antara 2,40% - 4,27%, dan pada tahun 2021 menjadi 1,09 hal ini mengalamai peningkatan dimana selama periode 2017 – 2021, realisasi kinerja umumnya terkategori sangat tinggi.

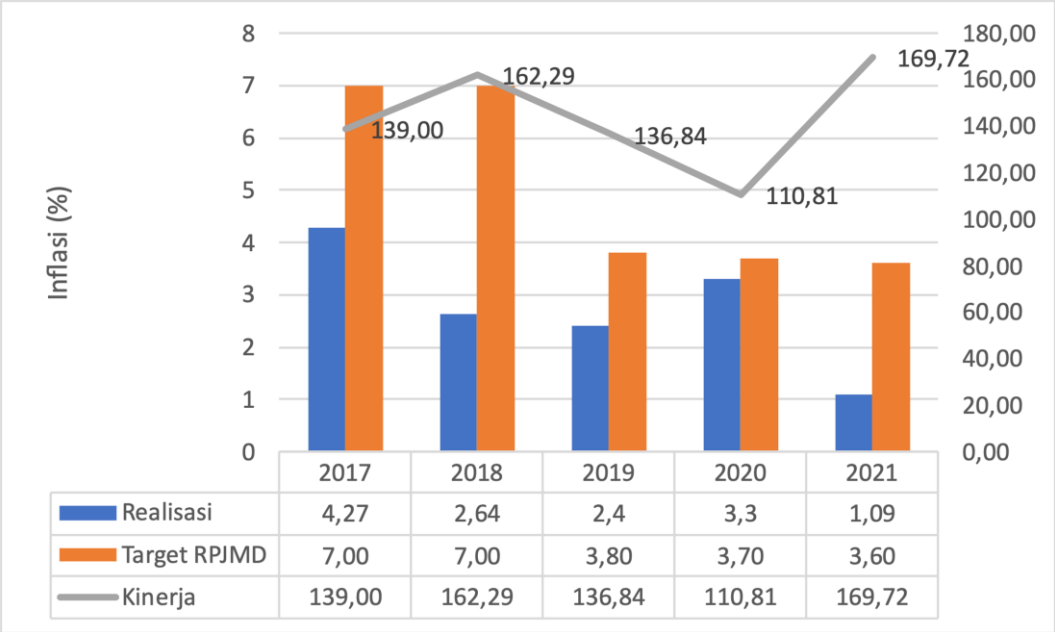

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	4,27	2,64	2,4	3,3	1,09
Target RPJMD	7,00	7,00	3,80	3,70	3,60
Kinerja	139,00	162,29	136,84	110,81	169,72

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.8.
Kinerja Indikator Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

2.1.2.1.3. PDRB Per kapita

Selama periode 2017 – 2021, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren yang terus meningkat. Pada tahun 2019, PDRB per kapita sebesar Rp 62,39 juta per kapita/tahun meningkat menjadi Rp 71,31 juta per kapita/tahun pada tahun 2021. PDRB per kapita kabupaten Indragiri Hilir ini relatif lebih rendah dibanding PDRB per kapita Kabupaten Pelalawan yaitu 71,31 Juta Perkapita/tahun pada tahun 2019 dan 99,93 Juta Perkapita/tahun. PDRB Kabupaten Indragir hilir juga lebih tingi dari

Kabupaten Indragiri Hulu yang nilainya 67,58 juta perkapita/tahun pada tahun 2021.

	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB Inhil	55,75	57,64	62,38	68,58	71,31
PDRB Inhu	64,01	65,31	67,61	66,02	67,58
PDRB Pelalawan	73,43	72,73	71,31	89,31	90,37

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Dalam Angka, 2017-2021)

Gambar 2.9.
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Pelalawan Tahun 2017- 2021

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditargetkan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2017 sebesar Rp 58,14 juta/kap/tahun, meningkat menjadi Rp 61,10 juta/kap/tahun pada tahun 2019. Kemudian untuk tahun 2020 disesuaikan menjadi 60,73 juta/kap/tahun dan sebesar 63,34 juta/kap/tahun pada tahun 2021 sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023. Realisasi PDRB per kapita tahun 2019 - 2021 berkisar antara Rp 62,38 juta/kap/tahun – Rp 71,31 juta/kap/tahun. Selama periode 2017 – 2021, realisasi kinerja PDRB per kapita terkategori sangat tinggi.

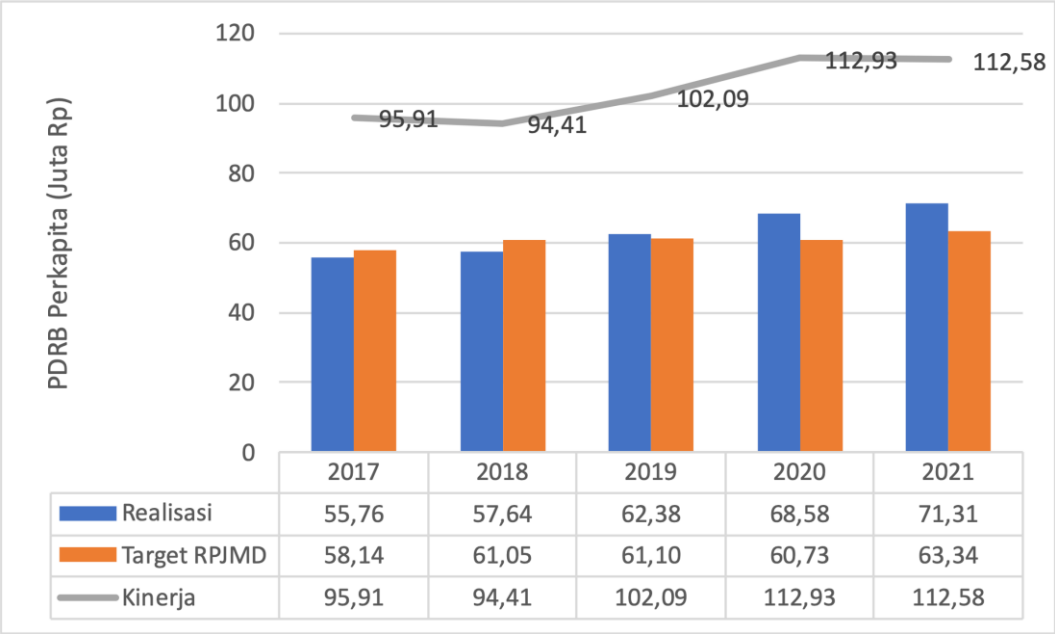

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	55,76	57,64	62,38	68,58	71,31
Target RPJMD	58,14	61,05	61,10	60,73	63,34
Kinerja	95,91	94,41	102,09	112,93	112,58

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Dalam Angka, 2017-2021)

Gambar 2.10.
Kinerja Indikator PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017 - 2021

2.1.2.1.4. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 – 2020 memiliki tren menurun. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir sebanyak 55,4 ribu jiwa, menurun menjadi 44,29 ribu jiwa tahun 2020, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 44,61 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 27,35 ribu jiwa, namun masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Pelalawan yang 49,30 ribu jiwa, dan dapat dilihat pada tabel berikut :

	2017	2018	2019	2020	2021
Inhu	29,42	27,22	26,66	26,66	27,35
Inhil	55,4	51,42	48,29	44,29	44,61
Pelalawan	44,4	44,29	45,98	45,88	49,3

Sumber: Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022

Gambar 2.11.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2017 – 2021

Pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 – 2021 telah ditargetkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir menurun dari 45,84 ribu jiwa pada tahun 2017 menjadi 44,08 ribu jiwa pada tahun 2018, dan disesuaikan dengan target pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 target untuk tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 53,36 dan 53,03 ribu jiwa. Selama periode 2017 – 2021, realisasi jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir menurun. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir berjumlah 55,4 ribu jiwa dengan capaian kinerja sebesar 79,14%, dan menurun pada tahun 2021 menjadi 44,61 ribu jiwa dengan capaian kinerja meningkat menjadi 115,88%.

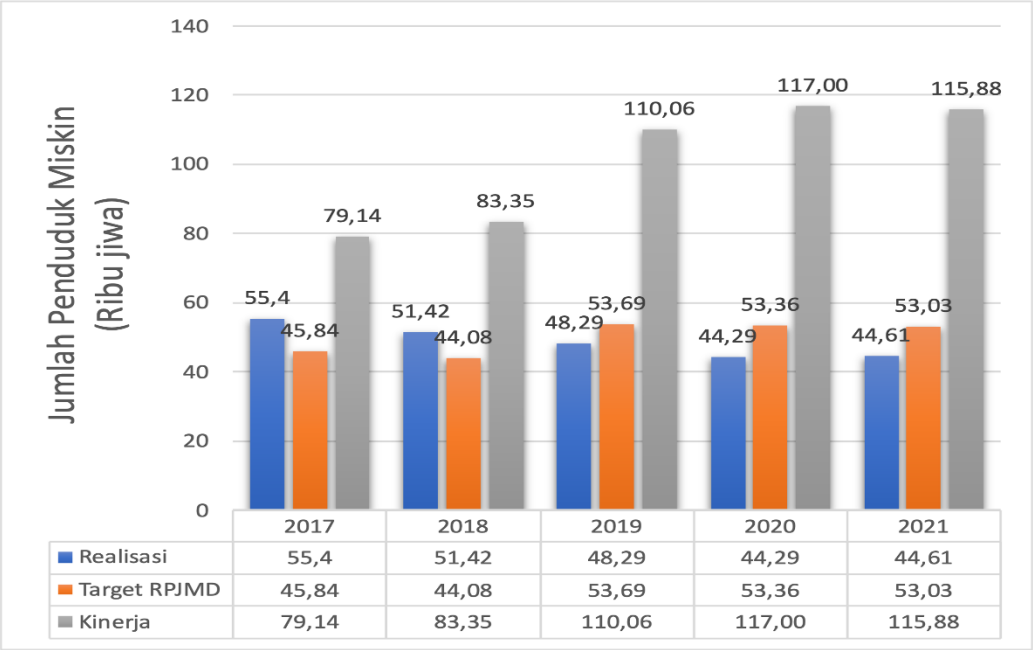

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.12.
Kinerja Indikator Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hilir dan persentase kemiskinan memiliki tren berfluktuatif menurun. Selama periode 2017 – 2021, persentase kemiskinan atau tingkat kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir menurun dari 7,7% pada tahun 2017, turun menjadi 6,18% pada tahun 2021. atau rata-rata pertumbuhan penurunannya sebesar -7,74% per tahun. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin Indragiri Hilir ini lebih rendah dibanding capaian Kabupaten Pelalawan sebesar 9,63% dan sama dengan Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 6,18%, dan persentase penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hilir lebih rendah dibanding Provinsi Riau yaitu 7,12%.

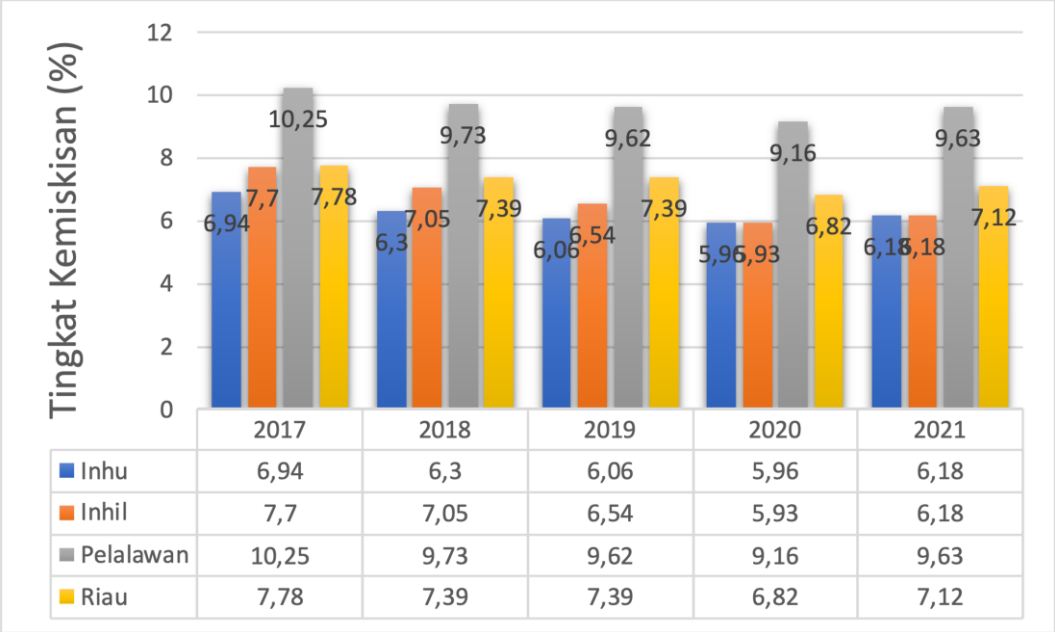

	2017	2018	2019	2020	2021
Inhu	6,94	6,3	6,06	5,96	6,18
Inhil	7,7	7,05	6,54	5,93	6,18
Pelalawan	10,25	9,73	9,62	9,16	9,63
Riau	7,78	7,39	7,39	6,82	7,12

Sumber: BPS Provinsi Riau (Provinsi Riau Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.13.
Perkembangan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2017– 2021

Sejalan dengan perkembangan realisasi jumlah penduduk miskin, Target persentase kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2020 adalah 7,50% dan 7,40%. Realisasi persentase kemiskinan tahun 2020 sebesar 5,93% dengan realisasi kinerja sebesar 119,86%. Pada tahun 2021, realisasi persentase kemiskinan menurun dibanding tahun 2020 yaitu sebesar 6,18% dengan realisasi kinerja 115,34%, dan terkategori tinggi – sangat tinggi.

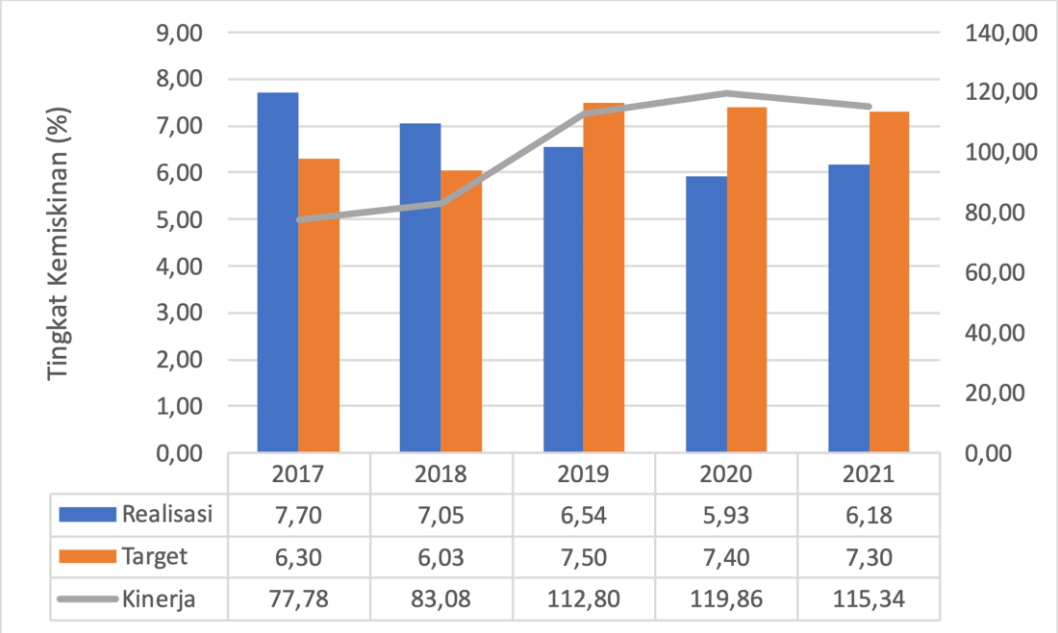

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	7,70	7,05	6,54	5,93	6,18
Target	6,30	6,03	7,50	7,40	7,30
Kinerja	77,78	83,08	112,80	119,86	115,34

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.14.
Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

a. Indeks kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode 2017-2021, indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan, dari 1.17 pada tahun 2017 menjadi 0.40 tahun 2021. Kondisi ini lebih baik jika dibanding Indragiri Hulu 1.14 tahun 2017 dan 0.81 tahun 2021 dan hampir sama dengan Kabupaten Pelalawan 1.52

tahun 2017 menjadi 1.41 tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.15

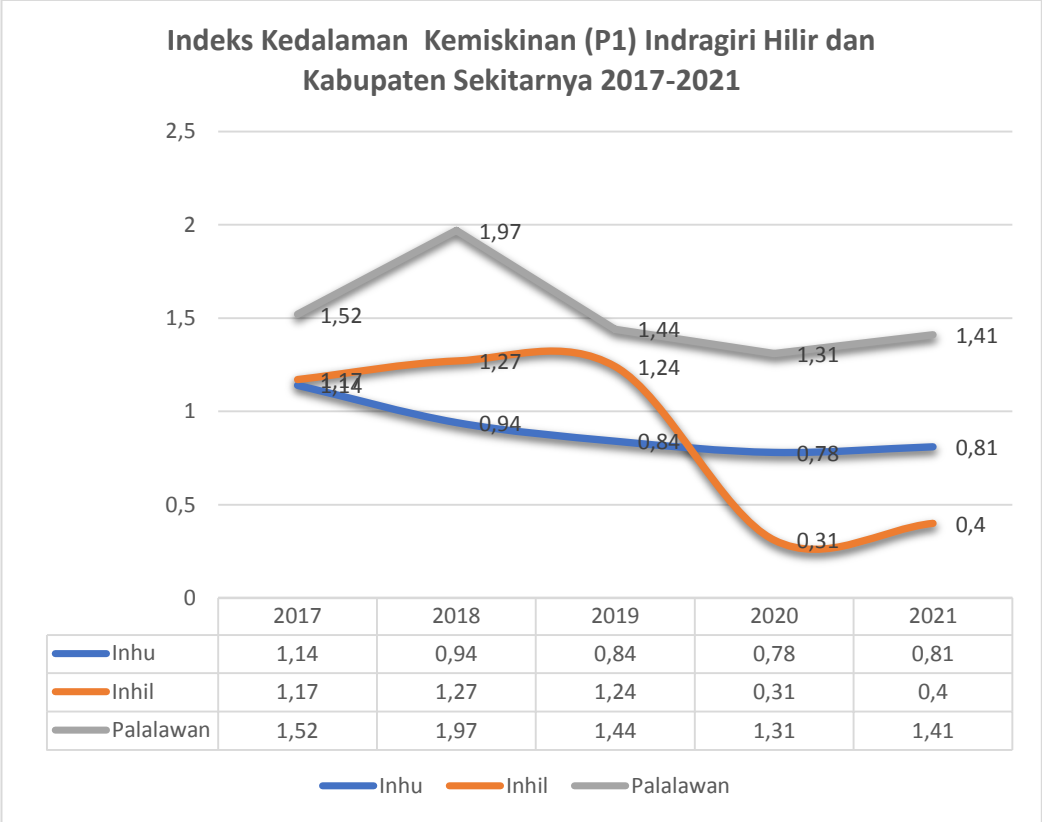

	2017	2018	2019	2020	2021
Inhu	1,14	0,94	0,84	0,78	0,81
Inhil	1,17	1,27	1,24	0,31	0,4
Palalawan	1,52	1,97	1,44	1,31	1,41

Sumber: Indikator Kesejahteraan Indragiri Hilir 2021 (diolah)

Gambar 2.15
Perkembangan Angka Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021

Diperiode yang sama Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0.28 pada tahun 2017 menjadi 0.21 di tahun 2021. Lebih kecil jika dibandingkan dari Kabupaten Indragiri hulu 0.29 tahun 2017 dan 0.23 tahun 2021, sementara Pelalawan turun dari 0.35 tahun 2017 menjadi 0.32 di tahun 2021 (lihat Gambar 2.14)

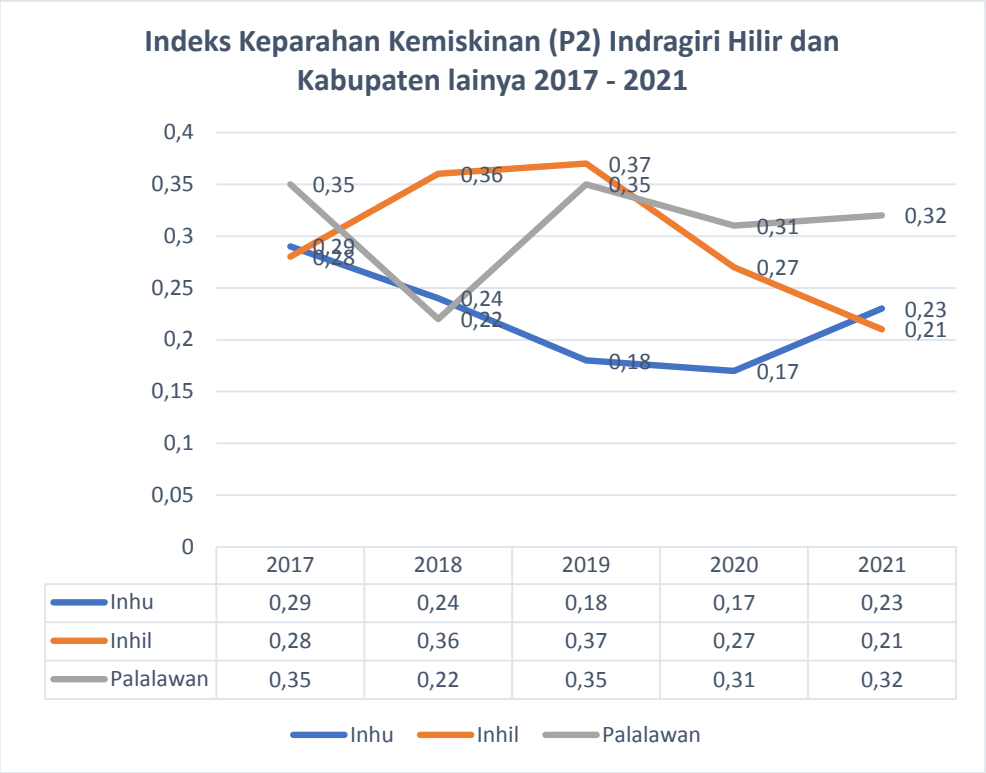

Sumber: Indikator Kesejahteraan Indragiri Hilir 2021 (diolah)

Gambar 2.16
Perkembangan Angka KeParahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Indragiri hilir
Tahun 2017-2021

b. Kemiskinan ekstrem

Kemiskinan ekstrem, atau kemiskinan absolut adalah suatu kondisi yang tidak dapat membantu kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi, tidak hanya tergantung dari pendapatan, tetapi juga ketersediaan jasa.

Kemiskinan esktrem indagiri Hilir pada tahun 2021 sebesar 2.58 % atau 12.280 jiwa, lebih besar dari Indragiri Hulu sebesar 1.75 % atau 7.830 jiwa dan kebih kecil dari Pelalawan yaitu sebesar 3.23 % atau 16.180 jiwa.

Sementara itu jumlah penduduk miskin ekstrem Provins Riau Tahun 2021 mencapai 147.600 Jiwa. Kabupaten yang paling tertinggi tingkat penduduk miskin ekstrem adalah Kabupaten Kepulauan Meranti,

dengan 11,3 persen atau 21,110 ribu jiwa. Sementara terendah adalah Kota Dumai, dengan 0,52 persen, atau 1063 jiwa. (lihat Gambar 2.15).

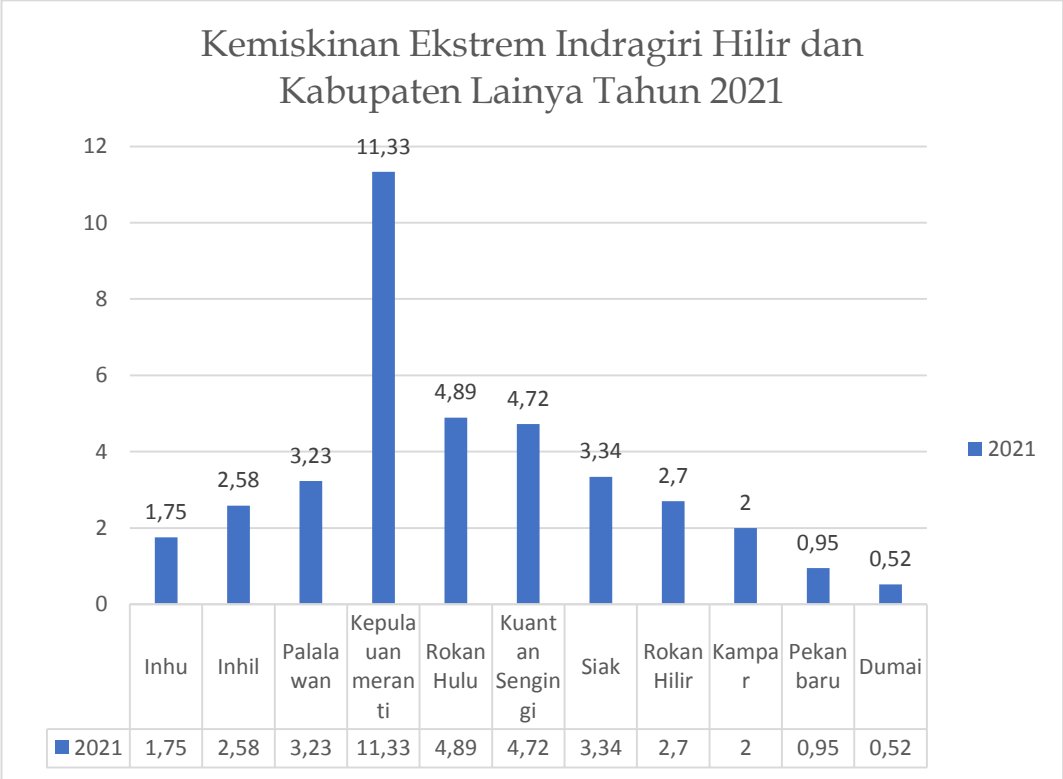

Sumber; BPS Maret 2021

Gambar 2.17
Perkembangan Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017-2021

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus Kesejahteraan Sosial menganalisis melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, APK SD/MI, APK SMP/MTs, angka harapan hidup, prevalensi gizi buruk dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode 2017 – 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat. Tahun

2017, IPM Indragiri Hilir sebesar 66,17 meningkat menjadi 66,84 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, IPM Kabupaten Indragiri Hilir mengalami sedikit penurunan menjadi 66,54. Pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 66,63. Pada periode 2017 - 2021, capaian IPM Kabupaten Indragiri Hilir yang berkisar antara 66,17 – 66,84 termasuk dalam kelompok dengan kategori "Sedang". Selama periode 2017 – 2021, capaian IPM Indragiri Hilir adalah yang terendah dibandingkan IPM Kabupaten tetangga dan Provinsi Riau. IPM Kabupaten Pelalawan yang sudah diatas 70 pada tahun 2017, bersama Provinsi Riau, termasuk dalam kelompok capaian IPM dengan kategori "Tinggi". Dari Keempat komponen pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Per Kapita, semua nilainya berada dibawah nilai kabupaten tetangga. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan IPM Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,17% per tahun.

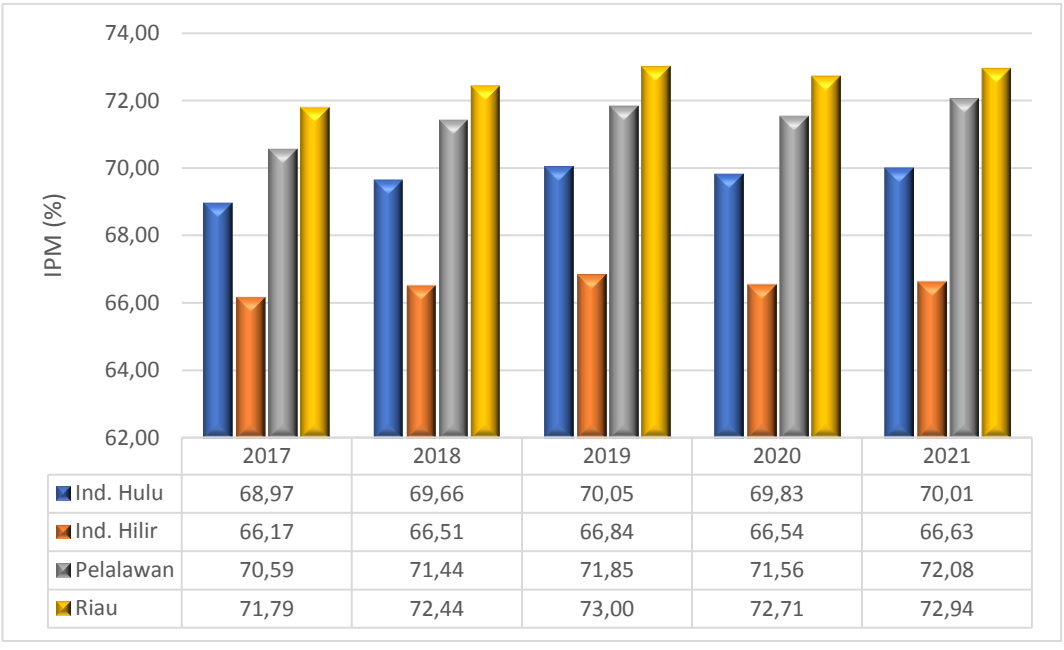

	2017	2018	2019	2020	2021
Ind. Hulu	68,97	69,66	70,05	69,83	70,01
Ind. Hilir	66,17	66,51	66,84	66,54	66,63
Pelalawan	70,59	71,44	71,85	71,56	72,08
Riau	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.18.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2017 – 2021

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023, telah ditargetkan capaian IPM yaitu sebesar 68,08 pada tahun 2021. Selama periode 2017-2021, capaian IPM Indragiri Hilir mendekati target yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga realisasi kinerjanya berkisar antara 97,87% - 100,47% dan terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2021, capaian IPM Indragiri Hilir sebesar 66,63% sehingga kinerjanya sebesar 97,87% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian kinerja IPM ini harus dilanjukan pada periode pembangunan berikutnya.

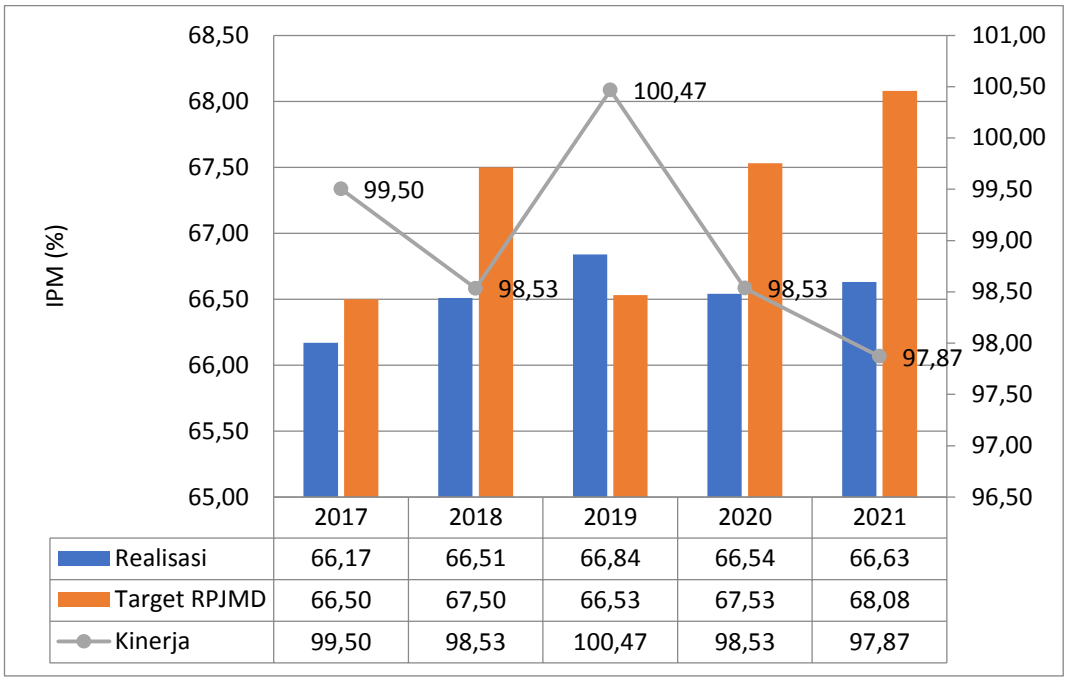

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	66,17	66,51	66,84	66,54	66,63
Target RPJMD	66,50	67,50	66,53	67,53	68,08
Kinerja	99,50	98,53	100,47	98,53	97,87

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.19
Kinerja Indikator IPM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021

2.1.2.2.2. Harapan lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) didefenisikan sebagai lama sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang sehingga HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang. Selama periode 2017–2021, HLS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren

meningkat yang menggambarkan bahwa kondisi pembangunan pendidikan di Indragiri Hilir terus meningkat. Namun bila dibandingkan dengan kondisi pembangunan pendidikan dengan Kabupaten tetangga dan Provinsi Riau memperlihatkan bahwa kondisi pembangunan pendidikan di Indragiri Hilir adalah yang terendah sehingga perlu dilakukan percepatan dimasa yang akan datang. Selama periode 2017–2021, rata-rata pertumbuhan HLS Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,11% per tahun.

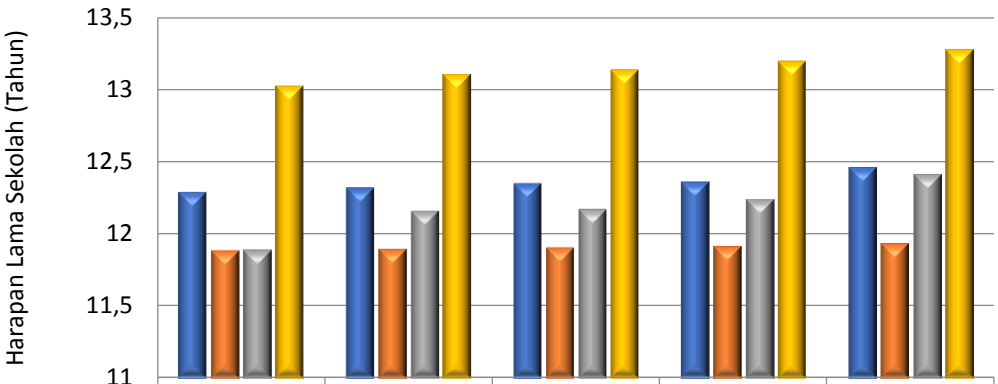

	2017	2018	2019	2020	2021
Ind. Hulu	12,29	12,32	12,35	12,36	12,46
Ind. Hilir	11,88	11,89	11,9	11,91	11,93
Pelalawan	11,89	12,16	12,17	12,24	12,41
Riau	13,03	13,11	13,14	13,20	13,28

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.20
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2017 – 2021

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditargetkan HLS pada tahun 2021 adalah 12,96 tahun. Realisasi HLS trendnya meningkat meski dengan slope yang lebih rendah dibanding slope target. Ditambah dengan target yang terus meningkat maka capaian kinerja menurun dari 95,04% pada tahun 2017 menjadi 91,46% tahun 2018 dengan kategori sangat tinggi. Pada tahun 2021 capaian kinerjanya sebesar 92,05% dengan kategori masih sangat tinggi. Capaian kinerja HLS

yang terus menurun perlu mendapat perhatian untuk senantiasa ditingkatkan.

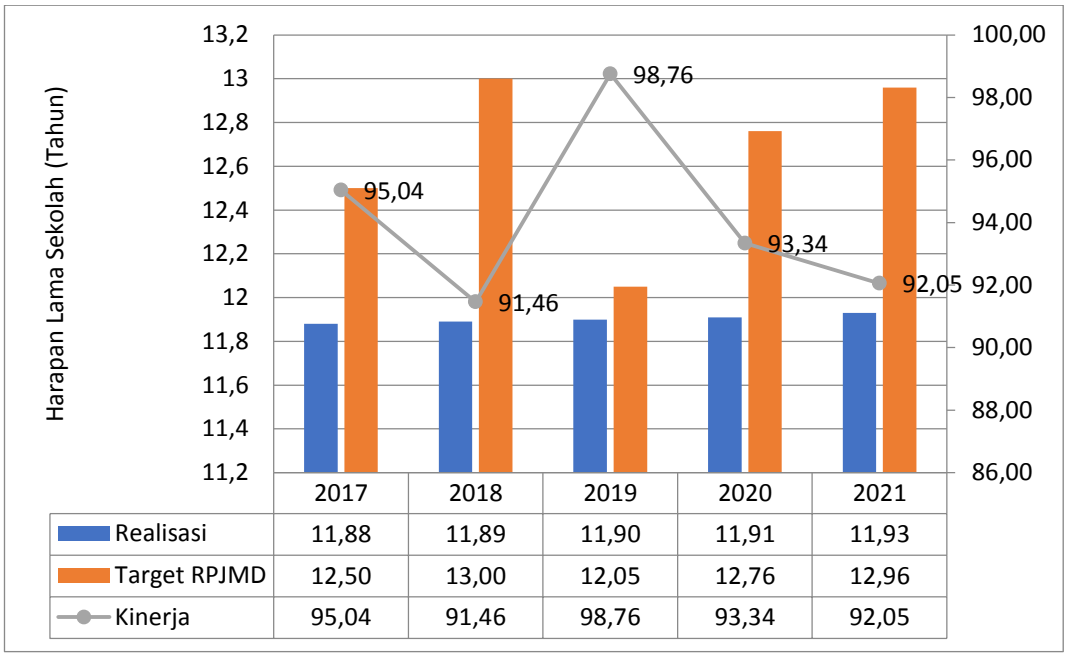

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	11,88	11,89	11,90	11,91	11,93
Target RPJMD	12,50	13,00	12,05	12,76	12,96
Kinerja	95,04	91,46	98,76	93,34	92,05

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.21.
Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017 - 2021

2.1.2.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefenisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Selama periode 2017 – 2021, RLS kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat meski dengan slope yang hampir datar. Posisi RLS kabupaten Indragiri Hilir kembali menjadi yang terendah dibandingkan dengan RLS kabupaten sekitarnya dan Provinsi Riau, sehingga kondisi ini perlu dilakukan percepatan dalam pembangunan bidang pendidikan periode berikutnya. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan RLS kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,21% per tahun, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan RLS kabupaten tetangga (Indragiri Hulu dan Pelalawan 1,5% per tahun), serta lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan RLS Provinsi Riau (1,70% per tahun).

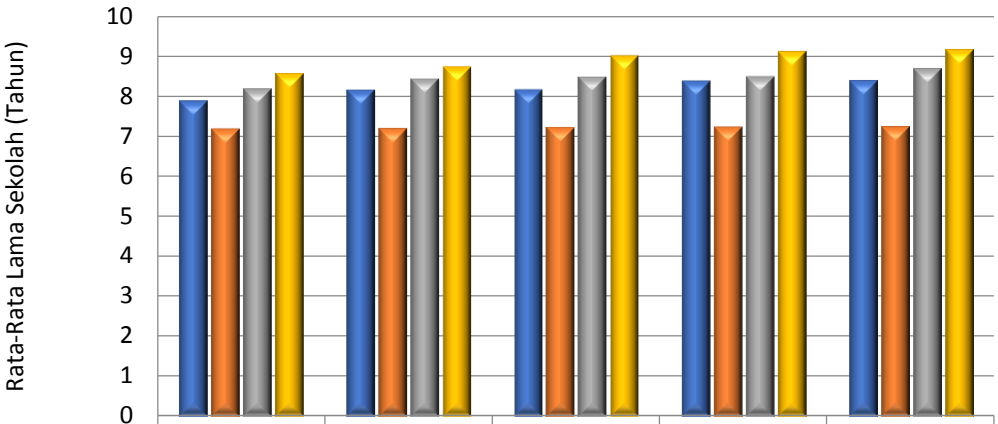

	2017	2018	2019	2020	2021
Ind. Hulu	7,89	8,16	8,17	8,38	8,39
Ind. Hilir	7,18	7,19	7,22	7,23	7,24
Pelalawan	8,19	8,44	8,49	8,50	8,70
Riau	8,59	8,76	9,03	9,14	9,19

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.22.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020 telah ditargetkan bahwa RLS terus meningkat dari 8,50 pada tahun 2017 menjadi 7,26 pada tahun 2020. Realisasi RLS meningkat dari 7,18 tahun pada tahun 2017 menjadi 7,24 tahun pada tahun 2021. Capaian RLS tahun 2021 ini masih dibawah Wajib Belajar 9 tahun. Capaian kinerja RLS kabupaten Indragiri Hilir trendnya berfluktuatif menurun. Pada tahun 2017, realisasi kinerja sebesar 84,47% yang terkategori tinggi. Namun pada periode 2019-2020, realisasi kinerjanya berkisar 99,59% dengan kategori sangat tinggi. Pada tahun 2021, realisasi kinerja sebesar 98,10% yang masih terkategori sangat tinggi. Relatif rendahnya RLS dan masih dibawah wajib belajar 9 tahun, harus menjadi perhatian dan prioritas pada pembangunan periode berikutnya.

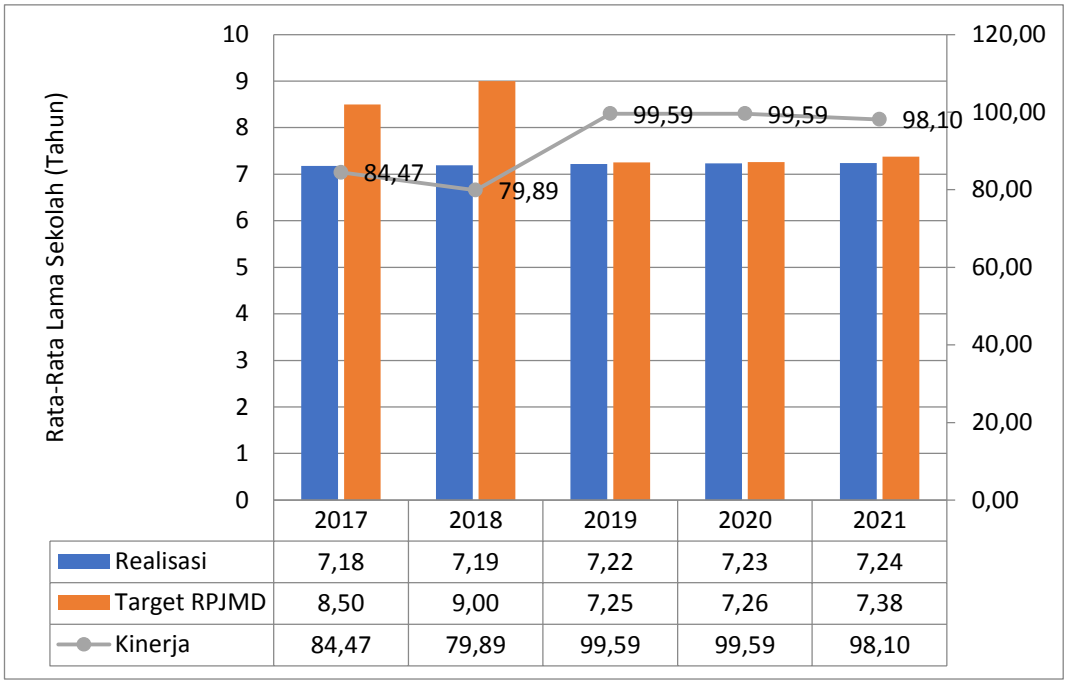

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	7,18	7,19	7,22	7,23	7,24
Target RPJMD	8,50	9,00	7,25	7,26	7,38
Kinerja	84,47	79,89	99,59	99,59	98,10

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.23.
Kinerja Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017 - 2021

2.1.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK yang dibahas terdiri dari APK SD/MI dan APK SMP/MTs

a. APK SD/MI

Selama periode 2017 – 2021, APK SD/MI kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend menurun. Pada tahun 2017, APK SD/MI Indragiri Hilir sebesar 101,73% meningkat menjadi 104,31% tahun 2018 dan menurun lagi menjadi 104,56% pada tahun 2021. Capaian APK SD/MI Indragiri Hilir adalah cenderung terendah dibandingkan capaian APK SD/MI kabupaten sekitarnya dan Provinsi Riau. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APK SD/MI menurun sebesar 0,69% per tahun. Peningkatan rata-rata pertumbuhan APK SD/MI kabupaten Indragiri Hilir adalah yang tertinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar maupun Provinsi

Riau. Rata-rata pertumbuhan APK SD/MI Kabupaten Pelalawan sebesar -1,26% dan Provinsi Riau sebesar -0,81%.

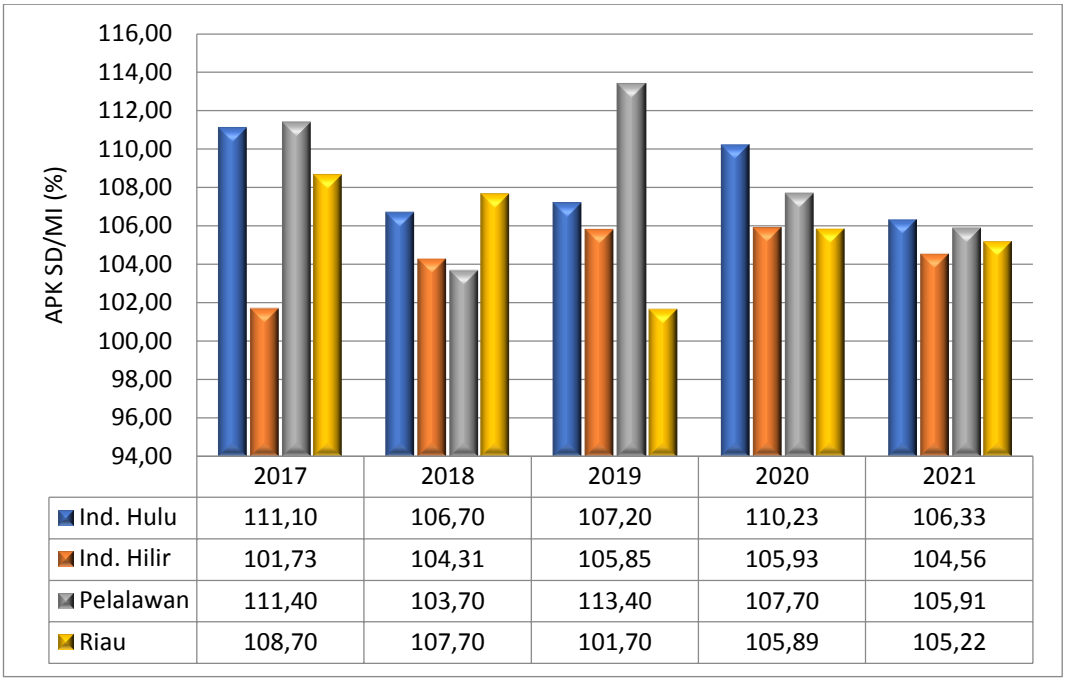

	2017	2018	2019	2020	2021
Ind. Hulu	111,10	106,70	107,20	110,23	106,33
Ind. Hilir	101,73	104,31	105,85	105,93	104,56
Pelalawan	111,40	103,70	113,40	107,70	105,91
Riau	108,70	107,70	101,70	105,89	105,22

Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, Indragiri Hulu Dalam Angka, Pelalawan Dalam Angka, Provinsi Riau Dalam Angka, 2022

Gambar 2.24.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau
Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditargetkan bahwa APK SD/MI kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2013 – 2018, trendnya terus meningkat dari 113% pada tahun 2017 menjadi 102,47% pada tahun 2020. Realisasi APK SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir berfluktuatif menurun sehingga realisasi kinerja cenderung turun. Pada tahun 2016-2017, realisasi kinerja menurun dari 110% menjadi 101,73% terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2017, realisasi kinerja menurun sebagai konsekwensi menurunnya capaian APKSD/SM dan meningkatnya target sehingga capaian kinerja menjadi turun menjadi 90,02% yang terkategori capaian kinerja Tinggi. Pada tahun 2020, diperkirakan capaian APK SD/MI kembali menurun sehingga capaian kinerja juga turun menjadi 103,38% yang terkategori sangat Tinggi.

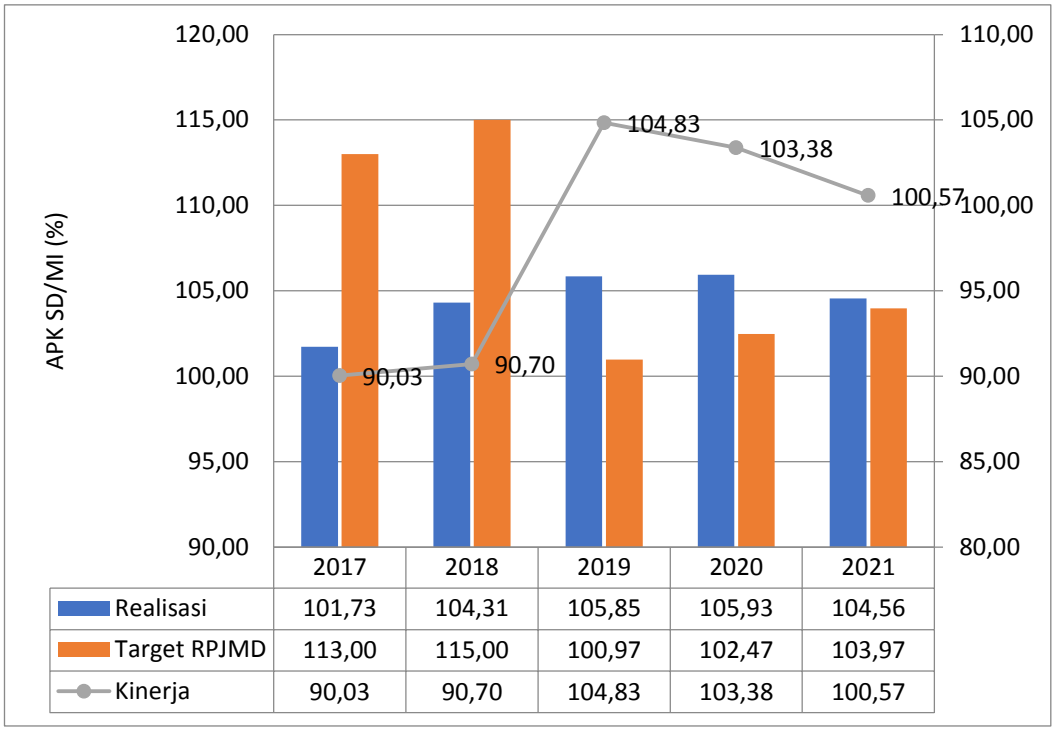

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	101,73	104,31	105,85	105,93	104,56
Target RPJMD	113,00	115,00	100,97	102,47	103,97
Kinerja	90,03	90,70	104,83	103,38	100,57

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022

Gambar 2.25.
Kinerja Indikator APK SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021

b. APK SMP/MTs

Selama periode 2016 – 2020, APK SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir trendnya meningkat yaitu dari 97,89% pada tahun 2016 menjadi 97,95% pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan capaian APK SD/SMP, maka capaian APK SMP/MTs relatif lebih rendah. Hal yang menonjol dibanding indikator-indikator sebelumnya, indikator APK SMP/MTs inilah yang nilainya lebih tinggi dibanding semua kabupaten sekitarnya bahkan juga dengan Provinsi Riau. Selama periode 2016 – 2020, rata-rata pertumbuhan APK SMP/MTs Indragiri Hilir meningkat 1,76% per tahun. Capaian rata-rata pertumbuhan APK SMP/MTs Indragiri Hilir (1,76% per tahun) adalah yang tertinggi dibanding capaian APK SMP/MTs Indragiri Hulu dan Pelalawan serta Provinsi Riau dengan rata-rata pertumbuhan menurun.

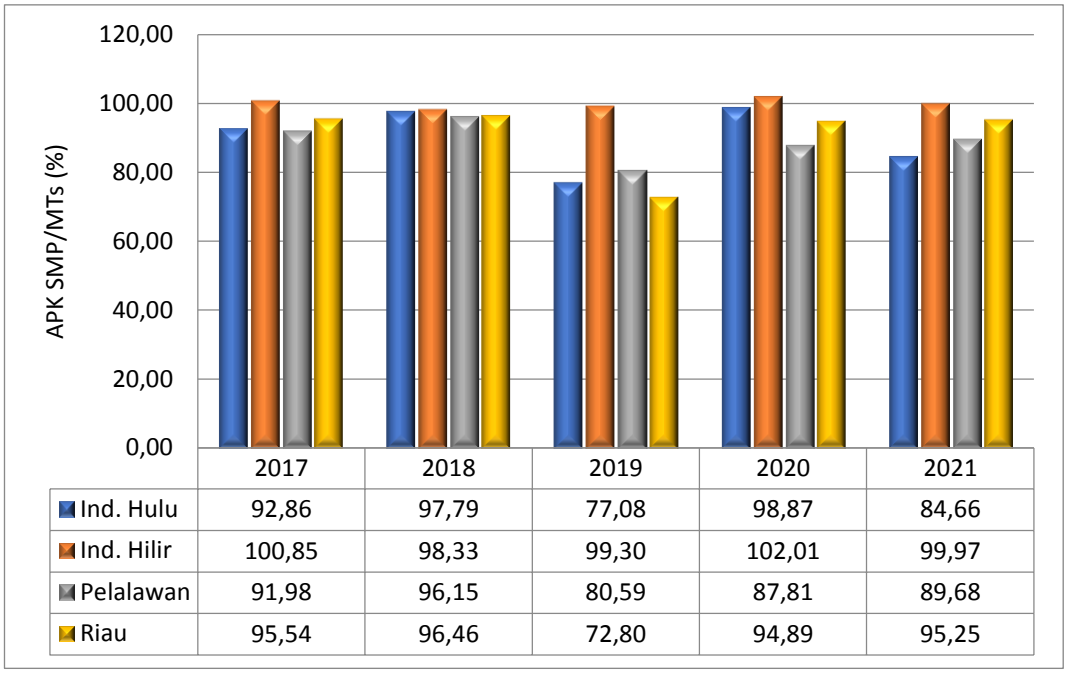

	2017	2018	2019	2020	2021
Ind. Hulu	92,86	97,79	77,08	98,87	84,66
Ind. Hilir	100,85	98,33	99,30	102,01	99,97
Pelalawan	91,98	96,15	80,59	87,81	89,68
Riau	95,54	96,46	72,80	94,89	95,25

Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, Indragiri Hulu Dalam Angka, Pelalawan Dalam Angka, Provinsi Riau Dalam Angka, 2022

Gambar 2.26.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan APK SMP/MTs trendnya meningkat dari 101% pada tahun 2016 menjadi 105% pada tahun 2018. Realisasi capaian APK SMP/MTs Indragiri Hilir trendnya berfluktuatif meningkat. Selama periode 2016-2018, realisasi kinerja APK SMP/MTs bekisar antara 93,65% – 97,91% yang semua capaain terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2020, capaian APK SMP/MTs sebesar 102,01 dengan capaian kinerja sebesar 100,72 % dan terkategori sangat tinggi. Capaian kinerja SMP/MTs perlu dipertahankan dan bahkan ditingkat pada pembangunan periode berikut agar upaya pencapaian wajib belajar 9 tahun dan rata-rata lama sekolah pada IPM terus meningkat sehingga IPM Kabupaten Indragiri Hilir naik lebih tinggi lagi.

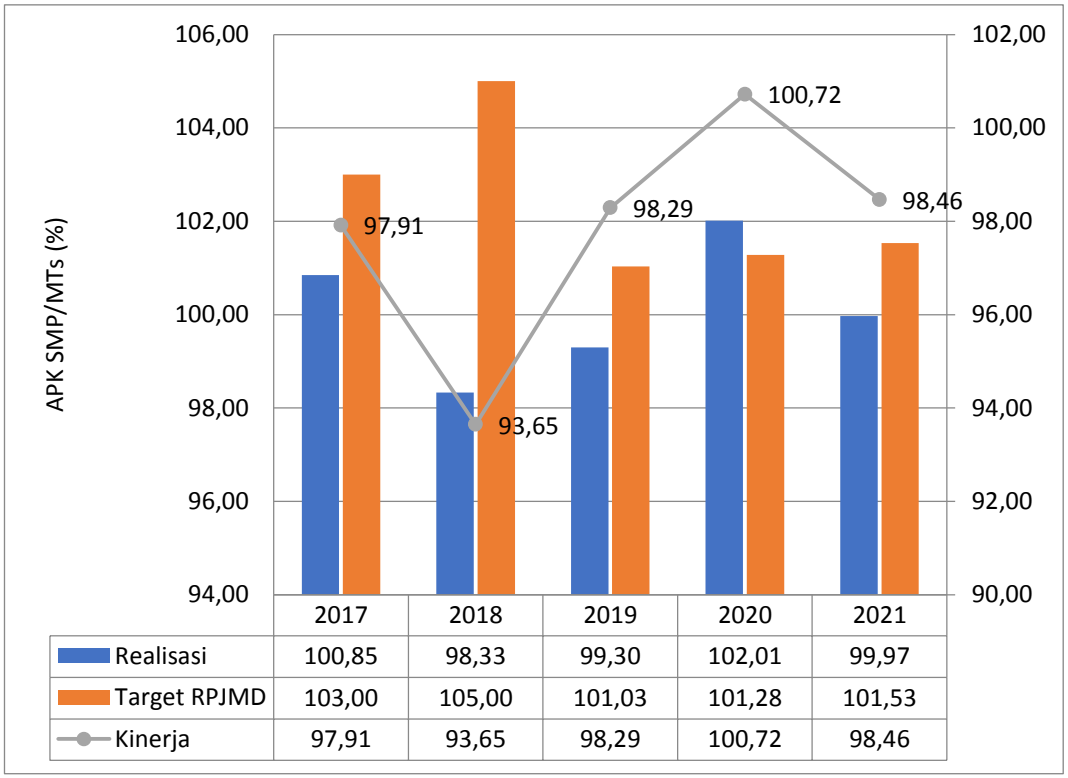

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022

Gambar 2.27.
Kinerja Indikator APK SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021

2.1.2.2.5. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) didefenisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM. Selama periode 2017 – 2021, AHH kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat yaitu dari 67,07 tahun pada tahun 2017 menjadi 67,98 tahun pada tahun 2021. Capaian AHH kabupaten Indragiri Hilir ini adalah yang terendah dibanding capaian AHH Kabupaten Indragiri Hulu (70,26 tahun) dan Pelalawan (71,24 tahun) serta Provinsi Riau (71,67 tahun). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan AHH kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,34% per tahun, tertinggi dibanding rata-rata pertumbuhan AHH

Kabupaten Indragiri Hulu (0,15% per tahun) dan Pelalawan (0,24% per tahun) serta Provinsi Riau (0,25% per tahun). Posisi AHH Kabupaten Indragiri Hilir yang terendah dibanding capaian AHH kabupaten sekitarnya perlu menjadi dorongan untuk dilakukan percepatan pada pembangunan bidang kesehatan pada periode berikutnya.

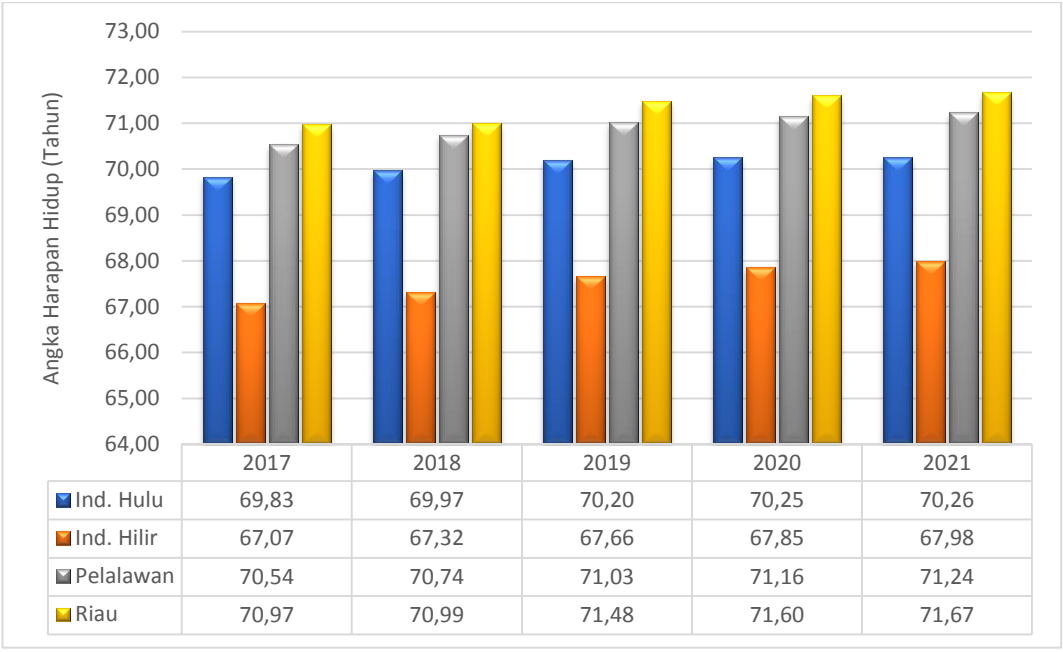

	2017	2018	2019	2020	2021
Ind. Hulu	69,83	69,97	70,20	70,25	70,26
Ind. Hilir	67,07	67,32	67,66	67,85	67,98
Pelalawan	70,54	70,74	71,03	71,16	71,24
Riau	70,97	70,99	71,48	71,60	71,67

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.28
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau
Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 telah ditetapkan AHH dengan trend meningkat yaitu dari 69,5 tahun pada tahun 2017 menjadi 68,80 tahun pada tahun 2021. Meski realisasi capaian AHH terus meningkat yaitu dari 67,07 tahun pada tahun 2017 menjadi 67,98 tahun 2021, namun peningkatan target jauh lebih tinggi sehingga realisasi kinerja terus menurun. Pada tahun 2016 , realisasi kinerja sebesar 97,02% yang terkategori sangat tinggi, menurun realisasi kinerja menjadi 96,50% pada tahun 2017 yang kategori capaiannya masih sangat tinggi. Pada tahun 2020 capaian AHH sebesar 67,85% dengan capaian realisasi

kinerja sebesar 99,78% dan terkategori sangat tinggi. Meski capaian kinerja terkategori tinggi namun dengan posisi AHH yang terendah dibanding AHH kabupaten sekitarnya yang menggambarkan bahwa derajat kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir masih rendah sehingga perlu menjadi perhatian serius pada pembangunan periode berikutnya.

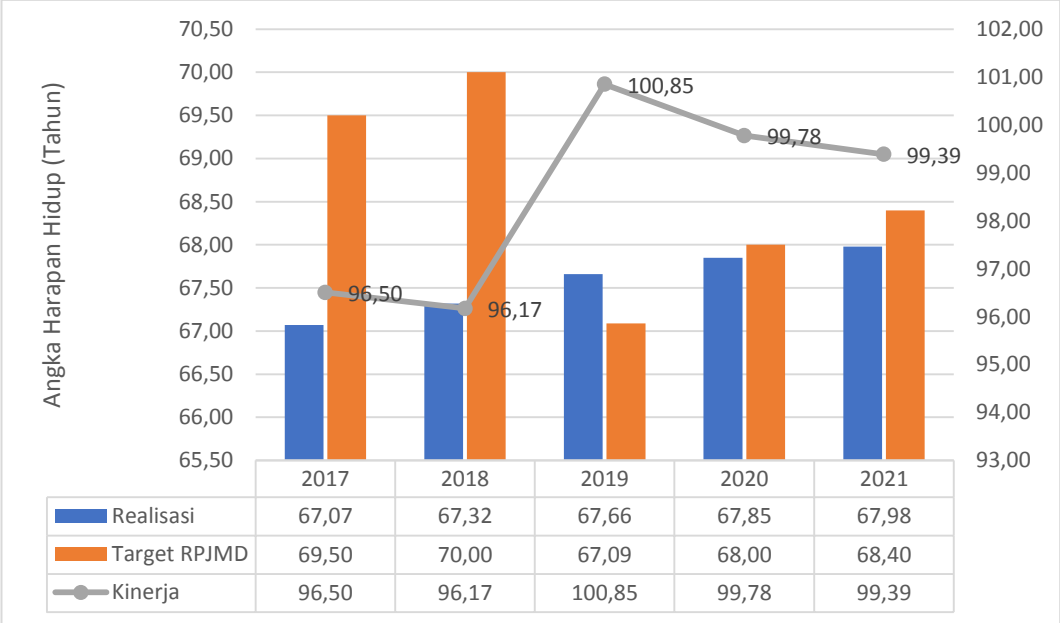

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	67,07	67,32	67,66	67,85	67,98
Target RPJMD	69,50	70,00	67,09	68,00	68,40
Kinerja	96,50	96,17	100,85	99,78	99,39

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.29
Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017 - 2021

2.1.2.2.6. Prevalensi Gizi Buruk

Pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 telah ditetapkan bahwa target prevalensi balita gizi buruk menurun dari 1,00% pada tahun 2017 menjadi 0,80% pada tahun 2021. Realisasi capaian prevalensi balita gizi buruk menurun dari 1,20% pada tahun 2017 menjadi 0,02% pada tahun 2021 dengan realisasi kinerja berkisar antara 80% - 198% yang terkategori sangat tinggi. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal menurunkan angka prevalensi balita gizi buruk harus dipertahankan pada periode pembangunan dimasa mendatang.

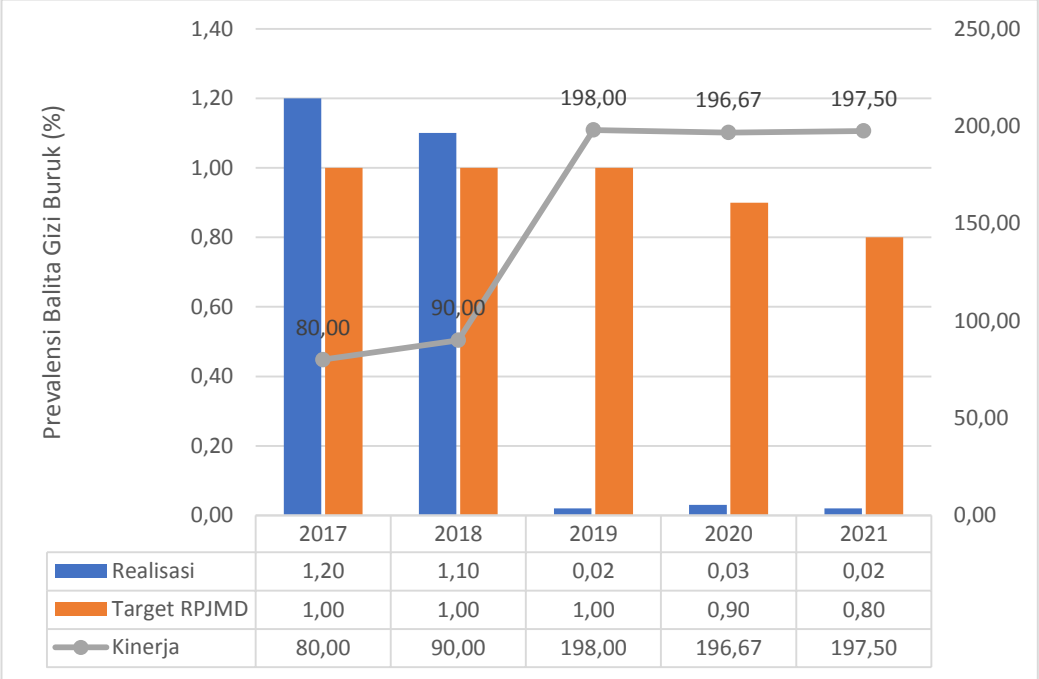

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.30
Kinerja Indikator Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017-2021

2.1.2.2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jika pada suatu daerah terdapat TPT yang tinggi, maka hal ini mengindikasikan banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Selama periode 2017 - 2021, TPT Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun yang bermakna kuantitas dan tingkat pengangguran menurun. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka di Indragiri Hilir sebesar 4,08%, menurun menjadi 3,96% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 4,55% pada tahun 2019, kemudian kembali menurun menjadi 4,35% pada tahun 2020 menjadi 2,66% pada tahun 2021. Pada tahun 2021, capaian TPT Kabupaten Indragiri Hilir (2,66%) adalah yang terendah dibanding TPT Provinsi Riau (4,42%) dan Indragiri Hulu (3,32%) tetapi masih lebih tinggi

jika dibandingkan dengna Pelalawan (2,34%). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan TPT Kabupaten Indragiri Hilir menurun sebesar 10,14% per tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata penurunan TPT kabupaten Indragiri Hulu sebesar 8,47% per tahun.

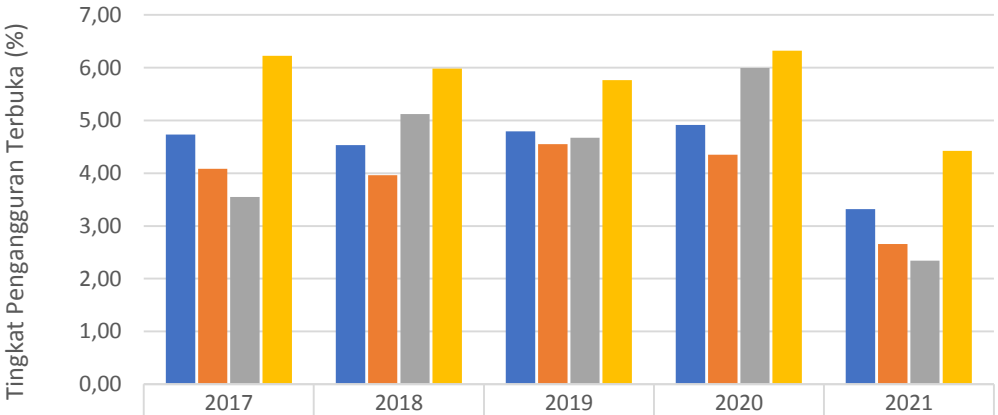

	2017	2018	2019	2020	2021
Ind. Hulu	4,73	4,53	4,79	4,91	3,32
Ind. Hilir	4,08	3,96	4,55	4,35	2,66
Pelalawan	3,55	5,12	4,67	5,99	2,34
Riau	6,22	5,98	5,76	6,32	4,42

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Gambar 2.31.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditargetkan TPT Kabupaten Indragiri Hilir dengan trend menurun yaitu dari 4,00% pada tahun 2017 menjadi 2,86% pada tahun 2021. Realisasi TPT yang berfluktuatif meningkat dan target yang semakin menurun menjadikan realisasi kinerja memiliki trend menurun. Pada tahun 2017 dengan realisasi kinerja sebesar 98% dan terkategori Sangat Tinggi, menurun menjadi 61,46% pada tahun 2020, yang terkategori Rendah. Pada tahun 2021, realisasi TPT Kabupaten Indragiri Hilir menurun menjadi 2,66% dengan kinerja sebesar 106,99% yang terkategori Sangat Tinggi menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menurunkan TPT khususnya pada saat pandemi COVID-19.

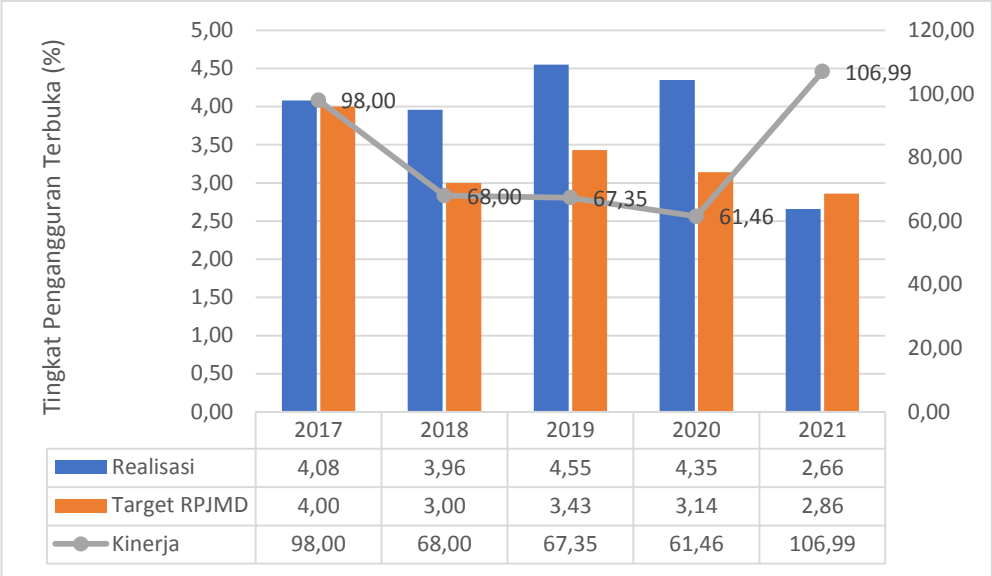

Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022

Gambar 2.32.
Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga terdiri dari seni budaya yang direpsesentasikan dari cakupan fasilitasi seni dan olahraga yang direpresentasikan dari jumlah lapangan olahraga.

2.1.2.3.1. Seni Budaya

Selama periode 2017 – 2020, perkembangan fasilitasi seni budaya oleh pihak terkait relatif tidak mengalami perkembangan yang berarti. Ditambah lagi dengan terjadinya bencana non alam, pandemi COVID-19 yang mengharuskan orang untuk membatasi interaksi antar manusia sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang seperti kegiatan kesenian praktis tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2021.

Fasilitasi seni budaya yang dilakukan masih terbatas pada kegiatan-kegiatan seni budaya yang telah dilakukan sebelumnya seperti festival bakaroh, sampan, menongkah, seribu telur dan karnaval budaya.

Padahal masih banyak seni budaya Indragiri Hilir yang perlu diangkat sehingga akan dapat menjadi daya tarik wisata ke Indragiri Hilir.

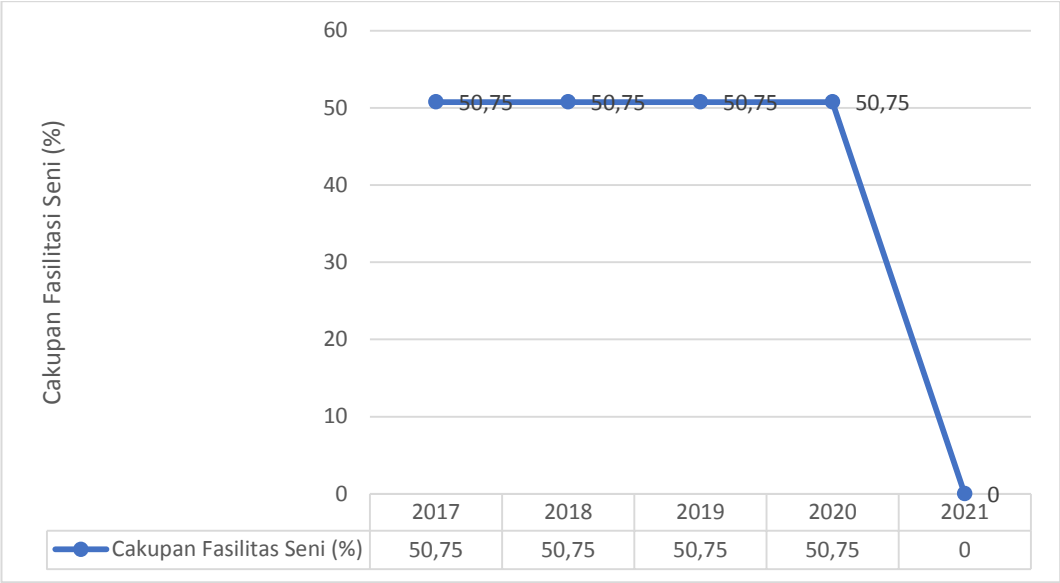

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2022

Gambar 2.33.
Perkembangan Cakupan Fasilitasi Seni Budaya di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

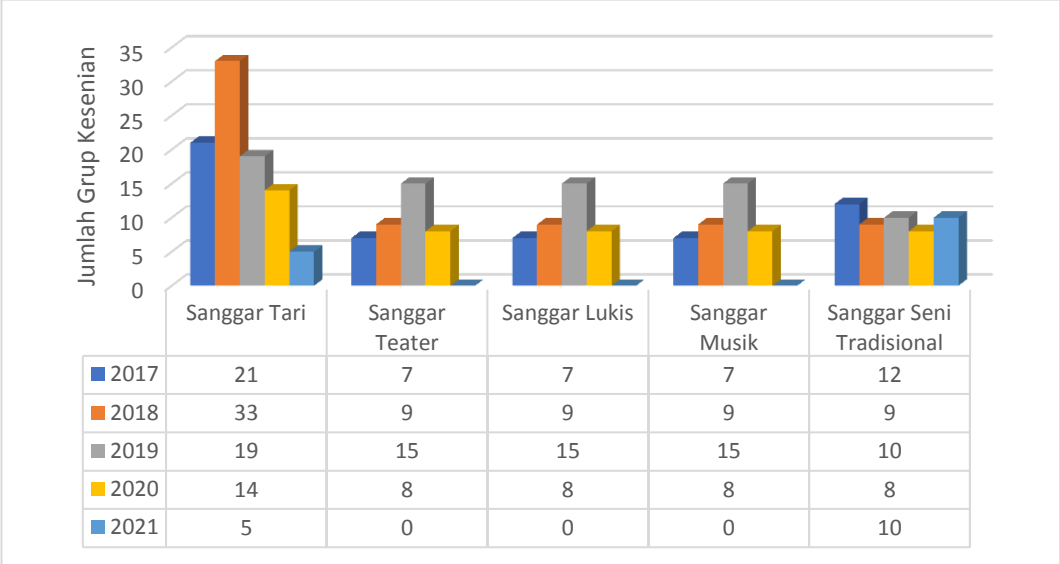

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2022

Gambar 2.34.
Perkembangan Group kesenian di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditargetkan bahwa cakupan fasilitasi seni pada tahun 2017 sebesar 70% meningkat menjadi 80% pada tahun 2018. Realisasi cakupan fasilitasi seni stagnan sebesar 50,75% sampai pada tahun 2020. Target RPJMD terhadap cakupan fasilitasi seni terus meningkat dan disisi lain realisasi tetap sebesar 50,75% maka realisasi kinerja terus menurun. Pada tahun 2017-2018 menurun menjadi 72,5% dan 63,43 terkategori sedang. Pada tahun 2019 dan 2020 realisasi meningkat menjadi 97,6% - 93,98% dan terkategori sangat tinggi. Alasan tidak tersedianya dana untuk fasilitasi cakupan seni adalah hal yang paling menonjol disampaing alasan lain seperti keterbatasan sumberdaya manusianya. Kedepan, dalam upaya menarik wisatawan ke Indragiri Hilir dan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir, perlu upaya peningkatan kinerja cakupan fasilitasi seni di Kabupaten Indragiri Hilir.

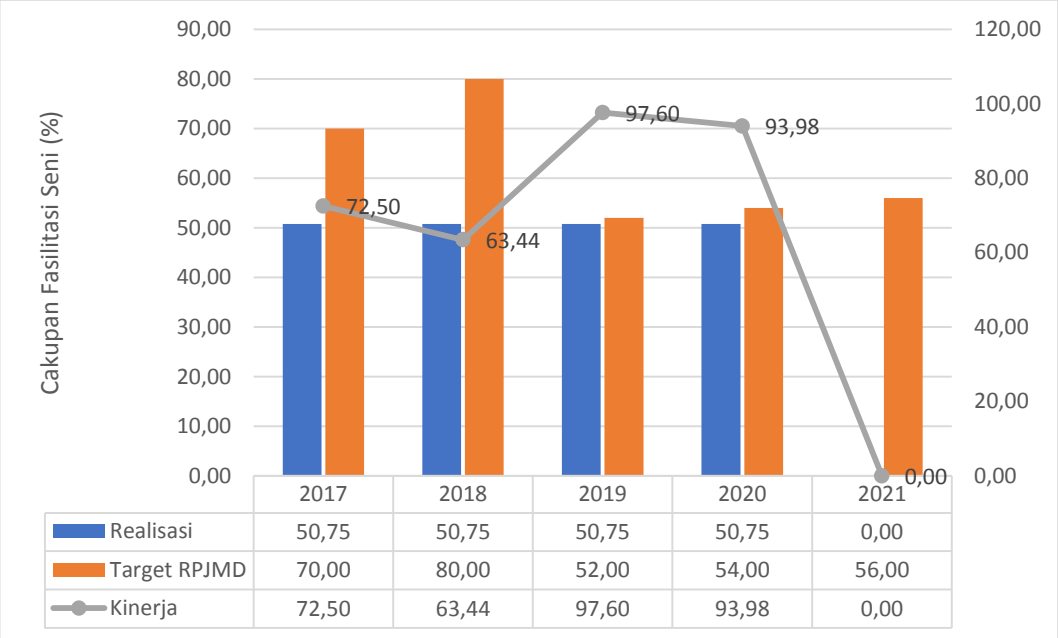

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	50,75	50,75	50,75	50,75	0,00
Target RPJMD	70,00	80,00	52,00	54,00	56,00
Kinerja	72,50	63,44	97,60	93,98	0,00

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2022

Gambar 2.35
Kinerja Indikator Cakupan Fasilitasi Seni Budaya
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

2.1.2.3.2. Olahraga

Pada dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 terdapat indikator baru untuk urusan olahraga yaitu jumlah prestasi olahraga (kejuaraan). Target indikator ini untuk tahun 2021 adalah 5 kejuaraan dengan realisasi sebanyak 3 kejuaraan sehingga kinerja hanya 60% dengan kategori Sedang. 3 kejuaraan ini diperoleh dari cabang olahraga bulutangkis dengan perolehan 7 medali emas, 5 medali perak dan 7 medali perunggu, cabang olahraga senam dengan perolehan 2 medali perak serta cabang olahraga sepak takraw dengan perolehan 2 medali perunggu.

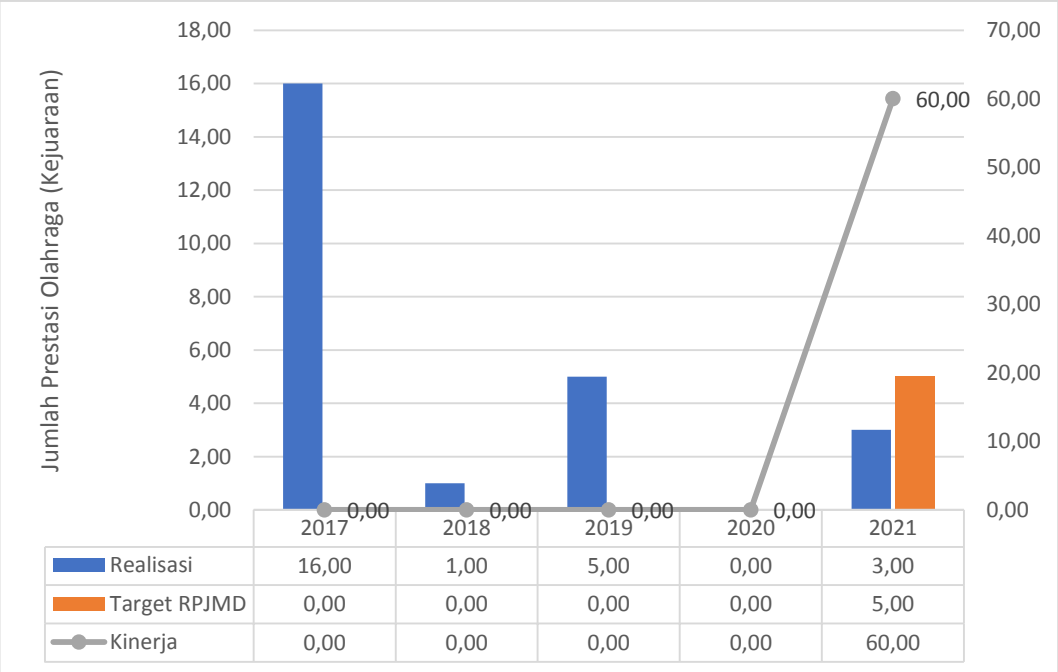

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	16,00	1,00	5,00	0,00	3,00
Target RPJMD	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2022

Gambar 2.36.
Kinerja Indikator Jumlah Lapangan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017-2021

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum terdiri 4 layanan yaitu (i) layanan urusan wajib dasar, (ii) layanan urusan wajib non dasar, (iii) layanan urusan pilihan dan (iv) urusan penunjang.

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan wajib dasar terdiri dari 6 urusan dasar yaitu (i) pendidikan, (ii) kesehatan, (iii) pekerjaan umum dan penataan ruang, (iv) perumahan rakyat dan pemukiman, (v) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan (vi) sosial.

2.1.3.1.1. Pendidikan

Layanan urusan wajib dasar bidang urusan pendidikan dianalisis meliputi indikator kinerja (a) Angka partisipasi murni (APM), (b) Angka partisipasi sekolah (APS), (c) Angka putus sekolah, (d) Rasio ketersediaan sekolah, (e) Rasio guru terhadap Murid dan (f) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV

a. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu. Selama periode 2017 – 2021, APM SD/MI Indragiri Hilir memiliki tren meningkat. Pada tahun 2017 APM SD/MI Indragiri Hilir sebesar 94,62% meningkat menjadi 95,99% pada tahun 2021. Selama periode ini terdapat 4,01% - 5,38% penduduk umur pendidikan SD/MI yang belum sekolah. Capaian APM SD/MI Indragiri Hilir tahun 2021 sebesar 95,99%, lebih rendah dibanding APM SD/MI Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau yang masing-masingnya sebesar 98,45% dan 97,85%. Oleh karena itu, upaya meningkatkan APM SD/MI hingga mencapai 100% perlu terus dilakukan agar semua penduduk umur SD/MI dapat bersekolah sehingga juga mendorong terhadap pencapaian wajib belajar dan IPM Indragiri Hilir.

Selama periode 2017 – 2021, rata-rata pertumbuhan APM SD/MI Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,36% per tahun.

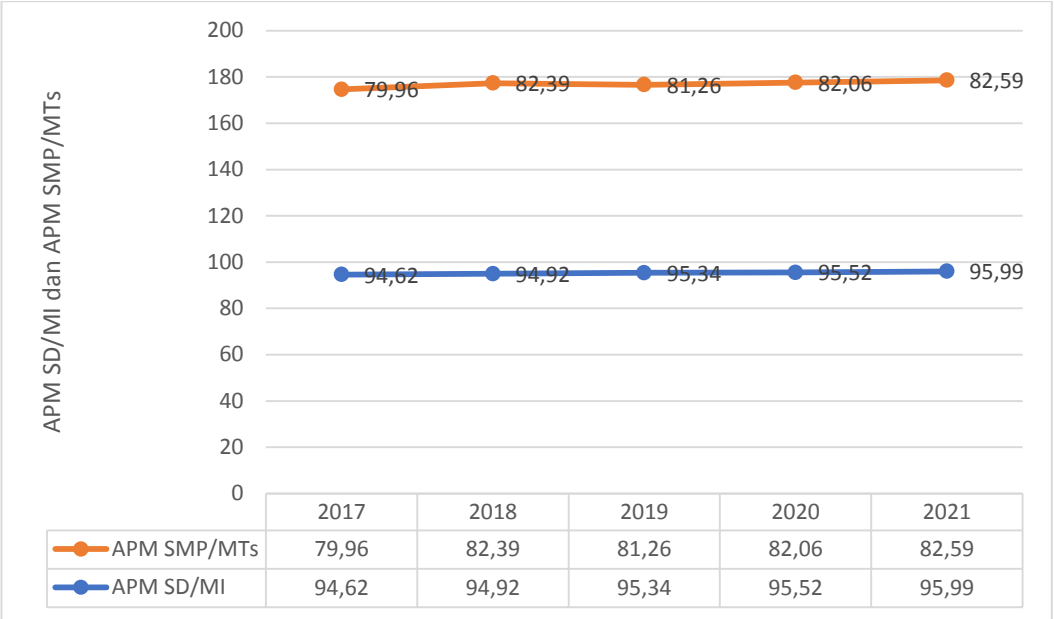

Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022

Gambar 2.37.
Perkembangan APM SD/MTs dan APM SMP/MTs
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Pada periode yang sama, APM SMP/MTs memiliki trend berfluktuatif meningkat yaitu dari 79,96% pada tahun 2017 menjadi 82,59% tahun 2021. Meski trend APM SMP/MTs memiliki trend yang meningkat namun nilai APM SMP/MTs jauh lebih rendah dibanding APM SD/MI. Selama periode 2017-2021 ini, terdapat 17,41% - 20,04% penduduk usia sekolah SMP/MTs yang belum sekolah. Upaya mengesa peningkatan APM SMP/MTs menjadi 100% sehingga wajib belajar 9 tahun tercapai dan IPM meningkat lebih cepat. Capaian APM SMP/MTs Indragiri Hilir tahun 2021, lebih tinggi dibanding capaian APM SMP/MTs Indragiri Hulu dan Provinsi Riau yang masing-masingnya sebesar 77,10% dan 80,52%. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APM SMP/MTs Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,81% per tahun.

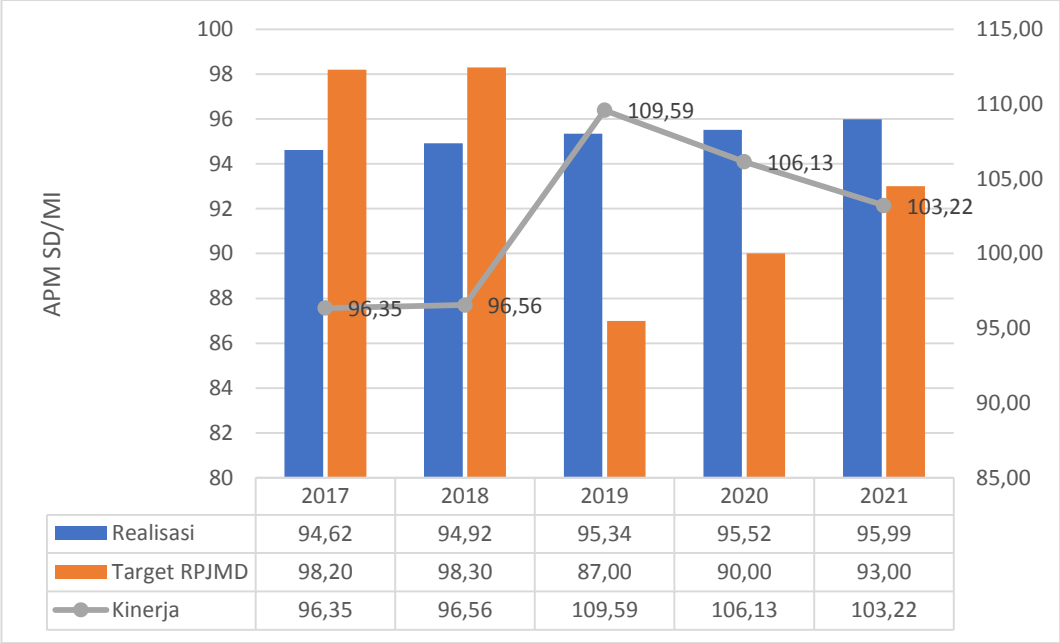

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	94,62	94,92	95,34	95,52	95,99
Target RPJMD	98,20	98,30	87,00	90,00	93,00
Kinerja	96,35	96,56	109,59	106,13	103,22

Sumber: https://sipd.kemendagri.go.id, Kab. Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022

Gambar 2.38
Kinerja Indikator APM SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

Pada RPJMD Indragiri Hilir tahun 2017-2021 telah ditargetkan APM SD/MI meningkat dari 98,20 pada tahun 2017 menjadi 93% pada tahun 2021. Selama periode 2017-2021, realisasi APM SD/MI memiliki trend meningkat, dari 94,62% menjadi 95,99% pada tahun 2021. Selama periode 2017-2021, capaian realiasi kinerja berkisar antara 96,35%-109,59% yang semuanya terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja terkategori Sangat Tinggi, namun upaya pencapaian APM SD/MI mencapai 100% harus terus diupayakan agar pencapaian wajib belajar dan percepatan peningkatan nilai IPM.

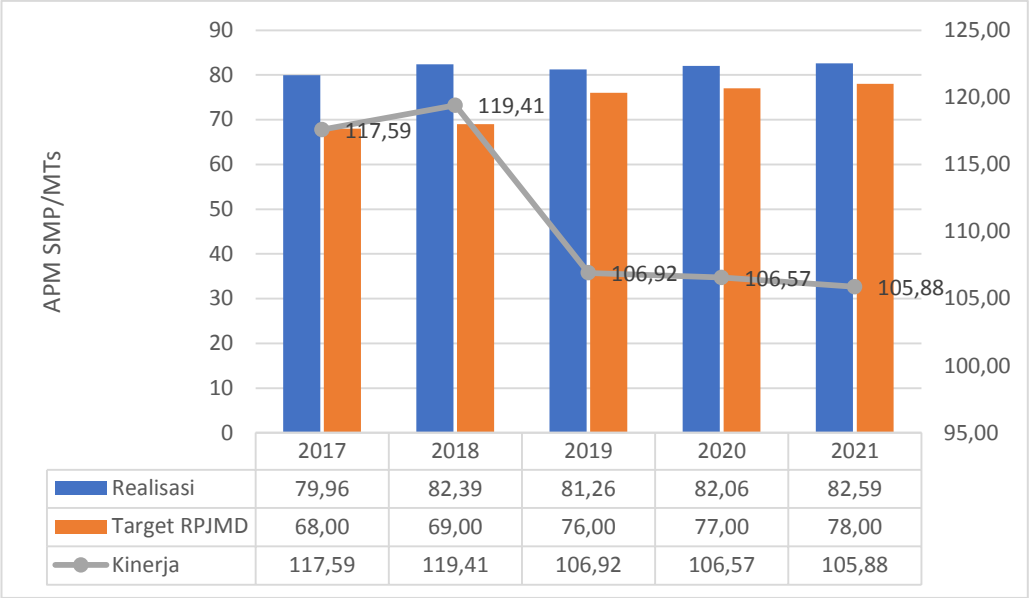

Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022

Gambar 2.39
Kinerja Indikator APM SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

Pada RPJMD juga telah ditarget APM SMP/MTs dengan trend meningkat yaitu dari 68% pada tahun 2017 menjadi 78% pada tahun 2021. Realisasi capaian APM SMP/MTs melebihi target yaitu sebesar 79,96% pada tahun 2017 meningkat menjadi 82,59% pada tahun 2021. Realisasi kinerja APM SMP/MTs berkisar antara 105,88% - 119,41% yang semuanya terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian realisasi kinerja APM SMP/MTs Sangat Tinggi, namun untuk mencapai APM SMP/MTs Indragiri Hilir dengan nilai 100% perlu dilakukan dengan usaha yang lebih terencana baik.

b. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7–12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Selama periode 2017-2021, APS 7–12 tahun kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2017, nilai APS 7–12 tahun Indragiri Hilir sebesar 97,56% menurun menjadi 97,26% pada

tahun 2017. Capaian APS 7–12 tahun selama periode ini sekaligus menggambarkan bahwa terdapat sebesar 2,44% hingga 2,74% penduduk usia 7–12 tahun yang tidak sedang sekolah di SD/MI. Namun, pada tahun 2019 hingga 2021 terjadi peningkatan APS 7-12 tahun cukup signifikan menjadi 99,77%. Hal ini mengindikasi bahwa hanya terdapat 0,23% penduduk pada usia 7-12 tahun yang belum menikmati pendidikan ditingkat SD/MI

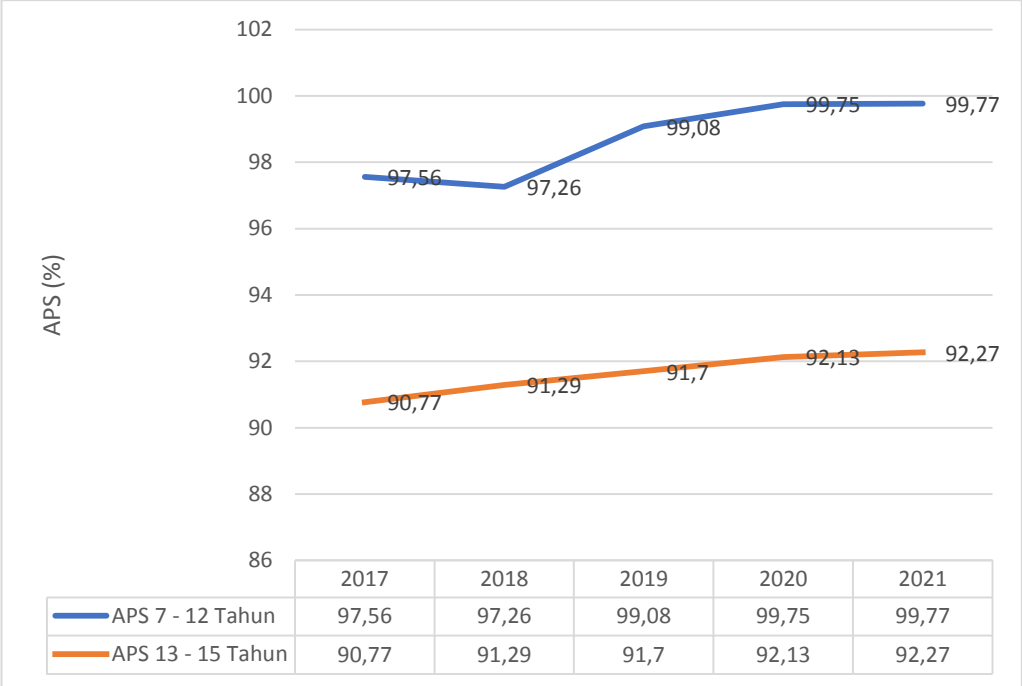

	2017	2018	2019	2020	2021
APS 7 - 12 Tahun	97,56	97,26	99,08	99,75	99,77
APS 13 - 15 Tahun	90,77	91,29	91,7	92,13	92,27

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id, Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022

Gambar 2.40
Perkembangan APS 7 – 12 Tahun dan APS 13 – 15 Tahun
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Pada periode yang sama, APS 13–15 tahun Kabupaten Indragiri Hilir juga menunjukkan trend yang meningkat yaitu dari 90,77% pada tahun 2017 menjadi 92,27% pada tahun 2021. Meski capaian APS 13–15 tahun Indragiri Hilir meningkat namun nilainya lebih rendah dibanding APS 7– 12 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk umur 13–15 tahun yang tidak berpartisipasi pada pendidikan SMP/MTs jauh lebih besar yaitu 7,73%-9,23% dari total penduduk usia 13 – 15 tahun. Oleh

karena itu, upaya peningkatan APS 13–15 tahun harus menjadi perhatian dalam pembangunan pendidikan Indragiri Hilir ke depan. Pada tahun 2020, capaian APS 13–15 tahun Indragiri Hilir ini adalah lebih rendah jika disbanding dengan kabupaten sekitarnya (Pelalawan 98,23% dan Indragiri Hulu 94,49%) dan Provinsi Riau (95,51%).

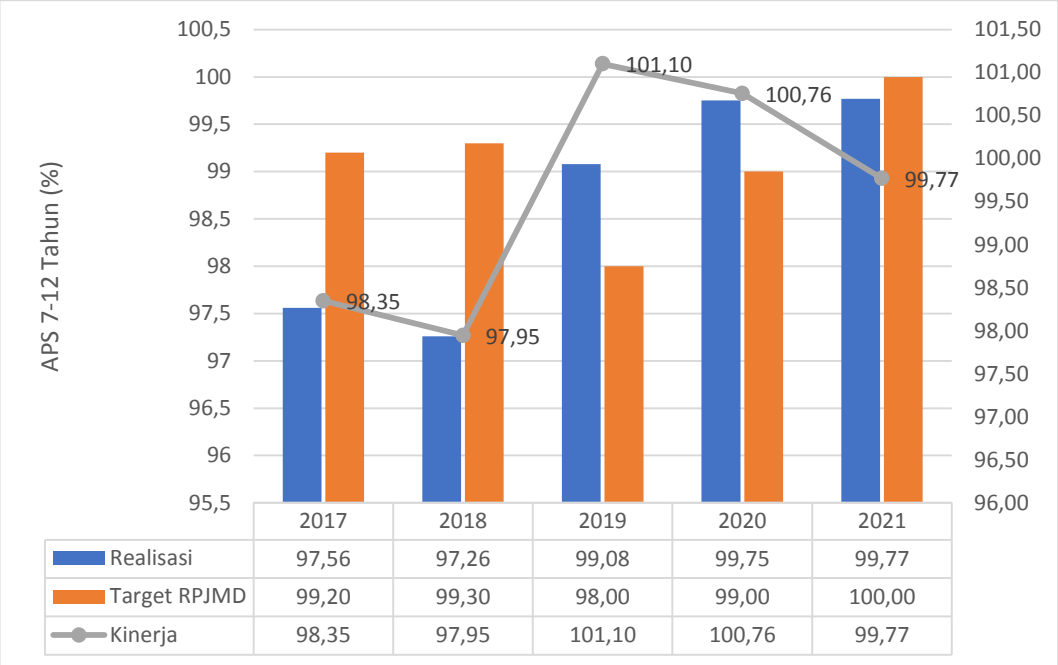

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	97,56	97,26	99,08	99,75	99,77
Target RPJMD	99,20	99,30	98,00	99,00	100,00
Kinerja	98,35	97,95	101,10	100,76	99,77

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022

Gambar 2.41
Kinerja Indikator APS 7–12 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, pada tahun 2017-2021 telah ditetapkan target APS 7–12 tahun Indragiri Hilir yaitu sebesar 98,00% pada tahun 2019 meningkat menjadi 100,00% pada tahun 2021. Selama periode 2017-2021, capaian realisasi APS 7–12 tahun berfluktuatif meningkat namun pada umumnya masih dibawah target yang ditetapkan. Realisasi kinerja berkisar antara 97,95% - 101,10% yang terkategori Sangat Tinggi.

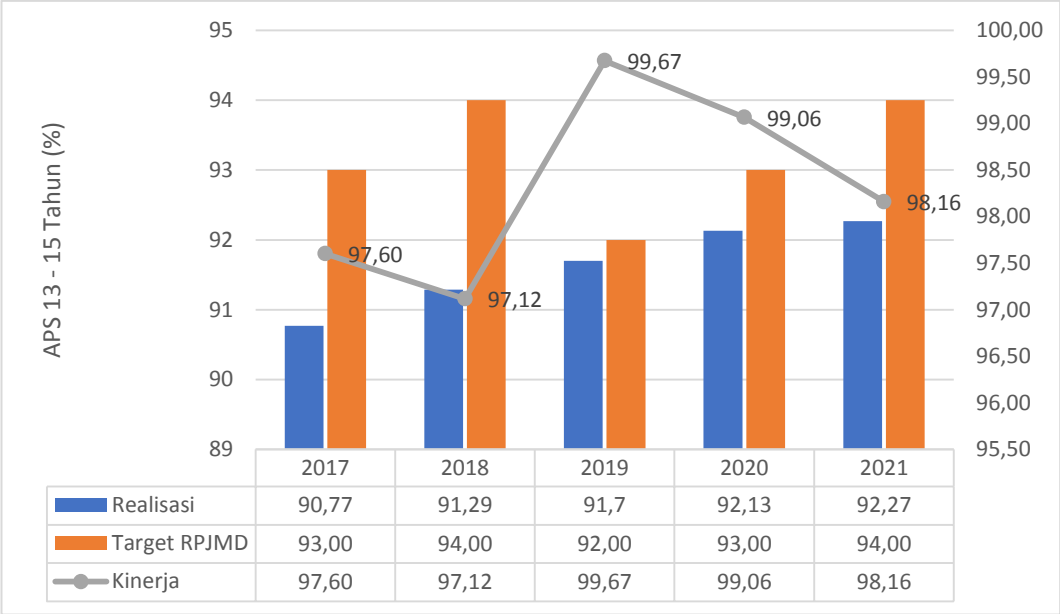

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022

Gambar 2.42
Kinerja Indikator APS 13 – 15 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD Indragiri Hilir, pada tahun 2017-2021 telah ditargetkan APS 13-15 tahun sebesar 93% - 94%. Realisasi APS SMP/MTs berfluktuatif meningkat dan umumnya dibawah target RPJMD. Meski capaian APS 13–15 tahun dibawah target namun realisasi kinerjanya terkategori Sangat Tinggi dengan rentang realisasi kinerja antara 97,12% - 99,67%.

c. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APTS) adalah proporsi anak menurut kelompok usia 7–12 tahun, 13–15 tahun dan 16–18 tahun) yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Selama periode 2017-2021, APTS SD/MI memiliki trend berfluktuatif meningkat yaitu dari 0,05% pada tahun 2017 menjadi 0,70% pada tahun 2021. Dampak pandemi COVID-19 sangat signifikan dirasakan pada tahun 2021, yang mengakibatkan angka putus sekolah SD/MI meningkat secara drastis. Pada tahun 2020, Capaian APTS SD/MI

ini sedikit lebih rendah dibanding capaian APTS Provinsi Riau (0,042%). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APTS SD/MI menurun sebesar -46,92% per tahun.

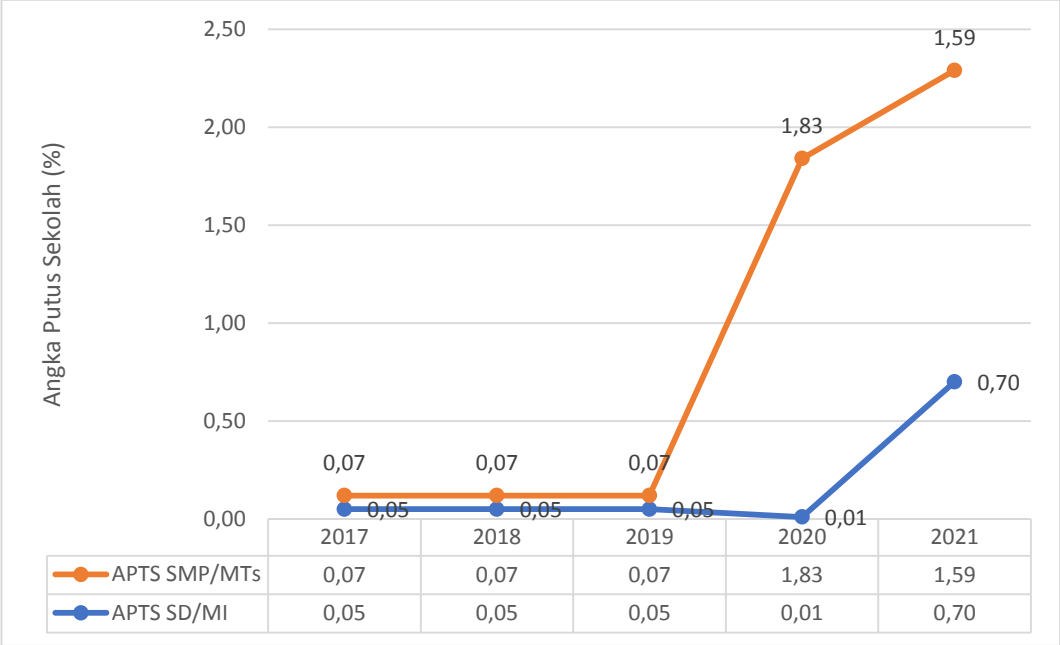

	2017	2018	2019	2020	2021
APTS SMP/MTs	0,07	0,07	0,07	1,83	1,59
APTS SD/MI	0,05	0,05	0,05	0,01	0,70

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id , Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.43
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

Pada periode yang sama, APTS SMP/MTs memiliki trend yang sama dengan APTS SD/MI yang memiliki trend berfluktuatif meningkat, namun dengan nilai yang lebih besar. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat putus sekolah di SMP/MTs lebih tinggi dibanding ditingkat SD/MI. Pada tahun 2017, capaian APTS SMP/MTs Indragiri Hilir (0,07%) relatif sama dengan APTS SMP/MTs Provinsi Riau (0,07%). Selama periode 2016-2020 ini, rata-rata pertumbuhan APTS SMP/MTs menurun sebesar -41,31% per tahun.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa APTS SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir menurun dari 0,2% pada tahun 2017 menjadi 0,02% pada tahun 2021. Realisasi APTS

SD/MI 2017 – 2018 masih dibawah target dengan realisasi kinerja sebesar 10% - 50% yang terkagori rendah dan sedang. Pada tahun 2021, realisasi APTS SD/MI mengalami penurunan sangat signifikan seiring dengan meningkatnya APTS SD/MI sebagai akibat dari dampak COVID-19.

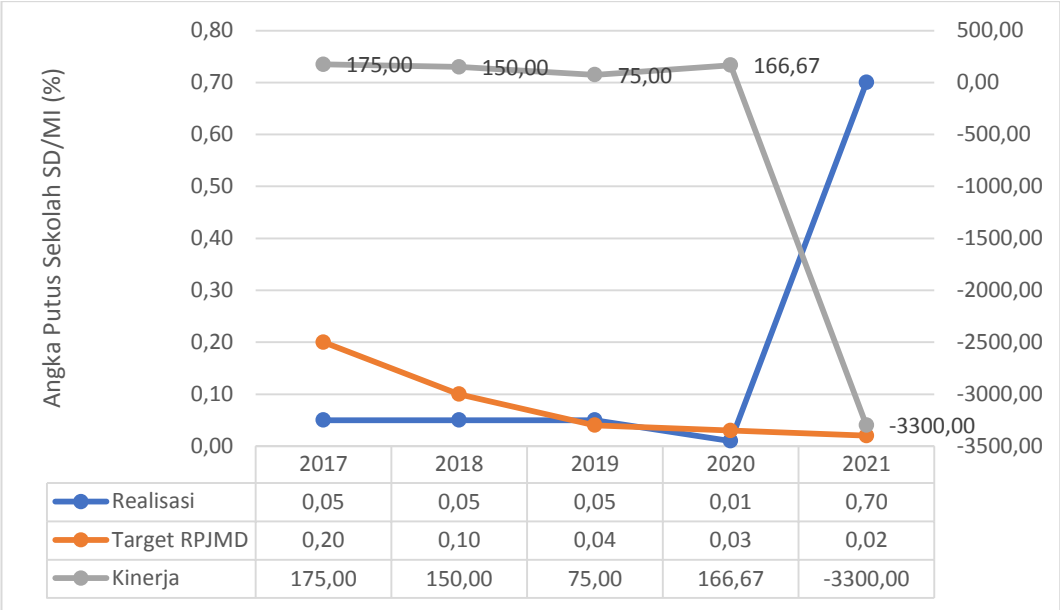

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	0,05	0,05	0,05	0,01	0,70
Target RPJMD	0,20	0,10	0,04	0,03	0,02
Kinerja	175,00	150,00	75,00	166,67	-3300,00

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id, Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.44
Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SD/MI
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017–2021 telah ditetapkan bahwa APTS SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetap menurun dari 0,20% pada tahun 2017 menjadi 0,04% pada tahun 2021. Realisasi APTS SMP/MTs tahun 2017-2018 menunjukkan kondisi sangat tinggi. Namun, sejak tahun 2020 dimana pandemi COVID-19 terjadi, APTS SMP/MTs mengalami peningkatan sangat signifikan. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah baik dijenjang SD/MI maupun SMP/MTs adalah adanya kebijakan belajar jarak jauh yang dilakukan secara daring dimana menggunakan smartphone dan paket data dirasa cukup memberatkan bagi sebagian

orang tua, adanya tekanan ekonomi yang dirasakan orang tua murid sehingga mereka mengajak anak-anaknya untuk bekerja ataupun melakukan migrasi ke daerah baru serta orang tua murid yang memilih untuk segera menikahkan anaknya.

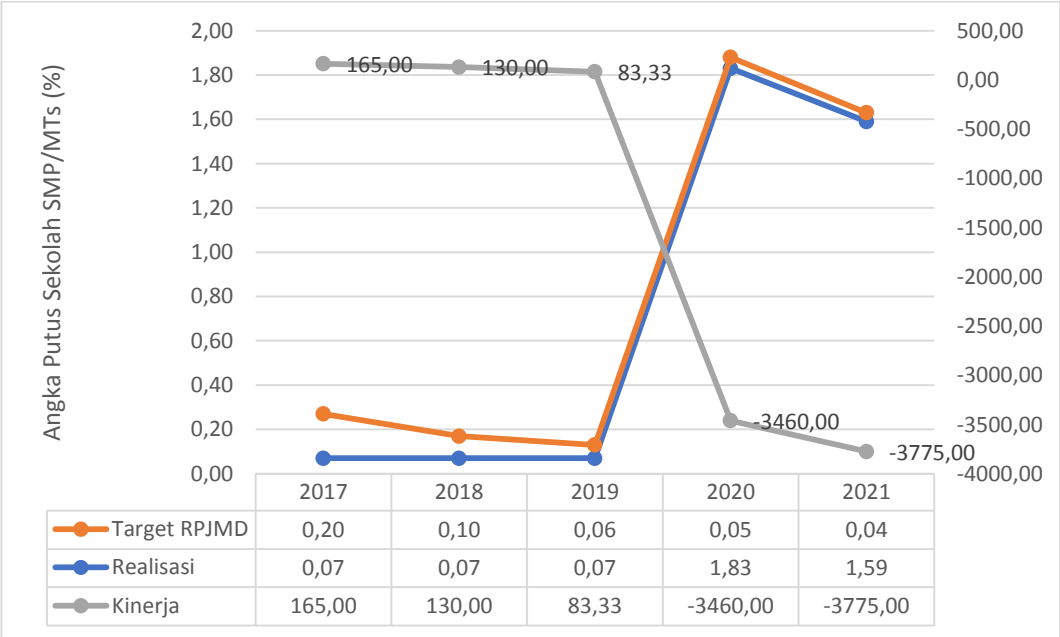

	2017	2018	2019	2020	2021
Target RPJMD	0,20	0,10	0,06	0,05	0,04
Realisasi	0,07	0,07	0,07	1,83	1,59
Kinerja	165,00	130,00	83,33	-3460,00	-3775,00

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id, Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.45.
Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SMP/MTs
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

d. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar (7–12 tahun dan 13–15 tahun). Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Selama periode 2017-2021, rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia 7–12 tahun yang selanjutnya disebut tingkat SD/MI memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2017, rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 72,32% meningkat menjadi 79,95% pada tahun 2021 atau setiap sekolah SD/MI melayani 122,91 orang penduduk

usia 7–12 tahun, meningkat menjadi 131,94 orang penduduk usia 7-12 tahun.

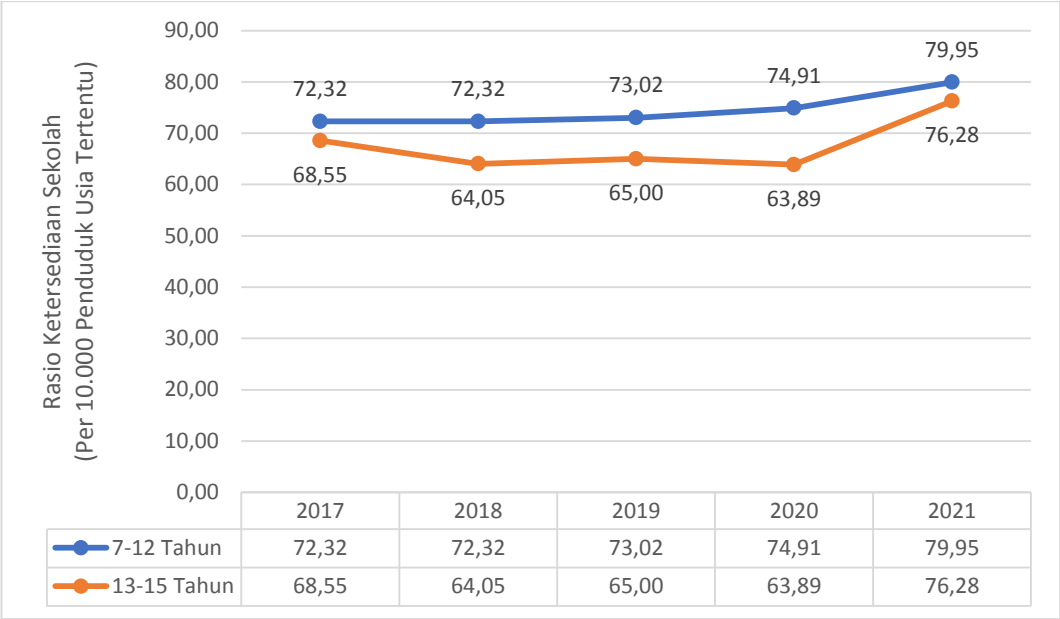

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id, Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.46.
Perkembangan Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13–15 tahun yang selanjutnya disebut tingkat SMP/MTs memiliki trend yang juga berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2017 rasionya sebesar 68,55 meningkat menjadi 76,28% pada tahun 2021. Namun angka rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs jauh lebih kecil dibanding dengan angka rasio ketersediaan sekolah SD/MI. Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan sekolah SMP/MTs hanya mampu menampung sebesar 66,52% hingga 71,36% dari penduduk usia 13 – 15 tahun atau setiap sekolah SMP/MTs melayani sebanyak 127,37 – 150,33 orang penduduk umur 13 – 15 tahun. Sama halnya dengan permasalahan diatas adalah rendahnya persentase bangunan dengan kondisi yang baik. Pada tahun 2017, persentase bangunan sekolah SMP/MTs dengan kondisi baik di Indragiri Hilir sebesar 20,15%, lebih rendah dibandingkan kabupaten

sekitarnya seperti Indragiri Hulu (25,85%) dan Pelalawan (39,76%) serta Provinsi Riau (28,54%). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 1,98% per tahun.

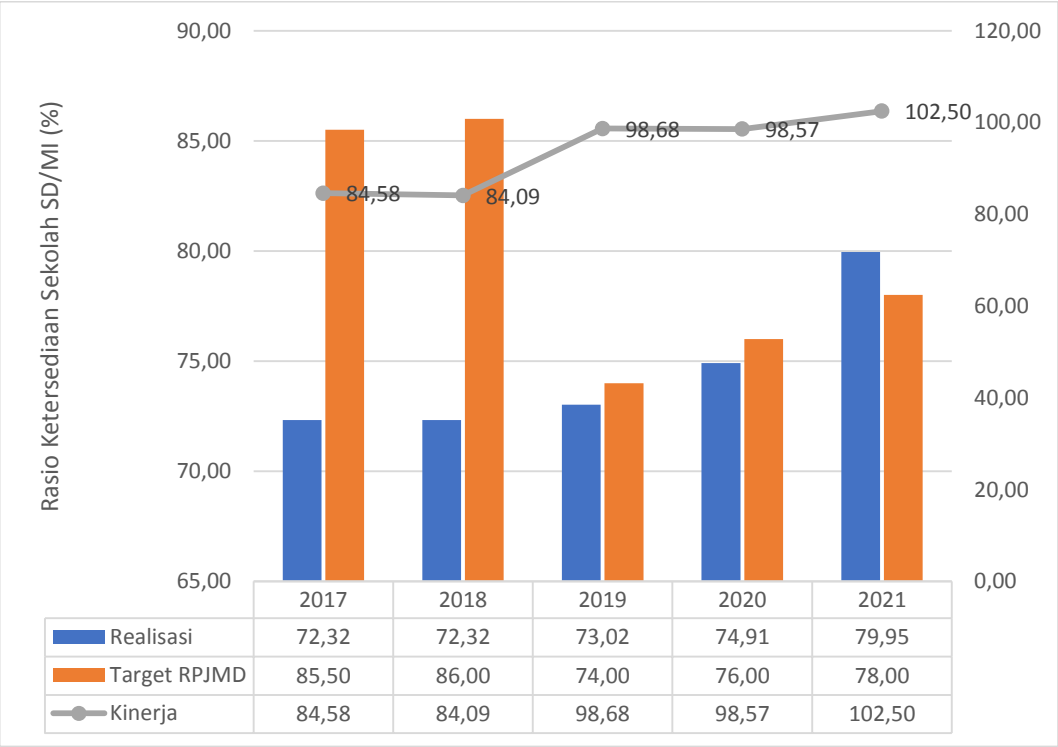

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	72,32	72,32	73,02	74,91	79,95
Target RPJMD	85,50	86,00	74,00	76,00	78,00
Kinerja	84,58	84,09	98,68	98,57	102,50

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id, Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.47
Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia 7 – 12 tahun
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 telah ditetapkan bahwa rasio ketersediaan sekolah SD/MI adanya peningkatan yaitu dari 74% tahun 2019 menjadi 78% tahun 2021. Realisasi rasio ketersediaan sekolah SD/MI memiliki trend yang terus meningkat. Realisasi kinerja sebesar 98,57% dan 102,50% yang terkategori Sangat Tinggi.

Begitu pula halnya dengan indikator rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs per 10.000 penduduk, dimana realisasinya juga terus mengalami peningkatan. Realisasi capaian indikator ini selama periode

2019 sampai 2021 yaitu sebesar 65% menjadi 76,28%, dengan realisasi kinerja berkisar antara 97,01%-104,49% yang terkategori Sangat Tinggi.

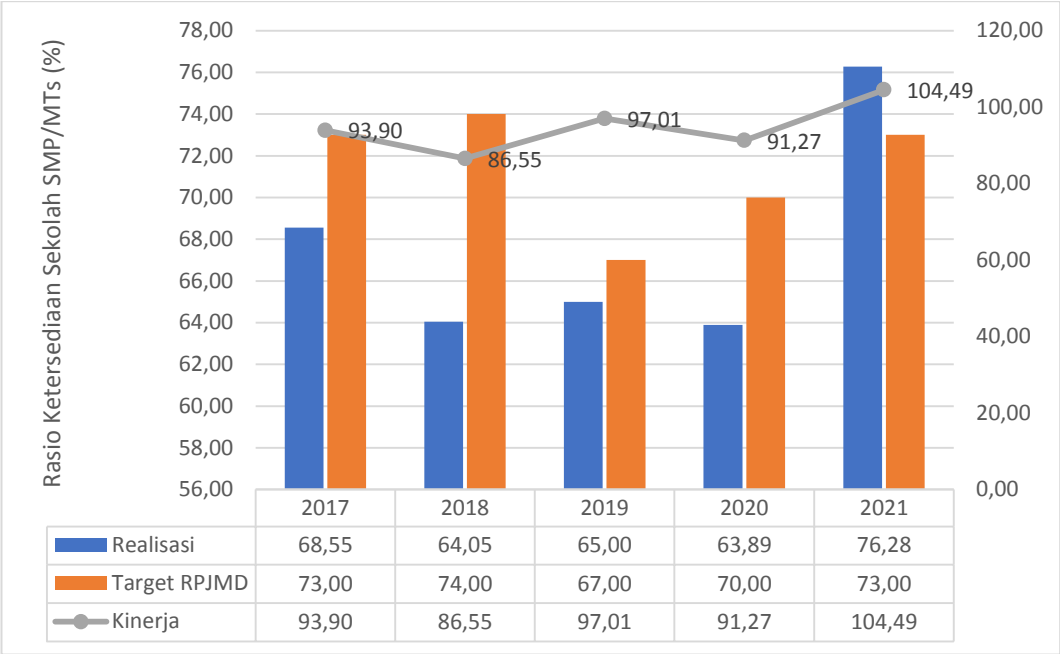

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	68,55	64,05	65,00	63,89	76,28
Target RPJMD	73,00	74,00	67,00	70,00	73,00
Kinerja	93,90	86,55	97,01	91,27	104,49

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.48
Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia 13 - 15 tahun
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

e. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah rasio antara jumlah guru tingkat pendidikan dasar dengan jumlah penduduk yang masuk kategori umur pendidikan dasar (7–12 tahun dan 13–15 tahun). Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar disamping mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru. Selama periode 2017-2021, rasio guru terhadap 10.000 murid SD/MI di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif menurun yaitu dari 1005,19 pada tahun 2017 menjadi 600 pada tahun 2021. Rasio sebesar 600 ini bermakna bahwa setiap 10.000 murid SD/MI dilayani oleh rata-rata sebanyak 600 orang guru atau setiap guru melayani 13,39 murid SD/MI. Selama periode ini, seorang guru SD/MI di Kabupaten Indragiri Hilir melayani sebanyak 13,30 – 16,20 orang murid SD/MI, yang merupakan rasio yang cukup baik. Namun

permasalahan yang umum terjadi adalah rasio ini kurang baik untuk daerah sulit dan rendah atau baik didaerah perkotaan.

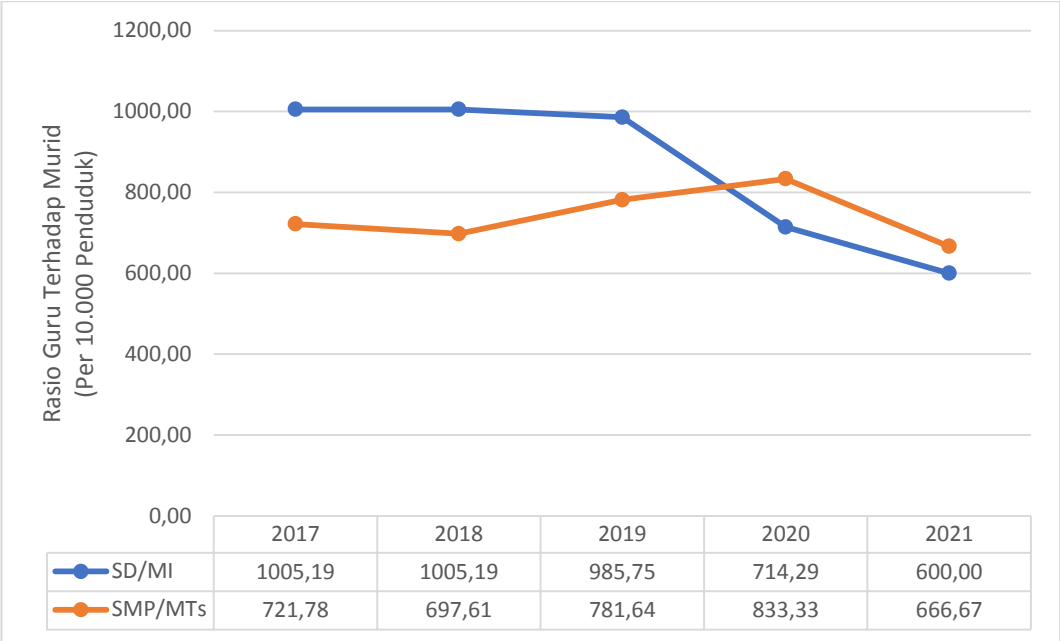

	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI	1005,19	1005,19	985,75	714,29	600,00
SMP/MTs	721,78	697,61	781,64	833,33	666,67

Sumber: https://sipd.kemendagri.go.id, Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.49
Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio guru terhadap murid SD/MI (Guru per 10.000 murid SD/MI) menurun dari 1005,19 menjadi 600 guru per 10.000 murid SD/MI. Realisasi capaian indikator rasio guru terhadap murid SD/MI pada tahun 2017-2019 berada diatas target sehingga capaian kinerja sebesar 138,84%-182,76% yang terkategori Sangat Tinggi. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 dimana pandemi COVID-19 melanda, realisasi indikator ini mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai 600 saja dengan capaian kinerja hanya 78,95% dengan kategori sedang.

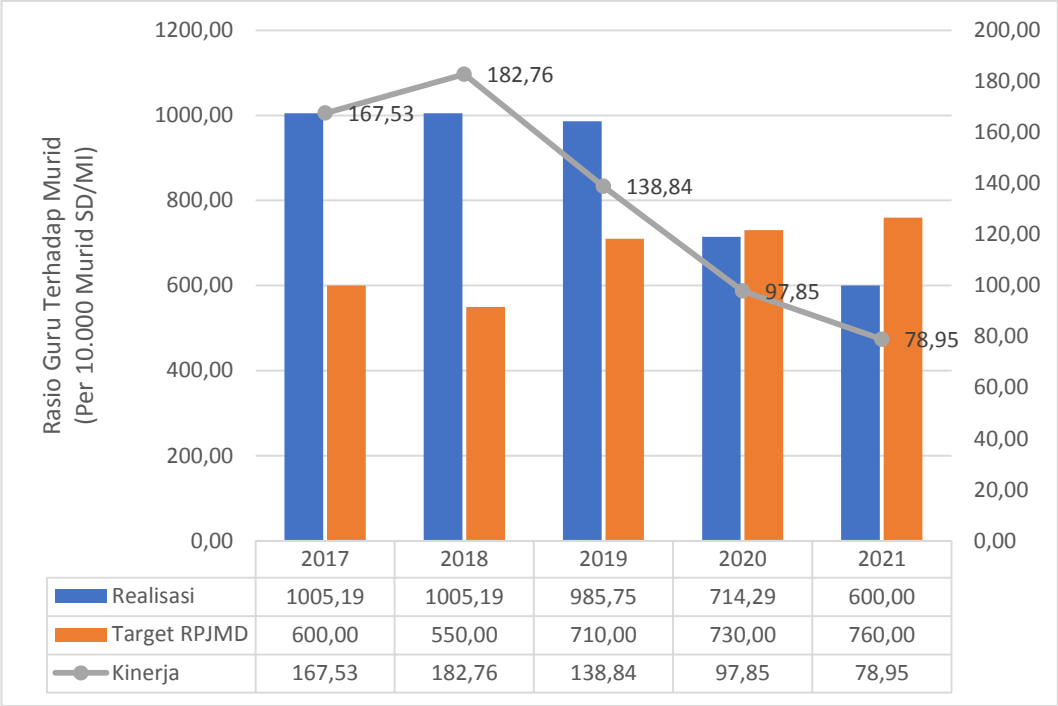

Sumber: https://sipd.kemendagri.go.id, Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.50
Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017–2021

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 telah ditetapkan bahwa indikator rasio guru terhadap murid SMP/MTs (Guru per 10.000 murid SMP/MTs) meningkat dari 1007-1009 guru per 10.000 murid SMP/MTs. Realisasi indikator guru terhadap murid SMP/MTs ini terus mengalami penurunan dari 781,64 tahun 2019 menjadi 666,67 tahun 2021 dengan realisasi kinerja sebesar 66,07% - 82,67% yang terkategori Sedang – Tinggi.

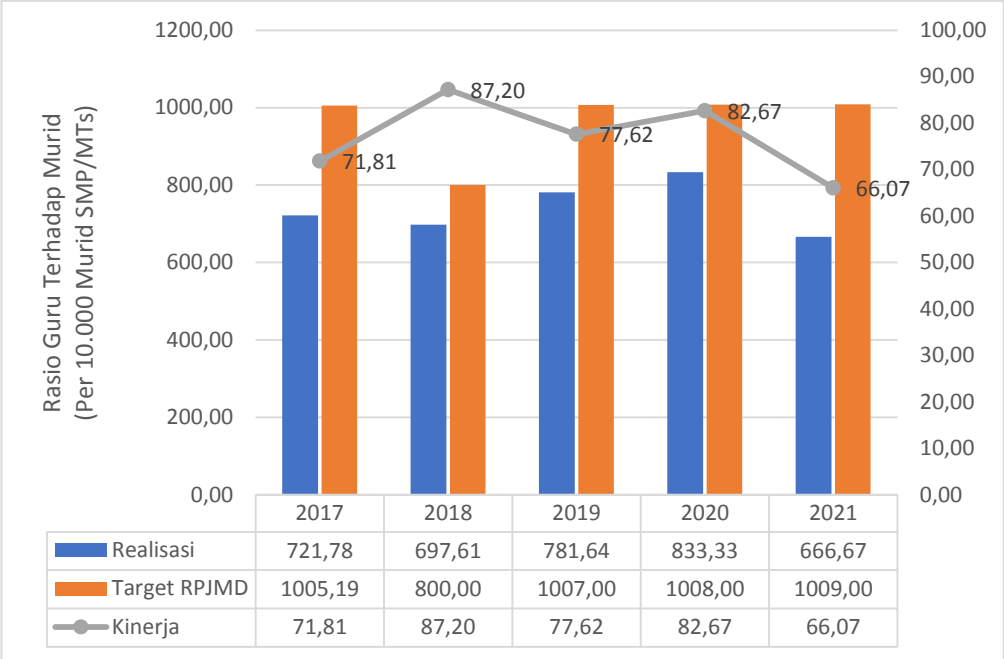

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	721,78	697,61	781,64	833,33	666,67
Target RPJMD	1005,19	800,00	1007,00	1008,00	1009,00
Kinerja	71,81	87,20	77,62	82,67	66,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.51
Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

f. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidikan profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana S1 atau Diploma Empat (D.IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian) memiliki sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

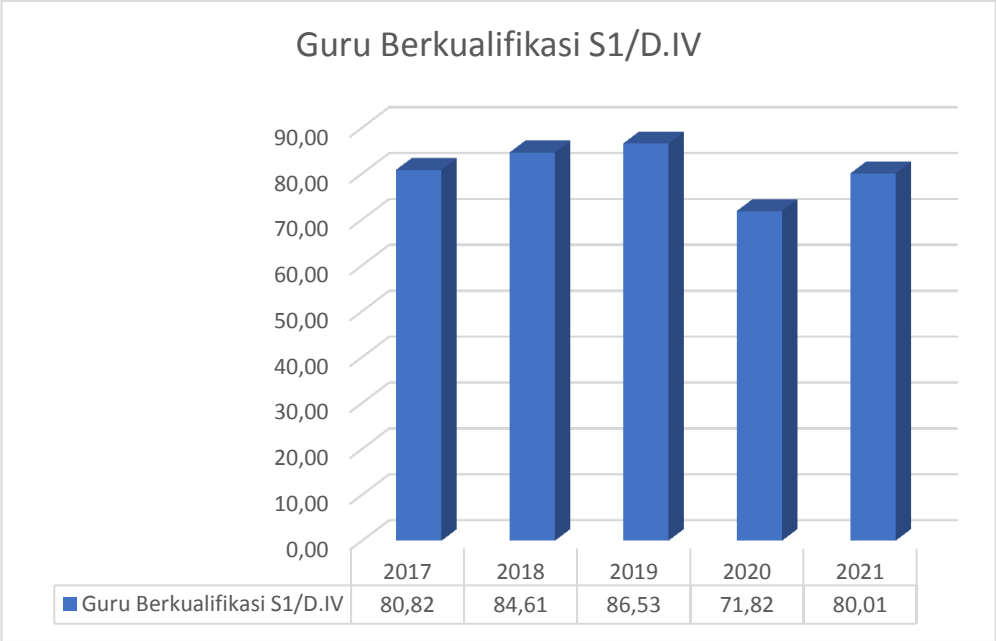

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id, Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.52
Perkembangan Guru Berkualifikasi S1/D.IV Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

Selama periode 2017-2021, perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2017 persentase guru (SD/MI dan SMP/MTs) yang memiliki kualifikasi S1/D.IV sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 20 tahun 2003 dan UU No. 14 tahun 2005 serta PP No. 19 tahun 20015, sebesar 80,82% tahun 2017 meningkat menjadi 86,53% pada tahun 2019. Capaian persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV Indragiri Hilir tahun 2017 ini lebih rendah dibanding capaian Kabupaten Pelalawan (90,58%), Indragiri Hulu (87,21%), dan Kuansing (84,26%) serta Provinsi Riau (91,58%). Bila dibandingkan capaian antara guru SD/MI dengan SMP/MTs menunjukkan bahwa persentase capaian Guru tingkat SD/MI yang memiliki kualifikasi S1/D.IV sebesar 76,93%, adalah yang terendah diikuti guru SMP/MTs (84,36%). Rata-rata pertumbuhan guru yang memiliki kualifikasi S1/D.IV meningkat sebesar 29,75% per tahun.

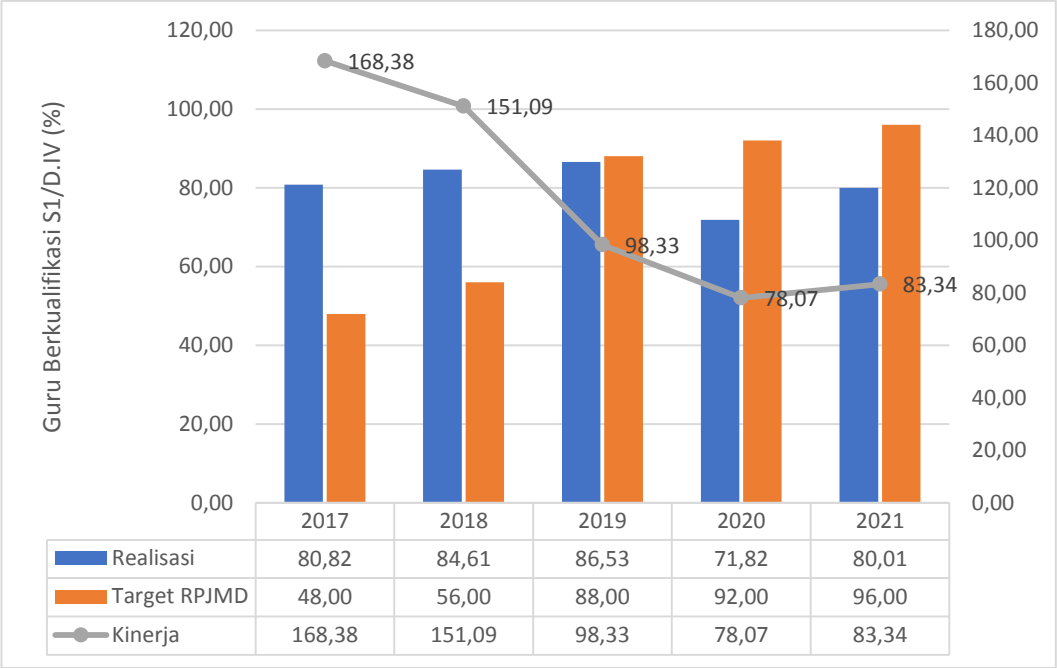

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.53
Kinerja Indikator Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan target bahwa indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV ditargetkan meningkat dari 48% pada tahun 2017 menjadi 96% pada tahun 2021. Pada tahun 2017 dan 2018, realisasi indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV mengalami peningkatan dari 80,82% tahun 2017 menjadi 86,53% tahun 2019, dengan realisasi kinerja sebesar 98,33%-168,38% dengan kategori sangat tinggi. Pada tahun 2020–2021, realisasi indikator ini mengalami penurunan seiring dengan makin meningkatnya target pada RPJMD dengan capaian kinerja 78,07% tahun 2020 dengan kategori capaian Sedang, dan kinerja tahun 2021 sebesar 83,34% dengan kategori Tinggi.

g. SPM Bidang Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan merupakan kewenangan kabupaten/kota. Di dalamnya mencakup : (a) pendidikan dasar oleh kabupaten/kota dan; (b) pendidikan kesetaraan; (c) pendidikan anak usia dini. Batas waktu pencapaian SPM bidang pendidikan adalah setiap tahun. Rincian mengenai jenis pelayanan dasar dan indikator SPM bidang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.11. berikut.

Tabel 211.
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM
Bidang Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN				Batas waktu capaian
			2018	2019	2020	2021	
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 % Setiap Tahun S D/Mi, SMP/MTs)	95,01	95,28	95,29	95,30	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	85,10	85,18	85,19	85,20	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	23,20	23,49	23,51	23,52	

Sumber : https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Selama Periode 2018 – 2021, pencapaian SPM pendidikan dasar Kabupaten Indragiri hilir ditunjukkan pada tabel diatas. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan 3 indikator (100%) tetapi dalam capaiannya masih dibawah target yang ditetapkan.

Permasalahan/hambatan yang dihadapai dalam pencapaian SPM bidang pendidikan dasar di Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis pelayanan dan indikator, solusinya uraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.12.
Permasalahan/Hambatan Dalam Penerapan Serta Solusi dalam pencapai SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
1.	Perluasan Akses Pendidikan Dasar	- Persentase ketersediaan satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	Kondisi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan ketinggian rata-rata 0-3 dpl, dengan kondisi daratan merupakan lahan gambut	Perlunya pendanaan pembangunan sarana prasarana sekolah yang cukup besar
2.	Rasio rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	- Persentase peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	Penyebaran penduduk usia sekolah yang tidak merata	Perlunya penyelenggaran sekolah filial atau sekolah non induk
3.	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang	- Persentase SMP dan MTs tersedia ruang	Jumlah tenaga guru mata	Penerimaan guru PNS atau Non PNS

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
	laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	pelajaran IPA yang masih kurang	yang memiliki kualifikasi pendidikan jurusan IPA linier dengan
4.	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	- Persentase SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	Ketersediaan anggaran yang belum dapat memenuhi kebutuhan ruang kepala seko0lah dan ruang guru beserta perabotannya	Mengalokasikan sumber pendanaan melalui sumber pendanaan dari sumber lain seperti, Dana Alokasi Khusus, APBN, dan APBD Provinsi Riau
5.	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	- Persentase SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
6.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	- Persentase setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
7.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat	- Persentase SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
	pendidik;	pendidik;		
8.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	- Persentase setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
9.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	- Persentase setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
10.	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	- Persentase setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Masih terdadapat Kepala SD/MI yang belum berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Izin belajar ataupun tugas belajar yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir, maupun sumber pendanaan lain
11.	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	- Persentase setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Masih terdadapat Kepala SMP/MTs yang belum berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Izin belajar ataupun tugas belajar yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir, maupun sumber pendanaan lain
12.	Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi	- Persentase setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi	Masih terdadapat Pengawas Sekolah yang belum berkualifikasi akademik S-1 atau	Izin belajar ataupun tugas belajar yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir,

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
	akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	maupun sumber pendanaan lain
13.	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	- Persentase Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	Ketersediaan anggaran belum maksimal dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	Pengalokasian anggaran melalui sumber-sumber lain, seperti :DAK, APBN dan APBD Provinsi
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	- Persentase Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	Keterbatasan tenaga pengawas dan keterbatasan pendanaan bagi pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan	Pengalokasian anggaran melalui sumber-sumber lain, seperti :DAK, APBN dan APBD Provinsi

2.1.3.1.2. Kesehatan

Layanan urusan wajib dasar bidang kesehatan dianalisis dari aspek (i) rumah sakit, (ii) Puskesmas, (iii) Dokter, Perawat dan Bidan, (iv) cakupan.

a. Rasio Rumah Sakit

Pada tahun 2021, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 3 rumah sakit pemerintah. Selama periode 2017 – 2021, jumlah rumah sakit tidak mengalami perubahan dan yang berubah adalah jumlah penduduk yang meningkat. Selama periode 2017 - 2021, rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Indragiri Hilir relatif tetap yaitu sebesar 0,0042 yang berarti setiap 1 rumah sakit melayani sebanyak 219.341 orang penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2021, capaian rasio rumah sakit Indragiri Hilir

lebih rendah dibanding Indragiri Hulu dan Provinsi Riau yang masing-masingnya sebesar 0,0067 dan 0,0092.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, rasio ideal daya tampung RS adalah 1.000 penduduk : 1 tempat tidur. Pada tahun 2021, jumlah penduduk sebanyak 658.025 jiwa maka dibutuhkan jumlah tempat tidur sebanyak 658 tempat tidur. Total tempat tidur ketiga rumah sakit umum daerah di Indragiri Hilir sebanyak 257 tempat tidur sehingga masih kurang sebanyak 398 tempat tidur. Olah karena itu, upaya peningkatan jumlah tempat tidur sehingga ideal 1 tempat tidur per 1.000 penduduk disamping peningkatan sarana dan prasarana layanan rumah sakit perlu mendapat perhatian pada pembangunan ke depan.

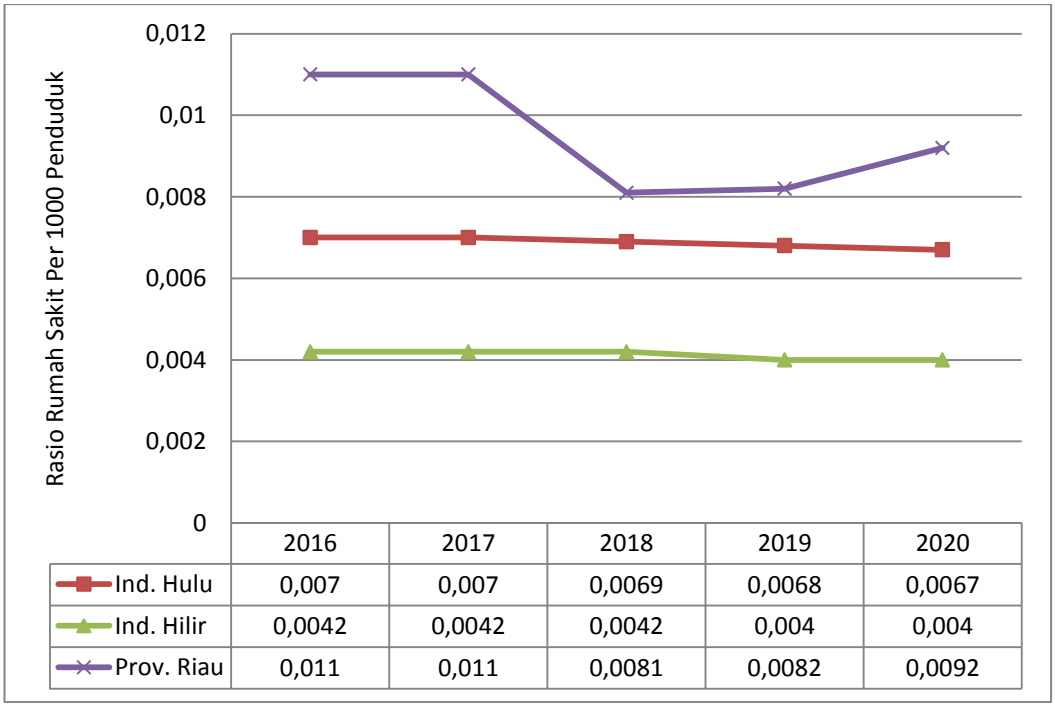

	2016	2017	2018	2019	2020
Ind. Hulu	0,007	0,007	0,0069	0,0068	0,0067
Ind. Hilir	0,0042	0,0042	0,0042	0,004	0,004
Prov. Riau	0,011	0,011	0,0081	0,0082	0,0092

Sumber : Provinsi Riau dalam Angka, Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.54
Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2016–2020

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk telah ditetapkan terus meningkat meski belum ideal yaitu sebesar 0,009 tahun 2017 meningkat

menjadi 0,0042 pada tahun 2021. Pada tahun 2019, realisasi rasio rumah sakit per 1.000 penduduk sesuai target yaitu 0,0040 sehingga realisasi kinerja sebesar 95,24% dan terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2021, realisasi indikator ini sebesar 0,0060 dengan kinerja 142,86% dengan kategori sangat tinggi.

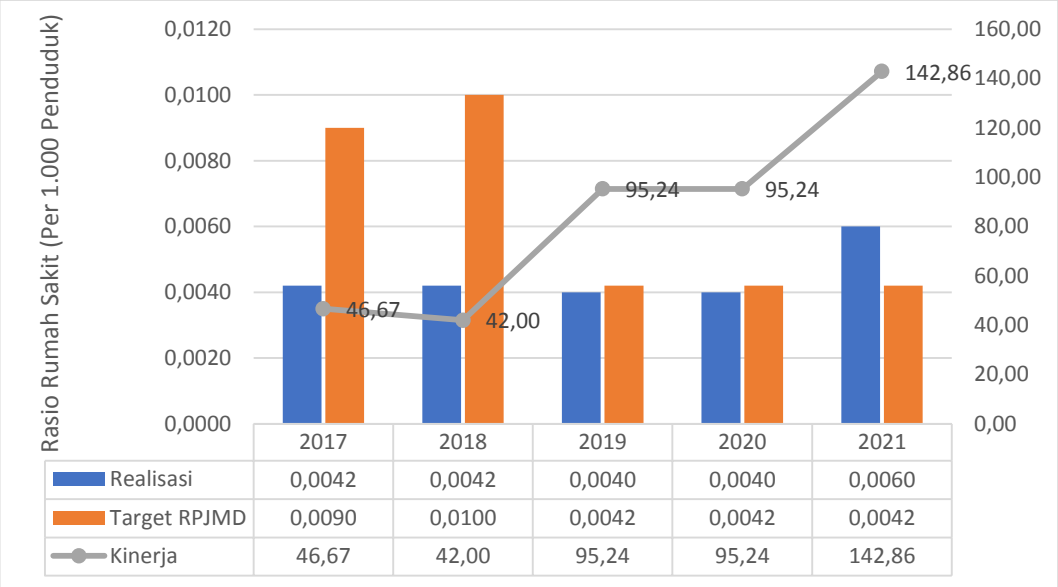

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	0,0042	0,0042	0,0040	0,0040	0,0060
Target RPJMD	0,0090	0,0100	0,0042	0,0042	0,0042
Kinerja	46,67	42,00	95,24	95,24	142,86

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id, Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.55.
Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

b. Rasio Puskesmas

Puskesmas adalah organisasi fungsional yang meyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Selama periode 2016 – 2020, perkembangan rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2020, jumlah puskesmas di Indragiri Hilir sebanyak 31 puskesmas lebih banyak dari jumlah kecamatan (20 kecamatan). Rasio puskesmas per 1.000 penduduk sebesar 0,038 atau 1 puskesmas rata - rata melayani sebanyak 27.424 penduduk pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 0,041 atau setiap puskesmas melayani

sebanyak 21.126 penduduk pada tahun 2020. Capaian rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hilir ini masih dibawah capaian rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hulu.

Rasio puskemas Indragiri hilir sebesar 0,038 – 0,041 per 1.000 penduduk artinya setiap satu puskesmas melayani 38 – 41 dalam 1.000 penduduk. Apalabila kita bagi dengan jumlah penduduk maka, rasio 1 puskesmas di Kabupaten Indragiri Hilir melayani penduduk dengan jumlah berkisar antara 21.126 - 27.424. Rentang jumlah penduduk yang dilayani oleh puskesmas di Indragiri Hilir ini masih memenuhi standar nasional (1 puskesmas melayani 30.000 penduduk). Meski rasio puskesmas telah memenuhi standar nasional dari sisi kuantitas, namun dari segi kualitas sarana dan prasarana relatif masih belum memadai. Kondisi puskesmas, peralatan dan obat-obatan belum mampu memenuhi standar sebuah puskesmas yang baik. Oleh karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas harus menjadi agenda pembangunan ke depan.

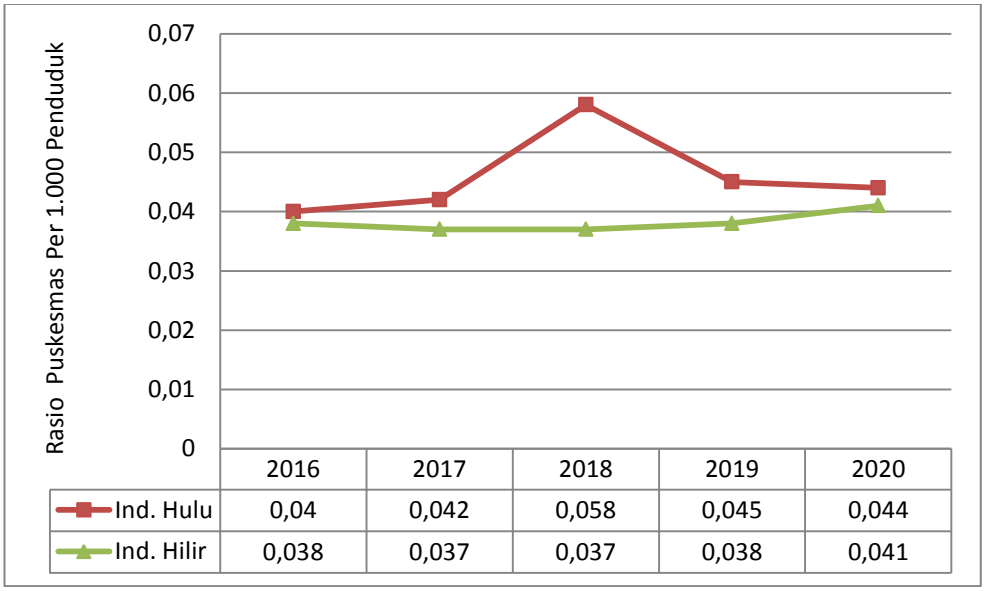

	2016	2017	2018	2019	2020
Ind. Hulu	0,04	0,042	0,058	0,045	0,044
Ind. Hilir	0,038	0,037	0,037	0,038	0,041

Sumber : https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.56
Perkembangan Rasio puskesmas per 1.000 penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, pada tahun 2017–2021 telah ditetapkan bahwa indikator rasio puskesmas per 1.000 penduduk ditargetkan terus meningkat yaitu dari 0,037 pada tahun 2017 menjadi 0,04

pada tahun 2021. Selama periode 2017 hingga 2021, capaian rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hilir berada dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 86,05–105,13% dengan kategori tinggi-sangat tinggi.

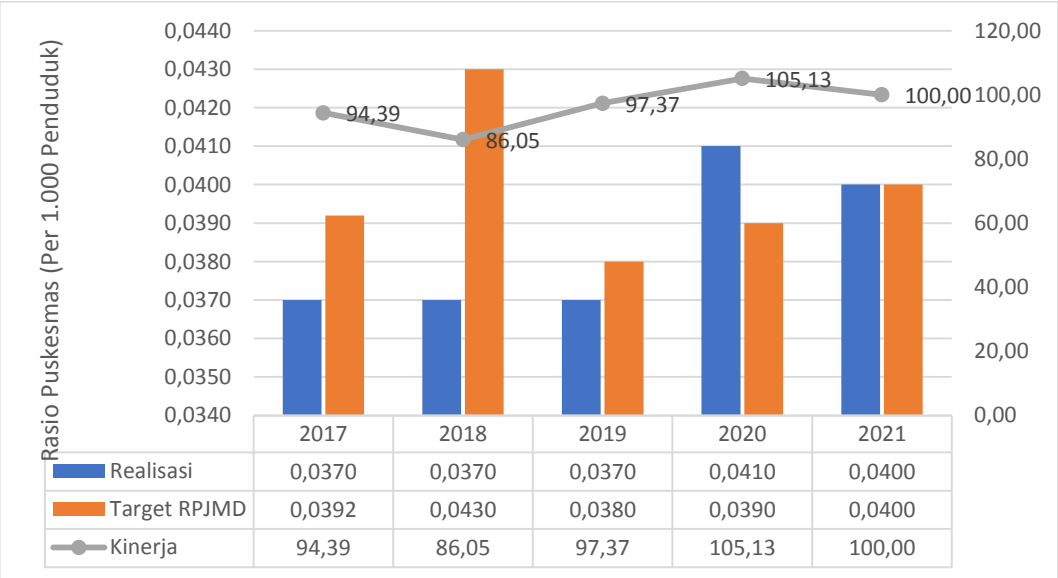

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	0,0370	0,0370	0,0370	0,0410	0,0400
Target RPJMD	0,0392	0,0430	0,0380	0,0390	0,0400
Kinerja	94,39	86,05	97,37	105,13	100,00

Sumber : https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id, Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.57.
Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017–2021

c. Rasio Dokter Spesialis

Selama periode 2016-2020, jumlah dokter spesialis yang Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 34 42 orang. Selama periode ini, rasio dokter spesialis per 1.000 penduduk memiliki tren berfluktuatif meningkat berkisar antara yaitu dari 0,029 pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,032 pada tahun 2020 yang bermakna bahwa setiap 1 orang dokter sepesialis melayani penduduk berkisar antara 15.593 20.972 penduduk. Kondisi rasio dokter spesialis Indragiri Hilir masih dibawah standar (15 dokter spesialis melayani 100.000 penduduk atau 1 dokter spesialis melayani 6.946 penduduk). Dibandingkan dengan capaian rasio dokter spesialis Indragiri Hulu, capaian rasio dokter spesialis Indragiri Hilir masih dibawah capaian rasio dokter spesialis Indragiri Hulu. Agar mencapai

jumlah ideal, maka jumlah dokter spesialis di Indragiri Hilir sebanyak 52 orang dokter spesialis dari berbagai keahlian. Kondisi ini perlu menjadi target pada pembangunan kesehatan ke depan.

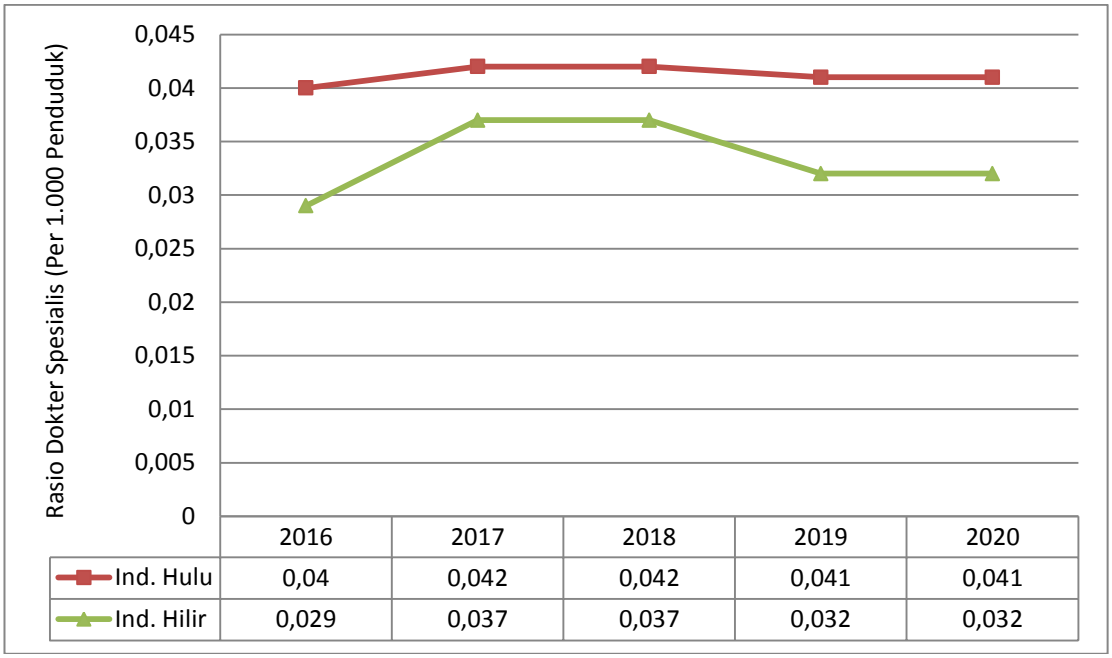

	2016	2017	2018	2019	2020
Ind. Hulu	0,04	0,042	0,042	0,041	0,041
Ind. Hilir	0,029	0,037	0,037	0,032	0,032

Sumber : https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.58
Perkembangan Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2020

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio dokter spesialis per 1.000 sebesar terus meningkat meski jauh dari ideal yaitu sebesar 0,05-0,106. Selama periode 2016-2018, capaian target indikator rasio dokter spesialis terus dibawah target dimana pada tahun 2017-2018 memiliki realisasi kinerja sebesar 34,91%-49,33% yang terkategori Sangat Rendah. Pada tahun 2019-2020, realisasi kinerja indikator rasio dokter spesialis diperkirakan meningkat, berkisar antara 76,19%-80,00% dan terkategori sedang.

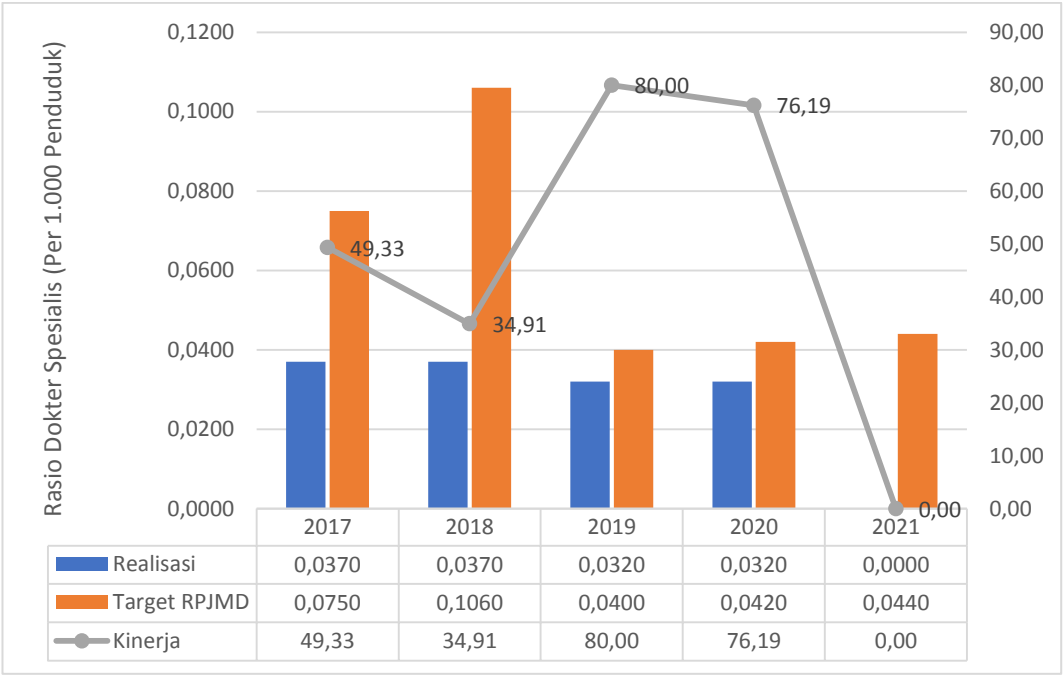

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	0,0370	0,0370	0,0320	0,0320	0,0000
Target RPJMD	0,0750	0,1060	0,0400	0,0420	0,0440
Kinerja	49,33	34,91	80,00	76,19	0,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2022

Gambar 2.59.
Kinerja Indikator Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017–2021

d. Rasio Dokter Umum

Selama periode 2016–2020, rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2016, jumlah dokter umum umum di Indragiri Hilir sebanyak 60 orang dengan rasio dokter umum per 1.000 penduduk sebesar 0,108 yang berarti setiap 1 orang dokter melayani sebanyak 11.883 orang menduduk. Jumlah dokter umum meningkat menjadi 87 orang pada tahun 2018 atau 1 dokter melayani 8.406 orang penduduk. Capaian rasio dokter umum Indragiri Hilir dimana setiap 1 orang dokter umum melayani antara 8.289–11.883 orang penduduk Indragiri Hilir masih dibawah standar nasional (1 orang dokter umum melayani 2.500 orang penduduk). Capaian rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir ini pada tahun 2016-2020, dibawah capaian rasio Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh karena itu, upaya pencapaian rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir perlu diupayakan terus untuk dicapai. Idealnya sesuai standar nasional, jumlah

dokter umum di Indragiri Hilir tahun 2018 sebanyak 292 dokter, masih kurang sebanyak 205 orang dokter umum.

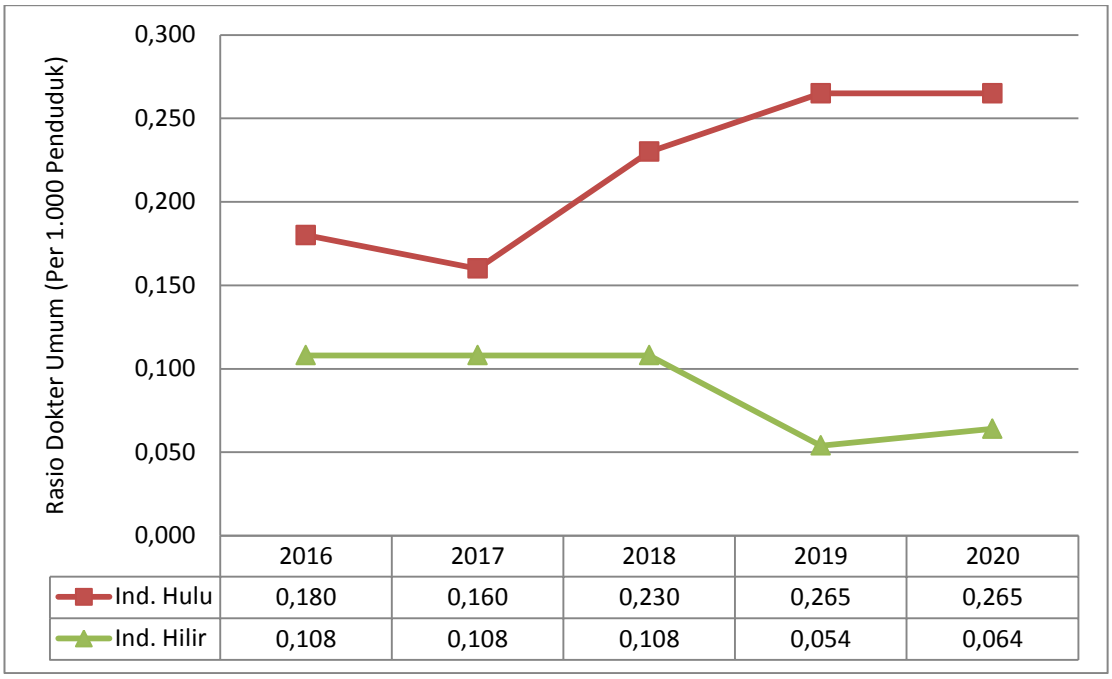

	2016	2017	2018	2019	2020
Ind. Hulu	0,180	0,160	0,230	0,265	0,265
Ind. Hilir	0,108	0,108	0,108	0,054	0,064

Sumber : https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.60
Perkembangan Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016–2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018–2023 telah ditetapkan bahwa target indikator rasio dokter umum per 1.000 penduduk terus meningkat dari 0,23 tahun 2017 meningkat menjadi 0,30 tahun 2021. Realisasi rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir berfluktuatif dan terus dibawah target RPJMD. Pada tahun 2017, rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir sebesar 0,108 dengan realisasi kinerja sebesar 46,96% dan terkategori sedang. Pada tahun 2018 hingga 2020, realisasi kinerja berkisar 32,00%-49,09% dan terkategori Rendah-Sangat Rendah. Pada tahun 2021, capaian realisasi rasio dokter umum sebesar 0,11 dengan realisasi kinerja sebesar 36,67% dan terkategori Sangat rendah. Secara umum, rata-rata capaian realisasi kinerja rasio dokter umum sebesar 49,91% dan terkategori Sangat Rendah.

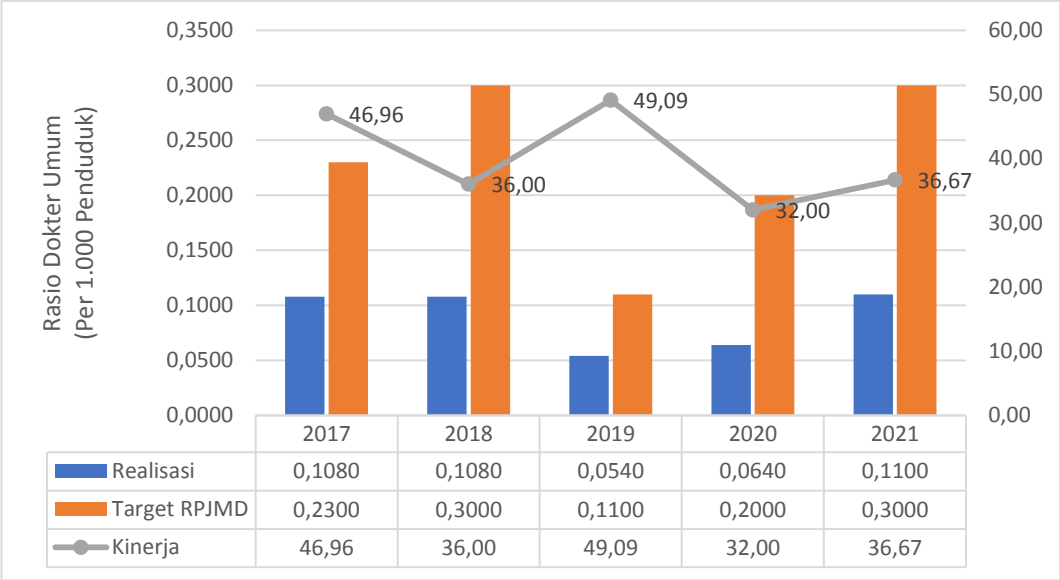

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2022

Gambar 2.61.
Kinerja Indikator Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017–2021

e. Rasio Dokter Gigi

Selama periode 2016–2020, rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2016, jumlah dokter gigi di Indragiri Hilir sebanyak 17 orang dengan rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri Hilir sebesar 0,02 atau setiap 1 orang dokter gigi melayani sebanyak 41.396 orang penduduk. Pada tahun 2018, jumlah dokter gigi meningkat menjadi 33 orang dengan rasio sebesar 0,039 atau setiap 1 orang dokter gigi melayani sebanyak 22.164 penduduk Indragiri Hilir. Capaian layanan 1 orang dokter gigi melayani 21.830 – 41.943 penduduk Indragiri Hilir masih dibawah standar nasional (1 dokter gigi untuk melayani 9.090 penduduk). Bila dibandingkan dengan Indragiri Hulu, capaian rasio dokter gigi Indragiri Hilir lebih rendah dibandingkan dengan capaian rasio dokter gigi Indragiri Hulu. Menurut standar nasional, pada tahun 2019 Indragiri Hilir masih perlu tambahan sebanyak 48 orang dokter gigi.

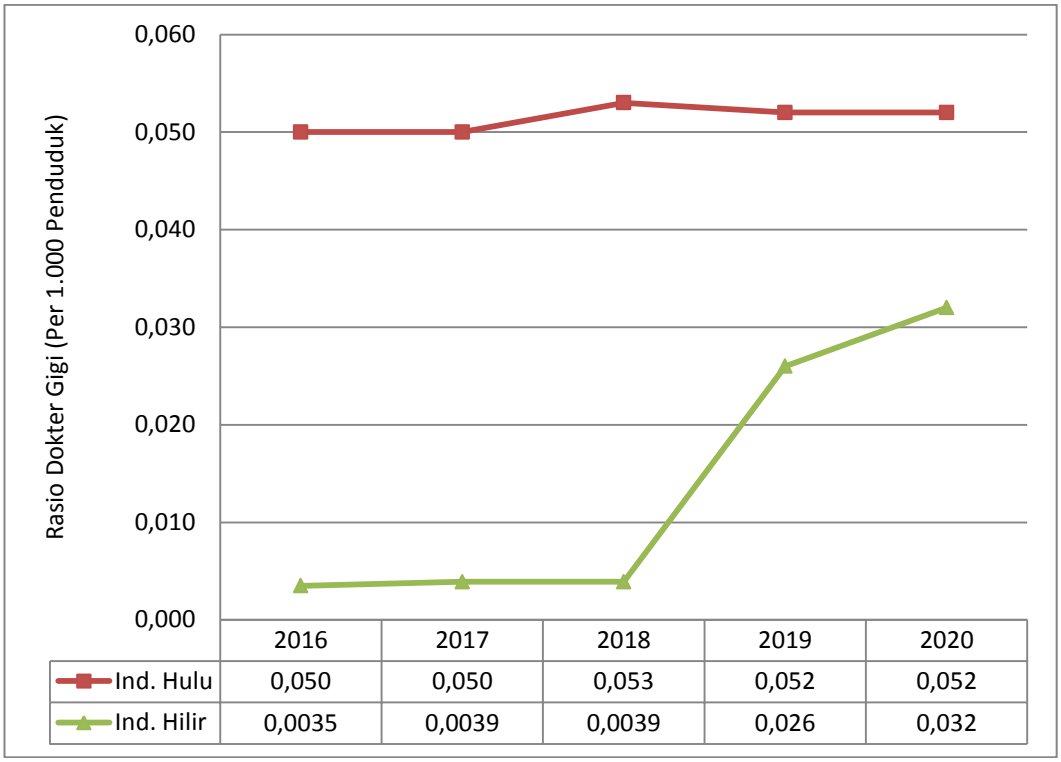

	2016	2017	2018	2019	2020
Ind. Hulu	0,050	0,050	0,053	0,052	0,052
Ind. Hilir	0,0035	0,0039	0,0039	0,026	0,032

Sumber : https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.62.
Perkembangan Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016–2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri Hilir ditetapkan terus meningkat meski belum mencapai rasio ideal yaitu dari 0,09 tahun 2017 menjadi 0,10 pada tahun 2018. Realisasi rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri tahun 2017-2018 berada dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 3,9%-4,38% yang terkategori Sangat Rendah. Pada tahun 2019-2020, realisasi kinerja indikator dokter gigi per 1.000 penduduk berkisar sebesar 320%-433% dan terkategori Sangat Tinggi. Selama periode ini, rata-rata realisasi kinerja rasio dokter gigi per 1.000 penduduk sebesar 53,58% dan terkategori Rendah.

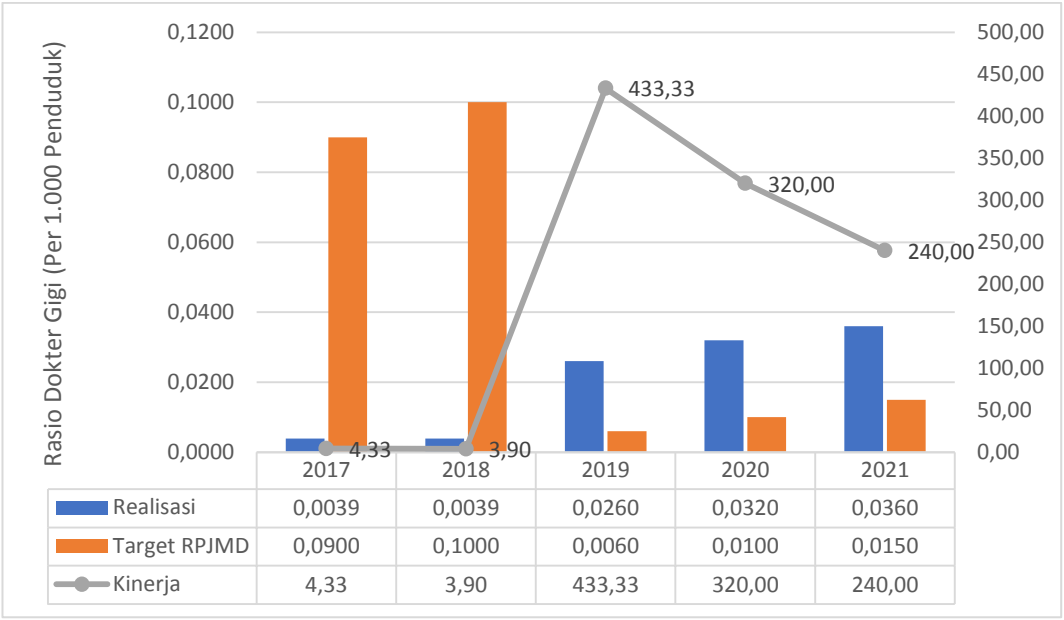

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2022

Gambar 2.63.
Kinerja Indikator Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017–2021

f. Rasio Perawat

Perawat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Selama periode 2016–2020, rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2016, jumlah perawat di Indragiri Hilir sebanyak 323 orang dengan rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hilir sebesar 0,442 yang berarti 1 orang perawat melayani sebanyak 2.178 orang penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2017, jumlah perawat menurun menjadi 315 orang dengan rasio sebesar 0,44 yang berarti setiap 1 orang perawat melayani sebanyak 2.292 penduduk. Pada tahun 2018, jumlah perawat meningkat drastis sebanyak 887 orang dengan perkiraan rasio sebesar 0,789 yang berarti setiap 1 orang perawat melayani 825 penduduk. Hal ini sudah memenuhi standar nasional (1 perawat melayani 900,90 penduduk). Bila capaian rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hilir

dibandingkan dengan capaian rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hulu menunjukkan bahwa capaian Indragiri Hilir relatif lebih rendah.

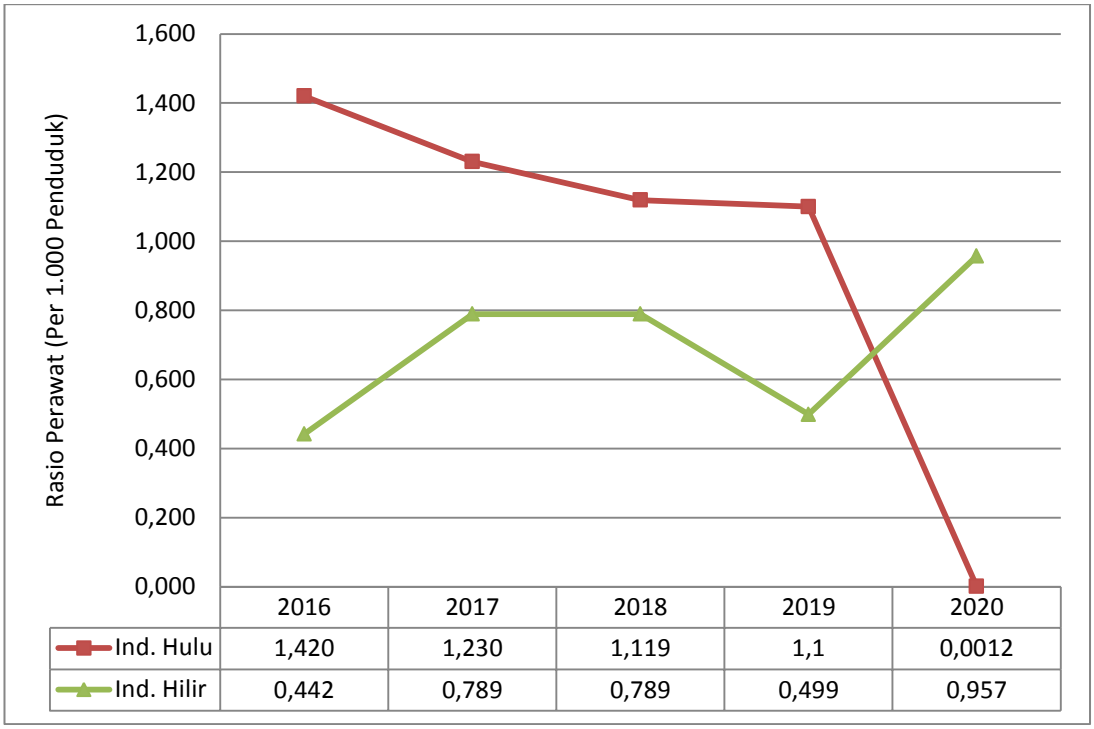

	2016	2017	2018	2019	2020
Ind. Hulu	1,420	1,230	1,119	1,1	0,0012
Ind. Hilir	0,442	0,789	0,789	0,499	0,957

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, Indragiri Hulu Dalam Angka, 2021

Gambar 2.64.
Perkembangan Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016–2020

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hilir terus meningkat meski belum sampai pada standar ideal yaitu dari 0,9 pada tahun 2017 menjadi 1,0 pada tahun 2018. Realisasi rasio perawat per 1.000 Indragiri Hilir selama periode ini terus dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 55,25%-87,67 yang terkategori Rendah hingga Tinggi. Rata-rata realisasi kinerja indikator rasio perawat per 1.000 penduduk sebesar 65,06% yang terkategori Rendah. Pada tahun 2021, jumlah perawat di Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sehingga kinerja mencapai 966,67% dengan kategori sangat tinggi.

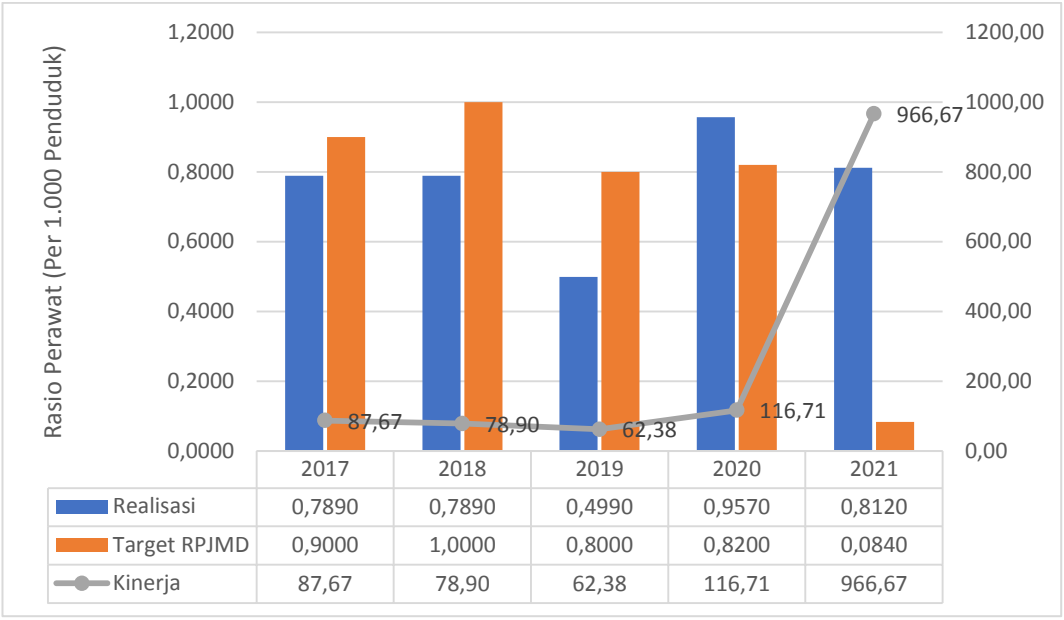

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2022

Gambar 6.65
Kinerja Indikator Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017–2021

g. Rasio Bidan

Bidan adalah salah satu petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Selama periode 2016–2020, rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2016, jumlah bidan di Indragiri Hilir sebanyak 180 orang dengan rasio sebesar 0,369 atau setiap 1 orang bidan melayani sebanyak 3.910 orang penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2017, jumlah bidan meningkat menjadi 430 orang dengan rasio bidan per 1.000 penduduk sebesar 0,24 atau setiap 1 orang bidan melayani sebanyak 1.680 penduduk Indragiri Hilir. Rentang pelayanan 1 orang bidan untuk 1.680–3.910 penduduk Indragiri Hilir ini terkategori dibawah standar nasional (1 orang bidan melayani sebanyak 833,33 penduduk). Namun, pada tahun 2018, jumlah bidan di Indragiri Hilir meningkat sangat signifikan menjadi 1.137 orang. Hal ini berarti setiap 1 orang bidan dapat melayani 643 penduduk. Capaian ini telah memenuhi standar nasional. Capaian rasio

bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir relatif masih dibawah capaian rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hulu, kecuali untuk tahun 2018, capaian rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir diperkirakan berada diatas capaian rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hulu.

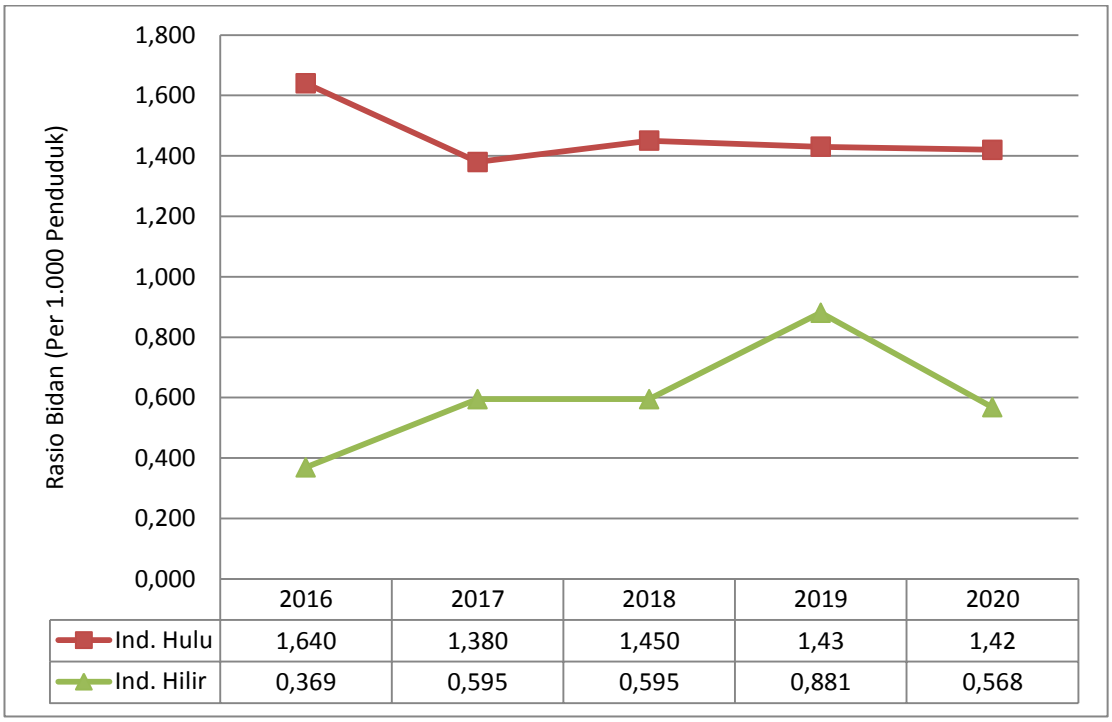

	2016	2017	2018	2019	2020
Ind. Hulu	1,640	1,380	1,450	1,43	1,42
Ind. Hilir	0,369	0,595	0,595	0,881	0,568

Sumber : https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id, Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.66
Perkembangan Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016–2020

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir terus meningkat meski belum akan ideal yaitu dari 0,55 pada tahun 2017 menjadi 0,65 pada tahun 2018. Realisasi indikator rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat yaitu dari 0,595 dengan realisasi kinerja sebesar 108,18% yang terkategori Sangat Tinggi pada tahun 2017, meningkat menjadi 1,261% dengan realisasi kinerja sebesar 200,16% yang terkategori Sangat tinggi.

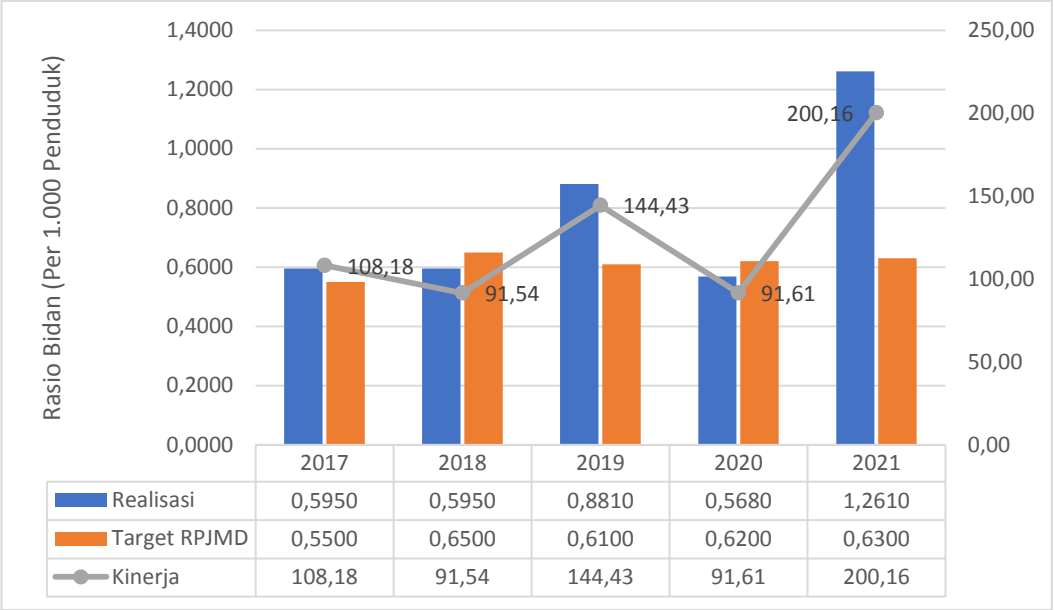

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2022

Gambar 2.67
Kinerja Indikator Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017–2021

h. SPM Bidang Kesehatan

Selama periode 2019-2021, SPM bidang kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Target waktu capaian SPM bidang kesehatan adalah setiap tahun dengan nilai capaian berkisar Antara 0 –100%. Rincian jenis pelayanan dasar dan indikator kinerja SPM bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13.
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN (orang)			Batas waktu capaian
			2019	2020	2021	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	11.931	11.641	9.734	Setiap Tahun

2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	10.901	11.340	8.742	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	11.610	11.608	7.906	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	29.972	35.635	30.905	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	13.089	30.423	16.105	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	38.441	17.271	30.840	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	20.792	1.674	30.604	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	22.995	7.318	5.892	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	4.135	1.398	1.205	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	593	977	1.026	

	berat yang terlayani kesehatan					
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	1.140	1.790	1.529	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	4.085	5.701	5.885	

Pada tahun 2019-2021, dari 12 indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan sebanyak 12 indikator (100%). Namun demikian, belum semua pelayanan tersebut memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dari 12 indikator, baru 5 indikator (22,73%) yang telah memenuhi target nasional, selebihnya belum mencapai target nasional.

SPM bidang kesehatan menurut Permenkes 741/Menkes/Per/VII/2008 direvisi menjadi Permenkes Nomor 43/MENKES/PER/VIII/2016. Dalam Permenkes tersebut dijelaskan bahwa terdapat 12 jenis layanan dasar dengan 12 indikator kinerja yang menjadi kewajiban dan tanggung yang harus dilaksanakan pemerintah

daerah. Target waktu capaian SPM bidang kesehatan adalah tahun 2016–2020 dengan nilai capaian berkisar Antara 0–100%. Dalam pelaksanaan, mulai tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah mengacu ke Permenkes Nomor 43/MENKES/PER/VIII/2016. Rincian jenis pelayanan dasar dan indikator kinerja SPM bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan
Berdasarkan Permenkes No : 43/MENKES/PER/VIII/2016

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian Kinerja Kabupaten	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Batas Waktu Pencapaian	Satker Penanggung Jawab
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	2021	Dinkes Kab/Kota
2		Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	Sesuai standar pelayanan peralinan a	Ibu bersalin	2021	Dinkes Kab/Kota
3		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Bayi baru lahir	2021	Dinkes Kab/Kota
4		Pelayanan kesehatan balita	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	2021	Dinkes Kab/Kota
5		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikn usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	2021	Dinkes Kab/Kota
6		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun	2021	Dinkes Kab/Kota
7		Pelayanan kesehatan pada usia	100	Sesuai standar skrining kesehatan	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun	2021	Dinkes Kab/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian Kinerja Kabupaten	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Batas Waktu Pencapaian	Satker Penanggung Jawab
		lanjut		usia lanjut	keatas		
8		Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	2021	Dinkes Kab/Kota
9		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	2021	Dinkes Kab/Kota
10		Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	2021	Dinkes Kab/Kota
11		Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	Sesuai standar skrining kesehatan dengan TB	Orang dengan TB	2021	Dinkes Kab/Kota
12		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	2021	Dinkes Kab/Kota

Selama periode 2017–2021, capaian ke 12 indikator bidang kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir ditunjukkan pada Tabel 2.15. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Indrgiri Hilir telah menerapkan sebanyak 12 indikator (100%). Namun demikian, belum semua indikator tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Tabel 2.15.

Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan tahun 2017– 2021

No.	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	77	80	77	77,68	87,05
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	76	80	48	60,28	81,77
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	72	71	79	76,33	77,76
4	Pelayanan kesehatan balita	55	58	58	100	51,96
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	81	88	97	95	38,37
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	91	10	5,75	8,36
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	90	59	12	57,26
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	35	6	14	4,63	3,73
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	12	59	88	41,16	35,48
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	73	79	100	95,53
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	100	30	69,32	21,96
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	38	22	14	24,54	44,67

Sumber : https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id, Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, 2022

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan Antara lain yaitu (i) Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai, sehingga mengakibatkan akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan yang belum maksimal. (ii) Masih belum terintegrasi pelaporan dan perencanaan ditingkat Puskesmas dengan Dinas Kesehatan. (iii) Pemanfaatan dana BOK di Puskesmas belum terintegrasi dengan perencanaan di Dinas Kesehatan. (iv) Dukungan dan peran serta masyarakat masih kurang terhadap upaya preventif dan promotif.

Terkait data capaian kinerja penanganan terkait Tuberculosis (TB) secara khusus dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.16
Capaian kinerja penanganan terkait Tuberculosis (TB)

No	Indikator	2019		2020		2021			
		Capaian (%)	Sasaran %	Capaian (%)	Sasaran %	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran %
1	Pelayanan Kesehatan Terduga TB	30,10%	100%	29,02%	100%	6964	1529	21,96%	100%

Penilaian status gizi Balita ini terkait erat juga dengan sasaran pokok yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu meningkatnya status kesehatan dan gizi anak. Pilar kelima dari Strategi Nasional Penanganan Stunting yakni pemantauan dan evaluasi dinilai strategis dan penting sebagai upaya mengetahui dampak intervensi terhadap pencegahan dan penanggulangan stunting. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan masalah stunting di Indonesia umumnya dan khususnya pada kabupaten/kota prioritas.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Jika dibanding tahun 2020, angka stunting di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase balita stunting tahun 2020 sebesar 6,59% dan 2021 menjadi 3,00%. “Namun dari 20 Kecamatan

ada 2 Kecamatan Lokus yang terjadi peningkatan yaitu Kuala Indragiri dan Teluk Belengkong.

Telah dilakukan salah satunya perbaikan gizi di masa 1.000 Hari pertama Kehidupan (HPK) mulai dari dalam kadungan sampai anak berusia dua tahun. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil bersama stakholder terkait melakukan penyuluhan dan sosialisasi ASI Ekslusif, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), pendidikan gizi untuk ibu hamil dan kesehatan reproduksi. Berikut Grafik Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.17
Grafik Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 dan 2021

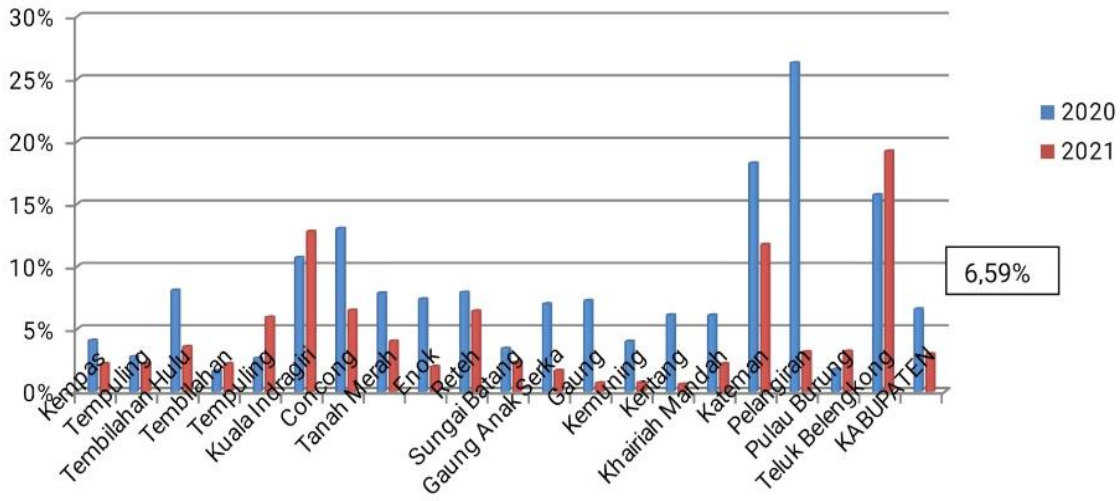

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Inhil (2022)

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Layanan urusan wajib dasar bidang Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang dianalisis dengan beberapa aspek yaitu (i) Kondisi jalan Kabupaten, (ii) Jembatan, (iii) Irigasi dan (iv) RuangTerbuka Hijau.

a. Jalan Kabupaten

Jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air. Perkembangan Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Indragiri Hilir Pada tahun 2021 sebesar 58,106 Km, ini naik dari tahun 2020 sebesar 50,401 Km, dimana pada tahun 2021 untuk permukaan jalan dalam kondisi sedang sebesar 597,878 Km, jalan dalam kondisi rusak 254,962 Km dan jalan dalam kondisi rusak berat 279,648 Km.

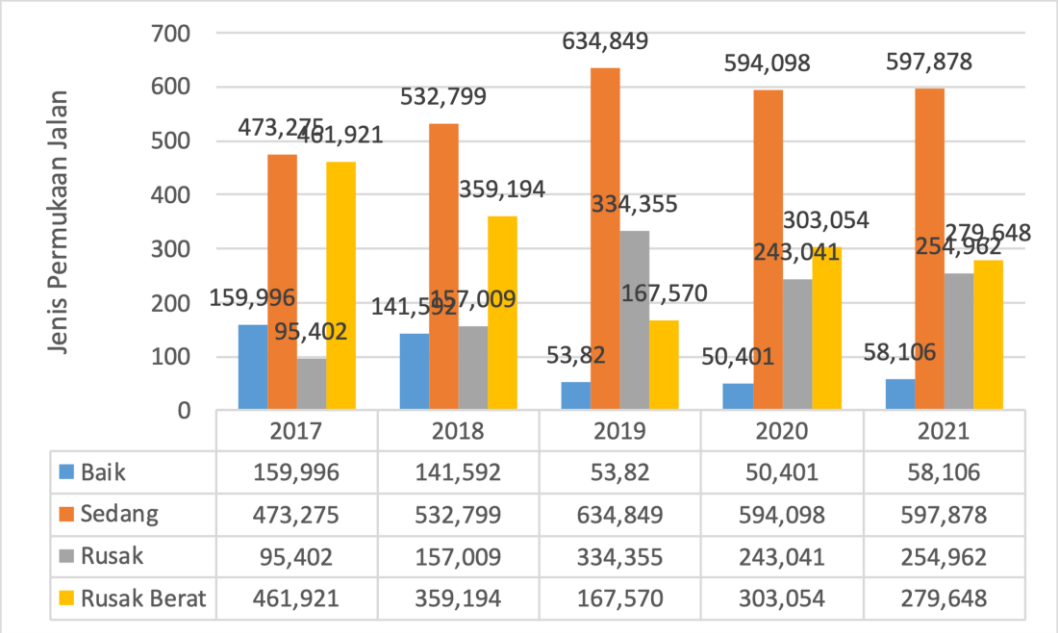

	2017	2018	2019	2020	2021
Baik	159,996	141,592	53,82	50,401	58,106
Sedang	473,275	532,799	634,849	594,098	597,878
Rusak	95,402	157,009	334,355	243,041	254,962
Rusak Berat	461,921	359,194	167,570	303,054	279,648

Sumber : PUPR Kabupaten Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.67
Jenis Permukaan Jalan Baik Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio jalan Kabupaten dengan kondisi baik, proporsinya ditargetkan terus meningkat dari 26% pada tahun 2017 menjadi 27% pada tahun 2018. Selama periode 2017 – 2018, realisasi proporsi jalan kabupaten denagn kondisi baik terus dibawah target yaitu sebesar 13,4% dan ditahun 2021 diperkirakan juga sebesar 4,88%. Selama periode 2017-2021 , kinerja

indikator proporsi jalan Kabupaten dengan kondisi baik berkisar antara 21,22% - 70,00% dengan kategori Sangat Rendah – Tinggi. Rata-rata nilai realisasi kinerja sebesar 43,90% dengan kategori Rendah.

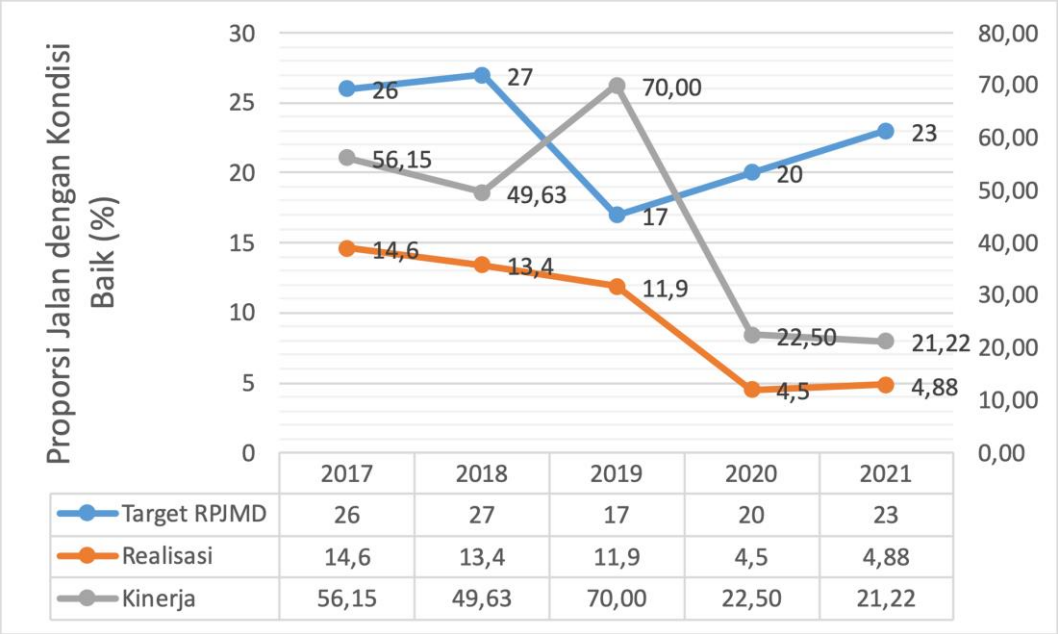

	2017	2018	2019	2020	2021
Target RPJMD	26	27	17	20	23
Realisasi	14,6	13,4	11,9	4,5	4,88
Kinerja	56,15	49,63	70,00	22,50	21,22

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022

Gambar 2.69
Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Pada periode yang sama (2017 – 2021), ruas jalan dengan kondisi mantap yakni ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Pada tahun 2017, panjang jalan Kabupaten dengan kondisi mantap dengan persentase sebesar 53,19%. Meningkat sebesar 56,64% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 57,84% pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 dan 2021 jaln dengan kondisi mantap sebesar 54,13% dan 55,10%. Secara keseluruhan, jalan dengan kondisi mantap, baik pada jalan kabupaten masih dibawah standar yang ditetapkan secara nasional yaitu 80% jalan dengan kondisi mantap. Oleh karena itu, upaya untuk terus meningkatkan kondisi jalan dengan status mantap dengan proporsi sekitar 80% perlu terus diupayakan. Strategi yang diambil untuk

meningkatkan kemantapan jalan adalah dengan memprioritaskan penanganan pada ruas jalan kabupaten yang berkondisi tidak mantap melalui sub kegiatan rekonstruksi jalan dan mempertahankan kemantapan jalan melalui sub kegiatan rehabilitasi jalan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga berupaya mencari sumber pendanaan lainnya seperti DAK dan Bankeu.

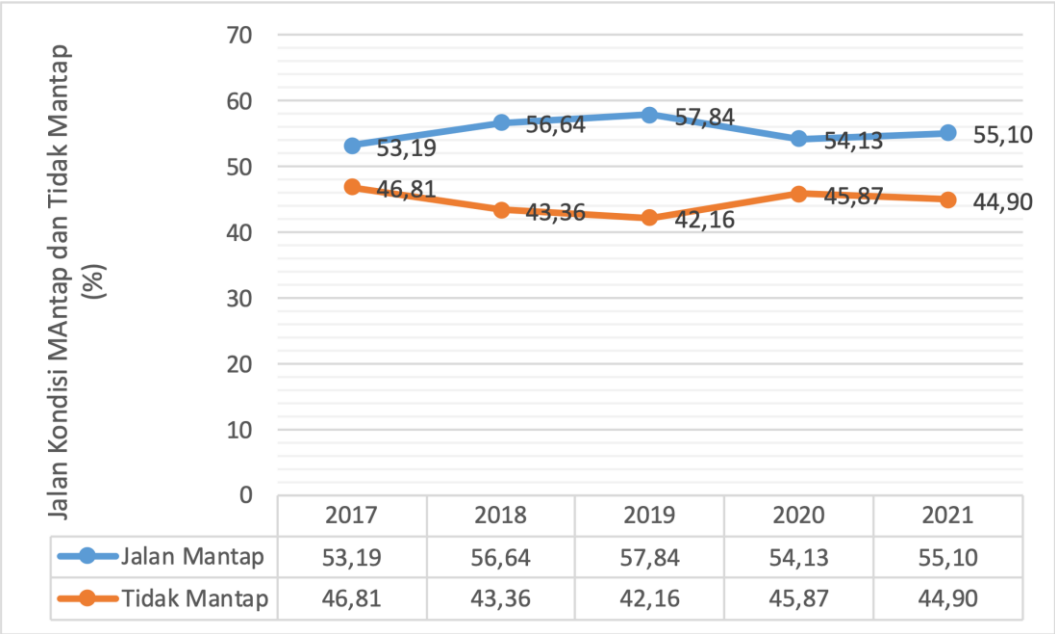

	2017	2018	2019	2020	2021
Jalan Mantap	53,19	56,64	57,84	54,13	55,10
Tidak Mantap	46,81	43,36	42,16	45,87	44,90

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022

Gambar 2.70
Perkembangan Jalan dengan Kondisi Mantap Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator kinerja rasio jalan Kabupaten dengan kondisi mantap, mengalami fluktuasi yaitu dari 84,09% pada tahun 2017 menjadi 85,52% pada tahun 2019. Pada periode 2017 – 2019, realisasi indikator jalan kabupaten dengan kondisi mantap berkisar antara 55,19% - 58,86% yang terkategori Tinggi. Pada tahun 2020, realisasi indikator proporsi jalan kabupaten dengan kondisi mantap sekitar 57,84% dengan realisasi kinerja tahun 2020-2021 sebesar 82,95% dan 75,24% terkategori Tinggi.

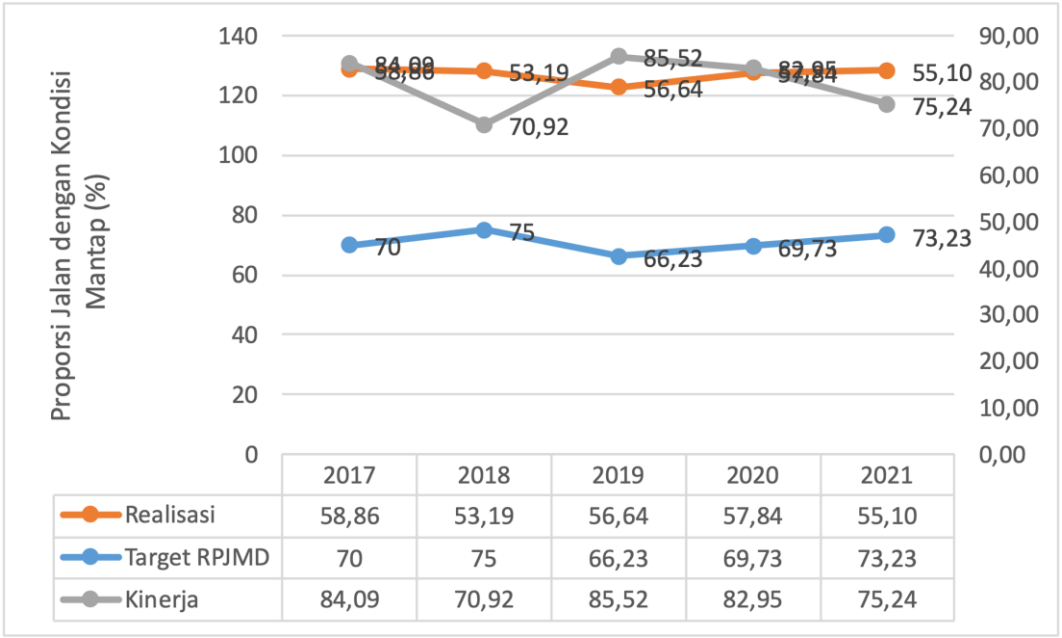

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	58,86	53,19	56,64	57,84	55,10
Target RPJMD	70	75	66,23	69,73	73,23
Kinerja	84,09	70,92	85,52	82,95	75,24

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022

Gambar 2.71
Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Mantap
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

b. Jembatan

Secara umum, jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain. Pada tahun 2021, proporsi jembatan dengan kondisi baik 54,12%. Proporsi jembatan dengan kondisi baik dan mantap harus menjadi perhatian dalam pembangunan periode berikutnya agar transportasi dari dan menuju Indragiri Hilir dapat terus lancar.

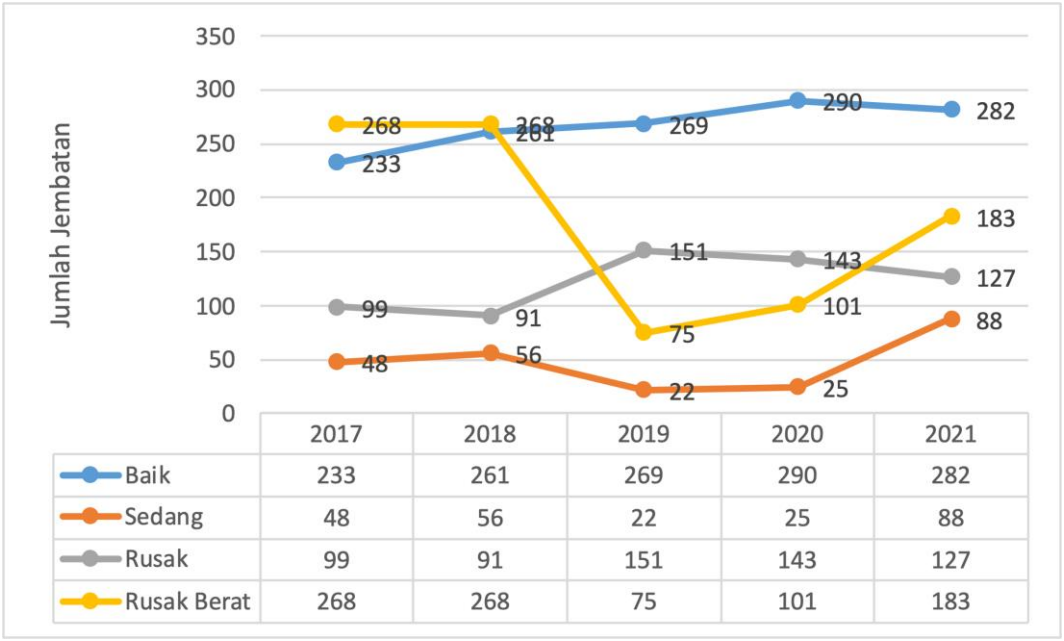

	2017	2018	2019	2020	2021
Baik	233	261	269	290	282
Sedang	48	56	22	25	88
Rusak	99	91	151	143	127
Rusak Berat	268	268	75	101	183

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Indragiri Hilir

Gambar 2.72
Perkembangan Jembatan dengan Kondisi Baik dan Mantap
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2021

Pada periode yang sama, jembatan dengan kondisi baik memiliki trend yang berfluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah jembatan dalam kondisi baik sebesar 233, meningkat sebesar 261 pada tahun 2018, pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi sebesar 290, pada tahun 2021 jembatan dengan kondisi baik turun menjadi 282, kondisi sedang 88, kondisi rusak 127, dan rusak berat 183. Jembatan dengan kondisi baik yang tidak begitu tinggi harus menjadi perhatian dalam pembangunan periode berikutnya agar transportasi dari dan menuju Indragiri Hilir dapat terus lancar.

c. Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Selama periode 2017-2021, irigasi di Indragiri Hilir dengan kondisi baik proporsinya berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2017, proporsinya sebesar 27% meningkat menjadi 28% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 30%

pada tahun 2020 dan secara perlahan meningkat menjadi 31,2% pada tahun 2021. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan indikator luas irigasi dengan kondisi baik 28,84%. Rendahnya proporsi luas irigasi dengan kondisi baik dan penurunannya yang tajam perlu mendapat perhatian dalam pembangunan agar produksi padi dapat terus ditingkatkan

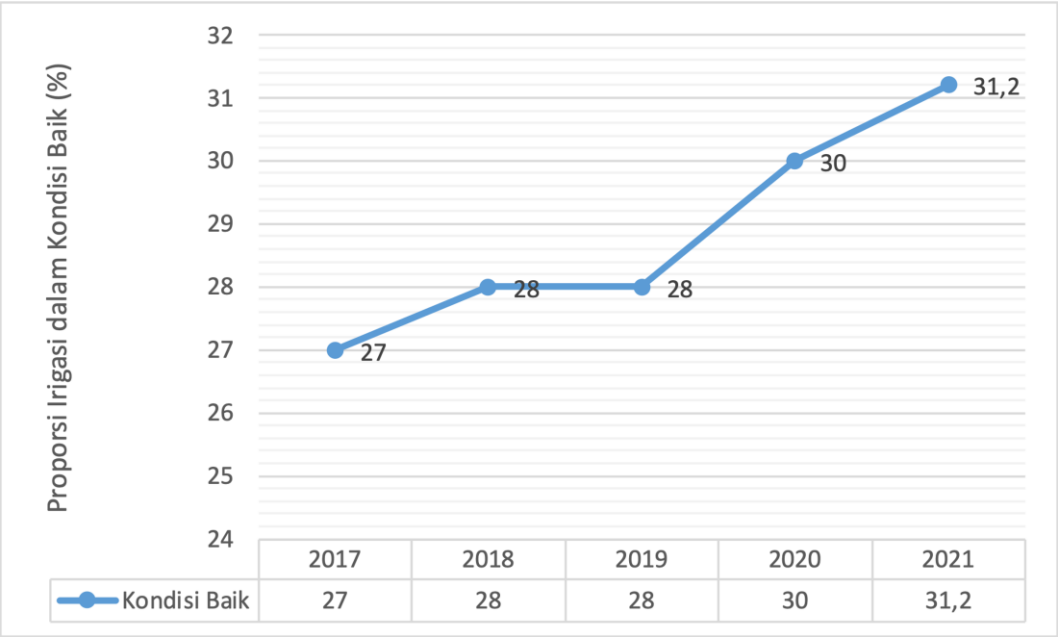

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022

Gambar 2.73
Perkembangan Kondisi Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator luas irigasi dalam kondisi baik telah ditetapkan meningkat dari 30% pada tahun 2017 menjadi 40% pada tahun 2018. Realisasi indikator luas irigasi dengan kondisi baik dari 2017-2021 memiliki trend meningkat meski umumnya masih dibawah target. Rata-rata realisasi kinerja indikator luas irigasi dengan kondisi baik sebesar 87,77% dan terkategori Tinggi.

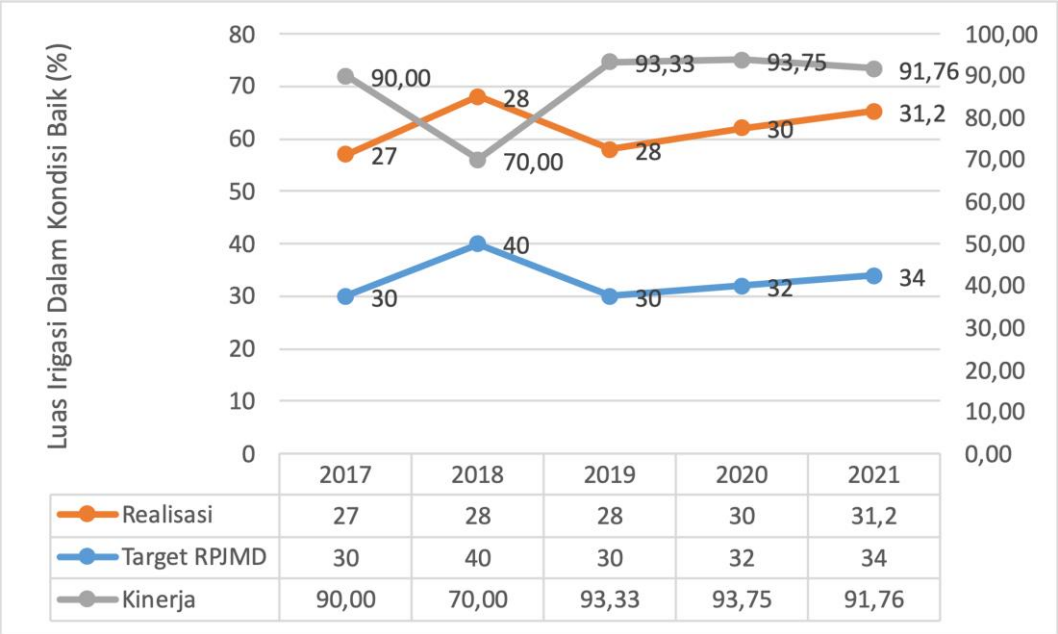

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022

Gambar 2.74
Kinerja Indikator Luas Irigasi Dengan Kondisi Baik
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Tabel 2.18.
Status Daerah Irigasi Yang Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

NO	NAMA D.I.R	Luasan (Ha)	Luas baku	Luas Potensial	Luas Fungsional	Ket
1	D.I.R. Bagan Negara/Suhada	250	250,595	74,863	0	
2	D.I.R. Bekawan	156	156,792	84,703	0	
3	D.I.R. Concong Dalam	20	20,6	13,177	0	
4	D.I.R. Concong Tengah	84	84,094	43,073	17,827	
5	D.I.R. Enok	250	250,219	179,422	0	
6	D.I.R. Karya Tunas Jaya	405	405,024	348,728	118,197	
7	D.I.R. Kuala Gaung	853	853,591	364,38	0	
8	D.I.R. Kuala Lahang	992	992,868	667,708	69,101	
9	D.I.R. Kuala Selat	278	278,113	42,536	0	
10	D.I.R. Lahang Baru	560	560,907	515,96	69,424	
11	D.I.R. Lahang Hulu	786	786,37	734,751	80,607	
12	D.I.R. Lahang Tengah	763	763,195	538,155	11,626	
13	D.I.R. Pekan Kamis	245	245,172	182,66	113,304	
14	D.I.R. Pekan Tua	954	954,421	889,776	449,217	
15	D.I.R. Pengalihan enok	560	560,917	355,934	0	

16	D.I.R. Perigi Raja	76	76,789	50,158	0	
17	D.I.R. Reteh II/Bagan Jaya	876	876,018	111,627	30,941	
18	D.I.R. Reteh I dan Reteh Lokal	750	750,3	228,751	158,728	
19	D.I.R. Rotan semelur	295	293,643	130,344	0	
20	D.I.R. Sapat	800	800,293	651,972	0	
21	D.I.R. Sei Ambat (Ambar)	234	234,233	123,749	0	
22	D.I.R. Sei Baru	279	279,428	67,774	0	
23	D.I.R. Sei Lala/Sei Empat	165	-	-	-	Lokasi Tidak Di Temukan
24	D.I.R. Sei Rukam I dan II	300	300,211	154,388	0	
25	D.I.R. Sei Beringin	872	872,059	385,136	113,833	
26	D.I.R. Sei Danai	500	500,779	191,944	0	
27	D.I.R. Sei Empat	204	204,147	133,213	0	
28	D.I.R. Sei Rabit	759	759,905	638,518	0	
29	D.I.R. Sei Raya	443	443,121	291,145	115,151	
30	D.I.R. Sei Undan	205	205,465	170,29	120,461	
31	D.I.R. Sencalang, Pancur	304	273,889	129,436	27,13	
32	D.I.R. Sialang Panjang	876	998,428	974,848	974,848	
33	D.I.R. Simpang Gaung	880	882,735	92,57	0	
34	D.I.R. Tanjung Melayu	920	920,42	825,395	0	
35	D.I.R. Tekulai Bugis	700	700,795	326,974	0	
36	D.I.R. Tekulai Hulu	500	500,326	225,194	0	
37	D.I.R. Teluk Jira	308	308,709	142,231	0	
38	D.I.R. Teluk Kiambang Seberang	896	896,224	518,41	174,657	
39	D.I.R. Teluk Pinang/Teluk Pantaian	400	400,59	204,666	0	
40	D.I.R. Tembilahan Hilir	250	250,326	224,72	137,584	
41	D.I.R. Tempuling I dan II	894	894,159	429,127	274,957	
Total		**20842**	**20785,87**	**12458,406**	**3057,593**	

Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha (ada 41 DIR) berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Indragiri Hilir ada 41 (empat puluh satu) DIR, yang sudah ditangani dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 adalah 14 (empat belas) DIR dengan rincian pagu anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.19.

Data D.I.R Tertangani dan Pagu Anggaran

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1	Tahun 2015	8,606,799,000
2	Tahun 2016	29,942,966,240
3	Tahun 2017	10,231,304,810
4	Tahun 2018	5,192,578,000
5	Tahun 2019	3,034,021,000
6	Tahun 2020	1,135,888,000
7	Tahun 2021	3,124,267,753
8	Tahun 2022	815,502,350
	Total	**62,083,327,153**

d. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria (a) Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, (b) berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan (c) didominasi komunitas tumbuhan. Jumlah RTH Se-Kabupaten Indragiri Hilir ada 29 lokasi dengan Luas wilayah 222.424,57 M^2 Selama Periode 2018-2021, Jumlah RTH yang dibangun dan terpelihara ada 7 wilayah dengan luas 34.458,64 M^2. Persentase RTH yang terpelihara selama periode 2018-2021 terkategori sama yaitu sebesar 24,13%, sementara ratio persatuan wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2021 sebesar 15,49%. Dilihat dari kondisi RTH terpelihara untuk kedepannya perlu menjadi perhatian.

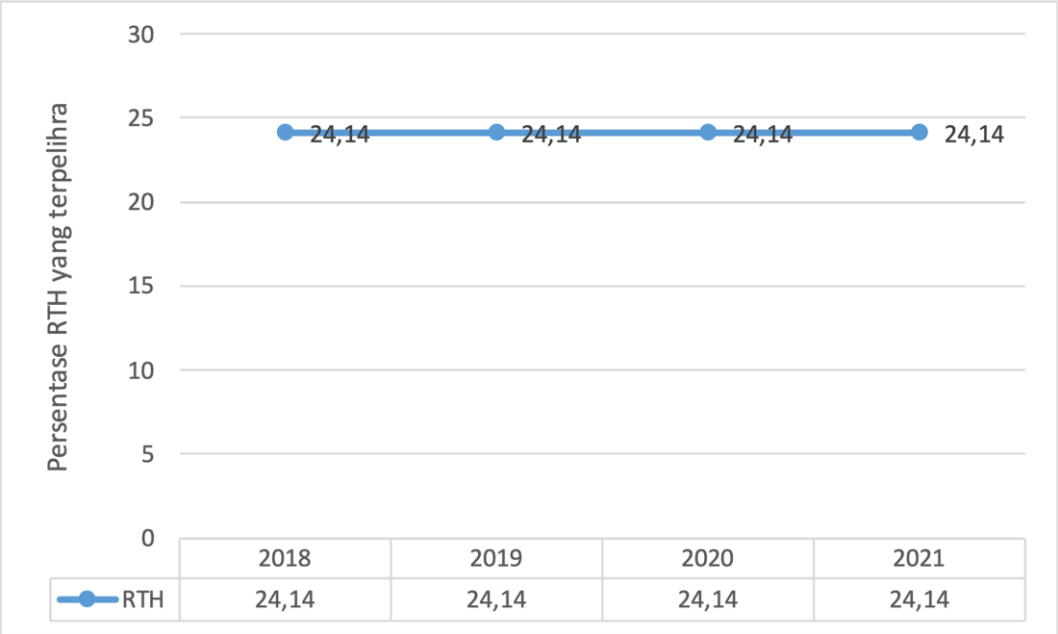

Sumber : DLHK 2022

Gambar 2.75
Persentase RTH yang terpelihara
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

e. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi persyaratan untuk pengairan sawah, untuk treatment air minum dan untuk treatmen air sanitasi. Persyaratan disini ditinjau dari persyaratan kandungan kimia, fisika dan biologis. Pengertian air bersih secara umum adalah air yang aman dan sehat yang bisa dikonsumsi manusia. Secara fisik air tersebut tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Secara Kimia adalah (a) PH netral (bukan asam/basa) dan (b) tidak mengandung racun dan logam berat berbahaya.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rumah tangga pengguna air bersih terus meningkat dari 80% pada tahun 2017 menjadi 98,33% pada tahun 2018. Realisasi indikator rumah tangga penggunaan air bersih di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2017-2021 terus dibawah target. Pada tahun 2020, target capaian

indikator rumah tangga pengguna air bersih sebesar 22% dengan realisasi kinerja sebesar 51,45%. Pada tahun 2021, target meningkat menjadikan 24% realisasi kinerja menurun yaitu dari 49,50% yang terkategori Sangat Rendah. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses rumah tangga terhadap penggunaan air bersih perlu mendapat prioritas pada pembangunan ke depan.

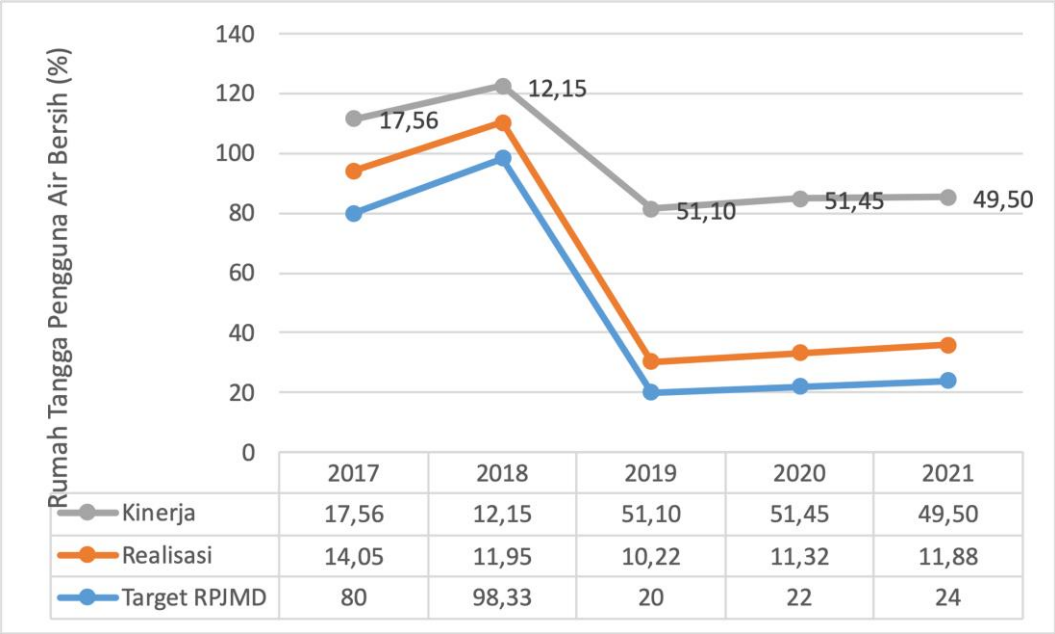

	2017	2018	2019	2020	2021
Kinerja	17,56	12,15	51,10	51,45	49,50
Realisasi	14,05	11,95	10,22	11,32	11,88
Target RPJMD	80	98,33	20	22	24

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022

Gambar 2.62.
Kinerja Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Tabel 2.20.
Data Capaian Sarana Prasarana Persedian Air Bersih Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penerima		Jumlah Penerima		Jumlah Penerima		Persentase Jumlah Penerima
		Sambungan Rumah (Kk)	Penduduk (Jiwa)	Sambungan Rumah (Kk)	Penduduk (Jiwa)	Sambungan Rumah (Kk)	Penduduk (Jiwa)	
		Jaringan Perpipaan Dari PDAM		Jaringan Perpipaan Dari Program Pamsimas (APBD & APBN)		Sumur Bor (Bantuan Stimulan-Sistem Penyediaan Air Minum)		
2015	694,614	15,304	76,520	2,113	8,450	34	2,040	12.53%

2016	713,034	15,137	75,685	4,718	18,872	-	-	13.26%
2017	722,234	15,058	75,290	4,691	18,764	124	7,440	14.05%
2018	731,396	15,117	75,585	2,175	8,700	52	3,120	11.95%
2019	740,598	13,386	66,930	2,193	8,770	-	-	10.22%
2020	654,909	13,592	67,960	1,540	6,160	-	-	11.32%
2021	654,909	14,092	70,460	1,540	6,160	20	1,200	11.88%

Tabel 2.21.

Data Sambungan Rumah
Sarana Dan Prasarana Persediaan Air Bersih Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Sambungan Rumah (KK)			Total SR
		Jaringan Perpipaan Dari Pdam	Jaringan Perpipaan Dari Program Pamsimas (APBD & APBN)	Sumur Bor (Bantuan Stimulan-Sistem Penyediaan Air Minum)	
2015	694.614	15.304	2112.5	34	17450.5
2016	713.034	15.137	4718	0	19855
2017	722.234	15.058	4691	124	19873
2018	731.396	15.117	2175	52	17344
2019	740.598	13.386	2192.5	0	15578.5
2020	654.909	13.592	1540	0	15132
2021	654.909	14.092	1540	20	15652

Tabel 2.22.

Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses
Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau

Tahun	Persentase	Ket
2019	91.11%	
2020	91.11%	
2021	91.23%	
2022	91.27%	

Sumber : Data RP3KP 2021

f. SPM PU-PR

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dijelaskan bahwa SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar SPM PU-PR terdiri dari 2 indikator, dengan batas waktu pencapaian tahun setiap tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.14 dibawah ini.

Tabel 2.23
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang PU-PR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN				Batas waktu capaian
			2018	2019	2020	2021	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	87402	75690	741358	77820	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	N/A	N/A	N/A	N/A	

Pencapaian indikator SPM bidang PU-PR Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2018 – 2021 ditunjukkan pada Tabel 2.23. Pada tahun 2018-2021, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan sebanyak 2 indikator (100%).

Permasalahan/hambatan dalam penerapan dan pencapaian SPM hingga tahun 2021 menurut jenis pelayanan dan indikator serta solusinya ditunjukkan pada Tabel 2.24 dibawah ini

Tabel 2.24
Permasalahan/Hambatan Dalam penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang PU-PR di Kabupaten Indragiri Hilir

JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR		HAMBATAN	SOLUSI
1	Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat	1	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	-	-
		2	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	Sidementasi yang terlalu cepat sehingga terjadi pendangkalan saluran irigasi	Operasional dan pemeliharaan saluran irigasi secara berkala dan tersedianya dana operasional dan pemeliharaan
2	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	3	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	Anggaran kurang memadai dan kondisi geografis yang sulit serta proses lelang yang selalu lambat,sehingga pengerjaan selalu dipenghujung waktu.	meningkatkan jumlah anggaran serta mempercepat proses lelang, sehingga bisa dikerjakan tepat waktu.
		4	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	Pembebasan Lahan pada Penyediaan Jalan	Tersedianya Lahan sebelum Pembangunan jalan
3	Penyediaan air minum	5	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	-	-
4	Penyediaan sanitasi	6	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	-	-
		7	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	-	-
		8	Persentase pengangkutan sampah	-	-
		9	Persentase pengoperasian TPA	-	-
		10	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	-	-
5	Penataan Bangunan dan Lingkungan	11	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	Belum Tersedianya RTRW Kabupaten Indragiri Hilir	Menggesa Pengesahan Ranperda RTRW
6	Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	12	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	-
7	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	13	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	-	-
		14	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	-	-
8	Informasi Penataan Ruang	15	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Belum Tersedianya RTRW Kabupaten Indragiri Hilir	Menggesa Pengesahan Ranperda RTRW
9	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	16	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Belum Tersedianya RTRW Kabupaten Indragiri Hilir	Menggesa Pengesahan Ranperda RTRW

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Layanan urusan wajib dasar bidang Perumahan dan Pemukiman dianalisis dari tiga indikator utamanya yaitu (i) Rumah tidak layak huni dan (ii) Kawasan Permukinan Kumuh

a. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah didefenisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan

minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Selama periode 2017 – 2021, jumlah persentase rumah tidak layak huni (RTLH) di Indragiri Hilir bervariasi. Selama periode ini, persentase RTLH pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 0,50% selanjutnya menurun pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 0,45%, kemudian kembali menurun pada angka 0,25% di tahun 2021.

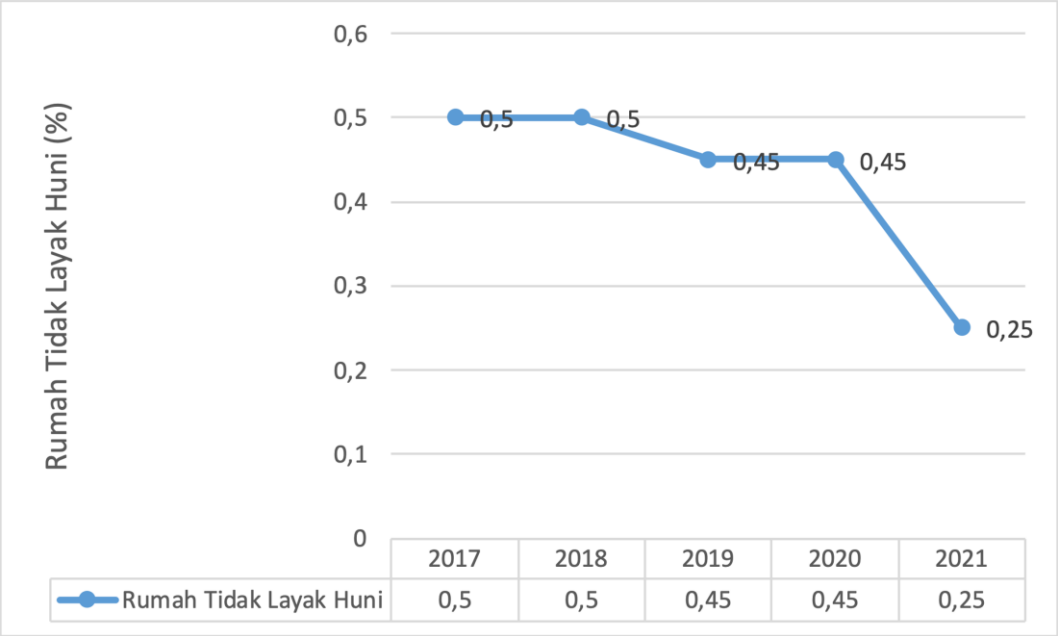

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2022

Gambar 2.77.
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Indragiri Hilir 2017-2021

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa target indikator rumah tidak layak huni di Kabupaten Indragiri Hilir terus menurun yaitu dari 0,50% pada tahun 2017 menjadi 0,40% pada tahun 2018. Realisasi capaian indikator rumah tidak layak huni lebih tinggi dan/atau sama dengan target pada tahun 2019 – 2020 yaitu sebesar 0,45% dengan capaian kinerja 87,5%. Capaian realisasi indikator rumah tidak layak huni yang yang tersisapada tahun 2021 berada dibawah target yaitu sebesar 0,021% dengan capaian realisasi kinerja sangat tinggi yaitu sebesar 128%.

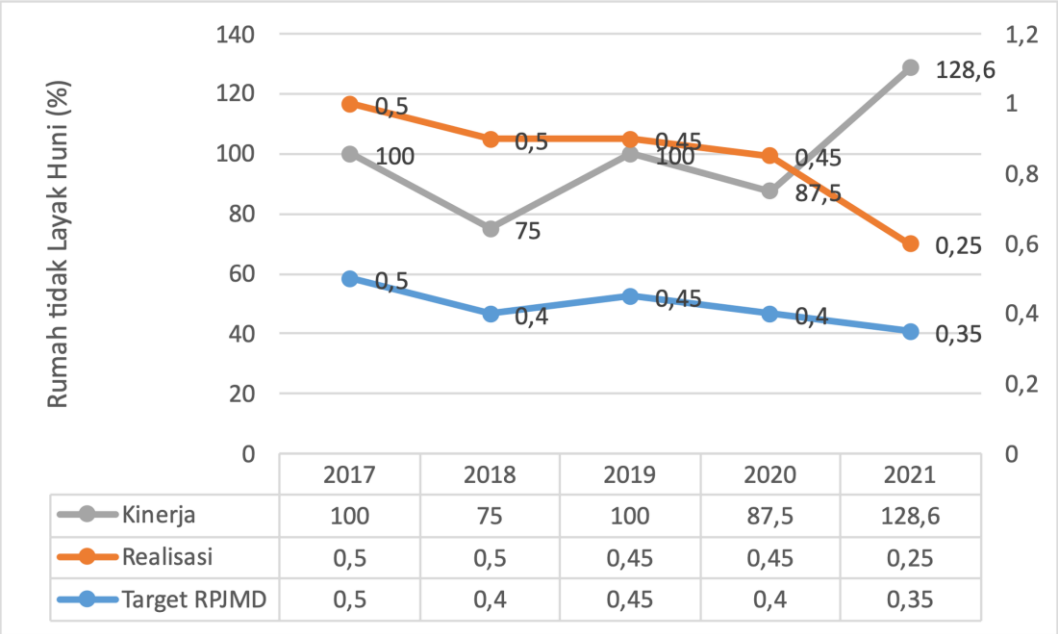

	2017	2018	2019	2020	2021
Kinerja	100	75	100	87,5	128,6
Realisasi	0,5	0,5	0,45	0,45	0,25
Target RPJMD	0,5	0,4	0,45	0,4	0,35

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2022

Gambar 2.78.
Kinerja Indikator Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

b. Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan Permukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas. Dengan kata lain memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya dan tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya. Ciri permukiman kumuh merupakan permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. Selain itu tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah.

Selama periode 2017 – 2021, persentase luasan lingkungan permukiman kumuh di perkotaan di Indragiri Hilir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 persentase lingkungan permukiman kumuh di perkotaan di Indragiri Hilir sebanyak 25,00% dan pada tahun 2019-2021 turun menjadi 22,00%

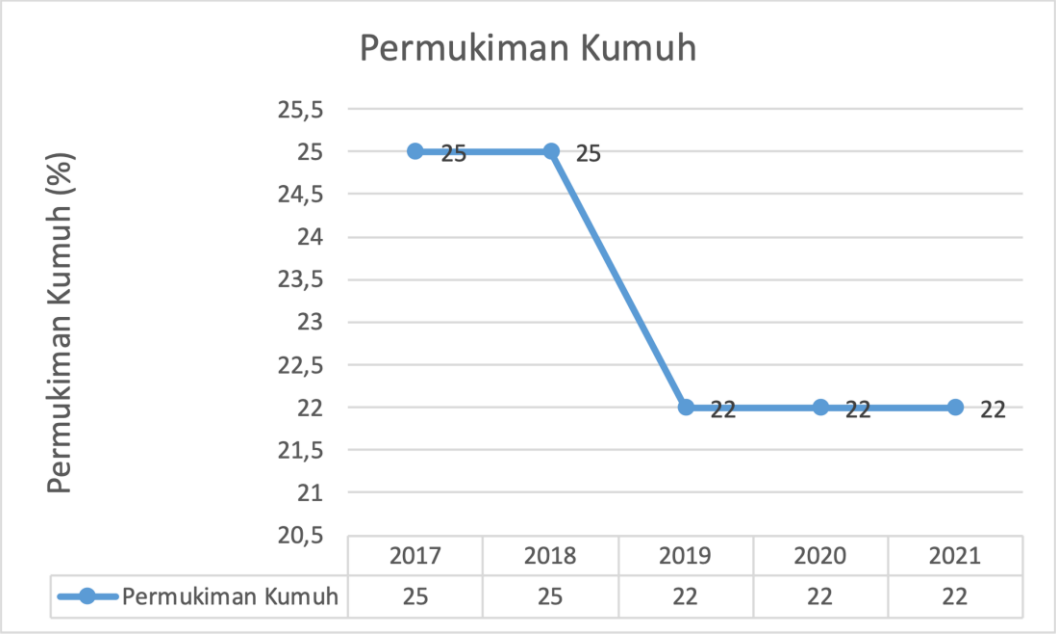

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2022

Gambar 2.79.
Kinerja Indikator Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

c. Prasarana Sarana Utilitas

Ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan Permukiman.

Penyediaan PSU mencakup pembangunan jalan lingkungan, penyediaan Drainase Perumahan, Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah dan penyediaan Sanitasi Perumahan. Pelaksanaan bantuan PSU dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

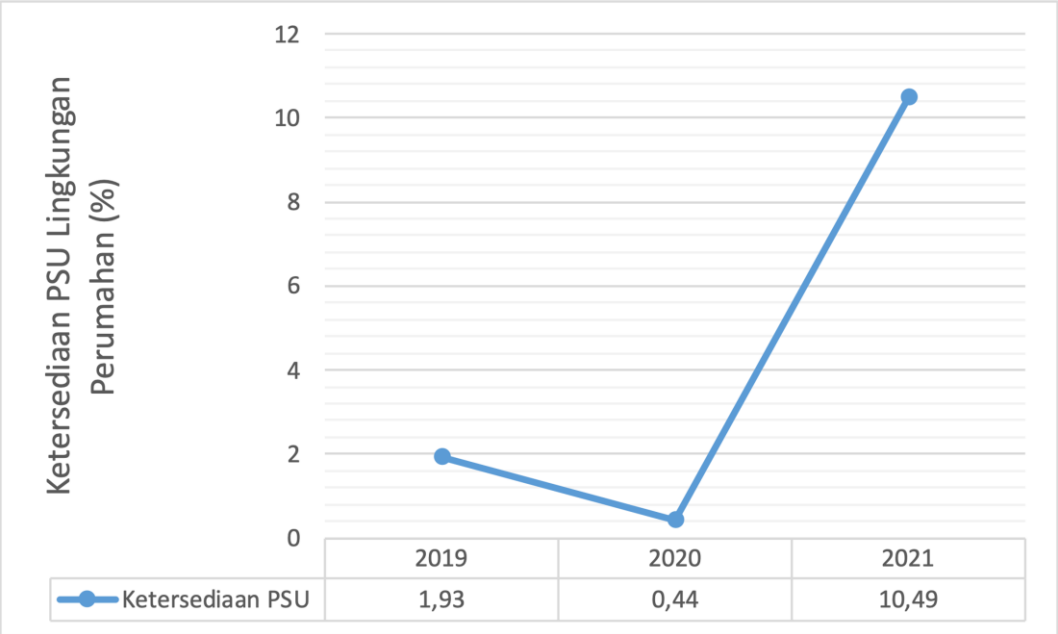

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

Gambar 2.80
Persentase Ketersediaan PSU Lingkungan Perumahan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2021

Persentase ketersediaan PSU di Lingkungan perumahan di Kabupaen Indragiri Hilir mengalami penurunan dan peningkatan. Di tahun 2019 Persentase Ketersediaan PSU di Lingkungan Perumahan sebesar 1.93%, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.44% dan di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 10.49%.

Secara garis besar Bidang PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan Permukiman. Bidang PSU Di samping pembangunan jalan lingkungan, bantuan PSU juga dapat mencakup penyediaan Drainase Perumahan, Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah dan penyediaan Sanitasi Perumahan. Pelaksanaan bantuan PSU dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum. Dan Dalam Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, fasilitas umum maupun fasilitas sosial masih dikategorikan dalam prasarana, yang merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Serta, dapat pula sebagai sarana, yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan sebuah prasarana atau sarana penunjang layanan kegiatan yang ada dalam perumahan.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dijelaskan bahwa indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. Jenis pelayanan dasar SPM bidang Perumahan Rakyat berjumlah 2 indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN				Batas waktu capaian
			2018	2019	2020	2021	
1	Penyediaan dan rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	30	35	-	406	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	NA	NA	NA	20	Setiap Tahun

Pencapaian indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2021 ditunjukkan pada Tabel 2.25. Pada tahun 2018, dari 2 indikator pelayaban dasar bidang perumahan, seluruhnya telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indrgairi Hilir. Capaian semua indikator masih dibawah target nasional.

Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian SPM Perumahan Rakaya beserta solusi ditunjukkan pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26

Permasalahan Dalam Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Masalah	Sub Masalah	Solusi
1	Perumahan Rakyat belum memenuhi standar layak huni	Mahalnya bahan konstruksi di daerah pedesaan sehingga masyarakat kesulitan membangun rumah bersetandar	Membantu masyarakat membangun rumah layah huni berstandar
		Struktur tanah yang tidak memungkinkan membangun beton atau semenisasi rumah	Diupayakan membangun rumah dengan penimbunan sabut dasn pasir curug

No	Masalah	Sub Masalah	Solusi
2	Sulitnya akses jalan	Sulitnya akses cepat jalan lingkungan pemukiman	Membangun jalan lingkungan dan menunjang keberhasilan distribusi dan perekonomian masyarakat
3	Tidak adanya jamban (toilet)	Dekatnya sumber air sungai	Membuat kesadaran hidup bersih dan sehat
			Membuat tempat mandi cuci kakus (MCK)
4	Sulitnya air bersih	Jenis air di Kabupaten Indragiri Hilir adalah payau (berlumpur)	Membangun pipa air bersih dengan sumur bor
			Membantu masyarakat membuat penampungan air hujan
5.	Lemahnya administrasi pembangunan tempat pemakaman umum	Tidak adanya pembatas tanah bangunan tempat pemakaman umum	Membuat pagar pembatas antar wilayah penguburan jenazah dengan batas tanah masyarakat
6.	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan perkotaan kecamatan di wilayah pedesaan	Partisipasi Rekreasi pada masyarakat di Kecamatan tertentu	Terbuka HIjau dengan mementingkan aspek pertumbuhan perdagangan dan jasa transfortasi
			Membuat Taman Rekreasi di Kawasan Perkotaan dan Ibu Kota Kecamatan

2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Layanan urusan wajib dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianalisis dari empat indikator penting yaitu ((i) Rasio rumah ber IMB, (iii) Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk, (iii) Cakupan penegakan daerah dan peraturan kepala daerah, dan (iv) Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

a. Rasio Rumah Ber IMB

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

IMB salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, kenyamanan sekaligus kepastian hukum. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa target indikator rasio rumah ber IMB terus meningkat yaitu dari 4% pada tahun 2017 menjadi 5% pada tahun 2018.

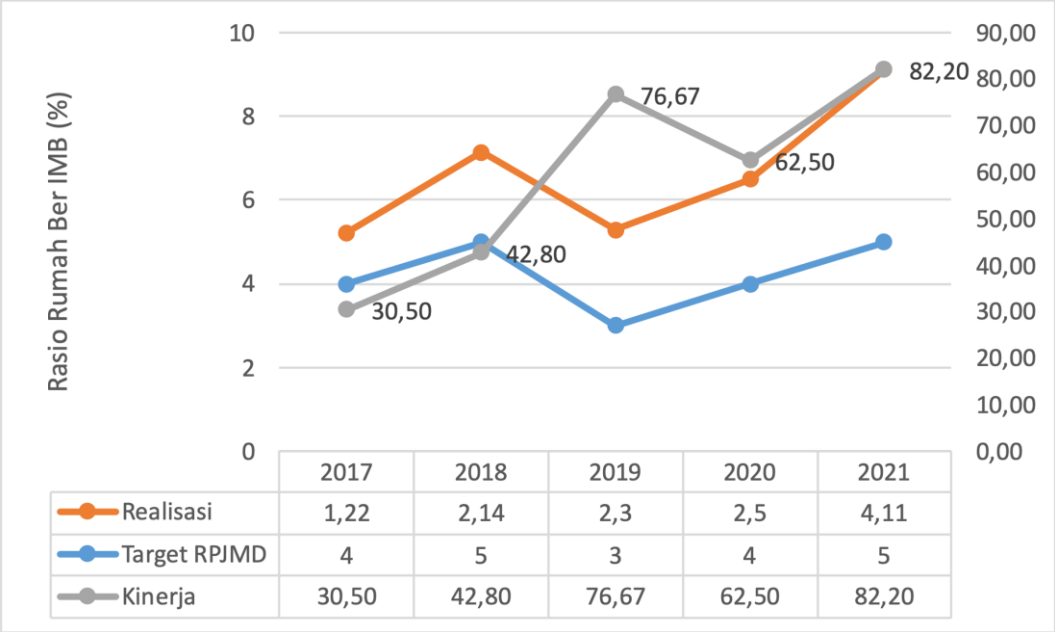

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	1,22	2,14	2,3	2,5	4,11
Target RPJMD	4	5	3	4	5
Kinerja	30,50	42,80	76,67	62,50	82,20

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.81.
Kinerja Indikator Rasio Rumah Ber IMB
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Selama periode 2017-2021, capaian realisasi indikator rasio rumah ber IMB di Kabupaten Indragiri Hilir terus dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada periode20 17-2020 , realisasi kinerja indikator rasio rumah ber IMB berkisar antara 30,50% - 62,50% yang terkategori rendah-sedang. Pada tahun 2021 Kinerja Indikator Rasio Rumah Ber IMB meningkat Menjadi 82,20% dan terkategori tinggi. Upaya untuk meningkatkan kinerja indikator ini selalun menjadi perhatian serius dalam pembangunan periode mendatang.

b. Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memeliharan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator rasio target personil satpol PP per 10.000 penduduk terus meningkat dari 0,06 tahun 2017 menjadi 0,07 tahun 2018.

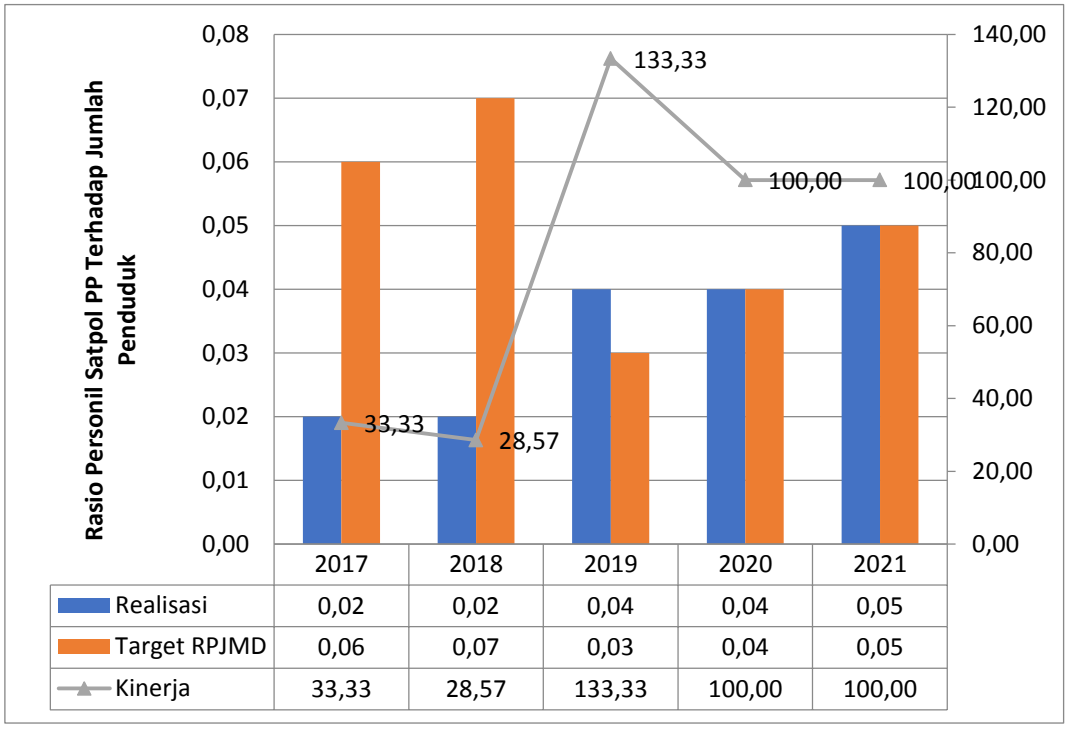

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	0,02	0,02	0,04	0,04	0,05
Target RPJMD	0,06	0,07	0,03	0,04	0,05
Kinerja	33,33	28,57	133,33	100,00	100,00

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2022

Gambar 2.82.
Kinerja Indikator Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Realisasi indikator rasio personil satpol PP per 10.000 penduduk Indragiri Hilir selama periode 2017-2018 terus dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada tahun 2019 Terdapat peningkatan kinerja sebesar 133,33 % dengan kategori sangat tinggi, meskipun harus menurunkan target pada RPJMD, dan pada tahun 2020-2021 realisasi

kinerja indikator rasio personil satpol PP per 10.000 penduduk Indragiri Hilir meningkat menjadi 100% yang terkategori Sangat tinggi.

c. Cakupan Penegakan Peraturan

Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilakukan oleh Satpol PP sebagai perangkat Pemerintahan Daerah kabupaten Indragiri Hilir. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 94% pada tahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2018.

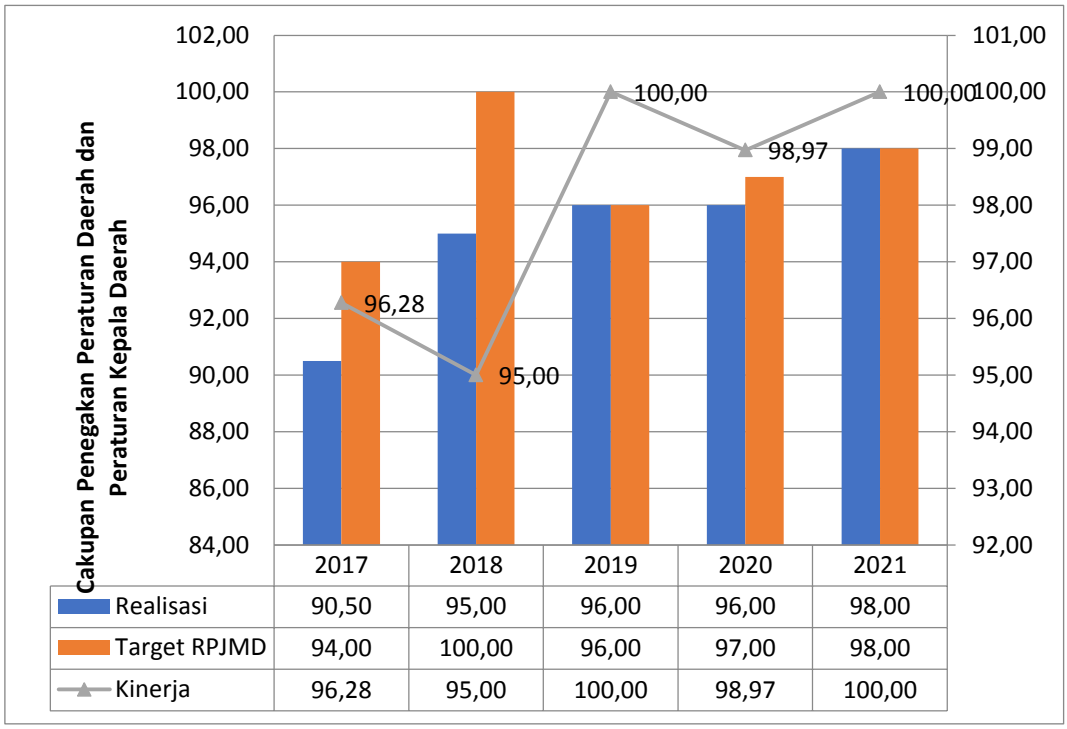

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	90,50	95,00	96,00	96,00	98,00
Target RPJMD	94,00	100,00	96,00	97,00	98,00
Kinerja	96,28	95,00	100,00	98,97	100,00

Sumber : BPS (Indragiri HilirDalam Angka,2022) dan LKPJ (2016 – 2022)

Gambar 2.83.
Kinerja Indikator Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Selama periode 2017-2021, capaian indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah di Kabupaten Indragiri Hilir relatif mendekati target yang telah ditetapkan. Meski capaian indikator ini terus meningkat namun peningkatkannya lebih rendah dibanding target sehingga realisasi kinerja memiliki trend menurun. Pada periode 2017-2021, realisasi kinerja berkisar antara 94,50% - 100% dan terkategori Sangat

Tinggi. Capaian indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah yang Sangat Tinggi harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

d. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok satuan polisi pamong praja disetiap kecamatan yang berada di Kabupaten/Kota. Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan antara lain (a) tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan, (b) antar batas wilayah dan (c) tempat keramaian/hiburan. Apabila telah tercipta kondisi 3 kali patroli dalam sehari diseluruh kecamatan pada Kabupaten maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi. PP sebagai perangkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terus meningkat yaitu dari 75% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2018.

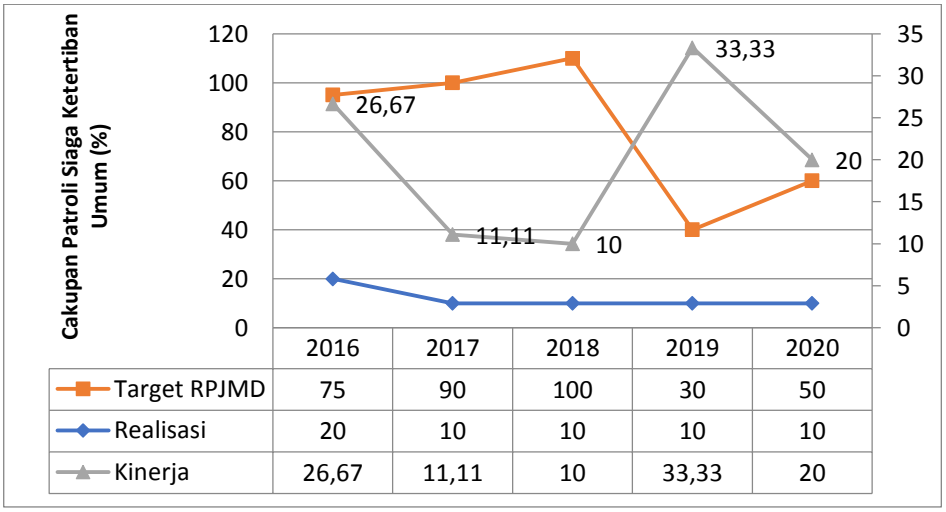

	2016	2017	2018	2019	2020
Target RPJMD	75	90	100	30	50
Realisasi	20	10	10	10	10
Kinerja	26,67	11,11	10	33,33	20

Sumber : BPS (Indragiri HilirDalam Angka,2016 - 2020) dan LKPJ (2016 – 2020)

Gambar 2.84.
Kinerja Indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Selama periode 2016-2020, capaian indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terus dibawah target yang ditetapkan dan bahkan semakin membesar gapnya. Pada tahun 2016, realisasi indikator patroli siaga ketertiban di Indragiri Hilir sebesar 20% dengan realisasi kinerja sebesar 26,67% dan terkategori sangat rendah. Pada tahun-tahun berikutnya realisasi indikator terus menurun sehingga realisasi kinerja juga terus menurun yaitu dari 11,11% yang terkategori Sangat rendah menjadi 10,00% yang terkategori Sangat Rendah. Secara umum, realiasi kinerja sebesar 43,85% dan terkategori Sangat Rendah. Rendahnya capaian indikator ini sangat terkait erat dengan ju,alh satpol PP yang jauh dari ideal sebagaimana diatur dalam permendagri No. 60 tahun 2012.

e. SPM Bidang Trantibumlinmas

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam SPM bidang Trantibumlinmas terdapat 5 jenis pelayanan dasar dengan total indikator berjumlah 4 indikator Batas waktu pencapaian target SPM bidang Trantibumlinmas adalah setiap tahun. Daftar jenis layanan dasar dan indikator kinerja SPM bidang Trantibumlinmas ditunjukkan pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27

Pencapaian Indikator SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN				Batas waktu capaian
			2018	2019	2020	2021	
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	0	0	0	0	Setiap Tahun

2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	17,78	18,47	42,08	24,98	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	70,04	63,47	78,25	79,20	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	0	35,29	58,82	Setiap Tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	0	0	35,29	58,82	Setiap Tahun

Sumber : https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Selama periode 2018 – 2021, capaian indikator SPM bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir ditunjukkan pada Tabel 2.27. Dari 4 indikator kinerja SPM Bidang Trantibumlinmas, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan seluruh indikator (100%) Tugas pelayanan bidang Trantibumlinmas dilaksanakan oleh 3 Perangkat Daerah yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Permasalahan /hambatan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis pelayanan dasar dan indikator serta solusinya ditunjukkan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28

Permasalahan/Hambatan Dalam penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Indragiri Hilir

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Hambatan	Solusi
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	1. Kurangnya dukungan anggaran 2. Minimnya sarana dan prasarana 3. Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia	1. Pemerintah Daerah agar memprioritaskan (Dukungan Anggaran) OPD yang menjadi Urusan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja)
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang belum menjangkau langsung masyarakat	Pembuatan media informasi baik berupa website, aplikasi, dll dalam penyampaian informasi kebencanaan bagi masyarakat
		Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap Kecamatan belum maksimal	Dukungan dari pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pencegahan dan Keiapsaiagaan di tingkat Kecamatan, Desa maupun tingkat RT dan RW
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Masih rendahnya pamahaman masyarakat tentang pencegahan kebencanaan terutaman di daerah rawan terjadinya bancana	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap Kecamatan dan desa
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	warga yang terdampak bencana	Perlunya regulasi yang jelas dalam pelaksanaan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Hambatan	Solusi
korban bencana	penyelamatan dan evakuasi korban bencana	melakukan evakuasi mandiri di rumah kerabat dan tetangga terdekat dan belum	penyelamatan dan evakuasi korban bencana sehingga lebih terarah dan sesuai target
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	(1) Jarak Tempuh diluar Respon Time, Sarana Prasarana belum memadai, dan belum terpenuhinya Kompetensi terhadap kebutuhan Armada Damkar	(1) Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan belum murni berbasis SPM, (2) Keterbatasan Anggaran menyebabkan tidak semua Program Kegitan dan Sub Kegiatan SMP tidak dapat di akomodi

2.1.3.1.6. Sosial

Layanan urusan wajib dasar bidang sosial dianalisis dari dua indikator penting yaitu (i) Penyandang Disabilotas maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dan (ii) PPKS yang menerima bantuan sosial.

a. Penerima Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlinduangan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteran Sosial.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial terus meningkat yaitu dari 90% pada tahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2018. Indikator

ini ditetapkan agar menjamin indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial di Kabupaten Indragiri Hilir menerima jaminan sosial .

Selama periode 2017-2021, realisasi capaian indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial hampir mendekati target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 – 2019, realisasi kinerja indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial berkisar antara 90,00% - 100% yang terkategori Tinggi – Sangat Tinggi. Secara keseluruhan, capaian realisasi kinerja indikator ini sebesar 93,55% dan terkategori Sangat Tinggi.pada tahun 2020 terjadi penurunan dengan realisasi kinerja 77,34% lalu mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 dengan realisasi kinerja 100% dengan kategori sangat tinggi, Meski capaian kinerja telah Sangat tinggi, namun upaya terus mempertahankan jinerja harus terus dilakukan agar penyandang cacat mendapat perlindungan sosial..

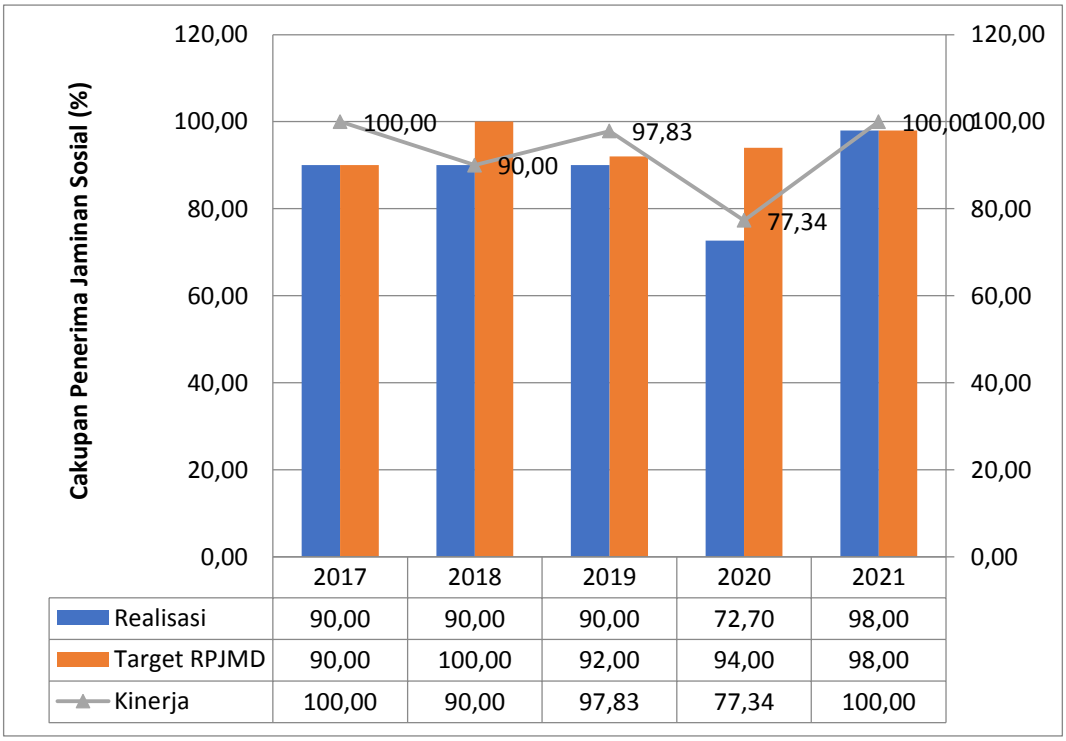

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	90,00	90,00	90,00	72,70	98,00
Target RPJMD	90,00	100,00	92,00	94,00	98,00
Kinerja	100,00	90,00	97,83	77,34	100,00

Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka,2016-2020) dan LKPJ (2016-2020)

Gambar 2.85.
Kinerja Indikator Cakupan Penerima Jaminan Sosial

di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

b. PPKS yang Menerima Bantuan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator PPKS yang menerima bantuan sosial terus meningkat yaitu dari 60% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2018. Indikator ini ditetap dan dimasukan dalam RPJMD untuk menjamin agar PPKS yang ada di Indragiri Hilir mendapat pembinaan dan bantuan sosial.

Selama periode 2017-2021, realisasi capaian indikator di Indragiri Hilir hampir sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada tahun 2017-2019, realisasi kinerja indikator ini sebesar 80 – 82,50% yang terkategori Tinggi. Pada tahun 2020 realisasi indikator sebesar 100% namun karena target meningkat sehingga realisasi kinerja meningkat menjadi 111,11% dan terkategori sangat Tinggi. dan di tahun 2021 realisasi PPKS penerima Bantuan sosial menurun menjadi 96 % dikarenakan target juga meningkat, Capaian indikator PPKS penerima bantuan sosial yang tinggi selama periode 2017-2021 perlu terus dipertahankan pada periode berikutnya.

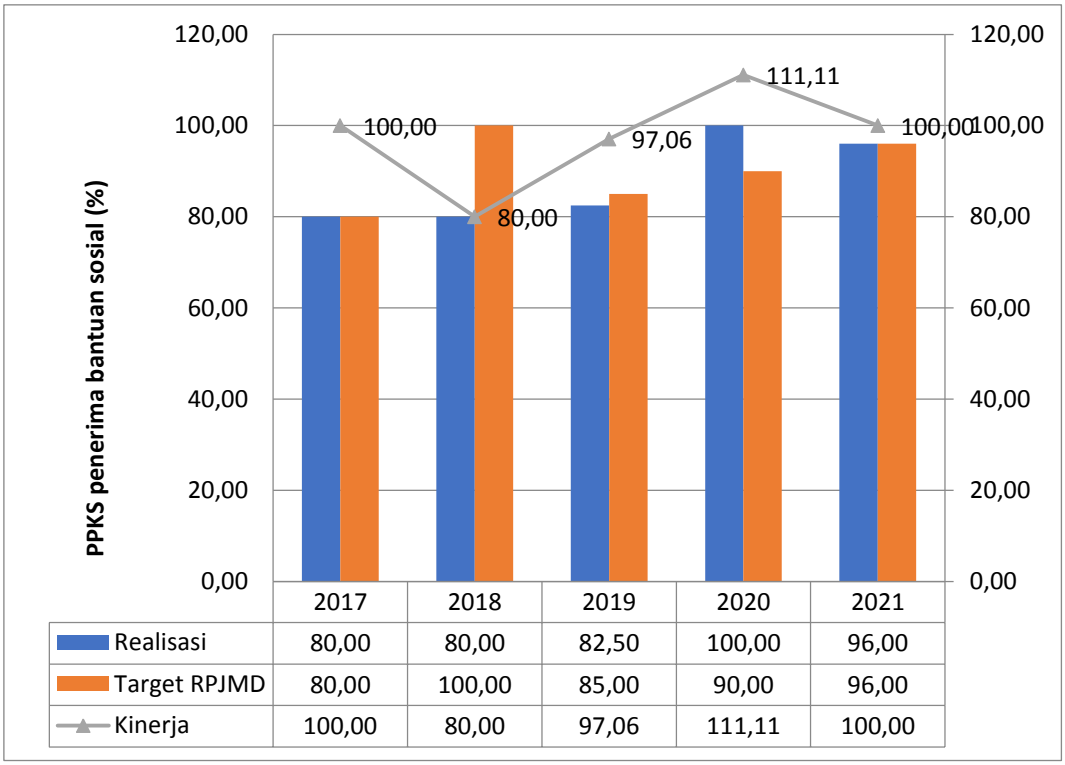

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	80,00	80,00	82,50	100,00	96,00
Target RPJMD	80,00	100,00	85,00	90,00	96,00
Kinerja	100,00	80,00	97,06	111,11	100,00

Sumber : Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.86
Kinerja Indikator PPKS Yang Menerima Bantuan Sosial
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa DTKS merupakan sumber data utama pemerintah dalam menetapkan sasaran bagi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dasar hukum dari hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Tujuan dari DTKS adalah agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Ayat 2, disebutkan bahwa DTKS meliputi:

1) Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti : fakir miskin dan anak terlantar.
2) Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti: keluarga penerima manfaat - program keluarga harapan (KPM PKH) - keluarga penerima manfaat – program sembako (KPM Sembako).
3) Potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti: tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Dalam pengelolaan DTKS dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) yang terintegrasi. SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan , penyajian dan penyimpanan DTKS dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Data DTKS Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan perbaikan (Update) setiap bulan dengan memasukan ke SIKS-NG Kemensos melalui akun Supervisor Kabupaten. Berikut data DTKS, PSKS dan TKSK di kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.29

Rekapitulasi DTKS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

No	Tanggal SK	Nomor SK	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
1	10 Januari 2022	2/HUK/2022	335.541	119.557
2	25 Januari 2022	10/HUK/2022	335.545	119.557
3	10 Februari 2022	21/HUK/2022	335.074	119.307
4	25 Februari 2022	29/HUK/2022	334.632	116.065

5	10 Maret 2022	41/HUK/2022	334.606	116.054
6	21 Maret 2022	46/HUK/2022	334.606	116.054
7	04 April 2022	52/HUK/2022	334.550	116.007
8	9 Mei 2022	81/HUK/2022	340.162	117.791
9	6 Juni 2022	110/HUK/2022	346.034	119.393
JUMLAH			**3.030.750**	**1.059.785**

Tabel 2. 30

Data Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 -2021

No	Jenis	Jumlah		Ket
1.	Pekerja Sosial	82	Orang	By Name By Address
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	142	Orang	By Name By Address
3.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	21	Orang	By Name By Address
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	18	LKS	By Name By Address
5.	Karang Taruna (KT)	4	KT	By Name By Address
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial	1	LK3	By Name By Address
7.	Keluarga Pioner	-	Orang	By Name By Address
8.	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	29	Kelompok	By Name By Address
9.	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	-	Orang	By Name By Address
10.	Penyuluh Sosial Fungsional	-	Orang	By Name By Address
11.	Penyuluh Sosial Masyarakat	71	Orang	By Name By Address
12.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	20	Orang	By Name By Address
13.	Dunia Usaha	8	Dunia Usaha	By Name By Address
Jumlah		**396**	**PSKS**	

Tabel 2.31

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

No	Kecamatan	Jumlah TKSK	Jenis Kelamin (L/P)
1	3	4	5
1	Kec. Batang Tuaka	1	L
2	Kec. Concong	1	P
3	Kec. Enok	1	L
4	Kec. Gaung	1	P
5	Kec. Gaung Anak Serka	1	L
6	Kec. Kateman	1	L
7	Kec. Kempas	1	L
8	Kec. Kemuning	1	L
9	Kec. Keritang	1	P
10	Kec. Kuindra	1	L
11	Kec. Mandah	1	L
12	Kec. Pelangiran	1	L
13	Kec. Pulau Burung	1	L
14	Kec. Reteh	1	L
15	Kec. Sungai Batang	1	L
16	Kec. Tanah Merah	1	L
17	Kec. Teluk Belengkong	1	L
18	Kec. Tembilahan	1	P
19	Kec. Tembilahan Hulu	1	P
20	Kec. Tempuling	1	P

Terkait Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terkait oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi. Karena permasalahan keterpencilan dan kemiskinan, maka KAT sebagai salah

satu penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu penangnan khusus agar dapat hidup setara dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir tersebar di beberapa Kecamatan, yakni Kecamatan Reteh, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Mandah, Kecamatan Kateman, Kecamatan Sungai Batang, Kecamatan Concong dan Kecamatan Kemuning. Kehidupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sangat tergantung pada sumber daya alam, terutama hutan, sungai dan laut yang sebagian besar merupakan daerah perairan di Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi Suku KAT di Kabupaten Indragiri Hilir tersebar pada beberapa desa/kelurahan, mereka pada umumnya hidup dipinggir pantai dengan mata pencaharian sebagai nelayan sedangkan yang di daratan dengan mata pencaharian bertani untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Demografis Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Indragiri Hilir ini terdapat di 7 (tujuh) Kecamatan dan tersebar di 12 (dua belas) Desa/Kelurahan, kehidupan mereka tergatung sekali pada sumber daya alam sekitarnya. Terutama sekali pada hutan, sungai dan laut yang sebagian besar merupakan daerah perairan di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun jumlah masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di kabupaten indragiri hilir yang terdapat di 7 (tujuh) Kecamatan dan tersebar di 12 (dua belas) Desa/Kelurahan.

Mata pencaharian utama masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Duano di Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar sebagai Nelayan disamping itu ada juga sebagai buruh, pedagang, wiraswasta dan kebanyakan memiliki mata pencaharian lainnya, sedangkan masyarakat Suku Kubu umumnya bertani untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 2.32

Jumlah Data Komunitas Adat Terpencil (KAT)

No	Jumlah	Alamat	Penanganan Yang Telah Dilakukan
1	27 KK	Selensen, Kecamatan Kemuning	Bantuan biaya hidup/sembako
			Bimbingan Sosial terhadap Suku KAT
			Bantuan perumahan untuk Suku KAT (APBN/Kemensos RI)

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupten/Kota) dan non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. SLRT menggunakan satu sistem informasi SIKS-NG yaitu suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

SLRT diatur dalam sebuah Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Permensos tersebut ditetapkan Menteri Sosial pada tanggal 2 Agustus 2018 di Jakarta. Pertimbangan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah: Saat ini program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu masih bersifat sektoral sehingga

mengakibatkan penanganan fakir miskin kurang efektif dan efisien. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu.

SLRT juga dikembangkan di Desa dengan nama Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Secara umum Puskesos yaitu tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Melalui Puskesos ini diharapkan layanan SLRT dekat dengan masyarakat pedesaan dan mereka tidak harus menempuh jarak yang jauh ke lokasi SLRT di tingkat kota atau kabupaten.

Di Kabupaten Indragiri Hilir telah terbentuk 20 Puskesos yang tersebar di 14 Kecamatan, untuk anggaran pelaksanaan kegiatan sampai hari ini belum tersedia. Sebagai Puskesos Percontohan adalah Puskesos Sri Gemilang Kab. Inhil, Puskesos Mayang Kelapa di Kel. Tembilahan Hilir dan Puskesos Melati di Kec. Tempuling.

c. SPM Bidang Sosial

SPM Bidang Sosial merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal. Hal ini tertuang dalam Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, dijelaskan bahwa yang dimaksud Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.. Daftar

jenis layanan dan indikator SPM Bidang Sosial ditunjukkan pada Tabel 2.33 berikut

Tabel 2.33.

Jenis Pelayanan, Indikator dan Capaian Bidang Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	CAPAIAN				Batas waktu capaian
				2018	2019	2020	2021	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	orang	2	96	8	40	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi anak telantar di luar panti sosial diluar panti	orang	28	22	25	30	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	orang	100	100	100	100	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	orang	5	8	5	10	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	jiwa	1025	136	330	439	Setiap Tahun

Selama periode 2018 – 2021, capaian indikator SPM Bidang Sosial Kabupaten Indragiri Hilir ditunjukkan pada Tabel 2.33. Pada tahun 2018-2021, Pemerintah Kabupaten Indagiri Hilir telah menerapkan 5 indikator (100%) pada SPM bidang sosial.

Permasalahan /hambatan dalam penerapan dan pencapainan SPM bidang sosial di Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis pelayanan dan indikator serta solusinya ditunjukkan pada Tabel 2.34 dibawah ini.

Tabel 2.34

Permasalahan/hambatan Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Indragiri Hilir

Jenis Pelayanan	Indikator		Hambatan	Solusi
1. Pelaksanaan program/kegiatan				

Jenis Pelayanan	Indikator		Hambatan	Solusi
bidang				
a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	1	Persentase (%) PPKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Letak Daerah pada Perairan Pasang Surut satu kendala lambatnya distribusi Bansos kepada PPKS	Menignkatnya Koordinasi dengan pihak kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)
b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2	Persentase (%) PPKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Pemberdayaan Sosial masyarakat melalui KUBE belum berjalan secara maksimal karena belum serius Kecamatan ada Pendamping KUBE	Meningkatkan Koordinasi kerja dengan pihak Kecamatan dan membentuk petugas Pendamping KUBE
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial:				
a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	3	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	Menyacu kepada isu no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Panti yang dikelola oleh pemerintah merupakan Kewenangan Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk Bantuan Sosial bagi Panti-panti swasta
b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	4	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	Belum terbentuknya wahana kesejahteraan berbasis masyarakat (WKSB)	Mengupayakan Secepatnya melalui Koordinasi dengan pihak kecapatan membentuk WKSBM
3. Penanggulangan korban Bencana:				
a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	5	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Sulitnya Proses Administrasi untuk Pencairan dana Tanggap Darurat Bencana pada BPKAD Kab. Inhil menyebabkan Bantuan Sosial tidak maksimal	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pelaporan Bencana secara berkala
b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/kota	6	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Sulitnya proses pencairan dana tanggap darurat Bencana, walaupun Evakuasi Korban sudah dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Bencana daerah	Meningkatkan Koordinasi kerja dengan Tim penanggulangan bencana alam proses bantuan Tanggap darurat Bencana berjalan dengan yang diharapkan

Jenis Pelayanan	Indikator		Hambatan	Solusi
4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:				
- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Masih Banyaknya PPKS yang belum menerima jaminan sosial terutama yang berada di daerah terpencil, kesulitan peralatan e-KTP, sehingga tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi terkait agarn masyarakat yang belum dapat menerima Jaminan Sosial dapat masih data Nasional Penerima bantuan iuran Jaminan Kesejahteraan nasional (PBI-JKN)

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Layanan urusan wajib non dasar terdiri dari 18 layanan yaitu (i) Tenaga Kerja, (ii) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (iii) Pangan, (iv) Pertanahan, (v)Lingkungan Hidup, (vi) Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (vii) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (viii) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (ix) Perhubungan, (x) Komunikasi dan Informatika, (xi) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (xii) Penanaman Modal, (xiii) Kepemudaan dan Olahraga, (xiv) Statistik, (xv) Persandiaan, (xvi) Kebudayaan, (xvii) Perpustakaan dan (xviii) Kearsipan

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Layanan urusan wajib non dasar bidang tenaga kerja dianalisis dari indikator (i) Tingkat partisipasi Angkatan Kerja, (ii) Pencari kerja yang ditempatkan dan (iii) Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

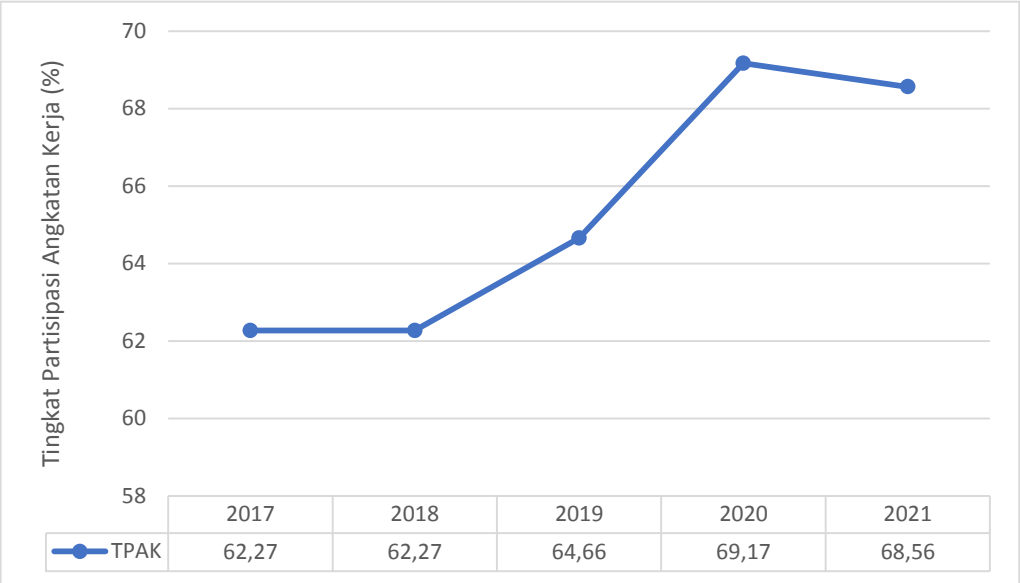

Sumber : BPS Provinsi Riau, Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2022, diolah Bappeda, 2022

Gambar 2.87
Perkembangan TPAK Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2017 – 2021

Selama periode 2017 – 2021, TPAK Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif. Pada tahun 2017 dan 2018 TPAK Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 62,27% yang berarti, dari 100 orang penduduk Indragiri Hilir berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 62,27% tersedia untuk memproduksi. Pada tahun 2019, TPAK meningkat diangka 64,66% dan kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 69,17% yang kemudian menurun pada tahun 2021 sebesar 68,56%.

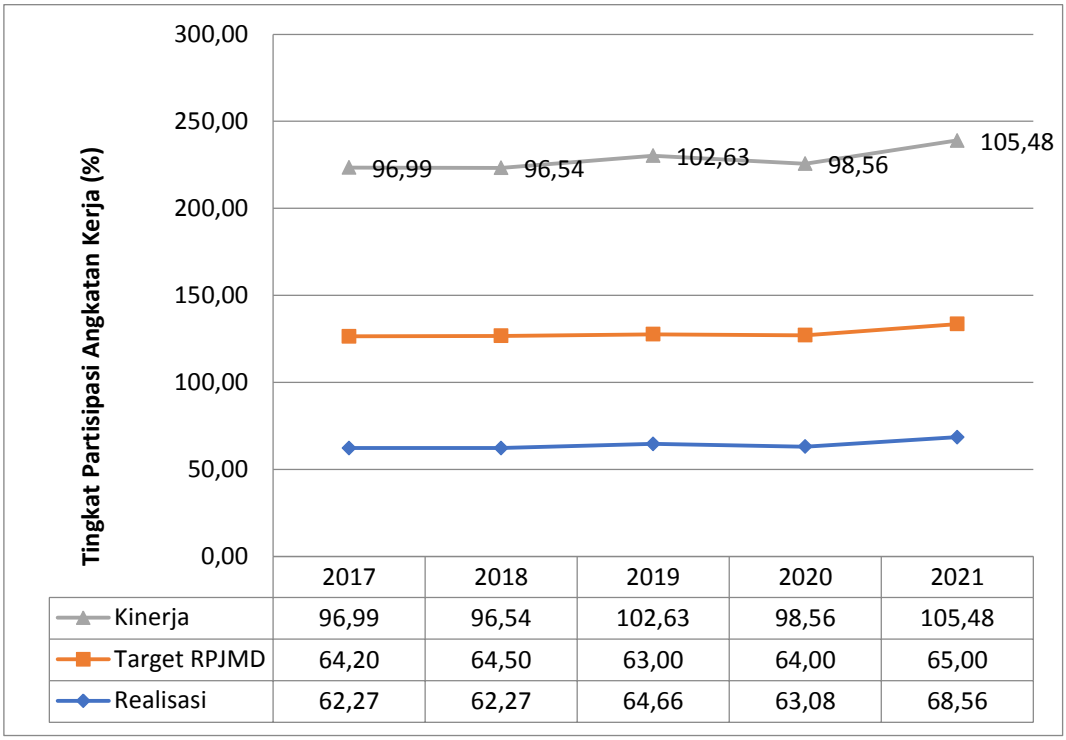

	2017	2018	2019	2020	2021
Kinerja	96,99	96,54	102,63	98,56	105,48
Target RPJMD	64,20	64,50	63,00	64,00	65,00
Realisasi	62,27	62,27	64,66	63,08	68,56

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2022

Gambar 2.88
Kinerja Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa target indikator TPAK telah ditetapkan terus meningkat dari 64,20% pada tahun 2017 menjadi 64,50% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, realisasi TPAK Indragiri Hilir berada diatas target sehingga realisasi kinerja sebesar 102,63% yang terkategori Sangat Tinggi. pada tahun 2020 realiasai mengalami penurunan dari target sebesar 98,56% dan di tahun 2021 kembali meningkat dengan kinerja 105,48 % dengan kategori sangat tinggi Pencapaian TPAK dan kinerja yang Sangat Tinggi ini perlu dipertahankan.

b. Pencari kerja yang ditempatkan

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan (Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. PER.07/MEN/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja). Selama periode 2016-2020, pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat dari 56,37% pada tahun 2016 meningkat menjadi 82,74% pada tahun 2017.

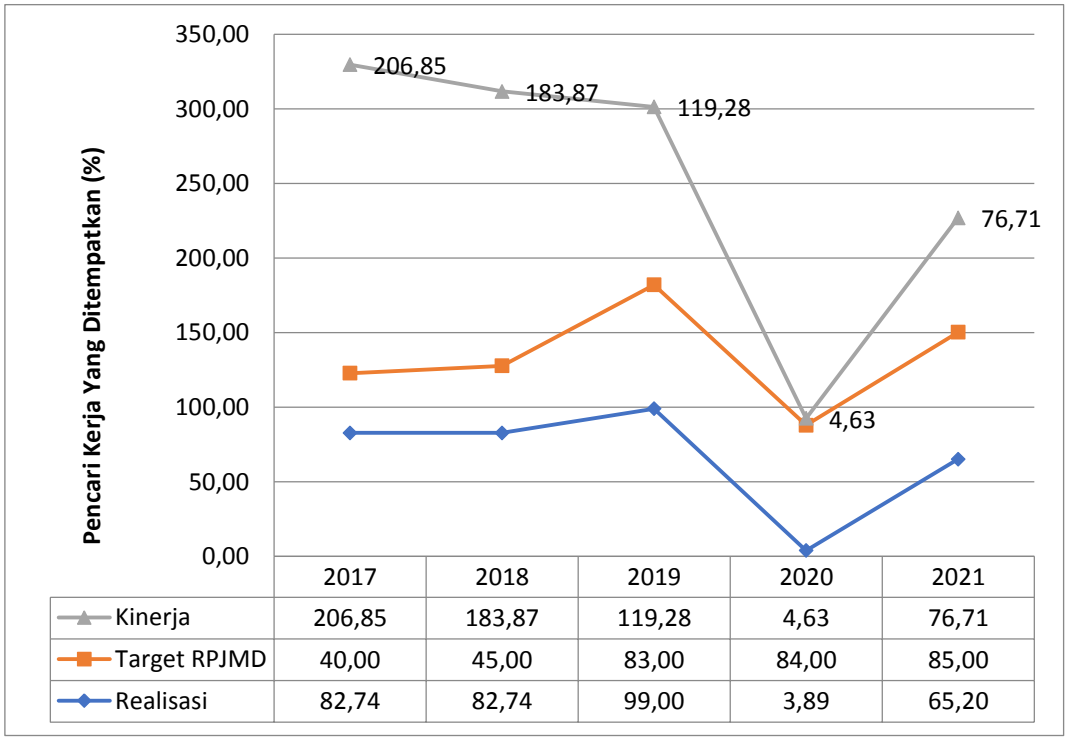

	2017	2018	2019	2020	2021
Kinerja	206,85	183,87	119,28	4,63	76,71
Target RPJMD	40,00	45,00	83,00	84,00	85,00
Realisasi	82,74	82,74	99,00	3,89	65,20

Sumber : https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.89.
Kinerja Indikator Pencari Kerja Yang Ditempatkan
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan target indikator pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir terus meningkat dari 40% pada tahun 2017 menjadi 50% pada tahun 2018. Realisasi indikator pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir ini, capainnya umumnya diatas target kecuali pada tahun 2020 yang merosot

dibawah target. Kemudian ditahun 2021 realiasi kembali meningkat menjadi 65,20 % dengan kinerja 76,71 % ,. Capaian kinerja indikator yang tinggi ini perlu terus dipertahankan.

c. Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan

Selama periode 2017-2021, realisasi indikator tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan memiliki trend berfluktuatif menurun yaitu dari 100% pada tahun 2017 sama 100% pada tahun 2018 dan Pada Tahun 2018-2020 terus menurun menjadi 0%-75%. Kemudian Kembali Meningkat di tahun 2021 dengan realiasasi 50% dengan kategori rendah, Upaya untuk meningkatkan indikator ini perlu senantiasa dilakukan sehingga tenaga yang dilatih dapat membuka lapangan usaha mandiri.

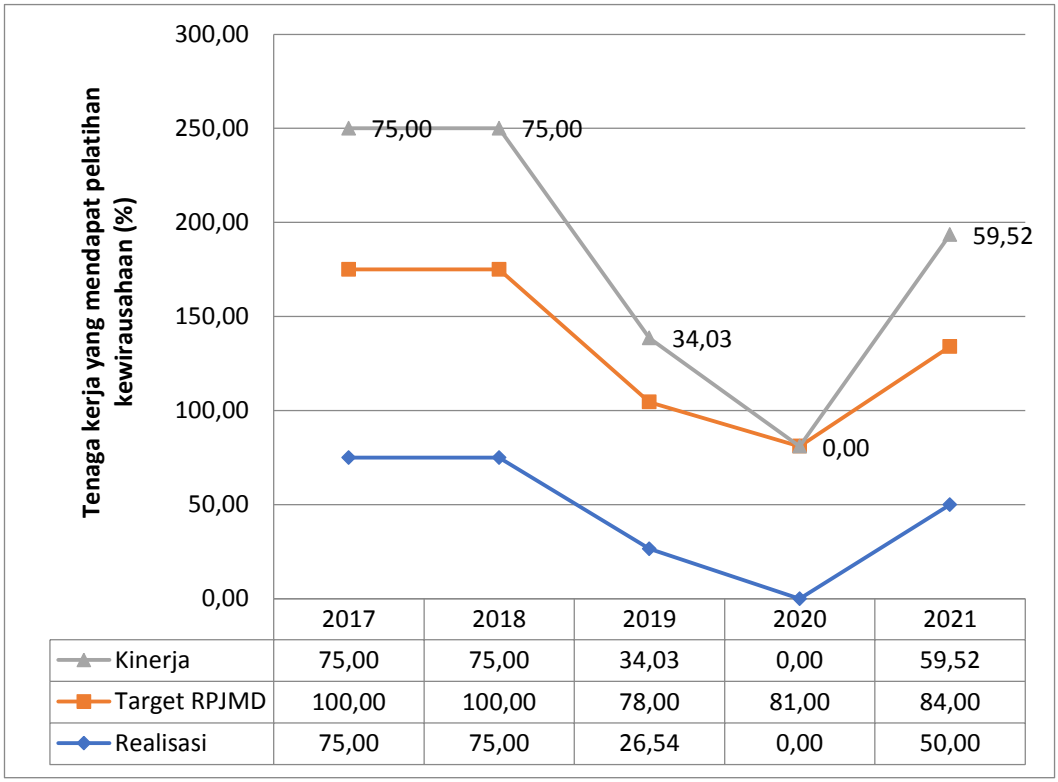

	2017	2018	2019	2020	2021
Kinerja	75,00	75,00	34,03	0,00	59,52
Target RPJMD	100,00	100,00	78,00	81,00	84,00
Realisasi	75,00	75,00	26,54	0,00	50,00

Sumber : https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.90.
Kinerja Indikator Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan urusan wajib non dasar bidang tenaga kerja dianalisis dari indikator (i) Indeks Pembangunan Gender, (ii) Indeks Pemberdayaan Gender dan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.

a. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen.

Selama periode 2017–2021, IPG Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat yaitu dari 81,69% pada tahun 2017 meningkat menjadi 82,37% pada tahun 2021. Bila dibandingkan dengan IPG Kabupaten sekitarnya serta IPG Provinsi Riau memperlihatkan bahwa IPG Indragiri Hilir adalah yang terendah. Oleh karena itu, upaya meningkatkan pembangunan perempuan di Indragiri Hilir dari bidang ekonomi dan non ekonomi perlu terus ditingkatkan khususnya dalam peran serta perempuan dalam bekerja.

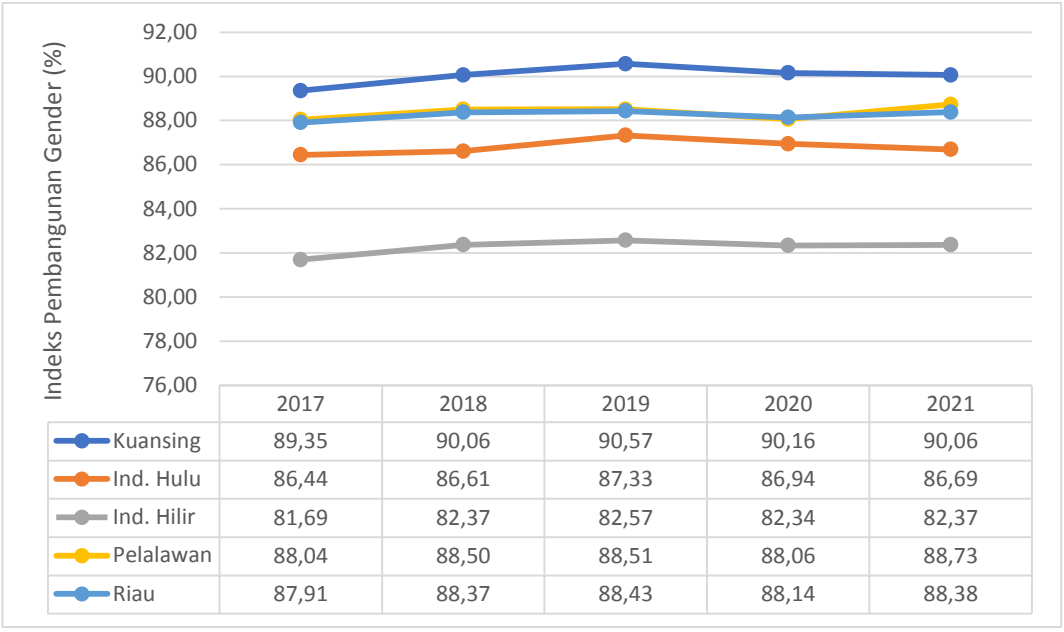

	2017	2018	2019	2020	2021
Kuansing	89,35	90,06	90,57	90,16	90,06
Ind. Hulu	86,44	86,61	87,33	86,94	86,69
Ind. Hilir	81,69	82,37	82,57	82,34	82,37
Pelalawan	88,04	88,50	88,51	88,06	88,73
Riau	87,91	88,37	88,43	88,14	88,38

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2022

Gambar 2.91.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2017-2021

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator IPG Kabupaten Indragiri Hilir dari 84,00% pada tahun 2017, meningkat menjadi 85% pada tahun 2018. Selama periode ini, capaian indikator IPG Indragiri Hilir berada dibawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2019-2021, capaian indikator IPG sebesar 82,34% dan 82,57% dengan realisasi kinerja sebesar 98,90% - 99,22% yang terkategori Sangat Tinggi. Capaian realisasi kinerja IPG Indragiri Hilir selama periode ini harus terus dipertahankan dan ditingkat nilainya sehingga dapat melampaui IPG Kabupaten Sekitarnya.

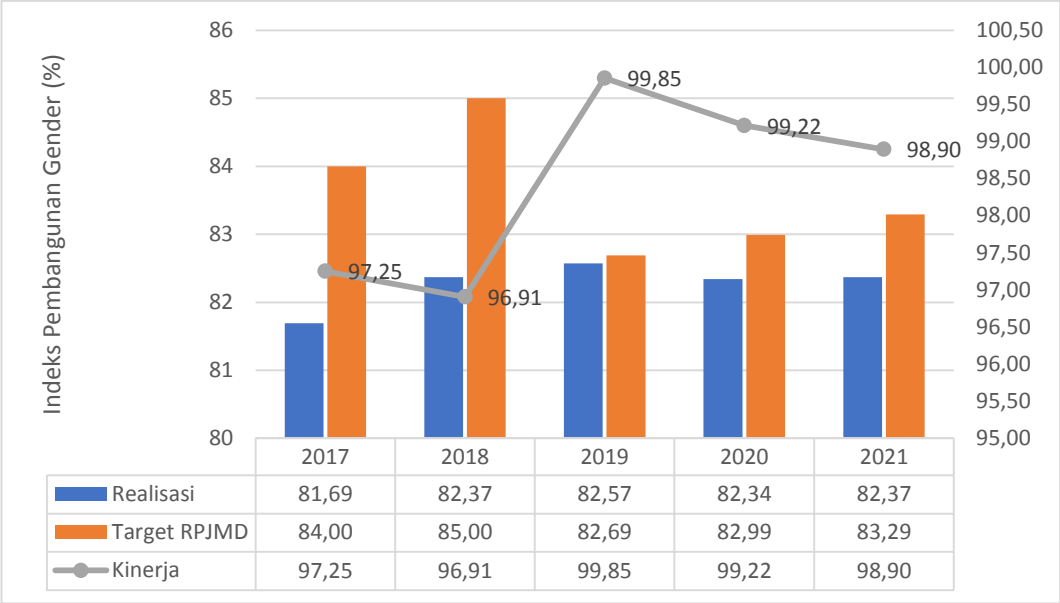

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.92.
Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021

b. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama periode 2017–2021, IDG Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat yaitu dari 59,43% pada tahun 2017, meningkat menjadi 64,50 pada tahun 2021. Bila capaian IDG Indragiri Hilir ini dibandingkan dengan capaian IDG Kabupaten sekitarnya menunjukkan bahwa IDG Indragiri Hilir lebih tinggi dari IDG Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi pada tahun 2019-2021. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan indikator IDG Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 1,65% per tahun.

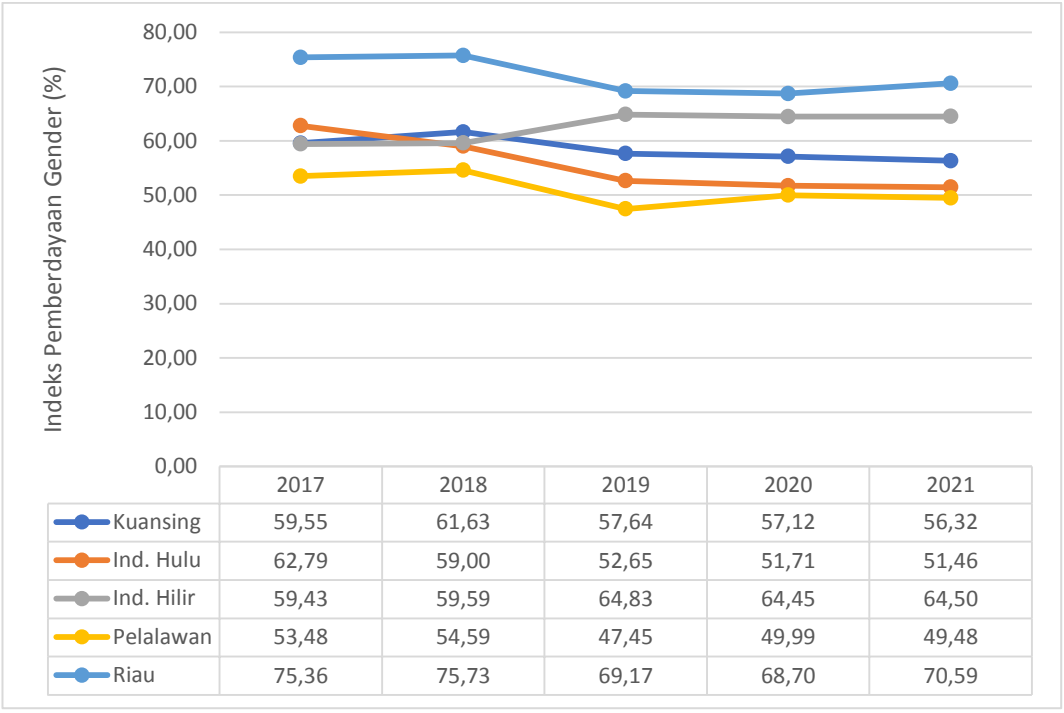

	2017	2018	2019	2020	2021
Kuansing	59,55	61,63	57,64	57,12	56,32
Ind. Hulu	62,79	59,00	52,65	51,71	51,46
Ind. Hilir	59,43	59,59	64,83	64,45	64,50
Pelalawan	53,48	54,59	47,45	49,99	49,48
Riau	75,36	75,73	69,17	68,70	70,59

Sumber: BPS Provinsi Riau, diolah Bappeda, 2022

Gambar 2.93.
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2017-2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator IDG Indragiri Hilir meningkat dari 61% pada tahun 2016 menjadi 62% pada tahun 2018. Realisasi Indikator IDG Kabupaten Indragiri Hilir sedikit dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Selama periode 2017-2021, realisasi kinerja indikator IDG Indragiri Hilir berkisar antara 96,11% - 102,74% dan terkategori Sangat Tinggi. Tingginya capaian kinerja indikator IDG ini perlu terus dipertahankan sehingga IDG Indragiri Hilir dapat terus meningkat melebih IDG Kabupaten Sekitarnya.

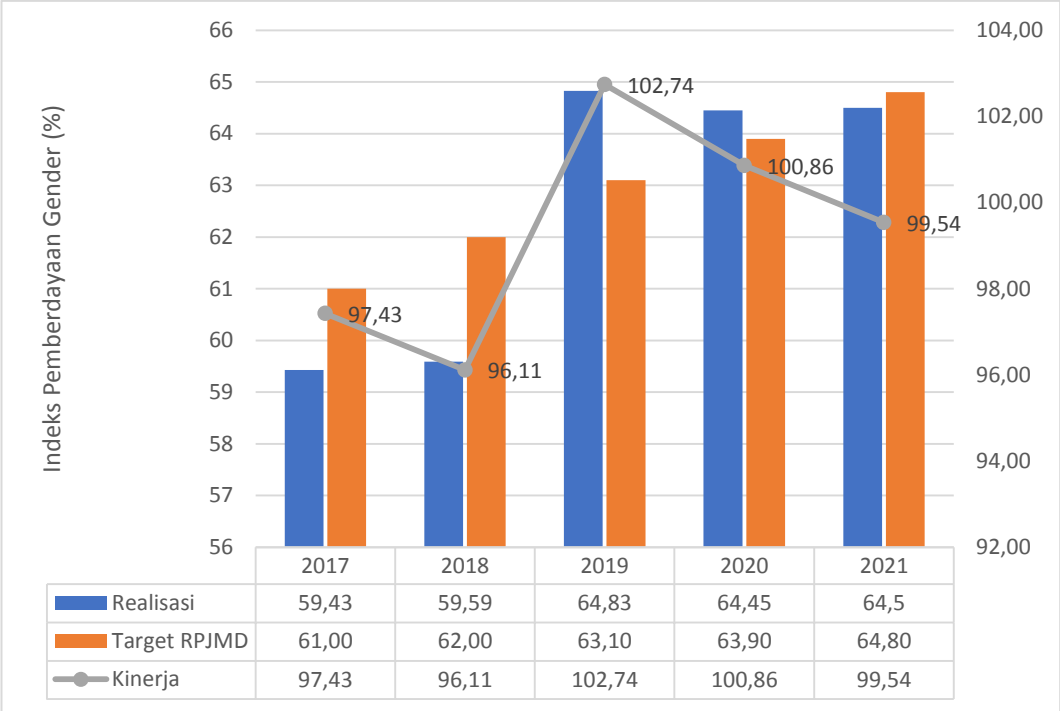

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.94.
Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021

c. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Bank Dunia menyatakan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih rendah. Masih rendahnya partisipasi itu karena terhambat masih kurangnya layanan pengasuhan anak baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Hanya sekitar 53,5 persen perempuan usia kerja di Indonesia yang menjadi bagian dari angkatan kerja atau jauh di bawah rata-rata 67,7 persen untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik.

Selama periode 2017-2021, indikator partisipasi angkatan kerja perempuan di Indragiri Hilir terus meningkat meski dibawah target RPJMD Indragiri Hilir. Selama periode ini realisasi kinerja indikator partisipasi angkatan kerja perempuan berkisar antara 97,84% - 103,83% dan terkategori pencapaian yang Sangat Tinggi. Namun, pada tahun 2021, capaian indikator ini mengalami penurunan yang cukup signifikan

sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dimana banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Capaian kinerja ini perlu terus ditingkatkan agar IPG dan IDG Kabupaten Indragiri Hilir meningkat lebih cepat lagi dan melampaui IDG dan IPG Kabupaten tetangga dan Provinsi Riau

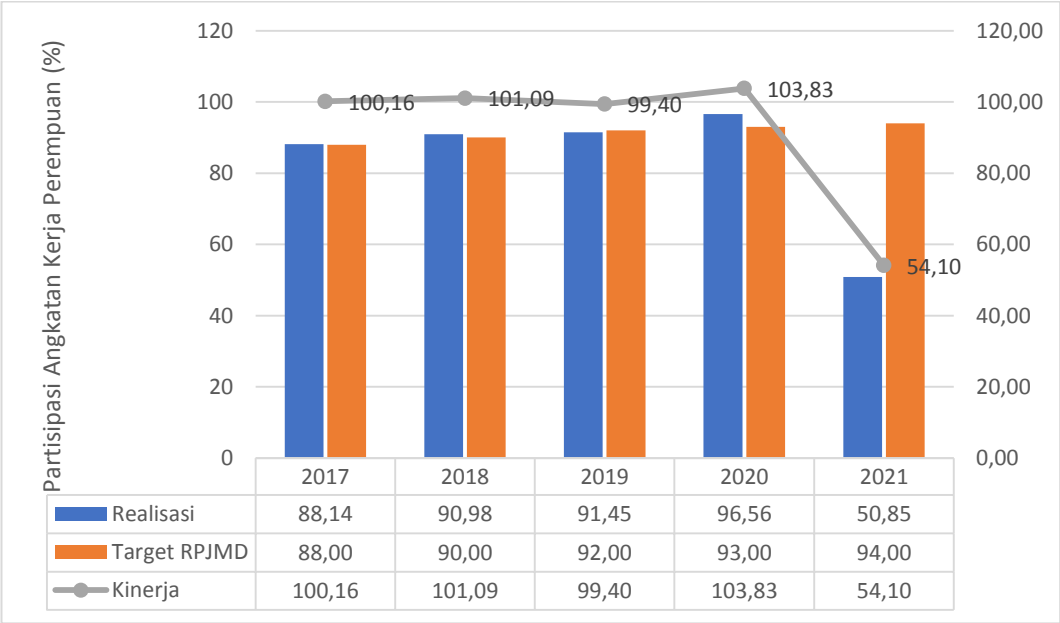

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	88,14	90,98	91,45	96,56	50,85
Target RPJMD	88,00	90,00	92,00	93,00	94,00
Kinerja	100,16	101,09	99,40	103,83	54,10

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.95.
Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021

2.1.3.2.3. Pangan

Layanan urusan wajib non dasar bidang tenaga kerja dianalisis dari indikator (i) ketersediaan pangan utama dan (ii) skor Pola Pangan Harapan (PPH)

a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama beras di Kabupaten Indragiri Hilir, selama periode 2016 – 2020, trendnya berfluktuatif menurun. Pada tahun 2016, ketesediaan pangan utama beras di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 92,381% menurun menjadi 91,518% pada tahun 2017 dan seterusnya menurun menjadi 81,373% pada tahun 2020. Bila indikator ketersediaan pangan utama beras Kabupaten Indragiri Hilir dibandingkan

dengan Kabupaten tetangga menunjukkan bahwa ketersedian pangan utama beras di Indragiri Hilir adalah yang tertinggi. Hal ini dimungkinkan karena produksi beras di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terbesar di Riau dengan rasio produksi terhadap konsumsi sebesar 0,85% yang berarti bahwa produksi beras Indragiri Hilir baru mampu mencukupi kebutuhan konsumsi beras di Indragiri Hilir sebesar 85%. Kekurangannya disuplai oleh Bulog dan Provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Upaya untuk berswasembada pangan di Indragiri Hilir perlu terus diupayakan agara ketersediaan pangan inidapat terus terjamin.

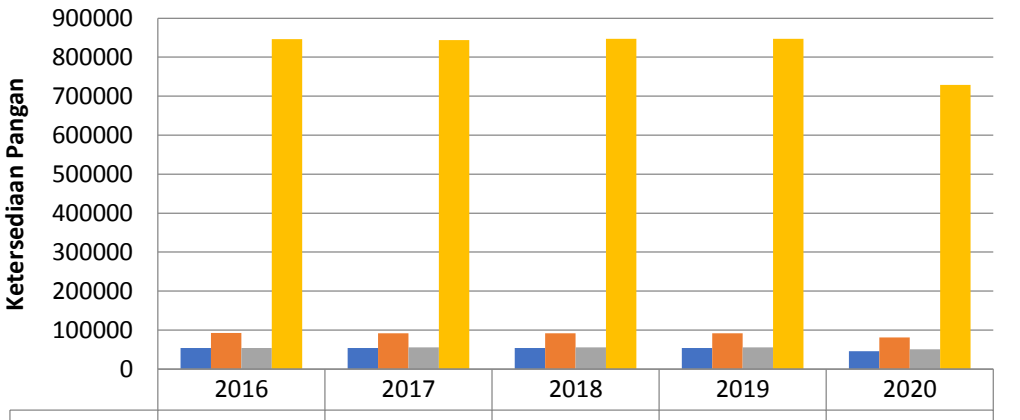

	2016	2017	2018	2019	2020
Inhu	54385	53968	54179	54190	46120
Inhil	92831	91518	91875	91894	81373
Pelalawan	54355	55601	55818	55830	50963
Riau	846373	843661	846954	847128	729143

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau (2020) dan LKPJ (2016 – 2020)

Gambar 2.96.
Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya
Tahun 2016-2020

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator ketersediaan pangan utama beras terus meningkat dari 97% pada tahun 2017 menjadi 103,9% pada tahun 2021. Selama periode ini, capaian indikator ini umumnya sama atau diatas target RPJMD kecuali pada tahun 2017 sehingga realisasi kinerja berkisar antara 97,71% - 103,9% dan

terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian indikator ketersediaan pangan utama beras ini Sangat Tinggi, namun upaya untuk terus berupaya untuk meningkatkan produksi sehingga rasio produksi sama atau lebih tinggi dibanding konsumsi perlu terus diupayakan.

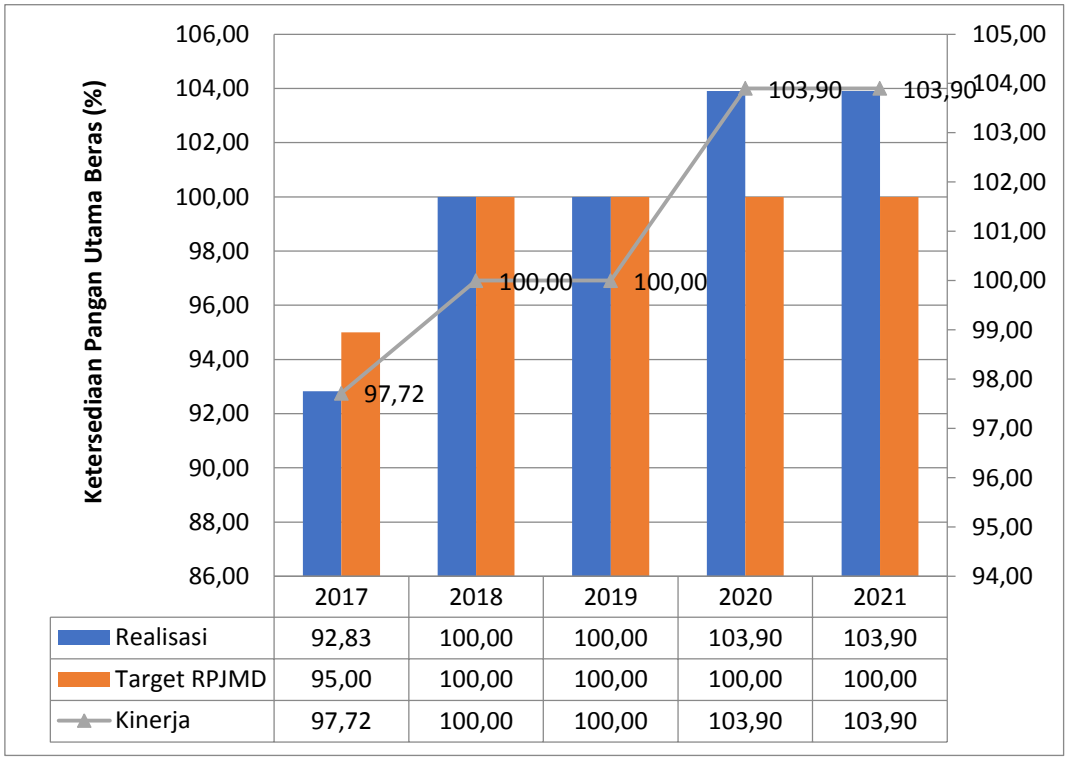

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	92,83	100,00	100,00	103,90	103,90
Target RPJMD	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kinerja	97,72	100,00	100,00	103,90	103,90

Gambar 2.97.
Kinerja Indikator Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021

b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan

untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Selama periode 2016 -2020, skor PPH indragiri memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2019 – 2020, posisi skor PPH Indragiri Hilir adalah diposisi tengah dibanding skor PPH kabupaten tetangga. Pada tahun 2016 – 2017, skor PPH Indragiri Hilir bergerak dengan percepatan yang lebih tinggi sehingga pada tahun 2016/2017 , skornya tertinggi dibanding skor PPH kabupaten tetangga. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan skor PPH Kabupaten Indragiri Hilir 2,52% per tahun.

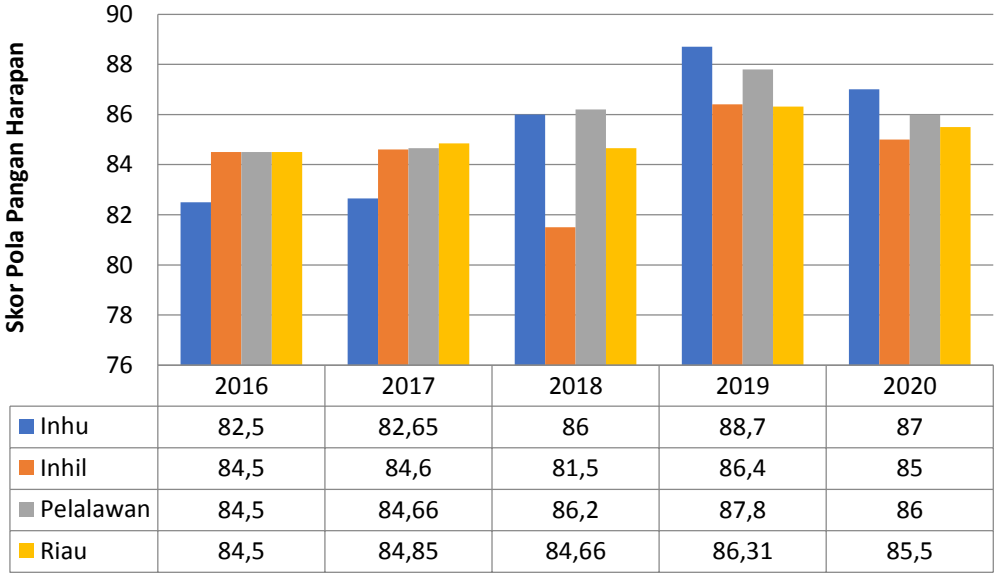

	2016	2017	2018	2019	2020
Inhu	82,5	82,65	86	88,7	87
Inhil	84,5	84,6	81,5	86,4	85
Pelalawan	84,5	84,66	86,2	87,8	86
Riau	84,5	84,85	84,66	86,31	85,5

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau (2017) dan LKPJ (20136– 2020)

Gambar 2.98.
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan
di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya
Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir , indikator Skor PPH ini telah ditetapkan meningkat yaitu dari 88,00% pada tahun 2017 meningkat menjadi 90,00% pada tahun 2020. Realisasi skor PPH pada periode ini berfluktuatif meningkat dengan realisasi kinerja berkisar antara 93,09% -

100,00% yang terkategori Sangat Tinggi. Kemudian di tahun 2021 terjani menurunan menjadi 86% penurunan ini juga terjadi karena peningkatan target RPJMD, namun Capaian indikator skor PPH perlu terus ditingkatkan sehingga akan mendorong kepada peningkatan angka harapan hidup.

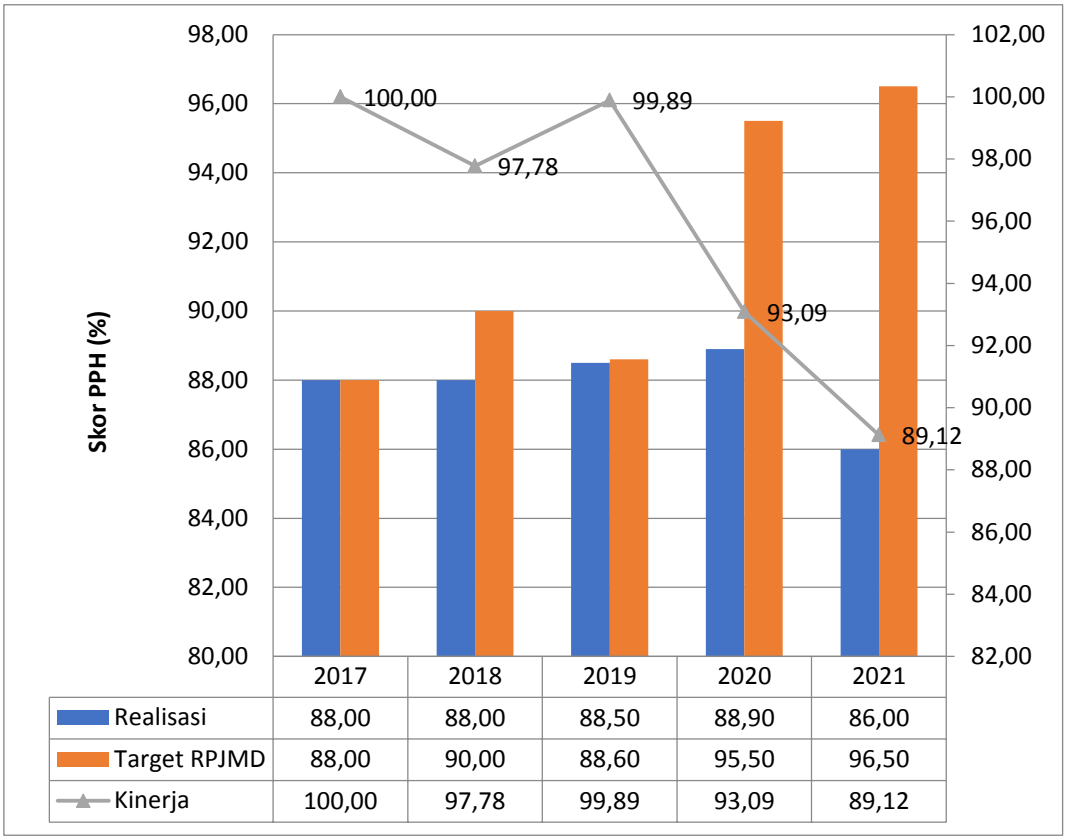

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	88,00	88,00	88,50	88,90	86,00
Target RPJMD	88,00	90,00	88,60	95,50	96,50
Kinerja	100,00	97,78	99,89	93,09	89,12

Sumber: https://sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.99.
Kinerja Indikator Skor Pola Pangan Harapan
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

2.1.3.2.4. Pertanahan

Layanan urusan wajib non dasar bidang tenaga kerja dianalisis dari indikator persentase luas tanah bersertifikat. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator persentase luas tanah bersertifikat di kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 44% pada tahun 2016 menjadi 46% pada tahun 2018. Selama periode ini,

realisasi capaian indikator persentase luas tanah bersertifikat di Kabupaten Indragiri Hilir relatif kosntan. Target yang terus meningkat dengan capain yang konstans maka realisasi kinerja terus menurun yaitu dari 94,07% menjadi 89,98% yang terkategori dari Sangat Tinggi hingga Tinggi. Upaya peningkatan indikator luas tanah bersertifikat perlu terus ditingkatkan lebih baik melalui Prona maupun program daerah karena indikator ini merupakan surat tanda bukti pemegang hak tanah bagi masyarakat.

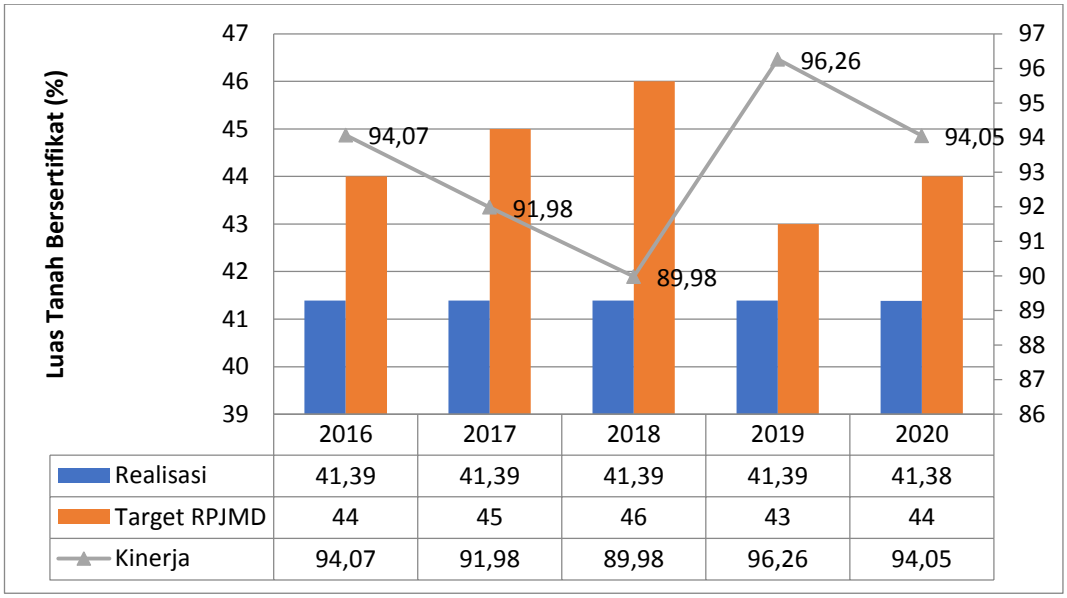

	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi	41,39	41,39	41,39	41,39	41,38
Target RPJMD	44	45	46	43	44
Kinerja	94,07	91,98	89,98	96,26	94,05

Sumber : LKPJ Inhil (2016 - 2020)

Gambar 2.100.
Kinerja Indikator Luas tanah bersertifikat
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Layanan urusan wajib non dasar bidang Lingkungan Hidup dianalisis dari indikator (i) penegakan hukum lingkungan dan (ii) penanganan sampah.

a. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan Hukum Lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum

lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, dan pidana. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, telah ditetapkan bahwa indikator penegakan hukum lingkungan terus meningkat yaitu dari 95% pada tahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2018.

Selama periode 2017 – 2021, realisasi indikator penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend meningkat dan berada dibawah target kecuali pada tahun 2017 yang relatif sama dengan target RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator penegakan hukum berkisar antara 95% - 100,% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada Tahun 2021 realisasi indikator mencapai 100% dengan Realisasi Kinerja sebesar 102 %. Meski capaian penegakan hukum lingkungan rata-ratanya terkategori Sangat Tinggi, namun upaya penegakan hukum lingkungan ini harus terus dilakukan meski dengan keterbatasan tenaga fungsional pengawas lingkungan daerah. Upaya menambah kuantitas tenaga fungsional pengawas lingkungan perlu mendapat perhatian kedepannya.

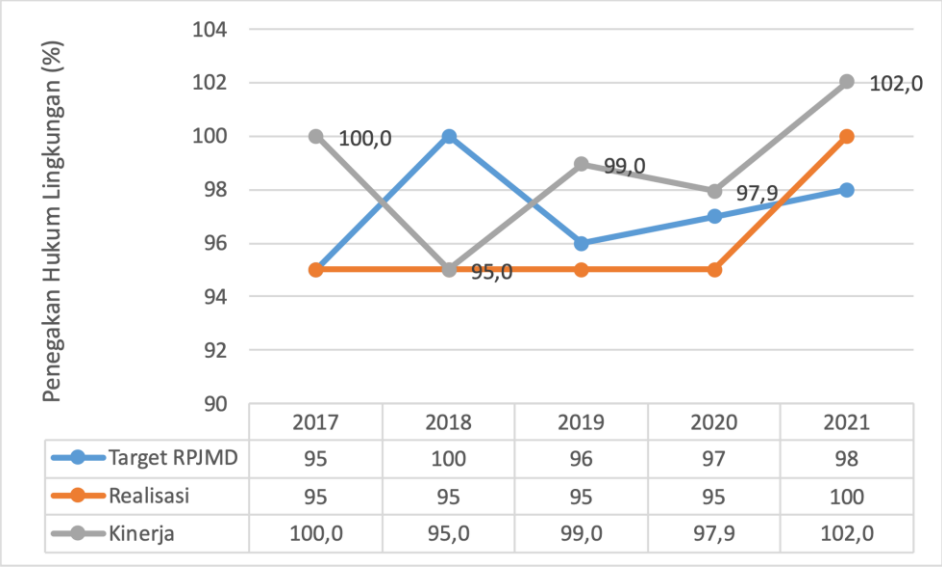

	2017	2018	2019	2020	2021
Target RPJMD	95	100	96	97	98
Realisasi	95	95	95	95	100
Kinerja	100,0	95,0	99,0	97,9	102,0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Inhil (2022)

Gambar 2.101.
Kinerja Indikator Penegakan Hukum Lingkungan
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

b. Penanganan Sampah

Sampah merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kurangnya TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) atau pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat kesehatan lingkungan dapat mengakibatkan (i) tempat bekembang dan bersarang serangga dan tikus, (ii) menjadi sumber polusi dan bencana alam, seperti tanah, air, dan udara, dan (iii) menjadi sumber dan tempat hidup kuman - kuman yang membahayakan kesehatan.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator persentase penanganan sampah terus meningkat yaitu dari 95% pada tahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2018. Pada periode 2017 – 2020, realisasi indikator persentase penangan sampah berkisar antara 70,15 - 81,49 % dan posisinya terus dibawah target yang ditetapkan. Pada periode ini ini Realisasi kinerja persentase penanganan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir berkisar antara 81,70% - 98,2% yang terkategori Tinggi. Namun pada tahun 2021 realisasi indikator persentase penanganan sampah hanya sebesar 17,22% dengan capaian kinerja sebesar 20,5%, hal ini disebabkan data untuk penangan sampah pada tahun sebelumnya diambil dari dua Kecamatan Pengolah Sampah, yaitu Kecamatan tembilahan dan Kecamatan tembilahan Hulu, sedangkan pada tahun 2021 data pengolahan sampah diambil dari seluruh Kecamatan yang ada dikabupaten Indragiri Hilir. Masih rendahnya pencapaian indikator penangan sampah ini dibanding target perlu menjadi perhatian dalam pembangunan periode berikutnya.

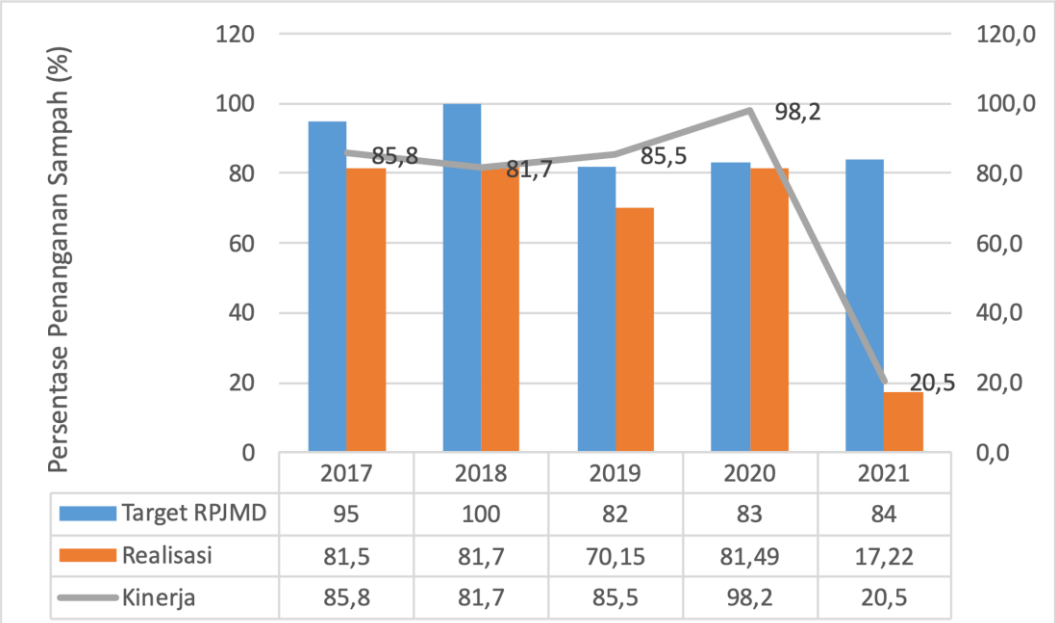

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Inhil (2022)

Gambar 2.102.
Kinerja Indikator Persentase Penangan Sampah
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator kinerja daerah Kabupaten Indragiri Hilir, oleh karena itu dapat kita lihat pada table 2.33 dibawah ini :

Tabel. 2.35.
Capaian Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)
Tahun 2019 s.d 2021

Realisasi	Tahun		
	2019	2020	2021
IKA	52,22	32,86	50
IKU	92,91	92,15	88,63

Dari data diatas, beberapa hal yang menyebabkan penurunan nilai IKA dan IKU diantaranya sebagai berikut :

1. Penghitungan Indeks Kualitas Air menggunakan 8 (delapan) parameter yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Nitrat dan Fecal Colliform.

2. Penghitungan Indeks Kualitas Udara menggunakan dua parameter yaitu NO2 dan SO2. Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO2 mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.
3. Perhitungan IKA, IKU, IKL dan IKLH pada tahun 2019-2020 dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan perhitungan IKA, IKU, IKL dan IKLH pada tahun 2021 dilaksanakan melalui aplikasi ppkl.menlhk.go.id/iklh
4. Jika dilihat dari trend nilai IKA dari tahun 2019-2021, Nilai IKU dan IKA menunjukan nilai yang fluktuatif. Ini berarti dalam tiga tahun terakhir kualitas air dan kualitas udara belum menunjukkan perubahan yang signifikan (tren kualitas yang baik, tetap atau turun).
5. Untuk nilai IKA, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi trend nilai IKA tersebut diantaranya :

- Titik pemantauan yang berbeda tahun 2019 s.d 2020 dikarenakan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
- Frekuensi pemantauan yang hanya dilaksanakan 1 kali, sedangkan berdasarkan PP 82 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 13 ayat 3 menyatakan bahwa Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan Permenlhk Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pasal 9 ayat 1 poin a menyatakan bahwa untuk air, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan; Sebagai contoh : untuk tahun 2021, perhitungan nilai IKA diperoleh dari data yang bersumber dari data yang bersumber dari Provinsi, sedangkan data yang

bersumber dari Kabupaten sebanyak 17 titik tidak bisa diverifikasi karena hanya dilakukan dengan frekuensi pemantauan 1 kali.

- Peralatan sampling yang terbatas;
- Jarak tempuh laboratorium yang cukup jauh sehingga memungkinkan hasil pengawetan beberapa parameter sampel melebihi waktu penyimpanan maksimum yang direkomendasikan sesuai SNI 8995:2021 sehingga mempengaruhi hasil sampel;
- Berdasarkan ekspose nilai IKLH yang dilaksanakan oleh KLHK pada tanggal 14 Januari 2021 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi IKA nasional yaitu : pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar, izin pembuangan air limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar dan pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penambahan beban pencemaran lebih tinggi daibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga.

6. Untuk nilai IKU, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi trend nilai IKU tersebut diantaranya :

- Frekuensi pemantauan yang hanya dilaksanakan 1 kali, Permenlhk Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pasal 9 ayat 1 poin b 1,a menyatakan bahwa untuk alat manual pasif, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan, masing-masing sampel diambil selama 14 (empat belas) hari; Sebagai contoh : untuk tahun 2021, perhitungan nilai IKA diperoleh dari data yang bersumber dari data 4 (empat) titik pemantauan yang mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di Kecamatan Kemuning dan Kateman dengan periode 1 (satu) kali pemantauan sehingga

mempengaruhi hasil verifikasi karena hanya dilakukan dengan frekuensi pemantauan 1 kali.

- Alat pasif sampler yang rawan hilang dan alat shelter yang rawan lepas dari penyangga jika ada angin kencang sehingga mempengaruhi hasil sampel;
- Berdasarkan ekspose nilai IKLH yang dilaksanakan oleh KLHK pada tanggal 14 Januari 2021 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi IKA nasional yaitu : pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar serta upaya pengelolaan lingkungan kualitas udara yang belum maksimal. Selain itu, penurunan nilai IKU juga menunjukkan meningkatnya pemanfaatan sarana yang menggunakan teknologi yang belum ramah lingkungan.

c. Kebakaran Hutan dan lahan

Kebakaran hutan dan lahan berskala besar menyebabkan bencana asap yang berdampak pada beragam masalah ekologi, sosial dan ekonomi. Bencana ini disebabkan oleh kebakaran atau pembakaran biomassa, baik di kawasan hutam, lahan perkebunan, ladang, maupun semak belukar/ilalang. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah yang hampir setiap tahun menghadapi bencana kebakaran dan asap, termasuk bencana kebakaran hutan/lahan dan asap yang cukup luas awal tahun 2014.

Berdasarkan tipologi lahan, Kab. Indragiri Hilir pada umumnya merupakan lahan gambut yang cukup luas, terdiri atas: 1.267.237 ha kawasan hidrologis gambut/KHG, 222.706 ha kawasan lindung gambut (KLG) dan 1.044.531 ha kawasan budidaya gambut (KBG). Degradasi hutan dan deforestasi yang terjadi di Kab. Indragiri Hilir telah menyebabkan suatu ekosistem yang tahan kebakaran (seperti ekosistem lahan gambut) menjadi ekosistem yang rentan terhadap kebakaran (KLH, 2009).

Hutan alam primer memiliki resiliensi yang lebih tinggi terhadap kebakaran dibandingkan dengan hutan sekunder atau hutan yang telah terdegradasi. Sehingga pada umumnya, hutan alam ini hanya akan terbakar setelah mengalami musim kering yang berkepanjangan dan adanya faktor pemicu api yang sangat kuat, misalnya karena rembetan api dari lahan perkebunan atau hutan tanaman yang bersebelahan. Namun sebaliknya, areal hutan yang telah terdegradasi dan ditumbuhi semak belukar, pada saat musim kemarau jauh lebih rentan terhadap kebakaran karena ketersediaan biomasa yang kering sebagai bahan bakar.

Hasil analisis data sekunder dan data distribusi hotspot, diperoleh hasil bahwa areal hutan/lahan terbakar, termasuk perkebunan rakyat, tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kec. Pulau Burung, Kecamatan Enok, Kecamatan Kempas, Kecamatan Gaung, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Pelangiran, Kecamatan Teluk Belengkong, Kecamatan Keritang, Kecamatan Mandah, Kecamatan Kemuning, dan Kecamatan Gaung Anak Serka.

Jumlah titik Hotspot di kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak 26 titik hostspot menjadi 20 titik hotspot pada tahun 2021.

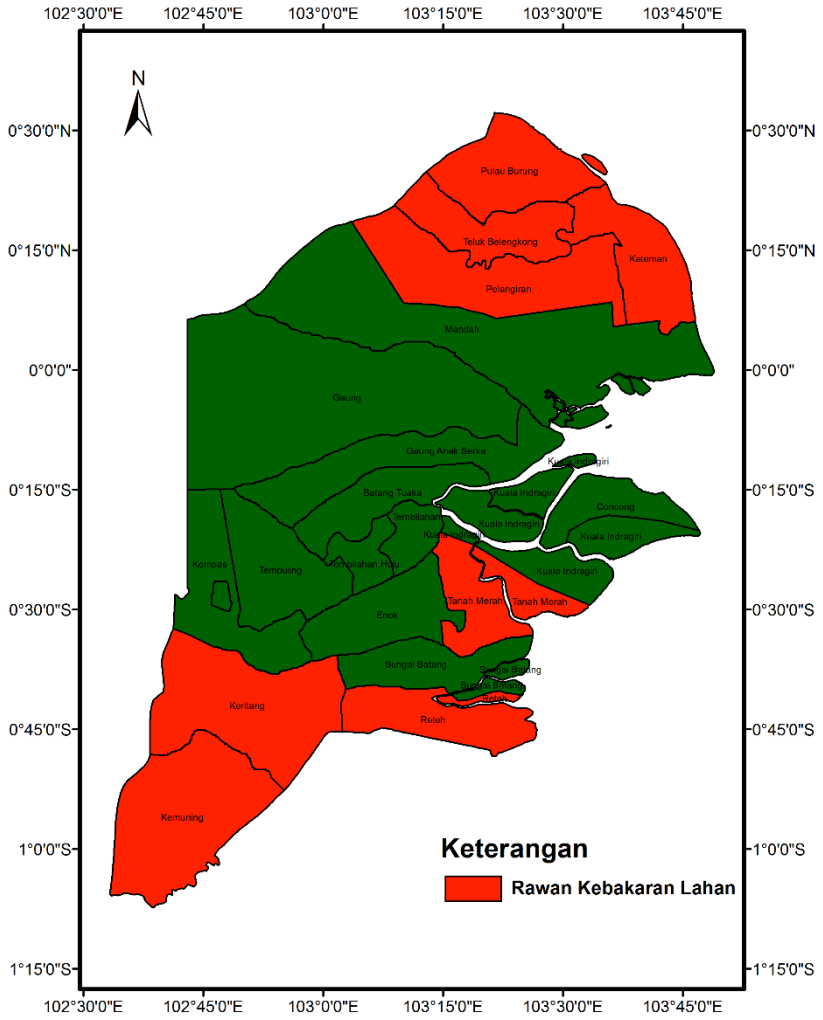

Gambar 2.103
Peta Rawan Bencana Kebakaran Lahan
di Kabupaten Indragiri Hilir

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan urusan wajib non dasar bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianalisis dari indikator (i) Cakupan penerbitan kartu keluarga, (ii) Kepemilikan KTP dan (iii) Kepemilikan Akta kelahiran.

a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, wajib dimiliki

oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator cakupan penerbitan kartu keluarga secara bertahap dimiliki dari 95% pada tahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2018. Dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 telah ditetapkan bahwa target untuk indikator cakupan penerbitan KK tahun 2021 adalah 90%.

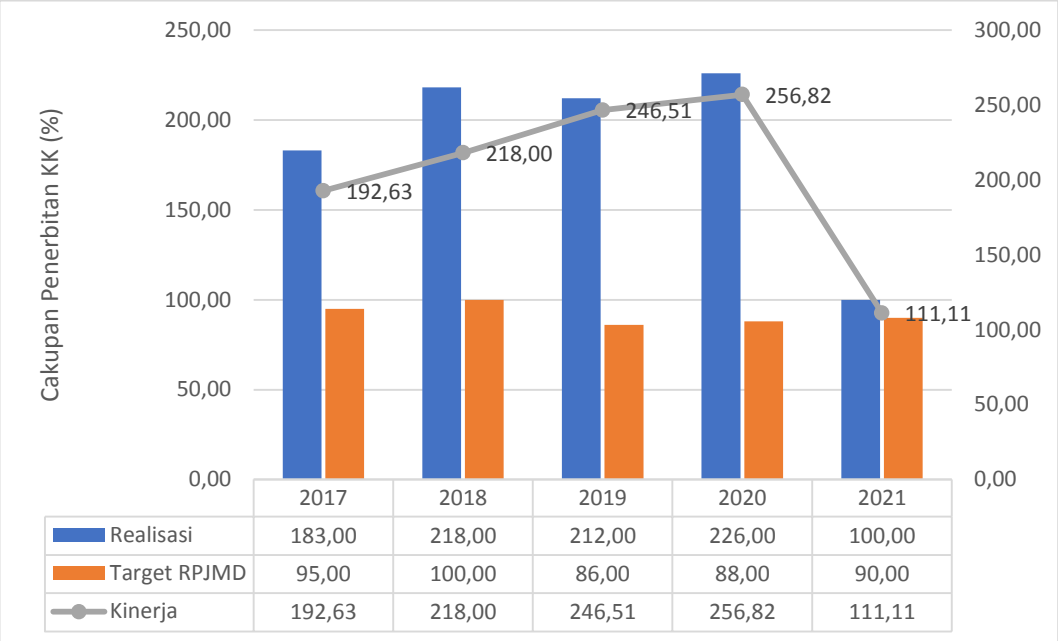

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	183,00	218,00	212,00	226,00	100,00
Target RPJMD	95,00	100,00	86,00	88,00	90,00
Kinerja	192,63	218,00	246,51	256,82	111,11

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Inhil (2022) dan LKPJ Inhil (2017 – 2022)

Gambar 2.104.
Kinerja Indikator Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Realisasi capaian indikator cakupan penerbitkan kartu keluarga di Indragiri Hilir selama periode 2017 – 2020 memiliki trend berfluktuatif meningkat. Realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2017 – 2018 berkisar antara 192,63% - 218% dan terkategori pencapaian kinerja Sangat Tinggi. Pada tahun 2019– 2020, setiap penduduk harus memiliki NIK dan kartu keluarga nasional maka capaian indikator ini relatif meningkat cakupannya sejak tahun 2016. Realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 246,51% - 256,82% dengan kategori Sangat Tinggi.

b. Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia setidaknya telah menerbitkan 3 versi KTP. KTP lama atau KTP Kabupaten (1978), KTP dari blangko kertas dan laminasi plastik, photo di lem, tanda tangan/cap jempol dan data tercetak di komputer serta berlaku di tiap Kabupaten/Kota. Versi kedua adalah KTP nasional tahun 2004 dengan karakteristik photo dicetak pada kartu, tanda tangan/cap jempol, data dicetak dengan komputer, berlaku nasional. Versi ketiga dan terbaru adalah KTP Elektronik (2011) dimana photo dicetak dikartu, data tercetak di komputer, berlaku secara nasional, mampu menyimpan data dan data dapat dibaca/ditulis dengan *Card Reader*. Namun kenyataan pelaksanaan KTP elektonik ini hingga saat ini masih bermasalah sehingga banyak penduduk yang belum memiliki KTP elektronik ini.

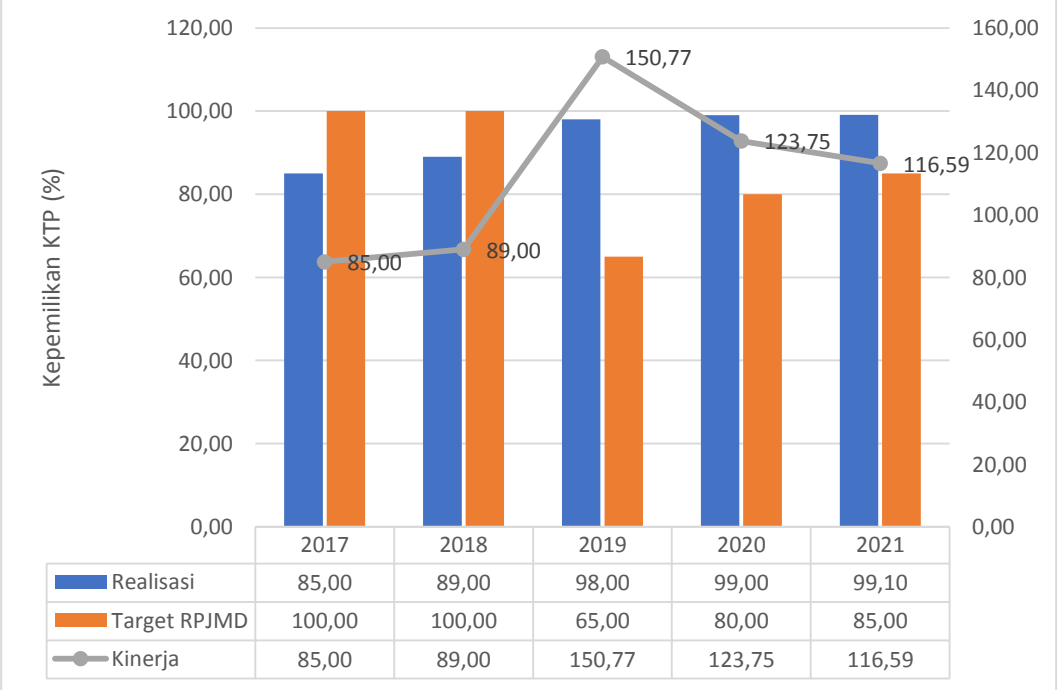

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	85,00	89,00	98,00	99,00	99,10
Target RPJMD	100,00	100,00	65,00	80,00	85,00
Kinerja	85,00	89,00	150,77	123,75	116,59

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Inhil (2022) dan LKPJ Inhil (2017-2022)

Gambar 2.105.
Kinerja Indikator Kepemilikan KTP
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator kepemilikan KTP ditargetkan 100% mulai dari tahun 2017–2018. Realisasi indikator kepemilikan KTP tahun 2017–2018, masih dikategorikan sedang yaitu sebesar 85,00%-89,00% karena penduduk disamping menggunakan KTP versi KTP Nasional dan KTP Kabupaten serta KTP elektronik. Mulai 2016–2020, pemberlakukan KTP elektronik disemua institusi menjadikan KTP versi sebelumnya tidak lagi digunakan. Disisi lain, penerbitan KTP elektronik mengalami kendala seperti ketiadaan blangko KTP. Kondisi ini menjadikan persentase kepemilikan KTP di Indragiri Hilir sebagaimana kabupaten lainnya di Indonesia menurun menjadi 65% dan terkategori Rendah. Upaya untuk terus memfasilitasi masyarakat untuk dapat akses memiliki KTP elektronik perlu terus dilakukan meski menghadapi masalah-masalah yang sukar diterobos oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Manfaat Akta Kelahiran**:** (i) Identitas Anak, (ii) Administrasi Kependudukan untuk KTP dan KK**,** (iii) Keperluan Sekolah, (iii) Pendaftaran Pernikahan di KUA**,** (iv) Mendaftar Pekerjaan, (v) Persyaratan Pembuatan Paspor, (vi) Mengurus Hak Ahli Waris, (viii) Mengurus Asuransi, (ix) Mengurus Tunjangan Keluarga, (x) Mengurus Hak Dana Pensiun dan (xi) Melaksanakan Ibadah Haji.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, pada tahun 2017 – 2020 telah ditetapkan bahwa indikator kepemilikan akte kelahiran ditetapkan terus meningkat yaitu dari 800 akte kelahiran per 1.000 penduduk meningkat menjadi 1.000 akte per 1.000 penduduk yang berarti setiap penduduk mempunyai akte kelahiran. Selama periode 2017 – 2020, realisasi indikator kepemilikan akte kelahiran memiliki trend meningkat akan tetapi dibawah target RPJMD. Realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 51,00%-77,43% pada tahun 2017-2020 yang terkategori Rendah-Sedang. Pada tahun 2021, kepemilikan akte kelahiran di Indragiri Hilir sebesar 554 per 1.000 penduduk, masih terdapat sekitar 446 penduduk dari setiap 1.000 penduduk yang belum mempunyai akte kelahiran. Mengingat pentingnya akte kelahiran bagi setiap penduduk maka upaya peningkatan kinerja indikator ini perlu terus dilakukan.

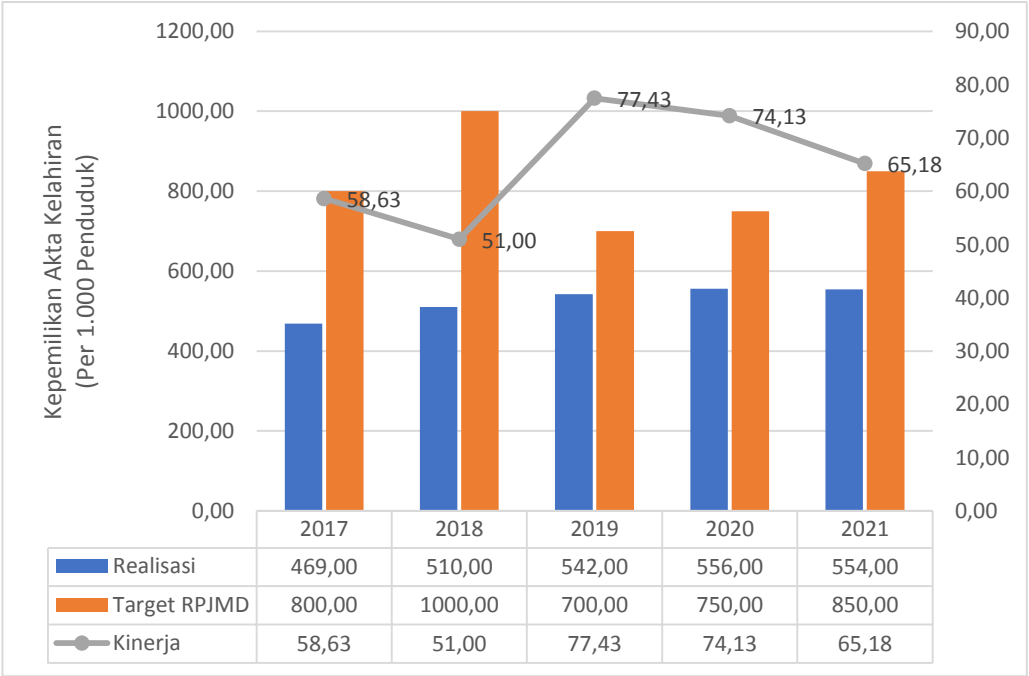

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	469,00	510,00	542,00	556,00	554,00
Target RPJMD	800,00	1000,00	700,00	750,00	850,00
Kinerja	58,63	51,00	77,43	74,13	65,18

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Inhil (2022) dan LKPJ Inhil (2017 – 2021)

Gambar 2.106.
Kinerja Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Layanan urusan wajib non dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dianalisis dari indikator (i) Cakupan program 'Desa Maju Inhil Jaya', (ii) Jumlah desa 'Maju', (iii) PKK aktif dan (iv) Posyandu aktif.

a. Cakupan Program "Desa Maju Inhil Jaya"

Program Desa maju Inhil Jaya merupakan program inisiasi Pemerintah Indragiri Hilir untuk mensiasati permasalahan pembangunan infrastruktur pedesaan di Indragiri Hilir yang dilaksanakan dengan konsep pemberdayaan Masyarakat. Program ini sebenarnya juga merupakan kelanjutan dari Program Desa Mandiri yang mulai dilaksanakan tahun 2006 di Indragiri Hilir. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator cakupan program desa maju inhil jaya sebanyak desa dan kelurahan yang ada di indragiri Hilir yaitu sebanyak 236 desa/kelurahan. Realisasi indikator cakupan desa maju inhil jaya mencakup semua desa kelurahan dengan realsiasi kinerja sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi. Setelah lebih dari 12 tahun berjalannya program ini di Indragiri Hilir, hampir sebagian infrastruktur pedesaan telah terbangun. Namun demikian perlu sadari bahwa dengan kondisi alam indragiri Hilir yang keras menjadikan umur ekonomis infrastruktur yang dibangun tidaklah terlalu lama sehingga program seperti ini masih tetap dibutuhkan masyarakat pedesaan. Program ini dipandang juga perlu pengembangan untuk porsi pengembang ekonomi masyarakat dengan mendorong industri di pedesaan.

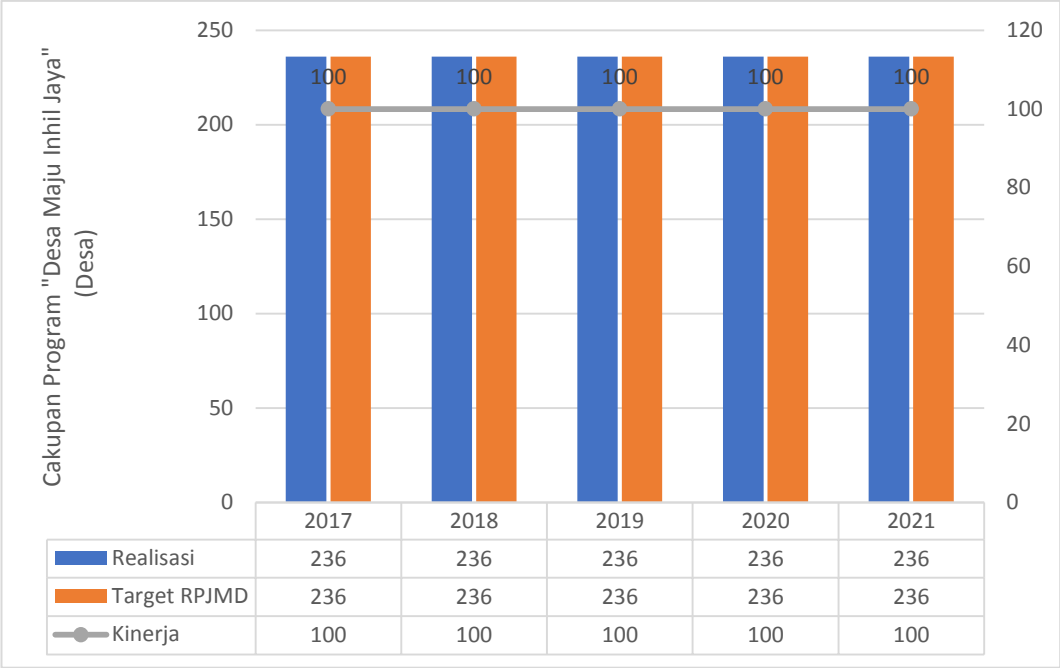

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.107.
Kinerja Indikator Cakupan Program "Desa Maju Inhil Jaya"
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

b. Pertambahan Jumlah Desa "Maju"

Sejalan dengan pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi dengan pendekatan pemberdayaan akan membawa desa kearah kemajuan dari semua aspek. Program Desa Mandiri yang mulai dilaksanakan tahun 2006 di Indragiri Hilir. Dalam perubahan RPJMD kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 telah ditetapkan bahwa indikator pertambahan jumlah desa 'maju' adalah sebanyak 2 desa maju setiap tahunnya sampai tahun 2021.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga Indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan (Permendes No. 2 Th. 2016 tentang IDM). Indeks Ketahanan Sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Indeks Ketahanan ekonomi dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat,

ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan Indeks Ketahanan Lingkungan terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup resiko resiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor-faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan. Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap resiko bencana.

Tabel 2.36.
Perkembangan Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun (IDM)

TAHUN	STATUS DESA MENURUT INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)				
	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
2018	0	2	49	129	17
2019	0	11	59	116	11
2020	0	19	76	100	2
2021	2	21	93	81	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Indragiri Hilir, 2022

Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Indragiri Hilir terlihat dari data tabel diatas, dimana dari Tahun 2018 yang semula di Kabupaten Indragiri Hilir tidak ada satu Desa berkatagori "Mandiri", di Tahun 2021 sudah ada 2 (dua) Desa dengan status Desa Mandiri yaitu Desa Tanah Merah dan Desa Sungai Batang. Demikian pula dengan status Desa "Maju", peningkatan sangat signifikan di Tahun 2021 ini sduah ada 21 Desa berstatus Desa "Maju". Sementara untuk Desa "Sangat Tertinggal" sudah tidak ada lagi.

Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga Desa yakni :

- Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Lembaga Kemasyarakatan;
- Lembaga Adat;
- Kerjasama Antar Desa; dan
- Badan Usaha Milik Desa(BUMDes);

Di Kabupaten Indragiri Hilir perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sudah terlihat, dari 197 Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, seluruhnya telah memiliki BUMDesa, dengan jumlah total pengelola 601 orang dan jumlah karyawan 248 orang, yang nantinya akan menjadi penopang ekonomi Desa. Adapun Bidang Usaha yang dilakukan oleh BUM Desa ada bermacam-macam seperti : air bersih, kelapa, saprodi pertanian, perdagangan, perbankan dan bahkan ada juga yang memiliki unit usaha berupa jasa.

Tabel 2.37.
Jumlah Unit Usaha BUMDesa di Inhil

No.	BIDANG USAHA	JUMLAH UNIT BUMDesa
1	Air Bersih dan Air Kemasan	51
2	Kelapa	33
3	Saprodi, Pasar, Peternakan dan Perdagangan	126
4	Perbankan	119
5	Jasa	18
TOTAL		347

Tabel 2.38
Data Kelembagaan Desa

No	Kecamatan	Kepala Desa	Perangkat	BPD	LPM	Karang Taruna
1	Concong	5	42	31	6	5
2	Kateman	8	70	54	11	0
3	Kemuning	11	350	71	12	5
4	Keritang	16	204	132	17	7
5	Kuala Indragiri	7	43	36	8	3
6	Enok	10	98	68	14	6
7	Kempas	10	84	70	12	6
8	Pelangiran	15	125	91	16	14
9	Tanah Merah	9	70	57	10	3
10	Tempuling	5	53	37	9	9
11	Teluk Belengkong	13	98	65	13	13
12	Gaung Anak Serka	9	98	47	12	7
13	Sungai Batang	7	62	35	8	5
14	Tembilahan Hulu	4	49	28	6	7
15	Gaung	15	142	93	16	8
16	Batang Tuaka	12	103	80	13	31
17	Pulau Burung	14	63	74	14	14
18	Reteh	11	90	67	14	5
19	Mandah	16	147	108	17	1
Total		197	1.991	1.244	228	149

Tabel 2.39
Data Sarana Prasarana Kantor Desa Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Jumlah Kantor Desa
1	Concong	5
2	Kateman	8
3	Kemuning	11
4	Keritang	16
5	Kuala Indragiri	7
6	Enok	10
7	Kempas	10
8	Pelangiran	15
9	Tanah Merah	9

10	Tempuling	5
11	Teluk Belengkong	13
12	Gaung Anak Serka	9
13	Sungai Batang	7
14	Tembilahan Hulu	4
15	Gaung	15
16	Batang Tuaka	12
17	Pulau Burung	14
18	Reteh	11
19	Mandah	16
Total		197

c. PKK Aktif

Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan msyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, pada tahun 2017–2021 telah ditetapkan bahwa PKK aktif di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yaitu 100%.

Selama periode ini, realisasi indikator persentase PKK aktif relatif sama dengan target RPJMD yaitu 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja indikator ini Sangat Tinggi, upaya-upaya peningkatan kualitas kegiatan PKK aktif perlu dilakukan sehingga akan mampu mendorong pencapaian indikator Desa Maju.

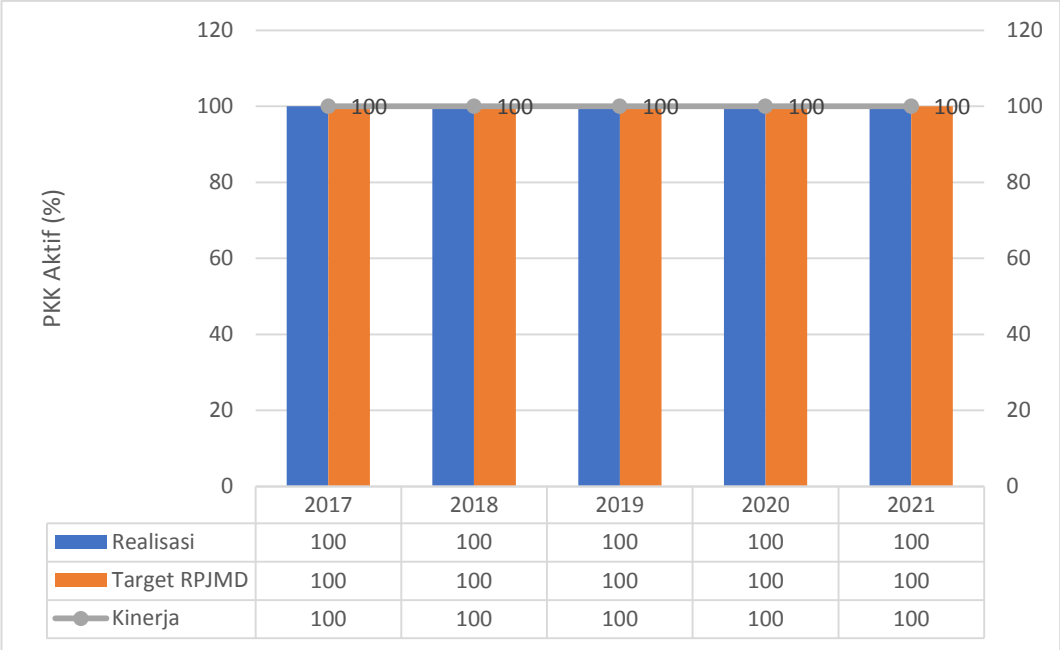

Sumber : https://sipd.kemendagri.go.id, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.108.
Kinerja Indikator PKK Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017–2021

d. Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Keluarga berencana – Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Tujuan posyandu antara lain (i) Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, (ii) Membudayakan NKBS, (iii) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan (iv) Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Mengingat pentingnya peran Posyandu yang aktif maka dalam Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator posyandu aktif terus meningkat yaitu 100% pada tahun 2017-2021.

Selama periode 2017-2021, realisasi capaian indikator posyandu aktif Indragiri Hilir memilik trend meningkat dan mulai tahun 2017 sudah sesuai target RPJMD yaitu 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian indikator dan kinerjanya sangat tingga namun upaya meningkatkan kualitas kegiatan posyandu perlu untuk terus dipertahankan.

Sumber: https://sipd.kemendagri.go.id, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.109.
Kinerja Indikator Posyandu Aktif
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017–2021

2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Layanan urusan wajib non dasar bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dianalisis dari indikator (i) Cakupan peserta KB aktif, (ii) Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri, dan (iii) Ratio PPKBD satu petugas disetiap desa/kelurahan.

a. Cakupan Peserta KB Aktif

Pengertian program keluarga Berencana menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta

masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Oleh karena pentingnya KB maka dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan Indikator cakupan peserta KB aktif yang terus meningkat dari 69,22% pada tahun 2017 menjadi 78,77% pada tahun 2021.

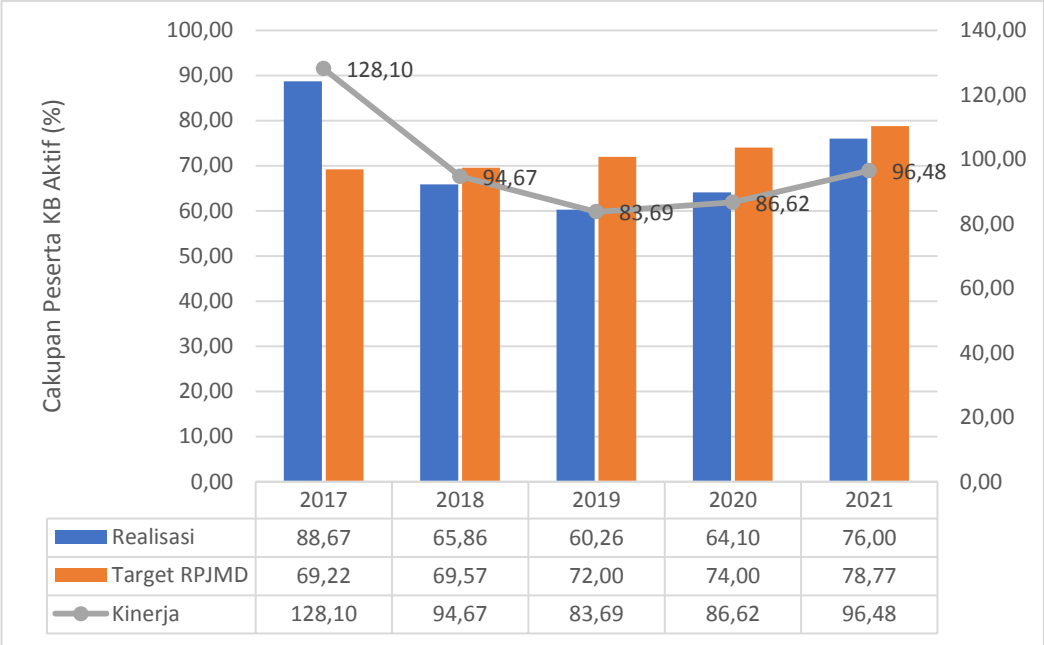

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	88,67	65,86	60,26	64,10	76,00
Target RPJMD	69,22	69,57	72,00	74,00	78,77
Kinerja	128,10	94,67	83,69	86,62	96,48

Sumber : Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.107.
Kinerja Indikator Cakupan Peserta KB Aktif
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017–2021

Selama periode 2017–2021, realisasi capaian indikator cakupan peserta KB aktif di Indragiri Hilir berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2017–2021, capaian indikator berkisar antara 60,26%-88,67% dengan realiasi kinerja berkisar antara 83,69%-128,10% yang terkategori Tinggi-Sangat Tinggi. Meski kinerja indikator ini sudah terkategori Sangat Tinggi tahun 2021, namun upaya meningkatan cakupan peserta KB aktif di Indragiri Hilir perlu terus dilajutkan agar tujuan keluarga berencana dapat terus tercapai.

b. Cakupan Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber KB

Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur yang sudah ber KB maupun yang belum ber KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan. Tujuan UPPKS adalah (i) mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif, (ii) mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga, (iii) meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga dan (iv) mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, pada tahun 2019–2021 telah ditetapkan indikator cakupan peserta PUS KB anggota UPPKS yang ber KB terus meningkat yaitu dari 75% pada tahun 2019 menjadi 79% pada tahun 2021. Selama periode 2019-2020, realisasi indikator ini mempunyai trend menurun dari 92,93% menjadi 53,85%. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator cakupan peserta PUS KB anggota UPPKS yang ber KB menurun dari 123,91% yang terkategori Sangat Tinggi menjadi 68,16% yang terkategori Sedang. Upaya untuk terus meningkat cakupan peserta PUS KB anggota UPPKS yang ber KB perlu terus ditingkat agar pencapaian desa maju dapat diwujudkan.

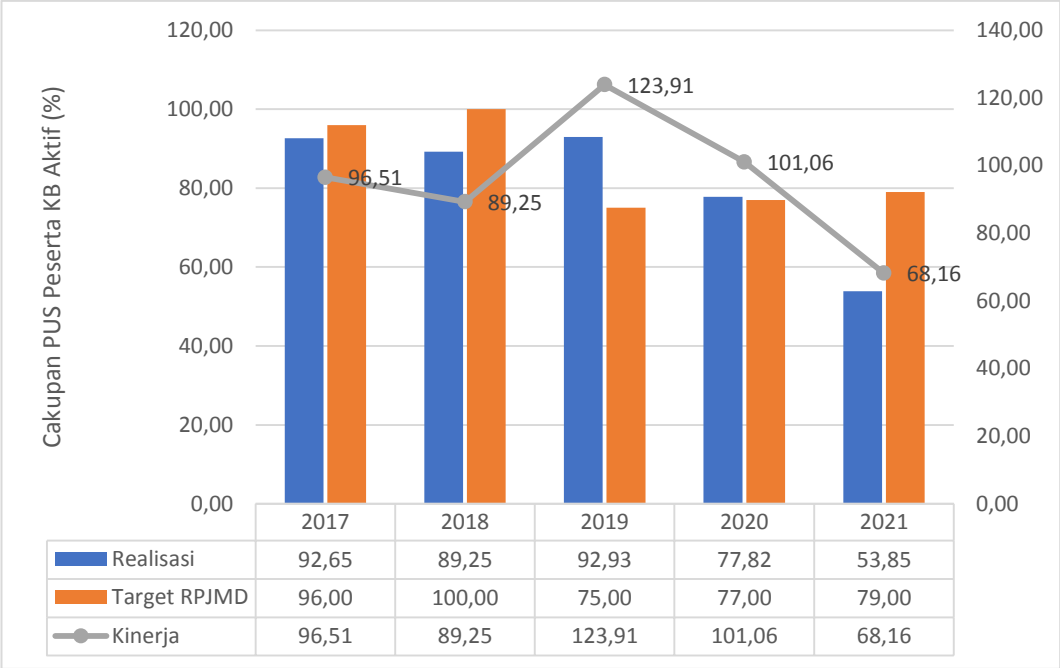

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	92,65	89,25	92,93	77,82	53,85
Target RPJMD	96,00	100,00	75,00	77,00	79,00
Kinerja	96,51	89,25	123,91	101,06	68,16

Sumber: https://sipd.kemendagri.go.id, Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.111.
Kinerja Indikator PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber-KB
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017–2021

c. Ratio PPKBD Per Desa/Kelurahan

Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seseorang atau beberapa kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB ditingkat Desa/Kelurahan. Peran dan fungsi PPKBD adalah (i) Kepengurusan, (ii) Penyuluhan, motivasi dan konseling, (iii) pelayanan ulang/rujukan, (iv) pendataan dan pencatatan, (v) pertemuan rutin, (vi) kegiatan program KB dan (vii) kegiatan mandiri. Dalam rangka mensukseskan program KB sekaligus mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dilapangan maka memberadayaan PPKBD per desa/kelurahan penting untuk dilakukan.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator ratio PPKBD satu petugas disetiap desa/kelurahan terus meningkat dari 90% pada tahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2018-2021.

Selama periode 2017-2021, realisasi kinerja indikator ratio PPKBD satu petugas disetiap desa/kelurahan memiliki trend yang meningkat dan sama dan/atau diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 100%-111,11% yang terkategori Sangat Tinggi.

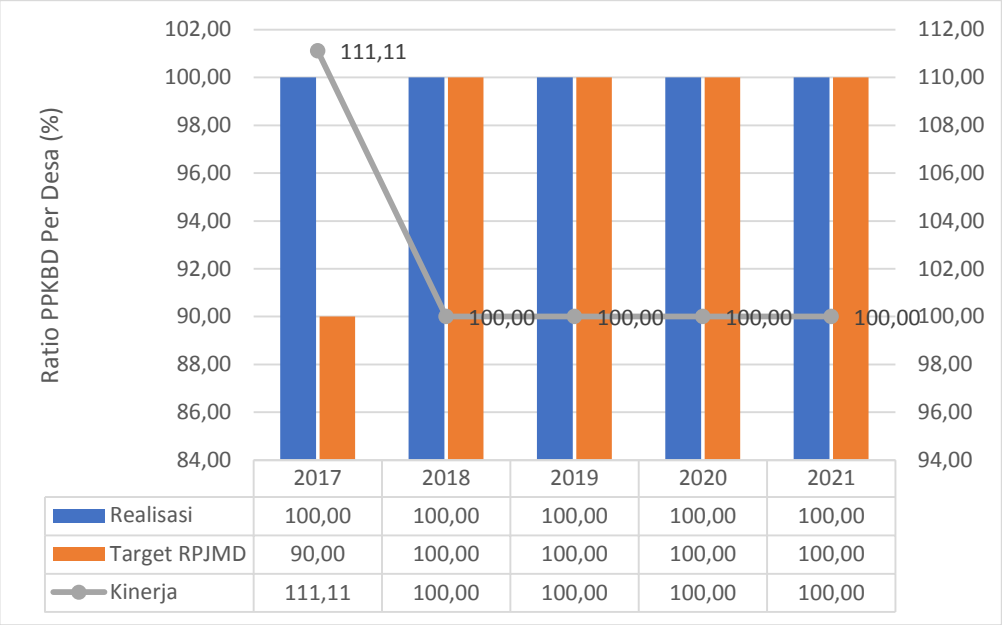

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Target RPJMD	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kinerja	111,11	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: https://sipd.kemendagri.go.id, Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indragiri Hilir, 2022

Gambar 2.112.
Kinerja Indikator Ratio PPKBD Satu Petugas Di Setiap Desa/kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017–2021

2.1.3.2.9. Perhubungan

Layanan urusan wajib non dasar bidang Perhubungan dianalisis dari indikator (i) Tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota, (ii) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten/kota, dan (iii) Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada

wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

a. Angkutan Umum

Angkutan Umum atau transportasi umum adalah sebuah layanan angkutan penumpang yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 – 2021 telah ditetapkan indikator tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota terus meningkat dari 74% pada tahun 2017 menjadi 75% pada tahun 2019.

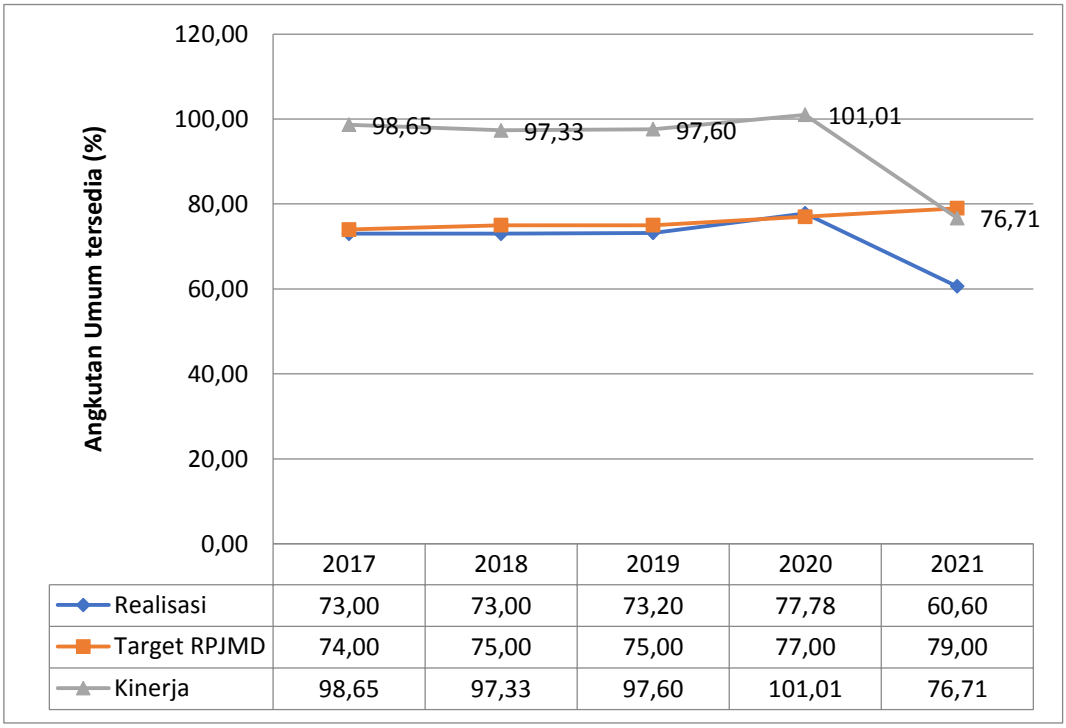

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	73,00	73,00	73,20	77,78	60,60
Target RPJMD	74,00	75,00	75,00	77,00	79,00
Kinerja	98,65	97,33	97,60	101,01	76,71

Sumber : Dinas Perhubungan Inhil (2022) dan LKPJ Inhil (2017-2022)

Gambar 2.113.
Kinerja Indikator Tersedianya Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang telah tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Selama periode 2017-2021, realisasi indikator tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk

jaringan jalan kabupaten/kota terus meningkat meski masih dibawah target RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator ini terus meningkat dari 73% pada tahun 2017 menjadi 77,78% pada tahun 2020. Selama periode 2017-20121, relaisasi kinerja berkisar antara 76,71%-101,01% yang terkategori Tinggi-sangat Tinggi. Pada periode 2019-2021, realisasi kinerja menurun menjadi 76,71% yang terkategori Tinggi. Upaya untuk terus meningkatkan tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota harus terus ditingkatkan sebagai wujud pembangunan yang berkeadilan di Indragiri Hilir.

Berikut merupakan lampiran data jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2021.

Tabel 2.40.
Data Angkutan Penumpang Umum dan Berizin Tahun 2019-2021

Jumlah Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Armada	Jenis Pelayanan (AKDP/AJDP/AKAP)
12	130	AKDP =6, AKAP = 6

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hilir (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang beropersi dan memiliki izin berjumlah 12 Perusahaan dengan Jumlah Armada sebanyak 130 armada dengan jenis pelayanan AKDP dijalankan oleh 6 perusahaan dan AKAP sebanyak 6 perusahaan.

Tabel 2.41.
Data Penumpang Laut Tahun 2019-2021

Tahun	Berangkat	Tiba
2019	59.602	54.081
2020	242.476	236.405
2021	825.337	644.559

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hilir (2022)

Data diatas terlihat jumlah penumpang laut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data 2019 penumpang berangkat sebanyak 59.602 orang meningkat menjadi 825.337 orang pada tahun 2021. Begitu juga data tiba penumpang tahun 2019 sebanyak 54.081 orang meningkat menjadi 644.559 orang pada tahun 2021.

Tabel 2.42.
Jumlah Arus Lalu Lintas Angkutan Udara Di Bandara Udara Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2021

Tahun	Kedatangan	Keberangkatan
2019	194	340
2020	97	89
2021	55	93

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hilir (2022)

Data Jumlah lalu lintas angkutan udara mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 2019 jumlah kedatangan penumpang sebanyak 194 orang dan keberangkatan sebanyak 340 orang, dan pada tahun 2021 menjadi 55 penumpang kedatangan dan 93 penumpang keberangkatan.

Tabel 2.43.
Data Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 - 2021

Tahun	Jumlah Kasus Kecelakaan
2018	42
2019	48
2020	37
2021	57
Jumlah	**184**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hilir (2022)

Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas sampai dengan tahun 2021 sebanyak 184 kasus kecelakaan yang terjadi. Kasus kecelakaan terendah terjadi pada tahun 2018 dan kasus tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 57 kasus kecelakaan.

Tabel 2.44.
Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019 - 2021

Tahun	Jumlah Kendaraaan			Total
	Umum	Tidak Umum	Pemerintah	
2019	833	1.347	12	**2.192**
2020	978	1.419	12	**2.409**
2021	1.051	1.546	12	**2.609**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hilir (2022)

Data jumlah Kendaraan bermotor wajib Uji mengalami peningkatan dari tahun 2019 total 2.192 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan tidak umum sebesar 1.347 kendaraan, meningkat pada tahun 2021 total 2.609 kendaraan yang mengikuti uji dan masih didominasi kendaraan tidak umum sebesar 1.546, sisanya adalah kendaraan umum 1.051 dan kendaraan pemerintah 12 kendaraan.

b. Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penerangan Jalan Umum

Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan dalam Pasal 22 menyebutkan: (1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan (2) Perlengkapan jalan terdiri atas perlengkapan yang berkaitan langsung dan berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan penggunajalanadalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Perlengkapan jalan ini meliputi: rambu-rambu (termasuk nomor ruas jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus. Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan" adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan penggunan jalan, dan pengamanan aset jalan, dan informasi pengguna jalan.

Penerangan jalan umum (PJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui malam hari sehingga dapat meningkatkan keselamatam lalu lintas dan keamanan dari pengguna jalan dari kegiatan/aksi keriminal.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 75% pada tahun 2017 menjadi 80% pada tahun 2018 dan 2019. Semakin meningkat pada tahun 2021 sebesar 90%. Selama periode ini, realisasi indikator tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten Indragiri Hilir berfluktuatif meningkat dan namun masih dibawah target RPJMD, yaitu dari 70% pada tahun 2017 menjadi 75% pada tahun 2018, dan terus meningkat pada tahun 2020 sebesar 83,31%, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 54,06%. Realisasi kinerja indikator pada tahun 2017-2020 berkisar antara 90,50% - 98,01% yang terkategori sangat Tinggi namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 60,70% dan terkategori rendah. Upaya untuk terus meningkatkan

tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten/kota perlu untuk terus dilakukan agra kenyaman dan keselamatan dijalan Kabupaten Indragiri Hilir meningkat.

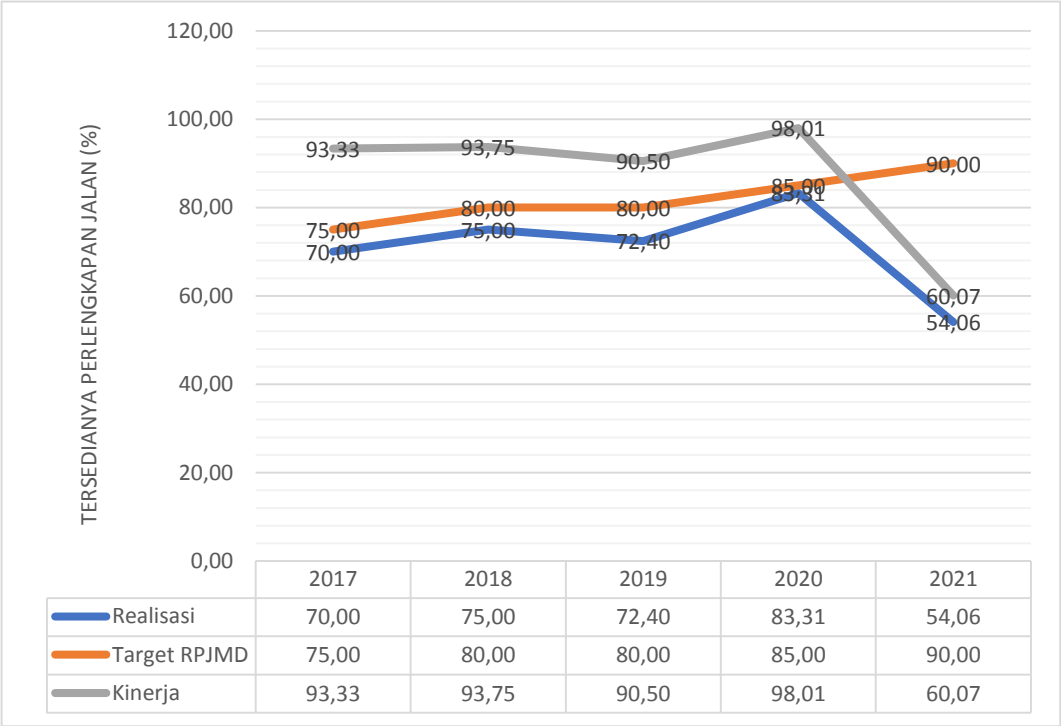

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	70,00	75,00	72,40	83,31	54,06
Target RPJMD	75,00	80,00	80,00	85,00	90,00
Kinerja	93,33	93,75	90,50	98,01	60,07

Gambar 2.114.
Kinerja Indikator Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penerangan Jalan Umum pada Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

c. Kapal laut

Indragiri Hilir yang sebagian besar wilayahnya perairan dan laut maka indikator tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan menjadi sangat penting. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan

indikator ini terus meningkat yaitu dari 100% pada tahun 2017 masih tetap 100% pada tahun 2018.

Selama periode 2017-2021 realisasi indikator tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2017, capaian realisasi indikator ini sebesar 80,00% dengan capaian Kinerja 80%. Pada tahun 2018-2020, capaian realisasi indikator ini meningkat bekisar 85%-87,4% dengan realisasi Kinerja 85%-98,28. Pada Tahun 2021 capaian realisasi kembali meningkat mnejadi 92,70,% dengan capaian kinerja sebesar 99,68% terkategori sangat tinggi. Upaya terus meningkatkan tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan harus terus ditingkatkan dalam upaya membuka isolasi daerah.

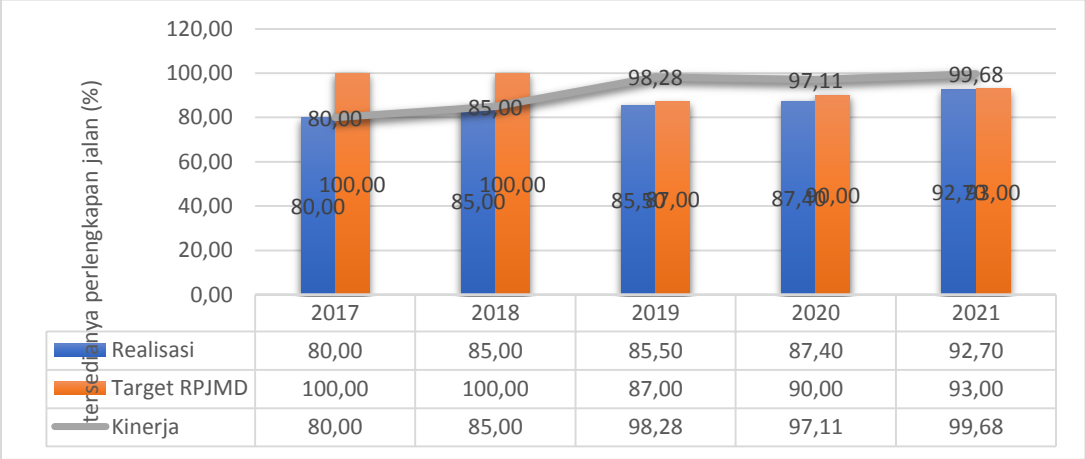

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	80,00	85,00	85,50	87,40	92,70
Target RPJMD	100,00	100,00	87,00	90,00	93,00
Kinerja	80,00	85,00	98,28	97,11	99,68

Sumber : Dinas Perhubungan Inhil (2022)

Gambar 2.115.
Kinerja Indikator Tersedianya Kapal Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Atau Trayek Dalam Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Layanan urusan wajib non dasar bidang Komunikasi dan Informatika dianalisis dari indikator (i) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), (ii) pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalu website (media o*nline*) dan (iii) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam Perubahan RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan memandirian daerah dalam penyelenggaraan komunikasi dan infomatika berbasis digital dan elektronik yang diperlukan dalam suatu sistem informasi yang baik dan terbaru serta pengelolaan managemen teknologi informasi yang handal.

Dalam mewujudkan SPBE di Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai evaluasi telah dilakukan regulasi terkait teknologi informasi yakni telah terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts.561/VII/HK-2021 tentang

Pembentukan Tim Asesor Evaluator Internal Sistem SPBE Kabupaten Indragiri Hilir. Selama periode 2019-2023 realisasi indikator dan capaian target SPBE mengalami peningkatan.

Tabel 2.45.
Indikator Kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tahun 2019 - 2021

Indikator	Kondisi Kerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Realisasi*		Target			
		2019	2020	2021	2022	2023	
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,06	2,07	2,08	2,08	2,09	3,0	3,0

Untuk meningkatkan realisasi dan capaian target, perlu didukung dengan infrastruktur pendukung teknologi informasi seperti Sub Domain, hosting dan akun, layanan koneksi internet gratis, layanan Media Center yang memadai sehingga dapat meminilisir permasalahan yang dihadapi.

b. Diseminasi dan Distribusi Informasi

Diseminasi (*dissmenination*) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Sedangkan distribusi informasi adalah proses dimana informasi yang telah disampaikan pada orang yang tepat dan pada waktu yang diinginkan.

Dalam diseminasi dan distribusi informasi Kabupaten Indragiri Hilir terdapat saluran portal Komunikasi Informasi melalui Portal **https://inhilkab.go.id/** yang memuat beberapa Website didalamnya dengan yakni : Cloud Inhilkab, e-Office, E-mail, Kotaku, Sikuda, Webhosting, e-Pad, Lapor dan ditahun 2022 bertambah 2 Website yakni PPID dan Satu Data.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator pelaksanaan dan pendistribusian informasi nasional melalui web di Indragiri Hilir ditargetkan terlaksana 100%. Selama periode 2017–2021, realisasi indikator pelaksanaan dan pendistribusian informasi nasional melalui web terlaksana 100% sehingga realisasi kinerja nya juga sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi.

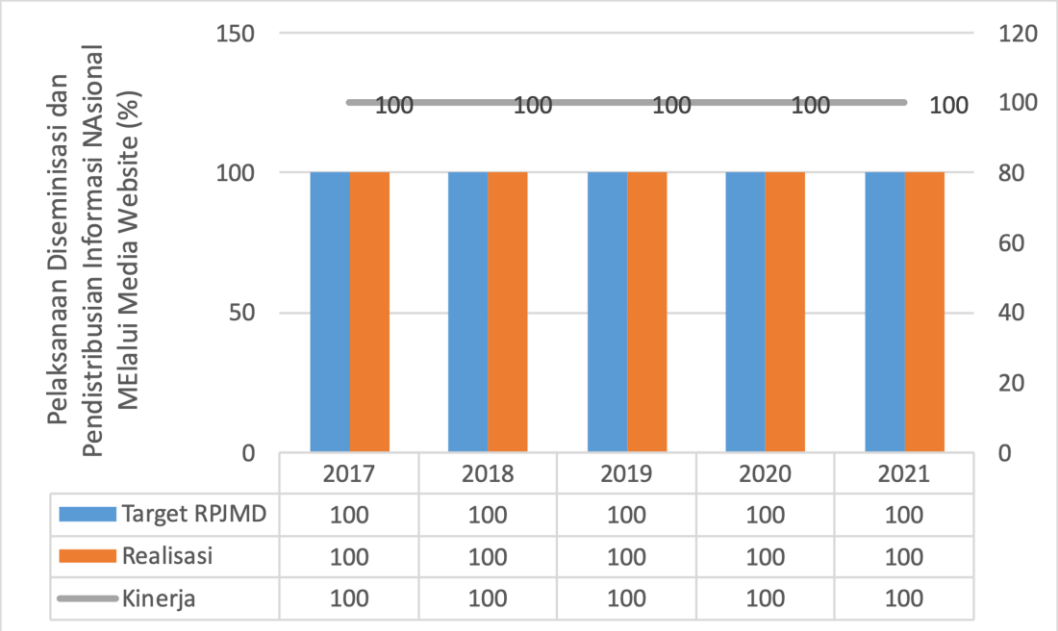

	2017	2018	2019	2020	2021
Target RPJMD	100	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100	100
Kinerja	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil (2022)

Gambar 2.116.
Kinerja Indikator Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Website di Kabupaten di Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

c. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi

masyarakat di tingkat kecamatan sebagai indikator penting yang ditargetkan terlaksana sebesar 80% padan tahun 2016 dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2018.

Selama periode 2017-2021, realisasi indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan memiliki trend meningkat. Pada tahun 2017 – 2019, realisasi indikator ini sama dengan dan diatas target dengan realisasi kinerja berkisar antara 100% - 111,11% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada periode 2020 realisasi kinerja menurun menjadi 35% dan Kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 95% , realisasi indikator ini masih dibawah target RPJMD namun masih terkategori Sangat Tinggi.

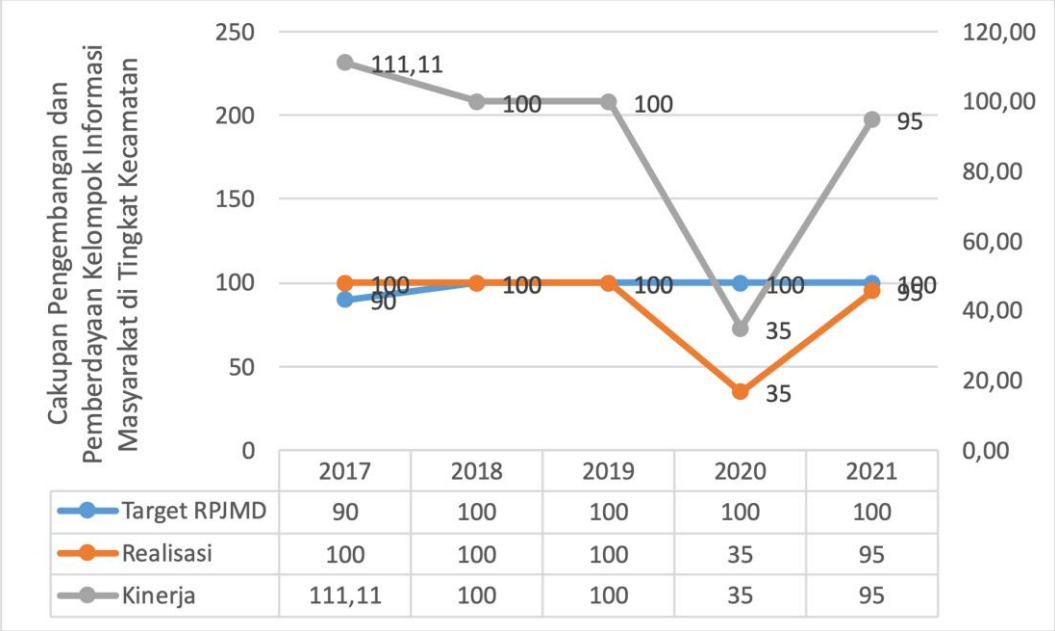

	2017	2018	2019	2020	2021
Target RPJMD	90	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	35	95
Kinerja	111,11	100	100	35	95

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Inhil (2022)

Gambar 2.117.
Kinerja Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Tabel 2.46
Indikator pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) :

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KIM	20	20	-	-	-
2	Jumlah Kecamatan yang ada di dalam Kabupaten/Kota	20	20	20	20	20
3	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	40	40	-	-	-

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil (2022)

Dalam Cakupan Layanan Telekomunikasi di kabupaten Indragiri Hilir, Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon, Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet serta Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.47
Cakupan Layanan Telekomunikasi di kabupaten Indragiri Hilir

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	-	83	85	86,8	88,83	90,86
2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	%	-	67,46	73,45	75,85	79,46	81,85
3	Proporsi Rumah Tangga	%	-	25,48	29,02	32,74	40,16	48,50

	Dengan Akses Internet							
4	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	%	8,54	8,74	10,71	6,90	6,35	6,35

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil (2022)

d. *Blank Spot Area* di Kabupaten Indragiri Hilir

Di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarakan Data Statistik Sektoral dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 140/DPMD-PEMDES/1129.2 yang dikumpukan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 87 Desa yang memiliki akses internet dengan status "signal bagus", selanjutnya terdapat 91 desa yang memiliki status "signal tidak bagus". Bedasarkan data tersebut dari 197 desa di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 18 desa yang tidak ada akses internet (*Blank Spot Area*).

2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Layanan urusan wajib non dasar bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dianalisis dari indikator (i) Koperasi Aktif dan (ii) Usaha Mikro dan Kecil.

a. Koperasi Aktif

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 25/Per/M.KUKN/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi menyatakan bahwa koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut mengadakan rapat RAT (Rapat Tahunan Anggora) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota). Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 – 2021 telah ditetapkan indikator koperasi aktif sebagai indikator yang terus

meningkat prosentasenya di Indragiri Hilir. Pada tahun 2017, persentase koperasi aktif ditargetkan sebesar 60%, meningkat menjadi 70% pada tahun 2018.

Selama periode 2018 -2021, realisasi indikator persentase koperasi aktif dibawah target RPJMD dengan realisasi kinerja sebesar 94,36% - 98,81% yang terkategori sangat Tinggi. Pada periode 2017, realisasi indikator ini sudah diatas terget RPJMD dengan realisasi kinerja sebesar 110,08% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada periode pembangunan berikutnya diupayakan untuk mendorong semua koperasi di Indragiri Hilir menjadi koperasi aktif..

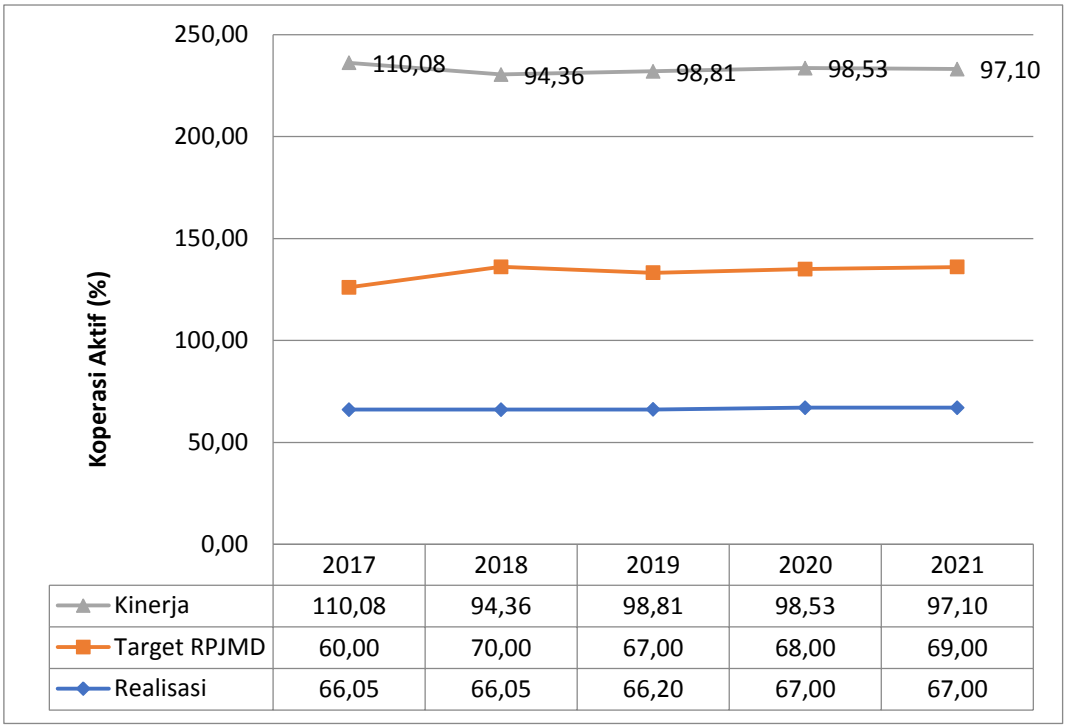

	2017	2018	2019	2020	2021
Kinerja	110,08	94,36	98,81	98,53	97,10
Target RPJMD	60,00	70,00	67,00	68,00	69,00
Realisasi	66,05	66,05	66,20	67,00	67,00

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.118.
Kinerja Koperasi Aktif di Kabupaten di Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

b. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang - Undang dengan kriteria aset

maksimal Rp. 50 juta dan kriteria omset maksimal Rp. 300 juta. Usaha kecil adalah yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang, memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200 juta dan omset maksimal Rp. 1 miliar. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 – 2021 telah ditetapkan indikator persentase Usaha Mikro dan Kecil penting dalam pembangunan di Indragiri Hilir. Pada tahun 2017-2018 ditargetkan sebesar 99,50%. Di Periode 2019-2021 terjadi perubahan target pada tahun 2019 menjadi 68% dan 86% di tahun 2021.

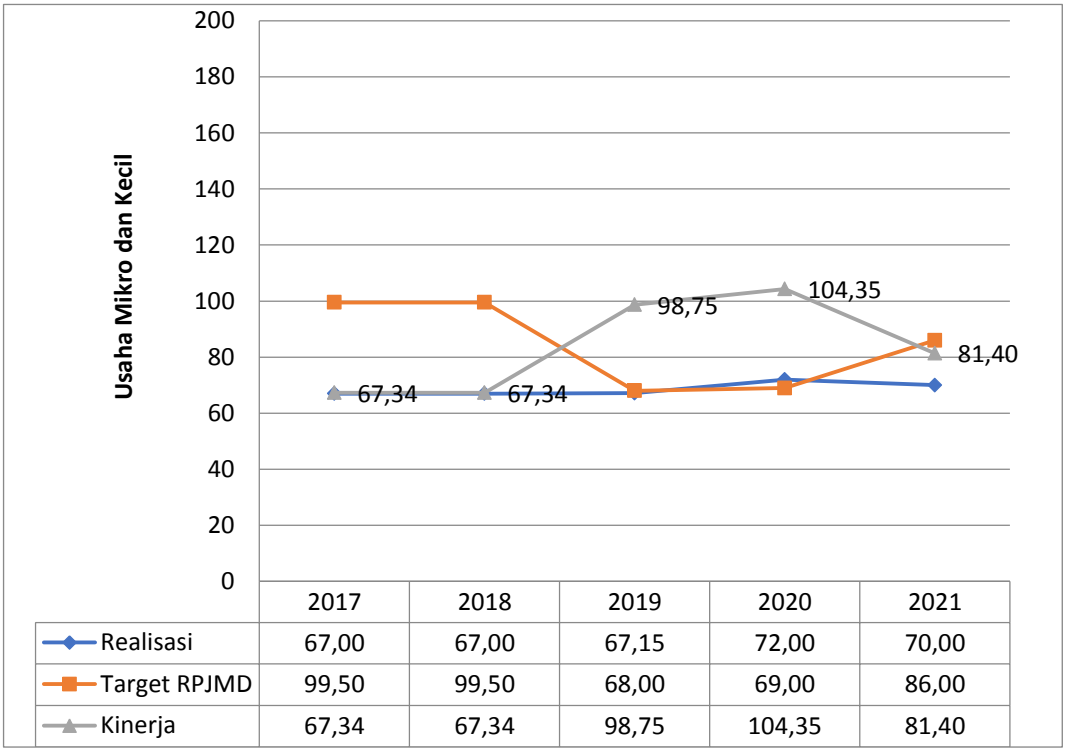

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	67,00	67,00	67,15	72,00	70,00
Target RPJMD	99,50	99,50	68,00	69,00	86,00
Kinerja	67,34	67,34	98,75	104,35	81,40

Sumber : https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.119.
Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten di Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

Selama periode 2020, realisasi indikator persentase usaha mikro dan kecil lebih tinggi dan/atau sama dengan target RPJMD sehingga realisasi kinerja sebesar 104,35% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada

tahun 2019 hingga 2021, realisasi indikator ini cenderung fluktuatif yaitu dari 98,75% pada tahun 2019 meningkat 104,35% pada tahun 2020 sehingga realisasi kinerja sebesar 98,75% - 104,35% yang terkategori Sangat Tinggi. Secara keseluruhan, rata-rata realisasi kinerja indikator persentase usaha mikro dan kecil sebesar 83,83% yang terkategori Tinggi. Meski persentase usaha mikro dan kecil capaian kinerjanya terkategori tinggi namun upaya pembinaan UMK menjadi usaha yang lebih berdaya saing perlu terus dilakukan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir.

2.1.3.2.12. Penanaman Modal

Layanan urusan wajib non dasar bidang Penanaman Modal dianalisis dari indikator (i) Realisasi PMDN dan (ii) Realisasi PMA.

a. Realisasi PMDN

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri. Untuk penanaman modal dalam negeri tidak ada ketentuan mengenai persyaratan nilai investasi. memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta dan omset maksimal Rp 1 miliar. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator penanaman modal dalam negeri terus meningkat yaitu dari Rp 18.000 (milyar) pada tahun 2016 menjadi Rp 20.000 (milyar) pada tahun 2018.

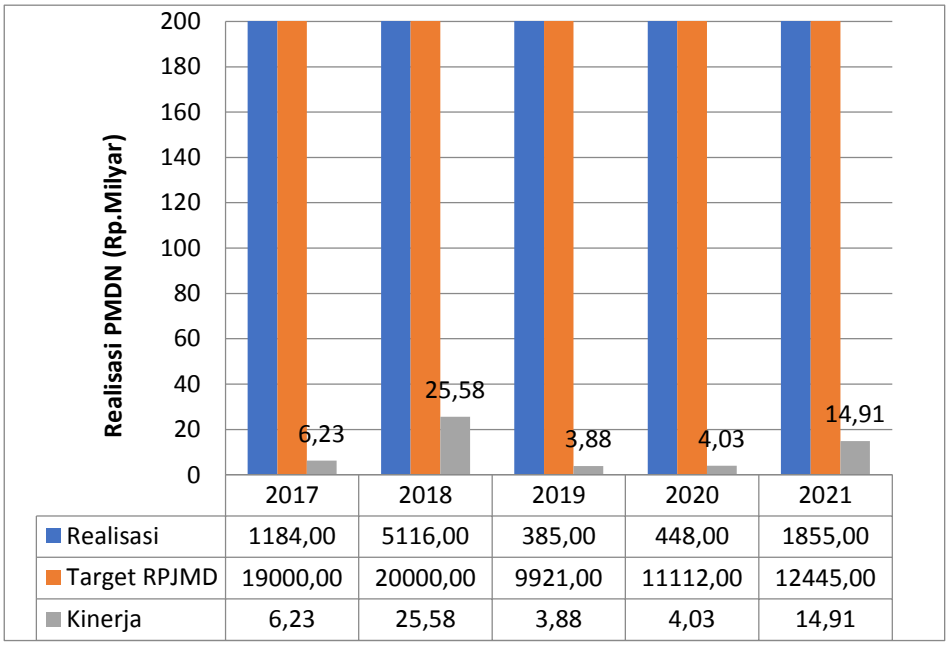

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	1184,00	5116,00	385,00	448,00	1855,00
Target RPJMD	19000,00	20000,00	9921,00	11112,00	12445,00
Kinerja	6,23	25,58	3,88	4,03	14,91

Sumber : Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Inhil (2022) dan LKPJ Inhil (2017-2021)

Gambar 2.120.
Kinerja Indikator Realisasi PMDN di Kabupaten di Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

Selama periode 2017 – 2018, realisasi indikator penamanan modal dalam negeri relatif cukup tinggi meski masih dibawah target RPJMD yaitu Rp. 1.184 milyar dan Rp 5.116 milyar dengan realisasi kinerja sebesar 6,23% dan 25,58% yang masing-masing terkategori rendah dan sangat rendah. Pada tahun 2019 hingga 2020, realisasi indikator ini menurun tajam dengan realisasi kinerja sebesar 3,88% - 4,03% yang terkategori Sangat Rendah. Kondisi ini terjadi karena bencana Non Alam Pandemi Covid-19 dan disertai melemahnya perkenomian dunia sehingga banyak investor yang melakukan 'wait and see". Upaya untuk terus menarik investasi PMDN harus terus dilakukan sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indragiri Hilir.

b. Realisasi PMA

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun sebagian dengan penamanan modal dalam negeri. Total nilai investasi lebih besar dari Rp 10 milyar diluar tanah dan bangunan. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017– 2021 telah ditetapkan indikator realisasi PMA meningkat dari USD 73 juta pada tahun 2017 menjadi USD 121 juta pada tahun 2021.

Hampir sejalan dengan PMDN, realisasi PMA hanya relatif tinggi pada tahun 2018 saja yaitu sebesar USD 329,71 juta dengan realisasi kinerja sebesar 445,55% yang terkategori sangat Tinggi. Pada tahun 2017 dan selanjutnya jumlah realisasi PMA terjen bebas seiring dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang disertai dengan kelembaban ekonomi dunia. Selama periode 2017 dan 2019, realisasi PMA naik pada tahun 2020 274,38 USD Juta dan terkontraksi dalam diangka 2,29 USD Juta pada tahun 2021 ini diakibatkan Pandemi Covid-19 yang menghantam perekonomian dunia secara keseluruhan. Realisasi kinerja indikator ini selama periode ini berkisar antara 1,89% - 274,38 yang terkategori Sangat Rendah – Sangat Tinggi. Upaya untuk terus meningkatkan PMA perlu terus dilakukan sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir.

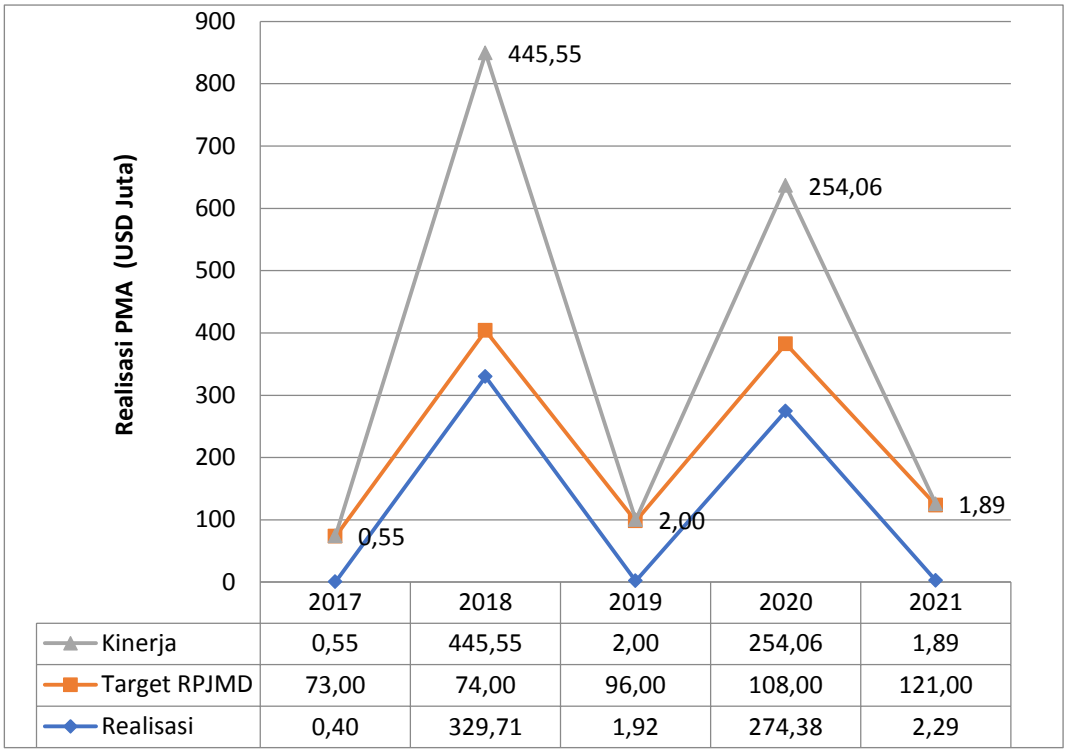

	2017	2018	2019	2020	2021
Kinerja	0,55	445,55	2,00	254,06	1,89
Target RPJMD	73,00	74,00	96,00	108,00	121,00
Realisasi	0,40	329,71	1,92	274,38	2,29

Sumber : Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Inhil (2022) dan LKPJ Inhil (2076 – 2021)

Gambar 2.121.
Kinerja Indikator PMA di Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

2.1.3..2.13. Statistik

Layanan urusan wajib non dasar bidang Statistik diwakili oleh indikator (i) Buku "Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka" dan (ii) buku "Kecamatan Dalam Angka".

a. Buku Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan buku Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka menjadi indikator dalam bidang statistik. Selama periode 2017-2021, Buku Indragiri Hilir dalam angka selalu terbit dalam edisi cetak dan online sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan cepat dan murah. Setiap tahunnya, BPS bekerjasama pemerintah indragiri hilir juga mempublikasikan Statistik

Daerah, Indikator kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir dan PDRB Indragiri Hilir serta publikasi-publikasi lainnya.

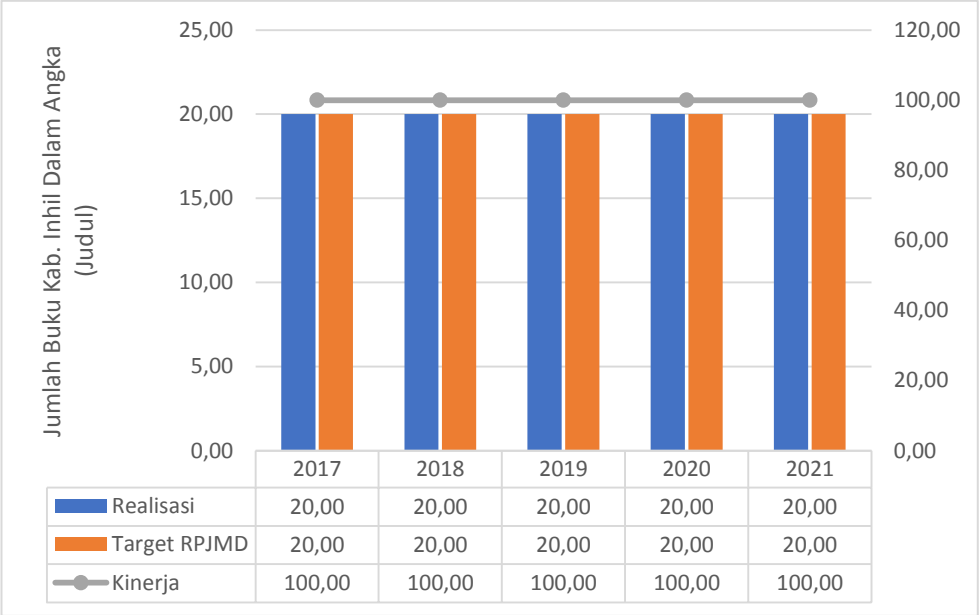

Sumber: https://sipd.kemendagri.go.id, Kab. Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022

Gambar 2.122.
Kinerja Indikator Buku Indragiri Hilir Dalam Angka
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator Buku Indragiri Hilir Dalam Angka sebagai indikator dalam bidang Statistik. Selama periode ini, realisasi indikator buku Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka sebesar 100% dengan realsiasi kinerja sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi. Agar evaluasi RPJMD dapat dilakukan dengan baik setiap tahunnya, perlu dilakukan kerjasama dengan BPS untuk pengukuran beberapa indikator penting sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017.

b. Kecamatan Dalam Angka

Sejalan dengan penerbitan Buku Indragiri Hilir Dalam Angka, Pemerintah Kabupaten Idnragiri Hilir bekerjasama dengan BPS Indragiri hilir juga menerbitkan dan mempublikasikan buku Kecamatan dalam

Angka untuk ke 20 kecamatan di Indragiri Hilir. Buku Kecamatan Dalam Angka ini diikuti dengan buku Statistik Daerah Kecamatan sebanyak 20 judul. Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator peneribitan dan publikasi 20 judul buku kecamatan dalam angka sebagai indikator penting dalam bidang Statistik.

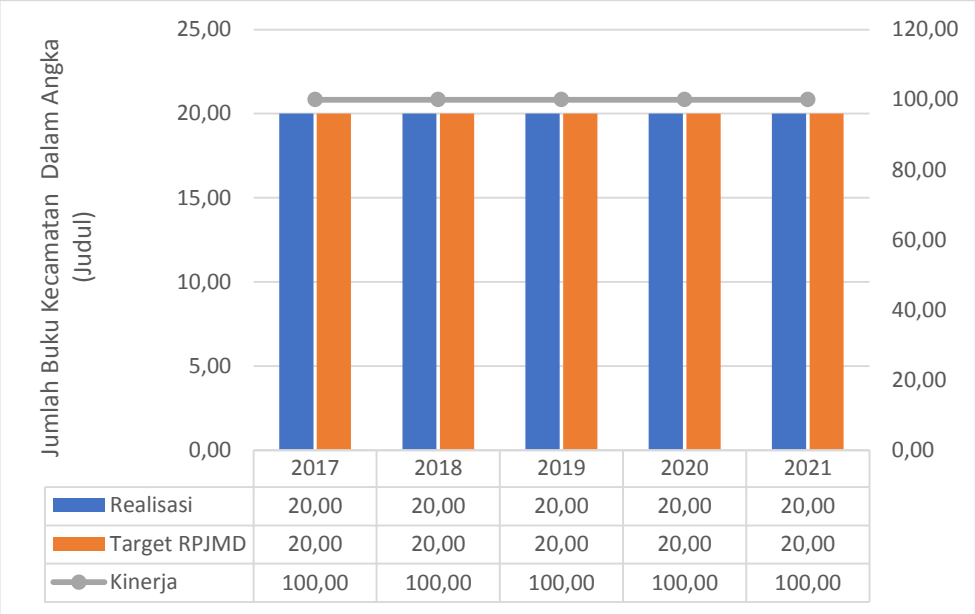

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Target RPJMD	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Kinerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: https://sipd.kemendagri.go.id, Kab. Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022

Gambar 2.123.
Kinerja Indikator Kecamatan Dalam Angka
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Realisasi indikator penerbitan dan publikasi ke 20 buku kecamatan dalam angka terealisasi penuh sehingga realisasi kinerja 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Kedepan, statistik tingkat kecamatan juga menyediakan data-data yang terkait dengan indikator yang diperlukan dalam evalusasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 86 tahun 2017.

c. Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir

Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir meruupakan buku tentang publikasi tahunan yang menyajikan data-data tentang produk domestik regional bruto Kabupaten Indragiri

Hilir yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang didukung dengan data sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Produk Domestik Regional Bruto merupakan isi dari komponen pengeluaran baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan. Komponen dan subkomponen yang disajikan telah mengalami perubahan menyesuikan konsep dari system of national account (SNA) 2008 yang telah direkomendasikan oleh United Nations (UN).

Tabel 2.48.

Buku PDRB

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Buku "PDRB"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil (2022)

d. Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi

Sistem data dan statistik yang terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat pada sistem portal satu data inhil yang dimulai pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Portal ini berisikan data-data sektoral dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hilir beserta beberapa data dari badan atau lembaga vertikal yang memiliki tugas dan menjalakan tugas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.47.

Sistem Data dan Statistik Terintergrasi

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	-	-	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil (2022)

2.1.3.2.14. Persandian

Persandian atau juga dikenal dengan sebutan kriptologi adalah ilmu atau seni yang mempelajari semua aspek tulisan rahasia. Bidang urusan persandian diukur menggunakan indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam kemunikasi perangkat daerah. Indikator ini relatif kurang digunakan dan tidak tersedia data yang dimaksud. Sub Kegiatan Persandian di Kabupaten Indragiri Hilir sedang memulai untuk memenuhi standar persandian dalam melakukan kegiatan pelaksanaan persandian di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tahun 2021 Sub Kegiatan Persandian telah melaksanakan Program Kegiatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dilingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam mendukung Program pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) diperlukan konsultasi dan sosialisasi terhadap Perangkat Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.50.

Program Kegiatan Tanda Tangan Elektronik

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sosialisasi	Ada/Tidak	-	-	Ada	-	Ada
2	Konsultasi	Ada/Tidak	-	-	Ada	-	Ada
3	Pelaksanaan TTE	Ada/Tidak	-	-	-	-	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil (2022)

Dalam pelaksanaan Sosialisasi dan konsultasi dilaksanakan pada tahun 2019, Sosialisasi ditujukan ke OPD dan Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, dan Pelaksanaan terlaksana pada tahun 2021.

2.1.3.2.15. Kebudayaan

Layanan urusan wajib non dasar bidang Kebudayaan diwakili oleh indikator (i) Penyelenggaraan festival seni dan budaya dan (ii) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya.

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Setiap tahun, pemerintah Indragiri Hilir melaksanakan berbagai festival seni dan budaya seperti (i) festival bumi gemilang, (ii) festival berdah, (iii) penampilan sanggar seni tari Citra Sebati di Taman Mini Indonesia, (iv) lomba seni teater klasik dan (vi) lomba kagu bupati Singer, musik gebyar merdeka serta panggung hiburan rakyat Penyelenggaraan pestival seni dan budaya ini menjadi indikator dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2017-2021.

Realisasi capaian indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya di Indragiri Hilir pada tahun 2017-2019 sesuai dengan target sehinggaa realisasi kinerjanya sebesar 80%-100% yang terkategori Tinggi -

Sangat Tinggi. Namun pada tahun 2019-2021 mengalami penurun realisasi indikator berkisar antara 0-4, dengan realisasi kinerja nya 0-80% di akibatkan pandemic Covid-19 sehingga tidak terlaksanannya Penyelenggaraan festival seni dan budaya indragiri Hilir, tetapi perlu terus dilakukan secara berkala sehingga akan dapat menjadi daya tarik wisatawan datang ke Indragiri Hilir.

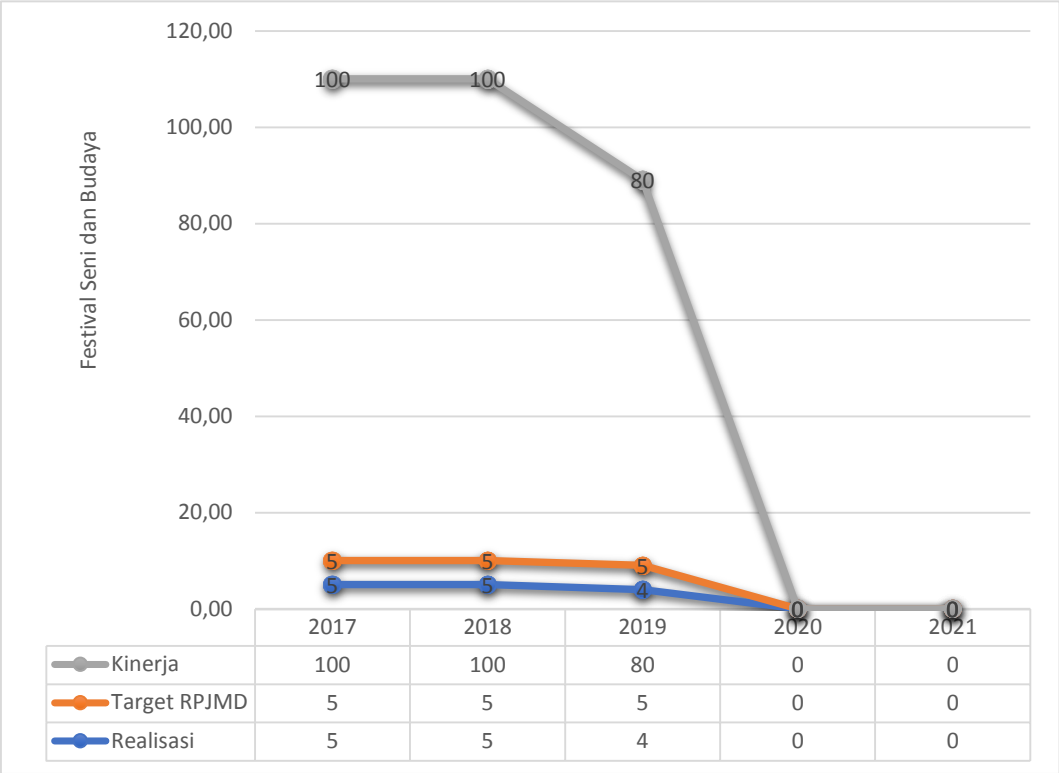

	2017	2018	2019	2020	2021
Kinerja	100	100	80	0	0
Target RPJMD	5	5	5	0	0
Realisasi	5	5	4	0	0

Gambar 2.124.
Kinerja Indikator Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

b. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebagai indikator penting yang diukur setiap tahun tingkat pencapaian kinerjanya. Selama periode 2017-2021, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Indragiri Hilir sebanyak dua unit dan realisasinya juga dua unit sehingga realisasi kinerjanya 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian

realisasi kinerja indikator ini terkategori Sangat Tinggi namun pemanfaat sarana seni dan budaya untuk pertunjukan masih sangat terbatas. Oleh karena itu pembinaan terhadap seni dan budaya perlu ditingkatkan dan dipertunjukkan kepada masyarakat.

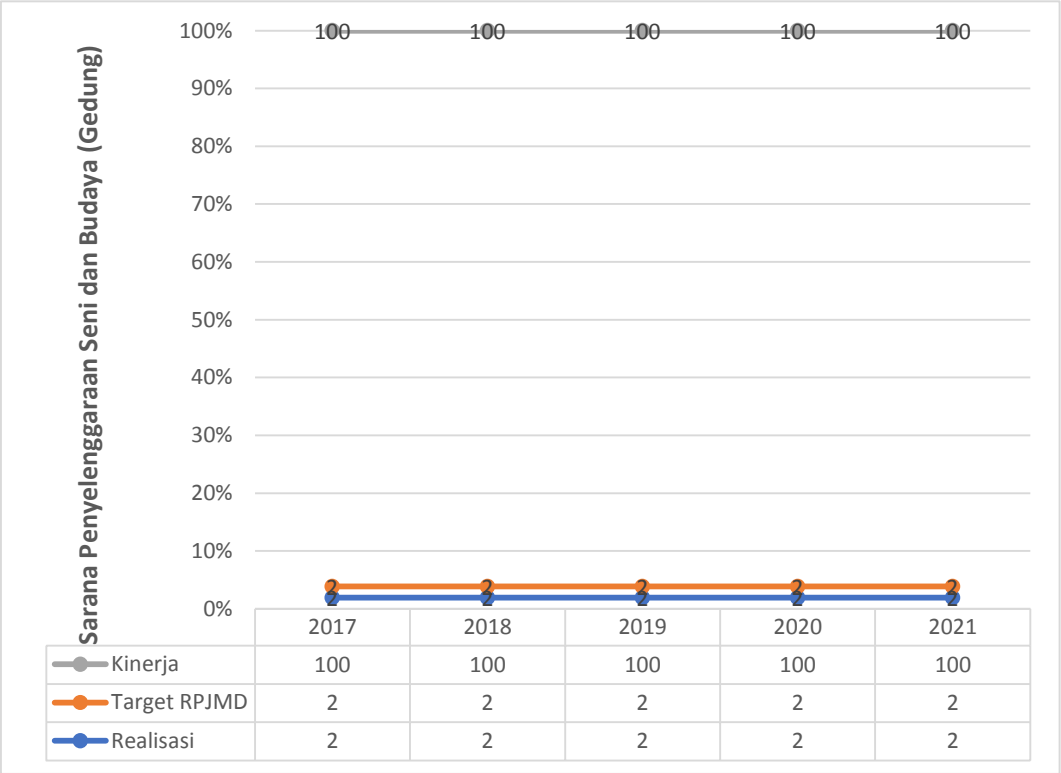

	2017	2018	2019	2020	2021
Kinerja	100	100	100	100	100
Target RPJMD	2	2	2	2	2
Realisasi	2	2	2	2	2

Gambar 2.125.
Kinerja Indikator Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Layanan urusan wajib non dasar bidang Perpustakaan diwakili oleh indikator (i) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan (ii) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Indragiri Hilir meningkat dari 10.000 pengunjung pada tahun 2017 menjadi 11.000 pengunjung pada tahun 2018. Selama periode 2017 – 2018, realisasi indikator jumlah

pengunjung perpustakaan cenderung menurun. Pada tahun 2021 tercatat jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 9.480 pengunjung, diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga realisasi kinerja sebesar 134,05% dan terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2019 – 2021, jumlah pengunjung mengalami peningkatan pengunjung pertahun dengan realisasi kinerja sebesar 91,85% - 134,05% yang terkategori Sangat Tinggi. Peningkatan terjadi dengan makin lengkapnya sarana dan fasilitas perpustakaan serta bertambahnya koleksi buku-buku sebagai bahan bacaan dan referensi bagi masyarakat. Pengembangan perpustakaan digital yang terkonek dengan perpustakaan lainnya adalah salah strategi yang dapat menarik minat pengunjung ke perpustakaan Indragiri Hilir.

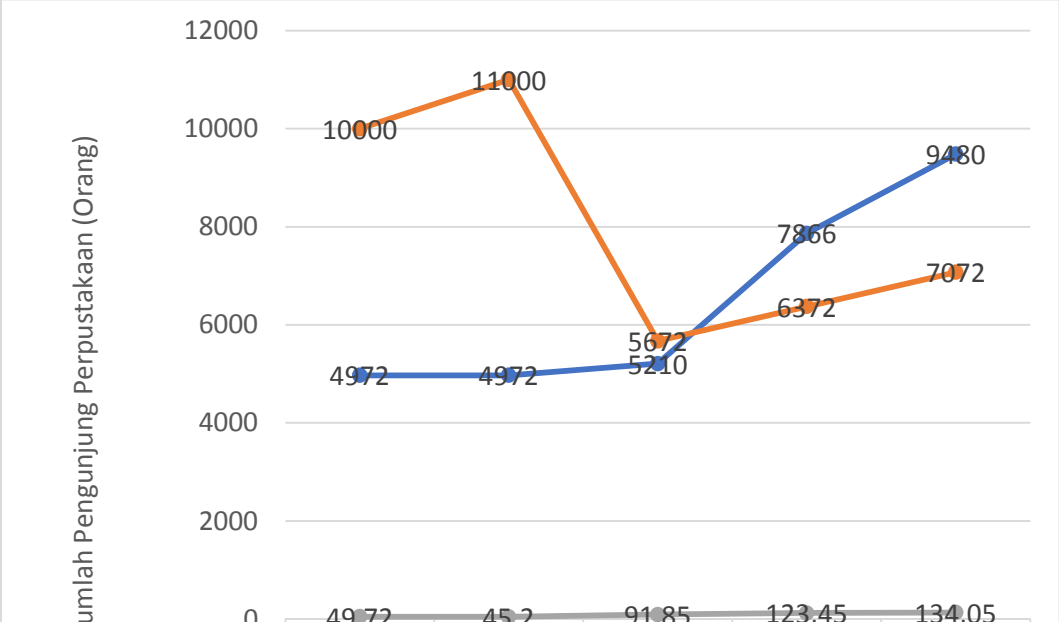

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	4972	4972	5210	7866	9480
Target RPJMD	10000	11000	5672	6372	7072
Kinerja	49,72	45,2	91,85	123,45	134,05

Gambar 2.126.
Kinerja Indikator Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

b. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator jumlah buku yang tersedia di perustakaan Indragiri Hilir meningkat dari 25.000 buku menjadi 40.000 buku. Selama periode 2016 – 2018, jumlah koleksi buku berjumlah 22.736 buku pada tahun 2016 meningkat menjadi 22.862 buku. Selama periode ini, telah terjadi kenaikan jumlah buku hampir 4 kali lipat dengan rata-rata pertumbuhan jumlah buku meningkat sebesar 29,99% per tahun. Meski peningkatan jumlah buku cukup tinggi, namun masih dibawah target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2020 yang jumlahnya diatas target. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Indragiri Hilir berkisar antara 57,15% - 236,96% yang terkategori Rendah hingga Sangat Tinggi dengan rata-rata terkategori Tinggi. Meski capaian realisasi kinerja terkategori Tinggi namun jumlah pengunjung perpustakaan relatif sepi. Oleh karena itu upaya menarik minat pengunjung melalui peningkatan pelayan seperti perpustakaan digital dan terkonek dengan perpustakaan lain perlu diupayakan.

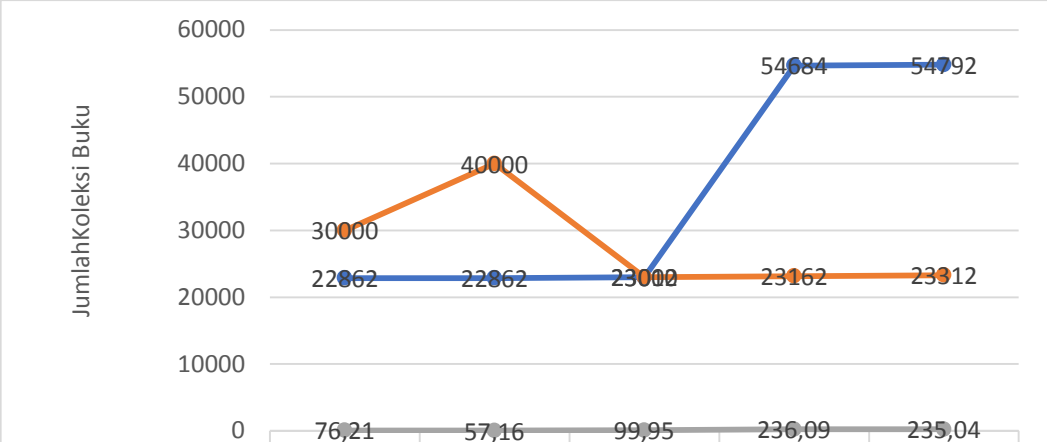

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	22862	22862	23000	54684	54792
Target RPJMD	30000	40000	23012	23162	23312
Kinerja	76,21	57,16	99,95	236,09	235,04

Sumber : LKPJ Inhil (2017 – 2021)

Gambar 2.127.
Kinerja Indikator Koleksi Buku Yang tersedia di Perpustakaan
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

2.1.3.2.17 Kearsipan

Layanan urusan wajib non dasar bidang Kearsipan diwakili oleh indikator (i) Pengelolaan arsip secara baku dan (ii) Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

a. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Kearsipan adalah suatu proses penyimpanan arsip secara sistematis agar mudah ditemukan kembali, yang meliputi penciptaan (pembuatan dan penerimaan), penyimpanan (filling) dan penemuan kembali (fnding), penyelamatan (pengamanan, pemeliharaan, dan perawatan), dan penyusutan arsip (pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan). Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator pengelolaan arsip secara baku meningkat dari 60% pada tahun 2017 menjadi 60% pada tahun 2021. Selama periode 2017-2021, realisasi indikator ini berada dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD kecuali tahun 2020-2021 ada realisasi diatas target RPJMD sehingga realisasi kinerjanya sebesar 101.48% - 111,67% yang terkategori Sangat Tinggi dengan rata-rata kinerja terkategori Tinggi. Upaya peningkatan realisasi kinerja indikator ini perlu terus dilakukan pada periode yang akan datang.

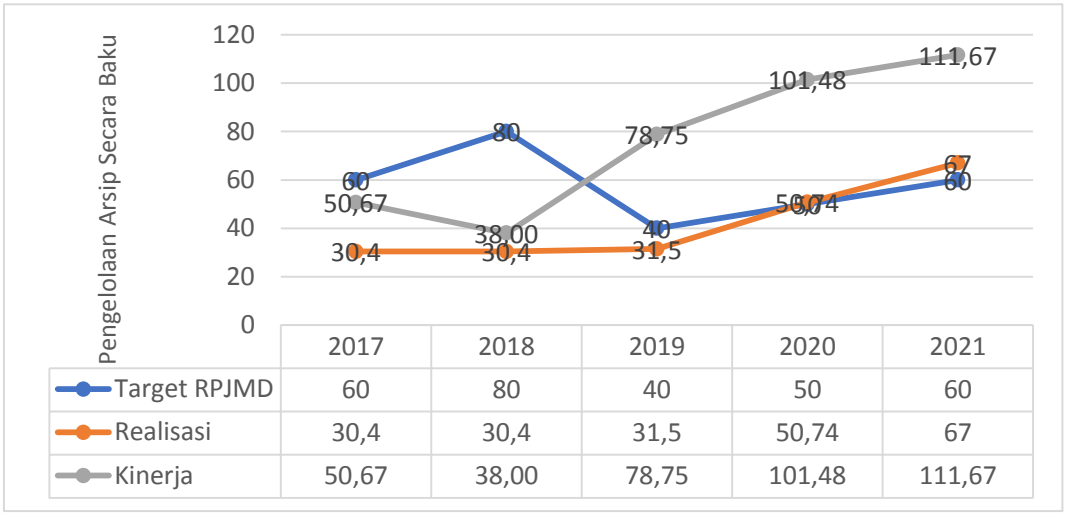

	2017	2018	2019	2020	2021
Target RPJMD	60	80	40	50	60
Realisasi	30,4	30,4	31,5	50,74	67
Kinerja	50,67	38,00	78,75	101,48	111,67

Sumber : LKPJ Inhil (2016 – 2021)

Gambar 2.128.
Kinerja Indikator Pengelolaan Arsip Secara Baku
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

b. Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan sebanyak 3 orang. Realisasi indikator ini pada tahun 2017-2021 rata sebanyak 20 - 25 orang sehingga realisasi kinerja sebesar 500%-666,67% dan terkategori sangat tinggi. Pada tahun 202`, realisasi kinerja sebesar 41,67% yang terkategori Sangat Rendah. Terjadi penurunan karena ada perubahan target pada RPJMD. Upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan dapat dilakukan dengan fungsional kearsipan buka sekedar pegawai

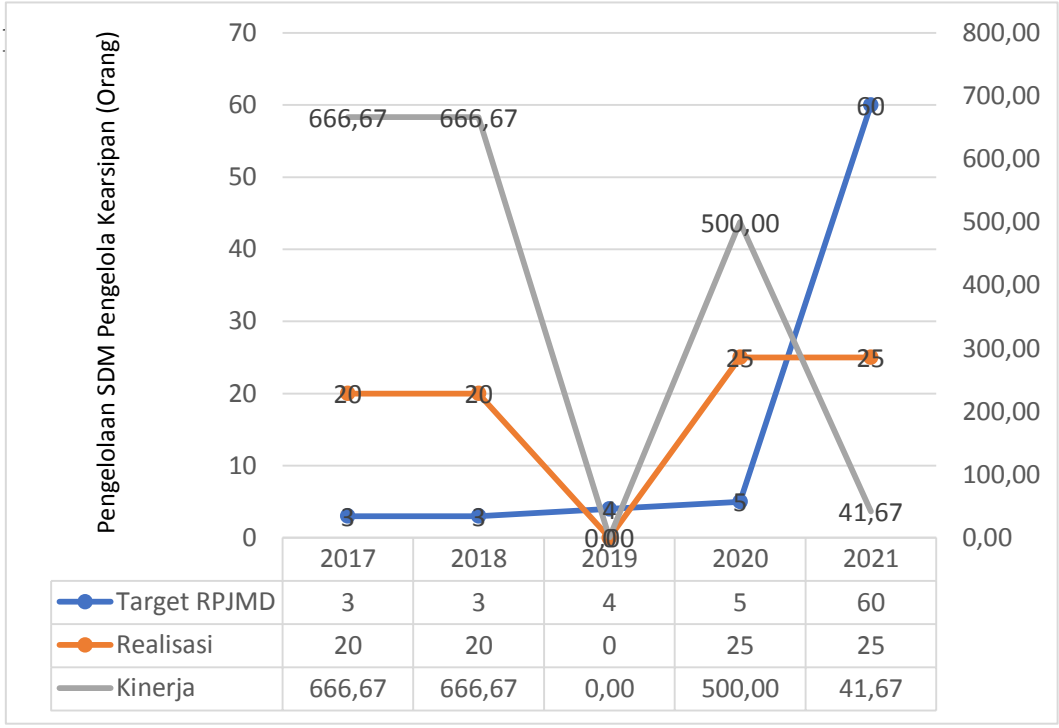

	2017	2018	2019	2020	2021
Target RPJMD	3	3	4	5	60
Realisasi	20	20	0	25	25
Kinerja	666,67	666,67	0,00	500,00	41,67

Sumber : LKPJ Inhil (2017 – 2021)

Gambar 2.129.
Kinerja Indikator Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan terdiri dari (i) Pariwisata, (ii) Pertanian, (iii) Perdagangan, (iv) Perindustrian, (v) Transmigrasi, dan (vi) Kelautan dan Perikanan.

2.1.3.3.1. Pariwisata

Layanan urusan pilihan bidang pariwisata digambarkan dari indikator Kunjungan Wisatawan. Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti (i) agriwisata yang berupa hamparan ladang padi dan kelapa, (ii) Bukit berbunga Indragiri Hilir, (iii) Pantai Solop, (iv) Air Terjun Tembulan Rusa dan (v) Makam Syekh Abdurrahman Siddiq Al Banjari.

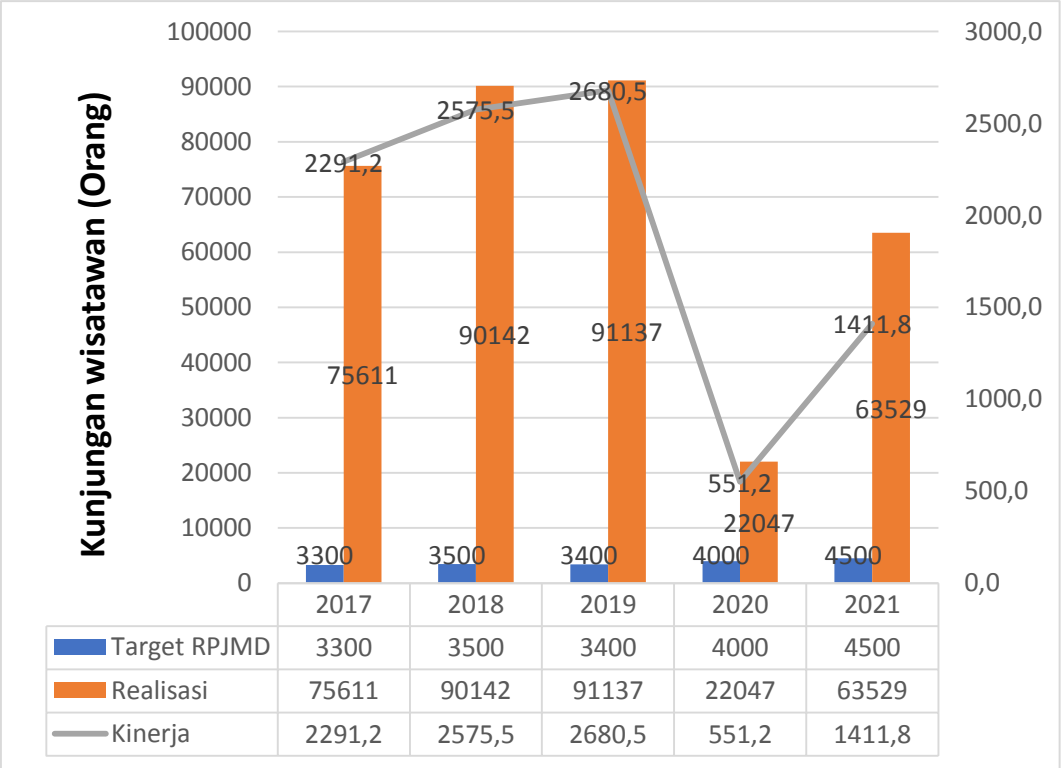

	2017	2018	2019	2020	2021
Target RPJMD	3300	3500	3400	4000	4500
Realisasi	75611	90142	91137	22047	63529
Kinerja	2291,2	2575,5	2680,5	551,2	1411,8

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.130.
Kinerja Indikator Kunjungan Wisatawan
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2017-2021 telah ditetapkan bahwa indikator kunjungan wisatawan ke Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 3.300 wisatawan pada tahun 2017menjadi 4.500 wisatawan pada tahun 2021. Realisasi indikator memiliki tren berfluktuatif meningkat, dimana pada tahun 2017-2020, capaiannya diatas target dan realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 551,2% - 2291,2% dan terkategori

Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja indikator kunjungan wisatawan terkategori Sangat Tinggi, namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif belum berkembang, dimana objek-objek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana-prasarana yang memadai. Masih jauh kalah bila dibandingkan dengan Kabupaten Tetangga seperti Pelalawan yang mempunyai objek wisatawan yang dikenal dan dikunjungi wisatawan manca negara seperti Ombak Bono dan Taman Nasional Tesso Nilo. Begitu juga dengan Indragiri Hulu dengan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

2.1.3.3.2. Pertanian

Layanan urusan pilihan bidang pertanian digambarkan dari indikator (i) Produktivitas Padi, (ii) Produksi beras, (iii) Produktivitas Kelapa, (iv) Produktivitas kelapa sawit dan (v) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

a. Produktivitas Padi

Indragiri Hilir merupakan sentra tanaman padi di Provinsi Riau. Pada tahun 2016, luas panen padi sawah di Indragiri Hilir seluas 24.988,9 hektar dengan kontribusi sebesar 34,44% dari total luas tanam Provinsi Riau. Luas panen padi sawah Indragiri Hilir jauh lebih luas dibanding Kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu dan Pelalawan yang masing-masing hanya seluas 1.895,5 hektar dan 645,8 hektar. Produksi gabah Indragiri Hilir tahun 2016 sebesar 100.383 ton dengan kontribusi terhadap produksi gabah Provinsi Riau sebesar 30,81%, jauh lebih tinggi dibanding Indragiri Hulu dan Pelalawan yang masing - masingnya sebesr 7.174 ton dan 29.819 ton. Namun dari segi produktivitas, produktivitas padi sawah Indragiri Hilir sebesar 40,17 kwintal/hektar masih dibawah produktivitas padi sawah Pelalawan yang sebesar 44,87 kwintal/hektar, meski lebih tinggi dibanding Indragiri Hulu yang sebesar 37,17 kwintal/hektar.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator produktivitas padi sawah Kabupaten Indragiri Hilir meningkat dari 4 ton/hektar tahun 2017 menjadi 4,15 ton pada tahun 2020. Realisasi indikator produktivitas padi sawah di kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2017 – 2020, produktivitas padi sawah di Indragiri Hilir masih dibawah target RPJMD capaian indikatornya berkisar diantara 3,89-4,02, dan meningkat di tahun 2021 dengan capaian 4,24 dengan kinerja 94,88- 100,95 dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja indikator ini Sangat Tinggi, namun perlu disadari bahwa produktivitas target relatif jauh lebih rendah dibanding potensi disamping produksi yang ada belum mampu mencukup kebutuhan. Oleh karena itu, upaya menggenjot lagi produktivitas dengan revitalisasi irigasi dan penerapan teknologi perlu terus dilakukan sehingga produktivitas padi sawah dapat mencapai produktivitas potensinya.

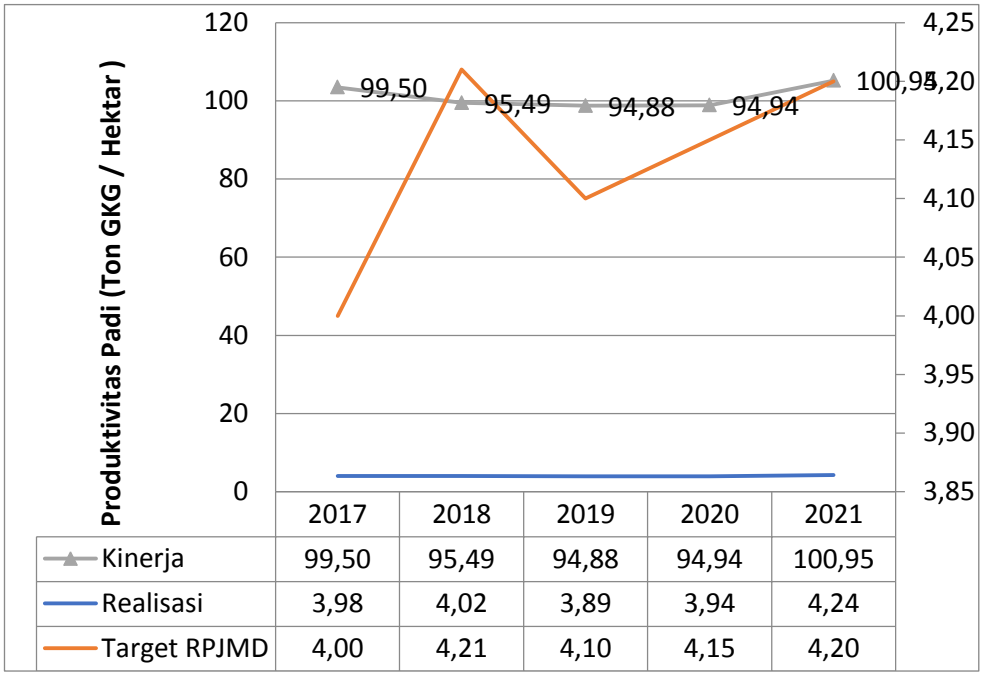

	2017	2018	2019	2020	2021
Kinerja	99,50	95,49	94,88	94,94	100,95
Realisasi	3,98	4,02	3,89	3,94	4,24
Target RPJMD	4,00	4,21	4,10	4,15	4,20

Sumber: https://sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.131.
Kinerja Indikator Produktivitas Padi
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

b. Produksi Beras

Meski indragiri hilir merupakan sentra padi terbesar di Provinsi Riau dengan produksi beras terbesar di Riau, namun produksi berasnya belum mampu mencukup kebutuhan beras penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2016, jumlah penduduk sebesar 713.034 jiwa dibutuhkan beras sebanyak 70.661,7 ton. Sementara kemampuan produksi beras Indragiri Hilir sebesar 63.509 ton, dan kekurangan sebeesar 7.152 ton atau defisit sebesar -10,12%. Capaian ini lebih baik dibanding Indragiri Hulu yang defisit sebesar -080,20% dan Pelalawan defisit sebesar -54,43%.

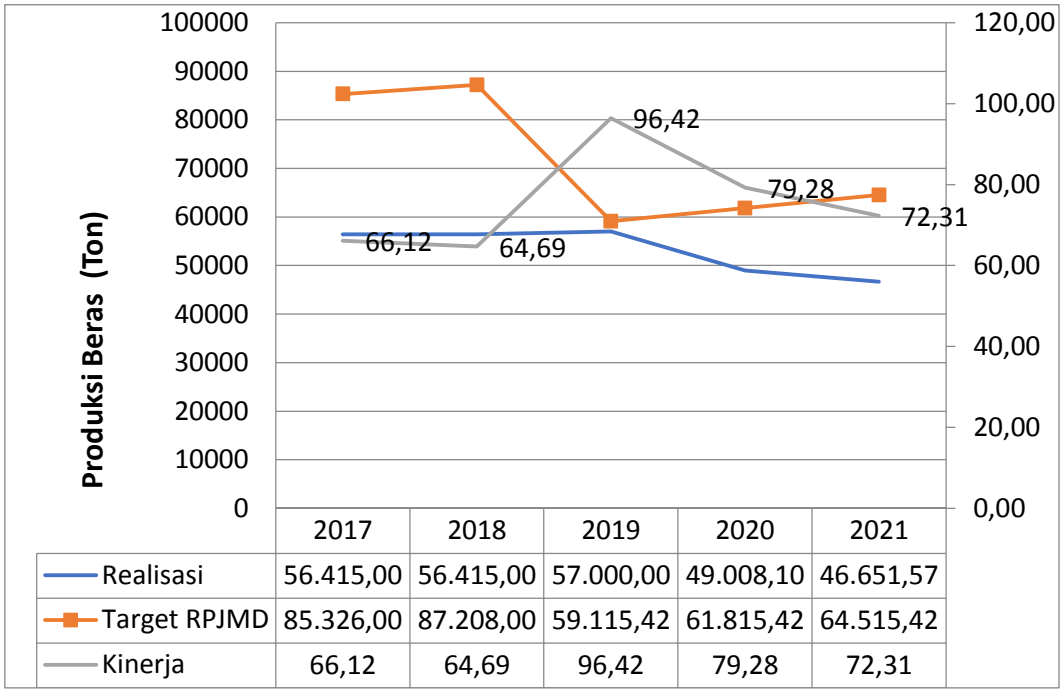

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	56.415,00	56.415,00	57.000,00	49.008,10	46.651,57
Target RPJMD	85.326,00	87.208,00	59.115,42	61.815,42	64.515,42
Kinerja	66,12	64,69	96,42	79,28	72,31

Sumber : BPS (Statistik Daerah Indragiri Hilir 2017– 2021) dan LKPJ Inhil (2017-2021)

Gambar 2.132.
Kinerja Indikator Produksi Beras
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2017-2021 telah ditetapkan bahwa produksi beras Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 85.326 ton pada tahun 2017 menjadi 57.115,42 ton pada tahun 2019. Target ini berubah sesuao dengan perubahan pada RPJMD. Realisasi indikator produksi beras Indragiri Hilir berfluktuatif menurun dan berada dibawah

target. Realisasi kinerja indikator ini selama 2017 – 2018 berkisar antara 66,12% - 64,69% yang terkategori Sedang dan pada tahun 2019-2021 berkisar di 72,31%-96,42% yang terkategori sedang - sangat tinggi. Selama periode ini, rata-rata capaian kinerja indikator produksi beras di Idnragiri Hilir terkategori Sedang. Upaya terus meningkatkan produksi beras harus terus dilakukan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga kedepan Indragiri Hilir dapat berswasembada beras.

Menurunya produksi selama period 2017-2020 disebabkan oleh alih fungsi lahan yang terus terjadi, dari lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sawit atau dialihkan kepada peruntukan laiinya. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi alih fungsi lahan dan mempertahankan lahan baku sawah ini maka telah ditetapkan peta lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2021.

c. Peternakan

Indragiri Hilir merupakan daerah perkebunan kelapa sawit dan kelapa yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan Peternakan sapi sebab Industri perkebunan kelapa sawit dan kelapa menyimpan potensi sumber daya pakan yang besar untuk pengembangan ternak ruminansia khususnya sapi. Integrasi sapi dengan kelapa sawit memunculkan tiga kegiatan terpadu sekaligus, yaitu 1) industri pakan ternak berbasis hasil samping perkebunan kelapa sawit, 2) usaha perkembangbiakan sapi (cow calf operation), dan 3) penggemukan sapi potong. Pada tahun 2017, populasi sapi di Indragiri Hilir sebanyak 7.394 ekor. Populasi ternak sapi Indragiri Hilir ini relatif sangat rendah dibanding potensi sumberdaya alam yang dimiliki dan kalah jauh dibanding Kabupaten tetangga sperti Indragiri Hulu yang mencapai 50.000 ekor.

Populasi Ternak sapi Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 7.394 ekor, jumlah betina produktif dari jumlah suatu data kegiatan 3.000 ekor yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir yang di batasi aliran parit-parit

(sungai). Menyulitkan peternak untuk melakukan kawin alam ternak sapinya. Sehingga angka kelahiran ternak sapi di Kabupaten Indragiri Hilir baru mencapai 28% dari betina produktif. Dan jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Riau angka kelahiran ternak di Indragiri Hilir sangat jauh tertinggal dengan Kabupaten lain yang Sarana dan Prasarana pendukungnya yang lebih memadai. Untuk peningkatan angka kelahiran tersebut pula dilakukan berbagai upaya: (i) pengadaan pejantan untuk wilayah – wilayah yang sulit untuk pelaksanaan Inseminasi Buatan, (ii) perluasan wilayah Inseminasi Buatan (IB) dengan dukungan petugas, Sarana dan Prasarana IB yang memadai dan (iii) mengoptimalkan kinerja petugas pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB).

Perkembangan Produksi ternak Kabupaten Indragiri Hilir terus mengalami peningkatan, untuk ternak besar sapi 497.551 Kg di tahun 2021 menjadi 547.307 Kg tahun 2022. Terjadinya peningkatan produksi daging ini disebabkan karena semakin antusiasnya petani untuk mengembangkan ternak mereka, terutama di sela-sela tanaman perkebunan mereka baik sawit ataumpun perkebunan kelapa. Kondisi ternak lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51.

Produksi Ternak Kabupaten Indragiri Hilir 2017-2021

No	Uraian	Pemotongan (Ekor)			K.E	Produksi Tahun 2021 (Kg)	Produksi Tahun 2022 (Kg)	r (%)	Ket
		Tercatat	Tidak Tercatat	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**TERNAK BESAR/KECIL**								
1	Sapi	3,899	-	3,899	127.61	497,551	547,307	5.00	
2	Kerbau	12	-	12	175.62	2,107	2,213	10.00	
3	Kambing	941	-	941	12.50	11,763	12,586	5.00	
4	Domba	70	-	70	13.00	910	974	5.00	
5	Babi	-	-	-	57.00	-	-	-	
	Jumlah A					**512,331**	**563,079**	5.00	
	Pemasukan (Kg)					-	-	-	
	Penyediaan (Kg)					512,331	563,079	-	
	Konsumsi (Kg)					789,630	802,106	-	
	Populasi Penduduk (Jiwa)					658,025	668,422	1.58	
	Konsumsi/Kapita/Tahun					**1.20**	**1.20**	-	
B	**TERNAK UNGGAS**								
6	Ayam Ras Petelur	200	-	200	1.23	246	258	5.00	
7	Ayam Ras Pedaging	2,606,478	26,328	2,632,806	1.43	3,764,913	3,953,158	5.00	
8	Ayam Buras	123,928	1,252	125,180	1.05	131,439	138,011	5.00	
9	Itik	6,234	63	6,297	1.00	6,297	6,612	5.00	
10	Puyuh	12,181	-	12,181	0.10	1,218	1,279	5.00	
11	Angsa	-	-	-	1.00	-	-	-	
12	Merpati	-	-	-	0.20	-	-	-	
13	Kalkun	-	-	-	0.20	-	-	-	
	Jumlah B					**3,904,113**	**4,099,318**	5.00	
	Pemasukan (Kg)					-	-	-	
	Penyediaan (Kg)					3,904,113	4,099,318	-	
	Konsumsi (Kg)					7,567,288	7,686,851	-	
	Populasi Penduduk (Jiwa)					658,025	668,422	1.58	
	Konsumsi/Kapita/Tahun					**11.50**	**11.50**	-	

Sumber: Dinas TPHP, 2022

d. Kelapa

Indragiri Hilir merupakan sentra kelapa Indonesia, bahkan dunia. Pada tahun 2020, produktivitas lahan kelapa di Indragiri Hilir sebesar 1,22 Ton CPO/Hektar, perkembangan produktivitas kelapa ini relativ sama sejak tahun 2019 dimana pada tahun tersebut produktivitas kelapa sebesar 1,21 Ton Koppa/Hektar. Luas lahan kelapa Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020, memiliki porsi sebesar 84,76% dari total luas areal kelapa Provinsi Riau dengan kontribusi produksi sebesar 86,41%. Perkebunan kelapa khususnya kelapa dalam di Kabupaten Indragiri Hilir mencakup hampir seluruh kecamatan kecuali di kecamatan Kemuning yang luasan dan produksinya relatif kecil. Perkebunan kelapa ini telah menjadi urat perekonomian penduduk Kabupaten Indragiri Hilir.

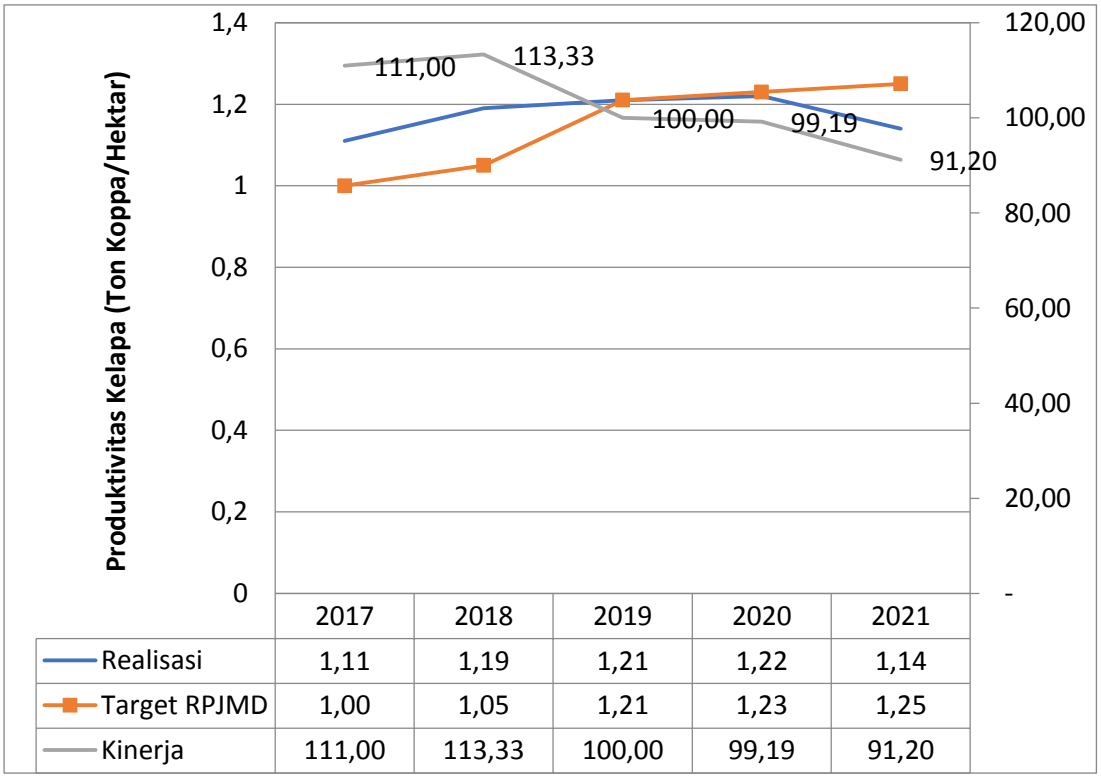

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	1,11	1,19	1,21	1,22	1,14
Target RPJMD	1,00	1,05	1,21	1,23	1,25
Kinerja	111,00	113,33	100,00	99,19	91,20

Sumber : LPPD, 2021

Gambar 2.133.
Produktivitas Kelapa (Ton Koppa/Hektar) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa produktivitas kelapa Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 1 ton/ha/tahun pada tahun 2017 menjadi 1,21 ton/ha/tahun pada tahun 2019 dan diperkirakan pada tahun 2020 juga sebesar 1,23 ton/ha/tahun. Realisasi indikator produktivitas kelapa diatas target pada tahun 2017 – 2021. Realisasi kinerja indikator produktivitas kelapa indragiri Hilir ini berkisar antara 89,74% - 109,82% yang terkategori Sangat Tinggi.

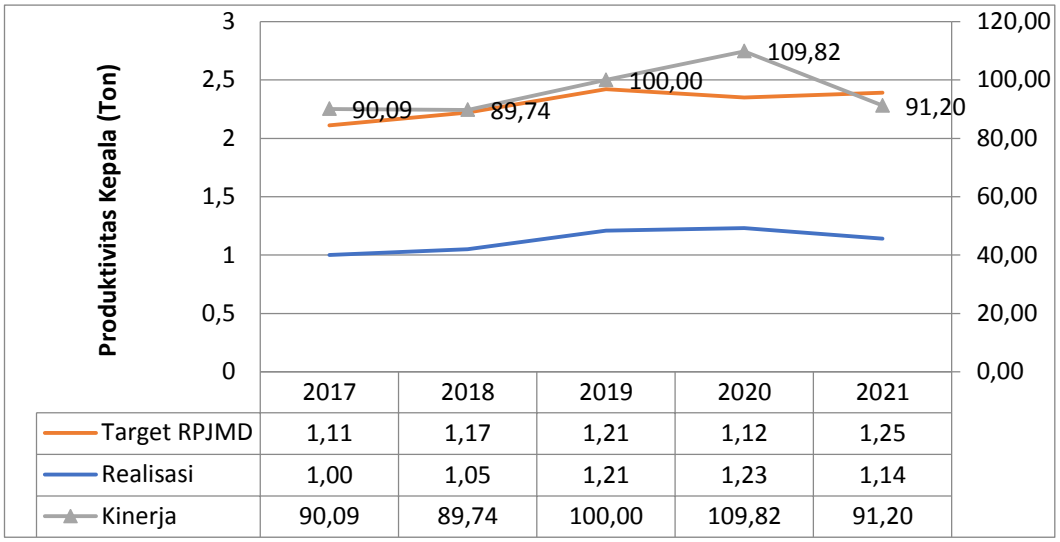

	2017	2018	2019	2020	2021
Target RPJMD	1,11	1,17	1,21	1,12	1,25
Realisasi	1,00	1,05	1,21	1,23	1,14
Kinerja	90,09	89,74	100,00	109,82	91,20

Sumber : Sumber : BPS (Statistik Daerah Indragiri Hilir 2022)

Gambar 2.134.
Kinerja Indikator Produktivitas Kelapa
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Sebagaimana telah ditunjukkan pada tabel diatas bahwa perkebunan kelapa merupakan urat nadi perekonomian penduduk Kabupaten Indragiri Hilir yang diusahakan hampir diseluruh kecamatan dan desa. Meski data statistik menunjukkan bahwa produktivitas kelapa Indragiri Hilir memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan produktivitas meningkat sebesar 1,88% per tahun, namun capaian produktivitas saat ini masih dibawah potensinya yaitu sebanyak 9000 – 11.000 butir atau 1,5 – 2,0 ton kopra/hektar/tahun. Rendahnya produktivitas kelapa Kabupaten Indragiri Hilir ini tidak terlepas dari

berbagai permasalahan yang dihadapi petani kelapa antara (i) luasnya tanaman tua dan rusak - TTR, (ii) banyaknya tanggul yang rusak sehingga banyak tanaman kelapa sawit yang terancam rusak, dan (iii) serangan hama.

Pada masa yang hampir bersamaan, perkebunan kelapa khususnya kelapa dalam dihadapkan kepada banyak tanggul-tanggul yang sudah rusak sehingga mengancam tidak kurang dari 100. 000 hektar tanaman kelapa terinstrusi air laut. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk memperbaiki tanggul dan trio tata airnya. Pada tahun 2017, sekitar 60.000 hektar perkebunan kelapa dalam rakyat masih memerlukan perbaikan tanggul dan trio tata air yang rusak dan kurang berfungsi.

Relatif rendahnya produktivitas kelapa juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya serangan hama kelapa khususnya serangan hama kumbang tanduk. Kondisi cuaca yang cenderung lembab dan semakin luas replating kelapa sawit, dimana dalam pembenaman batang kelapa kurang sesuai SOP, maka batang kelapa sawit sisa replanting ini menjadikan media yang baik untuk berkembangan biaknya kumbang tanduk. Hama kumbang tanduk inilah yang menyerang tanaman kelapa dalam rakyat.

Hal yang terus menjadi perbincangan adalah harga jual kelapa bulat petani yang cenderung rendah. Akibat tekanan harga beli kelapa yang sudah lama rendah, menjadikan kebun-kebun kelapa kurang mendapat perhatian oleh petani. Kondisi harga jual kelapa rakyat yang rendah karena pasar kelapa bulat di Indragiri Hilir yang Monopsoni dan akan mengarah ke Monopoli. Campur tangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar posisi tawar petani menjadi lebih baik perlu dilakukan antara melalui resi gudang. Upaya mendorong industri miko/kecil

berbasis kelapa di pedesaan adalah bentuk lainnya mendorong berkembang dan berjayanya kembali industri kelapa Indragiri Hilir. Selain itu peluang terkait dengan pengembangan potensi perkebunan kelapa dapat di laksankan dengan penyelenggaraan pembangunan kawasan pedesaan, dimana di Kabupaten Indragiri Hilir desa – desa yang memiliki potensi perkebunan kelapa dapat di tetapkan sebagai Kaswasan Perdesaan Perkebunan Kelapa Indragiri Hilir.

e. Kelapa Sawit

Provinsi Riau telah menjadi barometer industri kelapa sawit Indonesia. Luas areal kelapa sawir Provinsi riau seluas 2.493.176 hektar atau 20,26% dari total luas areal kelapa sawit Indonesia dengan produksi sebesar 8.721.148 ton atau 24,66% dari total produksi minyak sawit Indonesia. Luas dan produksi kelapa sawit di Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa areal kelapa sawit Indragiri Hilir seluas 227.806 hektar atau 9,49 % dari total luas areal kelapa sawit Provinsi Riau dengan produksi sebesar 721.084 atau 9,29% dari total produksi minyak sawit Provinsi Riau. Luas areal dan produksi kelapa sawit Indragiri Hilir ini diatas Indragiri Hulu (117.820 hektar dan 424.022 ton), namun masih jauh dibawah luas areal dan produksi minyak sawit Pelalawan (306.977 hektar dan 1.249.219 ton).

Produksi Kelapa sawit Indragiri Hilir mengalami penurunan, dari 272. 449 tahun 2017 menjadi 268.864 Ton di tahun 2021, menurunnya produksi kelapa sawit ini disebabkan karena kurang optimalnya perawatan, khususnya kebun-kebun yang dimiliki oleh masyrakat, berpluktuasinya harga sawit juga membuat petani kurang semangat dalam mengelola kebun sawit mereka (lihat gambar 2.135)

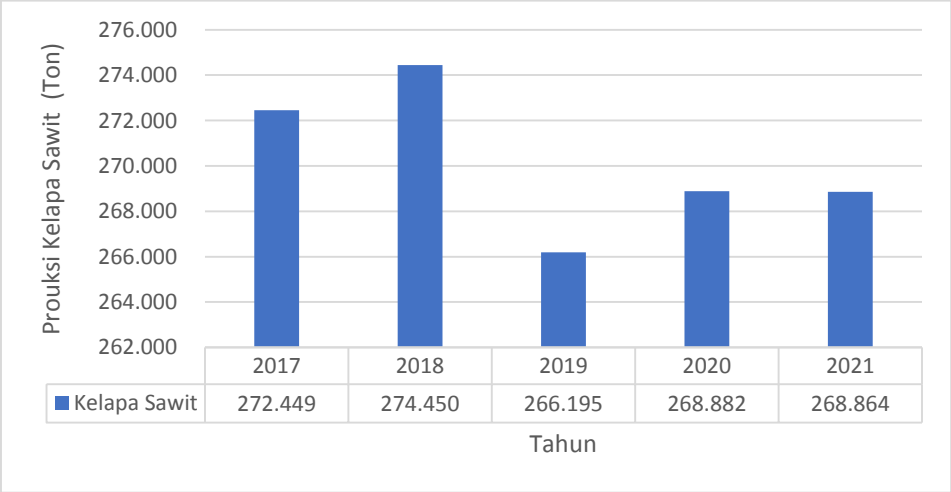

Sumber : Disbun Inhil, 2022 (diolah)

Gambar 2.135.
Produksi kelapa Sawit Indragiri Hilir 2017 – 2021 (Ton)

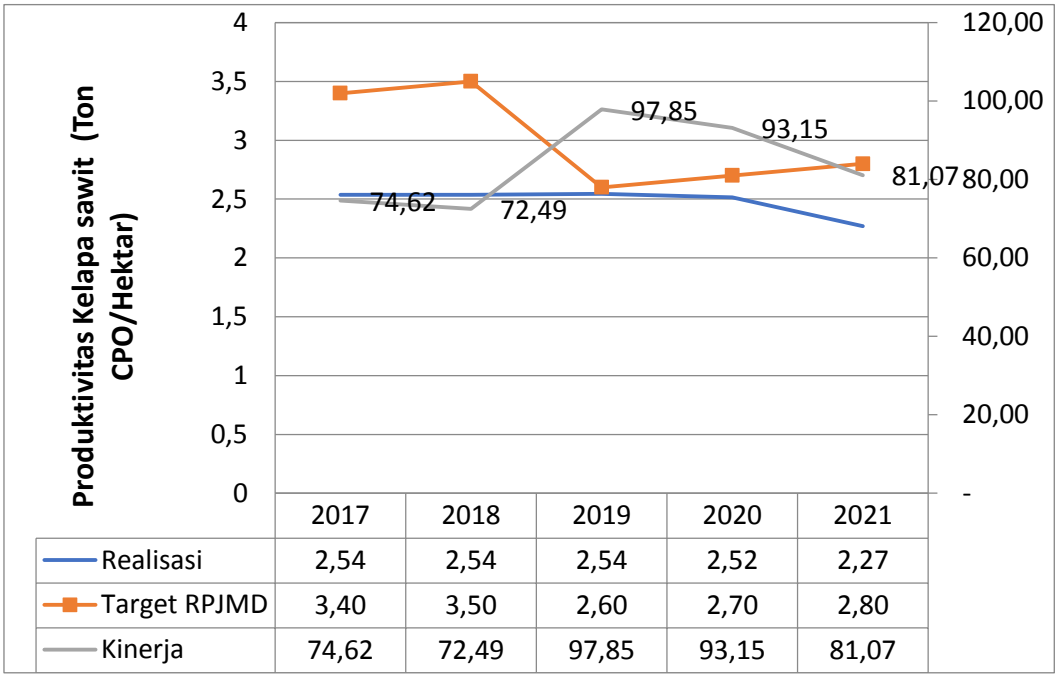

Sumber : Disbun Inhil, 2022 (diolah)

Gambar 2.136.
Produktivitas Kelapa Sawit (Ton CPO/Hektar) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Pada gambar diatas terlihat bahwa produktivitas kelapa masih cenderung lebih sedikit dengan produktivitas kelapa sawit, dimana

produktivitas kelapa sawit Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 sebesar 2,54 Ton CPO/Hektar, hingga tahun 2020 produktivitas kelapa sawit Kabupaten Indragiri Hilir relatif sama dimana pada tahun 2020 produktivitas kelapa sawit diangka 2,52 Ton CPO/Hektar.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa produktivitas kelapa sawit di Indragiri Hilir didorong meningkat yaitu dari 3,40 ton/hektar pada tahun 2017 menjadi 3,50 ton/hektar tahun 2018. Tahun 2019-2021 di angka 2,60 ton/hektar -2,80 ton/hektar. Realisasi capaian indikator produktivitas kelapa sawit ini umumnya dibawah target. Selama periode ini, realisasi kinerja produktivitas kelapa sawit berkisar antara 72,49% - 97,85% yang terkategori sedang-sangat Tinggi. Namun perlu dicatat bahwa capaian produktivitas kelapa sawit Indragiri Hilir khususnya diperkebunan rakyat tahun 2017 yaitu sebesar 3,5 ton per hektar, masih jauh rendah bila dibanding dengan capaian produktivitas perkebunan besar di Indragiri Hilir sendiri yaitu sebesar 4,24 ton, bahkan di Pelalawan sudah mencapai 4,42 ton per hektar. Oleh karena itu, upaya replanting perkebunan kelapa sawit rakyat di Indragiri perlu direncanakan sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit.

f. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Indragiri Hilir menurut lapangan usaha dengan tren berfluktuatif menurun. Kontribusi sektor pertanian menurut sub sektor menunjukkan bahwa subsektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 57% diikuti perikanan (24%), kehutanan (11%), tanaman pangan (4%), tanaman hortikultura (1%) dan peternakan (1%) serta jasa pertanian dan perburuan (1%).

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB menurun dari

45,50% pada tahun 2017 menjadi 45% pada tahun 2018. Realisasi indikator kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Indragiri Hilir memiliki trend yang relatif sama dengan target yaitu menurun dengan capaian yang masih diatas target. Realisasi kinerja indikator kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Indragiri Hilir ini berkisar antara 98,13% - 105,53% yang terkategori Sangat Tinggi. Masih tingginya kontribusi sektor pertanian khususnya dari sub sektor perkebunan naka sudah seharusnya sub sektor ini mendapat perhatian yang cukup dalam pembangunan dan didorong untuk berkembangnya industri hilir.

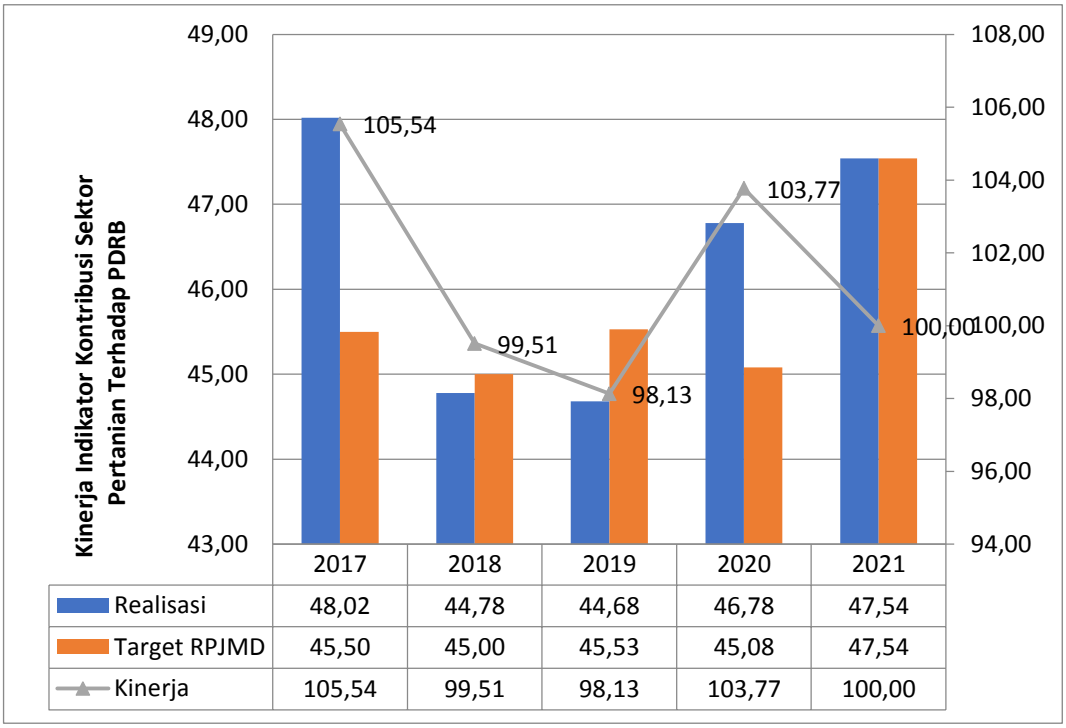

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	48,02	44,78	44,68	46,78	47,54
Target RPJMD	45,50	45,00	45,53	45,08	47,54
Kinerja	105,54	99,51	98,13	103,77	100,00

Sumber : https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.137.
Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

2.1.3.3.3. Perdagangan

Layanan urusan pilihan bidang perdagangan diwakili oleh indikator (i) Nilai ekspor bersih perdagangan dan (ii) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan atau disebut juga neraca perdagangan adalah nilai ekspor dikurangi nilai impor. Volume dan nilai ekspor Indragri Hilir selama periode 2016 hingga 2020 cendrung fluktuatif. Pada tahun 2016, volume ekspor USD 184,88 juta dan meningkat pada tahun 2020 pada angka USD 409,15 juta. Disisi lain volume dan nilai impor cenderung meningkat sehingga ekspor bersih cenderung menurun.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator ekspor bersih perdagangan Indragiri Hilir adalah terus meningkat atau surplus yaitu dari USD 320.93 pada tahun 2020 menjadi USD 409,15.

Selama periode 2018 – 2019, realisasi indikator ekspor bersih perdagangan Indragiri Hilir memiliki trend menurun dan diatas target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, dengan realsiasi indikator diatas target maka realisasi kinerja menjadi 184,55% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada periode 2018-2019, realisasi kinerja indikator ekspor bersih perdagangan menurun menjadi 143,58% - 184,55% yang terkategori Rendah. Pada tahun 2019-2020 terjadi peningkatan dengan realisasi kinerja 170,48%-143,58% dengan kategori sangat tinggi, Kemudian di tahun 2020-2021 realisasi kinerja mengalami penurunan kembali menjadi 125,78%-170,48% dengan kategori rendah, Semakin menurunnya ekspor bersih perdagangan atau neraca perdagangan Indragiri Hilir ini harus segera diantisipasi melalui program-program pembangunan yang

mendorong tumbuh dan berkembangan industri yang memberi nlai tambah pada output pertanian yang beroreantasi ekspor.

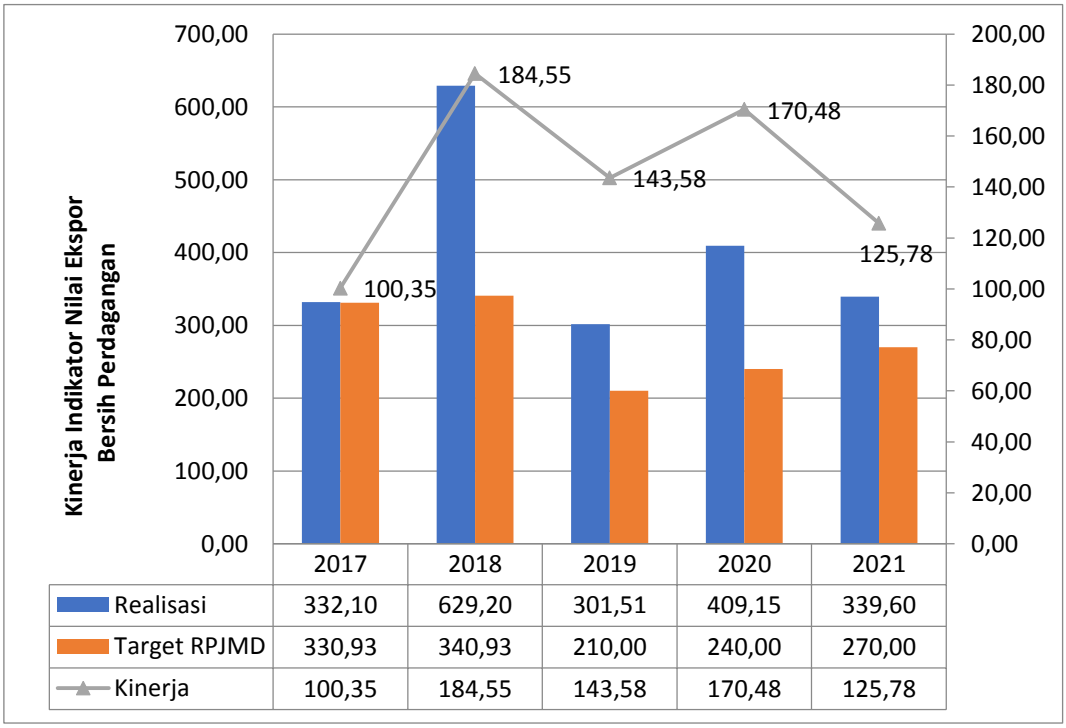

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	332,10	629,20	301,51	409,15	339,60
Target RPJMD	330,93	340,93	210,00	240,00	270,00
Kinerja	100,35	184,55	143,58	170,48	125,78

Sumber : https://sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.138.
Kinerja Indikator Nilai Ekspor Bersih Perdagangan
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

b. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000 = 100) menggunakan klasifikasi usaha indonesia 1990 (KLUI 1990) yang terdiri dari 9 lapangan usaha. PDRB tahun dasar 2010 = 100 menggunakan KBLI 2009 yang terdiri dari 17 lapangan usaha. Lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran pada KLUI 1990 dipecah menjadi 2 lapangan usaha pada KBLI 2009 yang terdiri dari (i) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dan (ii) transportasi dan pergudangan.

alam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator kontribusi perdagangan terus meningkat dari 14% pada tahun 2017 menjadi 14,40% pada tahun 2021. Realisasi indikator ini memiliki trend menurun yaitu dari 17,55% pada tahun 2017 meningkat menjadi 14,99% pada tahun 2019 dan Realisasi kinerja indikator ini selama periode 2019 – 2021 berada diatas target dengan realisasi kinerja sebesar 104,10% pada tahun 2021 yang terkategori Sangat Tinggi.

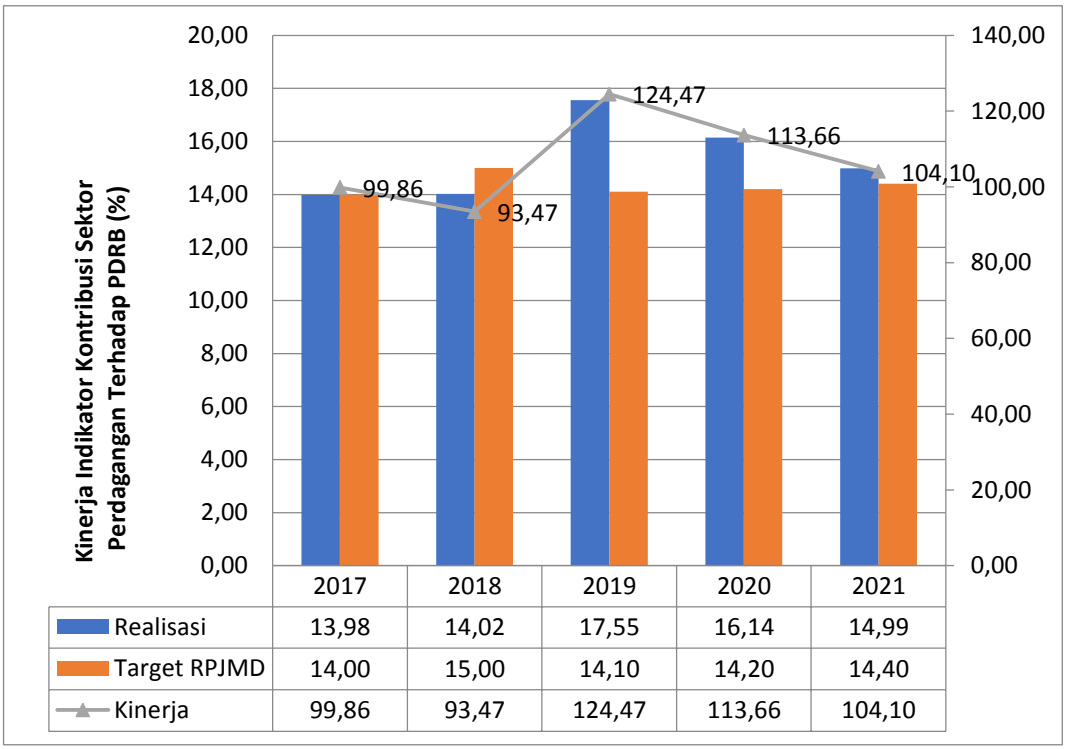

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	13,98	14,02	17,55	16,14	14,99
Target RPJMD	14,00	15,00	14,10	14,20	14,40
Kinerja	99,86	93,47	124,47	113,66	104,10

Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka 2022)

Gambar 2.139.
Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

2.1.3.3.4. Perindustrian

Layanan urusan pilihan bidang industri diwakili oleh indikator (i) Nilai produksi usaha menengah kecil dan (ii) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

a. Nilai Produksi Usaha Industri Menegah Kecil

Selama periode 2016-2020, nilai produksi usaha industri menengah dan kecil Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2016, nilai produksi usaha industri menengah kecil sebesar Rp 57.000 (juta) meningkat menjadi Rp 59.500 (juta) pada tahun 2018. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan nilai produksi usaha industri menengah keci Indragiri Hilir meningkat sebesar 1,80% per tahun. Capaian nilai produksi usaha menengah kecil Indragiri Hilir lebih kecil dari Kuantan Singingi meski lebih tinggi nilainya dibanding Indragiri Hulu dan Pelalawan. Upaya untuk meningkatkan nilai produksi usaha menegah kecil Indragiri Hilir perlu mendapat perhatian karena potensi yang ada saat ini belum terkelola dengan baik. Upaya menggerakan usaha menengah kecil melalui program Desa Maju Inhil Jaya adalah suatu strategi terbaik dilakukan.

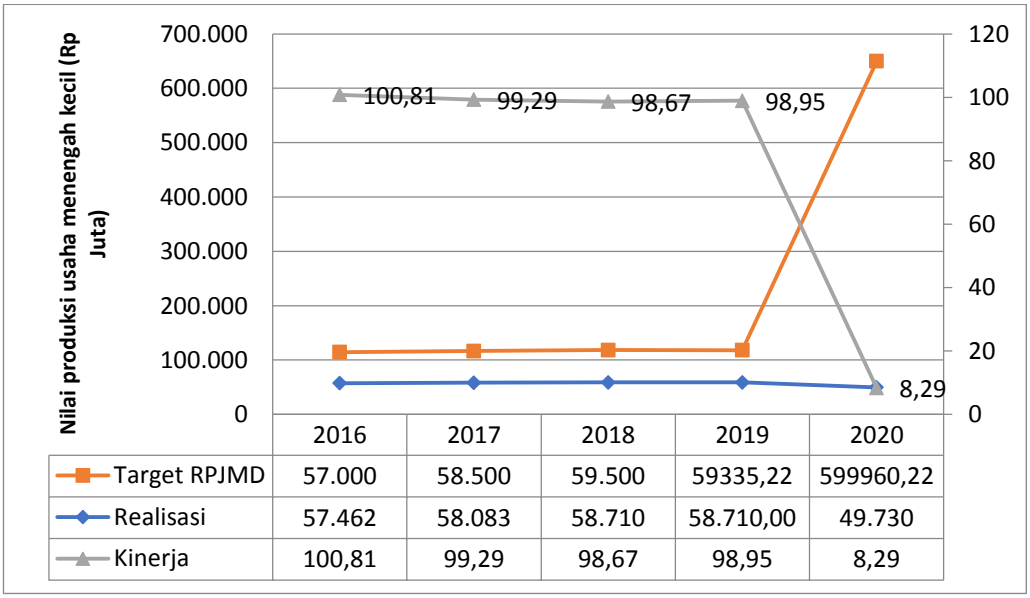

	2016	2017	2018	2019	2020
Target RPJMD	57.000	58.500	59.500	59335,22	599960,22
Realisasi	57.462	58.083	58.710	58.710,00	49.730
Kinerja	100,81	99,29	98,67	98,95	8,29

Sumber : BPS (Riau Dalam Angka , 2020)

Gambar 2.140.
Perkembangan Nilai Produksi Usaha Industri Menengah Kecil
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

b. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor industri disini adalah Industri Pengolahan dengan kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekatkepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*). Kontribusi Sektor industri ini dalam PDRB indragiri Hilir menempati posisi kedua setelah sektor pertanian. Dalam RPJMD Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa kontribusi sektor indsutri terhadap PDRB Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 23,65% pada tahun 2017 menjadi 24,65% pada tahun 2021. Target ini menandakan bahwa Indragiri Hilir bertransformasi dari pertanian ke industri pertanian.

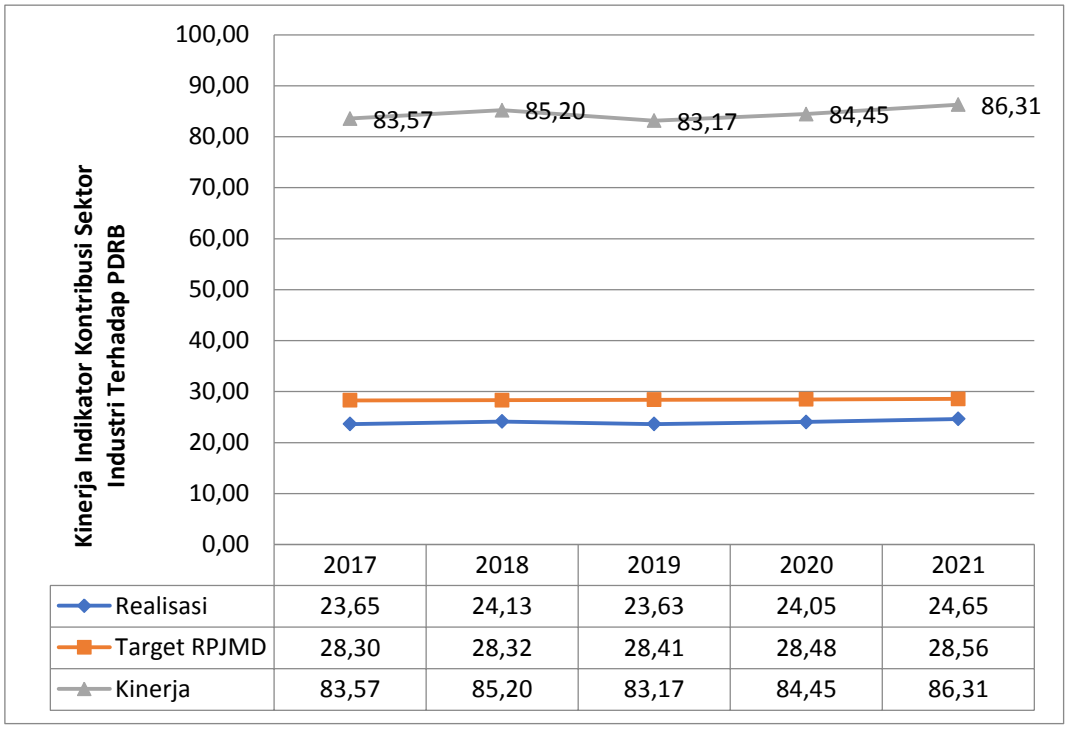

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	23,65	24,13	23,63	24,05	24,65
Target RPJMD	28,30	28,32	28,41	28,48	28,56
Kinerja	83,57	85,20	83,17	84,45	86,31

Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka 2022)

Gambar 2.141.
Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Selama periode 2017-2021, realisasi indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB memiliki trend berfluktuatif meningkat yaitu dari 23,65% pada tahun 2017 meningkat menjadi 24,13% pada tahun 2018 dan meningkat 24,65 pada tahun 2021. Selaras dengan peningkatan capaian indikator dan target, maka realisasi kinerja cenderung menurun yaitu dari 85,20% pada tahun 2018 menjadi 83,17% pada tahun 2019 yang terkategori Tinggi. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian kinerja indikator kontribusi sektor industri berkisar antara 84,45% - 86,31% yang terkategori Tinggi. Meski kontribusi sektor industri Tinggi, namun pencapaian ini dapat jauh lebih tinggi karena sumberdaya yang tersedia masih banyak diekspor dengan nilai tambah rendah seperti kelapa bulat dan CPO. Upaya mewujudkan kawasan industri yang saat ini masih terbengkalai perlu terus diupayakan.

2.1.3.3.5. Transmigrasi

Indikator yang biasa digunakan untuk bidang transmigrasi adalah kontribusi transmigrasi terhadap PDRB. Data ini relatif tidak tersedia dalam penyajian PDRB. Pada tahun 2016, tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebuah kegiatan yaitu Transmigrasi Lokal dengan nilai sebesar Rp 46.913.500 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 90,40%.

2.1.3.3.5. Kelautan dan Perikanan

Layanan urusan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan diwakili oleh indikator (i) Produksi perikanan dan (ii) Konsumsi ikan.

a. Produksi Perikanan

Indragiri Hilir merupakan salah satu produsen ikan di Provinsi Riau setelah Rokan Hilir. Produksi ikan Indragiri Hilir jauh diatas Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan. Sumber produksi ikan Indragiri Hilir berasal dari perikanan laut dan perairan umum. Dalam RPJMD

Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator produksi ikan Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 61.000 ton pada tahun 2017 menjadi 63.000 ton pada tahun 2018.

Selama periode 2017-2021, realisasi indikator produksi ikan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat. Selama periode ini, capaian indikator produksi ikan Indragiri Hilir dibawah target RPJMD. Capaian kinerja indikator ini berkisar antara 93,58% - 104,55% yang terkategori Sangat Tinggi. terkategori Sangat Tinggi namun untuk terus meningkatkan produksi dari tangkap dilaut dan perairan umum akan sulit terus dilakukan. Oleh karena itu, upaya pengembangan perikanan budidaya harus menjadi agenda pembangunan ke depan sehingga produksi ikan dapat terus meningkat dan kesejahteraan nelayan tetap terjamin.

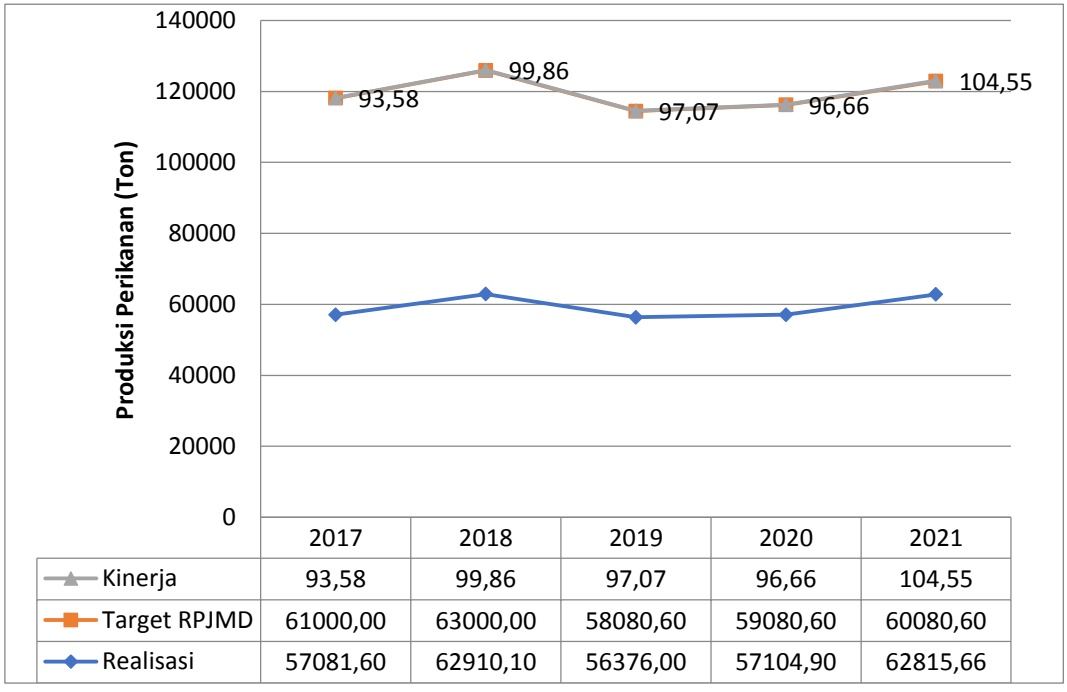

	2017	2018	2019	2020	2021
Kinerja	93,58	99,86	97,07	96,66	104,55
Target RPJMD	61000,00	63000,00	58080,60	59080,60	60080,60
Realisasi	57081,60	62910,10	56376,00	57104,90	62815,66

Sumber: https://sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.142.
Kinerja Indikator Produksi Perikanan
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

b. Konsumsi Ikan

Indragiri Hilir yang merupakan produsen ikan di Provinsi Riau sehingga suplai ikan ke masyarakat selalu tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga murah. Ketersediaan protein per kapita Indragiri Hilir tahun 2016 sebesar 95,52 gram/kapita, dimana ketersediaan ini lebih besar dari ketersediaan protein per kapita di Indragiri Hulu (93,42 gram/kapita) dan Pelalawan (94,31 gram/kapita). Ketersediaan protein per kapita sebesar 95,52 gram, sebesar 37,15 gram berasal dari ikan.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator konsumsi ikan di Indragiri Hilir meningkat dari 38,70 gram per kapita menjadi 39,96 gram per kapita. Pada periode 2017-2021, Realisasi indikator konsumsi ikan Indragiri Hilir masih dibawah target RPJMD, namun pada periode 2017 – 2018 sudah diatas target RPJMD. Pada periode 2019-2021, realisasi kinerja indikator konsumsi ikan berkisar antara 91,93% - 97,59% yang terkategori Tinggi. Meski capaian indikator ini sudah Tinggi namun capaian indikator ini harus terus ditingkat sehingga konsumsi protein dari ikan dapat meningkat.

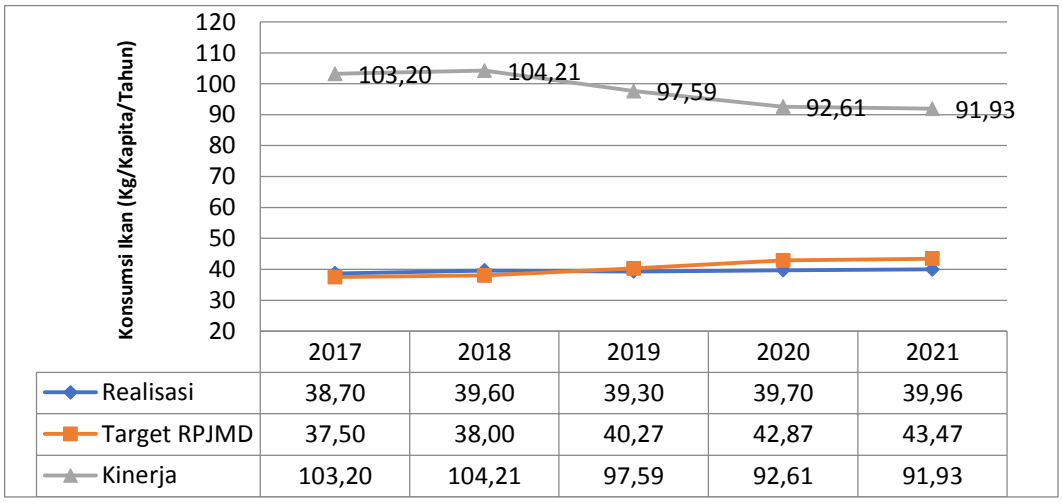

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	38,70	39,60	39,30	39,70	39,96
Target RPJMD	37,50	38,00	40,27	42,87	43,47
Kinerja	103,20	104,21	97,59	92,61	91,93

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.143.
Kinerja Indikator Konsumsi Ikan
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

2.1.3.4. Urusan Penunjang

2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Layanan urusan Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan diwakili dari indikator (i) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, (ii) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada dan (iii) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD.

a. RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. Indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/perkada telah ditetapkan dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 sebagai indikator dalam bidang Perencanaan Pembangunan. RPJMD Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 tahun 2019. Pada tanggal 7 Maret 2022, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indragiri Hilir mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023.

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2022

Gambar 2.144.
Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada di Kabupaten di Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

Selama periode 2017-2021, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki RPJMD yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Realisasi kinerja indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada sebesar 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski pencapaian kinerja indikator ini sangat tinggi namun disadari bahwa dalam penyusunan dokumen RPJMD, Bappeda Indragiri Hilir masih sangat tergantung sepenuhnya dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsional penelitian bidang perencanaan perlu menjadi perhatian dalam periode berikutnya.

b. RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. RKPD

mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain (i) merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD, (ii) menjadia acuan penyusunan Rencana Kerja OPD, berupa program/kegiatan, (iii) mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD, (iv) menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD dan (v) menjadi bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa Indikator tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam Perkada menjadi salah sau indikator dalam bidang perencanaan pembangunan. Selama periode 2014 – 2021, Peraturan Bupati Indragiri Hilir yang berkaitan dengan RKPD sebagai berikut

1. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 18 tahun 2013 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014.
2. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 19 tahun 2014 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015.
3. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 20 tahun 2015 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016.
4. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 27 tahun 2016 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017.
5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 16 tahun 2017 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018.
6. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 18 tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019.
7. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 46 tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020.

8. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 39 tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021
9. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 18 tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022

Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dalam Perkada Realisasi kinerja indikator menjadikan realisasi kinerja indikator ini sebesar 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski pencapaian indikator ini sangat tinggi dan RKPD Indragiri Hilir mendapat penghargaan di tingkat Provinsi Riau, namun dalam penyusunan RKPD masih banyak tergantung dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, kedepan perlu diperbanyak fungsional perencana yang berkualitas dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan.

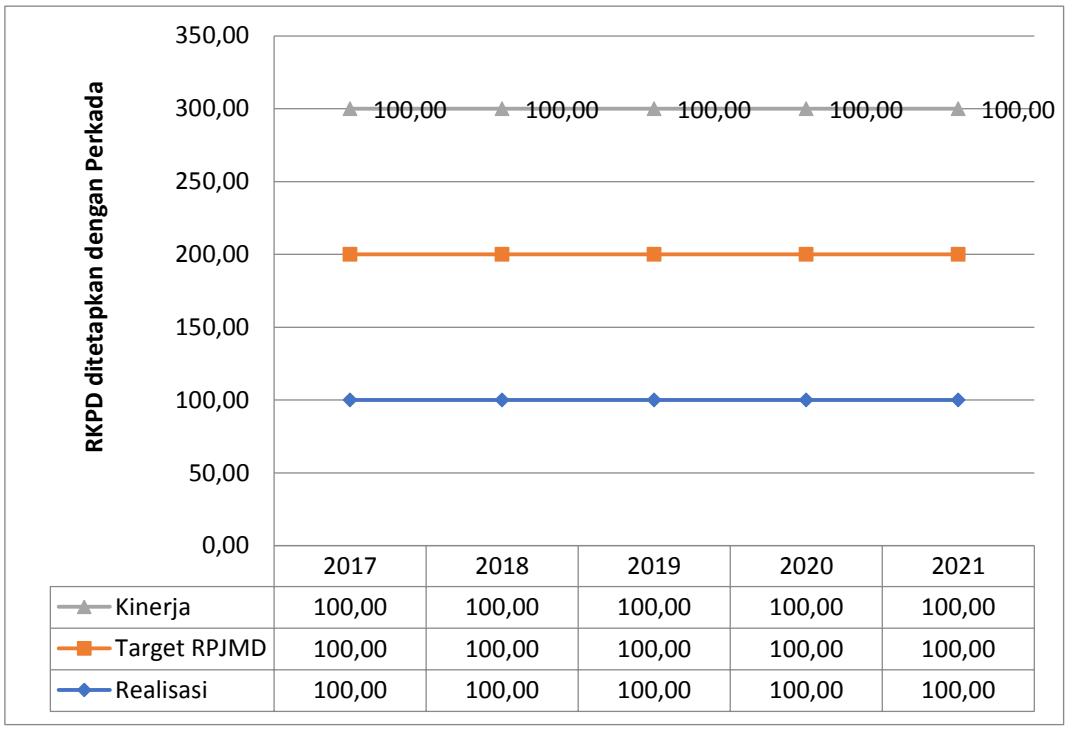

	2017	2018	2019	2020	2021
Kinerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Target RPJMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2022

Gambar 2.145.
Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada di Kabupaten di Indragiri Hilir
Tahun 2017 – 2021

c. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Dalam pedoman penyusunan RKPD telah digariskan bahwa program dalam RKPD harus merupakan mengacu kepada program dalam RPJMD. Dalam RPJMD Kabuapaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa bahwa indikator penjabaran RPJMD ke dalam RKPD dilaksanakan 100% dalam artian program yang dilaksanakan dalam RKPD harus ada dalam RPJMD. Realisasi capaian indikator ini selama periode 2017-2021 adalah sebesar 100%. Dengan demikian, realisasi kinerja indikator penjabaran RPJMD ke dalam RKPD terlaksana 100% dan terkategori Sangat Tinggi.

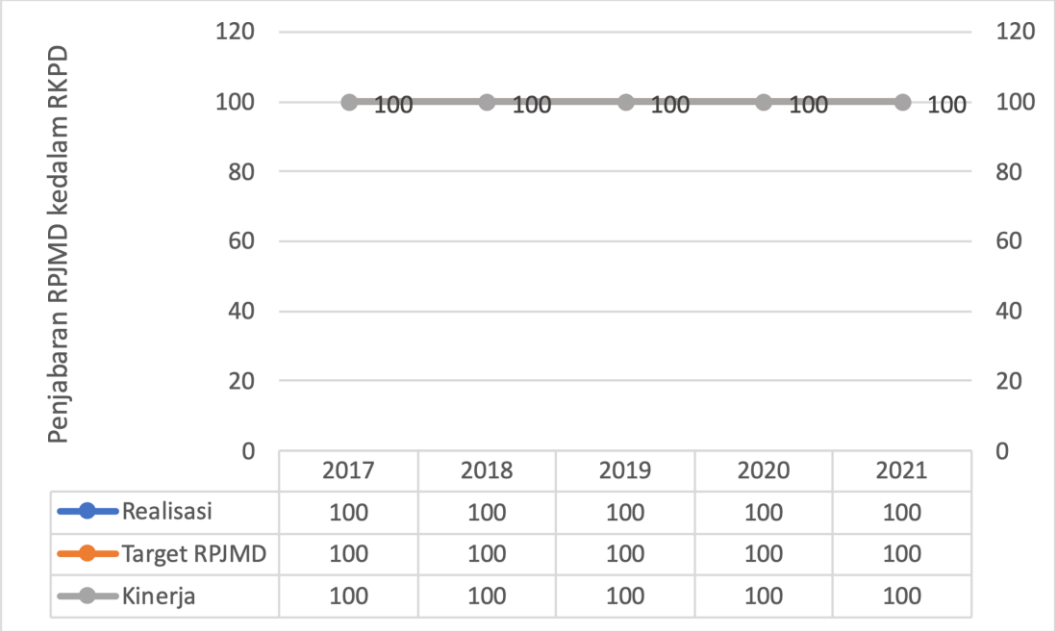

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	100	100	100	100	100
Target RPJMD	100	100	100	100	100
Kinerja	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Inhil 2022

Gambar 2.146.
Kinerja Indikator Penjabaran RPJMD kedalam RKPD
di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

2.1.3.4.2. Keuangan

Layanan urusan Penunjang Bidang Keuangan diwakili dari Opini BPK. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Jenis Opini BPK adalah (i) Wajar tanpa pengecualian atau WTP (*unqualified opinion*), (ii) Wajar Dengan Pengecualian atau WDP (*qualified opinion*), Tidak Wajar (*advised opinion*) dan Tidak Menyatakan pendapat (*disclamer of opinion*)

Pada tahun 2017 – 2021, opini BPK yang diterima adalah WTP atau wajar tanpa pengecualian. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) diberikan jika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos – pos laporan keuangan. Secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat mempertahankan hasil pemeriksaan dari BPK ini.

Tabel 2.52.
Perkembangan Realisasi, target dan capaian kinerja indikator Opini BPK Indragiri Hilir Tahun 2017 - 2021

Uraian	**Tahun**				
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Target RPJMD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kinerja	S. Tinggi	S. Tinggi	S. Tinggi	S. Tinggi	S. Tinggi

Sumber: LKPJ Indragiri Hilir (2017-2021)

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan capaian indikator opini BPK yaitu WTP pada tahun 2017 – 2018. Opini BPK juga ditargetkan WTP dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023. Realisasi capaian indikator opini BPK Indragiri Hilir lebih awal dari target RPJMD dimana pencapaian opini BPK dengan prediket WTP dapat dicapai pada tahun 2017 - 2021. Capaian kinerja indikator opini BPK Indragiri Hilir terkategori Sangat Tinggi.

2.1.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Layanan urusan penunjang Bidang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diwakili oleh oleh indikator Indeks profesionalitas ASN dan Indikator Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manejemen ASN

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, dari 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi , pada Area Perubahan yang ke 5 (lima) yaitu Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Hasil penilaian terhadap Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit menjadi bagian komponen pengungkit dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi .

Penilaian terhadap Indeks Profesinalitas ASN daiatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Penilaian terhadap Indeks Sistem Merit diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengukuran Indeks Profesinalitas ASN dan Indeks Sistem Merit Kabupaten Indragiri Hilir baru dimulai tahun 2019 sampai sekarang dengan kinerja dilihat pada table berikut :

Tabel 2.53
Indeks Profesinalitas ASN dan Indeks Sistem Merit Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2021

Uraian	Indeks Profesinalitas ASN			Indeks Sistem Merit		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Target	50	53	51	218	225	265
Realisasi	52,52	51,57	52,24	218	270	281,5
Kinerja	105,04	97,30	102,43	100	120	106,23

Sumber : BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir (2022)

Pada tahun 2019 Survey dilakukan pada 3 (tiga) perangkat daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai 3,61 kategori B (Baik) , Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nilai 2,82 kategori C (Cukup) dan RSUD Puri Husada Tembilahan dengan nilai 3,22 kategori "B-" dengan nilai rata-rata untuk kabupaten Indragiri Hilir 3,22 kategor B-. Sedangkan untuk hasil evaluasi pada tahun 2020 dilakukan pada 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai 3,61 kategori B (Baik), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nilai 2,82 kategori C (Cukup) mendapat nilai rata-rata untuk Kabupaten Indragiri Hilir 3, 24 dengan kategori B-. Berdasarkan Penilaian Kepatuhan yang dilakukan oleh Ombudsman pada Tahun 2021, Kabupaten Indragiri Hilir mendapat prediket "Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau" dengan Nilai rata-rata 89,21. Dalam hal ini terjadi peningkatan rata-rata sebesar 6.06 point dari penilaian OMBUDSMAN RI yang dilakukan pada tahun 2018 yakni dengan nilai 83, 15.

Tabel 2.54

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Indeks Kepuasan Masyrakat

Tahun 2019-2021 Kabupaten Indragiri Hilir

UPP	2019		2020		2021	
	IPP	Kategori	IPP	Kategori	IPP*	Kategori
DPM-PTSP	3,61	B (Baik)	3,63	B (Baik)	N/A	N/A
DISDUKCAPIL	2,82	C (Cukup)	2,84	C (Cukup)	N/A	N/A
RSUD PURI HUSADA	3.29	B- (Baik Dengan Catatan)	(Hanya 2 UPP, dan RSUD Tidak dilakukan survey di tahun 2020 dan 2021)			
RATA-RATA/ KATEGORI	3,22	B-	3.24	B-	N/A	N/A

2.1.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Pada dasarnya penelitian dan pengembangan harus berjalan seiring dan sejalan dengan pembangunan termasuk di tingkat daerah. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan, secara valid harus mampu menopang seluruh kerangka pembangunan. Kelitbangan terdiri dari kelitbangan utama dan pendukung dan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Kelitbangan utama di arahkan pada penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Sedangkan kelitbangan pendukung diarahkan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan; penguatan ketatalaksanaan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program; fasilitasi inovasi daerah; pengembangan basis data kelitbangan; penguatan kerjasama kelitbangan; dan pemenuhan sumber daya organisasi lainnya.

Selama tahun 2017-2021 pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan, menghasilkan kinerja melalui indikator (1) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, (2) Indeks Inovasi Daerah (Kategori) seperti tersaji pada Gambar 2.147 dan Tabel 2.55.

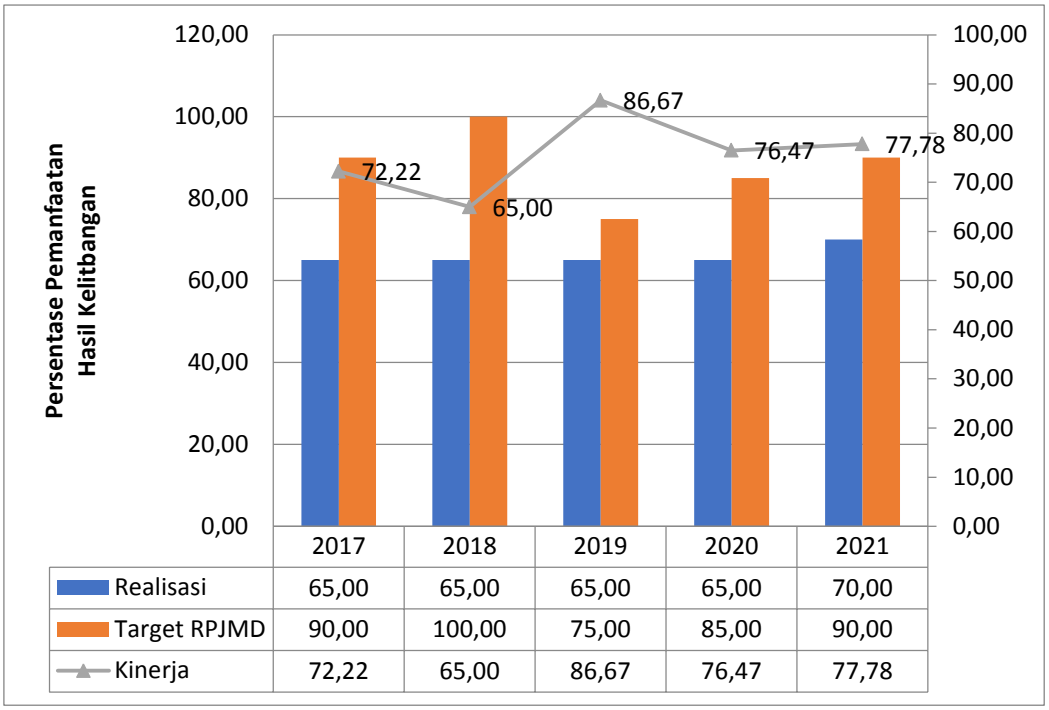

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	65,00	65,00	65,00	65,00	70,00
Target RPJMD	90,00	100,00	75,00	85,00	90,00
Kinerja	72,22	65,00	86,67	76,47	77,78

Gambar 2.147.
Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017– 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir, Kinerja Indikator Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan ditargetkan mencapai 90 % pada tahun 2021. Realisasi pada tahun dimaksud hanya mencapai 70 % sehingga Kinerja pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 77.78 %.

Tabel 2.55
Kinerja Indeks Inovasi Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 - 2021

Indikator	Target		Realisasi	
	2020	2021	2020	2021
Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Terinovatif

Indeks Inovasi Daerah adalah Indikator baru yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 yang ditargetkan kinerjanya mendapat kategori "Sangat Inovatif" dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Pada 2020 Indragiri Hilir masih menduduki posisi 101 dari semua kabupaten yang dinilai dengan kategori sangat inovatif dengan skor indeks 16,30. Sementara pada tahun 2021 Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah meraih peringkat ketujuh sebagai daerah terinovatif melebihi dari target RPJMD. Capaian tersebut diraih Kabupaten Indragiri Hilir setelah mendapatkan penilai baik pada beberapa variabel Indeks Inovasi Daerah. Khususnya pada kecepatan bisnis proses, output pengetahuan, dan teknologi, juga hasil kreatif.

2.1.3.4.5. Pengawasan

Layanan urusan Penunjang Bidang Pengawasan diwakili oleh indikator Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. Di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan oleh Inspektorat yang bertanggungjawab kepada Bupati.

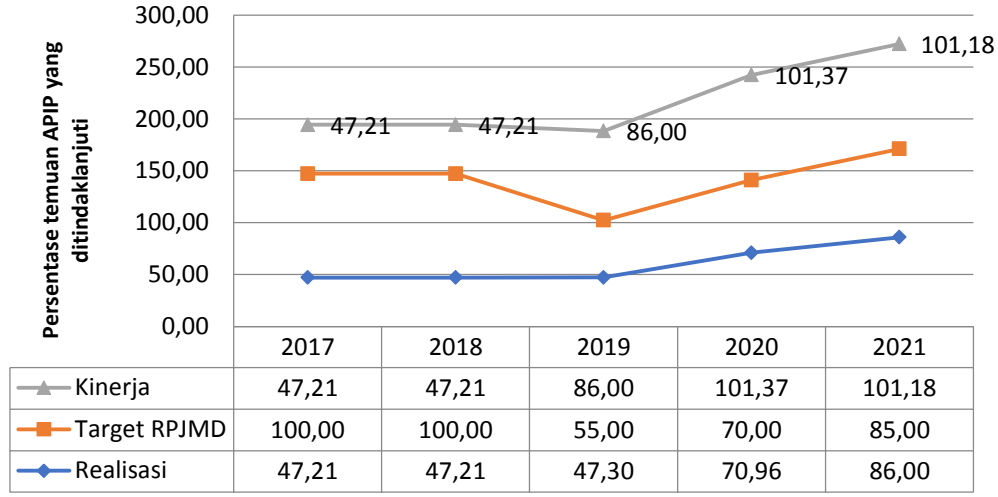

	2017	2018	2019	2020	2021
Kinerja	47,21	47,21	86,00	101,37	101,18
Target RPJMD	100,00	100,00	55,00	70,00	85,00
Realisasi	47,21	47,21	47,30	70,96	86,00

Sumber : LKPJ Inhil (2022)

Gambar 2.148.
Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator
Indikator Persentase Temuan APIP Yang Ditindaklanjuti
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Selama periode 2017-2021, persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti memeiliki trend berfluktuatif menurun yaitu dari 47,21%

pada tahun 2017 tetap sama 47,21% pada tahun 2018 dan naik menjadi 86% pada tahun 2021. Sebagaimana target umumnya, seharusnya persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti adalah 100%. Dengan demikian, realisasi kinerja indikator temuan APIP yang ditindaklanjuti memiliki trend meningkat yaitu dari 100 pada tahun 2020-2021 yang terkategori Sangat Tinggi 101,18% – 101,37% yang terkategori Sangat Tinggi. Permasalahan menurunnya kinerja indikator temuan APIP yang ditindaklanjuti disebabkan oleh beberapa hal seperti (i) terbatasnya jumlah personil aparatur APIP . Jumlah ideal aparatur fungsional APIP sebanyak 45 orang dan (ii) lemahnya penegakan hasil temuan APIP sehingga temuan berulang terjadi di OPD yang sama.

2.1.3.4.6. Sekretariat Dewan

Layanan urusan Penunjang Bidang Sekretariat Dewan diwakili oleh indikator Rasio Pembahasan Prolegda. Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.

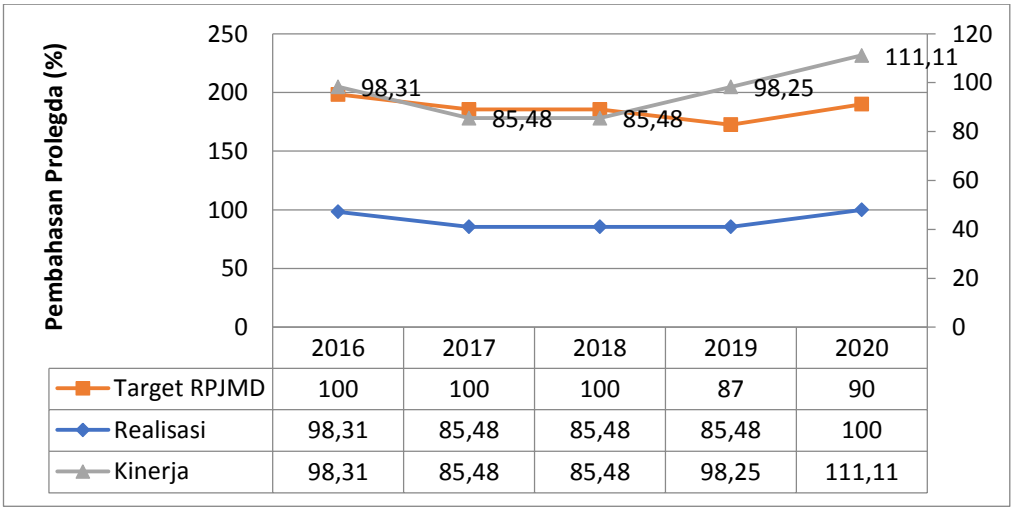

	2016	2017	2018	2019	2020
Target RPJMD	100	100	100	87	90
Realisasi	98,31	85,48	85,48	85,48	100
Kinerja	98,31	85,48	85,48	98,25	111,11

Sumber : LKPJ Inhil (2016– 2020)

Gambar 2.149.
Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Indikator Rasio Pembahasan Prolegda di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Selama periode 2016-2020, perkembangan indikator rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir memiliki trend berfluktiatif

menurun. Pada tahun 2016, realsiasi pembahasan progda Indragiri hilir capainya 100%, menurun menjadi 87% pada tahun 2019 dan capainya menjadi 85,48% pada tahun 2017. Seharusnya, prolegda yang telah diagendakan dapat dibahas pada tahun berkenaan. Selama priode 2016 – 2020, realisasi kinerja indikator rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir sebesar 85,48% - 111,11% dan terkategori tinggi. Pada tahun 2017, realisasi kinerja indikator rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir sebesar 85,48 dan diperkirakan pada tahun 2018 capaiannya diperkirakan sama yaitu sebesar 85,48 dan terkategori Tinggi. Meski capaian indikator rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir terkategori tinggi pada tahun 2017, namun trend indikator ini yang menurun perlu diantisipasi lebih awal dengan melakukan koordinasi yang lebih baik dengan DPRD. Bila rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir terus menurun persentasenya akan menghambat kinerja pemerintah.

2.1.3.4.7. Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 71 Tahun 2021, berikut Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir adalah Menyelenggarakan tugas Membantu Bupati Melaksanakan Urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Yang Menjadi Kewewenangan daerah dan untuk memberikan dukungan ketersedian anggaran yang ada dalam melaksanakan unsur pemerintahan umum terkait Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai mana surat dari Kementerian Dalam Negeri 910/964/Polpum yaitu:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat bergama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
4. Penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertical

Rencana program terdapat program prioritas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang di harapkan sejalan (in-line) dengan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berikut data capaian program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Tabel 2.56

Capaian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kab. Indragiri Hilir Tahun 2021

No	Program	Target	Capaian Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90%	90%
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	20%
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	49.99%
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	28.17%
5	Program Pembinaan dan Pengembangan	100%	100%

	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%	100%

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, provinsi, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah antara lain terdiri dari fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dianalisis melalui pengeluaran per kapita dan nilai tukar petani (NTP).

2.1.4.1.1. Pengeluaran Per Kapita

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan. BPS dalam mengitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Selama periode 2017-2020, pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend meningkat dari tahun 2017-2019 yaitu dari Rp 910.041.000 meningkat menjadi Rp 10.382.000. Namun diakibatkan dari COVID-19 maka terjadi penurunan pengeluaran perkapita pada tahun 2020 dan 2021 yaitu Rp 9.954.000 dan Rp 9.45.000. Capaian pengeluaran per kapita riil penduduk Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2017– 2021 mecapai pengeluaran perkapita tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar Rp 10.382.000 dengan rata – rata pengeluar perkapita pada peride 2017-2021 yakni sebesar Rp. 10.115.000.

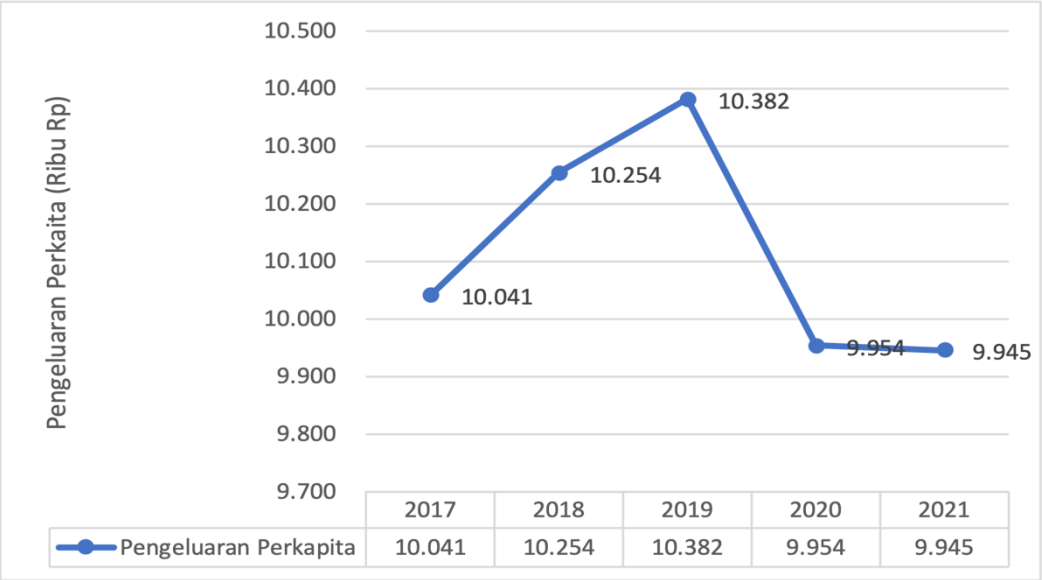

Sumber: inhilkab.bps.go.id, 2022

Gambar 2.147.
Perkembangan Pengeluaran Per kapita Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017– 2021`

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator pengeluaran per kapita Kabupaten Indragiri Hilir ditargetkan meningkat dari Rp 10.000.000 pada tahun 2017, meningkat menjadi Rp 11.667.000 pada tahun 2021. Selama periode 2018-2021 realisasi indikator pengeluaran per kapita dibawah target dengan capaian kinerja sebesar 85,17% sampai 92,50% masih terkategori sangat tinggi. Hal ini disebakan dari adanya dampak COVID-19 yang sehingga pengeluaran perkapita jadi menurun. Selama periode ini, rata-rata kinerja indikator pengeluaran per kapita sebesar 93,47% yang terkategori Sangat Tinggi.

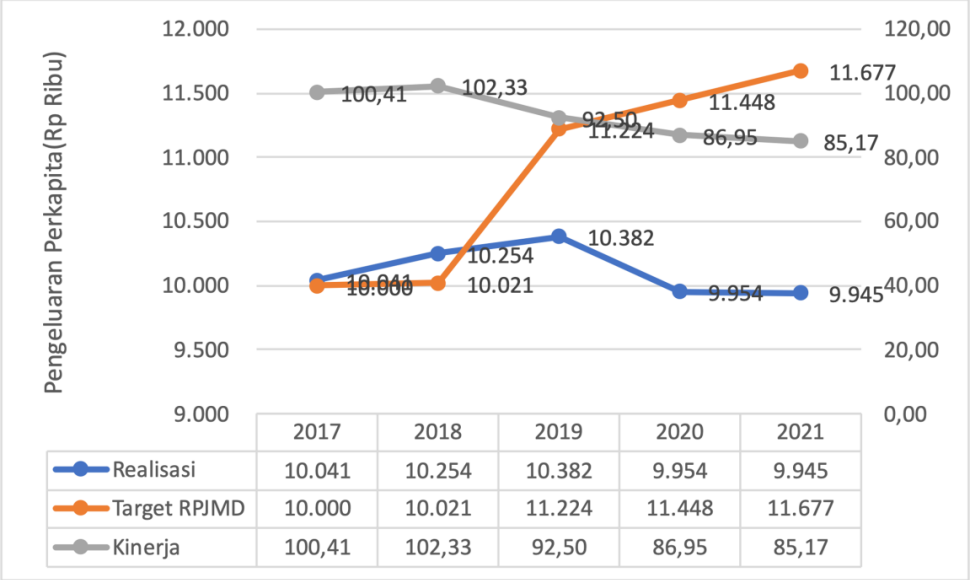

Sumber: inhilkab.bps.go.id, 2022

Gambar 2.148
Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021

2.1.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayar oleh petani dalam melaksanakan usahataninya. NTP mencerminkan efisiensi usahatani dan daya beli petani. Oleh karena NTP Kabupaten Indragiri Hilir tidak tersedia, maka NTP Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan proxy NTP Provinsi Riau.

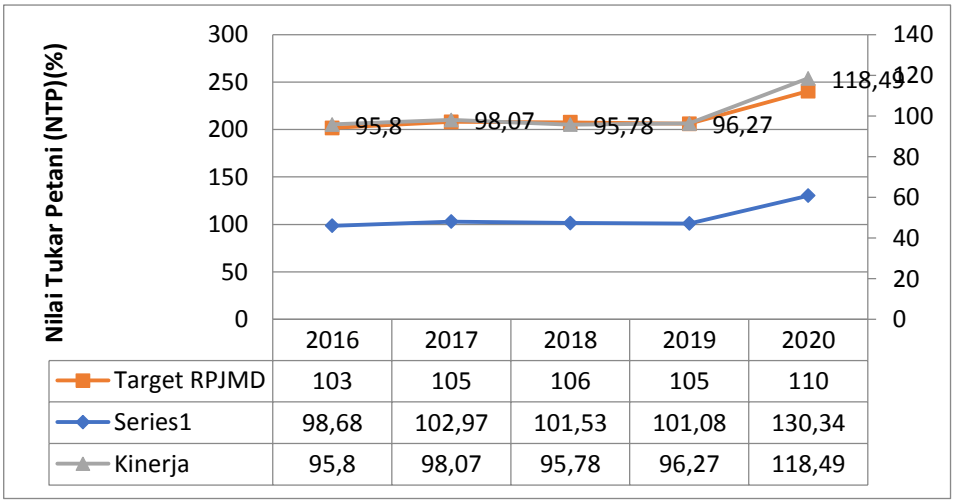

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.152.
Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017– 2021

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator NTP terus meningkat yaitu dari 103,00 pada tahun 2016 menjadi 106,00 pada tahun 2018. Selama periode ini, realisasi indikator NTP meningkat secara berfluktuatif dan dibawah target. Meski realisasi indikator NTP selalu dibawah target namun capaian kinerja berkisar antara 95,78% - 118,49% yang terkategori Sangat Tinggi.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan menggunakan indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

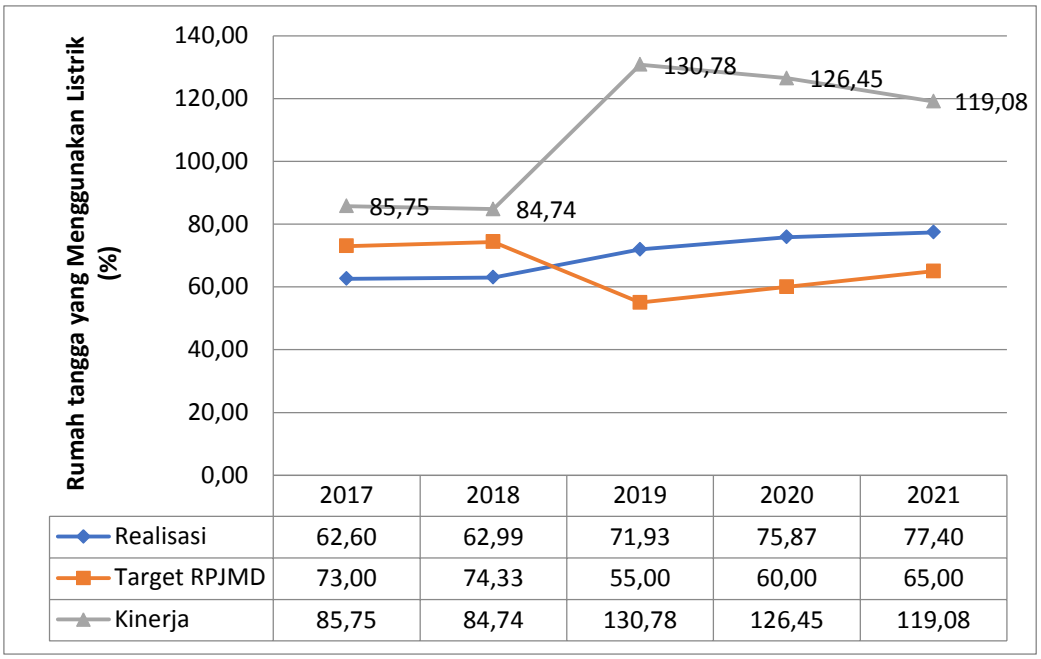

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	62,60	62,99	71,93	75,87	77,40
Target RPJMD	73,00	74,33	55,00	60,00	65,00
Kinerja	85,75	84,74	130,78	126,45	119,08

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id

Gambar 2.153.
Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Rumah tangga yang Menggunkakan Listrik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

2.1.4.3. Iklim Investasi

Analisis Analisis kinerja atas iklim investasi dilakukan menggunakan indikator Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (2)

Jumlah investor berskala nasional (PMA). Sampai dengan tahun 2018 Jumlah investor yang melaksanakan kegiatan atau usaha di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 103 Investor, Investor berskala Nasional (PMDN) Berjumlah 99 Investor sementara berskala Nasional (PMA) berjumlah 4 Investor yang tersebar dibeberapa Kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir sebagai mana tercantum dalam table 2.43 berikut:

Tabel 2.54
Daftar Investor PMA Dan PMDM Masih Beroperasi Berdasarkan IP Yang Bernvetasi
Di kabupaten Indragiri Hilir s/d Tahun 2018

NO	LOKASI PROYEK	JUMLAH PERUSAHAAN	BIDANG USAHA
1	*2*		*5*
1	**KEC. PLANGIRAN**		
	- Desa Tanjung Simpang	2 PMA	- Perkebunan Kelapa Sawit dan PKS
	- Simpang Kanan	5 PMDM	- Perkebunan kelapa Hibrida & Kelapa Sawit
	- Simpang Kanan		- Hutan Tanaman Industri (HTI)
	- Desa Saka Rotan		- Perkebunan kelapa Hibrida & Kelapa Sawit
	- Lubuk Kempas		- Industri Pati Palma
2	**PULAU BURUNG**		
	- Desa Pulau Burung	2 PMDM	- Perkebunan Kelapa Hibrida, Nenas dan pengolahannya
			- Perkebunan Kelapa Hibrida & Sawit.
3	**KEC. MANDAH**		
	- Bente, Belaras,C.Baru,	2 PMDM	- Perkebunan Kelapa Sawit
4	**KEC. KETAMAN**		
	- Bandar Sei. Gemilang	4 PMDM	- Perkebunan Kelapa Sawit
			- Industri kelapa terpadu
			- Hotel melati
			- Baching plant / Beton siap pakai
5	KEC. T. MERAH		
	- Desa Tanah Merah	2 PMDM	- Perkebunan Kelapa Sawit
			- Pengolahan Kelapa
6	**KEC. RETEH**		
	- Seb. Pulau Kijang	4 PMDM	- Perdagangan Eceran BBM
			- Rice Milling
	- Seb. Sangalar		- Perdagangan Buah Yg mengandung minyak
	- Pulau Kijang		- Pedagang Pinang
7	**KEC.SUNGAI BATANG**		
	- Desa Pesangrahan	1 PMDM	- Perkebunan Kelapa Sawit

8	**KEC. KEMUNING**		
	- Desa Keritang	10 PMDM	- Pengolahan Kelapa Sawit (PKS)
	- Desa Tuk Jimun		- Pertambangan Batu Bara
	- Desa Batu Ampar		- Perkebunan Kelapa Sawit
			- Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit
			- Stasiun Pengsian Bahan Bakar Umum (SPBU)
	- Desa,Selensen		
	- Desa Sekara		
9	KEC.KUINDRA	1 PMDM	- Pengolahan Kelapa Sawit (PKS)
10	KEC. CONCONG	2 PMDM	
	- Desa Panglima Raja		
11	KEC. GAUNG ANAK SERKA	21 PMDM	
	- Desa Pintasan		- Industri pati Palm (Sagu basah)
			- Perkebunan Kelapa Sawit
	- Tl. Sungka		
	- Kel. Sei. Empat		
	- Desa Beringin		
	- Lubuk kempas		
	- Desa Idaman		
	- Rambaian		
	- Teluk Pantaian		
	- Desa Harapan Makmur		
12	KEC. GAUNG	6 PMDM	- Perkebunan Kelapa Sawit dan PKS
			- Perkebunan Kelapa Sawit
	- Desa Pungkat		- Hutan Tanaman Industri (HTI)
	- Soren		- Industri Pati Palma (Sagu)
	- Belantara		- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
			- Hutan Tanaman Industri (HTI)
13	**KEC. BATANG TUAKA**	1 PMDM	- Perkebunan Kelapa Sawit & PKS
14	**KEC.KERITANG**	2 PMDM	
	- Desa Sencalang		- Pabrik Kelapa Sawit (PKS)
	- Desa Pengalihan		- Hotel melati
15	**KEC. TEMPULING**	3 PMDM	- Kelapa Sawit terpadu
	- Teluk Jira, Mumpa		- Konstruksi
	- Kel. Tempuling		- Pertambangan batu bara, Pasir
	- Teluk Jira		
16	**KEC. KEMPAS**	2 PMA	
	- Desa Sungai Gantang	12 PMDM	- Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit terpadu
			- Industri Kelapa Terpadu
			- Pembangunan perumahan
			- Pengolahan Pinang
	- Desa Pekan Tua		- Kontruksi , Pelabuhan/Dermaga

	- Desa Bayas Jaya		- Industri Kapal - Eceran BBM di SPBU - Tanki Timbun - Docking - Dermaga dan Pergudangan - Industri kimia dasar organik dari hasil pertanian - Hutan Tanaman Industri
	- Desa Hrapan Jaya - Kel. Harapan Tani.		- Bacing Plant
17	**KEC. ENOK** Desa Bagan Jaya	1 PMDM	- Perkebunan Kelapa Sawit dan PKS
18	**KEC. TEMBILAHAN HULU**	7 PMDM	
	- Kel. Tbh. Barat		- Industri Mortar / Beton siap pakai - Pertambangan Pasir
	- Desa pulau palas		- Pertambangan batu bara - Perkebunan Kelapa Sawit
	- Kel. Tbh. Hulu		- Telekomunikasi - Sntral Telekomunikasi - Laboratorium Farmasi dan Kesehatan
19	**KEC.TEMBILAHAN**	13 PMDM	
	- Kel. Tembilahan		- Hotel Melati - Pertambangan batu bara, Pasir - Perhotelan - Penyediaan Tenaga Listrik
	- Kel. Tembilahan Hilir		- SPBU - Industri mortal / Beton siap pakai - Hotel Melati
	- Tembiahan Kota		- Klinik utama - Klinik swasta - Pembangunan Perumahan
	- Kel. Pekan Arbaa		- Rumah Sakit swasta
	INDRAGIRI HILIR		- Industri Mortar / Beton siap pakai

Sumber : https://dpmptsp.inhilkab.go.id

2.1.4.3.1. Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi

Kondisi daerah yang kondusif akan mendorong meningkatnya iklim investasi karena investor ingin modal yang telah ditanamkan dapat kembali lagi. Untuk itu diperlukan kepastian hukum dan

supremasi hukum harus ditegakan serta didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha di Kabupaten Indragiri Hilir maka disusun beberapa peraturan daerah yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Peraturan tersebut penting karena menjadi pedoman bagi aparatur maupun masyarakat umum dalam menjalankan aktivitas usaha sehingga jelas mana yang boleh dan mana yang dilarang. Beberapa peraturan daerah tersebut antara lain sebagaimana Tabel 2.55.

Tabel 2.58.
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Yang Mendukung Iklim Usaha

NO	NOMOR PERDA	TENTANG
1	1 Tahun 2014	Perubahan atas Perda Kab. Inhil Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dsn Perkotaan
2	2 Tahun 2014	Retribusi Pelayanan Pasar
3	3 Tahun 2014	Retribusi Izin Mendidrikan Bangunan
4	8 Tahun 2014	Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
5	9 Tahun 2014	Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Puri Husada Tembilahan
6	1 Tahun 2015	Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah
7	5 Tahun 2015	Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya
8	9 Tahun 2015	Perubahan ke empat atas Perda Kab. Inhil Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
9	10 Tahun 2015	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada PT. Bank Riau Kepri
10	11 Tahun 2015	Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Indragiri
111	6 Tahun 2016	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
12	10 Tahun 2016	Pencabutan Perda Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan
13	11 Tahun 2016	Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakkit Masyarakat
14	6 Tahun 2017	Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
15	7 Tahun 2017	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	9 Tahun 2017	Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

NO	NOMOR PERDA	TENTANG
17	1 Tahun 2018	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada PT. Bank Riau Kepri
18	2 Tahun 2018	Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada PD. BPR Gemilang
19	3 Tahun 2018	Tata Niaga Kelapa
20	8 Tahun 2019	Tata Niaga Kelapa

Sumber : JDIH Inhil (2022)

Guna percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir maka telah di-Perda-kan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya melalui Perda Nomor 5 Tahun 2015. Program ini memberikan kewenangan kepada desa sekaligus pendanaannya sehingga Pemerintahan Desa diharapkan dapat mandiri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah desanya.

Program DMIJ bertujuan sebagai penggerak agar pembangunan/kegiatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir bercirikan daerah, artinya mengikuti khasanah Indragiri Hilir.

Program DMIJ dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pola Pendampingan.Pendamping Program DMIJ direkrut secara profesional terhadap pelaku-pelaku pemberdayaan masyarakat yang sudah berpengalaman dalam mendampingi masyarakat seperti Program PNPM Mandiri, RIS PNPM, PISEW, Program Pemberdayaan Desa, PAMSIMAS, anggota LSM penggerak dan pelaku Pemberdayaan, dan lain-lain

Program DMIJ tidak hanya membangun sarana infrastruktur, tapi juga memadukan arahan pembinaan yang kemudian di integrasikan dengan program Posyandu maupun pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD).

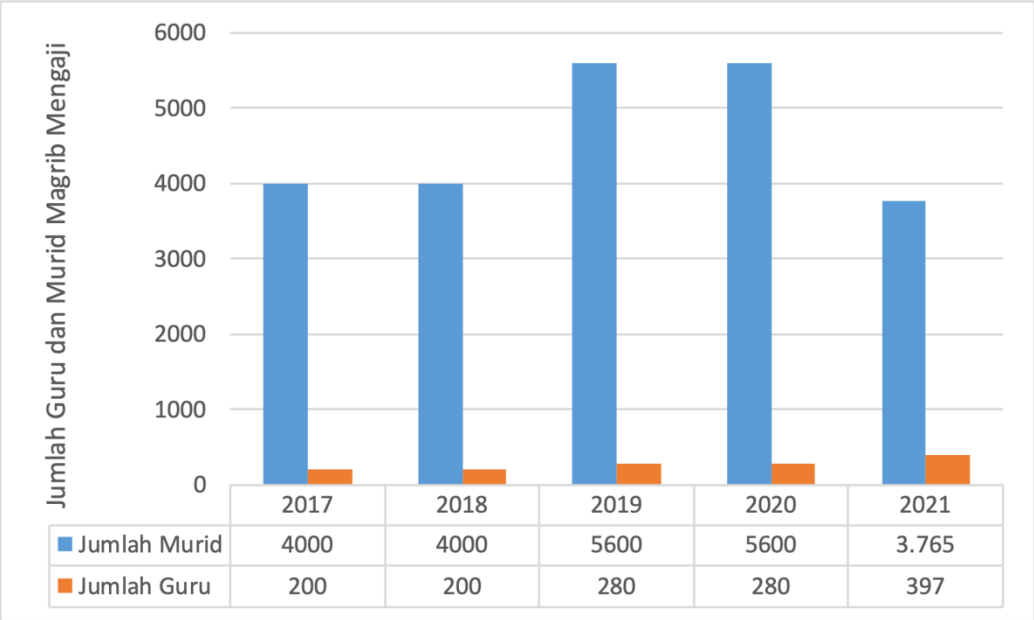

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir (2022)

Gambar 2.154.
Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Magrib Mengaji
melalui Program DMIJ 2017-2021

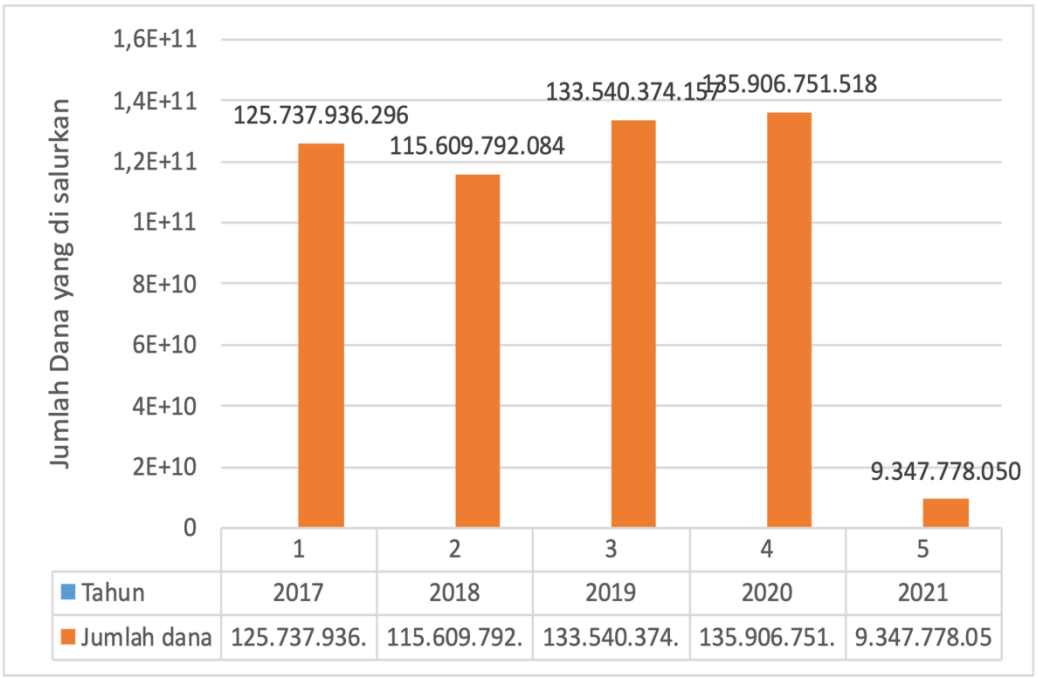

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir (2022)

Gambar 2.155.
Jumlah Dana yang Sudah Disalurkan melalui Program DMIJ 2017-2021

2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

Analisis kinerja sumberdaya manusia dilakukan menggunakan indikator rasio ketergantungan (*defendency ratio*). Perhitungan rasio ketergantungan diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 – 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun (angkatan kerja). Angka ketegantungan ini menunjukkan berapa banyak beban penduduk usia non produktif (bukan tenaga kerja) yang harus ditanggung oleh seorang penduduk produktif (tenaga kerja).

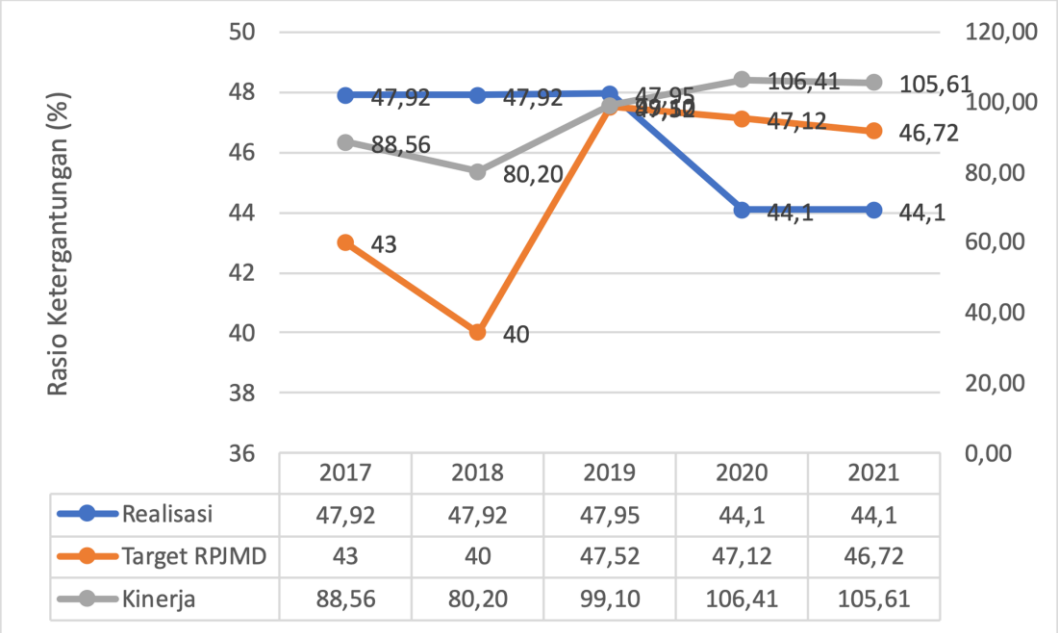

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	47,92	47,92	47,95	44,1	44,1
Target RPJMD	43	40	47,52	47,12	46,72
Kinerja	88,56	80,20	99,10	106,41	105,61

Sumber: Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka 2022

Gambar 2.156.
Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Rasio Ketergantungan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

Hasil Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan capaian kinerja (target kinerja dan realisasi kinerja) penyelenggaraan urusan pemerintah selama periode 2017-2021 dirangkum dalam Tabel 2.56 sebagai berikut:

Tabel 2.59.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
I	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1.1.1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp Milyar)	45.158	48.158	45.676,05	48.188,23	51.079,53	41.491	42.989	44.776	44.928	46.921,26	<
1.1.2.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)	6,9	7	5	5,5	6,0	4,52	3,61	4,16	0,34	4,44	<
1.1.3.	Inflasi (%)	7	7	3,8	3,7	3,6	4,27	2,64	2,4	3,3	1,1	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1.1.4.	PDRB Per Kapita (Rp Juta/Kap/Tahun)	58,14	61,05	61,1	60,73	63,34	57,64	58,78	60,46	68,6	71,31	>
1.1.5.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	45,84	44,08	53,69	53,36	53,03	55,4	51,42	48,29	44,29	44,61	>
1.1.6.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,3	6,03	7,5	7,4	7,3	7,7	7,05	6,54	5,93	6,18	>
1.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial											
1.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	66,5	67,5	66,53	67,53	68,08	66,17	66,51	66,84	66,54	66,63	<
1.2.2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,5	13	12,05	12,76	12,96	11,88	11,89	11,9	11,91	11,93	<
1.2.3.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,5	9	7,25	7,26	7,38	7,18	7,19	7,22	7,23	7,24	<
1.2.4.	APK SD/MI (%)	113	115	100,97	102,47	103,97	101,73	104,31	105,85	105,93	104,56	>
1.2.5.	APK SMP/MTs (%)	103	105	101,03	101,28	101,53	100,85	98,33	99,3	102,01	99,97	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1.2.6.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,5	70	67,09	68	68,40	67,07	67,32	67,66	67,85	67,98	<
1.2.7.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	1	1	1	0,9	0,80	1,2	1,1	0,02	0,03	0,02	<
1.2.8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4	3	3,43	3,14	2,86	4,08	3,96	4,55	4,35	2,66	<
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga											
1.3.1.	Cakupan Fasilitasi Seni (%)	70	80	52	54	56	50,75	50,75	50,75	50,75	0	<
1.3.2.	Jumlah Prestasi Olahraga (Kejuaraan)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	<
II	Aspek Pelayanan Umum											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
2.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar											
2.1.1.	Pendidikan											
2.1.1.1.	APM SD/MI (%)	98,2	98,3	87	90	93	94,62	94,92	95,34	95,52	95,99	>
2.1.1.2.	APM SMP/MTs (%)	68	69	76	77	78	79,96	82,39	81,26	82,06	82,59	>
2.1.1.3.	APS 7 - 12 Tahun (%)	99,2	99,3	98	99	100	97,56	97,26	99,08	99,75	99,77	<
2.1.1.4.	APS 13 - 15 tahun (%)	93	94	92	93	94	90,77	91,29	91,7	92,13	92,27	<
2.1.1.5.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,2	0,1	0,04	0,03	0,02	0,05	0,05	0,05	0,01	0,70	>
2.1.1.6.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,2	0,1	0,06	0,05	0,04	0,07	0,07	0,07	1,83	1,59	>
2.1.1.7.	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI (%)	85,5	86	74	76	78	72,32	72,32	73,02	74,91	79,95	<
2.1.1.8.	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTS	73	74	67	70	73	68,55	64,05	65	63,89	76	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	(%)											
2.1.1.9.	Rasio ketersediaan Guru Terhadap Murid SD/MI (Guru Per 10.000 Murid)	600	550	710	730	760	721,78	697,61	781,64	833,33	600	<
2.1.1.10.	Rasio ketersediaan Guru Terhadap Murid SMP/MTs (Guru Per 10.000 Murid)	900	800	1007	1008	1009	1.005,19	1.005,19	985,75	714,29	666,67	<
2.1.1.11.	Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV (%)	48	56	88	92	96	80,82	84,61	86,53	71,82	80,01	<
2.1.2.	Kesehatan											
2.1.2.1.	Rasio Rumah Sakit (Per 1.000 Penduduk)	0,009	0,01	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,004	0,004	0,006	<
2.1.2.2.	Rasio Puskesmas (Per 1.000 Penduduk)	0,0392	0,043	0,038	0,039	0,040	0,037	0,037	0,038	0,041	0,040	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
2.1.2.3.	Rasio Dokter Spesialis (Per 1.000 Penduduk)	0,075	0,106	0,04	0,042	0,044	0,037	0,037	0,032	0,032	0	<
2.1.2.4.	Rasio Dokter Umum (Per 1.000 Penduduk)	0,23	0,3	0,11	0,2	0,3	0,108	0,108	0,054	0,064	0,11	>
2.1.2.5.	Rasio Dokter Gigi (Per 1.000 Penduduk)	0,09	0,1	0,006	0,01	0,015	0,0039	0,0039	0,026	0,032	0,036	>
2.1.2.6.	Rasio Perawat (Per 1.000 Penduduk)	0,9	1	0,8	0,82	0,84	0,789	0,789	0,499	0,957	0,812	>
2.1.2.7.	Rasio Bidan (Per 1.000 Penduduk)	0,55	0,65	0,61	0,062	0,63	0,595	0,595	0,881	0,568	1,261	>
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
2.1.3.1.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik (%)	26	27	17	20	23	14,22	14,22	14,22	4,52	4,88	<
2.1.3.2.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan	70	75	66,23	69,73	73,23	59,23	59,23	53,23	57,84	55.10	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kondisi Mantap (%)											
2.1.3.3.	Proporsi Jembatan Dengan Kondisi Baik (%)	26	27	40	45	50	35,96	35,96	35,96	58,32	54,12	>
2.1.3.4.	Proporsi Irigasi Dalam kondisi Baik (%)	30	40	30	32	34	27	28	28	30	31,2	<
2.1.3.5.	Ratio RTH Per Satuan Wilayah Ber HPL/HGB (%)	75	76	77	78	78	75	76	77	77	77	<
2.1.4.	Perumahan Rakyat dan Pemukiman											
2.1.4.1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	80	98,33	20	22	24	18,77	18,77	20,05	20,05	11,88	<
2.1.4.2.	Rumah Tidak Layak Huni (%)	0,5	0,4	0,45	0,4	0,35	0,5	0,5	0,45	0,45	0,25	<
2.1.4.3.	Persentase luasan pemukiman kumuh	24	20	20	18	15	25	25	22	22	22	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	diperkotaan (%)											
2.1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dam Perlindungan Masyarakat											
2.1.5.1.	Rasio Rumah Ber IMB (%)	4	5	3	4	5	1,22	2,14	2,3	2,5	4,11	<
2.1.5.2.	Rasio Personil Satpol PP (Per 10.000 Penduduk)	0,06	0,07	0,03	0,04	0,04	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	=
2.1.5.3.	Cakupan Penegakan Peraturan (%)	94	100	96	97	97	90,5	95	96	96	96	<
2.1.5.4.	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (%)	90	100	30	50		10	10	10	10		<
2.1.6.	Sosial											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
2.1.6.1.	Penyandang Cacat Baik Fisik Maupun Mental Serta Lanjut Usia Yang Tidak Potensial Yang telah Menerima Jaminan Sosial (%)	90	100	92	94	98	90	90	90	72,7	98	=
2.1.6.2.	PPKS penerima bantuan sosial (%)	80	100	85	90	96	80	80	82,5	100	96	=
2.2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar											
2.2.1.	Tenaga Kerja											
2.2.1.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,2	64,5	63	64	65	62,27	62,27	64,66	63,08	68,56	>
2.2.1.2.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)	40	45	83	84	85	82,74	82,74	99	3,89	65,20	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
2.2.1.3.	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)	100	100	78	81	84	75	75	26,54	0	50	<
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Gender (%)	84	85	82,69	82,99	83,29	81,69	82,37	82,57	82,34	82,37	<
2.2.2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	61	62	63,1	63,9	64,80	59,43	59,59	64,83	64,45	64,5	<
2.2.2.3.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	88	90	92	93	94	88,14	90,98	91,45	96,56	50,85	<
2.2.3.	Pangan											
2.2.3.1.	Ketersediaan Pangan Utama (%)	100	100	100	100	100	100	100	109	103,9	103,90	>
2.2.3.2.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	88	90	88,6	95,5	96,50	88	88	88,5	88,9	86	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
2.2.4.	Pertanahan											
2.2.4.1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	45	46	43	44		41,39	41,39	41,39	41,38		<
2.2.5.	Lingkungan Hidup											
2.2.5.1.	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	95	100	96	97	98	95	95	95	95	100	>
2.2.5.2.	Persentase Penanganan Sampah (%)	95	100	82	83	84	81,5	81,7	70,15	81,49	17,22	<
2.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
2.2.6.1.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	95	100	86	88	90	183	218	212	226	100	>
2.2.6.2.	Kepemilikan KTP (%)	100	100	65	80	85	85	89	98	99	99,10	>
2.2.6.3.	Kepemilikan Akta Kelahiran (Per 1.000	800	1.000,00	700	750	850	469	510	542	556	554	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Penduduk)											
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2.2.7.1.	Cakupan Program Desa Maju Inhil Jaya (Desa)	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	=
2.2.7.2.	Jumlah Desa Maju (Desa)	180	197	2	2	2	2	2	2	11	21	>
2.2.7.3.	PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.2.7.4.	Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
2.2.8.1.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	69,22	69,57	72	74	78,77	88,67	65,86	60,26	64,1	76	<
2.2.8.2.	Cakupan PUS Peserta	96	100	75	77	79	92,65	89,25	92,93	77,82	53,85	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	KB Aktif (%)											
2.2.8.3.	Ratio PPKBD Satu Setiap Desa/Kelurahan (%)	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.2.9.	Perhubungan											
2.2.9.1.	Tersedianya Angkutan Umum Yang melayani Trayek Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten (%)	74	75	75	77	79	73	73	73,2	77,78	60,60	<
2.2.9.2.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten/kota (%)	75	80	80	85	90	70	75	72,4	83,31	54,06	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
2.2.9.3.	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan (%)	100	100	87	90	93	80	85	85,5	87,4	92,70	<
2.2.10	Komunikasi dan Informatika											
2.2.10.1	Pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	website (media online)											
2.2.10.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	90	100	100	100	100	100	100	100	35	95	<
2.2.11.	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah											
2.2.11.1.	Koperasi Aktif (%)	60	70	67	68	69	66,05	66,05	66,2	67	67	<
2.2.11.2.	Usaha Mikro dan Kecil (%)	99,5	99,5	68	69	86	67	67	67,15	72	70	<
2.2.12.	Penanaman Modal											
2.2.11.1.	Realisasi PMDN (Rp Milyar)	19.000	20.000	9,921	11112	12445	1.184	5.116	385,23	448,6	1855	<
2.2.11.2.	Realisasi PMA (USD	73	74	96	108	121	0,4	329,71	1,92	274,38	2,29	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Juta)											
2.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga											
2.2.13.1.	Jumlah Prestasi olahraga (Kejuaraan)	0	0	5	6		0	4	0	0		<
2.2.14	Statistik											
2.2.14.1.	Buku "Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka" (Judul)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	=
2.2.14.1.	Kecamatan Dalam Angka (Judul)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	=
2.2.15	Persandian											
2.2.16	Kebudayaan											
2.2.16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan	5	5	5	5	0	5	5	4	0	0	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	budaya (Event)											
2.2.16.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Unit)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	=
2.2.17.	Perpustakaan											
2.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	10.000	11.000	5.672,00	6.372,00	7072	4.972	4.972	5.210	7.866	9480	>
2.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (Buku)	30.000	40.000	23.012,00	23.162,00	23.312	22.862	22.862	23.000	54.884	54.792	>
2.2.18.	Kearsipan											
2.2.18.1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	60	80	40	50	60	30,4	30,4	31,5	50,7	67	>
2.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang)	3	3	4	5	60	20	20	0	25	25	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
2.3.	Layanan Pilihan											
2.3.1.	Pariwisata											
2.3.1.	Kunjungan Wisatawan (Orang)	3.300	3.500	3400	4000	4.500	75.611	90.142	91137	22047	63.529	>
2.3.2.	Pertanian											
2.3.2.1.	Produktivitas Padi (Ton GKG/Hektar)	4	4,21	4,1	4,15	4,20	3,98	4,02	3,89	3,94	4,24	>
2.3.2.2.	Produksi beras (Ton)	85.326	87.208	59115,42	61815,42	64.515,42	56.415	56.415	57.000	49.008,10	46.651,57	<
2.3.2.3.	Produktivitas Kelapa (Ton Koppa/Hektar)	1	1,05	1,21	1,23	1,25	1,115	1,17	1,213	1,217	1,14	<
2.3.2.4.	Produktivitas kelapa sawit (Ton CPO/Hektar	3,4	3,5	2,6	2,7	2,80	2,537	2,537	2,544	2,515	2,27	<
2.3.2.5.	Kontribusi sektor pertanian terhadap	45,5	45	45,53	45,08	47,54	48,02	44,78	44,68	46,78	47,54	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	PDRB (%)											
2.3.3.	Perdagangan											
2.3.3.1.	Nilai Ekspor bersih Perdagangan (USD Juta)	330,93	340,93	210	240	270	332,1	629,2	301,51	409,15	339,60	>
2.3.3.2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	14	15	14,1	14,2	14,4	13,98	14,02	17,55	16,14	14,99	>
2.3.4.	Perindustrian											
2.3.4.1.	Nilai produksi usaha menengah kecil (Rp Juta)	58.500	59.500	59335,22	599960,2		58.083	58.710	58.710,00	49.730		<
2.3.4.2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.	30	31	28,41	28,48	28,56	28,3	28,3	23,6	24,1	24,65	<
2.3.5.	Transmigrasi											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
2.3.6.	Kelautan dan Perikanan											
2.3.6.1.	Produksi Perikanan (Ton)	61.000	63.000	58.080,60	59.080,60	60.080,60	57081,6	62910,1	56376	57104,9	62.815,66	>
2.3.6.2.	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	37,5	38	40,27	41,87	43,47	38,7	39,6	39,3	39,7	39,96	<
2.4.	Urusan Penunjang											
2.4.1.	Perencanaan Pembangunan											
2.4.1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	0	100	0	0	100	0	100	0	0	100	=
2.4.1.2.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	dengan Perkada											
2.4.1.3.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.2.	Keuangan											
2.4.2.1.	Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
2.4.3.	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Latihan											
2.4.3.1.	Pembinaan PNS melalui Pemberian Hukuman Disiplin (Persen))	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.4.	Penelitian dan Pengembangan											
2.4.4.1.	Persentase pemanfaatan hasil	90	100	75	85	90	65	65	65	65	70	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	kelitbangan											
2.4.5.	Pengawasan											
2.4.5.1.	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	55	70	85	47,21	47,21	47,3	70,96	86	>
2.4.6.	Sekretariat Dewan											
2.4.6.1.	Rasio Pembahasan Prolegda	100	100	87	90		85,48	85,48	85,48	100		<
III.	Aspek Daya Saing											
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah											
3.1.1.	Pengeluaran Per Kapita (Rp Ribu)	10.000,00	10.021,00	11.223,66	11.448	11.667	10.041,00	10.254,00	11.987	12.724	9.945	<
3.1.2.	Nilai Tukar Petani (%)	105	106	105	110		102,97	101,53	101,08	130,34		=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur											
3.2.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	73	74,33	55	60	65	51,07	51,07	51,5	51,5	77,40	>
3.3.	Fokus Iklim Investasi											
3.3.1.	Jumlah Tindak Pidana (Kasus)	300	280	1,5	2		149	149	2,52	2,96		>
3.4.	Fokus Sumberdaya Manusia											
3.4.1.	Rasio Ketergantungan (%)	43	40	47,52	47,12	46,72	47,92	47,92	47,95	44,1	44,1	<

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Telaahan hasil evaluasi mencakup (i) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. (ii) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. (iii) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. (iv) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan. (v) implimentasi yang timbul terhadap target capaian RPJMD dan kinerja pembangunan daerah dan (vi) kebijakan atau tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

RKPD tahun 2023 merupakan RKPD tahun terakhir RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2019 – 2023. Total nilai APBD tahun 2021 sebesar Rp 1.8 triliyun. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV 2021 adalah (1) Adanya Kegiatan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi COVID-19 termasuk Rasionalisasi Anggaran (2) Kesalahan dalam penentuan target kinerja (3) Tunda bayar kegiatan (4) Gagal Tender Pengadaan Barang dan Jasa (5) Khusus untuk kecamatan penyebab tidak tercapainya target adalah masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaanya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola). Kinerja program dan kegiatan yang terpenuhi atau melebihi target kinerja pada umumnya program-program seperti program pelayanan administrasi perkantoran dan

program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas adalah (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui (2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi sehingga akan mudah untuk mengukur dan menargetkan kinerja selanjutnya. Secara ringkas, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2021 dan realisasi RPJMD ditunjukkan pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60
EVALUASI TERHADAP HASIL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (PERUBAHAN RKPD)
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 x 14		16 (15/77*100%		17
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							-																DINAS PENDIDIKAN
		1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							607.730,55			80.346,98		152.788,00											DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen					100	472.477,37	21	56.373,09	17	138.976,39	17	103.448,08	48	137.503,94	102,02	436.301,50					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen					80,00	276,62	32	54,72	-	56,66	-	53,70	48	105,16	80	270,23					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Program Kerja yang disusun	Dokumen					5	276,62	2	54,72	0	56,66	0	53,70	3	105,16	5	270,23					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan					5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kali					64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Organisasi Pendidikan	Organisasi					3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Peserta Pelatihan	Orang					52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang					36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Sekolah yang dibina	Sekolah					341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen					100,00	469.817,50	25	55.938,12	25	138.390,85	25	102.916,37	25	136.658,03	100	433.903,36					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	469.817,50	1	55.938,12	1	138.390,85	1	102.916,37	1	136.658,03	1	433.903,36					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Penelola yang terpelihara	Persen					100,00	24,00	25	6,00	25	6,00	25	6,00	25	6,00	100	24,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.03.02	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Tahun					1	24,00	1	6,00	1	6,00	1	6,00	1	6,00	1	24,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen					100,00	113,87	-	17,69	-	41,78	-	11,29	100	41,20	100	111,96					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Kali					134											0,00					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan	Kali					79	-										0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Tim Penilai Angka Kredit Guru (DUPAK), Panitia Penghargaan (Setya Lencana Karya Setya), dan Tim Penilai Karya Inovatif Publikasi Ilmiah Angka Kredit	Orang					37	113,87	-	17,69	-	41,78	-	11,29	37	41,20	37	111,96					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tahun					1	-										0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen					100,00	1.418,99	26	182,06	31	303,70	29	272,99	48	421,02	134	1.179,78					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					14	20,88	4	5,10	9	2,17	5	8,97	7	4,63	25	20,88					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					51	246,81	35	11,31	23	10,71	30	102,78	25	50,36	113	175,16					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set					27	-									0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Loistik Kantor	Jumlah loistik yang disediakan	Liter					5782	85.98	1.800	19,62	2.300	21.83	1.000	19,66	2.500	22.19	7.600	83.30					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	orang					87		20		20		20		27		87	0.00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Jenis					17	36,50	-	0	-	7,13	-	10,43	17	18,95	17	36,50					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					24	80,00	-	0	-	0	-	0	8	80,00	8	80,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					73	245,56	60	69,73	50	28,10	65	10,81	45	53,27	220	161,91					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sekolah yang akan dilakukan inventarisasi	Sekolah					11	207,72	-	22,27	5	55,71	5	48,80	1	24,06	11	150,83					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Biaya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tahun					1	495,53	1	54,03	1	178,06	1	71,54	1	167,56	1	471,19					DINAS PENDIDIKAN
																				0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Onerasional kantor	Persen					100,00	721,58	25	170,91	25	169,56	25	172,45	25	194,43	100	707,36					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					1300										0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					4	161,18	4	30,81	3	29,46	3	32,35	4	54,33	4	146,96					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					2	560.40	2	140.10	2	140.10	2	140.10	2	140.10	2	560.40					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					10	-	10		10		10		10		10	0,00					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					30	-	29		29		29		29		29	0,00					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan	Orang					17	-	17		17		17		17		17	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen					100,00	104,82	13	3,60	13	7,83	13	15,30	63	78,10	100	104,82					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					3	70,57	3	3,60	3	7,83	3	10,06	3	49,08	3	70,57					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang dirselihara/Service	Unit					6	34.25	-	0	-	0	-	5.24	6	29.02	6	34.25					DINAS PENDIDIKAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :										96,54	95,65					
										Predikat kinerja :										57	57					
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen					100,00	135.017,66		23.964,31		13.781,83		33.367,16	91,61	61.842,73	91,61	132.956,03					DINAS PENDIDIKAN
				APK SD	Persen					106.01								108.87		108,87						DINAS PENDIDIKAN
				APK SMP	Persen					102,56								96,31		96,31						DINAS PENDIDIKAN
				APM SD	Persen					95.88								95.29		95.29						DINAS PENDIDIKAN
				APM SMP	Persen					83.30								66.26		66.26						DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 12 tahun yang bersartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen					83,05	80.489,62		17.896,72		3.660,40		25.821,34		35.940,92	95,29	83.319,38					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas SD/MI yang dibangun	Ruang					6	1.710,87	0	0	0	108,01	0	35,65	6	1.158,71	6	1.302,37					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya Dana Alokasi Khusus yang dibangun	Ruang					3	4.196,26	0	0	0	66,46	0	62,84	3	3.824,04	3	3.953,34					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya Dana Alokasi Khusus yang dibangun	Ruang					2	-	0	0	0		0		2		2	-					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD/MI yang dibangun (Belanja Hibah)	Paket					2	-	0	0	0		0		2		2	-					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD/MI yang dibangun (Belanja Modal)	Paket					12	-	0	0	0		0		12		12	-					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya Dana Alokasi Khusus yang dibangun	Ruang					3	-	0	0	0		0		3		3	-					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Pembangunna Ruang Perpustakaan Berserta Perabotnya Dana Alokasi Khusus yang dibangun	Ruang					3	-	0	0	0		0		3		3	-					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya Dana Alokasi Khusus yang direhab	Ruang					1	-	0	0	0		0		1		1	-					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya Dana Alokasi Khusus yang direhab	Ruang					6	-	0	0	0		0		6		6	-					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya Dana Alokasi Khusus yang direhab	Sekolah					22	7.518,02	0	0	0	63,28	0	96,97	22	6.905,22	22	7.065,48					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Sekolah SD/MI yang di rehab	Sekolah					6	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.01.010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah SD/MI yang direhab	Sekolah					10										0	-					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.01.014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah pengadaan Bangku Sekolah Yang Tersedia	Unit					1540	2.500,00	0	0	0	0	0	0	1.540	2.308,16	1540	2.308,16					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah pengadaan Meja Sekolah Yang Tersedia	Unit					1540	-									0	-					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.01.016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya Perlengkapan Sekolah	Tahun					1	-									0	-					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.01.021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Personil Peserta Didik Sekolah Dasar yang dibiayai	Tahun					1	400,00	0	0	0	0	0	0	1	400,00	1	400,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.01.023	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat SD/MI	Siswai					15000	113,66	11.429	42,77	0	3,86	0	58,12	3.571	3,15	15000	107,90					DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 ÷ 14		16 (15/7)*100%		17
		1.01.02.02.01.024	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Sarana SD Keluar Daerah	Kali					7	164,33	2	0	3	22,60	2	27,13	2	71,58	9	121,30					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Monitoring pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sekolah SD Dana Alokasi Khusus	Kali					171	-					30		90		120	-					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.01.025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa, Pembina dan Pelatih Seleksi dan Pembinaan Peserta Lomba Bidang Sains, Olahraga dan Seni Siswa SD	Orang					123	12,28	0	7,79	0	0	123	3,82	0	0	123	11,61					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.01.026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru Bantu Provinsi Penerima	Orang					290	9.612,00	-	0	549	3.363,40	264	1.638,60	264	3.831,00		8.833,00					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Guru Non PNS Penerima Insentif Penerima Honor	Orang					2668	-	-						1.827		1827	-					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Jasa Tenaga Pendidik SD di Daerah Terpencil	Orang					15	-	-								14	-					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.01.027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru PNS dan Non PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG)	Orang					90	50,00	-	0	-	2,46	20	33,90	-	10,92	20	47,28					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Monitoring pelaksanaan tunjangan profesi dan aneka tunjangan Guru PNS dan Non PNS	Kali					34	-	-		-		-		-		0	-					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Peserta Pelatihan	Orang					31	-	-		-		-		-		0	-					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Peserta Pelatihan	Orang					33	-	-		-		-		-		0	-					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik PAUD di Kab. Inhil	Orang					45	-	-		-		-		-		0	-					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.01.028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta Bimtek Kegiatan Mutu Satuan Pendidikan Dasar	Orang					38	15,18	0	0	0	0	0	0	38	15,18	38	15,18					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Peserta Sosialisasi Program Indonesia Pintar	Orang					410	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.01.029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah penerima BOS SD Negeri	Sekolah					520	54.106,25	-	17.846,16	0	0	-	23.847,80	520	17.389,53	520	59.083,49					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Sekolah penerima BOS SMP Negeri	Sekolah					108	-									0						DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.01.030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Dana Bos Jenjang SD	porsen					100	90,78	0	0	38,00	30,33	20,00	16,52	29,00	23,43	87,00	70,28					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah Pertama**	**Persen**					**75,2**	**42.808,72**		**5.870,32**		**9.615,10**		**3.673,89**	**66,25**	**19.746,05**	**66,25**	**38.905,36**					**DINAS PENDIDIKAN**
		1.01.02.02.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs yang dibangun	Ruang					9	1.124,05	0	0	0	87,41	0	143,62	4	565,76	4	796,79					DINAS PENDIDIKAN
											-									0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jamban Sekolah SMP yang dibangun	Unit					6	650,12	0	0	0	36,75	0	0,68	1	445,18	1	482,61					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Paket Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP/MTs	Paket					5	-	0		0		0		5		5	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.013	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Sekolah SMP/MTs yang direhab	Sekolah					7	206,90	0	0	0	8,10	0	0,68	1	100,33	1	109,11					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs yang direhab	Ruang					45	10.849,26	0	0	0	0	0	200,94	45	6.535,41	45	6.736,35					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.015	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru SMP/MTs yang direhab	Ruang					4	1.308,23	0	0	0	0	0	19,45	4	1.107,84	4	1.127,29					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan SMP/MTs yang direhab	Ruang					4	1.315,66	0	0	0	0	0	21,80	4	1.215,99	4	1.237,79					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium SMP/MTs yang direhab	Ruang					2	739,16	0	0	0	0	0	15,84	2	663,86	2	679,70					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Prasarana dan Utilitas SMP/MTs yang direhab	Ruang					6	638,83	0	0	0	0	0	9,74	6	563,86	6	573,60					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah paket pengadaan Mebeleur Sekolah SMP/MTs	Paket					11	985,54	0	0	0	0	0	0	8	882,08	8	882,08					DINAS PENDIDIKAN
											-									0	0					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Tahun					1	400,00	0	0	0	8,78	0	48,98	1	295,72	1	353,48					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.033	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Tersedianya Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Tahun					1	-									0	0					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.036	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa/i Peserta Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP/MTs	Orang					11845	99,50	29	39,51	0	9,18	0	6,12	0	27,74	29	82,55					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.037	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Monitoring pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sekolah SMP/MTs	Kali					71	-									0	0					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta lomba mewakili Kabupaten Inhil Ke Tingkat Propinsi	Orang					26	50,30	0	0	0	3,88	0	6,12	0	7,66	0	17,66					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru Bantu Provinsi Penerima	Orang					118	4.696,76	0	5,90	218	1.658,53	105	816,04	104	1.599,13	427	4.079,60					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Guru Non PNS Penerima Insentif Penerima Honor	Orang					974	-	0		0		0		659		659	-					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Jasa Tenaga Pendidik SMP di Daerah Terpencil	Orang					12	-	0		11		9		9		29	0,00					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Jasa Guru Huni	orang					39	-	0		39		39		39		117	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tahun					1	50,00	1	32,91	0	0	0	0	0	10,61	1	43,52					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terbinanya Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tahun					1	33,10	0	9,87	0	6,59	0	0	1	9,05	1	25,51					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tahun					1	19.467,78	0	5.782,13	0	7.760,86	0	2.360,00	1	5.600,71	1	21.503,70					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Monitoring Kurikulum 2013 Tingkat SMP	Sekolah					28	98,42	0	0	10	35,01	8	20,95	10	23,62	28	79,58					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Sekolah yang dibina	Sekolah					157	-									0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.02.045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kenala Sekolah	Jumlah Sekolah Yang di Bangun	Sekolah					2	95,13	0	0	0	0	0	2,94	2	91,48	2	94,42					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD**	**Persen**					**92,02**	**10.206,02**		**169,87**		**460,51**		**3.111,67**	**23,52**	**5.510,13**	**23,52**	**9.252,18**					**DINAS PENDIDIKAN**
		1.01.02.02.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah PAUD yang dibangun	Lembaga PAUD					1	665,45	-	24,13	-	12,68	-	233,89	-	373,88	0	644,57					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Ruang Guru TK Neeeri vang dibangun	Ruang					6	-	0	0	0	0	3		3	0	6	0,00					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun	Ruang					1								1		1	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK Neeeri vang dibangun	Ruang					5	862,78	0	0	0	0	2	235,44	3	624,81	5	860,25					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinva TK Neeeri vang dibangun	Unit					1	-	0		0		0		2		2	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang di rehab	Sekolah					1	1.103,45	-	22,47	-	17,30	-	29,30	-	992,94	0	1.062,00					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah TK Neeeri vang di Rehab	Sekolah					4								4		4	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah paket pengadaan Mebeleur Sekolah PAUD	Paket					3	30,00	-	2,00	-	0	-	0	1	27,94	1	29,94					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah TK Negeri Penerima Operasional Perlengkapan Sekolah	Sekolah					18	150,00	-	57,09	-	49,06	-	43,85	-	0	0	150,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.03.011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Tahun					1	-									0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.03.012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Paket Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD	Paket					1	41,00	-	1,00	-	0	-	39,01	-	0	0	40,01					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Paket Pengadaan Alat Praktek dan Praga Siswa TK Negeri						2	-	-		-		2		-		2	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.03.013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Hari Anak Nasional	Orang					160										0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.03.014	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Visitasi dan Monitoring Lembaga PAUD	Kali					74	158,05	13	12,00	17	19,16	26	18,71	81	45,86	137	95,73					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.03.015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Guru Bantu Provinsi Penerima	Orang					35	1.660,80	-	0	24	307,60	24	152,40	24	872,40	24	1.332,40					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Guru Non PNS Penerima Insentif Penerima Honor	Orang					650	-	-		-		-		600		600	0,00					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Jasa Tenaga Pendidik PAUD di Daerah Terpencil	Orang					6	-	-		3		2		2		7	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.03.016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Peserta Gebyar PAUD dan Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas	Orang					108	142,26	-	0	-	12,42	-	0	40	126,29	40	138,72					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.03.017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peserta Apresiasi Bunda PAUD dan Forum PAUDI	Orang					207	378,03	-	51,18	-	42,29	80	175,69	-	63,11	80	332,27					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Akreditasi Lembaga PAUD	Orang					41	-	-		-			0	-		0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Peserta Sosialisasi Bintek Manajemen Pengelola Paud	Orang					82	-	-		-		40	0			40	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.03.018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga penerima Bantuan Operasional PAUD	Lembaga PAUD					268	5.014,20	-	0	-	0	239	2.183,40	261	2.382,90	250,00	4.566,30					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan**	**Persen**					**18,85**	**1.513,29**		**27,40**		**45,81**		**760,26**	**1,83**	**645,63**	**39,00**	**1.479,10**					**DINAS PENDIDIKAN**
		1.01.02.02.04.012	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksanaannya Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Tahun					1	-									0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.04.015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penerima Beasiswa	Orang					1145	86,07	9	16,69	8	23,79	27	22,45	-	0,92	44	63,85					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Peserta Sosialisasi	Peserta					33	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0,00					DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		1.01.02.02.04.016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Pelatihan	Peserta					43	151,92	-	10,71	-	22,02		100,61	-	7,07	0	140,40					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Peserta Sosialisasi	Peserta					50	-	-	0	-	0	50	0		0	50	0,00					DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Peserta yang mengikuti Kursus dan kelembaaan	Orang					43	-	-	0	-	0		0		0	0	0,00					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.02.04.017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga penerima Bantuan Operasional pada Pendidikan Nonformal	lembaga					23	1.275,30	-	0	-	0	23	637,20	-	637,65	23	1.274,85					DINAS PENDIDIKAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*60,83*	*46,99*					
											Predikat kinerja :									*R*	*SR*					
		1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum sesuai Standar**	**Persen**					**97,00**	**235,52**	-	**9,58**	-	**29,79**		**61,86**	**100**	**92,97**	**100,00**	**194,20**					**DINAS PENDIDIKAN**
				Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	**Persen**					**55,00**																**DINAS PENDIDIKAN**
		1.01.03.02.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Jumlah SD dan SMP yang Menerapkan Pendidikan Muatan Lokal**	**Persen**					**100,00**	**99,01**	-	**0**	-	**12,16**	-	**0**	**100**	**59,66**	**100**	**71,82**					**DINAS PENDIDIKAN**
		1.01.03.02.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Bimtek Penilaian Pembelajaran Bagi Guru SD	Orang					71	99,01		0		12,16		0	47	59,66	47	71,82					DINAS PENDIDIKAN
		1.01.03.02.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Menerapkan Pendidikan Muatan Lokal**	**Persen**					**50,00**	**136,51**	-	**9,58**	-	**17,63**		**61,86**		**33,32**	**64**	**122,38**					**DINAS PENDIDIKAN**
		1.01.03.02.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum Paud	Orang					82	136,51	-	9,58	-	17,63	40	61,86	-	33,32	40	122,38					DINAS PENDIDIKAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*82,00*	*81,09*					
											Predikat kinerja :									*T*	*T*					
		1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN**																							**DINAS KESEHATAN**
		1.02.0.0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								236.817,47															**DINAS KESEHATAN**
		NON URUSAN																								**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.0	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERCAPAINYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persen**					**100**	**86.137,48**	-	**11.550,7**	**3,13**	**29.706,83**	**17,50**	**28.664,85**	**8,75**	**64.331,8**	**29,38**	**76.924**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**					**100**	**273,19**	**0**	**12,00**	-	**89,15**	-	**8,64**	-	**145,50**	-	**255**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Program Kinerja yang disusun	Dokumen					9	161,96	0	8,00	2	54,43	1	33,31	5	62,72	8	158					DINAS KESEHATAN
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan					3	111,23	0	4,00	1	34,72	1	-24,67	1	82,78	3	97					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Dibayarkan**	**persen**					**100**	**73.997,10**	**0,00**	**11.354,5**	**0,00**	**24.970,77**	**0,0**	**(31.171,98)**	**0**	**60.334,03**	-	**65.487**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	73.958,52	1	11.340,5	1	24.958,77	1	(31.181)	1	60.322,45	1	65.449					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan					1	38,58	0	6,00	0	12,00	0	9	1	11,58	1	39					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Aset Milik Daaerah yang ditata**	**persen**					**100**	**110,69**	**0**	**11,04**	**25**	**30,45**	**25**	**23,96**	**25**	**15,81**	**75**	**81,26**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset Milik Daaerah yang ditata	Unit					4	110,69	0	11,04	1	30,45	1	23,96	1	15,81	3	81					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN Yang Mendapatakan Pendidikan dan Pelatihan**	**persen**					**90**	**712,30**	**0**	-	**0,00**	**35,80**	**15,00**	**137,15**	**45,00**	**267,07**	**60**	**440**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang					6	712,30	0	-	0	35,80	1	137,15	3	267,07	4	440					DINAS KESEHATAN
				Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	Kali					2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Yang Terlaksana**	**persen**					**100**	**695,56**	**0**	**11,42**	-	**80,35**	-	**547,28**	-	**60,02**	-	**699**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Furniture dan Interior Gedung Kantor yang disediakan	Set					2	369,68	0	-	0	-	2	299,81	0	-	2	300					DINAS KESEHATAN
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set					15	-	0		0	-	0	-	0	-	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					18032	125,00	316	1,66	1567,00	22,36	2502,0	23,92	5857,00	33,26	10.242	81					DINAS KESEHATAN
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					10	-	0		0	-	0	-	0	-	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					45187	9,00	0	-	0	-	21445	7,00	6127	2,00	27.572	9					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					12	12,00	0	-	3	5,05	4	3,86	5	1,85	12	11					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					40	179,88	2	9,76	12	52,95	6	25,12	5	22,92	25	111					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.07.0	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persen**					**100**	**122,25**	**0**	-	-	-	**100**	**93,79**	-	-	**100**	**94**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	Unit					1	122,25	0	-	0	-	1,00	93,79	0	-	1	94					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Ruang					117	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-					DINAS KESEHATAN
				Jumlah gedung yang dibangun	Unit					3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-					DINAS KESEHATAN
				Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi	Ruang					40		0		0	-	0		0		-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Ketersiadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**					**100**	**9.998,20**	**0,00**	**158,94**	-	**4.492,6**	-	**1.651,58**	-	**3.463,7**	-	**9.767**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					1500	7,50	0	-	0	-	0	-	1500	7,50	1.500	8					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					3	525,60	1	158,94	-	83,08	1,00	90,28	1,0	85,28	3	418					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	kenis					37	50,50	0	-	36	48,68	0	-	0	-	36	49					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					30	9.414,60	0	-	30	4.360,85	30	1.561,30	30	3.370,90	30						DINAS KESEHATAN
				Tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					405	-	0		0	-	0	-	0	-	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang terpilihara**	**persen**					**100**	**228,20**	**0**	**2,80**	-	**7,70**	-	**44,73**	-	**45,69**	-	**101**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipergunakan Perizinannya	Unit					15	138,20	0	0,85	1	7,70	4	29,73	3	22,69	8	61					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara/Service	Unit					223	90,00	5	1,95	0	-	42	15,00	64	23,00	111	40					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Ruang					9	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-					DINAS KESEHATAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*73,95*	*70,06*					
											Predikat kinerja :									*S*	*S*					
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	-	-					
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**TERWUJUDNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**persen**					**95**	**145.651,00**	0	**116,91**	-	**12.669,72**	-	**37.359,20**	-	**51.239,59**	-	**101.385**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.02.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**					**95**	**38.521,26**	**0**	-	-	**242,75**	-	**4.202,85**	-	**16.295,05**	-	**20.741**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.02.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun	Unit					3	9.795,65	0	-	0,00	35,60	0	2.531,37	3	81,02	3	2.648					DINAS KESEHATAN
											-									-	-					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		1.02.02.02.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pustu yang dibangun dan direlokasi	Unit					2	234,65	0	-	0	-	-	7,65	2,0	5,10	2	13					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas	Unit					3	900,00	0	-	0	-	0	86,83	3	274,82	3	362					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang pembangunan dan peningkatan sarkes	Kegiatan					2	2.801,60	0	-	0,00	87,00	0,00	999,00	1,00	685,00	1	1.771					DINAS KESEHATAN
				Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Puskesmas	Unit					1	-	0		0	-	0	-	0	-	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas BLUD dan Pemantapannya	Puskesmas					27	236,48	0	-	0	21	0	14	10	42,96	10	78					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi	Unit					10	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.01.010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi	Unit					10	182,35	0	-	0,0	14,45	0	110,40	8	29,77	8	155					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.01.012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarpras Puskesmas Pembantu yang disediakan	Unit					14	2.300,00	0	-	0	-	0	-	14	2.282,50	14	2.283					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.01.013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)	Kegiatan					1	5.019,34	0	-	0	-	0	159,65	1	346,12	1	506					DINAS KESEHATAN
				Terlaksananya Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) Puskesmas	Paket					8	-	0	-	0	-	0	0	0	-	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.01.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	Persen					70	10.933,08	0	-	0	-	0	-	66,00	10.283,02	66	10.283					DINAS KESEHATAN
											-									-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.01.015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas yang dilakukan Pemeliharaan	Puskesmas					30	99,10	0	-	0	-	25	81,85	0	-	25	82					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.01.016	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	persen					90	3.107,59	0	-	0	-	0	0	60,00	2.077,35	60	2.077					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.01.017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di puskesmas dan jaringannya	persen					90	2.440,32	0	-	1,0	33,39	3,00	70,06	72,00	43,92	76	147					DINAS KESEHATAN
											-									-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.01.018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan	Puskesmas					1	172,05	0	-	0,0	31,67	0	13,50	1	23,64	1	69					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.01.019	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu yang dilakukan pemeliharaan	Puskesmas Pembantu					5	74,67	0	-	1	19,40	2,0	31,51	1	-	4	51					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.01.021	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Obat, BMHP dan Vaksin ke Puskesmas se Kabupaten Indragiri Hilir dan Pemanfaatan sistem Elektronik logistik obat dan BMHP di UPTD IFK Kab. Inhil	Puskesmas					30	224,38	0	-	0	-	13	96,93	16	119,85	29	217					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**					**95**	**103.882,54**	**0,00**	**45,58**	**-**	**11.920,41**	**-**	**32.863,07**	**-**	**33.515,99**	**-**	**78.345**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.02.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Puskesmas					30	1.119,74	0	-	3	107,92	0	- 2,38	23	840,66	26	946					DINAS KESEHATAN
				Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir	Puskesmas					30	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
				Persentase Pelayanan Kesehatan Program KIA	Persen					75	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
				Terlaksananya Audit Maternal Perinaltal (AMP)	RSUD					3	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
				Terlaksananya Audit Maternal Perinaltal (AMP)	Puskesmas					30	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
				terlaksananya monitoring dan surveilans kesehatan ibu dan anak	Puskesmas					30	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
				Terlaksananya pembinaan AKI dan AKB ke Fasyankes Tingkat Pertama	Puskesmas					23	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	meningkatnya Kesehatan dan keselamatan ibu bersalin	Persen					90	5.391,28	0	-	0	-	33,00	1.957,95	55,00	3.274,10	88	5.232					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah pelaksanaan penunjang program imunisasi	Kegiatan					2	518,25	0	-	0,0	20,26	0	177,02	2	208,38	2	406					DINAS KESEHATAN
											-									-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Monitoring, evaluasi dan pembinaan kegiatan bayi baru lahir dan balita	Puskesmas					30	871,51	0	-	0	9,39	0	33,91	25	690,45	25	734					DINAS KESEHATAN
				Persentase Peningkatan Cakupan BBL yang mendapat IMD	Persen					80	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
				Persentase peningkatan cakupan pelayanan bayi baru lahir dan persentase peningkatan cakupan pelayanan balita	Puskesmas					30	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase pelaksanaan BIAS di kabupaten indragiri hilir	Persen					90	217,04	0	-	6,00	14,60	11,00	26,27	55,00	133,78	72	175					DINAS KESEHATAN
											-									-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase dari evaluasi program lansia	Persen					60	611,83	0	-	0,00	2,42	6,00	57,86	53,00	536,32	59	597					DINAS KESEHATAN
											-									-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	persentase pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang					130	265,47	0	-	42	86,28	39	79,78	27	56,08	108	222					DINAS KESEHATAN
											-									-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang					13916	678,57	0	-	907	44,22	1522	74,24	9044	441,01	11.473	559					DINAS KESEHATAN
											-									-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk terpapar Covid-19 yang di tanggulangi	orang					645686	44.274,82	0	-	0	-	232538	15.942,81	147722	10.129,35	380.252	26.072					DINAS KESEHATAN
											-									-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan dalam upya pencapaian keluarga sadar gizi	Persen					70	2.765,48	0	-	1,0	39,03	5,00	213,94	58,00	2.288,21	64	2.541					DINAS KESEHATAN
				Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	kegiatan					1	-		-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
				Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	Puskesmas					30	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
				Persentase balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan makanan dan vitamin	Persen					70	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan	Puskesmas					30	-		-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
				Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting	Desa					15	-		-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani dan Olahraga di 35 OPD kabupaten Indragiri Hilir	Orang					60	334,81	0	-	0	-	19	107,29	31	172,81	50	280					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase pelaksanaan pengawasan limbah dan sampah fasyankes	Persen					60	958,89	0	-	5,00	80,14	29,00	459,84	18,00	291,72	52	832					DINAS KESEHATAN
				Persentase pelaksanaan pengawasan sanitasi dasar dan air minum	Persen					70	-		-	0	-	0	0	0		-	-					DINAS KESEHATAN
				Terlaksananya Pengawasan dan pemeriksaan kualitas air minum	Sampel					39	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye Penanerakan dan Pembudayaan Germas	Kegiatan					14	1.322,28	0	-	0	-	0	0	13,00	1213,00	13	1.213					DINAS KESEHATAN
				Jumlah Puskesmas yang mendapatkan penyebarluasan informasi kesehatan	Puskesmas					30	-		-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional	Puskesmas					27	103,48	0	-	22	83,57	0	-	3	11,74	25	95					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Menular Yang Berpotensi KLB/Wabah yang ditaksankan	Kali					47	90,33	0	-	9	17,57	14	27,74	11	21,40	34	67					DINAS KESEHATAN
											-									-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas	Puskesmas					28	76,67	0	-	9	24,24	6	15,30	2	5,63	17	45					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Penggunaan NAPZA	Puskesmas					27	619,36	0	-	2	38,83	10	239,77	12	285,94	24	565					DINAS KESEHATAN
											-									-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang					2333	103,17	0	-	700	30,93	538	23,81	617	27,29	1.855	82					DINAS KESEHATAN
				Jumlah Puskesmas yang dibentuk tim pembina UKS Kabupaten	Puskesmas					27	-		-		-		-		-	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.024	Pengelolaan Upaya Penguranagan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah prevalensi dan distribusi kejadian kematian yang disebabkan penyakit dan kecelakaan	Kali					10	196,31	0	-	0	5,00	1,00	3,86	0,00	-	1	9					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		1.02.02.02.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah lokasi yang ditangani	Puskesmas					6	3.537,60	0	-	0	141,55	0,00	269,14	5	2.518,84	5	2.930					DINAS KESEHATAN
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya Penanggulangan Terhadap Penularan Penyakit Menular Langsung dan Tidak Langsung	Puskesmas					28	-	0	-	0	-	0	0	0		-	-					DINAS KESEHATAN
				Persentase pelaksanaan kegiatan Transmission Accessment Survey /TAS	Persen					90	-	0	-	0	-	0	0	0		-	-					DINAS KESEHATAN
				Persentase Penderita Malaria diobati sesuai standar 100% dan mampu mempertahankan status eliminasi malaria	Persen					90	-	0	-	0	-	0	0	0		-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jamkesmas dan jampersal yang mendapatkan Pelayanan	Persen					90	29.383,59	-	45,58	34	10.952,73	34,00	10.936,84	21	7.003,05	89	28.938					DINAS KESEHATAN
				Persentase Tertanggulangnya Biaya Pelayanan Kesehatan dan Rujukan	Persen					90	-		-		-	0	0	0		-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Ruiukan/Nasional							-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah peserta yang mengikuti pemberdayaan untuk Peningkatan peran serta masyarakat demi terwujudnya kesehatan	Orang					20	184,59	0	-	3	26,45	0	-	12	112,13	15	139					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.031	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Terjaminya kualitas Mutu Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Persen					100	767,42	0	-	7,00	51,57	6,00	49,57	0		13	101					DINAS KESEHATAN
										-	-		-		-		-			-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah pusling yang disediakan	Unit					5	3.775,85	0	-	0	-	0	0	3	2.572,59	3	2.573					DINAS KESEHATAN
										-	-		-		-	0	-			-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Gudang Farmasi yangdikelola dan dipelihara	Gudang Farmasi					28	314,32	0	-	6	62,25	4	47,95	16	183,57	26	294					DINAS KESEHATAN
				Jumlah Kegiatan Pembinaan Sarana Produksi Distribusi Kefarmasian	Sarana					30	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang dibidai berprestasi	Puskesmas					31	2.590,81	0	-	0	19,55	-	9,64	2	191,02	2	220					DINAS KESEHATAN
				Persentase Pemutakhiran Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Kesehatan	Persen					90	-		-		-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
				Terlaksananya survei akreditasi Puskesmas	Puskesmas					15	-		-		-	0	0	0		-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							-	-	0	-		-	0	-	0	-	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.02.037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Fogging Fokus DBD - Workshop Fogging - Bimbingan Teknis Fogging - Konsultasi Fogging yang dilaksanakan	Kali					11	2.809,09	0	-	0	61,91	8	2.110,92	1	306,93	9	2.480					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Jumlah Data Yang Tersedia**	**persen**					**95**	**2.455,25**	**0,00**	**71,34**	**-**	**482,19**	**-**	**293,29**	**-**	**844,74**	**-**	**1.692**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.02.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen profil kesehatan yang dirangkum dari data-data dinkes & Pkm	Dokumen					1	148,12	0	-	0	31,72	0	42,12	1	64,84	1	139					DINAS KESEHATAN
				Jumlah Sosialisasi/pelatihan data informasi peritinan dibidang kesehatan bagi tenaga puskesmas yang dilaksanakan	Puskesmas					29	-	0	-	0	-	0	0	0		-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase terbentuknya sistem pengelolaan dan penyimpanan data terpadu	Persen					90	908,68	3,0	26,50	21,00	210,62	11,00	110,53	29	291,62	64	639					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Akses Jaringan di wilayah kerja puskesmas yang ditingkatkan	Puskesmas					28	1.398,44	1	44,84	5	239,85	3	140,63	10	488,29	19	914					DINAS KESEHATAN
										-	-		-		-		-			-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Yang Mendapatkan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah**	**persen**					**95**	**791,95**	**0,00**	**-**	**-**	**24,37**	**-**	**-**	**-**	**583,81**	**-**	**608**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.02.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabunaten/Kota	Jumlah Kunjungan Sakit	Kunjungan					263565	506,84	0,00	-	-	-	-	-	213,00	410,45	213	410					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian	Sarana					83	100,42	0	-	20	24	0	-	48,00	58	68	82					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Perencanaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi (BANKEU) dan APBN (DAK)	Dokumen					3	184,70	0	-	0	-	0	-	2,00	115,80	2	116					DINAS KESEHATAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***68,67***	***70,72***					
											Predikat kinerja :									***S***	***S***					
		1.02.03.0	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**TERCIPTANYA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**persen**					**60**	**3.248,34**	**0,00**	**-**	**0,33**	**26,74**	**20**	**1.498,41**	**7,67**	**1.464,63**	**28**	**2.990**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.03.02.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabunaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan**	**persen**					**60**	**3.006,33**	**0,00**	**-**	**-**	**24,81**	**-**	**1.336,51**	**-**	**1.401,69**	**-**	**2.763**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.03.02.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						-	-									-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.03.02.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase rasio ketersediaan tenaga kesehatan	Persen					90	2.624,71	0,00	-	0,00	2,55	43,00	1.263,68	44,00	1.273,85	87	2.540					DINAS KESEHATAN
										-	-	0,00								-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.03.02.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Organisasi Profesi kesehatan yang bermitra dan dibina	Organisasi					5	381,62	0,00	-	0,00	22,26	0	72,83	5	127,85	5	223					DINAS KESEHATAN
				Jumlah Pembinaan Puskesmas Mamnu PONED	Kegiatan					6	-	0,00	-	0	-	0	0	0		-	-					DINAS KESEHATAN
				Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan	Kali					1	-	0,00	-	0	-	0	0	0		-	-					DINAS KESEHATAN
				Persentase pemenuhan dokter kesehatan untuk Layanan Paripurna	Persen					90	-	0,00	-	0	-	0	0	0		-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.03.02.03.0	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kopetensi**	**persen**					**60**	**242,00**	**0,00**	**-**	**0,67**	**1,93**	**40**	**161,90**	**15,33**	**62,94**	**56**	**227**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.03.02.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kesehatan di setiap Fasyankes (sesuai standar)	Persen					90	242,00	0,00	-	1,00	1,93	60,00	161,90	23,00	62,94	84	227					DINAS KESEHATAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***95,83***	***85,65***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***T***					
		1.02.04.0	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**TERSEDIANYA FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**persen**					100	516,10	0,00	-	0,78	71,21	13	35,86	52,30	227,91	66	335					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.04.02.01.0	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) vang memiliki izin**	**persen**					**100**	**20,05**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**44,09**	**8,84**	**44**	**9**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.04.02.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana					55	20,05	0	-	0	-	0	0	24	8,84	24	9					DINAS KESEHATAN
		1.02.04.02.03.0	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Jumlah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat**	**persen**					**100**	**85,12**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**69,31**	**59,00**	**69**	**59**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.04.02.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	sarana					80	85,12	0	-	0	-	0	0	55	59,00	55	59					DINAS KESEHATAN
		1.02.04.02.04.0	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi**	**persen**					**100**	**221,16**	**0,00**	**-**	**3,88**	**8,59**	**14**	**31,61**	**54,36**	**120,22**	**73**	**160**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.04.02.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase pengawasan terhadap sarana TTU/TPM dan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persen					70	221,16	0	-	2,72	8,59	10	31,61	38,05	120,22	51	160					DINAS KESEHATAN
										-	-		-		-		-			-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.04.02.05.0	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Iaianan**	**Jumlah Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Iaianan vang memiliki stiker**	**persen**					**100**	**110,21**	**0,00**	**-**	**-**	**62,63**	**50**	**4,25**	**50,00**	**5,85**	**100**	**73**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.04.02.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya	kegiatan					2	110,21	0	-	-	62,63	1	4,25	1	5,85	2	73					DINAS KESEHATAN
		1.02.04.02.06.0	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**persen**					**100**	**79,56**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**43,75**	**34,00**	**44**	**34**					**DINAS KESEHATAN**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		1.02.04.02.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan post market pada produk makanan/minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	sarana					80	79,56	0,00	-	0	-	0	0	35,00	34,00	35	34					DINAS KESEHATAN
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															**65,94**	***58,93***					
					Predikat kinerja :															***R***	***R***					
		1.02.05.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**TERWUJUDNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**persen**					**85**	**1.264,56**	**0**	-	**4,88**	**84,84**	**29**	**452,06**	**40,10**	**434,43**	**74**	**971**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.05.02.01.0	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas**	**persen**					**85**	**336,18**	**0**		**6,91**	**27,66**	**20**	**80,87**	**40,73**	-	**68**	**109**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.05.02.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah KIE Keamanan Pangan	orang					455	336,18			37	27,66	109	80,87	218	161,15	364	270					DINAS KESEHATAN
				Jumlah Terlaksananya kegiatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	kegiatan					24	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.05.02.02.0	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabunaten/Kota**	**Jumlah Terlaksananya Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabunaten/Kota**	**persen**					**85**	**74,23**	**0**	-	**7,73**	**6,00**	**31**	**24,87**	**38,64**	**32,11**	**77**	**63**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.05.02.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidun Bersih dan Sehat	Puskesmas					11	74,23	0	-	1	6,00	4	24,87	5	32,11	10	63					DINAS KESEHATAN
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi KIE Hidun Bersih dan Sehat di Puskesmas	Kecamatan					10	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
				Terlaksanannya Strategi KIE Hidun Bersih dan Sehat	Tema KIE					5	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-					DINAS KESEHATAN
		1.02.05.02.03.0	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Dava Masvarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabunaten /Kota**	**Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Dava Masvarakat (UKBM)**	**persen**					**85**	**854,14**	**0**		**0,00**	**51,18**	**35**	**346,33**	**40,93**	**402,31**	**76**	**800**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.05.02.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Unava Kesehatan Bersumber Dava Masvarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pembinaan Terhadan Petuuas Puskesmas	Puskesmas					27	854,14	0	-	0	51,18	11	346,33	13,00	402,31	24	800					DINAS KESEHATAN
											-									-	-					
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															***86,60***	***70,25***					
					Predikat kinerja :															***T***	***S***					
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								-									-					**DINAS KESEHATAN**
		1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								**2.348,88**														**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tercanainva Proaram Urusan Pemerintahan**	**aersen**					**90**	**2.348,88**	**5,58**	2.636,66	**18,45**	8.715,71	**21,07**	9.953,03	**22,95**	**10.840,61**	83,10	**32.146**					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.02.1.0	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Tingkat Kemandirian Puskesmas**	**persen**					**90**	**42.512,95**	**5,58**	2.636,66	**18,45**	8.715,71	**21,07**	9.953,03	**22,95**	10.840,61	83,10	32.146,01					**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Kemnas Java	Persen					90	2.348,88	9	235,60	23,00	607,21	14	370,21	30,00	788,58	85,22	2.001,60					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Sunsai Salak	Persen					90	1.544,16	6	96,96	26,00	440,29	15	260,76	23,00	398,42	78,70	1.196,42					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Tembilahan Hulu	Persen					90	3.480,54	9	342,01	21,00	806,40	14	555,64	28,00	1.089,47	80,31	2.793,53					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Tembilahan Kota	Persen					90	2.466,03	5	141,17	25,00	687,97	13	346,72	15,00	416,68	64,58	1.592,54					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Gaiah Mada	Persen					90	3.120,36	5	159,68	28,00	957,53	17	606,18	32,00	1.112,15	98,91	2.835,55					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Piring	Persen					90	2.145,52	13	301,67	15,00	367,11	13	305,57	24,00	564,20	71,71	1.538,55					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Teluk Pinang	Persen					90	1.446,43	19	298,83	8,00	121,10	11	178,47	13,00	206,88	55,67	805,28					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Kuala Lahang	Persen					90	1.758,67	0	-	36,00	695,05	18	352,48	32,00	622,29	99,92	1.669,83					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Sapat	Persen					90	1.034,70	0	-	22,50	149,94	23	247,45	22,50	194,70	57,22	592,09					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Concong Luar	Persen					90	1.542,68	9	146,90	8,69	148,94	15	263,57	14,35	245,89	52,20	805,30					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Tanah Merah	Persen					90	2.128,04	2	49,91	10,00	246,21	12	283,18	21,00	494,72	50,47	1.074,01					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Kuala Enok	Persen					90	1.151,32	0	-	19,00	243,72	24	313,27	45,00	577,99	100,00	1.134,98					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Baru	Persen					90	2.816,03	0	-	16,00	494,86	11	342,02	27,00	852,72	60,00	1.689,60					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Pengalihan Keritang	Persen					90	1.188,36	6	77,99	15,00	193,77	16	209,77	21,00	283,17	64,35	764,70					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Enok	Persen					90	871,05	8	73,76	12,00	115,82	21	203,95	27,00	263,06	75,38	656,60					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Penalihan Enok	Persen					90	1.547,60	7	122,27	25,00	426,80	15	266,35	7,00	118,02	60,32	933,46					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Pulau Kijang	Persen					90	2.207,02	0	-	16,00	394,56	23	561,78	32,00	787,62	88,28	1.743,95					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Benteng	Persen					90	741,80	0	-	27,00	225,99	9	73,85	62,00	510,40	82,46	810,25					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Selensen	Persen					90	1.418,04	0	-	36,00	571,13	47	747,05	13,00	215,52	91,23	1.533,70					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Mandah	Persen					90	2.122,34	5	114,52	6,00	138,16	42	980,50	25,00	579,66	92,66	1.812,84					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Batang Tumu	Persen					90	408,12	0	-	24,00	108,91	49	220,53	5,00	24,68	100,00	354,13					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Pelangiran	Persen					90	1.292,64	0	-	11,00	160,26	33	469,02	13,00	179,47	75,70	808,75					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Guntung	Persen					90	1.771,81	12	245,20	16,00	313,67	44	866,99	2,00	43,48	83,58	1.469,34					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Pulau Burung	Persen					90	1.383,18	12	181,51	3,00	38,58	46	680,26	10,00	155,44	76,34	1.055,79					DINAS KESEHATAN
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Teluk Belengkong	Persen					90	577,63	8	48,67	9,62	61,73	39	247,45	17,98	115,38	82,75	473,23					DINAS KESEHATAN
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															***83,10***	***74,31***					
					Predikat kinerja :															***T***	***S***					
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								-														
		1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**129.649,21**														
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah vang terpenuhi**	**Persen**					**100**	**99.342,55**	**18,17**	**11.415**	**21,36**	**23.430**	**19,27**	**24.546**	**26,91**	**30.627**	**85,71**	**90.018**					**RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN**
		1.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Rumah Sakit**	**Persen**					**100**	**25.060,10**	**25**	**3.138**	**25**	**8.674**	**25**	**5.294**	**25**	**5.328**	**100**	**22.434**					**RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN**
		1.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	25.060,10	1	3.138	1	8.674	1	5.294	1	5.328	1	22.434					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Rumah Sakit**	**Persen**					**100**	**199,07**	**4,76**	**17,3**	**11,43**	**25,2**	**2,86**	**4,0**	**9,52**	**19,2**	**28,57**	**65,7**					**RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN**
		1.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Jam Karyawan/karyawati yang mendapat pendidikan pelatihan formal	Jam					105	199,07	5	17,3	12	25,2	3	4,0	10	19,2	30	65,7					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya Administrasi Umum**	**Persen**					**100**	**1.297,56**	**11,11**	**49**	**20,37**	**98,7**	**18,47**	**82,1**	**50,05**	**549,5**	**100**	**779,3**					**RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN**
		1.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					19	114,13	0	0	0	0	0	10	80	9	33,5	19	113,5					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit					16	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Makan Minum dan Opersional COVID19	Paket					5	950,00	0	0	0	0	0	0	5	513,6	5	513,6					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.01.02.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah makanan dan minunan yang disediakan	Kali					299	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					36	233,43	12	49	22	98,7	1	2,1	1	2,4	36	152,2					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								-									0	0					**RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN**
		1.02.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Unit					1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**					**100**	**6.485,82**	**25**	**985,9**	**25**	**1.690**	**25**	**1.461,9**	**25**	**1.624,1**	**100**	**5.761,9**					**RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN**
		1.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					120	1.996,42	30	428,1	30	451,2	30	452,7	30	435,1	120	1.767,1					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung Pelayanan dan Manajemen yang terjaga kebersihannya	Gedung					2	4.489,40	2	557,8	2	1.238,8	2	1.009,2	2	1.189,0	2	3.994,8					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					156	-	156		156		156		156		156	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan Pelaksanaan BLUD**	**Persen**					**100**	**66.300,00**	**25**	**7.225**	**25**	**12.942,2**	**25**	**17.703,6**	**25**	**23.106,3**	**100**	**60.977,1**					**RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN**
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan	Persen					100	66.300,00	100	7.225	100	12.942,2	100	17.703,6	100	23.106,3	100	60.977,1					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***85,71***	***72,68***					
											Predikat kinerja :									***T***	***S***					
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat terpenuhi**	**Persen**					**100**	**30.306,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26,06**	**2344,2**	**73,9**	**18.546,7**	**100,00**	**20.890,9**					**RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN**
		1.02.02.02.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan sesuai standar**	**Persen**					**100**	**15.030,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**12.472,1**	100	12.472,1					**RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN**
		1.02.02.02.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah bangunan Rumah Sakit	Unit					1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.02.02.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Ruang Perawatan yang Standar	Unit					1	4.973,20	0	0	0	0	0	0	1	4.298,6	1	4.298,6					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.02.02.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Ruang Perawatan yang Standar	Unit					1	2.947,43	0	0	0	0	0	0	1	1.654,2	1	1654,2					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.02.02.01.013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat-alat Non Medik (Unit)	Unit					35	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
				Jumlah Mebeleur Rumah Sakit yang disediakan	Jenis					7	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.02.02.01.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Unit					189	6.102,93	0	0	0	0	16	0	173	5.556,7	189	5.556,7					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
											-									0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
											-									0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.02.02.01.016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Golongan Obat-obatan Rumah Sakit	Golongan Obat					45	1.006,72	0	0	0	0	0	0	45	962,6	45	962,6					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.02.02.01.017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Jenis					16	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.02.02.01.018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan	Unit					1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.02.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabunaten /Kota**	**cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat**	**Persen**					**100**	**15.276,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**2344,2**	**50**	**6.074,6**	**100**	**8.418,8**					**RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN**
		1.02.02.02.02.012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Peserta Sosialisasi HIV AIDS	Orang					40	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.02.02.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Bahan Operasional yang disediakan	Persen					100	15.276,38	0	0	0	0	50	2.344,2	50	6.074,6	100	8.418,8					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
											-									0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.02.02.02.035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Elemen terakreditasi	Persen					100	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.02.02.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**								-									0	0					**RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN**
		1.02.02.02.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Sistem Informasi Kesehatan	Paket					1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.02.02.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabunaten /Kota**								-									0	0					**RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN**
		1.02.02.02.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tinsikat Daerah Kabunaten /Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan	Persen					100	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***69,04***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***S***					
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan terpenuhi**							-									**0**	**0**					
		1.02.05.02.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan kebijakan PHBS dan berwawasan kesehatan**	**Persen**						-									0	0					**RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN**
		1.02.05.02.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan tentang hidup sehat	Orang					442	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		1.02.05.02.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat**	**Persen**						-									0	0					**RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN**
		1.02.05.02.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah pelaksanaan Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	Materi					80	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***0***	***0***					
											Predikat kinerja :									***SR***	***SR***					
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								-															
		1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**27.078,10**															
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**Persen**					**100**	**15.972,59**	**47,42**	**3890,06**	**44,38**	**3678,25**	**74,58**	**3763,39**	**74,88**	**3.814,04**	**99,70**	**15145,74**					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA**
		1.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**4.140,09**	**100,00**	**690,25**	**100,00**	**1.191,39**	**100,00**	**820,25**	**100,00**	**812,48**	**100,00**	**3.514,37**					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA**
		1.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	4.140,09	1	690,25	1	1.191,39	1	820,25	1	812,48	1	3514,37					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
		1.02.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ peneembanaan kompetensi**	**Persen**					**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA**
		1.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang					9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
		1.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA**
		1.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipergunjang Perizinannya	Unit					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
		1.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**					**100**	**2.332,50**	**12,36**	**358**	**12,36**	**513**	**100,00**	**686,48**	**100,00**	**659,50**	**100**	**2216,98**					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA**
		1.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah perbagan Keamanan yang dibayarkan	Orang					4	15,00	0	0	0	0	4	7,5	4	7,5	4	15					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					89	2.317,50	11	358	11	513	89	678,98	89	652	89	2201,98					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
		1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan Pelaksanaan BLUD**	**Persen**					**100**	**9.500,00**	**30**	**2.841,81**	**21**	**1.973,86**	**24**	**2.256,66**	**25**	**2.342,06**	**99,10**	**9414,39**					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA**
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	Persen					100	9.500,00	30	2.841,81	21	1.973,86	24	2.256,66	25	2.342,06	99,10	9414,39					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***93,01***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelavanan Minimal**	**Persen**					**90**	**11.105,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,52**	**1481,71**	**50,92**	**7421,62**	**69,40**	**8903,33**					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAIA MUSA**
		1.02.02.02.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenanaan Daerah Kabunaten/Kota**	**Cakupan Ketersediaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan**	**Persen**					**90**	**11.105,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,52**	**1481,71**	**50,92**	**7421,62**	**69,40**	**8903,33**					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAIA MUSA**
		1.02.02.02.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Rumah Sakit	Kegiatan					4	206,00	0	0	0	0	0	0	3	152,96	3	152,96					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
		1.02.02.02.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit	Unit					2	2.975,00	0	0	0	0	1	1.330,98	0	1.150,58	1	2481,55					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
		1.02.02.02.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang direhabilitasi	Ruangan					1	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12				13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		1.02.02.02.01.013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Prasarana Rumah Sakit	Unit					2	750,00	0	0	0	0	0	0	1	342,43	1	342,43					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
		1.02.02.02.01.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat-alat Rumah Sakit yang disediakan	Set					1	6.674,51	0	0	0	0	0	0	1	122,03	1	5578,94	1	5700,97					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
		1.02.02.02.01.016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat yang tersedia	Jenis					2	300,00	0	0	0	0	1	28,71	1	196,71	2	225,42					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*77,11*	*80,17*					
											Predikat kinerja :									*T*	*T*					
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							-																**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG**
		1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**16.770,46**																**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG**
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi**	**Persen**					**100**	**8.452,46**	**11,21**	**1.039,82**	**21,88**	**2.674,32**	**15,94**	**1.809,99**	**34,84**	**2.233,14**	**83,87**	**7757,27**					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG**
		1.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan Yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**3.242,17**	**25,00**	**536,69**	**25,00**	**883,58**	**25,00**	**593,87**	**25,00**	**609,53**	**100,00**	**2623,67**					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG**
		1.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	3.242,17	1	536,69	1	883,58	1	593,87	1	609,53	1	2.623,67					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Administrasi dan Sarana Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**392,60**	**17,98**	**67,36**	**17,81**	**79,60**	**21,21**	**91,04**	**39,82**	**117,74**	**96,82**	**355,74**					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG**
		1.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Kegiatan					1	18,50	1	5,80	1	6,09	1	0,19	1	6,29	1	18,37					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					29	41,41	3	4,26	5	6,96	4	6,32	17	23,81	29	41,35					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set					5	0									0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					124	0									0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Set					30	24,92	11	9,53	4	3,06	3	2,12	12	10,05	30	24,76					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					4647	26,27	205	1,16	633	3,58	851	4,81	2.933	16,58	4.622	26,13					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					15228	23,55	1.810	2,80	841	1,30	4.720	7,30	7.552	11,68	14.923	23,08					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.01.02.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					2580	65,80	589	15,03	758	19,33	541	13,81	676	17,24	2.564	65,41					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
				Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					650	0									0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					68	192,15	10	28,78	14	39,28	20	56,49	11	32,09	55	156,64					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
				Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					2	0									0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor**	**Persen**					**100**	**2.654,21**	**19,28**	**336,98**	**19,23**	**920,53**	**25,44**	**602,97**	**36,00**	**747,38**	**100**	**2.607,86**					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG**
		1.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					650	6,21	51	0,49	50	0,48	171	1,63	377	3,60	649	6,20					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					2	109,00	2,00	18,29	2,00	21,05	2,00	26,34	2,0	28,98	2	94,66					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					124	2.539,00	124	318,20	124	899,00	124	575,00	124	714,80	124	2.507,00					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**					**100**	**65,48**	**0**	**1,38**	**30**	**4,80**	**0**	**11,33**	**71**	**43,48**	**101**	**60,99**					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG**
		1.02.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					10348		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					23	6,00	0	0	21	1,23	0	0	3	4,26	24	5,49					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Kegiatan					1	20,00	-	1,38	-	3,20	-	0,61	1,00	14,77	1	19,96					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					46	0									0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.01.02.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
				Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Ruang					7	39,48	0	0	-	0,37	-	10,72	7	24,45	7,00	35,54					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Ruang					1	0									0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
				Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Set					30	0									0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan Pelaksanaan BLUD**	**Persen**					**100**	**2098**	**5,00**	**97,41**	**19,00**	**392,29**	**24,00**	**510,78**	**34,00**	**710,75**	82,00	1711,23					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG**
		1.02.01.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD RSUD Tengku Sulung	Persen					99	2098	5,00	97,41	19,00	392,29	24,00	510,78	34,00	710,75	82,00	1711,23					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*95,92*	*88,90*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehtan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal**	**Persen**					**90**	**8.318,00**	-	**12,93**	-	**17,27**	-	**1.557,67**	**75,68**	**4.717,37**	**75,68**	**6305,24**					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG**
		1.02.02.02.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Ketersediaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan**	**Persen**					**90**	**8.318,00**	-	**12,93**	-	**17,27**	-	**1.557,67**	**75,68**	**4.717,37**	75,68	6305,24					**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG**
		1.02.02.02.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Pembangunan Rumah Sakit	Kegiatan					1	5.900,00	0	0	0	0	-	1.527,96	1,00	3.428,70	1	4.956,66					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.02.02.01.010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang terselihara	Unit					1	15,00	-	1,02	-	3,01	-	1,87	1,00	8,90	1	14,80					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.02.02.01.013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Saarana dan Prasarana Rumah Sakit	Kegiatan					3	1.150,00	0	0	0	0	0	0	2,00	727,69	2	727,69					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.02.02.01.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat-alat Rumah Sakit yang disediakan	Set					10	900,00	0	0	0	0	0	0	4,00	365,63	4	365,63					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
											0									0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.02.02.01.016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat-obatan Rumah Sakit yang disediakan	Paket					1	179,00	0	0	0	0	0	0	1,00	147,82	1	147,82					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.02.02.01.017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit yang disediakan	Jenis					26	74,00	-	11,91	-	14,26	-	27,84	19,00	18,83	19	72,84					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.02.02.01.018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ruangan/bangunan Rumah sakit yang terselihara	Unit					1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.02.02.01.019	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jlmlah Ambulance/Mobil Jenazah yang terpelihara	Unit					2	20,00	0	0	0	0	0	0	1,00	19,80	1	19,80					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.02.02.01.020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang terpelihara	Set					1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.02.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persen					100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
		1.02.02.02.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang					1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*84,09*	*75,80*					
											Predikat kinerja :									*T*	*S*					
		1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							-																**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**80.245,67**			**3.713,43**		**4.642,65**		**3.870,97**		**4.210,36**		**16.445,40**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**19.076,93**	**24,76**	**3.713,43**	**25,83**	**4.642,65**	**18,29**	**3.870,97**	**22,87**	**4.210,36**	**91,75**	**16.445**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**7.478,96**	**22,50**	**1.250,51**	**22,50**	**1.955,28**	**27,50**	**1.337,73**	**27,50**	**1.321,12**	**100**	**5.865**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji PNS	Tahun					1	7.455,56	0,25	1.234,44	0,25	1.952,55	0,25	1.336,47	0,25	1.318	1	5.841,26					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.01.02.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Laporan					10	23,40	2	16,07	2	2,73	3	1,26	3	3,31	10	23,37					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ penneembanean komoetensi**	**Persen**					**100**	**82,50**	**48,65**	**22,00**	**51,35**	**41,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**63,00**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Stel					279	-		0		0		0		0	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang					37	82,50	18	22,00	19	41,00		-		-	37	63,00					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		1.03.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**1.498,93**	**13,90**	**132,76**	**16,40**	**278,61**	**22,22**	**129,31**	**32,23**	**397,22**	**84,75**	**937,91**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					30	141,45	5	8,82	6	91,11	15	6,96	4	32,70	30	139,58					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set					12	-							12		12	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					23	195,02	6	42,74	6	43,06	6	10,32	5	75,78	23	171,90					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					1	-									0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					101067	60,60	25275	3,14	25275	8,96	25275	11,14	25275	36,63	101100	59,87					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					20	54,00	5	5,20	5	12,23	5	6,70	5	5,98	20	30,10					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					280	1.047,86	10	72,87	15	123,26	28	94,19	62	246,14	115	536,46					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					168	-	25		50		70		85		230	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**					**100**	**9.243,31**	**25,02**	**2.250,97**	**25,02**	**2.270,81**	**25,02**	**2.288,03**	**25,02**	**2.289,43**	**100,06**	**9.099,24**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					60333	8,00	15.131	2,00	15.131	1,52	15.131	2,20	15.131	2,26	60.524	7,98					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					10	7.895,11	10	1.931,77	10	1.934,39	10	1.957,93	10	1.961,07	10	7.785,16					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					7	1.340,20	7	317,20	7	334,90	7	327,90	7	326,10	7	1.306,10					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					20	-	20		20		20		20		20	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					59	-	59		59		59		59		59	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan**	**Persen**					**100**	**773,22**	**13,74**	**57,18**	**13,91**	**96,95**	**16,69**	**115,89**	**29,59**	**210,59**	**73,93**	**480,61**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	Unit					5	100,80	1	21,45	1	8,97	1	16,81	2	38,90	5	86,13					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dioptimalkan Perizinannya	Unit					20	120,75	5	15,62	5	18,67	5	2,94	5	25,45	20	62,69					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					12	-	3		3		3		3		12	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara/Service	Unit					20	27,50	10	8,32	2	0,23	2	2,23	6	16,30	20	27,07					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Ruang					10	37,04		0		0	1	34,64		-	1	34,64					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium bahanmaraan yang direhabilitasi	Set					23	487,13	4	11,79	4	69,08	4	59,28	3	129,94	15	270,08					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah alat berat yang direhabilitasi	Unit					7	-			1		2		2		5	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah alat berat yang tersedia	Unit					1	-							1		1	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang disediakan	Set					28	-			3		4		4		11	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	Set					30	-			5		5		6		16	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***91,75***	***75,59***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***S***					
		1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yangi baik**	**Persen**					**55**	**17.439,03**	**0**	**2,06**	-	**119,01**	**0**	**1.561,17**	**81**	**20.372,09**	**81**	**22.054,33**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.02.02.01.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabunaten/Kota**	**Persentase Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik**	**Persen**					**60**	**13.323,06**	**0**	**2,06**	-	**102,60**	-	**714,90**	**76**	**15.280,87**	**76**	**16.100,44**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.02.02.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penamnung Air	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen					9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.02.02.01.010	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah panjang turap/talud/bronjong di wilayah sungai yang di bangun	Meter					79	2.258,66	0	-	0	18,32	0	543,26	22,26	100,52	22,26	662,11					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah pembangunan turap/talud/bronjong di wilayah sungai yang dikendalikan	Kecamatan					20	-	-	-	-	-	-	-	1	1.659	1	1.659,27					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.02.02.01.037	Peningkatan Kanal Banjir	Jumlah panjang sungai/kali yang dinormalisasi Wilayah I	Km					7	11.064,40	0	2,06	0	84,28	0	171,64	77,098	6.103,85	5,40	6.361,84					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah panjang sungai/kali yang dinormalisasi Wilayah II	Km					51.8	-	-	-	-	-	-	-	24,206	2.012	24,206	2.012,00					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah panjang sungai/kali yang dinormalisasi Wilayah III	Km					44.8	-	-	-	-	-	-	-	50,593	4.800	50,593	4.800,00					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Pembayaran Tunda Bayar Kegiatan tahun 2020	paket					4	-	-	-	-	-	-	-	4	605,23	4	605,23					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.02.02.01.053	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah turap/talud/bronjong yang dipelihara	Meter					4076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.02.02.01.062	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenanaan Kabunaten/Kota	Jumlah itin pengelolaan air baku/air permukaan yang di keluarkan	Itin					20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.02.02.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabunaten/Kota**	**Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi baik**	**Persen**					**50**	**4.115,98**	-	-	-	**16,41**	-	**846,26**	**86**	**5.091,22**	**86**	**5.953,89**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.02.02.02.06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah prasarana pengambilan dan saluran pembawa dibangunan	Unit					54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.02.02.02.016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah jaringan irigasi yang telah dibangun yang direhabilitasi dan dipelihara	Km					51	3.232,39	0	0	0	0	0	773,04	18,72	1.892	18,72	2.664,95					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah jaringan irigasi yang telah dibangun yang direhabilitasi dan dipelihara	Ha					718.1	-	-	-	-	-	-	-	719	2.450	719	2.450,00					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.02.02.02.023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah jaringan irigasi yang telah dibangun yang direhabilitasi dan dipelihara	Km					11	883,59	0	0	0	16,41	0	73,22	25,119	749,32	25,119	838,94					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***59,23***	***66,05***					
											Predikat kinerja :									***R***	***S***					
		1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak**	**SR**					**15625**	**6.511,05**	-	**0**	-	**659,79**	-	**1.083,04**	-	**1.854,49**		**3.597,320**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.03.02.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabunaten/Kota**	**Persentase SR SPAM kabupaten dalam Kondisi Baik**	**Persen**					**60**	**6.511,05**	-	-	-	**659,79**	-	**1.083,04**	-	**1.854,49**		**3.597,32**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.03.02.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen DED Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar tertutama bagi masyarakat miskin	Dokumen					2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.03.02.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Paket Hutang Tahun 2020 yang dibayarkan	Paket					1	1.909,97	-	0	-	597,41	-	940,81	1	343,72	1	1.881,94					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Panjang Jaringan Perpipaan dan sambungan rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	SR					1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.03.02.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Perpipaan dan Sambungan Rumah Terbangun	SR					480	2.324,00	0	0	0	-	-	-	270	811,29	270	811,29					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.03.02.01.011	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelomnok Masvarakat	Jumlah dokumen DED Jaringan Perpipaan dan sambunaan rumah pada Pembanaunan Sarana dan	Dokumen					5	261,80	0	0	0	41,33	0	26,34	2	76,95	2	144,61					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Infrastruktur Pedesaan	Kali					11	-	-	-	-	-	11	-	20	-	31	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pamsimas	Kali					85	-	-	-	20	-	30	-	46	-	96	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.03.02.01.016	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Lokasi					2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.03.02.01.017	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sarana dasar terutama bast	kali					177	2.015,29	0	0	0	21,06	0	115,89	59	622,53	59	759,48					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Sumur Bor yang dibangun	Unit					93	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***57,40***	***56,59***					
											Predikat kinerja :									***R***	***R***					
		1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan/gedung dalam kondisi baik**	**Persen**					**80**	**1.454,60**	**0**	**0**	**22,22**	**38,873**	**33,33**	**35,99**	**44,44**	**143,47**	**80,00**	**218,33**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.08.02.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Funesi Banaunan Gedung**	**Persentase Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah dalam kondisi baik**	**Persen**					**80**	**1.454,60**	**0**	**0**	**0**	**38,873**	**0**	**35,99**	**0**	**143,47**	**0**	**218,33**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.08.02.01.02	Pemeliharaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Banaunan Gedung Daerah Kabunaten/Kota	Jumlah bangunan Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah yang dibanaun	Unit					24	1.297,20	0	0	0	5,69	0	15,50	5	112,36	5	133,55					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah bangunan Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah yang di rehabilitasi	Unit					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
				Jumlah Monitoring pada Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Bangunan	Kali					87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Paket Hutang Tahun 2018 yang dibayarkan	Paket					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.08.02.01.09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Monitoring Survey dan Pemetaan RTBL dan IMB yang dilaksanakan	Kali					90	157,40	0	0	20	33,19	30	20,49	40	31,11	90	84,79					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*60,42*	*32,08*					
											Predikat kinerja :									*R*	*SR*					
		1.03.09.0	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.09.02.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.09.02.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Banaunan dan Lindkunan di Kabunaten/Kota	Jumlah Dokumen DED Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tembilahan	Dokumen					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW yang tersedia	Perda					3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :															
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					
		1.03.010	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik**	**Persen**					**65**	**33.943,44**	**0**	**27,182**	**0**	**472,99**	**0**	**5.244,10**	**55,10**	**14.930,53**	**55,1**	**20.674,80**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
				Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	**Persen**					**65**		**0**		**0**				**49,45**		49,45						**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.010.02.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Jalan dalam Kondisi Baik**	**Persen**					**63**	**33.943,44**	**0**	**27,182**	**0**	**472,99**		**5.244,10**	**55,10**	**14.930,53**	**55,1**	**20.674,80**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
				Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen					52		0	-	0	-			49,45		49,45						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.010.02.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan	Dokumen					2	1.462,07	0	0	0	21,79	0	401,30	2	822,47	2	1.245,55					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Pembayaran Hutang Pada Pihak ketiga Kegiatan Tahun 2020	Pekerjaan					6	-	-	-	6	-					6	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.010.02.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan yg dipelihara	Persen					90	416,48	0	0	0	68,05	0	194,93	90	106,71	90	369,69					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Persentase Ruas Jalan yang di terangi	Persen					20	-		-	-	-			20		20	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.010.02.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Jembatan yang Disurvey	Unit					727	-		-	-	-					0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Panjang Ruas Jalan yang Disurvey	KM					1190	-		-	-	-					0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.010.02.01.05	Pembangunan Jalan	Jumlah panjang Jalan Baru Wilayah III yang dibangun	KM					2	4.824,22	0	0	0	33,31	0	899,38	7,264	2.249,44	7,264	3.182,13					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah panjang Jalan Baru Wilayah II yang dibangun	KM					1.5	-	-	-	-	-			0,266		0,266	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah panjang Jalan Baru Wilayah I yang dibangun	KM					6.5	-	-	-	-	-			1,096		1,096	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Pembayaran Hutang Pada Pihak ketiga Kegiatan Tahun 2020	Pekerjaan					5	-	-	-	5						5	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.010.02.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah panjang Jalan Wilayah III yang di tingkatkan	KM					2	18.842,02	0	0	0	35,70	0	3.040,35	0,448	9.472,65	0,448	12.548,70					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah panjang jalan Wilayah II yang di tingkatkan	KM					8	-	-	-	-	-			2,613		2,613	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah panjang jalan Wilayah I yang di tingkatkan	KM					4.5	-	-	-	-	-			2,923		2,923	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Pembayaran Hutang Pada Pihak ketiga Kegiatan Tahun 2020	Pekerjaan					1	-	-	-	1						1	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.010.02.01.09	Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi	Km					11	2.143,69	0	0	0	178,12	0	245,02	25,87	734,59	25,87	1.883,69					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.010.02.01.012	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Wilayah III yang Dibangun	Unit					7	3.920,04	0	0	0	37,96	0	108,40	2	714,20	2	860,56					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Jembatan Wilayah II yang Dibangun	Unit					10	-	-	-	-	-			2		2	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Jembatan Wilayah I yang Dibangun	Unit					10	-	-	-	-	-			0		0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.010.02.01.018	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah dan Panjang Jembatan yang dipelihara	Km					4	1.599,25	0	0	0,106	60,48	0,171	345,01	0,215	780,74	0,492	1.186,23					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.010.02.01.022	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah kegiatan pembangunan jembatan yang dimonitoring	Kecamatan					20	735,68	0	27,182	0	37,60	0	9,70	20	49,73	20	124,21					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah kegiatan pemeliharaan Jalan yang di monitoring dan dievaluasi	kegiatan					20	-	5	-	5	-	5		5		20	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan di evaluasi	Kecamatan					20	-	5	-	5	-	5		5		20	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah pelaksanaan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali yang di monitoring dan dievaluasi	Kecamatan					20	-	-	-	-	-					0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang di monitoring dan dievaluasi	Kecamatan					20	-	-	-	-	-					0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah pemeliharaan Jalan yang di monitoring dan dievaluasi	Kecamatan					20	-	-	-	-	-					0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*91,28*	*60,91*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*R*					
		1.03.011	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase SDM jasa Konstruksi yang terlatih**	**Persen**					**80**	**220,62**	**0**	**0**	**58,33**	**147,17**	**23,33**	**73,49**	**0**	**62,60**	**81,67**	**283,25**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.011.02.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**								**1,70**	**0**	**0**							0	-					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.011.02.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SDM / Tenaga Ahli Jasa Konstruksi yang diberdayakan Jasa Konstruksi	Orang					13	1,70	-	-	-	1,7		0		0	0	1,70					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.011.02.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Pengguna Jasa Konstruksi yang didata	Objek					30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah SDM / Tenaga Ahli Jasa Konstruksi yang diberdayakan	Orang					13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Terkait Peraturan Jasa Konstruksi	Kali					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.011.02.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan sistem informasi jasa konstruksi yang dikelola**	**Persen**					**100**	**114,55**	**0**	**0**	**100**	54,38	-	12,79	-	3,90	100	71,07					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.011.02.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Terkait Peraturan Jasa Konstruksi	Kali					1	114,55	-	0	1	54,38	-	12,79	-	3,90	1	71,07					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.011.02.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Cakupan Monitoring Jasa Konstruksi**	**Persen**					**100**	**104,36**	**0**	**0**	**16,67**	18,35	**23,33**	23,10	**26,67**	26,55	66,67	68,01					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.011.02.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengguna Jasa Konstruksi yang didata	Objek					30	104,36	-	0	5	18,35	7	23,10	8	26,55	20	68,01					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*83,33*	*63,60*					
											Predikat kinerja :									*T*	*R*					
		1.03.012	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)**	**Persen**					**100**	**1.600,00**	**5,67**	**12,060**	**1,6**	**155,38**	**1,6**	**393,24**	**67,5**	**575,95**	**76,37**	**1.136,64**					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.012.02.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Persentase Rapat - Rapat Koordinasi TKPRD**	**Persen**					**100**	**454,23**	**0**	**6,03**	**1,6**	**17,71**	**1,6**	**17,84**	**50**	**266,7545**	53,2	308,34					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.012.02.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah surat Informasi Tata Ruang	Rekomendasi					27	454,23		6,03	79	17,71	10	17,84	6	266,75	95	308,34					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Jumlah Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang yang tersedia	Kali					125	-			2		2		3		7	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.012.02.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terwujudnya Peta Petak Tanah yang Sesuai dengan RDTR RWP Tembilahan**	**Persen**					**100**	**412,75**	**0**	**6,03**	**0**	**34,49**	**0**	**210,54**	**70**	**28,91**	70	279,97					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.012.02.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW yang tersedia	Perda					3	412,75	0	6,03	0	34,49	0	210,54	4	28,91	4	279,97					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.012.02.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Inventarisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Tata Ruang**	**Persen**					**100**	**437,69**	**11,33**	**0**	**41,33**	**14,38**	**6,00**	**103,86**	**2,67**	**209,64**	61,34	327,88					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.012.02.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Dokumen Pemanfaatan Ruang	Advice Planning					150	437,69	17	0	62	14,38	9	103,86	4	209,64	92	327,88					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.012.02.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sinkronisasi dan Penuktahiran Informasi Tata Ruang yang Saling Terintegrasi**	**Persen**					**100**	**295,34**	**0**	**0**	**13**	**88,80**	**19**	**61,00**	**18**	**70,64**	50	220,45					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		1.03.012.02.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terintegrasinya Informasi Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabunaten	Persen					100	295,34	0	0	13	88,80	19	61,00	18	70,64	50	220,45					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*58,63*	*71,32*					
											Predikat kinerja :									*R*	*S*					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							-																
		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							34.477,57																
		1.03.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU	Persen					75	34.477,57	0	45,49	0	109,80	75,00	414,84	0	27.656,89	75,00	28.227,02					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.05.02.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Persen					75	34.477,57	0	45,49	0	109,80	75,00	414,84	0	27.656,89	75,00	28.227,02					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.05.02.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menuniang Funesi Hunian	Jumlah Kawasan Permukiman yang dikembangkan	Kawasan					1	34.477,57		45,49		109,80	1	414,84		27.656,89	1	28.227,02					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Jumlah Lokasi Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong di Kab. Inhil	Lokasi					2	-					2				2	0					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Jumlah Sarana Prasarana TPU yang dibangun	Unit					23	-					23				23	0					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Luas tanah untuk kawasan pemakaman yang disediakan	Hektar					1	-					1				1	0					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Panjang Jalan yang di bangun pada Kegiatan Pembanunnan Jalan Linekunan di Wilavah I	Km					21	-					21				21	0					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Panjang Jalan yang di bangun pada Kegiatan Pembanunnan Jalan Linekunan di Wilavah III	Km					8	-					8				8	0					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Panjang Jalan yang di bangun pada Pembangunan Jalan Lingkungan di Wilayah II	Km					15	-					15				15	0					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	Km					5	-					5				5	0					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :										*100*	*81,87*					
										Predikat kinerja :										*ST*	*T*					
		1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							26.520,13																DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Nilai					22	7.424,55	0	-	0	-	0	-	22	7.424,55	22	7.424,55					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen					100	40,61	0	7,08	0	13,50	0	2,28	100	12,89	100	35,75					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan					1	40,61	0	7,08	0	13,50	0	2,28	1	12,89	1	35,75					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Dokumen					3	5.156,06	3	887,78	3	1.375,24	3	939,66	3	920,16	3	4.122,84					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	4.826,54	1	806,02	1	1.278,10	1	845,58	1	879,54	1	3.809,24					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Laporan					1	329,52	1	81,76	1	97,14	1	94,08	1	40,62	1	313,60					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Penguasaan yang terpelihara	Persen					100	121,20	25	30,30	25	30,30	25	30,30	25	30,30	100	121,2					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan	Orang					8	121,20	8	30,30	8	30,30	8	30,30	8	30,30	8	121,2					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	Orang					5	-	0		0		0		0		0	0					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang					10	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen					100	815,36	-	209,58	-	117,60	-	80,94	-	63,88	0	472,00					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					5	17,42	1	1,69	1	4,62	0	-	3	9,83	5	16,13					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jamuan makan dan minum rapat yang disediakan	Kali					21	66,82	5	16,06	5	14,23	5	16,29	6	15,88	21	62,45					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Jumlah logistik yang disediakan	Jenis					3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Lembar					72032	38,01	26.432	14,55	10000	2,50	17600	4,40	18000	4,50	72.032	25,95					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Media					18	18,00	4	0,60	4	1,10	4	1,60	6	1,70	18	5,00					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan	Kali					424	675,11	135	176,67	104	95,15	98	58,66	87	31,98	424	362,46					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen					100	965,22	-	202,61	-	201,72	-	277,51	-	134,79	0,00	816,63					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan lainnya yang mendukung administrasi perkantoran	Buah					2400	12,90	600	3,90	600	5,85	600	1,95	600	1,15	2400	12,85					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	Rekening					4	295,26	1	52,81	1	53,97	1	59,00	1	39,19	4	204,97					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					31	74,46	0	-	0	-	31	74,41	0	-	31	74,41					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa petugas Keamanan yang dibayarkan , Jumlah Petugas Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan, Jumlah tenaga jasa administrasi/Teknis	Orang					45	582,60	45	145,90	45	141,90	45	142,15	45	94,45	45	524,40					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kineria Peranakat Daerah yang terpelihara dengan	Persen					100	207,10	-	55,03	-	49,18	-	25,01	-	17,71	-	146,93					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara, Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	Unit					30	122,10	5	52,38	5	35,44	10	18,95	10	11,83	30	118,59					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipertanggung beritikannya	Unit					30	35,00	0	-	10	4,74	10	2,32	10	5,24	30	12,30					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara/Service	Jenis					3	22,00	1	2,65	1	9,00	0	3,75	1	0,65	3	16,05					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Ruang					10	15,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis					2	13,00	0	1,00	0	5,25	1	3,55	1	2,32	2	12,12					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :										*95,00*	*73,35*					
										Predikat kinerja :										*ST*	*S*					
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan	Persen					100	2.418,38	3,14	112,83	5,07	191,87	2,42	271,06	35,52	388,15	46,15	963,92					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.02.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Progam Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni yang dibangun	unit					414	2.037,19	0	82,45	0	137,76	0	206,13	118	254,53	118	680,87					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.02.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni yang dibangun	Unit					414	2.037,19	0	82,45	0	137,76	0	206,13	118	254,53	118	680,87					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.02.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Cakupan Penerbitan Izin Pembangunan dan Penembanaan Kawasan Permukiman vang	Persen					100	381,19	6,28	30,39	10,14	54,11	4,83	64,93	13,04	133,62	34,30	283,05					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.02.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan dan Jumlah monitoring dan evaluasi rumah	Kali					207	381,19	13	30,39	21	54,11	10	64,93	27	133,62	71	283,05					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :										*46,15*	*39,06*					
										Predikat kinerja :										*SR*	*SR*					
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen					75	4.192,88	25,00	63,35	15,00	158,92	10,00	936,66	25,00	1.280,71	75,00	2439,64					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.02.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Cakupan Penerbitan Izin Pembangunan dan Penembanaan Kawasan Permukiman vang	Persen					100	87,65	19,30	25,47	24,12	12,12	23,68	12,78	32,89	4,40	100,00	54,77					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.02.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Penambanaan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Penembanaan Kawasan Permukiman dan	Kali					228	87,65	44	25,47	55	12,12	54	12,78	75	4,40	228	54,77					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.02.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman yang memiliki akses Sarana dan Prasarana yang layak	Persen					100	1.458,53	0,00	37,88	0,00	146,80	0,00	262,43	0,00	128,79	0,00	575,90					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.02.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen DED Pembangunan Saluran Drainase yang disusun	Dokumen					2	870,39	0	24,29	0	94,49	1	193,78	1	23,56	2	336,11					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.02.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Penerima Program KOTAKU	BKM					8	588,14	1	13,59	2	52,31	2	68,65	3	105,23	8	239,79					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.02.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Persen					100	2.646,70	0	-	0	-	39,39	661,45	57,58	1.147,52	96,97	1808,97					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.02.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibanaun/diperbaiki	Unit					132	2.646,70	0	-	0	-	52	661,45	76	1.147,52	128	1.808,97					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :										*98,99*	*56,77*					
										Predikat kinerja :										*ST*	*R*					
		1.04.04.0	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh	Hektar					75	9.780,00	0	-	0	-	0	36,19	73,33	9.483,87	73,33	9.520,06					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.04.02.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh	Persen					100	9.780,00	0	-	0	-	0	36,19	97,78	9.483,87	97,78	9.520,06					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		1.04.04.02.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (BSRLH) yang diberikan	Unit					135	9.780,00	0	-	0	-	0	36,19	132	9.483,87	132	9.520,06					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									98,99	56,77					
											Predikat kinerja :									ST	R					
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU	Persen					75	2.704,32	0,00	346,93	0,00	543,67	0,00	865,03	0,00	354,19	75,00	2109,81					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.05.02.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	cakupan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Persen					75	2.704,32	0,00	346,93	0,00	543,67	0,00	865,03	0,00	354,19	0,00	2.109,81					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.05.02.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen DED Perencanaan Prasarana Per mukiman dan Jalan Jerambah di Kab. Inhil	Dokumen					3	1.236,85	0	19,36	1	356,44	1	579,45	1	135,99	3	1.091,24					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.05.02.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	jumlah monitoring dan evaluasi pembangunan jalan lingkungan pemukiman yang dlaksanakan Dan Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Kali					268	1.467,47	74	327,57	58	187,22	68	285,58	68	218,20	268	1.018,57					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									100	78,02					
											Predikat kinerja :									ST	T					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								17.463,70		2.638,23		4.985,87		4.823,50		4.606,03		17.053,63					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai					-	14.672,87	-	2.539,61	-	4.521,79	-	3.564,06	-	3.264,07	-	13.889,53					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun	Persen					100	6,00	33,33	1,50		1,50	33,33	1,50	33,33	1,50	100,00	6,00					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pertanggung Jawaban dan Laporan Keuangan yang disusun	Jenis					6	6,00	2,00	1,50	-	1,50	2,00	1,50	2,00	1,50	6,00	6,00					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai						100	12.221,78	25	2.307,79	25	3.876,82	25	2.663,21	25	2.628,02	100	11.475,85					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Total Gaji ASN	tahun					1	12.221,78	1,00	2.307,79	1,00	3.876,82	1,00	2.663,21	1,00	2.628,02	1,00	11.475,85					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen					100	54,89	12,5	8,95	12,5	15,54	12,5	27,53	12,5	1,43	50	53,44					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pembinaan dan Latihan Rutin Tim Korsik Satpol.PP yang dilaksanakan	kali					48	54,89	6,00	8,95	6,00	15,54	6,00	27,53	6,00	1,43	24,00	53,44					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Jumlah Peserta Diksar, dan Pembentukan Tim Penilai	Orang					32	-									0	-					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen					100	350,08	19,54	55,66	29,29	120,36	24,81	42,68	30,29	91,72	104	310,42					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					13	5,58	-	-	2,00	0,84	5,00	2,50	6,00	2,25	13,00	5,58					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					23	37,26	23,00	-	23,00	11,60	23,00	14,83	23,00	10,83	23	37,26					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					6025	23,00	1.506	4,50	1.506,00	6,00	1.506,00	5,50	1.507,00	7,00	6025	23,00					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Jenis					4	21,31	4,00	4,00	4,00	1,25	4,00	5,05	4,00	10,90	4	21,20					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Jenis					2	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang	Kali					66	261,34	15,00	47,16	37,00	100,67	7,00	14,81	20,00	60,74	79	223,38					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang	Kali					134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Jumlah Peserta HUT Satpol.PP Tingkat Nasional dan	Orang					1852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang	persen					100	1.925,90	24,99	165,70	24,99	477,76	24,99	786,43	24,99	498,12	99,95	1.928,01					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					1350	3,50	337	-	337,00	1,00	337,00	1,00	339,00	0,50	1350	2,50					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					36	50,10	9	11,55	9,00	14,31	9,00	14,68	9,00	9,52	36	50,06					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruangan					6	1.872,30	6	154,15	6,00	462,45	6,00	770,75	6,00	488,10	6	1.875,45					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					149	-	149		149		149		149		149	-					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan	Persen					100	114,22	20,27	-	21,28	29,81	20,27	42,72	19,70	43,29	81,51	115,81					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipellihara dan dipepanjang Perizinannya	Unit					33	51,22	4	-	5,00	10,07	4,00	13,57	3,00	29,29	16	52,92					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara/Service	Unit					38	10,00	9	-	9,00	4,80	9,00	1,20	11,00	4,00	38	10,00					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Ruang					1	53,00	1	-	1,00	14,94	1,00	27,95	1,00	10,00	1	52,89					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									89,24	96,91					
											Predikat kinerja :									T	ST					
		1.05.02.0	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA /	persen					100	2.790,83	17,57	98,63	18,91	464,08	19,395	1.259,44	20,305	1.341,96	76,18	3.164,10					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.02.01.0	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	persen					100	2.330,69	11,62	72,28	14,3	356,84	15,27	1.103,20	17,09	1.185,25	58,28	2.717,56					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.02.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Patroli Rutin dan Operasi Ketertiban Lingkungan yang dilaksanakan	kali					96	1.979,78	48	42,85	48	234,80	48	1.049,64	48	1.081,40	192	2.408,68					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Jumlah pelaksanaan Operasional Pengamanan dan	Kali					233	-	16		61		82		100		259	-					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Jumlah Pelaksana Siaga Piket / Penjagaan Objek Vital	Orang					1584	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.02.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Anak / Remaja Penyalahguna Lem, Tuak dan atau Obat yang dibina	Orang					53	1,99	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.02.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Pelantikan Satlinmas Desa / Kelurahan Se-Kab.Inhil	kegiatan					1	97,53	0	-	0	14,90	0	4,38	0	42,01	0	61,28					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.02.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Operasional Yustisi dan Non Yustisial yang dilaksanakan	kali					31	251,39	4	29,43	3	107,14	2	49,18	3	61,85	12	247,60					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.02.02.0	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan	Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada yang	persen					100	460,14	23,52	26,35	23,52	107,25	23,52	156,24	23,52	156,71	94,08	446,54					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.02.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Patroli Pengawasan Pelaksanaan PERDA / PERKADA, Pengawasan Disiplin PNS pada Jam Kerja Efektif dan Pengawasan Pelajar pada Jam Sekolah yang	kali					102	460,14	24	26,35	24	107,25	24	156,24	24	156,71	96	446,54					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									63,43	79,51					
											Predikat kinerja :									R	T					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-															DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								10.395,41															DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen					100	6.532,86	16,43	999,02	38	2.316,66	19,62	1.193,13	25,95	1.571,16	100,00	6.079,97					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	rata rata aspek nilai aspek perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja dalam AKIP Prangkat Daerah	Nilai					70	315,00	70	1,00	70	119,78	70	106,30	70	86,02	70	313,10					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen					5	20,00	0	0	5	19,20	0	0	0	0	5	19,20					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan					6	295,00	1	1,00	2	100,58	2	106,30	1	86,02	6	293,90					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersedian Adminstrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran	persen					100	4.331,64	19,83	785,90	33,52	1.328,62	23,05	913,87	23,6	935,69	100,00	3.964,08					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	orang					47	4.331,64	47	785,90	47	1.328,62	47	913,87	47	935,69	47	3.964,08					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian Dinas beserta atributnya dan kelengkapan lain	stell					688	564,27	0	0	688	550,50	0	0	0	11,88	688	562,38					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	Stel					688	564,27	0	0	688	550,5	0	0	0		688	550,5					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Stel					360	-	0	0	0	0	0	0	360	11,88	360	11,88					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang					5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Jumlah PNS Daerah yang telah bersertifikat sesuai keahlian dalam jabatan	Orang					3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis					3	510,76	3	96,50	3	136,39	3	56,35	3	163,51	3	452,75					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					12	4,50	12	1,00	12	1,00	12		12	2,50	12	4,50					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					23	30,00	23	12,31	23	5,17	23	12,51	23		23	29,99					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					3913	178,32	523	39,91	1420	63,22	1320	21,92	650	53,12	3913	178,17					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Porsi					3663	-	700	14,96	1500	32,04	450	9,61	1013	21,64	3663	78,25					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Jenis					5	15,85	1	0,50			2	8,23	2	11,65	5	20,38					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					1080	3,60	270	0,65	270	0,65	270	0,55	270	1,45	1080	3,30					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		1.05.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah yang dilaksanakan	Kali					50	278,49	9	10,48	14	13,00	7	7,00	20	15,00	50	45,48					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					52	-	9	25,00	14	35,00	7	18,07	22	45,00	52	123,07					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah sarana dan prasarana milik Daerah	Jenis					2	186,69							2	172,27	2	172,27					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	Unit					2	60,00							2	45,65	2	45,65					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dibangun	Unit					1	126,69							1	126,62	1	126,62					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan ketersedian administrasi sarana dan prasarana aparatur perkantoran	persen					100	340,37	25,00	84,33	24,00	81,70	25,00	84,10	26,00	86,00	100	336,13					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				cakupan ketersedian jasa penunjang pemerintah daerah	Persen					100	-									0	-					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					439	2,50	350	1,98	89	0,51					439	2,49					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					2	48,30	2	8,86	2	9,16	2	12,07	2	14,19	2	44,28					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					10	289,57	10	73,49	10	72,02	10	72,02	10	72,02	10	289,55					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					10	-	10		10		10		10		10	-					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersedian administrasi sarana dan prasarana aparatur perkantoran	Persen					100	284,13	11,21	31,28	35,72	99,65	11,65	32,51	41,42	115,56	100,00	279,00					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Jumlah kendaraan dinas jabatan / Oprasional / Lapangan yang dipelihara	unit					15	-	2	2,50	5	4,50	1	1,30	7	6,50	15	14,80					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipellihara dan dipepanjang Perizinannya	Unit					31	259,13	5	35,00	8	60,00	3	21,82	15	111,00	31	227,82					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara/Service	Unit					15	15,00			6	5,68	4	4,00	5	5,25	15	14,93					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Unit					1	10,00			1	10,00					1	10,00					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*95,49*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		1.05.03.0	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban	Persen					100	3.293,02	0,77	256,86	10	332,90	48	1.596,37	41,23	1.135,35	100,00	3.321,48					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.03.02.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan yang disediakan	Jenis					11	3.249,52	1	245,11	2	302,60	5	1.594,91	3	1.135,36	11	3.277,98					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.03.02.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang disediakan	Jenis					3	1.684,00			1	47,80	1	927,73	1	689,28	3	1.664,81					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.03.02.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan Oprasional Posko Pemadam Kebakaran	Jenis					11	1.565,52	1	245,12	2	254,80	5	667,18	3	446,07	11	1.613,17					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.03.02.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah mitra kelembagaan penanganan kebakaran yang dibentuk di kecamatan dan hari jadi damkar	persen					100	43,50	26,99	11,74	69,68	30,30	3,33	1,45	0	-	100,00	43,49					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.03.02.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Pemadam kebakaran	Kali					1	43,50		11,74	1	30,30		1,45	0	-	1	43,49					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*100*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Non Kebakaran	Persen					100	569,53	0	0	37	81,47	53	116,52	10	20,92	100,00	218,91					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.02.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi dan penanganan bahan beracun	Jenis					58	464,76	0	0	23	60,05	35	87,36	0	-	58	147,41					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.02.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Orang					100	50,00		0	100	49,67		-	0	-	100	49,67					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.02.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran	Persen					1	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.02.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	sarana dan prasarana peralatan pemadam kebakaran yang disediakan	Jenis					1	414,76	0	0	0	10,38	1	87,36	0	-	1	97,74					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.02.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Oprasional pencegahan bahaya kebakaran yang direhabilitasi	Unit					1	-	0	0	0		0		0	-	0	-					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.02.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah peralatan proteksi peralatan yang didata	Objek					271	54,77		0	70	8,34	81	13,64	120	17,03	271	39,01					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Jumlah peralatan proteksi peralatan yang didata	Unit					271	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.02.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Peralatan Proteksi kebakaran yang diperiksa	Unit					6393	54,77		0	1000	8,34	2393	13,64	3000	17,03	6393	39,01					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.02.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persen					90	-	0	0	0		0		0		0	-					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.02.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Kejadaian kebakaran yang di Investigasi	Kejadian					9	50,00	0	0	3	13,07	3	15,52	3	3,88	9	32,47					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.02.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	terlaporkannya dalam pengawasan	Bulan					12	50,00	0	0	6	13,07	3	15,52	3	3,88	12	32,47					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.02.04.0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								-	0	0	0	-	0		0	-	0	-					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.02.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan/Pemberdayaan	Orang					1	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*55,96*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*R*					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-															BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								8.897,37															BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai					19	4.806,46	-	779,87	-	1.312,79	-	1.137,54	-	1.044,35	-	4.274,56					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen					100	132,223	26,67	13,101	47,33	32,102	10	10,452	16	42,908	100	99					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Program Keerja yang disusun	Dokumen					9	5,16	3	1,30	6	3,86		-		-	9	5,16					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan					25	127,07	5	11,80	7	28,25	5	10,45	8	42,91	25	93,40					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen					100	3.719,54	21,32	647,313	27,21	1.107,154	36,03	820,842	15,44	770,791	100	3.346					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	3.662,44	1	640,91	1	1.090,10	1	794,39	1	769,86	1	3.295,27					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Laporan					17	57,10	3	6,40	5	17,05	8	26,45	1	0,93	17	50,83					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen					100	91,60	0		0		100	32	150,00	58	250	90,010					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	Stel					40	91,60	0	-	0	-	40	31,60	60	58,41	100	90,01					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen					100	594,90	35,97	72,84	43,78	107,36	50,67	204,48	44,79	97,06	100	481,740					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					8	8,80	8	1,61	8	2,95	8	2,19	8	2,05	8	8,80					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					26	109,20	26	6,00	26	6,00	26	84,92	26	12,00	26	108,92					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set					11	-					6		5		11	-					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					14196	234,38	3423	46,32	3404	45,71	3946	96,62	3423	45,13	14196	233,79					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					50	-	10		15		15		10		50	-					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					6000	5,00	1534	1,31	3012	2,24	1232	1,10	222	0,30	6000	4,94					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					59	8,60		-	12	0,84	25	2,52	23	3,36	60	6,72					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					43	228,91	7	17,60	13	49,61	11	17,13	12	34,22	43	118,57					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					55	-	12		14		19		10		55	-					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen					100	123,33	20,99	26,50	27,16	27,90	25,31	39,59	26,54	27,37	100	121,355					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) K	Rp (Juta)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020 K	Rp (Juta)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) K	Rp (Juta)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan TW I K	Rp (Juta)	TW II K	Rp (Juta)	TW III K	Rp (Juta)	TW IV K	Rp (Juta)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi K	Rp (Juta)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021 K	Rp (Juta)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021 K	Rp (Juta)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		1.05.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					270	2,50	35	0,39	85	1,02	70	0,18	80	0,91	270	2,50					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					4	61,50	4	14,18	4	14,38	4	15,68	4	15,28	4	59,53					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					6	59,33	6	11,92	6	12,50	6	23,72	6	11,18	6	59,33					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen					100	144,88	11,94	20,12	18,86	38,28	49,02	30,58	20,19	47,81	100	136,80					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipellihara dan dipepanjang Perizinannya	Unit					21	123,00	5	20,00	6	37,09	4	12,75	6	45,81	21	115,66					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					53	-									0	-					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					25	6,00	3	0,12	7	1,19	7	1,96	8	2,00	25	5,27					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Ruang					1	15,88	0	-	0	-	1	15,87			1	15,87					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									130	89,43					
											Predikat kinerja :									ST	T					
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan	Persen					100	4.839,704	5,5	502,085	40,43	601,681	43,83	2.182,057	10,23	922,213	100	4.208,04					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.02.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penurunan warga yang terdampak bencana	persen					100	2.378,55	0	51,84	35,18518519	133,93	64,81481481	1.293,14	0	86,64	100	1.566					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.02.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat SDM / Masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan	kali					1	832,00	0	13,676	0	13,065	1	33,604	0	17,900	1	78,244					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.02.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana penanggulangan Bencana yang tersedia	Unit					27	123,69	0	8,640	7	67,580	20	17,910	0	20,033	27	114,163					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.02.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis kerusakan yang diakibatkan oleh bencana	Kali					2	61,15	0	3,894	1	10,288	1	11,062	0	9,671	2	34,914					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.02.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah dokumen mitigasi bencana	Lokasi					1	70,60	0	14,076	1	21,009	0	12,385	0	9,000	1	56,470					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.02.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kerusakan pasca bencana	Kali					1	1.270,35	0	11,550	0	21,992	1	1.218,178	0	9,393	1	1.261,112					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
											-									0	-					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.02.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TRC yang Terlatih	Orang					51	20,77	0	-	0	-	0	-	51	20,646	51	20,646					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.02.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan evakuasi yang berhasil terlaksana	persen					100	2.461,15	11,04	450,25	45,67099567	467,75	22,83549784	888,92	20,4545455	835,57	100	2.642,487					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.02.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Bencana yang di tanggulangi	Orang					77	2.345,52	9	427,607	12	409,848	28	879,561	28	825,920	77	2.542,936					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah Tim Reaksi Cepat siaga dan operasinal penanggulangan bencana	Orang					50	-	0								0	-					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.02.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Korban Bencana yang disediakan	Paket					33	115,63	0	22,643	33	57,900		9,359		9,650	33	99,551					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah Opersi pengiriman, evaluasi dan pemantauan logistik bencana	Kali					28	-	6		6		9		7		28	-					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									100	87					
											Predikat kinerja :									ST	T					
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-															
		1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		12.706,30						12.706,30															
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai					22	5.850,75	-	865,09	-	1.486,98	-	1.129,65	-	1.869,00		5.350,72					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai	Persen					100	36.00	20	6.00	20	9.00	20	9.00	40	12.00	100	36.00					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan					5	36,00	1	6,00	1	9,00	1	9,00	2	12,00	5	36,00					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai	Persen					100	3.868,85	25	700,05	25	1.192,90	25	854,42	25	838,68	100	3.586,05					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TOTAL GAJI ASN	Tahun					1	3.868.85	3	700.05	3	1.192.90	3	854.42	3	838.68	12	3.586.05					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen					100	70.81	0.00	-	16.67	9.98	22.22	10.22	33.33	41.23	72.22	61.43					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang	Kali					6	70.81	-	-	3	9.98	2	10.22	2	41.23	7	61.43					DINAS SOSIAL
				Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan	Kali					3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen					90	971,02	18,05	51,39	13,85	165,40	19,10	113,74	29,10	490,33	80,09	820,85					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					9	2,99	3	0,78	-	-	5	1,72	1	0,36	9	2,85					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					24	190,49	6	6,66	6	7,82	6	9,47	6	9,20	24	33,14					DINAS SOSIAL
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Unit					21	-		-		-		-	21	149.50	21	149.50					DINAS SOSIAL
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan yang	Jenis					10	-	3	0.76	-	-	6	1.47	1	0.31	10	2.54					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					5819	65,31	-	-	982,9	7,73	23,41	0,24	431,8	4,76	1.438	12,72					DINAS SOSIAL
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Porsi					2608	-	133	4,34		-	106	2,17	1812	43,44	2.051	49,95					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan yang disedikan	Jenis					14	38,46	2	1,56	3	4,48	4	9,52	5	11,31	14	26,86					DINAS SOSIAL
				Jumlah Penggandaaan yang disediakan	Lembar					39584	-	9716	2.43	9404	2.35	11858	2.96	8564	2.14	39542	9.89					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					46	337.20	34	1.05	12	54.60		72.00		204.30	46	331.95					DINAS SOSIAL
				Jumlah Media Online yang disediakan	Kegiatan					1	-					1		3		4	-					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah dan Dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					137	336,58	16	33,82	52	88,42	8	14,20	55	65,02	131	201,45					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang	Persen					100	430.39	25.00	73.41	25.00	101.75	25.00	102.39	25.00	141.63	100.00	419.18					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					512	5.12	-	-	-	-	-	-	512	5.12	512	5.12					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					8	89,27	8	17,41	8	17,75	8	18,39	8	24,51	8	78,06					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					3	336,00	3	56,00	3	84,00	3	84,00	3	112,00	3	336,00					DINAS SOSIAL
				Jumlah Petugas Kebersihan yang dibayarkan	Orang					2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-					DINAS SOSIAL
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					22	-	22	-	22	-	22	-	22	-	22	-					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan	Persen					100	473,69	11,87	34,24	12,79	7,96	21,80	39,89	42,42	345,13	88,89	427,22					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	Unit					11	91,30	3	33,06	3	7,09	2	17,13	3	20,41	11	77,69					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara/Service	Unit					36	15.12	3.00	1.18	4.00	0.87	5.00	2.85	12.00	7.87	24	12.77					DINAS SOSIAL
		1.06.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Ruang					3	367,27	-		-		1.00	19.91	2.00	316.86	3	336.77					DINAS SOSIAL
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									95,58	92,96					
											Predikat kinerja :									ST	ST					
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang menerima program	Persen					100	2.206.45	0.00	69.07	0.00	106.28	3.57	217.83	82.14	1.630.64	85.71	2.023.82					DINAS SOSIAL
		1.06.02.02.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat	Persen					100	564.91	0.00	21.23	0.00	21.52	0.00	14.76	100.0	395.48	100	452.98					DINAS SOSIAL
		1.06.02.02.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Barang Daerah yang dibantu	kelompok					8	564,91	-	21,23	-	21,52	-	14,76	8	395,48	8	452,98					DINAS SOSIAL
				Jumlah Masyarakat Miskin, Perorangan, Keluarga dan KAT yang diberi bantuan	orang					240	-							240		240	-					DINAS SOSIAL
		1.06.02.02.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS)	Persen					100	1.641,54	0,00	47,84	0,00	84,76	7,14	203,07	64,29	1.235,16	71,43	1.570,83					DINAS SOSIAL
		1.06.02.02.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Pahlawan, Veteran Pejuang maupun Pembela Kemerdekaan yang diberi Tali Asih.	orang					154	221,47	-	-	-	13,38	77	88,74	77	110,78	154	212,90					DINAS SOSIAL
		1.06.02.02.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Barang Daerah yang dibantu	kelompok					7	685,14		43,86		51,01		96,89	7	464,01	7	655,78					DINAS SOSIAL
				Jumlah Masyarakat dan Kelompok Masyarakat yang	orang					120	-	0	-	0	-	0	-	120	-	120	-					DINAS SOSIAL
				Jumlah Tali Asih TKSK yang diberikan	orang					20	-							20		20	-					DINAS SOSIAL
		1.06.02.02.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Kelembagaaan Masyarakat yang diberdayakan dan Jumlah Rekomendasi Izin Sumbangan yang	orang					32	734,93		3,98		20,37		17,44		660,37	0	702,16					DINAS SOSIAL
				Jumlah Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Barang Daerah yang dibantu	kelompok					13	-							13		13	-					DINAS SOSIAL
				Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitass SDM dan Peningkatan Kesejahteraan di bidang agama	Kecamatan					20	-									0	-					DINAS SOSIAL
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									85,71	87,94					
											Predikat kinerja :									T	T					
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase korban Tindak Kekerasan yang menerima bantuan sosial	Persen					100	192,42	10,77	10,03	7,69	23,07	0,00	4,35	6,15	40,74	24,62	78,19					DINAS SOSIAL
		1.06.03.02.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Penanganan orang terlantar	Persen					100	192,42	10,77	10,03	7,69	23,07	0,00	4,35	6,15	40,74	24,62	78,19					DINAS SOSIAL
		1.06.03.02.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke	Jumlah terbantunya Pemulangan Pengemis, Gelandangan serta Orang Terlantar	orang					65	192,42	7	10,03	5	23,07	-	4,35	4	40,74	16	78,19					DINAS SOSIAL
											-															
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									24,62	40,63					
											Predikat kinerja :									SR	SR					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi	Persen					100	1.315,59	10,42	152,84	14,62	227,29	19,30	239,05	46,58	603,65	90,92	1.222,82					DINAS SOSIAL
		1.06.04.02.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Persen					100	111,76	9,52	10,30	14,29	14,50	28,57	30,35	47,62	41,21	100	96,37					DINAS SOSIAL
		1.06.04.02.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas yang diberikan pelayanan dan yang di bantu	orang					21	111,76	2	10,30	3	14,50	6	30,35	10	41,21	21	96,37					DINAS SOSIAL
																				0						DINAS SOSIAL
		1.06.04.02.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Persen					100	1.203,83	11,32	142,54	14,96	212,79	10,03	208,70	45,53	562,43	81,84	1.126,46					DINAS SOSIAL
		1.06.04.02.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Pendamping dan Operator PSH yang ditingkatkan Kanasitas SDMnya	orang					89	633,14	3	87,93	3	155,17	3	147,72	3	191,30	12	582,12					DINAS SOSIAL
		1.06.04.02.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Koordinasi Eks Penyandang Penyakit Sosial	kali					8	40,02	3	8,28	4	15,39	1	4,84	-	7,25	8	35,76					DINAS SOSIAL
		1.06.04.02.02.013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang diberikan pelayanan	orang					350	530,67		46,33		42,23		56,14	350	363,88	350	508,58					DINAS SOSIAL
				Jumlah LKS yang dibantu	LKS					2	-							2		2	-					DINAS SOSIAL
				Jumlah Pasien Rujukan yang diberikan Pelayanan	orang					70	-	11		15		24		17		67	-					DINAS SOSIAL
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***90,92***	***89,90***				
											Predikat kinerja :									***T***	***T***				
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS Yang Mendapat Perlindungan	Persen					100	2.550,07	7,54	58,56	6,46	77,09	11,61	242,39	74,40	1.659,50	100,00	2.037,53					DINAS SOSIAL
		1.06.05.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Fakir Miskin	Persen					100	2.550,07	7,54	58,56	6,46	77,09	11,61	242,39	74,40	1.659,50	100,00	2.037,53					DINAS SOSIAL
		1.06.05.02.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Verival Data yang dilaksanakan	KPM					64.139	1.870,29	9570	54,58	2555	53,65	2599	200,98	49415	1.367,36	64139	1.676,57					DINAS SOSIAL
		1.06.05.02.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Barang Daerah yang dibantu	kelompok					13	679,78	1	3,98	2	23,44	4	41,41	6	292,14	13	360,96					DINAS SOSIAL
				Jumlah Masyarakat/ Stake Holder dan RTSM yang	orang					250	-							250		250	-					
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***79,90***				
											Predikat kinerja :									***ST***	***T***				
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen					100	545,44	5,00	35,92	30,00	59,04	10,00	133,67	35,00	215,96	80	444,59					DINAS SOSIAL
		1.06.06.02.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian bencana alam yang di tangani	Kecamatan					20	545,44	5,00	35,92	30,00	59,04	10,00	133,67	35,00	215,96	80,00	444,59					DINAS SOSIAL
		1.06.06.02.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah kejadian bencana alam yang di tangani	Kecamatan					20	545,44	1	35,92	6	59,04	2	133,67	7	215,96	16	444,59					DINAS SOSIAL
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***80,00***	***81,51***				
											Predikat kinerja :									***T***	***T***				
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	Persen					100	45,59	0,00	2,00	0,00	5,60	100,00	30,13	0,00	7,28	100	45,01					DINAS SOSIAL
		1.06.07.02.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Persentase Taman makam Pahlawan yang	Persen					100	45,59	0,00	2,00	0,00	5,60	100,00	30,13	0,00	7,28	100,00	45,01					DINAS SOSIAL
		1.06.07.02.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabunaten/Kota	Jumlah pemeliharaan Taman makam pahlawan	unit					1	45,59	-	2,00	-	5,60	1	30,13	-	7,28	1	45,01					DINAS SOSIAL
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***98,74***				
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***				
		2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-															
		2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								6.336,16		934,13		1.464,40		1.168,96		1.655,00							
		2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai					19	5.274,96		831,94		1.346,21		1.000,30		1.065,60	0	4.244,04					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen					4	77,04		4,30		10,35		9,91		31,70	0	56,25					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	laporan					5	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen					4	47,21	1	4,30	1	9,55	1	9,61	1	19,82	4	43,27					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	laporan					5	29,84	1	-	1	0,80	2	0,30	1	11,88	5	12,98					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	orang					32	4.418,34		672,46		1.116,02		770,66		839,66	0	3.398,80					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji ASN	Tahun					1	4.418,34	1	672,46	1	1.116,02		770,66		839,66	1	3.398,80					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	jenis					3	356,71	3	74,71	3	99,40	3	116,07	3	91,16	3	381,34					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	eksp					50	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis					9	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis					2	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah jenis peletan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis					4	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Persentase sarana prarasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	persen					100	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	jenis					3	2,93	3	1,38		-	3	0,60	3	0,95	3	2,92					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis					4	17,10		-	1	4,00	3	6,80		6,00	4	16,80					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis					9	29,28	9	7,78	9	12,30	9	7,78	9	1,15	9	29,01					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	jenis					2	10,01	2	1,88	2	0,50	2	26,63	2	18,42	2	10,58					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					50	5,00		-	50	5,00		-		-	50	5,00					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali					77	292,39	14	63,67	21	77,60	19	74,26	23	101,49	77	317,03					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	persen					100	351,42		75,20		77,97		89,67		91,79	0	334,63					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah Rekening yang dibayarkan	rekening					3	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	orang					11	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Persentase ketersediaan jasa penunjang opersinal kantro	persen					100	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	persen					100	153,86	24,43	36,06	22,69	34,91	26	40,12	26,88	42,72	100	153,81					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					3	52,80	3	2,51	3	9,11	3	12,55	3	11,90	3	36,06					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang					11	144,76	11	36,64	11	33,95	11	37,00	11	37,17	11	144,76					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					2	71,45		5,27		42,48		13,99		11,29	0	73,03					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	unit					12	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang disediakan	unit					17	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit					20	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	persen					100	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit					11	11,00	4	5,27	2	1,39	3	2,50	6	6,80	11	15,96					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit					8	8,00		-		-	3	1,52	5	3,19	8	4,71					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					13	12,50		-	4	4,19	7	6,93	2	1,30	13	12,42					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit					2	39,95		-	2	36,90		3,05		-	2	39,95					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***90,57***				
											Predikat kinerja :									***ST***	***T***				
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KER	Peresentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatih	Persen					100	223,774		46,55		37,62	100	71,93		65,93	100	222,03					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.03.02.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan berbasis Kompetensi	orang					20	223,77		46,55		37,62	20	71,93		65,93							DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.03.02.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kompetensi	orang					20	223,77		46,55		37,62	20	71,93		65,93	20	222,03					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***99,22***				
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen					75	554,92	0,75	23,14	35	36,33	30	33,72	9,25	394,23	75	487,42					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.02.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja	orang					3000	554,92	30	23,14	1400	36,33	1200	33,72	370	394,23	3000	487,42					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah pencari kerja yang terserap	orang					300	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam bentuk kelompok kerja	orang					300	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.02.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Orang					3000	69,60	30	11,31	1400	20,89	1200	16,46	370	- 31,66	3000	17,00					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.02.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam bentuk kelompok kerja sementara	Orang					300	485,32		11,83		15,44		17,26	300	425,89	300	470,42					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
										Rata-rata capaian kinerja (%) :											*100*	*87,84*				
										Predikat kinerja :											*ST*	*T*				
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen					100	282,50		32,50	7,7	44,25	15,38	63,01	15,38	129,24	38,46	269,00					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Persentase Kasus yang diselesaikan denga Perjanjian Bersama (PB)	persen					50	-			7,7		15,38		15,38		38,46	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.05.02.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan di Kab. Inhil	kasus					10	282,50	1	32,50	3	44,25	5	63,01	4	129,24	13	269,00					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.05.02.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir	kasus					10	60,00	1	5,65	3	12,74	5	8,65	4	32,23	13	59,27					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.05.02.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Survey KHL yang dilakukan	Kali					3	100,00		9,19	1	18,53	3	35,15		32,12	4	94,98					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		2.07.05.02.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Keselahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar di jamsostek	Orang					40701	122,50		17,67		12,98		19,21	40701	64,89	40701	114,76					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
										Rata-rata capaian kinerja (%) :											*121*	*95,81*				
										Predikat kinerja :											*ST*	*ST*				
																										DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		3.032.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								305,00		21,21		54,55		86,89		114,62							DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		3.032.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	persen					100	241,16	13,33	21,21	28,89	39,69	28,89	70,24	28,89	97,76	100	228,90					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		3.032.03.02.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/laporan kondisi sarana prasarana wilayah transmigrasi	laporan					1	241,16	1	21,21		39,69		70,24		97,76	1	228,90					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah dokumen pengelolaan penempatan transmigrasi	dokumen					1	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah lokasi transmigrasi yang dikelola	lokasi					1	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah lokasi yang diberikan penyuluhan/pengarahan	lokasi					1	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah warga transmigrasi yang dibina	orang					225	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		3.032.03.02.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah dokumen/laporan kondisi sarana prasarana wilayah transmigrasi	Laporan					1	40,00	1	-		10,57		2,90		21,45	1	34,92					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		3.032.03.02.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Transmigrasi yang dikelola	Lokasi					1	50,00		6,51		5,95		16,32		21,16	0	49,94					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		3.032.03.02.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah lokasi yang diberikan penyuluhan/pengarahan	Lokasi					1	120,00	1	12,69	1	18,13	1	45,87	1	43,00	1	119,69					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		3.032.03.02.01.07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang dibina	KK					225	31,16	30	2,01	65	5,04	65	5,15	65	12,15	225	24,35					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
										Rata-rata capaian kinerja (%) :											*100*	*94,92*				
										Predikat kinerja :											*ST*	*ST*				
		3.032.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	Persen					100	63,84		-	33,33	14,86	33,33	16,65	33,34	16,86	100	48,37					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		3.032.04.02.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah lokasi Transmigrasi yang dikelola	lokasi					1	63,84		-	1	14,86		16,65		16,86	1	48,37					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pengarahan	orang					225	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah warga transmigrasi yang mengelola prasarana, sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	orang					225	-									0	-					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		3.032.04.02.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pengarahan	orang					225	30,59		-	75	7,05	75	6,24	75	8,08	225	21,37					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		3.032.04.02.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah warga transmigrasi yang mengelola prasarana, sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	orang					225	33,25		-	75	7,81	75	10,41	75	8,78	225	27,00					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
										Rata-rata capaian kinerja (%) :											*100*	*75,77*				
										Predikat kinerja :											*ST*	*S*				
		2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-															DP2KBP3A
		2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								2.524,93															DP2KBP3A
		2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Anaratur Perkantoran	Persen					100	1.032,00	0,00	67,94	4,44	176,55	11,11	231,93	29,44	436,37	45,00	912,79					DP2KBP3A
		2.08.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen					80	68,68	0	4,06	17,78	15,45	44,44	27,45	17,78	16,85	80	63,823					DP2KBP3A
		2.08.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen					9	68,68	0	4,06	2	15,45	5	27,45	2	16,85	9	63,82					DP2KBP3A
		2.08.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen					100	301,47	-	15,07	0,00	57,84	0,00	96,93	0,00	52,53	0,00	222,36					DP2KBP3A
		2.08.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis					4	2,00	0	0	2	0	1	1,46	1	0,54	4	2					DP2KBP3A
		2.08.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis					6	50,00	0	0	0	0	5	47,017	1	1,95	6	48,97					DP2KBP3A
		2.08.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis					3	21,18	0	3,26	1	5,63	1	5,25	1	5,75	3	19,89					DP2KBP3A
		2.08.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis					19	25,49	0	0	5	9,44	9	13,01	5	2,98	19	25,43					DP2KBP3A
		2.08.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					480	6,00	120	1,11	120	0,72	120	0,91	120	1,61	480	4,35					DP2KBP3A
		2.08.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali					68	196,80	10	10,70	30	42,04	20	29,29	8	39,704	68	121,73					DP2KBP3A
		2.08.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen					100	323,79	-	48,81	0,00	81,42	0,00	84,11	0,00	85,30	0,00	299,64					DP2KBP3A
		2.08.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen					100	6,00	0	0	0	0	50	3,56	50	2,43	100	5,98					DP2KBP3A
		2.08.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					8	84,80	8	14,81	8	16,12	8	15,59	8	17,15	8	63,67					DP2KBP3A
		2.08.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang					21	232,99	21	34,00	21	65,30	21	64,96	21	65,73	21	229,99					DP2KBP3A
		2.08.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen					100	338,06	0	0	0	21,84	0,00	23,44	100,00	281,69	100,00	326,97					DP2KBP3A
		2.08.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit					34	51,78	0	0		17,74		4,06	34	24,90	34	46,70					DP2KBP3A
		2.08.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					48	16,00	0	0		4,10		4,38	48	2,7	48	11,18					DP2KBP3A
		2.08.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					2	270,28		0		0		14,99	2	254,09	2	269,09					DP2KBP3A
										Rata-rata capaian kinerja (%) :											*100,00*	*88,99*				
										Predikat kinerja :											*ST*	*T*				
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen					1,81	396,05	0,5	7,65	0,2	54,32	0,70	39,77	0,30	209,66	1,70	311,40					DP2KBP3A
		2.08.02.02.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PUG dengan kategori baik	Persen					5	70,29	0	4,74	0	7,06	0,00	21,53	5,00	22,85	5,00	56,18					DP2KBP3A
		2.08.02.02.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengintegrasikan Perencanaan, Penganggaran yang responsif Gender	OPD					380	70,29		4,74		7,06		21,53	380	22,85	380	56,18					DP2KBP3A
		2.08.02.02.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persen					100	37,55	0	0,00	100	15,67	0	7,50	0	9,41	100	32,5778					DP2KBP3A
		2.08.02.02.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Orang					40	37,55	0	0	40	15,67		7,50		9,4078	40	32,58					DP2KBP3A
		2.08.02.02.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persen					100	288,21	0	2,91	0	31,59	0	10,74	100	177,41	100	222,648					DP2KBP3A

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		2.08.02.02.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga					3	288,21		2,91		31,59		10,74	3,00	177,41	3,00	222,65					DP2KBP3A
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*81,31*				
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*				
		2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan**	**Persen**					**5**	**167,38**	**0**	**0**	**0**	**29,78**	**0,00**	**26,42**	**3,00**	**25,40**	**3,00**	**81,61**					**DP2KBP3A**
		2.08.03.02.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabunaten/Kota**	**Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan**	**Persen**					**100**	**102,18**		**0**		**29,78**		**26,42**	**100,00**	**22,75**	100,00	78,96					**DP2KBP3A**
		2.08.03.02.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabunaten/Kota	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Informasi dan Edukasi tentang Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	Orang					40	102,18	0	0		29,78		26,42	40,00	22,75	40,00	78,96					DP2KBP3A
		2.08.03.02.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**	**Persen**					**100**	**65,20**	**25**	**0**	**25**	**0**	**25**	**0**	**25**	**2,65**	100	2,65					**DP2KBP3A**
		2.08.03.02.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Advokasi tentang Perlindungan terhadap tindak Kekerasan	Orang					43	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					DP2KBP3A
		2.08.03.02.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabunaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Orang					20	65,20	5	0	5	0	5	0	5	2,65	20	2,65					DP2KBP3A
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*40,67*				
											Predikat kinerja :									*ST*	*SR*				
		2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam upaya peningkatan kualitas keluarga**	**Persen**					**100**	**78,67**	**0**	**0**	**0**	**12,25**	**50,00**	**33,67**	**50,00**	**27,01**	**100,00**	**72,93**					**DP2KBP3A**
		2.08.04.02.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pendampingan dalam peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persen**					**100**	**78,67**		**0**		**12,25**	**50,00**	**33,67**	**50,00**	**27,01**	100,00	72,93					**DP2KBP3A**
		2.08.04.02.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Informasi tentang Kesejahteraan dan Keadilan Gender yang diterbitkan	Terbitan					1	42,85	0	0		4,92	1	33,67		2,00	1,00	40,59					DP2KBP3A
		2.08.04.02.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Keluarga	Kebijakan					1	35,82	0	0	0	7,33	0,00	0,00	1,00	25,01	1,00	32,34					DP2KBP3A
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*92,70*				
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*				
		2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak**	**Persen**					**100**	**156,70**	**0**	**0**		**34,03**	**0,00**	**19,42**	**100,00**	**100,39**	**100,00**	**153,85**					**DP2KBP3A**
		2.08.06.02.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**Persen**					**100**	**156,70**	**0**	**0**	**0**	**34,03**	**0,00**	**19,42**	**100,00**	**100,39**	100,00	153,85					**DP2KBP3A**
		2.08.06.02.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pencapaian Klaster Hak Anak	Klaster					1	156,70	0	0	0	34,03	0,00	19,42	1,00	100,39	1,00	153,85					DP2KBP3A
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*98,18*				
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*				
		2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan Pemenuhan Anak yang berkebutuhan Khusus**	**Persen**					**100**	**694,13**		**11,00**		**52,49**		**97,35**	**50**	**184,96**	**50**	**345,791**					**DP2KBP3A**
		2.08.07.02.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Persen					100	694,13							50,00		50,00	0,00					**DP2KBP3A**
		2.08.07.02.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kasus Anak yang ditangani	Kasus					16	-	0		0				0		0	0					DP2KBP3A
		2.08.07.02.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan Informasi dan Edukasi tentang Perlindungan terhadap Tindak Kekerasan	Orang					180	694,13		11,00		52,49		97,35	90,00	184,96	90	345,79					DP2KBP3A
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*50,00*	*49,82*				
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*				
		2.014	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								**10.875,83**															**DP2KBP3A**
		2.014.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**4.373,55**	**25**	**754,00**	**25,00**	**1300,24**	**25,00**	**913,48**	**25,00**	**901,72**	**100,00**	**3869,44**					**DP2KBP3A**
		2.014.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**4.373,55**	**25**	**754,00**	**25,00**	**1300,24**	**25,00**	**913,48**	**25,00**	**901,72**	100,00	3869,44					**DP2KBP3A**
		2.014.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang					37	4.373,55	37	754,00	37,00	1300,24	37,00	913,48	37,00	901,72	37,00	3869,44					DP2KBP3A
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*88,47*				
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*				
		2.014.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Jumlah Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Kebijakan**					**1**	**48,46**	**1**	**0**	**1**	**22,34**	**1,00**	**5,01**	**1**	**13,08**	**1,00**	**40,44**					**DP2KBP3A**
		2.014.02.02.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Mitra dalam Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Program KKBPK**	**Mitra**					**2**	**48,46**	**0**	**0**	**0**	**22,34**	**0,00**	**5,01**	**2**	**13,08**	2,00	40,44					**DP2KBP3A**
		2.014.02.02.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan terkait Program KKBPK	Kebijakan					1	48,46	0	0	0	22,342	0,000	5,013	1	13,08	1,00	40,44					DP2KBP3A
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*83,45*				
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*				
		2.014.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif**	**Persen**					**90**	**5.282,72**	**0,00**	**3,98**	**0,00**	**470,50**	**0,00**	**706,73**	**0,00**	**1455,52**	**0,00**	**2636,73**					**DP2KBP3A**
		2.014.03.02.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Cakupan Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK**	**Kampung KB**					**14**	**1.236,78**		**0**	**14**	**194,68**	**14,00**	**198,03**	**14,00**	**356,82**	14,00	749,53					**DP2KBP3A**
				Dukungan Manajemen dan Media KIE	Kamnung KB					14										0	0					DP2KBP3A
		2.014.03.02.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Monitoring BOKB dan Penyediaan KIE	Lokasi					18	221,73	5		5,00	30,56	5,00	9,41	3,00	164,89	18,00	204,86					DP2KBP3A
		2.014.03.02.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Laporan					20	1.015,06	14		14	164,12	14	188,62	14	191,928	14	544,668					DP2KBP3A
		2.014.03.02.01.08	Penanendalian Proaram KKBPK	Kelomnok PIK R/M yang dibentuk	Kelomnok					8		0		0		0		0		0	0					DP2KBP3A
		2.014.03.02.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Cakupan Ketersediaan Tenaga Penyuluh/Petugas Lapangan (PKB/PLKB)**	**Persen**					**100**	**1.182,80**		**0**		**150,12**		**269,28**	**100,00**	**632,06**	100,00	1051,46					**DP2KBP3A**
		2.014.03.02.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader IMP yang mendapatkan Pembinaan Program KKBPK	Orang					50	1.182,80				150,12		269,28	50,00	632,06	50,00	1051,46					DP2KBP3A
																										DP2KBP3A
		2.014.03.02.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabunaten/Kota**	**Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Faskes KB)**	**Fasilitas Kesehatan**					**38**	**1.785,58**	**38**	**3,98**	**38,00**	**18,35**	**38,00**	**209,07**	**38,00**	**311,83**	38,00	543,23					**DP2KBP3A**
		2.014.03.02.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Lokasi Kegiatan PUS Ber-KB bagi Keluarga Miskin	Lokasi					1	1.234,88	0	0		6,56		101,66	1,00	73,60	1,00	181,82					DP2KBP3A
											-									0	0					DP2KBP3A
		2.014.03.02.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lokasi Pencatatan/Pendistribusi Alkon	Faskes					38	88,50	38	0	38	0	38	56,48	38,00	28,47	38,00	84,95					DP2KBP3A
		2.014.03.02.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Program KB	Unit					108	418,59	0	0	0	0		33,00	108,00	209,76	108,00	242,76					DP2KBP3A
		2.014.03.02.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reoroduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelomnok Kegiatan	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Materi tentang Kesehatan Renroduksi Remaja	Sekolah					1	10,07	0	0		6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70					DP2KBP3A
		2.014.03.02.03.011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Peserta Akseptor KB aktif dan baru yang mendapatkan Pelayanan KB	Orang					50	33,55		3,98		5,10	50,00	17,93	0,00	0,00	50,00	27,00					DP2KBP3A
		2.014.03.02.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Faskes KB)**	**Fasilitas Kesehatan**					**38**	**1.077,55**	**38**	**0,00**	**38,00**	**107,35**	**38,00**	**30,36**	**38,00**	**154,82**	38,00	292,52					**DP2KBP3A**
		2.014.03.02.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi					1	80,75				11,41		30,36	1,00	27,04	1,00	68,80					DP2KBP3A
		2.014.03.02.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pengelolaam Program KKBPK	Lokasi					20	996,80	14	0	14	95,94	14	0	14	127,78	14	223,72					DP2KBP3A
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*87,50*	*69,72*				
											Predikat kinerja :									*T*	*S*				
		2.014.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Cakupan Anggota Kelompok Kegiatan Ber-KB**	**Persen**					**60**	**1.171,11**	**0**	**3,75**	**0**	**21,47**	**0,00**	**188,38**	**30,00**	**335,73**	**30,00**	**549,34**					**DP2KBP3A**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		2.014.04.02.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Cakupan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persen**					60	981,11	0	3,75	0,00	9,81	0,00	182,68	0,00	335,73	0,00	531,98					DP2KBP3A
		2.014.04.02.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Penyediaan sarana Penunjang Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga	Unit					26	339,82	0	0	0	0	0	0	26	335,55	26,00	335,55					DP2KBP3A
		2.014.04.02.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Anggota Poktan yang dilatih untuk peningkatan peran dan fungsi tribina dan UPPKS	Orang					65	42,29		3,75		9,81	30,00	22,43		0,18	30,00	36,17					DP2KBP3A
		2.014.04.02.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Lokasi Penyediaan Operasional Kelompok Kegiatan	Lokasi					20	599,00	0	0	0	0	14	160,25	0	0	14	160,25					DP2KBP3A
		2.014.04.02.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persen**					60	190,00	0	0,00	0,00	11,66	0,00	5,70	60,00	0,00	60,00	17,36					DP2KBP3A
		2.014.04.02.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah mitra Organisasi kemasyarakatan dalam Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kelompok					1	190,00	0	0		11,66		5,70	1,00	0,00	1,00	17,36					DP2KBP3A
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*50,00*	*31,68*					
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					
		2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								-															**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**15.656,99**															**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**					19	6.663,25	-	1.078	-	1.826	-	1.546	-	1.354	-	5.804					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun**	**Dokumen**					11	74,21	9	5,51	0	19,71	2	19,71	0	23,2317	11	68,164					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.011.02.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Alat Berat, Kendaraan dan Penunjang Operasional Lainnya yang dipelihara	Jenis					6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				Jumlah Kendaraan dan Sarana Prasarana Penunjang Operasional Lainnya	Jenis					17	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen					11	74,21	9	5,51	0	19,71	2	19,71	0	23,2317	11	68,164					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.02.0	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan**	**Orang**					40	4.614,12	40	776,22	40	1.276,57	40	960,41	40	926,06	40	3.939,25					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	4.614,12	1	776,22	1	1.276,57	1	960,41	1	926,06	1	3.939,25					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan**	**Orang**					13	229,20	13	35,80	13	89,50	13	52,80	13	35,20	13	213,30					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Orang					13	229,20	13	35,80	13	89,50	13	52,80	13	35,20	13	213,30					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal**	**Kali**					**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kali					3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan yang disediakan**	**Jenis**					**5**	**1.230,14**	**5**	**166**	**5**	**305,75**	**5**	**392,61**	**5**	**240,14**	**5**	**1.104,33**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
				Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis					1	-									0	-					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan yang disediakan	Jenis					5	17,25	0	17,24	5	-	0	-	0	-	5	17,24					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang Terbeli	Jenis					32	18,62	0	13,00	32	1,50	0	1,50	0	2,56	32	18,56					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis					4	725,00	4	75,35	4	241,27	4	288,25	4	120,13	4	725,00					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaaan	Jenis					3	7,30	1	-	1	-	1	-	0	7,30	3	7,30					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Eksemplar					7	61,16	7	0,30	7	3,50	7	27,43	7	29,92	7	61,15					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali					95	400,81	29	59,93	16	59,48	15	75,43	21	80,23	81	275,08					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor**	**Persen**					**100**	**428,60**	**28,28**	**70,82**	**25,76**	**122,95**	**26,06**	**97,20**	**19,9**	**124,92**	**100**	**415,90**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat	Persen					100	5,00	34,85	-	27,27	3,08	28,18	1,40	9,7	0,48	100	4,95					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					2	95,40	2	18,92	2	27,78	2	23,80	2	24,19	2	94,69					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarakan	Orang					27	328,20	27	51,90	27	92,10	27	72,00	27	100,26	27	316,26					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan**	**Persen**					**100**	**86,97**	**56,75**	**23,35**	**11,51**	**11,70**	**12,7**	**23,55**	**19,05**	**4,46**	**100**	**63,05**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang disediakan	Unit					6	45,00	1	21,50	1	8,15	1	15,35	3	-	6	45,00					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit					39	37,07	39	-	0	3,20	0	7,55	0	2,56	39	13,30					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					28	4,90	15	1,85	5	0,35	6	0,65	2	1,90	28	4,75					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*91,42*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		2.011.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun**	**Dokumen**					**2**	**500,87**	**2**	**5,91**	**2**	**181,67**	**2**	**147,63**	**2**	**70,19**	**2**	**405,41**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.02.02.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Persen**					**100**	**24,65**	**0**	**5,91**	**0**	-	**0**	**13,22**	**50**	-	**50**	**19,13**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.02.02.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen PPLH yang tersedia	Dokumen					2	24,65	0	5,91	0	-	0	13,22	1	-	1	19,13					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.02.02.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabunaten/Kota**	**Persentase tersusunnya Data-data untuk Penyusunan Dokumen KLHS**	**Dokumen**					**1**	**476,23**	**0**	-	**0**	**181,67**	**0**	**134,42**	**1**	**70,19**	**1**	**386,28**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.02.02.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tersedia	Dokumen					1	476,23	0	-	0	181,67	0	134,42	1	70,19	1	386,28					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*75,00*	*79,36*					
											Predikat kinerja :									*S*	*T*					
		2.011.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Air**	**Indeks**					**57,67**	**230,83**	**57,67**	**2,05**	**57,67**	**47,21**	**57,67**	**43,27**	**57,67**	**47,00**	**57,67**	**139,53**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.03.02.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Titik Lokasi Kualitas Udara dan Air Permukaan yang dimonitoring**	**Lokasi**					**8**	**104,41**	**8**	-	**8**	**8,86**	**8**	**3,91**	**8**	**31,14**	**8**	**43,90**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.03.02.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,	Jumlah Sampel Sungai yang diperiksa kualitas airnya	Sungai					3	64,04	0	-	0	4,84	0	3,91	3	31,14	3	39,88					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.03.02.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adantasi Perubahan Iklim	Jumlah Sosialisasi Kampung Iklim yang dilaksanakan	Kali					1	40,37	0	-	0	4,02	1	-	0	-	1	4,02					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.03.02.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabunaten/Kota**	**Luas Lahan yang direhabilitasi**	**Ha**					**5**	**126,42**	**5**	**2,05**	**5**	**38,35**	**5**	**39,37**	**5**	**15,86**	**5**	**95,63**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.03.02.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah lokasi yang dipantau kualitas udaranya	Lokasi					2	64,61	0	-	1	28,88	1	10,17	0	6,00	2	45,05					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.03.02.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah titik pemasangan alat pantau tinggi muka air tanah	Titik					0	61,81	0	2,05	0	9,48	0	29,20	0	9,86	0	50,58					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*58,85*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*R*					
		2.011.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar**	**Persen**					55	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.04.02.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase Luas RTH yang ditangani**	**Persen**					**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.04.02.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola	Lokasi					0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :															
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					
		2.011.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH**	**limbah B3 dan bahan berbahaya lainnya yang dikelola**	**Ton**					**3850**	**56,93**	**721,875**	**2,05**	**721,875**	**7,55**	**721,875**	**13,67**	**721,875**	**15,09**	**2887,5**	**38,36**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.05.02.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Limbah B3 yang tertangani**	**Persen**					**50**	**56,93**	**9,38**	**2,05**	**9,38**	**7,55**	**9,38**	**13,67**	**9,38**	**15,09**	**37,50**	**38,36**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.05.02.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,	Jumlah Fasyankes yang diberi sosialisasi pengelolaan limbah medis/Covid-19	Fasyankes					40	56,93	30	2,05	30	7,55	30	13,67	30	15,09	30	38,36					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 ÷ 14		16 (15/7)*100%		17
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									*75,00*	*67,37*					
										Predikat kinerja :									*S*	*S*					
		2.011.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN**	**Persentase Ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh**	**Persen**					**100**	**148,76**	**2,94**	**6,08**	**0,00**	**23,30**	**0,00**	**22,70**	**0**	**57,39**	**2,94**	**109,46**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.06.02.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabunaten/Kota**	**Persentase perusahaan yang taat aturan lingkungan secara administrasi maupun teknis**	**Persen**					**80**	**148,76**	**2,35**	**6,08**	**8,71**	**23,30**	**8,39**	**22,70**	**27,22**	**57,39**	**46,67**	**109,46**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.06.02.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi izin lingkungan yang diterbitkan	Rekomendasi					30	49,19	0	1,93	3	14,57	1	9,27	1	22,32	5	48,08					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.06.02.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang diawasi yang persetujuan lingkungannya dan atau persetujuan Pemerintah	Unit Usaha					17	99,57	1	4,15	2	8,73	3	13,43	11	35,07	17	61,38					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									*58,34*	*73,58*					
										Predikat kinerja :									*R*	*S*					
		2.011.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang berkompeten**	**Persen**					**80**	**60,85**	**11,42857143**	**3,84**	**22,85714286**	**11,57**	**34,28571429**	**2,90**	**11,4285714**	**21,74**	**80**	**40,06**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.08.02.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat**	**Persentase peserta sosialisasi yang memahami tentang pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Persen**					**100**	**60,85**	**14,28571429**	**3,84**	**28,57142857**	**11,57**	**42,85714286**	**2,90**	**14,2857143**	**21,74**	**100**	**40,06**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.08.02.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan yang di Tindak Lanjuti	Verifikasi					7	60,85	1	3,84	2	11,57	3	2,90	1	21,74	7	40,06					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*65,83*					
										Predikat kinerja :									*ST*	*R*					
		2.011.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup**	**Kali**					**1**	**97,06**	**1**	**3,18**	**1**	**32,30**	**1**	**6,31**	**1**	**36,34**	**1**	**78,14**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.09.02.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabunaten/Kota**	**Cakupan Penerima Penghargaan Peduli Lingkungan**	**Persen**					**100**	**97,06**	**0**	**3,18**	**0**	**32,30**	**16,7**	**6,3**	**83,3**	**36,34**	**100**	**78,14**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.09.02.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantroni dalam Perlindunan dan	Jumlah Sekolah yang diberikan penghargaan Adiwiyata	Sekolah					6	97,06	0	3,18	0	32,30	1,0	6,3	5,0	36,34	6	78,14					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*80,50*					
										Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		2.011.011	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan sampah yang ditangani**	**Persen**					**100**	**7.898,44**	**16,11**	**203,49**	**17,22**	**3.147,03**	**17,2**	**1792,6**	**16,1**	**2.220,85**	**66,67**	**7.363,93**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.011.02.01	**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Prasarana dan Sarana Persampahan yang terpelihara dan berfungsi baik**	**Persen**					**90**	**7.898,44**	**14,5**	**203,49**	**15,5**	**3.147,03**	**15,5**	**1.792,56**	**14,5**	**2.220,85**	**60**	**7.363,93**					**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**
		2.011.011.02.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di	Jumlah Petugas Kebersihan yang dibayarkan	Orang	425	6.724,58	425	99,20	425	3.034,89	425	1.592,17	425	1.682,84	425	6.409,10					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.011.02.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan	Kali	1	58,09	0	4,48	0	17,27	0	8,23	1	20,43	1	50,41					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		2.011.011.02.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST /SPA Kabunaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan/direlihara	Jenis	30	1.115,77	7	99,81	8	94,87	8	192,16	7	517,58	30	904,41					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									*66,67*	*93,23*					
										Predikat kinerja :									*S*	*ST*					
		2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							-																**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.012.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**13.448,99**	-		-		-		-								**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.012.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERPENUHI**	**PERSEN**	**97,6**	**12.370,79**	**5,21**	**1.368,91**	**18,28**	**2.397,44**	**6,06**	**2.695,88**	**23,23**	**4.042,05**	**52,78**	**10.504,27**					**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.012.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kinerja SKPD**	**Dokumen**	**7**	**141,72**	**1,00**	**17,03**	-	**40,32**	-	**19,04**	**6,00**	**25,60**	7,00	102,00					**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.012.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penetapan Kertas Kerja anggaran DAK Non Fisik Tahun 2022	Dokumen	1	51,09	1,00	-	-	13,52	-	-	-	2,10	1,00	15,62					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	7	90,62	1,00	17,03	-	26,80	-	19,04	6,00	23,51	7,00	86,38					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan dalam rangka necenatan penerbitan dokumen	PKS	3	-		-		-		-		-	-	-					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar**	**Persen**	**100**	**5.751,90**	**24,44**	**965,50**	**24,44**	**1.579,29**	**24,44**	**1.114,08**	**26,11**	**1.171,13**	104,00	4.830,00					**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.012.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Orang	45	5.751,90	44,00	965,50	44,00	1.579,29	44,00	1.114,08	47,00	1.171,13	47,00	4.830,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**Persen**	**90**	**60,43**	-	-	-	-	-	**27,46**	**90,00**	**32,90**	90,00	60,36					**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.012.01.02.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penduduk yang mendapatkan informasi administrasi kependudukan	Jiwa	3.000	60,43	-	-	-	-	-	27,46	3.000,00	32,90	3.000,00	60,36					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	-	-					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**	**100**	**4.176,81**	-	**40,01**	-	**221,01**	-	**1.034,61**	-	**2.216,81**	-	3.512,44					**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.012.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	6	14,98	-	-	4,00	5,57	2,00	4,25	2,00	5,16	8,00	14,98					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Pencetakan KIA yang disediakan	Unit	376	3.463,75	-	-	-	104,88	-	943,12	376,00	2.025,58	376,00	3.073,58					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	16	-							16,00		16,00	-					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set	18	-					8,00		10,00		18,00	-					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	5	54,88	4,00	12,77	3,00	11,85	1,00	5,91	1,00	13,73	9,00	44,25					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	2	51,17	2,00	1,80	2,00	3,25	2,00	6,71	2,00	39,41	2,00	51,17					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	24	3,60	6,00	0,90	6,00	0,60	6,00	0,90	6,00	1,20	24,00	3,60					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bimtek/Diklat yang dilaksanakan	Kali	10	569,15	1,00	24,54	1,00	88,72	4,00	73,73	4,00	131,74	10,00	318,73					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali	95	-	9,00		9,00		24,00		24,00		66,00	-					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah website yang diupdate	Website	1	19,29		-	1,00	6,13		-		-	1,00	6,13					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**90**	**36,75**	-	**1,70**	**90,00**	**30,20**	-	-	-	-	90,00	31,90					**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.012.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Unit	1	36,75	-	1,70	1,00	30,20	-	-	-	-	1,00	31,90					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**	**90**	**1.906,79**	-	**332,46**	-	**509,58**	-	**483,51**	-	**428,80**	83,51	1.754,34					**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.012.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	90	13,04	14,68	0,65	0,95	0,04	11,95	0,53	56,43	5,45	84,01	6,66					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	4	160,20	4,00	23,63	4,00	23,70	4,00	60,26	4,00	35,39	4,00	142,98					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	102	1.733,55	97,00	308,19	97,00	485,84	95,00	422,72	96,00	387,96	96,00	1.604,70					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan**	**Persen**	**90**	**296,39**	**12,00**	**12,21**	**13,50**	**17,04**	**18,00**	**17,17**	**46,50**	**166,82**	90,00	213,24					**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.012.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lananan	Jumlah kendaraan dinas jabatan/operasional/lapangan yang direlihara	Unit	20	44,88	2,00	1,45	5,00	9,39	8,00	14,60	5,00	17,60	20,00	43,04					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	211,51		-		-		-	1,00	130,20	1,00	130,20					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	50	40,00	15,00	10,76	10,00	7,65	10,00	2,57	15,00	19,03	50,00	40,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									*85,26*	*84,38*					
										Predikat kinerja :									*T*	*T*					
		2.012.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**CAKUPAN PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK**	**PERSEN**	**91**	**448,95**	-	**10,24**	-	**8,85**	-	**197,98**	**91,00**	**201,96**	**91,00**	**419,03**					**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.012.02.02.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Blangko KIA yang diadakan**	**Keping**	**34.545**	**448,95**	-	10,24	-	8,85	-	197,98	34.545,00	201,96	34.545,00	419,03					**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.012.02.02.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah blangko KIA yang diadakan	Keping	34.545	448,95	-	10,24	-	8,85	-	197,98	34.545,00	201,96	34.545,00	419,03					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*93,34*					
										Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		2.012.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**PERSENTASE OPD/LEMBAGA PENGGUNA DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA KEPENDUDUKAN**	**PERSEN**	**22**	**629,25**	-	**29,14**	-	**32,23**	-	**16,08**	-	**259,32**	-	**336,76**					**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.012.04.02.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Adminstrasi Kependudukan yang**	**PKS**	**7**	**77,70**	-	**5,36**	-	**6,08**	**6,00**	**5,31**	-	**43,40**	6,00	60,14					**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		2.012.04.02.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan	PKS					7	77,70	-	5,36	-	6,08	6,00	5,31	-	43,40	6,00	60,14					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.04.02.02	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Kecamatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi tentang administrasi kependudukan**	**Kecamatan**					**20**	**139,71**	**2,00**	**9,98**	**1,00**	**3,11**	-	-	**15,00**	**85,42**	18,00	98,51					**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.012.04.02.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi tentang administrasi kependudukan	Kecamatan					18	139,71	2,00	9,98	1,00	3,11	-	-	15,00	85,42	18,00	98,51					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.012.04.02.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Ketersediaan database kependudukan**	**Persen**					**90**	**411,85**	-	**13,80**	-	**23,04**	-	**10,76**	**90,00**	**130,51**	90,00	178,11					**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.012.04.02.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah buku mengenai data kependudukan yang dipublikasikan	Buku					135	411,85	-	13,80	-	23,04	-	10,76	135,00	130,51	135,00	178,11					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***91,90***	***63,72***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***R***					
		2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								-															**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		2.013.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								**24.709,15**															**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		2.013.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Anaratur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**4841,41**	**20,06**	**249,77**	**28,52**	**151,34**	**17,41**	**219,65**	**39,5977612**	**380,15**	**105,59**	**1000,91**					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
				Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen					80	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai					19	-	4	-	5	-	5	-	5	-	0	-					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**persen**					**80**	**66,13**	**33,33**	**10,55**	**33,33**	**15,43**	**16,67**	**8,80**	**50**	**31,32**		66,10					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
				Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	persen					80	-	20	10,55	20	15,43	20	8,80	20	31,32	80	66,10					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	Dokumen					8	66,13	2	10,55	2	15,43	1	8,80	3	31,32	8	66,10					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**persen**					**100**	**3.411,31**	25	0	25	0	25	-	25	0	100	-					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
				Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	persen					100	-	25	0	25	0	25	-	25	0	100	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	persen					100	-	25	0	25	0	25	-	25	0	100	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai					19	-	4	0	5	0	5	-	5	0	19	-					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	3.411,31	1	386,07	1	1.191,67	1	501,52	1	933,39	1	3.012,64					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**persen**					**100**	**578,69**	**25,00**	**70,5933**	**25**	**81,52**	**25**	**56,76**	**25**	**159,58**	**100**	**368,45**					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		2.013.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					6	4,80	2	2,39	1	0,02	1	1,00	2	1,55	6	4,96					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					30	72,90	10	24	5	5,54	5	15,84	10	20,31	30	65,44					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					250	-									0	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					900	40,35	5	0,53	5	3,10	7	5,11	13	8,18	30	16,92					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Lembar					9856	23,57	2.350	5,25	2.600	5,54	2.606	6,52	1.992	4,98	9.548	22,29					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					240	19,80	35	1,95	70	5,82	60	4,69	75	7,19	240	19,65					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					145	417,27	15	36,73	36	61,50	19	23,60	75	117,37	145	239,19					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					60	-															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**persen**					**100**	**106,50**	**0**	**23,75**	**50**		**0**	-	**50**	**20,31**	100	70,31					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		2.013.01.02.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set					2	106,50	0	23,75	1	10,42	0	15,84	1	20,31	2	70,31					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**persen**					**100**	**575,67**	**12,60**	**134,96**	**12,60**	**45,49**	**12,60**	**133,19**	**62,40**	**137,09**	**100**	**450,73**					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		2.013.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					500	3,00	0	0		0		-	499	2,55	499	2,55					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					48	88,20	12	14,59	12	4,01	12	14,47	12	14,14	48	47,22					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					4	484,47	4	120,37	4	41,48	4	118,71	4	120,40	4	400,96					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					12	-									0	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					15	-									0	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan**	**persen**					**100**	**103,11**	**24,44**	**9,93**	**25,19**	**8,90**	**25,19**	**20,91**	**25,19**	**31,85**	100	71,57					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		2.013.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipegangnya Perizinannya	Unit					8	91,35	2	9,63	2	7,43	2	17,97	2	24,80	8	59,82					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					6	-										0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana/Prasarana gedung kantor yang di pelihara	Jenis					1	-					1				1	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.01.02.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					67	11,76	16	0,3	17	1,47	17	2,94	17	7,1	67	11,76					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***86,54***	***66,34***					
											Predikat kinerja :									***T***	***S***					
		2.013.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertata dengan Baik**	**Persen**					**80**	**74,60**					**22,86**	**10,46**	**57,14**	**59,88**	**80**	**70,34**					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		2.013.02.02.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase Desa yang Tertata dengan Baik**	**persen**					**80**	**74,60**	0	-	0	-	**22,86**	**10,46**	**57,14**	**59,88**	*80*	70,34					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		2.013.02.02.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	Desa					28	74,60	0	-	0	-	8	10,46	20	59,88	28	70,34					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***94,28***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		2.013.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Cakupan pelaksanaan Kerjasama antar desa**	**Persen**					**80**	**2.496,53**		**63,40**		**1.040,10**		**908,14**		**430,97**	**0**	**2.442,61**					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		2.013.03.02.01	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Persentase Kerjasama antar desa yang terlaksana**	**persen**					**100**	**2.496,53**		**63,40**	**0**	**1.040,10**	**100**	**908,14**		**430,97**	100	2.442,61					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		2.013.03.02.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten /Kota	Jumlah Lokasi Kegiatan karya Bhakti TNI	Desa					1	2.496,53	0	63,40	0	1.040,10	1	908,14	0	430,97	1	2.442,61					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah Lokasi Kegiatan Pelaksanaan TMMD	Desa					2	-					2				2	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***97,84***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		2.013.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel**	**Persen**					**65**	**16.727,02**	**29,77**	**2.131,95**	**29,77**	**3.780,56**	**12,64**	**3.518,12**	**42,22**	**5.208,78**	**114,4**	**14.639,41**					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		2.013.04.02.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa dengan Administrasi Baik**	**persen**					**100**	**16.727,02**	**29,77**	**2.131,95**	**29,77**	**3.780,56**	**12,64**	**3.518,12**	**42,22**	**5.208,78**	114,4	14.639,41					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
				Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel	persen					65	-	0	0	0	0	0	-	65	0	65	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.04.02.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mendapatkan Pelatihan	Orang					20	66,43	0	3,05		0,00		7,96	20	49,64	20	60,6535					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.04.02.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang Terfasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Informasi	Desa					50	88,15	20	25,78	5	7,13	5	25,17	20	26,1032	50	84,18					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.04.02.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa yang Mendapatkan Pembinaan	Orang					14	59,42		4,26		0,00		9,0	14	33,7535	14	47,00					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.04.02.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Kecamatan yang Diikuti	Kecamatan					20	2,55	20	0	20	2,55	0	-	0	0	20	2,55					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.04.02.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba Desa Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa	DesaKelurahan					36	92,57	8	17,73	9	19,04	7	13,5	12	36,77	36	87,04					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Monioring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Desa	Kecamatan					18	-	18								18	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		2.013.04.02.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUM Desa yang Aktif Membangunan Desa	BUM Desa					45	310,70	10	67,10	10	65,11	10	22,6	15	137,79	45	292,55					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah Bum Desa yang Terbina	BUM Desa					45	-									0	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.04.02.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kecamatan yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Desa					96	6.429,52	96	525,40	96	1.464,10	96	1.353,9	96	1.719,83	96	5.063,24					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.04.02.01.011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang Telah Melakukan Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa	DesaKel					120	143,91	0	5,278	120	94,55	0	12,0	0	11,43	120	123,3005					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.04.02.01.012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terdata Produk Hasil Usaha Desa	Desa					18	9.443,78															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah Pendamping Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi	Orang					202	0	202	1.483,36	200	2.120,95	198	2.061,2	198	3.133,15	199	5.665,56					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.04.02.01.013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan aset desa berbasis sistem informaso	desa					50	90,00		0		7,13		12,8	50	60,31	50	80,19265					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															*100*	*87,52*					
					Predikat kinerja :															*ST*	*T*					
		2.013.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam**	**Persen**					**100**	**1.086,88**	**18,33**	**25,07**	**20,33**	**62,40**	**21,33**	**133,72**	**23,33**	**451,85**	**83,32**	**673,047376**					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		2.013.05.02.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam**	**Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dlam pembangunan desa**	**persen**					**100**	**1.086,88**	**18,33**	**25,07**	**20,33**	**62,40**	**21,33**	**133,72**	**23,33**	**451,85**	83,32	673,047376					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
				Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	persen					100	-								100	100	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.05.02.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) ,Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah Lembaga Adat dan Sosial Budaya yang Dibina	DesaKelurahan					60	83,46	10	1,97	10	Rp 6	10	11,91	30	48,13	60	68,385					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.05.02.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Desa/Keluruhan yang Dibina	Lembaga					6	76,07		0		1,93	6	46,038		13,64	6	61,608					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah KP SPAMS yang Terbina	KP SPAMS					20	-							20		20	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah PKK yang terbina dan Berjalannya 10 Program Pokok PKK	DesaKelurahan					47	-							47		47	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.05.02.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa Yang memiliki produk hasil usaha desa dalam menunjang peningkatan PAD	Desa					47	66,30	0	0,00		7,38		3,18	47	54,91	47	65,47					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pemetaan Potensi Kawasan Perdesaan	Desa					47	-									0	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah PKK yang terbina dan Berjalannya 10 Program Pokok PKK	DesaKelurahan					47	-							47		47	0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.05.02.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Alat yang Ditampilkan Pada Gelar TTG	Alat					4	86,86	0	0		0,75		0,75	4	58,75	4	60,25					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.013.05.02.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang terbina dan Berjalannya 10 Program Pokok PKK	Lembaga					6	774,19	10	23,10	12	45,97	13	71,84	15	276,43	50	417,34					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah KP SPAMS yang Terbina	KP SPAMS					20	-										0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Jumlah Kelembagaan Masyarakat Desa/Keluruhan yang Dibina	DesaKelurahan					50	-										0					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															*100*	*61,92*					
					Predikat kinerja :															*ST*	*R*					
		2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								-															
		2015	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								**16.242,59**															
		2.015.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**8.794,35**	**75,16**	**1.514,49**	**62,30**	**2.280,45**	**60,56**	**1.785,59**	**62,17**	**1.908,80**	**65,05**	**7.489,33**					**DINAS PERHUBUNGAN**
				Persentase anaratur yang menikuti diklat/	Persen					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					DINAS PERHUBUNGAN
				Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai					19	-									-	-					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Persentase pelanoran kinerja yang disusun sesuai**	**Persen**					**80**	**110,43**	**31,25**	**-**	**-**	**3,20**	**7,81**	**44,25**	**23,44**	**60,72**	**19,54**	**108,17**					**DINAS PERHUBUNGAN**
				Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai	Persen					80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					**DINAS PERHUBUNGAN**
		2.015.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen					8	110,43	4	-	-	3,20	1	44,25	3	60,72	8	108,17					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun**	**Persen**					**100**	**5.971,24**	**100,00**	**1.040,30**	**50,00**	**1.737,34**	**50,00**	**1.155,40**	**50,00**	**1.155,58**	**100**	**5.088,62**					**DINAS PERHUBUNGAN**
		2.015.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	5.904,77	1	1.022,30	1	1.716,19	1	1.142,23	1	1.142,04	1	5.022,76					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen					1	66,47	1	18,00	-	21,15	-	13,17	-	13,54	1	65,86					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase anaratur yang berkinerja baik**	**Persen**					**80**	**45,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,47**	**-**	**7,80**	**-**	**18,27**					**DINAS PERHUBUNGAN**
				Persentase aparatur yang mengikuti diklat/	Persen					80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					**DINAS PERHUBUNGAN**
		2.015.01.02.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kali					100	45,36						10,47		7,80	-	18,27					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**991,48**	**80,68**	**103,65**	**88,83**	**157,96**	**81,58**	**129,03**	**87,40**	**269,29**	**84,62**	**659,93**					**DINAS PERHUBUNGAN**
		2.015.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Jenis					42	85.91	42	24,82	42	8,70	42	45,30	42	7,08	42	85.90					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis					5	120,00	5	19,49	5	33,00	5	36,56	5	30,88	5	119,93					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Jenis					6	84,00	6	34,07	6	7,60	6	5,70	6	36,55	6	83,92					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					36	3.58	36	0,40	36	0,30	36	0,85	36	2,00	36	3,55					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali					265	698,00	9	24,07	117	108,36	21	40,62	98	192,78	245	366,63					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang**	**Persen**					**100**	**1.430,34**	**100,00**	**364,21**	**100,00**	**349,07**	**100,00**	**345,66**	**100,00**	**350,41**	**100,00**	**1.409,35**					**DINAS PERHUBUNGAN**
		2.015.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	persen					100	6.40	100	0,45	100	1,68	100	1,11	100	3,12	100	6,36					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					4	248,00	4	74,46	4	53,38	4	53,05	4	53,87	4	234,76					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang					139	1.175,94	139	289,30	139	294,01	139	291,50	139	293,42	139	1.168,23					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan**	**Persen**					**80**	**245,50**	**63,89**	**6,33**	**72,69**	**32,88**	**63,43**	**111,25**	**50,00**	**72,80**	**80**	**223,26**					**DINAS PERHUBUNGAN**
		2.015.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit					4	80,00	4	2,23	4	26,37	4	32,84	4	18,41	4	79,85					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit					9	110,50	3	1,92	4	6,51	2	55,52	-	32,88	9	96,83					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					10	55,00	2	2,18	3	-	3	22,89	2	21,51	10	46,58					DINAS PERHUBUNGAN
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															*67,73*	*80,66*					
					Predikat kinerja :															*S*	*T*					
		2.015.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Presentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar**	**Persen**					**65**	**1.901,96**	-	**32,46**	**9,52**	**215,51**	**19,28**	**918,70**	**43,37**	**584,99**	**18,04**	**1.751,66**					**DINAS PERHUBUNGAN**
		2.015.02.02.03	**Penyelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi**	**Persen**					**80**	**685,09**	-	-	-	**13,21**	**12,50**	**97,61**	**12,50**	**179,32**	**16,00**	**290,14**					**DINAS PERHUBUNGAN**
		2.015.02.02.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal yang di Pelihara	Unit					10	685,09	-	-	-	13,21	1	97,61	1	179,32	2	290,14					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.02.02.05	**Penerujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase uji kir angkutan umum yang terlaksana**	**Persen**					**80**	**50,00**	-	**4,68**	-	**8,35**	-	**7,22**	**100**	**13,45**	**80**	**33,70**					**DINAS PERHUBUNGAN**
		2.015.02.02.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Penujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan/Angkutan Umum yang di Lakukan	Unit					500	50,00	-	4,68	-	8,35	-	7,22	500	13,45	500	33,70					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.02.02.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di lalan**	**Cakupan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi**	**Persen**					**70**	**1.071,62**	-	**7,48**	**47,62**	**145,07**	**83,90**	**802,86**	**79,37**	**392,22**	**75,31**	**1.347,63**					**DINAS PERHUBUNGAN**
		2.015.02.02.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten /Kota yang di	Kali					63	1.071,62	-	7,48	21	145,07	37	802,86	35	392,22	93	1.347,63					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.02.02.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah**	**Persentase layanan Angkutan Umum untuk Jasa Anekutan Orane dan/atau Baranc antar Kota dalam**	**Persen**					**80**	**95,25**	-	**20,30**	-	**48,88**	-	**11,01**	-	-	-	**80,19**					**DINAS PERHUBUNGAN**
		2.015.02.02.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Unit					34	95,25	-	20,30	-	48,88	-	11,01	-	-	-	80,19					DINAS PERHUBUNGAN
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															*56,90*	*79,92*					
					Predikat kinerja :															*R*	*T*					
		2.015.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana**	**Persen**					**65**	**5.546,27**	-	-	-	**31,05**	-	**295,68**	**28,21**	**1.646,94**	**28,21**	**1.973,67**					**DINAS PERHUBUNGAN**
		2.015.03.02.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penumpan Lokal	Cakupan Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen					75	5.546,27	-	-	-	31,05	-	295,68	24,44	1.646,94	24,44	1.973,67					DINAS PERHUBUNGAN
		2.015.03.02.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah dermaga yang dibangun	Unit					60	5.546,27		-		31,05		295,68	11	1.646,94	11	1.973,67					DINAS PERHUBUNGAN
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															*43,40*	*35,59*					
					Predikat kinerja :															*SR*	*SR*					
		2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								-															**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.016.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**14.954,47**		**1.836,31**		**5.356,13**		**2.994,55**		**4.543,83**		**14.730,82**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.016.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**					**19**	**6.029,39**	**n/a**	**239,15**	**n/a**	**2.815,37**	**n/a**	**492,14**	**n/a**	**1.720,37**	**n/a**	**5267,03**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		2.016.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**80**	**29,92**									**0**	**0**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
				Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	**Persen**					**80**	**29,92**	**34**	**-**	**23**	**4,08**	**11**	**15,13**	**11**	**10,71**	**80**	**29,92**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.016.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen					7	29,92	3	-	2	4,08	1	15,13	1	10,71	7	29,92					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**			**-**							**0**	**0**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
				Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	**Persen**					**100**	**3.828,46**	**100**	**-**	**100**	**2.417,07**	**100**	**1,50**	**100**	**769,05**	**100**	**3187,62**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.016.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang					30	3.818,36	30	-	30	2.415,07	30	-	30	762,45	30	3177,52					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen					1	10,10	0	-	0	2,00	0	1,50	1	6,60	1	10,10					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara**	**Persen**					**100**	**37,80**	**100**	**6,30**	**100**	**9,45**	**100**	**12,60**	**100**	**9,45**	**100**	**37,8**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.016.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Orang					3	37,80	3	6,30	3	9,45	3	12,60	3	9,45	3	37,80					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**Persen**					**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	0	0					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
				Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	Orang					3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**676,57**	**27**	**24,07**	**30**	**63,98**	**27**	**41,14**	**83**	**437,76**	**100**	**566,95**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.016.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis					3	3,53	0	-	0	-	0	-	3	3,53	3	3,53					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis					12	257,34	1	3,10	1	10,10	1	9,40	9	224,36	12	246,96					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis					31	-	1		3		3		24		31	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis					1	64,50	1	7,45	1	14,73	1	13,60	1	28,65	1	64,43					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis					2	-	2		2		2		2		2	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis					7	94,99	1	0,45	1	2,20	1	0,48	4	91,76	7	94,89					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Eksemplar					260	26,00	0	-	5	5,00	8	2,80	247	17,40	260	25,2					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali					10	230,21	0	13,07	1	31,95	0	14,86	9	72,06	10	131,94					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali					46	-	6	-	10	-	5	-	26		47	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**					**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	0	0					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.016.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	Unit					1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**					**100**	**1.287,90**	**57**	**206,68**	**82**	**312,33**	**57**	**405,11**	**57**	**354,80**	**82**	**1278,92**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.016.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen					20	2,40	0	-	20	2,40	0	-			20	2,4					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					1	85,30	1	20,58	1	20,58	1	20,58	1	20,58	1	82,32					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang					4	-	2		2		2		2		2	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang					83	1.200,20	64	186,10	64	289,35	64	384,53	64	334,22	64	1194,2					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**					**100**	**168,74**	**0**	**2,10**	**7**	**8,46**	**25**	**16,66**	**47**	**138,60**	**80**	**165,82**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.016.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional/ Lapangan yang dipelihara	Unit					3	24,10	0	2,10	0	5,04	2	8,88	0	6,46	2	22,48					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					1	129,14	0	-	0	-	0	5,00	1	123,91	1	128,91					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit					104	15,50	0	-	22	3,42	10	2,78	44	8,23	76	14,43					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***92,39***	***92,93***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		2.016.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik**	**Persen**					**45**	**7.934,67**	**13**	**1.545,17**	**18**	**2.288,11**	**16**	**2.204,28**	**20**	**2.553,66**	**66**	**8.591,22**					
		2.016.02.02.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Tersampaikan**	**Persen**					**100**	**7.934,67**	**28**	**1.545,17**	**40**	**2.288,11**	**35**	**2.204,28**	**44**	**2.553,66**	**147**	**8591,217**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.016.02.02.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Iklan Layanan Masyarakat, Profile Desa & Talkshow yang di Publikasikan	Publikasi					32	48,80	0	-	18	6,84	10	5,91	4	26,36	32	39,11					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.02.02.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kerjasama yang di Kelola Melalui Media Cetak, Online dan TV	Kontrak Kerjasama					80	7.288,70	24	1.540,17	50	2.107,34	13	2.022,01	90	2.330,75	177	8.000,27					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.02.02.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Penyediaan Informasi Publik yang di Kelola dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	PlynInformasi Publik					15	76,12	5	5,00	6	5,44	14	8,52	0	40,60	25	59,56					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.02.02.01.012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Saluran Informasi Pemerintah yang di Kelola Berupa TV, Radio, Website dan Facebook, Aplikasi InPas	Jns Saluru Informasi					2	521,05	1	-	0	168,49	0	167,84	1	155,95	2	492,28					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***146,98***	***108,27***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		2.016.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK**	**Persen**					**80**	**990,40**	**-**	**51,99**	**20**	**252,65**	**14**	**298,13**	**29**	**269,80**	**76**	**872,57**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.016.03.02.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Jumlah Sub Domain lingkup pemda yang dikelola**	**Persen**					**80**	**414,31**	**0**	**51,99**	**36**	**80,17**	**16**	**125,89**	**28**	**120,64**	**80**	**378,69**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		2.016.03.02.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang di Tatalaksanakan dan di Awasi Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah					2	35,91	0	-	1	7,11	0	13,36	1	3,78	2	24,25					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.03.02.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang Aplikasi/Website-nya yang di Kembangkan	Perangkat Daerah					5	378,40	0	51,99	2	73,06	2	112,53	1	116,86	5	354,44					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.03.02.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sistem Informasi Perangkat Daerah yang telah terintegrasi**	**Persen**					**80**	**576,09**	**0**	-	**5**	**172,48**	**12**	**172,24**	**31**	**149,16**	**72**	**493,88**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.016.03.02.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah					7	131,52	0	-	0	42,02	0	30,79	4	42,44	4	115,25					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.03.02.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Server Pusat Data Pemerintah Daerah yang di Kelola	Unit					9	197,29	0	-	0	95,04	0	22,23	9	47,10	9	164,37					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.03.02.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Arus Bisnis yang di Kembangkan	Aplikasi					3	50,77	0	-	0	8,62	1	37,99	2	0,87	3	47,48					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.03.02.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Jaringan dan Infrastruktur TIK yang dibangun sampai ke Desa	Lokasi					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.03.02.02.010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Infrastruktur TIK-nya dikembangkan dan dikelola	OPDPerangkat Daerah					34	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan dan Bimtek TIK	Orang					4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		2.016.03.02.02.012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Menara Telekomunikasi yang di Laksanakan	Kali					280	196,51	0	-	102	26,80	166	81,23	18	58,75	286	166,78					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
																				94,91	***88,57***					
																				ST	***T***					
		2.020	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**62,75**		-		**6,75**		**7,20**		**41,67**		**55,62**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.020.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase data dan statistik yang terintegrasi**	**Persen**					**100**	**62,75**	**0**	-	**0**	**6,75**	**0**	**7,20**	**100**	**41,67**	**100**	**55,62**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.020.02.02.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia**	**Persen**					**100**	**62,75**	**0**	-	**0**	**6,75**	**0**	**7,20**	**100**	**41,67**	100	55,62					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.020.02.02.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Mengenai Data Statistik Sektoral yang di Publikasikan	Data					35	62,75	0	-	0	6,75	0	7,20	35	41,67	35	55,62					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
																				100	***88,63***					
																				ST	***T***					
		2.021	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**103,39**															**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.021.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase PD yang menggunakan sistem persandian**	**Persen**					**20**	**103,39**	**0**	-	**0**	**22,96**	**0**	**18,57**	**20**	**47,46**	**20**	**88,99**					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.021.02.02.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sistem persandian**	**Persen**					**20**	**103,39**	**0**	-	**0**	**22,96**	**0**	**18,57**	**20**	**47,46**		88,99					**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**
		2.021.02.02.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sistem Informasi yang di Amankan	Sistem Informasi					2	103,39	0	-		22,96		18,57	2	47,46	2	88,99					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
																				100	***86,07***					
																				ST	***T***					
		2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								-															**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.017.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**6.493,14**															**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.017.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**4.492,31**	**26,18**	**594,85**	**17,56**	**1.206,70**	**25,65**	**960,91**	**25,81**	**1.108,29**	**95,2**	**3870,749054**					**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.017.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**3.682,27**	**12**	**445,80**	**31**	**1.144,99**	**22**	**816,59**	**21**	**766,94**	86	3174,309932					**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
				Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	**Persen**					**100**	-									**0**	**0**					**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.017.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang					30	3.682,27	28	445,80	28	1.144,99	28	816,59	28	766,94	28	3174,309932					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara**	**Persen**					**100**	**33,60**	**23**	**7,70**	**13**	**4,20**	**29**	**9,80**	**25**	**8,40**	90	30,1					**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.017.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa keamanan gedung kantor yang dibayarkan	Orang					4	33,60	4	7,70	3	4,20	4	9,80	4	8,40	4	30,1					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ peneremhanaan kompetensi**	**Persen**					**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0					**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.017.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	Potong					85	-	-	-		-	-	-	-	-	0	0					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelatihan Teknis yang diikuti	Kali					1	-	-	-		-	-	-	-	-	0	0					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	Kali					1	-	-	-		-	-	-	-	-	0	0					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**577,67**	**30,13**	**91,26**	**18,56**	**33,89**	**28,20**	**76,69**	**23,12**	**282,68**	**100,00**	**484,5282**					**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.017.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis					29	31,03	12	19,48	0	0	10	5,09	7	3,70	29	28,2791					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis					3	55,88	3	8,36	3	3,14	3	7,08	3	34,84	3	53,412					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis					4	13,08	4	3,34	0	0	4	6,38	4	3,365	4	13,08					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					12	232,08	12	3,68	12	3,68	12	9,20	12	215,12	12	231,68					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali					73	245,60	25	56,40	13	27,07	23	48,95	12	25,66	73	158,0771					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**					**100**	-		-		-		-		-	-	-					**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.017.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	Unit					1	-		-		-		-		-	-	-					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**					**100**	**140,02**	**24,33**	**33,83**	**21,67**	**20,41**	**27,33**	**43,71**	**26,67**	**31,67**	**100,00**	**129,614262**					**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.017.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan surat menyurat	Persen					100	1,54	23	0,36	15	0,23	32	0,49	30	0,46	100	1,54					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					3	91,54	3	21,91	3	14,58	3	29,13	3	21,83	3	87,442262					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang					5	46,94	5	11,56	5	5,60	5	14,09	5	9,38	5	40,632					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan**	**Persen**					**100**	**58,75**	**41,43**	**16,26**	**3,57**	**3,22**	**21,74**	**14,12**	**33,26**	**18,60**	**100,00**	**52,20**					**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.017.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Unit					28	43,12	8	10,21	3	3,22	7	9,51	10	13,62	28	36,56					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit					37	7,98	18	3,05	0	0	4	1,95	15	2,98	37	7,983					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					17	7,65	8	3,00	0	0	5	2,66	4	1,99	17	7,65					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
																				95,20	***88,21***					
																				ST	***T***					
		2.017.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**Persen**					**100**	**83,43**	**0**	**32,51**	**0**	**6,63**	**2,92**	**31,52**	**0**	**8,40**	**2,92**	**79,047**					**DINAS KOPERASI DAN USAHA**
		2.017.02.02.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi**	**Persen**					**100**	**83,43**	**0**	**32,51**	**0**	**6,63**	**2,92**	**31,52**	**0**	**8,40**	2,92	79,047					**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		2.017.02.02.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	Orang					20	83,43	0	32,51	0	6,63	20	31,52	0	8,40	20	79,047					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100,00*	*94,75*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		2.017.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Persen					80	80.32	0	6.00	0	4.00	65.80	25.42	31.85	32.92	97.65	68.33875					DINAS KOPERASI DAN USAHA
		2.017.03.02.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Yang Di Monev	Koperasi					40	80,32	0	6,00		4,00	20	25,42	20	32,92	40	68,33875					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.03.02.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap koperasi yang dilakukan	Kali					2	45,82	0	3,00	0	2,00	1	16,33	1	17,15	2	38,48115					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.03.02.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Koperasi					9	34,50	0	3,00	0	2,00	3	9,09	6	15,77	9	29,8576					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*85,08*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		2.017.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP koperasi Sehat	Persen					80	63.26	0	13.68	0	3.29	42.34	35.62	0	5.40	42.34	57.9835					DINAS KOPERASI DAN USAHA
		2.017.04.02.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu)	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Yang Dilakukan Penilaian	Persen					80	63,26	0	13,68	0	3,29	42,34	35,62	0	5,40	42,34	57,9835					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.04.02.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat penghargaan melalui pelaksanaan RAT tepat waktu	Koperasi					3	63,26	0	13,68	0	3,29	3	35,62	0	5,40	3	57,9835					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*52,92*	*91,66*					
											Predikat kinerja :									*R*	*ST*					
		2.017.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berdaya	Koperasi					80	66.99	14	9.49	11	7.52	61	41.17	7	4.58	93	62.763					DINAS KOPERASI DAN USAHA
		2.017.05.02.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Memiliki Kompetensi	Koperasi					80	66,99	0	9,49	0	7,52	20	41,17	0	4,58	20	62,76					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.05.02.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah	Orang					20	66,99	0	9,49	0	7,52	20	41,17	0	4,58	20	62,763					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*93,69*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		2.017.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM aktif	persen					100	1.503,49	0	31,73	11,71291866	63,56	18,62200957	299,79	93,8181818	1.033,21	124,15	1428,2869					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.07.02.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru Yang Mandiri	Persen					80	1.503,49	0	31,73	0	63,56	48	299,79	52	1.033,21	100	1428,2869					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.07.02.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta yang mengikuti Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Menambah Nilai Tambah Produk Melalui Pelatihan Kelapa dan Turunannya	Orang					20	82,10	0	6,00	0	10,39	20	47,16	0	11,53	20	75,0847					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.07.02.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosisalisasi Kemitraan antara Perbankan dan nonPerbankan dengan Usaha	Orang					30	61,33	0	3,00	0	2,00	0	7,74	30	32,72	30	45,464					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.07.02.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi HAKI kepada Koperasi dan UMKM	Orang					20	45,38	0	9,71	0	1,73	20	22,26	0	8,02	20	41,72195					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.07.02.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Kelompok UMKM yang di fasilitasi	Kelompok UMKM					21	1.274,30	0	6,00	0	45,43	0	211,54	21	965,27	21	1228,2356					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.07.02.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan dalam pemberdayaan usaha mikro	Kali					5	40,38	0	7,02	0	4,00	2	11,09	3	15,68	5	37,78065					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*95,00*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		2.017.08.0	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan Omset UMKM	Persen					2	203,34	-	6,00	0	13,69	0	65,16	1,64	101,87	1,64	186,719					DINAS KOPERASI DAN USAHA
				Persentase Peningkatan Omset UMKM	Persen					2	-															DINAS KOPERASI DAN USAHA
		2.017.08.02.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen					35	203,34	-	6,00	25	13,69	67	65,16	99	101,87	47,75	186,719					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.017.08.02.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan	Jumlah kelompok usaha mikro yang difasilitasi	kelompok UKM					3	203,34	0	6,00	0	13,69	0	65,16	3	101,87	3	186,719					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*82,00*	*91,82*					
											Predikat kinerja :									*T*	*ST*					
		2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-															DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								6.447,64		980,22		1.839,29		1.314,57		1.497,75	0	5.631,82					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen					60	5.829,01	12,35	980,22	15,95	1.641,00	18,27	1.277,99	11,29	1.223,69	57,87	5.122,89					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen					60	37,28	8,57	7,77	17,14	11,66	25,72	12,68	8,57	5,18	60,00	37,275					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan					7	37,28	1	7,77	2	11,66	3	12,68	1	5,18	7	37,28					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen					60	4.565,33	15,00	784,10	15,00	1.451,20	15,00	1.054,39	15,00	1.059,93	60,00	4349,617					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gajih ASN	Tahun					1	4.565,33	1	784,10	1	1.451,20	1	1.054,39	1	1.059,9	1	4.350					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi	Persen					60	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Stel					80	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen					60	619,98	12,02	52,85	16,92	32,51	14,60	52,17	9,79	18,30	53,33	155,83					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	Jenis					31	81,53	12	39,34	6	16,80	8	23,99	5	1,40	31	81,53					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis					3	-	0		1		0		0		1	0					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					2426	58,26	590	13,51	575	12,58	690	19,03	571	12,53	2.426	57,65					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah Porsi makanan dan minuman yang disediakan	Porsi					1284	-	500		500		100		184		1284	0					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar Barang Cetakan dan Penggandaan	Lembar					30043	16,65	0	-	8.000	3,13	17.043	9,15	5.000	4,38	30.043	16,65					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					0										-	-					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					110	463,54	20	128,13	30	209,02	30	97,40	30	26,57	110	461,122					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen					60	539,10	16,25	128,25	21,25	131,32	11,25	127,14	11,25	130,87	60,00	517,581					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					1020	3,90	340	0,65	680	3,250	-	-	-	-	1.020	3,9					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Jenis					3	49,60	3	8,50	3	8,97	3	9,24	3	11,37	3	38,08					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					31	485,60	31	119,10	31	119,10	31	117,90	31	119,50	31	475,60					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan	Orang					4	-	4		4		4		4		4	0					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		2.018.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**					**60**	**67,32**	**9,90**	**7,25**	**9,45**	**14,31**	**24,79**	**31,63**	**11,86**	**9,40**	**56,00**	**62,59**					**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.018.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipergunjang Perizinannya	Unit					22	45,50	5	5,85	6	14,31	8	16,83	3	3,78	22	40,77					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					5	-	1		1		1		1		4	0					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kerja (Komputer/Laptop/AC)	Kali					74	21,82	5	1,40	0	-	50	14,80	19	5,62	74	21,82					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
										Rata-rata capaian kinerja (%) :										***96,44***	***81,88***					
										Predikat kinerja :										***ST***	***T***					
		2.018.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Tingkat Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persen**					**50**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.018.02.02.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitas/insentif penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan					0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.02.02.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah unit perizinan usaha dan non perizinan yang dilakukan monitoring	Unit					6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
										Rata-rata capaian kinerja (%) :																
										Predikat kinerja :										***SR***	***SR***					
		2.018.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Sektor yang Berhasil Dipromosikan**	**Sektor**					***3***	***111,60485***	**0**	**0**	**1**	**6,23**	**1**	**9,35**	**1**	**78,04**	1	93,62					**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.018.03.02.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir yang Diselenggarakan	Kali					1	111,60	0	0	1	6,23	1	9,35	1	78,04	1	93,62					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.03.02.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi yang diikuti/dilaksanakan	Kali					1	111,60	0	-	1	6,23	1	9,35	1	78,04	1	93,62					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah Sarana Promosi Penanaman Modal	Unit					1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
										Rata-rata capaian kinerja (%) :										***100***	***83,89***					
										Predikat kinerja :										***ST***	***T***					
		2.018.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Penanaman Modal**	**Predikat**					**A**	**139,11**	**0**	**0**	**0**	**44,263**	**0**	**7,416**	**A**	**77,474**	**A**	**129,153**					**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.018.04.02.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani**	**Dokumen**					**575**	**139,11**	**100**	-	**150**	**44,26**	**150**	**7,42**	**175**	**77,47**	**575**	**129,153**					**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.018.04.02.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data Perizinan	Dokumen					1	109,34	0	-	0	16,33	0	5,58	1	77,47	1	99,39					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan secara online	Jenis					23	-									0	0					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.04.02.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Unit Perizinan tertentu yang di monitoring	Unit					6	29,77	0	-	5	27,93	1	1,83	0	-	6	29,76					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.04.02.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Berkas/Dokumen Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diverifikasi, Analisis dan Evaluasi	Izin					1100	-									0	0					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan	Pengaduan					10	-									0	0					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.04.02.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Berkas/Dokumen Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diverifikasi, Analisis dan Evaluasi	Dokumen					110	-									0	0					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
										Rata-rata capaian kinerja (%) :										***100***	***92,84***					
										Predikat kinerja :										***ST***	***ST***					
		2.018.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Tingkat Kedisiplinan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha**	**Persen**					**65**	**367,92**	**0**	-	**21,66**	**147,80**	**21,67**	**19,81**	**21,67**	**118,55**	**65,00**	**286,153**					**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.018.05.02.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Terlaksana**	**Kegiatan**					**3**	**367,92**	**0**	-	**1**	**147,80**	**1**	**19,81**	**1**	**118,55**	**3**	**286,153**					**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.018.05.02.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pemantauan	Unit					6	61,99	0	-	2	11,71	0	-	4	43	6	54,66					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.05.02.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	Unit					182	160,82	0	-	82	50,13		-	100	60,16	182	110,30					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.018.05.02.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan Optimalisasi Koordinasi Tim Tekhnis Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen					550	145,11	0	-	365	85,96	100	19,81	85	15,43	550	121,20					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah Unit Usaha Yang dilakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan	Unit					21	-	0		5		10		6		21	0					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
										Rata-rata capaian kinerja (%) :										***100***	***77,78***					
										Predikat kinerja :										***ST***	***T***					
		2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							-																**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**17.327,72**																**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**Persen**					**90**	**6.753,76**	**7,87**	**1.099,82**	**18,05142857**	**1.727,73**	**18,19**	**1.259,06**	**19,6571429**	**1.950,58**	**63,77**	**6.037,18**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**90**	**617,94**	**1,62**	**81,13**	**50,27**	**96,50**	**71,35**	**137,23**	**2,43**	**233,35**	**125,67**	**548,21**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Program Keerja yang disusun	Dokumen					2	263,53	1	41,23	1	37,79	1	27,60	1	143,65	4	250,27					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Dokumen RKT yang disusun	Dokumen					4	-	1		0		0		0		1	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen					5	354,42	0	39,90	1	58,71	2	109,63	2	89,70	5	297,94					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan	Kali					100	-	0	-	60	-	85	-	0	-	145	-					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**90**	**4.279,36**	**15**	**767,94**	**15**	**1.218,87**	**15**	**885,38**	**45**	**890,44**	**90**	**3.762,63**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	4.254,61	1	767,94	1	1.218,87	1	876,52	1	874,61	1	3.737,94					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen					1	10,00	0	-	0	-	0	-	1	10,00	1	10,00					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Triwulan					4	14,75	1		1		1	8,86	1	5,83	4	14,69					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		2.019.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi**	**Persen**					90	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kali					1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					90	962,38	16,87	81,28	35,91	210,76	19,4	32,60	39,7	545,12	111,88	869,76					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					7	40,00	2	-	1	10,00	2	-	2	28,68	7	38,68					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					60	300,93	20	45,38	10	13,00	15	18,16	15	258,85	60	335,38					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Furniture dan Interior Gedung Kantor yang disediakan	Paket					1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Meubeler yang disediakan	Unit					4	-	0	-	0	-	0	-	5	-	5	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit					39	-	5	-	10	-	15	-	20	-	50	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Jenis					27	74,16	1	14,29	2	15,79	2	0,92	2	39,44	7	70,45					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					30	-	2	-	3	-	5	-	9	-	19	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Jenis					7	159,38	0	1,25	2	22,50	2	7,63	3	125,39	7	156,77					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Jenis					1	8,00	0	-	1	7,59	0	-	0	-	1	7,59					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					104	379,91	9	20,36	54	141,88	3	5,90	34	92,76	100	260,90					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**					90	733,39	21,58	167,99	21,58	185,90	21,58	200,27	25,27	154,72	90,01	708,87					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					1400	5,00	350	2,44	350	1,88	350	-	350	0,65	1400	4,97					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Jenis					3	175,11	3	40,78	3	39,81	3	39,12	3	43,95	3	163,66					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					14	553,28	14	124,76	14	144,21	14	161,15	14	110,12	14	540,24					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruangan					12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					31	-	31	-	31	-	31	-	31	-	31	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					90	160,69	0	1,49	3,6	15,70	0	3,58	25,2	126,96	28,8	147,72					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					4	45,00	0	1,49	2	15,70	0	3,58	2	20,61	4	41,38					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Unit					15	72,35	0	-	0	-	0	-	3	67,04	3	67,04					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah gedung yang dibangun	Unit					4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Kegiatan					1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang direhab	Unit					20	-	0	-	0	-	0	-	3	-	3	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Jenis					6	43,34	0	-	0	-	0	-	6	39,30	6	39,30					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.01.02.13	**Penataan Organisasi**	**Jumlah Laporan Yang Disusun**	**Dokumen**					5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.01.02.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Penerima Hibah/Bansos	Kecamatan					20	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Usulan Hibah dan bansos yang diverifikasi	Proposal					104	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*96,40*	*89,35*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		2.019.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Pemuda yang Berdaya Saing**	**Persen**					60	1.029,36	0	17,67	5,22	158,84	44,35	336,37	0	159,61	49,57	672,48					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.02.02.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Organisasi Kepemudaan yang Aktif**	**Persen**					60	696,43	0	17,67	0	158,84	0	324,89	0	70,66	0	572,05					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
				Pelatihan yang Dilaksanakan	**Persen**					60		60		0		0		0		60						**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
				Jumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera dan Pembinaan siswa/i Berprestasi dalam Penerimaan Calon Anggota Polri yang Dibina	**Orang**					55		0		4		34		0		38						**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.02.02.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	Jenis					10	198,43	1	12,43	0	135,22	0	-	0	-	1	147,65					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.02.02.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera dan Pembinaan siswa/i Berprestasi dalam Penerimaan Calon Anggota Polri yang dibina	Orang					46	498,00	0	5,24	4	23,62	34	324,89	0	70,66	38	424,40					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.02.02.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan**	**Kegiatan**					1	332,93	0	-	0	-	0	11,48	0	88,95	0	100,43					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.02.02.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Kegiatan					1	332,93	0	-	0	-	0	11,48	0	88,95	0	100,43					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*82,62*	*65,33*					
											Predikat kinerja :									*T*	*R*					
		2.019.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Atlet Berprestasi yang Meningkat**	**Persen**					70	8.676,60	0	46,95	0	123,17	0	61,69	91,54	2.660,56	91,54	2.892,37					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.03.02.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Olahraga Pendidikan yang Dibina dan Dikembangkan**	**Persen**					80	4.144,81	0	46,95	0	123,17	0	61,69	0	2.660,56	0	2.892,37					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.03.02.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan	Unit					23	4.144,81	0	46,95	0	123,17	0	61,69	18	2.660,56	18	2.892,37					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
				Jumlah sarana olahraga yang tersedia	Unit					19	-	0		0		0		0		0	-					
		2.019.03.02.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan/diikuti**	**Persen**					**70**	**1.464,32**	**0**	**7,75**	**11,67**	**131,85**	**23,33**	**153,53**	**23,33**	**988,30**	**58,33**	1.281,42					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.03.02.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kompetisi yang dilaksanakan	Cabang Olah Raga					2	1.252,60	0	-	0	131,85	0	14,42	2	902,93	2	1.049,19					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.03.02.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabang Olah Raga yang dibina	Cabang Olah Raga					4	211,72	0	7,75	1	-	2	139,11	0	85,37	3	232,22					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.03.02.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Pelaku Olah Raga yang Dibina**	**Orang**					**35**	**532,47**	**0**	**101,50**	**0**	**152,23**	**0**	**184,94**	**2,69**	**92,45**	**2,69**	**531,12**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.03.02.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Cabor Yang Dikirim	Cabang Olah Raga					2	532,47	1	101,50	1	152,23	1	184,94	1	92,45	1	531,12					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.03.02.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga yang dikirim untuk pelatihan	Orang					11	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.03.02.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Organisasi Olahraga yang Dibina dan Dikembangkan**	**Organisasi**					**3**	**2.535,00**	**0**	-	**0**	-	**3**	**1,62**	**3**	**907,72**	**3**	**909,34**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.03.02.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi Keolahragaan yang mendapat Bantuan	Organisasi					3	2.535,00	0	-	0	-	3	1,62	3	907,72	3	909,34					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.03.02.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan**	**Jenis**					**2**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.03.02.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan					2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									***80,45***	***64,12***					
										Predikat kinerja :									***T***	***R***					
		2.019.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Cakupan pembinaan Kepramukaan**	**Persen**					**100**	**868,00**	**0**	-	**0**	-	**0**	**310,50**	**100**	**553,94**	**100**	**864,44**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.04.02.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Cakupan Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan**	**Persen**					**100**	**868,00**	**0**	-	**0**	-	**0**	**310,50**	**100**	**553,94**	**100**	**864,44**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.019.04.02.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang diberikan bantuan	Organisasi					1	550,00	0	-	0	-	1	298,00	1	252,00	1	550,00					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.019.04.02.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana Kepemudaan yang dibangun/ditingkatkan	Unit					2	318,00	0	-	0	-	0	12,50	1	301,94	1	314,44					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***100***					
										Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		2.022.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1.267,75**																**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.022.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Keragaman Budaya yang Berkembang**	**Jenis**					**4**	**1.192,75**	**0**	**21,28**	**1**	**125,74**	**0**	**78,78**	**0**	**915,50**	**1**	**1.141,30**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.022.02.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan**	**Jenis**					**1**	**1.192,75**	**0**	**21,28**	**1**	**125,74**	**0**	**78,78**	**0**	**915,50**	**1**	**1.141,30**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.022.02.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Acara Keagamaan yang dilaksanakan	Kegiatan					3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Pelaksanaan Malam Pergantian Tahun yang dilaksanakan	Kegiatan					1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		2.022.02.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dibangun	Unit					168	1.192,75	0	21,28	0	125,74	0	78,78	0	915,50	0	1.141,30					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Festival Teater Klasik yang dilaksanakan	Kegiatan					1	-	0		1		0		0		1	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Pemilihan Bujang Dara yang dilaksanakan	Kegiatan					1	-	0		0		0		0		0	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional yang disediakan	Set					21	-	0		0		0		30		30	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Tampilan Kesenian yang dilaksanakan	Tampilan					4	-	0		0		0		0		0	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100,00***	***95,69***					
										Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		2.022.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Cakupan Kesenian Tradisional yang Berkembang**	**Persen**					**50**	**75,00**	**0**	-	**0**	**15,02**	**0**	-	**0**	**55,74**	**50**	**70,76**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.022.03.02.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan**	**Persen**					**90**	**75,00**	**0**	-	**0**	**15,02**	**0**	-	**0**	**55,74**	**0**	**70,76**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Tampilan kesenian yang dibina	**Persen**					**90**	-	**0**		**0**	-	**0**	-	**90**	-	**90**	-					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		2.022.03.02.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Frekuensi Tampilan Kesenaian Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Kegiatan					1	75,00	0	-	0	15,02	0	-	1	55,74	1	70,76					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***94,35***					
										Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							-																**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		3.026.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**2.386,98**																**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		3.026.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**Persen**					**90**	**438,19**	**0,9**	**58,33**	**84**	**86,98**	**0,9**	**99,17**	**1,9**	**183,22**	**87,7**	**427,69**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		3.026.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**90**	**213,37**	**0**	**42,06**	**0**	**43,08**	**0**	**58,16**	**0**	**65,46**	**0**	**208,76**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		3.026.01.02.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Usulan Hibah dan bansos yang diverifikasi	Proposal					104	213,37	0	42,06	87	43,08	0	58,16	0	65,46	87	208,76					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		3.026.01.02.13	**Penataan Organisasi**	**Jumlah Laporan Yang Disusun**	**Dokumen**					**5**	**224,82**	**1**	**16,27**	**1**	**43,90**	**1**	**41,01**	**2**	**117,75**	5	218,93					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		3.026.01.02.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen					5	224,82	1	16,27	1	43,90	1	41,01	2	117,75	5	218,93					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									***97,44***	***97,60***					
										Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		3.026.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Cakupan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Meningkat**	**Persen**					**90**	**800,64**	**0**	**4,07**	**0**	**0,96**	**0**	-	**0**	-	**0**	**5,04**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		3.026.02.02.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan**	**Persen**					**90**	**5,04**	**0**	**4,07**	**0**	**0,96**	**0**	-	**0**	-	**0**	**5,04**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		3.026.02.02.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dibangun	Unit					168	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		3.026.02.02.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Wisata Khas Daerah yang dilaksnakan	Event					3	5,04	0	4,07	0	0,96	0	-	0	-	0	5,04					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Event Wisata Religi yang diselengarakan	Event					1	-	0		0		0		0		0	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Festival Sungai Indragiri yang dilaksanakan	Kegiatan					1	-	0		0		0		0		0	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*0*	*100*					
											Predikat kinerja :									*SR*	*ST*					
		3.026.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Keragaman Budaya yang Berkembang**	**Jenis**					**4**	**468,15**	**0**	**2,76**	**0**	**3,47**	**1**	**198,89**	**0**	**9,74**	**1**	**214,85**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		3.026.02.02.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Adat yang Dibina**	**Lembaga**					**1**	**468,15**	**0**	**2,76**	**0**	**3,47**	**1**	**198,89**	**0**	**9,74**	**1**	**214,85**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		3.026.02.02.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Pelstarian Budaya Daerah	Kali					1	276,15	0	2,76	0	-	0	18,18	0	3,88	0	24,81					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		3.026.02.02.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana Prasarana Nilai Budaya yang direhabilitasi	Unit					2	276,15	0	-	0	3,47	1	180,71	0	5,85	1	190,04					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*25,00*	*45,89*					
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					
		3.026.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Cakupan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Meningkat**	**Persen**					**90**	**800,64**	**0**	**35,99**	**0**	**111,80**	**0**	**157,10**	**19**	**460,43**	**19**	**765,31**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		3.026.02.02.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Prasarana Pariwisata yang Memenuhi Standar**	**Persen**					**80**	**549,08**	**0**	**1,54**	**0**	**56,81**	**0**	**116,32**	**19**	**361,70**	**19**	**536,37**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		3.026.02.02.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dibangun	Unit					168	549,08	0	1,54	0	56,81	0	116,32	4	361,70	4	536,37					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		3.026.02.02.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang Direkomendasikan**	**Persen**					**100**	**246,53**	**33,33**	**34,45**	**133,33**	**54,99**	**33,33**	**40,78**	**0**	**98,73**	**199,99**	**228,94**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		3.026.02.02.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota dikoordinasi	Jumlah pelaku industri dan Usaha Kepariwisataan yang dikoordinasi	Usaha					3	246,53	1	34,45	4	54,99	1	40,78	0	98,73	6	228,94					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*21,11*	*95,59*					
											Predikat kinerja :									*SR*	*ST*					
		3.026.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata**	**Persen**					**35**	**610,00**	**6,3**	**11,00**	**16,82**	**3,23**	**8,9**	**237,53**	**7,8**	**279,63**	**39,82**	**531,39**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		3.026.03.02.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketertarikan atas Destinasi Pariwisata yang Dipromosikan**	**Persen**					**80**	**610,00**	**14,4**	**11,00**	**38,4**	**3,23**	**20,4**	**237,53**	**17,8**	**279,63**	**91**	**531,39**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		3.026.03.02.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Bahan Promosi Yang Disediakan	Jenis					50	610,00	1	11,00	0	3,23	3	237,53	3	279,63	7	531,39					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Database dan Informasi Pariwisata Daerah	Kegiatan					1	-	0		0		0		1		1	-					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*91,00*	*87,11*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		3.026.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Cakupan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang**	**Persen**					**70**	**70,00**	**0**	-	**0**	**1,92**	**0**	-	**0**	**2,82**	**0**	**4,74**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		3.026.05.02.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula yang Diberikan Pelatihan**	**Persen**					**70**	**70,00**	**0**	-	**0**	**1,92**	**0**	-	**0**	**2,82**	**0**	**4,74**					**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**
		3.026.05.02.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Loksasi Jelajah Wisata Alam dan Field Trip yang dilaksanakan	Objek					2	70,00	0	-	0	1,92	0	-	0	2,82	0	4,74					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*0*	*6,76*					
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					
		2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								-															**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.023	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								**14.486,72**															**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.023.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**Persent**					**100**	**3.534,79**	**31,03**	**651,30**	**18,36**	**561,10**	**28,50**	**1.167,14**	**18,77**	**715,15**	**69,05**	**3.094,69**					**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.023.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah**	**Persent**					**100**	44,86	**62,82**	11,53	**7,69**	5,00	**14,10**	12,02	**15,38**	12,54	100,00	41,09					**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.023.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					39	44,86	10	11,53	6	5,00	11	12,02	12	12,54	39	41,09					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtixar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan					2	-	2								2	-					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persent**					**100**	**2.718,62**	**25**	**549,12**	**25**	**439,30**	**25**	**812,61**	**25**	**532,99**	**100**						**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.023.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	2.718,62	1	549,12	1	439,30	1	812,61	1	532,99	1	2.334,01					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**Persent**					**100**	**7,15**		-	-	-	-	-	-	-	0	-					**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.023.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	Stel					26	-		-		-		-		-	0	-					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang					1	7,15		-		-		-		-	0	-					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persent**					**100**	**169,80**	**14,85**	**29,66**	**24,13**	**57,30**	**39,24**	**40,28**	**5,15**	**20,94**	**83,36**	**148,17**					**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.023.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					10	1,30		-		-	10	1,30		-	10	1,30					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kelengkapan sarana pengolahan dan oenvimnanan arsio	Unit					7	24,50		-	4	12,52	3	8,66		1,80	7	22,98					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit					6	-			6						6	-					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					3688	16,38	260	2,61	320	3,36	3100	10,12	8	0,28	3688	16,37					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					12070	9,68	2070	2,42		-	10000	7,24		-	12070	9,66					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					2500	3,90	1500	2,60		-	1000	1,30		-	2500	3,90					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					36	114,04	4	22,03	5	41,41	3	11,65	4	18,86	16	93,95					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					30	-	4		4		3		3		14	-					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					12	-	3		3		3		3		12	-					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persent**					**100**	-	**0**		0						0	-					**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.023.01.02.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	Unit					1	-	0		0						0	-					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persent**					**100**	**555,36**	**26,67**	**51,46**	**22,50**	**50,99**	**29,17**	**295,49**	**21,67**	**136,51**	**100,00**	**534,44**					**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.023.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					400	1,92	120	0,6	70	0,36	150	0,68	60	0,27	400	1,91					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		2.023.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					3	112,54	3	25,43	3	25,31	3	24,33	3	29,65	3	104,72					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					7	440,91	7	25,43	7	25,31	7	270,47	7	106,59	7	427,81					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					15	-	15		15		15		15		15	-					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persent**					**100**	**39,00**	**25,83**	**9,54**	**12,50**	**8,51**	**35,00**	**6,75**	**26,67**	**12,18**	**100,00**	**36,98**					**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.023.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipergunjang Perizinannya	Unit					12	35,00	3	8,79	3	8,51	2	4,20	4	11,48	12	32,98					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					15	4,00	4	0,75	-	-	8	2,55	3	0,70	15	4,00					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.01.02.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Gedung					7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									**96,67**	**73,98**					
											Predikat kinerja :									***ST***	***S***					
		2.023.02.0	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**Persent**					**67,5**	**10.951,93**	**5,83**	**21,84**	**7,29**	**1.973**	**29,17**	**6.530**	**22,17**	**1.442**	**64,46**	**9.966**					**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.023.02.02.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota vang terakreditasi**	**Persent**					**70**	**666,93**	**11,67**	**19,08**	**14,58**	**135,23**	**23,33**	**212,56**	**9,33**	**292,16**	58,91	659					**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.023.02.02.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional	Jumlah Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan	Orang					2	32,83	2	7,20	2	19,43				5,75	2	32,38					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.02.02.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan yang dilatih	Orang					25	34,40		-		-	25	34,08		-	25	34,08					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.02.02.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Perpustakaan Keliling dan ULP Kecamatan yang di Kelola	Unit					20	43,98	20	11,88		-	20	13,19	20	11,90	20	36,97					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.02.02.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul Buku					42	15,02		-		-		6,89		8,01	0	14,90					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.02.02.01.010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan sarana dan prasarana informasi (Pameran koleksi bahan perpustakaan)	Kali					1	540,70		-	1	115,80	1	158,40	1	266,50	1	540,70					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.02.02.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Baca dan Literasi yang dilaksanakan**	**Persent**					**70**	**10.285,00**	**0**	2,76	0,00	1.837,37	35,00	6.317,49	35,00	1.149,85	70,00	9.307,47					**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.023.02.02.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Cakupan pengenalan nilai-nilai luhur dan kebiasan membaca pada anak melalui lomba	Orang					60	35,00		2,76		-	60	29,37		-	60	32,13					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.023.02.02.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Perpustakaan	Unit					1	10.250,00		-		1.837,37		6.288,12	1	1.149,85	1	9.275,34					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									**92,08**	**94,66**					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		2.024.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								**96,10**															
		2.024.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Nilai monitoring hasil pengawasan kearsipan**	**Persent**					**100**	**96,10**	**100,00**	**77,32**	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**100,00**	**77,32**					**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.024.02.02.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Arsip Dinamis yang terpelihara**	**Persent**					**100**	**96,10**	**100,00**	**77,32**	**0**	-	**0**	-	**0**	-	100,00	77,32					**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
		2.024.02.02.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah SDM Pengelola Arsip yang dilatih	Orang					25	34,02	25	30,27	0	-	0	-	0	-	25	30,27					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.024.02.02.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip daerah yang terpelihara	SKPD					10	20,00	10	13,30	0	-	0	-	0	-	10	13,30					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.024.02.02.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah arsip daerah yang terdata dan tertata	Perangkat Daerah					2	42,08	2	33,75	0	-	0	-	0	-	2	33,75					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***80,46***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***T***					
		3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																							
		3.025.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**13.080,06**															**DINAS PERIKANAN**
		3.025.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Anaratur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**5.933,26**	**29,99**	**982,48**	**30,28**	**1.754,56**	**18,29**	**1.052,11**	**21,43**	**1.488,92**	**100**	**5.278,06**					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Persen**					**100**	**40,04**	**55**	**0,94**	**20**	**2,05**		**15,55**	**25**	**15,85**	100	34,40					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang	Dokumen					5	8,79	3	0,94	2	1,10		1,64		4,70	5	8,37					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen					4	31,24	2			0,96		13,92	2	11,15	4	26,02					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang**	**Persen**					**100**	**4.406,29**	**25**	**776,08**	**25**	**1.325,94**	**25**	**903,65**	**25**	**864,87**	100	3.870,53					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberkan Gaji dan Tunjangan	orang					39	4.406,29	39	776,08	39	1.325,94	39	903,65	39	864,87	39	3.870,53					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi dan berkinerja baik**	**Persen**					**100**	**24,00**					**100**				20,825	100	20,83					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.01.02.05.02	Pensadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenekanannya	Stel					40	24,00					40				20,825	40	20,83					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang	Diklat					0										0	0					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**439,13**	**30,93**	**98,84**	**23,47**	**113,49**	**20,67**	**47,30**	**24,93**	**99,79**	100	359,43					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang	Jenis					10	3,00	6	2,00	2	0,60	2	0,40			10	3,00					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah lenis Peralatan dan Perlenekapan Kantor vang	kenis					1	26.06	1	7.96	1	4.99	1	-	1	13.06	1	26.02					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis					3	90,00	3	20,90	3	31,08	3	15,00	3	23,00	3	89,98					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Jenis					3	4,20	3		3		3	3,5	3	0,7	3	4,20					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan vang disediakan	Eksemplar					1776	12,72	444	1,06	444	4,24	444	3,18	444	4,24	1776	12,72					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukanyang	Kali					125	303,15	32	66,91	26	72,58	5	25,22	62	58,79	125	223,52					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**					**100**	-									0	-					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.01.02.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Dinas yang disediakan	Unit					0										0						DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.08	**Penvediaan Iasa Penunians Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Iasa Penuniane**	**Persen**					**100**	**819,80**	**25,00**	**77,59**	**20,83**	**255,21**	**27,50**	**71,29**	**26,67**	**384,15**	100	788,23					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	nersen					100	3,20	25	0,80	12,5	0,50	12,5	1,00	30	-	100	2,30					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.08.02	Penyediaan Iasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening vang dibayarkan	Rekening					4	74.60	4	11.14	4	10.46	4	7.61	4	14.80	4	44.01					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.08.04	Penyediaan Iasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang					60	742.00	60	65,64	60	244,25	60	62,67	60	369,35	60	741,92					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Peranekat Daerah vane terpelihara dengan**	**Persen**					**100**	**204,00**	**14,04**	**29,04**	**62,12**	**57,87**	**18,28**	**14,32**	**5,56**	**103,44**	100	204,65					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit					6	174,00	1	24,04	3	36,37	1	6,32	1	99,44	6	166,15					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					1	15,00			1	15					1	15,00					DINAS PERIKANAN
		3.025.01.02.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					55	15,00	14	5	20	6,5	21	8,00		4,00	55	23,50					DINAS PERIKANAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***90,41***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***T***					
		3.025.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap**	**Ton**					**79000**	**4.723,95**	**15.082,59**	**10,69**	**15.082,59**	**111,66**	**15.082,59**	**339,82**	**15.082,59**	**3467,02**	**60.330,35**	**3.929,19**					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.03.02.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase KUB/Kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan Sapras Penangkapan ikan**	**Persen**					**90**	**4.634,24**		**0,97**	**10,00**	**90,29**	**40,00**	**308,41**	**21,61**	**3.416,95**	71,61	3.816,62					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.03.02.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Jenis Data Perikanan Tangkap yang Dihasilkan	kenis					3	60,96			1,00	3,02	1,00	21,20	1,00	29,55	3,00	53,77					DINAS PERIKANAN
		3.025.03.02.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap yang diberikan kepada KUB/Kelompok	Unit					8	750,33					8,00	182,68		533,61	8,00	716,28					DINAS PERIKANAN
		3.025.03.02.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah KUB/Kelompok Nelayan yang di Bantu	Kelompok					93	3.822,95		0,97		87,27		104,53	36,00	2.853,80	36,00	3.046,57					DINAS PERIKANAN
		3.025.03.02.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten /Kota**	**Cakupan Pemberdayaan Nelayan Kecil**	**Persen**					**100**	**48,00**		**0,87**	**40,00**	**12,36**	**40,00**	**16,30**	**20,00**	**4,86**	100,00	34,39					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.03.02.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah KUB/Kelompok Nelayan Binaan yang mampu Meningkatkan Pendanatan Nelayan	Kelompok					5	48,00		0,87	2,00	12,36	2,00	16,30	1,00	4,86	5,00	34,39					DINAS PERIKANAN
		3.025.03.02.03	**Pengelolaan dan Penvelenggaraan Tempat Pelelanaan Ikan (TPI)**	**Persentase TPI sesuai standard**	**Persen**					**60**	**91,70**		**8,84**		**9,01**	**60,00**	**15,12**		**45,20**	60,00	78,17					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.03.02.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang di Kelola	Unit					1	91,70		8,84		9,01	1,00	15,12		45,20	1,00	78,17					DINAS PERIKANAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***93,19***	***79,75***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***T***					
		3.025.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**Ton**					**4500**	**2.124,82**	**621,25**	**24,12**	**621,25**	**108,22**	**621,25**	**150,59**	**621,25**	**978,43**	**2.484,98**	**1.261,36**					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.04.02.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan sesuc Usahanva dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pembudidayaan ikan yang memiliki izin usaha budidaya perikanan**	**Persen**					**60**	**27,96**		**0,99**		**7,79**	**60,00**	**7,72**		**8,08**	60,00	24,58					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.04.02.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau	Jumlah Unit Budidaya yang dapat dikembangkan sistem usahanya	Usaha					1	27,96		0,99		7,79	1,00	7,72		8,08	1,00	24,58					DINAS PERIKANAN
		3.025.04.02.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Cakupan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Persen**					**100**	**217,91**		**2,05**	**33,33**	**6,90**	**33,33**	**1,73**	**33,33**	**42,71**	100,00	53,39					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.04.02.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok pembudidaya binaan yang mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya	Pokdakan					3	60,00		2,05	1,00	6,90	1,00	1,73	1,00	36,89	3,00	47,57					DINAS PERIKANAN
		3.025.04.02.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi. serta Penvelenggaraan Pendidikan dan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Mengikuti Pelatihan	orang					2	157,91								5,82	-	5,82					DINAS PERIKANAN
		3.025.04.02.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Cakupan sapras Pembudidayaan Ikan yang tersedia**	**Persen**					**90**	**1.878,95**		**21,07**	**3,70**	**93,53**	**11,11**	**141,14**	**61,11**	**927,64**	75,93	1.183,39					**DINAS PERIKANAN**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
												K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		3.025.04.02.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis data Perikanan Budidaya	Jenis					1	86,11		9,79		25,35		14,90	1,00	18,62	1,00	68,66					DINAS PERIKANAN
		3.025.04.02.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan perikanan	Unit					6	960,52		9,55	1,00	23,06		39,41		421,43	1,00	493,45					DINAS PERIKANAN
		3.025.04.02.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdakan Yang di Bantu	Kelompok					12	744,30				15,12		59,93	3,00	480,83	3,00	555,88					DINAS PERIKANAN
		3.025.04.02.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi Budidaya yang dapat dikendalikan kesehatan ikan dan lingkungan nya	Lokasi					2	36,82		1,06		12,31	1,00	9,02	1,00	5,37	2,00	27,77					DINAS PERIKANAN
		3.025.04.02.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Kajian Pengembangan Lahan Budidaya Perikanan	Dokumen					1	51,20		0,68		17,69		17,88	1,00	1,38	1,00	37,63					DINAS PERIKANAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*94,79*	*58,46*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*R*					
		3.025.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun**	**KgKapitaTh**					**39,9**	**248,03**	**10,71**	**19,36**	**10,71**	**46,05**	**10,71**	**21,44**	**10,71**	**90,13**	**42,83**	**176,98**					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.06.02.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Persentase pembudidayaan ikan Skala Mikro dan Kecil yang memiliki Usaha Pengolahan Hasil Perikanan serta Cakupan Bahan Baku Industri**	**Persen**					**50**	**32,86**		**0,73**		**14,77**		**-**	**50,00**	**10,43**	50,00	25,94					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.06.02.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prodak perikanan yang dipromosikan dan dipamerkan	Jenis					2	32,86		0,73		14,77			2,00	10,43	2,00	25,94					DINAS PERIKANAN
		3.025.06.02.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase pembudidayaan ikan Skala Mikro dan Kecil yang memiliki Usaha Pengolahan Hasil Perikanan serta Cakupan Bahan Baku Industri**	**Persen**					**90**	**215,17**		**18,63**		**31,28**	**45,00**	**21,44**	**45,00**	**79,70**	90,00	151,05					**DINAS PERIKANAN**
		3.025.06.02.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Menu Serba Ikan yang dikonsumsi dan diolah	Menu					10	162,52		6,97		30,68		5,58	10,00	66,00	10,00	109,23					DINAS PERIKANAN
		3.025.06.02.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Usaha Kecil yang dibina	Kelompok					1	52,65		11,66		0,60	1,00	15,86		13,70	1,00	41,82					DINAS PERIKANAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*74,57*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*S*					
		3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								**23.772,27**															**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**23.772,27**	**22.40**	**1.512.77**	**80.20**	**3.348.50**	**93.66**	**5.260.50**	**177.47**	**6.172.46**	**373.7278571**						**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**cakupan Penunjang urusan pemerintah daerah**	**persen**					**68**	**9.563.96**	**12.55**	**1.283.14**	**7.73**	**2.337.18**	**22.15**	**2.506.07**	**20.79**	**1.495.80**	**63.22**	**7.622.19**					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun**	**persen**					**100**	**272,03**	**-**	**5,98**	**7**	**18,42**	**52,22**	**72,22**	**41,11**	**57,79**	**100,00**	154,41					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan/Program Kerja yang	Dokumen					5	187.63	-	5.98	1	17.32	2	28.28	2.00	35.67	5	87.25					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Yang disusun	Laporan					4	28,05	0	-	0	1,10	2	15,18	2	10,84	4	27,12					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Kali					75	56.36		-	-	-	50	28.76	25	11.28	75	40.04					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persen**					**100**	**6.658,23**	**25,00**	**1.045,33**	**25,00**	**1.839,54**	**25,00**	**1.653,94**	**25,00**	**790,43**	100	5.329,24					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	6.651,78	1	1.045,33	1	1.839,54	1	1.653,94	1	790,43	1	5.329,24					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan					1	6.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**persentase aset dan BMD pada pengelola yg di**	**persen**					**100**	**762.02**	**0.5**	**14.40**	**0.7**	**175.86**	**0.8**	**347.25**	**0.5**	**137.06**	**0.625**	**674.57**					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa keamanan gedung kantor yang dibayar	orang					4	57.60	4	14.40	4	14.40	4	14.40	4	14.40	4	57.60					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset Barang Milik Daerah pada Dinas	Jenis					5	672.99	0	-	2	161.46	3	332.85	-	122.66	5	616.97					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi pelatihan formal bagi ASN**	**persen**					**100**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	0	-					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang	Stel					192	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan	Orang					0	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi dan sarana prasarana aparatur perkantoran**	**persen**					**100**	**1.199,41**	**5,36**	**76,47**	**14,73**	**187,75**	**28,38**	**288,38**	**38,59**	**304,36**	**87,06**	856,96					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang	Jenis					3	14.19	0	-	2	10.45	1	3.73	0	-	3	14.18					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sediakan	Jenis					20	47.51	0	-	0	-	5	13.70	15	28.89	20	42.59					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak Yang disediakan	liter					7952	126.76	925	14.82	1075	18.77	2500	25.24	3452	25.10	7952	83.93					DINAS PERKEBUNAN
				jumlah makan minum rapat rutin, tamu, jumat bersih, hari-hari besar dan air galon						4982		100		120		130		4632								DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan					12	7.10	2	4.60	0	-	8	1.50	2	1.00	12	7.10					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Media					14	425.00	0	-	2	85.79	6	169.33	6	150.31	14	405.43					DINAS PERKEBUNAN
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah yang						62																DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang	Kali					119	578,86	15	57,05	25	72,74	30	74,88	45	99,06	115	303,73					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah yang**	**persen**					**100**	**532,78**	**32**	**121,16**	**7**	**108,41**	**7**	**112,07**	**7**	**131,34**	53	472,98					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos untuk administrasi/Surat Menyurat Perkantoran yang disediakan	Jenis					2	2,42	2	2,42	-	-	-	-	-	-	2	2,42					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik, Telepon, Berlangganan TV Kabel dan	jenis					4	-	4	24.45	4	24.41	4	27.55	4	26.38	4	102.79					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang dibayarkan dan Jumlah Petugas	orang					18	387,86	18	94,29	18	84,00	18	84,52	18	104,96	18	367,77					DINAS PERKEBUNAN
				jumlah petugas kebersihan yang dibayarkan	orang					6		6		6		6		6		6	6.00					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase BMD yang disediakan**	**Persen**					**0**	**131.00**	**25.00**	**19.80**	**-**	**7.20**	**41.67**	**27.46**	**33.33**	**71.07**	**100**	125.53					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara/Service	Unit					3	90,80	1	7,20	-	7,20	1	14,01	1	61,92	3	90,33					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jenis					6	40,20	1	12,60	-	-	3,00	13,45	2,00	9,15	6	35,20					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Gedung Kantor yang direhabilitasi	Unit					0	-	-	-	-	-	-	-	-		0	-					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.01.02.13	**Penataan Organisasi**	**persentase dokumen anjab dan ABK yang**	**persen**						**8.50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**4.75**	**50**	**3.75**	**100**	8.50					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.01.02.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang disusun	Dokumen					2	8,50	-	-	-	-	50	4,75	50	3,75	100	8,50					DINAS PERKEBUNAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*85,02*	*83,56*					
											Predikat kinerja :									*T*	*T*					
		3.027.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA**	**Persentase ketersediaan dan pengembangan**	**persen**					**90**	**1.344.89**	**-**	**7.20**	**29.70**	**294.34**	**9.15**	**381.86**	**7.32**	**429.08**	**46.155**	**1.112.48**					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.02.02.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Jumlah Penggunaan Sarana Pertanian yang Diawasi	**jenis**					**4**	**1.214,26**	**-**	**7,20**	**6,09**	**282,74**	**18,29**	**348,30**	**14,63**	**407,54**	**39,01**	1.045,78					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.02.02.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumalh Varietas Bibit Unggul Lokal, Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk yang diteliti	Komoditas					3	47,32	0	-	0	13,72		17,57	0	1,15	0	32,44					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.02.02.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkebunan/Pertanian	Jenis					41	1.166.93	0	7.20	5	245.82	15	263.61	12	363.31	32	879.94					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.02.02.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase bibit unggul yang disediakan**	**persen**					**90**	**130,63**	**-**	**-**	**53,30**	**11,60**	**-**	**33,56**	**-**	**21,54**	53,3	66,70					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.02.02.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Bibit Unggul Daerah yang disediakan	Komoditas					3	29.60	-	-	2.00	10.34	-	5.87	-	2.74	2	18.95					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.02.02.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Bibit tanaman sela pada kebun kelapa yang	Batang					5000	101.03	-	-	2.000.00	1.26	-	27.69	-	18.80	2000	47.75					DINAS PERKEBUNAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*0*	*86,13*					
											Predikat kinerja :									*SR*	*T*					
		3.027.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA**	**Persentase ketersediaan dan pengembangan**	**persen**					**45,22**	**9.820,20**	**-**	**22,56**	**8**	**239,93**	**11**	**1.632,19**	**30**	**3.468,58**	**47,87**	**5.363,26**					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.03.02.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana	**Persen**					**96**	**568.51**	**-**	**-**	**4**	**65.65**	**10**	**258.32**	**11**	**207.25**	**25**	531.22					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.03.02.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	luas tanaman Perkebunan pada Lahan Kering yang dikembangkan	Hektar					27	18,03	-	-	-	-	-	14,35	-	-	0	14,35					DINAS PERKEBUNAN
				jumlah peralatan dan pengolahan hasil perkebunan	unit					2																DINAS PERKEBUNAN
		3.027.03.02.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Persentase Pelayanan Informasi Pasar, Potensi, harga komoditas, sentra produksi, fasilitasi dan pembukaan	Persen					90	550,48	0	-	15	65,65	35	243,97	40	207,25	90	516,87					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.03.02.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Luas Areal Perkebunan Rakyat yang dikembangkan	Hektar					51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.03.02.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun**	**lokasi**					**56**	**9.251,70**	**-**	**22,56**	**11**	**174,28**	**11,55**	**1.373,87**	**48**	**3.261,33**	**70,74**	4.832,04					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.03.02.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Sarana dan Prasarana Trio Tata Air Perkebunan yang dibangun/Direbilitasi	km					104,7	6.334,90	0	22,56	5	105,82	10	949,99	65	1.883,87	80	2.962,24					DINAS PERKEBUNAN
											-									0	-					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.03.02.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jumlah jalan produksi yang dibangun	lokasi					10	1.855.44	-	-	-	19.60	2	270.75	8	1.033.39	10	1.323.74					DINAS PERKEBUNAN
											-									0	-					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.03.02.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	jumlah pintu klep yang dibangun	lokasi					6	672.50	-	-	-	15.21	1	33.55	3	327.68	4	376.44					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.03.02.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Jumlah peralatan dan pengolahan hasil perkebunan	unit					5	210.36	0	-	2	33.65	0	119.58	0	16.39	2	169.62					DINAS PERKEBUNAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*76,18*	*72,83*					
											Predikat kinerja :									*T*	*S*					
		3.027.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase penurunan serangan OPT**	**persen**					**52.5**	**1.001.14**	**1.40**		**7.50**	**113.00**	**12.25**	**146.85**	**34.29**	**158.16**	**55.44**	**418.01**					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.05.02.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Jumlah Bencana Pertanian yang Ditangani**	**Persen**					**56.25**	**1.001.14**	**1.40**	**-**	**7.50**	**113.00**	**12.25**	**146.85**	**34.29**	**158.16**	**54.04**	418.01					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.05.02.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Pengendalian OPT dan Penanganan gangguan Usaha Perkebunan yang ditangani	Hektar					680	273,69	30	-	150	62,40	250	103,65	250	56,90	680	222,95					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.05.02.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Bimtek/Pelatihan peningkatan mutu dan Keamanan Produksi Perkebunan yang dilaksanakan	Kali					0	31,93	-	-	-	12,96	-	10,11	-	-	0	23,07					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.05.02.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Luas Kebun Kelapa yang diremajakan	Hektar					121	695,52	-	-	-	37,64	-	33,09	80	101,26	80	171,99					DINAS PERKEBUNAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*96,07*	*41,75*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*SR*					
		3.027.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**cakupan rekomendasi izin usaha pertanian yang diterbitkan dan dievaluasi**	**persen**					**90**	**265,05**	**-**	**-**	**19,23**	**23,33**	**19,23**	**23,48**	**50**	**69,19**	**88,46**	**116,00**					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.06.02.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Direkomendasikan dan atau Dibina serta Dievaluasi**	**Perusahaan**					**26**	**265,05**	**-**	**-**	**19,23**	**23,33**	**19,23**	**23,48**	**50**	**69,19**	**88,46**	116,00					**DINAS PERKEBUNAN**
		3.027.06.02.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin perusahaannya	perusahaan					26	265,05	-	-	5	23,33	5	23,48	13	69,19	23	116,00					DINAS PERKEBUNAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*0*	*43,77*					
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		
		3.027.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	persen					65	1.777,02	8,45	199,87	8,45	340,72	20,11	570,05	35,57	551,65	72,58	1.662,29					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.07.02.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian yang	Persen					95	1.777,02	8,45	199,87	8,45	340,72	20,11	570,05	35,57	551,65	72,58	1.662,29					DINAS PERKEBUNAN
																										DINAS PERKEBUNAN
																										DINAS PERKEBUNAN
				Jumlah kelompok/petani dan pelaku agribisnis yang dilatih	kelompok tani					4		0		0		2		2		4						DINAS PERKEBUNAN
		3.027.07.02.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan yang dibinaraikan	Orang					71	1.351,66	18	187,50	18	298,55	18	472,32	17	393,29	71	1.351,66					DINAS PERKEBUNAN
				Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan yang ditingkatkan Kemampuannya	Orang					71	-	18		18		18		17		71	-					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.07.02.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani/Lembaga yang ditingkatkan kemampuannya	Kelompok Tani					1	188,92	-	9,00	-	18,87	-	62,52	-	52,24	-	142,63					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.07.02.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	kecamatan					20	162,68	-	-	-	15,70	4	18,98	16	106,12	20	140,80					DINAS PERKEBUNAN
		3.027.07.02.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok/petani dan pelaku agribisnis yang dilatih	Kelompok tani					0	34,07	-	3,37		7,60		16,23		-	-	27,20					DINAS PERKEBUNAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*76,40*	*93,54*					
											Predikat kinerja :									*T*	*ST*					
		2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-															DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN
		2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								16.112,86															DINAS PANGAN, TANAMAN
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	persen					100	12.978,92	100	2.779,17	100	2.740,96	100	2.309,73	100	2.387,16	100	10.217,02					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	persen					100	12.978,92	100	2.779,17	100	2.740,96	100	2.309,73	100	2.387,16	100	10.217,02					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	12.978,92	1	2.779,17	1	2.740,96	1	2.309,73	1	2.387,16	1	10.217,02					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*78,72*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Ketersediaan Pangan	Persen					70	1.416,68	0,00	-	0,00	18,29	0,00	257,99	59,50	956,92	59,50	1.233,20					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.02.02.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Persen					70	1.416,68	0,00	-	0,00	18,29	0,00	257,99	59,50	956,92	59,50	1.233,20					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.02.02.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Gudang Lumbung Pangan Masyarakat yang di Bangun	Unit					2	1.132,68	0	-	0	-	0	228,00	3	897,65	3	1.125,65					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah Kelompok Tani Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina	Kelompok Tani					2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.02.02.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pasca panen yang disediakan	Unit					5	284,00	0	-	0	18,29	0	29,99	1	59,27	1	107,55					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*85,00*	*87,85*					
											Predikat kinerja :									*T*	*T*					
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Persen					75	1207,26	2,08	46,32	4,86	320,31	21,53	239,47	38,19	429,30	66,67	1.035,39					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.03.02.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang disalurkan	Persen					100	343,71	6,25	3,95	14,58	114,19	14,58	57,72	14,58	70,79	50,00	246,65					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.03.02.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Berkala Harga Pangan Pokok	Laporan					12	65,50	3	-	3	21,50	3	16,72	3	18,90	12	57,12					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah pelaksanaan Promosi hasil pertanian/perkebunan Unggul Daerah	Kali					4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.03.02.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	luas Areal tanaman Perkebunan pada Lahan Kering yang dikembangkan	Hektar					56,5	163,39	0	3,95	0	68,62	0	12,33	0	42,07	0	126,96					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.03.02.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang dibina	Gapoktan					3	64,82	0	-	1	17,45	1	20,85	1	9,83	3	48,13					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.03.02.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Dokumen Laporan Berkala Hasil Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan	Dokumen					1	50,00	0	-	0	6,61	0	7,83	0	-	0	14,44					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.03.02.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Penguatan Desa Mandiri Pangan	Desa					9	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.03.02.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang tersedia	Persen					90	203,55	0,00	13,99	0,00	32,89	50,00	69,63	0,00	44,13	50,00	160,64					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.03.02.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian (Padi, Jagung)	Kali					1	160,55	0	13,99	0	24,68	1	51,01	0	36,20	1	125,88					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.03.02.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Beras CPP	Kg					12000	43,00	0	-	0	8,21	0	18,62	0	7,94	0	34,77					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.03.02.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Kualitas Konsumsi Pangan masyarakat	Persen					85	660,00	0,00	28,39	0,00	173,23	0,00	112,11	100,00	314,37	100,00	628,10					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.03.02.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Penduduk yang disusun	Dokumen					1	80,00	0	4,00	0	12,15	0	28,11	1	33,18	1	77,45					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.03.02.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah dilaksanakannya Lokakarya Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu (LCM) serta pengaruhnya terhadap Pola dan Susunan Gizi dan Cita Rasa Hidangan	Kali					2	580,00	0	24,38	0	161,08	0	84,00	2	281,19	2	550,66					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah Kelompok Tani yang dibina	Kelompok Tani					5	-	0		0		0		5		5	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				[+22:37]umlah KWT yang melaksanakan P2L	KWT					2	-	0		0		0		2		2	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*88,89*	*85,76*					
											Predikat kinerja :									*T*	*T*					
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan Kerawanan Pangan yang Tertangani	Persen					100	120,00	0,00	-	0,00	20,35	0,00	21,12	0,00	50,05	0,00	91,51					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.04.02.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah rawan pangan yang di beri bantuan	Kecamatan					2	120,00	0,00	-	0,00	20,35	0,00	21,12	0,00	50,05	0,00	91,51					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.04.02.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyaluran Bantuan Daerah Rawan Pangan Pasca Bencana/Keadaan Darurat	Person					90	120,00	0	-	0	20,35	0	21,12	0	50,05	0	91,51					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*0*	*76,26*					
											Predikat kinerja :									*SR*	*T*					
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Mutu Keamanan Pangan	Persen					75	390,00	0,00	16,56	42,86	66,74	0,00	37,01	0,00	217,69	42,86	338,00					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.05.02.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Monev Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persen					90	390,00	0,00	16,56	42,86	66,74	0,00	37,01	0,00	217,69	42,86	338,00					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		2.09.05.02.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar	Kecamatan					7	390,00	0	16,56	3	66,74	0	37,01	0	217,69	3	338,00					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*57,14*	*86,67*					
											Predikat kinerja :									*R*	*T*					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							-																**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							6.526,20																**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi**	**Persen**					**100**	**1.910,97**	**25,95**	**237,56**	**28,21**	**444,05**	**25,23**	**487,13**	**26,87**	**497,51**	**63,40**	**1.666,25**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Persen**					**100**	**436,76**	**24,88**	**12,97**	**23,06**	**87,93**	**13,45**	**90,30**	**13,77**	**203,99**	**75,17**	**395,18**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen					2	205,21	0	6,00	1	42,44	1	31,31	0	111,67	2	191,42					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	Dokumen					5	-	2		1		0		2		5	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah Dokumen RKT yang disusun	Dokumen					2	-	0		1		0		0		1	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun	Dokumen					5	231,55	5	6,97	0	45,49	0	58,99	0	92,32	5	203,76					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen					5	-	1		1		2		1		5	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kali					33	-	3		6		10		14		33	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara**	**Persen**					**100**	**43,20**	**100,00**	**10,80**	**100,00**	**10,80**	**100,00**	**10,80**	**100,00**	**10,80**	**100,00**	**43,20**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					4	43,20	4	10,80	4	10,80	4	10,80	4	10,80	4	43,20					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi**	**Persen**					**100**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Stel					160	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang					6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**760,37**	**23,46**	**66,42**	**35,10**	**168,25**	**23,07**	**237,43**	**18,36**	**105,00**	**99,99**	**577,10**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan yang disediakan	Jenis					14	243,60	0	29,52	14	39,39	0	168,81	0	5,85	14	243,57					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					22	-	22		0		0		0		22	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set					56	-	0		12		40		4		56	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					5749	67,17	1437	3,85	1437	20,41	1437	21,40	1438	21,20	5749	66,86					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HONTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					1145	-	286		286		286		286		1144	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	persen					90	24,22	5	1,00	40	11,10	15	3,50	30	8,62	90	24,22					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					1680	11,00	420	0,60	420	1,80	420	1,20	420	1,65	1680	5,25					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					65	414,38	10	31,45	20	95,55	15	42,53	20	67,69	65	237,21					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					79	-	12		35		17		15		79	-					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**					**100**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	Unit					3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**					**100**	**556,13**	**33,33**	**134,57**	**22,22**	**136,62**	**22,22**	**129,71**	**22,22**	**135,51**	**100,00**	**536,41**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					700	3,00	700	3,00	0	-	0	-	0	-	700	3,00					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					24	145,13	6	29,57	6	34,62	6	27,71	6	33,51	24	125,41					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Pengelola Aset dan Arsip yang dibayarkan	Orang					3	36,00	0,75	9,00	0,75	9,00	0,75	9,00	0,75	9,00	3	36,00					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan	Orang					9	96,00	2,25	27,00	2,25	27,00	2,25	27,00	2,25	27,00	9	108,00					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah tenaga Administrasi Surat Menyurat yang dibayarkan	Orang					8	96,00	2	24,00	2	24,00	2	24,00	2	24,00	8	96,00					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah Tenaga Juru Mudi (Supir) yang dibayarkan	Orang					1	12,00	0,25	3,00	0,25	3,00	0,25	3,00	0,25	3,00	1	12,00					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang dibayarkan	Orang					2	24,00	0,5	6,00	0,5	6,00	0,5	6,00	0,5	6,00	2	24,00					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah Tenaga Operator Komputer yang dibayarkan	Orang					8	96,00	2	24,00	2	24,00	2	24,00	2	24,00	8	96,00					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah Tenaga Pengelola Data Perencanaan yang dibayarkan	Orang					3	36,00	0,75	9,00	0,75	9,00	0,75	9,00	0,75	9,00	3	36,00					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HONTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**					**100**	**114,52**	**0,00**	**12,80**	**17,06**	**40,45**	**17,84**	**18,90**	**33,73**	**42,21**	**68,63**	**114,35**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	Unit					3	30,00	0	6,44	0	6,77	1	7,49	2	9,30	3	30,00					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	Unit					4	31,12	0	6,36	0	3,38	2	10,05	2	11,17	4	30,95					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Ruang					2	43,40	0	-	1	22,00	0	-	1	21,40	2	43,40					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
				Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Ruang					8	-									0	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					51	10,00	0	-	18	8,30	3	1,36	1	0,34	22	10,00					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :										*88,76*	*92,54*					
										Predikat kinerja :										*T*	*ST*					
		3.027.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian**	**Persen**					**100**	**2.268,02**	**11,62**	**37,73**	**21,72**	**126,17**	**0,00**	**89,86**	**22,46**	**1.774,75**	**55,79**	**2.028,51**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.02.02.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase Sarana Pertanian yang Aktif**	**Persen**					**81**	**76,50**	**0,00**	-	**0,00**	**17,12**	**0,00**	**18,43**	**0,00**	**25,55**	**0,00**	**61,11**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.02.02.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alsintan Prapanen yang disediakan	Unit					1	76,50	0	-	0	17,12	0	18,43	0	25,55	0	61,11					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.02.02.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembibitan Ternak**	**Persen**					**80**	**104,00**	**34,85**	**14,75**	**65,15**	**43,13**	**0,00**	**18,36**	**0,00**	**21,71**	**100,00**	**97,95**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.02.02.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pembibitan dan perawatan ternak	ekor					330	104,00	115	14,75	215	43,13	0	18,36	0	21,71	330	97,95					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.02.02.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peredaran ternak yang terkendali**	**Persen**					**100**	**2.087,52**	**0,00**	**22,98**	**0,00**	**65,91**	**0,00**	**53,07**	**67,37**	**1.727,48**	**67,37**	**1.869,45**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.02.02.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Bibit Ternak yang didistribusikan	Ekor					8580	2.087,52	0	22,98	0	65,91	0	53,07	5780	1.727,48	5780	1.869,45					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :										*64,12*	*87,87*					
										Predikat kinerja :										*B*	*T*					
		3.027.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**Persen**					**76**	**1.687,21**	**21,43**	**37,14**	**0,00**	**40,70**	**0,00**	**81,08**	**34,92**	**294,04**	**56,35**	**452,95**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.03.02.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Cakupan Prasarana Pertanian yang dikembangkan**	**Persen**					**75**	**318,00**	**42,86**	**37,14**	**0,00**	**48,49**	**0,00**	**41,35**	**14,29**	**167,55**	**57,14**	**294,52**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.03.02.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah luas lahan penangkar benih Padi (ha)	hektar					14	318,00	6	37,14	0	48,49	0	41,35	2	167,55	8	294,52					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.03.02.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Cakupan Prasarana Pertanian yang dibangun**	**Persen**					**85**	**1.369,21**	**0,00**	-	**0,00**	**32,91**	**0,00**	**120,81**	**55,56**	**420,52**	**55,56**	**574,24**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.03.02.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha Tani yang di Bangun	KM					5	419,91	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.03.02.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang di Bangun dan di Pelihara	Unit					2	300,000	0	-	0	-	0	81,20	2	197,00	2	278,20					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.03.02.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah alsintan pertanian/peternakan/perkebunan yang disediakan	Jenis					6	649,30	0	-	0	32,91	0	39,61	4	223,52	4	296,04					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Luas optimalisasi lahan	Ha					250	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :										*76,77*	*67,28*					
										Predikat kinerja :										*S*	*S*					
		3.027.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,utuh dan Halal)**	**Persen**					**70**	**175,00**	**7,50**	**28,06**	**26,25**	**44,91**	**0,00**	**34,89**	**36,25**	**46,23**	**70,00**	**154,09**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.04.02.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabunaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian Wabah Penyakit Hewan Menular**	**Persen**					**50**	**100,00**	**0,00**	**14,35**	**37,50**	**32,54**	**0,00**	**15,71**	**12,50**	**23,23**	**50,00**	**85,83**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.04.02.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Penurunan penyakit menular ternak dan kematian ternak(APBD)	kecamatan					4	100,00	0	14,35	3	32,54	0	15,71	1	23,23	4	85,83					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.04.02.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Cakupan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang memenuhi persyaratan**	**Persen**					**90**	**75,00**	**15,00**	**13,72**	**15,00**	**12,37**	**0,00**	**19,17**	**60,00**	**23,00**	**90,00**	**68,26**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.04.02.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pembinaan dan pengawasan produk pangan asal hewan	kali					6	75,00	1	13,72	1	12,37	0	19,17	4	23,00	6	68,26					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :										*100*	*88,05*					
										Predikat kinerja :										*ST*	*T*					
		3.027.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penurunan Serangan OPT**	**Persen**					**70**	**88,00**	**0,00**	**2,07**	**37,50**	**29,15**	**0,00**	**10,64**	**0,00**	**24,03**	**37,50**	**65,89**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.05.02.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan OPT**	**Persen**					**85**	**88,00**	**0,00**	**2,07**	**37,50**	**29,15**	**0,00**	**10,64**	**0,00**	**24,03**	**37,50**	**65,89**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.05.02.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Teknologi Budi Daya yang diteliti/dikembangkan	Jenis					8	88,00	0	2,07	3	29,15	0	10,64	0	24,03	3	65,89					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
										Rata-rata capaian kinerja (%) :										*53,57*	*74,88*					
										Predikat kinerja :										*R*	*S*					
		3.027.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan bina kelompok petani**	**Persen**					**100**	**397,00**	**3,75**	**3,00**	**3,75**	**37,92**	**3,75**	**30,75**	**47,28**	**264,29**	**58,53**	**335,97**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.07.02.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan bina kelompoktani**	**Persen**					**90**	**397,00**	**3,75**	**3,00**	**3,75**	**37,92**	**3,75**	**30,75**	**47,28**	**264,29**	**58,53**	**335,97**					**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**
		3.027.07.02.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang dibayarkan	Orang					51	249,78	0	-	0	32,33	0	19,92	46	159,56	46	211,81					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan yang dilatih	Orang					117	-	117	-	117		117		117		117	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.07.02.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Lembaga Petani yang mendapatkan Pelatihan	Kelompok					17	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan	Orang					80	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		3.027.07.02.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis	Kali					1	147,22	0	3,00	0	5,59	0	10,83	1	104,73	1	124,15					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
				Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana BPP	BPP					8	-	0	-	0	-	0	-	8	-	8	-					
										Rata-rata capaian kinerja (%) :										*58,53*	*84,63*					
										Predikat kinerja :										*R*	*T*					
		3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								-															**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								10.968,33															DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**Persen**					**100**	**6.224,00**	**25,54**	**1.149,06**	**20,02**	**1.457,57**	**22,39**	**1.485,78**	**29,86**	**1.383,71**	**97,79912339**	**5.476,12**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Persen**					**100**	**464,40**	**18,37**	**71,99**	**19,89**	**145,20**	**24,62**	**136,20**	**37,12**	**108,73**	**100**	**462,12**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	Dokumen					8	369,07	1	61,09	1	90,00	2	113,30	4	103,70	8	368,09					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan					66	95,33	16	10,90	18	55,20	16	22,90	16	5,03	66	94,030					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**4.686,41**	**62,50**	**983,99**	**12,50**	**1.015,53**	**12,50**	**983,99**	**12,50**	**983,99**	**100**	**3.967,50**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 ÷ 14		16 (15/7)*100%		17
		3.030.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN	Tahun					1	4.654,81	1	983,99	1	983,99	1	983,99	1	983,99	1	3.935,96					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan					5	31,60	5	0	0	31,54	0	0	0	0	5	31,54					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Persen**					**100**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang					7	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**618,51**	**13,49**	**40,90**	**17,70**	**225,38**	**41,48**	**270,10**	**16,33**	**73,55**	**89,00**	**609,93**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					20	20,00	4	4,51	4	4,27	7	7,13	5	4,09	20	20,00					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					53	111,07	0	0	0	0	41	85,97	12	24,36	53	110,33					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set					8	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					2641	74,92	698	26,94	323	14,32	1220	12,59	400	18,86	2641	72,71					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	orang					437	-									0	0					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					53937	31,38	4.314	2,50	10.380	6,04	18.868	10,98	20.375	11,86	53.937	31,38					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					120	16,00	5	0,60	29	3,95	17	2,10	29	3,90	80	10,55					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					85	365,14	19	6,35	26	196,80	35	151,33	5	10,48	85	364,96					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**					**100**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	Unit					1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**					**100**	**185,44**	**25,00**	**33,36**	**25,00**	**47,60**	**25,00**	**45,80**	**25,00**	**44,88**	**100**	171,64					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos yang di sediakan	jenis					3	6,00	3	0,80	3	0,50	3	2,00	3	2,70	3	6,00					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Jenis					3	99,61	3	20,76	3	21,34	3	22,42	3	22,00	3	86,52					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	ruangan					16	79,83	16	11,80	16	25,76	16	21,38	16	20,18	16	79,12					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**					**100**	**269,23**	**8,33**	**18,82**	**25,00**	**23,86**	**8,33**	**49,69**	**58,33**	**172,56**	**99,99**	**264,93**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipeganjang Perizinannya	Unit					4	111,87	4	16,02	4	13,21	4	46,89	4	32,96	4	109,08					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara/Service	Jenis					4	15,50	0	0	4	7,85	0	0	4	7,60	4	15,45					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Ruang					1	141,86	0	2,80	0	2,80	0	2,80	1	132,00	1	140,4					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Jumlah gedung yang dibangun	unit					1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***97,80***	***94,75***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		3.030.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Jumlah rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang difasilitasi dan diterbitkan**	**Persen**					**100**	**30,00**	**0**	**0**	**1**	**8,43**	**1**	**9,10**		**9,84**	**100**	**27,37**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.02.02.07	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat**	**Cakupan Penerbitan SKA**	**persen**					**100**	**30,00**	**0**	**0**	**1**	**8,43**	**1**	**9,10**	**1**	**9,84**	**100**	**27,37**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.02.02.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Koordinasi dengan Kementrian Perdagangan luar negeri dan IPSK se Indonesia	kali					3	30,00	0	0	1	8,43	1	9,10	1	9,84	3	27,37					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100,0***	***91,2***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		3.030.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdaanaan yang renresentatif**	**Persen**					**80**	**3.177,72**	**6,67**	**132,30**	**16,67**	**360,50**	**10,00**	**391,44**	**46,67**	**2.111,87**	**80,00**	**2.996,11**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.03.02.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik**	**Persen**					**65**	**2.176,33**	**0**	**14,11**	**0**	**54,76**	**0**	**45,13**	**65**	**1.919,68**	**65**	**2.033,68**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.03.02.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah DED Pasar dan Jumlah Pasar yang di bangun	unit					17	2.176,33	0	14,11	0	54,76	0	45,13	17	1.919,68	17	2.033,68					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Jumlah Pasar yang di Rehabilitsi	unit					1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.03.02.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Cakupan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdaanaan**	**Persen**					**100**	**1.001,39**	**16,67**	**118,19**	**41,67**	**305,74**	**25,00**	**346,31**	**16,67**	**192,19**	**100**	**962,43**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.03.02.02.01	Pembinaan dan Pengondalian Pengelola Sarana Distribusi Perdaanaan	Jumlah Pembinaan Pedagang kali lima dan Asongan	kali					2	1.001,39	0	118,19	1	305,74	1	346,31	0	192,19	2	962,43					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Jumlah Penyuluhan Pengkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan	kali					3	-	1		1				1		3	0					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***94,78***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		3.030.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**cakupan harga barang pokok dan penting lainya di Kecamatan yang dipantau**	**Kecamatan**					**10**	**188,91**	**1**	**17,64**	**2**	**52,41**	**2**	**30,72**	**5**	**31,25**	**10**	**132,02**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.04.02.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya**	**Persen**					**100**	**170,25**	**12,50**	**17,64**	**26,56**	**38,12**	**29,69**	**30,72**	**31,25**	**31,25**	**100**	**117,73**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.04.02.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pengawasan terhadap peredaran Barang dan Jasa dan Penyelenggaraan Pasar Murah	kali					64	170,25	8	17,64	17	38,12	19	30,72	20	31,25	64	117,73					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.04.02.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Cakupan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Dimonitoring dan**	**Persen**					**100**	**18,66**	**0**	**0**	**50**	**14,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**14,29**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.04.02.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	Jumlah Pelaksanan Monitoring Peredaran Barang dan Jasa di Kecamatan	Kecamatan					20	18,66	0	0	10	14,29	0	0	0	0	10	14,29					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***75,00***	***72,87***					
											Predikat kinerja :									***S***	***S***					
		3.030.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Ekspor Bersih Perdagangan**	**Milyar Rupiah**						**790,83**		**13,84**		**39,13**		**411,21**		**247,88**	**0**	**712,06**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.05.02.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Promosi Dagang yang di ikuti**	**kali**					**6**	**790,83**	**0**	**13,84**	**0**	**39,13**	**0**	**411,21**	**2,00**	**247,88**	**2,00**	**712,06**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.05.02.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran / Expo yang di ikuti	kali					6	790,83	0	13,84	0	39,13	0	411,21	2	247,88	2	712,06					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***33,33***	***90,04***					
											Predikat kinerja :									***SR***	***T***					
		3.030.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat ukur yang ditera/tera ulang**	**Persen**					**85**	**310,73**	**11**	**17,67**	**42**	**83,93**	**53**	**129,99**	**21**	**44,56**	**127**	**276,15**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.06.02.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan yang dilaksanakan**	**Kecamatan**					**11**	**310,73**	**1**	**17,67**	**4**	**83,93**	**5**	**129,99**	**2**	**44,56**	**12**	**276,15**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.06.02.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Kalibrasi Alat Metrologi	kali					8	179,60	2	4,20	2	39,21	2	93,74	2	29,00	8	166,15					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Jumlah Pelaksanaan Tera/Tera Ulang alat Uttp	kali					3	-	0		2		1				3	0					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.06.02.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan dan Pembinaan pendataan alat metrologi	kali					12	71,01	2	5,45	4	26,28	3	27,14	3	4,35	12	63,22					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Jumlah Sosialisasi Tertib ukur dilaksanakan	kecamatan					5	-	2		2		1				5	0					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.030.06.02.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Informasi Sarana dan Prasarana Kemetrologian	unit					1	60,12	0	8,02	0	18,44	0	9,11	0	11,21	0	46,78					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Jumlah Pengenambngan SDM dan Tenaga Penera	orang					3	-	0		0		0		0		0	0					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***88,87***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***T***					
		3.030.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Cakupan Penggunaaan Produk dalam negeri**	**Persen**					**80**	**246,15**	**0**	**21,02**	**0**	**62,59**	**0**	**12,30**	**0**	**68,67**	**0**	**164,58**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.07.02.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri**	**Persen**					**80**	**246,15**	**0**	**21,02**	**0**	**62,59**	**0**	**12,30**	**0**	**68,67**	**0**	**164,58**					**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
		3.030.07.02.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase proses Pembentukan SRG	Persen					70	246,15	0	21,02	0	62,59	0	12,30	0	68,67	0	164,58					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***0***	***66,86***					
											Predikat kinerja :									***SR***	***S***					
		3.031	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**2.145,75**															**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		3.031.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan IKM yang dibina	Persen					80	2.085,75	0	2,80	3,09	92,51	28,96	377,87	24,40	679,13	56,44	1.152,31					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.031.02.02.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persen					80	2.085,75	0	2,80	3,09	92,51	28,96	377,87	24,40	679,13	56,44	1.152,31					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.031.02.02.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang dibina	IKMBUMDES					15	262,34	0	2,80	1	15,20	0	70,36	0	45,07	1	133,43					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Jumlah IKM yang di bina	IKM					91	-	0		15		46		30		91	0					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.031.02.02.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM industri perabot yang dibina	IKM					6	1.823,41	0	0	0	77,31	10	307,51	9	634,06	19	1.018,88					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Jumlah IKM industri perbengkelan yang dibina	IKM					8	-									0	0					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Jumlah IKM industri sandang yang dibina	IKM					4	-									0	0					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Jumlah sarana dan prasarana masyarakat di bidang IKM	IKM					9	-									0	0					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*70,56*	*55,25*					
											Predikat kinerja :									*S*	*R*					
		3.031.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Cakupan Verifikasi Lapangan Izin Usaha Industri	Persen					100	20,00	0	0	0	7,88	0	0	0	10,36	0	18,24					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.031.03.02.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Lembar					5	20,00	0	0	0	7,88	0	0	0	10,36	0	18,24					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.031.03.02.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Industri yang Diberikan rekomendasi	Lembar					5	20,00	0	0	0	7,88	0	0	0	10,36	0	18,24					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*0*	*91,20*					
											Predikat kinerja :									*SR*	*ST*					
		3.031.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Pemanfaatan sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persen					100	40,00	0	0	16,67	6,84	16,67	8,75	66,67	13,93	100	29,52					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.031.04.02.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenanangan Kabunaten/Kota	Cakupan Industri yang Sudah Terdaftar dalam SIINas	Persen					100	40,00	0	0	16,67	6,84	16,67	8,75	66,67	13,93	100	29,52					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.031.04.02.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data SIInas yang Difasilitasi	Data					6	40,00	0	0	1	6,84	1	8,75	4	13,93	6	29,52					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*73,80*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*S*					
		4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								-		-		-		-		-							SEKRETARIAT DAERAH
		4.01	SEKRETARIAT DAERAH								83.415,28		10.488,97		17.524,89		14.799,22		27.773,93		70.587,02					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai					19	50.670,99		8.845,78		11.801,16		10.897,68		14.381,23		45.925,85					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun	Persen					90	789,97	0	78,32	0	145,06	51,42857143	159,55	32,1428571	285,75	83,57	668,68					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang	Dokumen					2	289,32	0	34,41	0	76,80	2	65,11	0	86,23	2	262,55					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang dikoordinasikan	Dokumen					1	164,79	0	6,52	0	22,35	1	43,30	0	60,23	1	132,40					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang	Dokumen					1	112,93	0	-	0	16,72	1	25,24	0	38,54	1	80,50					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang dikoordinasikan	Dokumen					1	18,90	0	8,79	0	6,97	0	-	1	2,86	1	18,62					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang	Dokumen					1	18,90	0	-	0	-	0	-	1	17,79	1	17,79					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen					2	43,35	0	9,64	0	-	1	6,44	0	27,03	1	43,11					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen					2	141,78	0	18,96	0	22,22	1	19,47	1	53,08	2	113,73					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelanoran Keuangan yang disusun	Persen					100	17.773,41	17,85714286	3.043,70	22,61904762	5.007,00	22,61904762	3.699,45	36,90476619	3.770,65	100,00	15.520,80					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang					162	16.745,48	162	2.873,60	162	4.694,42	162	3.407,86	162	3.536,60	162	14.514,48					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pensutian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaea pelaksana vang dibavarkan	Orang					7	346,92	7	62,70	7	119,91	7	76,64	7	84,05	7	343,30					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah tenaea pelaksana vang dibavarkan	Orang					4	277,31	4	42,08	4	75,38	4	86,69	4	69,22	4	273,37					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen					2	154,54	1	31,91	1	43,78	0	39,10	0	28,50	2	143,29					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.02.06	Pengelolaan dan Penvianan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Laporan vang disusun	Dokumen					1	51,44	0	5,01	0	14,22	0	21,01	1	10,88	1	51,12					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Dokumen					3	167,00	0	23,14	1	51,33	1	57,57	1	32,84	3	164,88					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.02.08	Penyusunan Pelanoran dan Analisis Proanosis Realiasi Anggaran	Jumlah Pelanoran Proanosis Realiasi Anggaran yang	Dokumen					2	30,73	0	3,25	0	7,96	1	10,58	1	8,56	2	30,35					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								-		-		-		-		-	0	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Hasil Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Aset	Laporan	0		0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen					80	124,31	0	-	8,3	5,44	50	44,55	0	-	58,33	49,99					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel					8	45,20	0	-	0	-	8	44,55	0	-	8	44,55					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data Elektronik Kepegawaian terkelola secara	Orang	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang	Diklat	6		0	-	1	5,44	0	-	1	5,44	0	-	0	-	1	5,44					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen					100	15.271,18	18,69955929	2.954,69	21,40107308	3.245,71	20,11171273	3.123,81	32,5799672	4.658,62	92,79	13.982,83					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang	Jenis					18	150,00	3	32,67	5	33,22	4	33,05	6	50,88	18	149,82					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Jenis					14	1.106,37	0	79,23	3	148,39	4	328,47	7	543,38	14	1.099,47					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis					12	518,40	4	156,14	1	99,68	1	28,49	6	211,59	12	495,90					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis					2	2.728,50	2	681,20	2	682,97	2	681,51	2	682,80	2	2.728,48					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Jenis					3	106,32	1	37,87	1	35,34	1	22,21	0	6,22	3	101,64					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Acara Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Kali					30	457,50	5	59,73	10	110,29	5	54,35	10	137,05	30	361,42					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali					13966	10.095,99	1276	1.896,61	1443	2.127,33	1290	1.962,99	1904	2.986,49	5913	8.973,42					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan elektronisasi data yang diketola	Persen					100	109,00	15,46	11,24	11,67	8,49	17,53	12,74	55,34	40,23	100	72,70					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.07	Penaadaan Barang Milik Daerah Penuniang Urusan Pemerintah								-		-		-		-		-	0	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.07.02	Penadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanaanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lanaanan	Unit	0		0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeler yang disediakan	Paket	0		0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.08	Penvedigan Iasa Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan iasa Penuniang	Persen					100	3.136,10	21,12068966	655,15	20,94827586	688,22	17,67241379	683,71	40,2586207	816,56	100	2.843,64					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen					100	40,00	#REF!	5,00	#REF!	2,00	#REF!	3,00	#REF!	4,50	#REF!	14,50					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening vang dibavarkan	Rekening					43	1.554,00	43	347,15	43	336,81	43	349,47	43	353,03	43	1.386,46					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang	Jenis					5	224,00	0	1,65	1	36,74	0	12,50	4	112,28	5	163,17					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibavarkan	Orang					82	1.318,10	82	301,34	82	312,67	82	318,74	82	346,75	82	1.279,50					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daera	Persen					100	3.727,84	8,23	410,38	14,47704082	605,01	21,74744898	630,60	55,5484694	1.869,08	100	3.515,07					SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan	Persen					100	-		-		-		-		-	0	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit					2	300,00	0	-	0	20,87	1	13,47	1	126,97	2	161,31					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit					49	1.833,41	10	271,14	10	267,22	12	387,45	17	841,08	49	1.766,89					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					8	649,70	1	139,25	3	147,52	1	141,38	3	217,32	8	645,47					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					1	693,64	0	-	0	13,80	0	6,00	1	672,16	1	691,96					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					2	251,09	0	-	1	155,60	1	82,30	0	11,54	2	249,44					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	Persen					100	1.002,75	25	193,24	12,5	208,25	37,5	352,61	25	201,44	100	955,54					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Rincian Objek Gaji dan Tunjangan yang diberikan kepada KDH dan WKDH	Rekening					9	170,73	9	34,32	9	58,25	9	38,32	9	35,65	9	166,54					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Bunati/Wakil Bunati yang disediakan	Stel					28	164,18	0	-	0	-	28	157,85	0	4,08	28	161,93					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelayanan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadan Bunati dan Wakil Bunati	Kali					2	67,84	1	8,93	0	-	0	6,44	1	11,71	2	27,08					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Rincian Objek Dana Penunjang Operasional yang diberikan kepada KDH dan WKDH	Rekening					1	600,00	1	150,00	1	150,00	1	150,00	1	150,00	1	600,00					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan dalam penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persen					100	3.924,40	15,55555556	675,45	31,11111111	801,26	26,66666667	902,71	26,66666667	1.288,77	100	3.668,19					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Frekuensi Makan Minum Harian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kegiatan					9	2.634,78	1	443,40	2	566,91	3	630,21	3	794,09	9	2.434,61					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kegiatan					5	1.289,63	1	232,04	2	234,35	1	272,50	1	494,68	5	1.233,57					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.13	Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah dengan RM minimal	Persen					100	821,04	1,05	99,50	18,23770492	147,38	26,7736009	154,31	53,9358395	255,83	100	657,02					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN, Peeda dan Perbaa vang ditetankan	Dokumen					4	514,05	0	38,20	0	71,61	0	91,08	4	211,28	4	412,17					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Laporan SOP dan Hasil Monitoring Pelavanan Publik di Lingkunuan Pemkab. Inhil vang	Dokumen	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi sesuai road map reformasi birokrasi	Persen	85	41,00	#REF!	1,49	#REF!	25,81	#REF!	2,51	#REF!	5,57	#REF!	35,38					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Laporan SOP dan Hasil Monitoring Pelayanan Publik di Lingkunuan Pemkab. Inhil vang	Dokumen	1	105,73	0	9,99	0	29,21	0	21,81	1	19,85	1	80,86					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.13.05	Koordinasi dan Penvusunan Lanoran Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Lanoran Kinerja Pemerintah vang dicanai.	Nilai	7	160,26	0	49,83	0	20,75	7	38,92	0	19,13	7	128,63					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan yang terlaksana melalui keprotokolan sesuai standar	Persen					100	4.100,00	19,78220914	735,36	23,227532	947,83	28,04450342	1.146,38	28,94575554	1.234,53	100	4.064,10					SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		4.01.01.02.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan fasilitasi Keprotokolan yang terlaksana	Persen					100	1.209.00	#REF!	245.06	#REF!	280.15	#REF!	348.28	#REF!	326.89	#REF!	1.200.38					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cakupan komunikasi pimpinan yang difasilitasi	Persen					100	1.882.00	13.93	259.92	21.34	398.22	30.12	561.94	34.61	645.63	100	1.865.71					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.02.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Hasil Liputan Kegiatan Bupati/ Wakil Bupati Indragiri Hilir	Jenis					3	1.009,00	3	230,38	3	269,47	3	236,16	3	262,01	3	998,02					SEKRETARIAT DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*93,47*	*82,96*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan**	**Persen**					**100**	**28.199,67**	**4,9**	**993,92**	**22,3**	**4.753,78**	**18,5**	**2.942,03**	**38,0**	**11.907,92**	**83,79**	**20.597,65**					**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.02.02.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Capaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang**	**Persen**					**100**	**2.097,33**	**5**	**218,53**	**19,44**	**789,23**	**15**	**488,93**	**16,11**	**410,90**	**55,56**	**1.907,59**					**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.02.02.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kecamatan yang menerima Bantuan Keuangan Khusus untuk Kabupaten/Kota terkait Efektivitas Pelaksanaan Tugas Camat Se Provinsi Riau	Kecamatan					0	1.009,69	0	113,19	0	435,33	0	233,90	0	163,19	0	945,61					SEKRETARIAT DAERAH
				Jumlah pelaksanaan evaluasi terkait Pengukuran Tingkat dan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan di	Kecamatan					20	-	5	-	5	-	5	-	5	-	20	-					SEKRETARIAT DAERAH
				Jumlah Rapat Koordinasi Pemda Se Kab. Inhil yang	Kali					15	-	3	-	5	-	4	-	3	-	15	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.02.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kecamatan yang disurvey terkait pendataan dan inventarisasi Namanama Rupabumi Unsur Alami dan	Kecamatan					0	286,20	0	53,54	0	79,58	0	54,58	0	69,44	0	257,14					SEKRETARIAT DAERAH
				Jumlah Kelurahan yang di Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanakan DAU Tambahan (APBN) dan Dana	Kelurahan					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					SEKRETARIAT DAERAH
				Jumlah Pembuatan Peta berskala Kecamatan se Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan	Kecamatan					1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-					SEKRETARIAT DAERAH
				Jumlah Persyaratan Administrasi Proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Indragiri Selatan dan	Persyaratan					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.02.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten	Laporan					3	801,45	0	51,80	2	274,32	1	200,44	0	178,27	3	704,83					SEKRETARIAT DAERAH
				Jumlah Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Kegiatan					4	-	0	-	2	-	2	-	0	-	4	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.02.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi**	**Persen**					**100**	**24.187,73**	**0**	**431,34**	**16,61**	**3607,94**	**19,11**	**2073,96**	**45,23**	**10863,49**	**80,95**	**16976,73**					**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.02.02.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Bantuan Sarana Keagamaan yang disediakan	Jenis					7	7.008,23	0	274,35	0	1.004,01	0	317,74	7	2.729,24	7	4.325,34					SEKRETARIAT DAERAH
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan yang	Kali					7	-		-	3	-	3	-	1	-	7	-					SEKRETARIAT DAERAH
											-		-		-		-		-	0	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.02.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait	Jumlah Mahasiswa Tidak Mampu yang diberikan	Orang					269	10.169,34	0	118,76	0	168,13	0	260,24	128	5.904,44	128	6.451,57					SEKRETARIAT DAERAH
				Jumlah Organisasi Sosial Keagamaan yang diberikan	Organisasi					12	-	0	-	0	-	0	-	12	-	12	-					SEKRETARIAT DAERAH
				Jumlah Pembinaan Terhadap Organisasi Sosial Keagamaan yang dilaksanakan	Kali					6	-	0	-	0	-	3	-	3	-	6	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.02.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pembinaan dalam rangka Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	Jenis					4	7.010,16	0	38,23	2	2.435,80	0	1.495,98	2	2.229,82	4	6.199,83					SEKRETARIAT DAERAH
				Jumlah Peserta Didik yang mengikuti identifikasi Bakat	Orang					250	-	0	-	100	-	150	-	0	-	250	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.02.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Cakupan Pelayanan Produk Hukum dan Bantuan**	**Persen**					**100**	**1.237.89**	**14.67**	**172.60**	**20**	**189.96**	**40**	**269.49**	**24**	**519.66**	**98.67**	**1.151.71**					**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.02.02.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang	Ranperda					25	137.37	0	29.38	0	21.56	4	37.52	5	40.72	9	129.18					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.02.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pemberian Bantuan Hukum yang diberikan	Perkara					5	834.54	1	95.89	1	113.01	2	111.83	1	446.39	5	767.12					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.02.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dapat diakses melalui website jdih	Produk Hukum					25	265,99	6	47,33	10	55,40	16	120,14	8	32,55	40	255,42					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.02.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase peningkatan kerjasama daerah yang**	**Persen**					**100**	**676.72**	**0**	**171.46**	**33.33**	**166.64**	**0**	**109.65**	**66.67**	**113.86**	**100**	**561.61**					**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.02.02.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Antar Daerah yang difasilitasi	Kali					3	467.00	0	134.74	2	109.75	0	60.79	1	72.90	3	378.18					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.02.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Kerjasama Luar Negeri yang difasilitasi	Dokumen					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.02.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang	Laporan					1	209.72	0	36.72	0	56.89	0	48.86	1	40.96	1	183.43					SEKRETARIAT DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*84,19*	*69,89*					
											Predikat kinerja :									*T*	*S*					
		4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan**	**Persen**					**100**	**4.544,61**	**13**	**649,26**	**9**	**969,96**	**17**	**959,51**	**57**	**1.484,78**	**96**	**4.063,51**					**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.03.02.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi / kebijakan Perekonomian Daerah daerah yang ditindaklanjuti	Persen					100	640,00	11,1	75,2	11,1	126,6	11,1	80,9	66,7	303,22	100	585,92					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.02.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dibina, dipantau dan dievaluasi	BUMD					3	300,00	1,0	28,5	1,0	54,9	1,0	21,5	0,0	159,97	3	264,88					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.02.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Stabilitas Perekonomian di Kabupaten	Laporan					1	170,00	0,0	22,9	0,0	29,5	0,0	33,6	1,0	78,72	1	164,59					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.02.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan Pengembangan dan Perluasan UKM yang dipantau dan dievaluasi	Laporan					1	170,00	0,0	23,8	0,0	42,3	0,0	25,9	1,0	64,52	1	156,45					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.02.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Cakupan Fasilitasi Rapat Koordinasi TAPD**	**Persen**					**100**	**1.137.14**	**7.4**	**182.4**	**7.4**	**288.0**	**42.6**	**198.1**	**42.6**	**324.60**	**100**	**993.08**					**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.03.02.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah asistensi dokumen RKA, DPA dan DPPA yang	Kali					192	364,13	0,0	30,9	0,0	87,8	192,0	33,8	0,0	166,30	192	318,79					SEKRETARIAT DAERAH
				Jumlah Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Kali					48	-	10,0	0,0	10,0	0,0	17,0	0,0	17,0	-	54	-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.02.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi Penyusunan Program Pembangunan yang difasilitasi	Kali					18	380,91	4,0	23,3	4,0	111,1	5,0	93,6	5,0	103,19	18	331,22					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.02.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil evaluasi dan monitoring pembangunan Daerah yang disusun	Dokumen					1	392,10	0,0	128,1	0,0	89,2	0,0	70,7	1,0	55,11	1	343,07					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.02.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP**	**Persen**					**100**	**2.507,47**	**35,4**	**371,5**	**16,7**	**499,3**	**13,1**	**642,1**	**33,8**	**722,64**	**98,97**	**2.235,54**					**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.03.02.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang	Paket					130	1.516.20	8	227.30	65	301.04	51	489.44	2	358.46	126	1.376.24					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.02.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Perangkat Daerah					55	648,06	55	97,92	0	147,62	0	98,09	0	229,60	55	573,23					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.02.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sosialisasi/Bimtek/Penyuluhan Pengembangan Akan Pemahaman dan Pengetahuan Mengenai Pengadaan Barang/Jasa Yang Terstandar dan	Kali					1	343,21	0	46,26	0	50,64	0	54,58	1	134,58	1	286,06					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.02.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Kebijakan Penggelolaan potensi sumber**	**Persen**					**100**	**260,00**	**0**	**20,28**	**0**	**55,99**	**0**	**38,38**	**83,29**	**134,31**	**83,29**	**248,96**					**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.03.02.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang dibina, dipantau dan dievaluasi	KPM					29465	170,00	0	16,38	0	18,34	0	27,41	19617	99,75	19617	161,88					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.02.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan hasil evaluasi terkait Penambahan Instalasi Listrik yang sudah atau belum terpasang	Laporan					1	90,00	0	3,90	0	37,65	0	10,97	1	34,56	1	87,08					SEKRETARIAT DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*95,57*	*90,81*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		4.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								-															**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.	**SEKRETARIAT DPRD**								**96.640.77**	**10.63**	**13.111**	**18.38**	**17.140**	**29.38**	**20.345**	**28.13**	**22.847**	**86.51**	**73.442.896**					**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan yang**	**Persen**					**100**	**60.729.92**	**10.75**	**9.492**	**19.88**	**11.754**	**27.20**	**13.467**	**28.06**	**14.601**	**86**	**49.313**			**86**	**81.20**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Persentase Tersusunnya Rencana Kerja Perangkat**	**Persen**					**100**	**341.55**	**0**	**0**	**50**	**52**	**41.67**	**82**	**-**	**95**	**91.67**	**229**			**91.67**	**79.18**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKT yang disusun	Dokumen					60	40,96		0	20	11	30	11		17	50	39			83,33	95,23	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan					30	300,59		0	20	41	10	71		78	30	190			100,00	63,13	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terwujudnya Penatausahaan Keuangan yang Mendukung Kelancaran dan Fungsi Perangkat**	**Persen**					**100**	**5.897,37**	**23,33**	**952**	**25**	**1.532**	**26,66**	**1.328**	**25**	**1.308**	**100**	**5.120**			**100,00**	**78,46**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	orang					52	5.178,66	52	911	52	1.407	52	1.181	52	1.094	52	4.593			100,00	88,70	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan					12	399,82	3	30	3	88	3	67	3	104	12	289			100,00	72,33	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	Laporan					20	318,89	4	11	5	37	6	80	5	110	20	237			100,00	74,37	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Telindunginya Barang Milik Daerah**	**Persen**					**100**	**1.370,49**	**25**	**308**	**25**	**312**	**25**	**319**	**25**	**313**	**100**	**1.251**			**100,00**	**91,28**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan yang dibayarkan	orang					56	1.370,49	56	308	56	312	56	319	56	313	56	1.251			100,00	91,28	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur**	**Persen**					**100**	**495,42**		**-**		**0**	**18,22**	**250**	**4,05**	**139**	**22**	**389**			**44,14**	**90,54**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang	Stel					555	376,84		-		0	200	250	45	91	245	341			44,14	90,54	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					16	118,58		-		0		-		48	0	48			0,00	40,48	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kali					1	-		-		0		-		-	0	-			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang**	**Persen**					**100**	**10.844,79**	**5,73**	**843**	**7,17**	**810**	**34,6**	**2.120**	**24**	**2.727**	**71**	**6.501**			**81,29**	**70,84**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					53	199,49		-		-	53	181		0	53	181			100,00	90,81	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Furniture dan Interior Gedung Kantor yang	Set					2			-		-		-		-	0	-			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
				Jumlah Meubeler yang disediakan	Jenis					1	-		-		-		-		-	0	-			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Set					155	2.478,29		-		-	68	668	77	927	145	1.596			93,55	64,39	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah	Unit					14	580,76		-		-	8	274	6	155	14	429			100,00	73,87	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					3100	654,58	501	106	430	91	617	130	1.135	240	2.683	567			86,55	86,60	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					30	830,80	2	47	6	125	10	263	7	182	25	617			83,33	74,27	SEKRETARIAT DPRD
				Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					168244	-		-		0		-		-	0	-			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					255	431,40	30	51	36	61	34	58	40	68	140	239			54,90	55,29	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang	Kali					290	5.669,48	32,7	639	27,3	533	27,9	545	59,1	1.155	147	2.873			50,67	50,67	SEKRETARIAT DPRD
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang	Kali					598	-		0		0		-		-	0	-			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang**	**Persen**					**100**	**476,21**		**-**		**-**		**43**	**50**	**189**	**50**	**232**			**50,00**	**44,00**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	Unit					5	117,98		0		0		41		-	0	41			0,00	34,56	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dibangun	unit					1	358,23		0		0		2	1	189	1	191			100,00	53,45	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang**	**Persen**					**100**	**2.080,85**	**25**	**386**	**25**	**421**	**25**	**473**	**25**	**444**	**100**	**1.724**			**100,00**	**83,10**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					25	1.104,88	25	200	25	213	25	232	25	227	25	873			100,00	79,04	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					53			-		-		-		-	0	-			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
				Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					25	975,97	25	185	25	208	25	241	25	216	25	851			100,00	87,16	SEKRETARIAT DPRD
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					394	-		-		0		-		0	0	-			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
				Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan	Orang					2	-		-		0		-		0	0	-			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**					**100**	**2.431,28**	**1,1**	**132**	**8,06**	**323**	**15**	**295**	**51**	**963**	**75**	**1.712**			**75,05**	**72,30**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	Unit					7	375,96		3	1	38	1	12	4	219	6	273			85,71	72,61	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	Unit					150	624,10		76		146	30	94	44	106	74	421			49,33	67,47	SEKRETARIAT DPRD
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					7	-		-		0		-		0	0	-			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara/Service	Unit					150	265,76		0	34	61	43	75	55	97	132	233			88,00	87,73	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan Dinas yang	Unit					31	829,62	2	53	3	74	4	94	12	325	21	546			67,74	65,81	SEKRETARIAT DPRD
				Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang	Set					6	-		-		0		0		0	0	-			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
				Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara	Unit					6	-		-		0		0		0	0	-			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Ruang					1	185,39		-		0		0	1	149	1	149			100,00	80,31	SEKRETARIAT DPRD
				Jumlah Gedung yang dibangun	Unit					1			-		0		0		0	0	-			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					116	150,45		-	2	3	15	20	52	67	69	90			59,48	59,85	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi**	**Persen**					**100**	**3.833,86**	**8,20**	**307**	**41,33**	**462**	**60**	**671**	**50**	**593**	**160**	**2.033**			**159,88**	**53,04**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.02.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan	kali					658	3.833,86	54	307	272	462	395	671	331	593	1052	2.033			159,88	53,04	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase penatausahaan keuangan dan pencanaian kinerja prosram yang mendukung**	**Persen**					**100**	**25.442,64**	**15,80**	**5.461**	**15,80**	**6.292**	**29**	**6.137**	**33**	**6.207**	**93**	**24.098**			**93,33**	**79,67**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.02.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Gaji dan	Orang					45	24.129,01	45	5.371	45	6.203	45	5.849	45	5.849	45	23.271			100,00	96,45	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Medical Check	Orang					45	1.313,63	3	90	3	89	15	289	18	359	39	826			86,67	62,90	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Layanan Administrasi yang mendukung**	**Persen**					**100**	**7.515,45**	**14,15**	**1.103**	**21,34**	**1.549**	**24**	**1.749**	**22**	**1.623**	**82**	**6.024**			**122,12**	**81,70**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.02.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					254	4.688,65	86	764	96	858	118	982	105	935	397	3.539			156,30	75,47	SEKRETARIAT DPRD
				Jumlah Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Kali					251	-		-		0		-		0	0	-			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
				Jumlah Rapat Paripurna	Kali					22	-		-		0		0		0	0	-			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.02.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Pemenuhan Logistik Rumah Tangga Pimpinan	Kali					7300	2.826,81	876	339	1.786	692	1.981	767	1776	688	6.419	2.486			87,93	87,93	SEKRETARIAT DPRD
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									**90,49**	***72,64***					
											Predikat kinerja :									***T***	***S***					
		4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**	**Persen**					**100**	**35.910,85**	**10,5**	**3.619**	**16,9**	**5.387**	**31,6**	**6.878**	**28,2**	**8.245**	**87**	**24.130**			**87**	**67,19**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.02.02.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Pesentase Rapat-rapat pembahasan Rauperda yang**	**Persen**					**100**	**3.448,01**		**45**		**564**	**44**	**837**	**44**	**1.140**	**89**	**2.586**			**88,89**	**74,99**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.02.02.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah yang di Bahas	Buah					9	3.448,01		45		564	4	837	4	1.140	8	2.586			88,89	74,99	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.02.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Rapat-rapat Pembahasan Kebijakan**	**Persen**					**100**	**845,63**	**3,1**	**15**	**18,75**	**161**	**34**	**293**	**34**	**303**	**91**	**772**			**90,63**	**91,29**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.02.02.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah RApat Paripurna	Kali					32	845,63	1	15	6	161	11	293	11	303	29	772			90,63	91,29	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.02.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang mengikuti**	**Persen**					**100**	**1.125,51**		**112**	**50**	**484**		**160**		**174**	**50**	**930**			**50,00**	**82,64**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.02.02.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kali					2	1.125,51		112	1	484		160		174	1	930			50,00	82,64	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.02.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase aspirasi masyarakat yang ditindak**	**Persen**					**100**	**3.558,64**	**33,33**	**384**		**789**	**33,33**	**761**	**33,33**	**807**	**100**	**2.741**			**100,00**	**77,02**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.02.02.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses dan Aspirasi yang diserap	Kali					3	3.558,64	1	384		789	1	761	1	807	3	2.741			100,00	77,02	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.02.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Persentase Pembahasan kerjasama daerah yang**	**Persen**					**100**	**1.587,79**		-	**7,14**	**127**	**50**	**812**	**28,57**	**407**	**86**	**1.347**			**85,71**	**84,81**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.02.02.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Risalah Rapat	Buah					14	1.587,79		-	1	127	7	812	4	407	12	1.347			85,71	84,81	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.02.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase rekomendasi yang dihasilkan dari**	**Persen**					**100**	**25.345,27**	**26,59**	**3.063**	**25,31**	**3.262**	**28**	**4.015**	**29,29**	**5.414**	**109**	**15.754**			**109,49**	**62,16**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.02.02.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kunjungan kerja yang dilakukan Pimpinan dan	Kali					2813	25.345,27	748	3.063	712	3.262	796	4.015	824	5.414	3.080	15.754			109,49	62,16	SEKRETARIAT DPRD
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***87,45***	***78,82***					
											Predikat kinerja :									***T***	***T***					
		5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							-																**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.	**PERENCANAAN**								**9.904,76**															**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100**	**6.865,18**	**18,44**	**1.162,88**	**16,89**	**1.850,24**	**12,69**	**1.294,59**	**15,51**	**1.313,65**	**74,13**	**5.621,36**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Persen**					**100**	**162,98**	**41,67**	**9,81**	**33,33**	**37,54**	**8,33**	**47,48**	**16,67**	**38,70**	**100**	**133,53**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	Dokumen					6	74,09	1	4,62	2	33,59	1	8,53	2	9,33	6	56,06					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen					3	88,89	2	5,19	1	3,95	0	38,95	0	29,38	3	77,47					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah dokumen Laporan Sistem Pengendalian Internal yang disusun	Dokumen					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Anantar Perkantoran**	**Persen**					**100**	**5.384,68**	13	907,12	13	1.547,00	13	1.080,12	13	998,28	**50,5**	**4.532,53**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	5.309,68	1	907,12	1	1.547,00	1	1.080,12	1	998,28	1	4.532,53					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen					1	75,00	0	19,56	0	18,40	0	12,74	1	24,24	1	74,94					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**persen**					**100**	**48,00**	**20**	**12,00**	**20**	**12,00**	**20**	**12,00**	**20**	**12,00**	**80**	**48,00**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					5	48,00	4	12,00	4	12,00	4	12,00	4	12,00	**4**	**48,00**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Indikator Program Daerah yang terukur**	**persen**					**100**	**63,29**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Stel					60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang					8	63,29	0	-	0	-	2	16,93	3	27,27	5	44,20					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah pertemuan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik terlaksana	Kali					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**persen**					**100**	**765,46**	**22,70**	**159,72**	**26,86424489**	**160,89**	**18,58**	**60,96**	**23,35511981**	**130,77**	**91,51**	**512,35**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Keluarkan yang disediakan	Komponen					2	10,00	0	0,90	1	1,82	0	2,44	1	4,84	2	9,99					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					24	40,80	6	9,79	6	9,73	6	9,49	6	9,28	24	38,29					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					2,4	92,50	2,4	7,99	2,4	4,42	2,4	6,65	2,4	4,93	2,4	24,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah logistik yang disediakan	LS Kali					8	-	3	3,81	2	1,34	3	2,63	0	0,20	8	7,98					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah logistik yang disediakan	LS Kali					60	-	18	19,81	7	9,46	3	2,12	2	18,51	30	49,91					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Jenis					9	24,01	2,5	6,17	2,5	6,22	2,5	6,21	1,5	5,10	9	23,70					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					17	25,00	4	6,66	4	6,20	5	9,28	4	2,86	17	25,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					24	573,15	0	104,59	3	121,70	3	22,14	12	85,05	18	333,47					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					138	-	49		57		7		23		136	-					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional**	**persen**					**100**	**273,88**	**25**	**51,89**	**25**	**63,75**	**25**	**58,64**	**25**	**60,01**	**100**	**234,30**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos Yang Disediakan	Jenis					2	7,05	2	0,95	2	2,50	2	2,50	2	1,10	2	7,05					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					7	191,17	7	38,97	7	40,62	7	41,19	7	42,01	7	162,79					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					9	75,66	9	11,97	9	20,64	9	14,95	9	16,90	9	64,46					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Peranekat Daerah vane terpelihara dengan**	**persen**					**100**	**166,90**	**7,22**	**22,34**	**0,56**	**29,05**	**4,44**	**35,38**	**10,56**	**73,89**	**22,78**	**160,67**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan disewaniane Perizinannva	Unit					60	126,30	13	12,29	1	23,23	8	25,09	19	60,06	41	120,66					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara	Unit					1	9,60	0	2,40	0	2,40	0	1,60	0	3,20	0	9,60					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					1	31,00	0	7,66	0	3,42	0	8,70	1	10,63	1	30,40					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah ruang sedung kantor vane terpelihara	Unit					56	-									**0**	-					
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***74,13***	***85,81***					
											Predikat kinerja :									***S***	***T***					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Persen**					**100**	**1.446,06**	**12,5**	**132,54**	**12,5**	**92,88**	**13**	**194,55**	**13**	**601,97**	**51**	**1.021,95**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.02.02.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**	**Dokumen**					**2**	**977,40**	**0**	**87,88**	**0**	**24,80**	**1**	**110,07**	**1**	**455,02**	**2**	677,76					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
				Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	Persen					100	-									0	-					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.02.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Kab.Inhil Tahun 2018-2022	Dokumen					1	416,91	0	4,50	0	4,50	0	42,32	0	273,33	0	324,65					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.02.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen Perubahan Renstra	Dokumen					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah dokumen Perubahan RPJMD	Dokumen					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali					75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah Perbup RKPD yang dihasilkan	Perbup					2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah Perda Perubahan RPJMD	Perda					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah Ranperbup RKPD yang dihasilkan	Ranperbup					2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.02.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pertemuan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik yang terlaksana	Kali					1	22,27	1	19,57	0	1,80	0	-	0	-	1	21,37					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.02.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan Musrenbang yang terlaksana	Kali					1	79,91	1	61,70	0	8,08	0	-	0	-	1	69,78					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.02.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perubahan Renstra	Dokumen					1	458,31	0	2,10	0	10,42	1	67,75	1	181,69	1	261,96					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah dokumen Perubahan RPJMD	Dokumen					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali					75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah Perbup RKPD yang dihasilkan	Perbup					2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah Perda Perubahan RPJMD	Perda					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase Indikator Program Daerah yang terukur						100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD						100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah Ranperbup RKPD yang dihasilkan	Ranperbup					2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.02.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Cakupan Pembinaan dan Pemanfataan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD sesuai**	**Persen**					**100**	**112,25**	**25**	**27,37**	**25**	**27,11**	**25**	**27,95**	**25**	**29,76**	**100**	**112,20**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
				Persentase Indikator Program Daerah yang terukur						100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.02.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan/atau dikembangkan	Aplikasi					1	112,25	1	27,37	1	27,11	1	27,95	1	29,76	1	112,20					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.02.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembanunnan Daerah**	**Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verifikasi Dokren dan Pelanoran Perencanaan Pembanunnan**	**Dokumen**					**10**	**356,42**		**17,30**		**40,97**		**56,53**		**117,19**	**0**	**231,99**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.02.02.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	kali					75	317,86	1	10,38	9	38,15	11	53,87	17	103,28	38	205,68					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.02.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen					5	38,56	1	6,92	1	2,82	1	2,66	2	13,91	5	26,31					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah lokasi monitoring Pelaksanaan Rencana Pembanunnan Daerah	Kecamatan					20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***95,39***	***78,13***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***T***					
		5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								**1593,519843**		**189,22**		**283,23**		**217,11**		**444,46**	**0**	**1.134,02**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.03.02.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembanunnan Manusia**	**Persentase Indikator Program Daerah yang terukur**	**Persen**					**100**	**652,092**		**64,62**		**134,55**		**77,72**		**184,47**	**0**	**461,36**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.03.02.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi dengan Stakeholder terkait	Dokumen					1	67,323		8,73		19,92		6,39	1	16,59	1	51,63					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen					2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali					35	-	2		10		10				22	-					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.02.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen					1	96,153		2,55		35,93		18,27	1	23,87	1	80,63					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali					33	-	0		10		10				20	-					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.02.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	Kali					33	85,907	6	15,65	10	10,71	10	17,40	3	27,07	29	70,83					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.02.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	Kali					40	93,225	2	8,63	14	19,76	16	15,16		17,11	32	60,65					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.02.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen					1	97,559		2,60		16,29		8,78	1	48,97	1	76,64					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.02.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembanunnan Manusia	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	Kali					33	211,926	9	26,46	21	31,94	23	11,72		50,86	53	120,99					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.02.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Dava Alam)**							**100**	**484,318**	**28,29**	**39,55**	**39,87**	**75,11**	**17,76**	**65,52**	**16,71**	**175,20**	**103**	**355,38**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.03.02.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali					40	239,854	10	24,13	14	26,28	10	49,98	6	84,19	40	184,57					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.02.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Taerkait	Kali					38	244,464	12	15,42	17	48,83	4	15,54	7	91,01	40	170,81					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.02.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**							**100**	**457,110**	**32,28**	**85,05**	**29,95**	**73,57**	**23,28**	**73,87**	**22,65**	**84,80**	**108**	**317,28**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.01.03.02.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanunnan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali					50	279,866	16	50,11	16	48,91	7	36,45	18	60,77	57	196,24					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.02.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Kali					23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.02.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali					43	177,244	14	34,94	12	24,65	14	37,42	4	24,03	44	121,04					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***78,26***	***71,18***					
											Predikat kinerja :									***S***	***S***					
		5.05.	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								**781,81**															**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**							**100**	**781,81**	**5,63**	**70,05**	**32,03**	**246,18**	**19,04**	**359,83**	**22,80**	**360,86**	**79,50**	**1.036,92**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.05.02.02.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penekaian Peraturan**	**Persentase Indikator Program Daerah yang terukur**						**100**	**255,28**	**16,90**	**37,50**	**18,31**	**34,26**	**12,68**	**49,82**	**23,94**	**57,93**	-	**179,52**	-	-	-	-	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.05.02.02.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penvelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	Kali					41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.05.02.02.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	Jenis					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali					71	255,28	12	37,50	13	34,26	9	49,82	17	57,93	51	179,52					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase keterisian Data SIPD	Persen					90	-			45				45		90	-					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.05.02.02.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembanunnan**							**100**	**31,57**	**0**	**2,20**	**66,7**	**13,27**	**0**	**3,30**	**0**	**1,96**	**66,67**	**20,73**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.05.02.02.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah koordinasi rumusan kajian dan pengembangan produk unggulan daerah yang dilakukan	Kali					6	31,57	0	2,20	4	13,27	0	3,30	0	1,96	4	20,73					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.05.02.02.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**							**100**	**494,95**	**0**	**30,35**	**11,11**	**75,56**	**44,44**	**126,79**	**44,44**	**120,54**	**100,00**	**353,24**					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5.05.02.02.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan	Dokumen					1	88,42	0	13,50	0	26,04	0	7,44	1	22,01	1	68,99					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.05.02.02.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah topik yang diseminasikan	Topik					1	268,56	0	1,20	0	16,12	1	95,75	0	63,32	1	176,39					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.05.02.02.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah yang diterbitkan	Terbitan					3	137,97	0	15,65	1	33,40	1	23,60	1	35,21	3	107,86					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***55,56***	***69,12***					
											Predikat kinerja :									***B***	***S***					
		5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																							**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) K	Rp (Juta)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020 K	Rp (Juta)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) K	Rp (Juta)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan TW I K	Rp (Juta)	TW II K	Rp (Juta)	TW III K	Rp (Juta)	TW IV K	Rp (Juta)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi K	Rp (Juta)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021 K	Rp (Juta)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021 K	Rp (Juta)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		5.02.	**KEUANGAN**								**16.072.96**										**11.285.84**					**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**					**-**	**12.422,50**		**2.487,51**		**1.875,75**		**2.054,84**		**2.661,70**		**9.079,79**					**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**					**-**	**76,59**	**-**	**-**	**-**	**9,36**	**-**	**14,38**	**-**	**30,72**		**54,46**					**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen					2	62.59	-	-	-	7.66	1.00	10.08	1.00	26.22	2.00	43.96					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan					5	14,00	-	-	-	1,70	3,00	4,30	2,00	4,50	5,00	10,50					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun**	**Persen**					**100**	**9.024,21**	**25,00**	**1.823,25**	**25,00**	**1.559,01**	**25,00**	**1.442,38**	**25,00**	**1.818,78**	**100,00**	**6.643,42**					**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	9.024.21	0.25	1.823.25	0.25	1.559.01	0.25	1.442.38	0.25	1.818.78	1.00	6.643.42					BADAN PENDAPATAN DAERAH
																										BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**Persen**					**90**	**116.06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**78.26**	**-**	**78.26**					**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang	Stel					74	84,50	-	-	-	-	-	-	74,00	78,26	74,00	78,26					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					3	31,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
																										BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**1.450,92**	**-**	**210,01**	**-**	**60,16**	**-**	**221,37**	**-**	**317,02**	**-**	**808,55**					**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					17	23,45	17,00	11,94	17,00	-	17,00	-	17,00	11,22	17,00	23,16					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					81	346.75	-	95.85	-	0.10	81.00	167.23	-	79.75	81.00	342.93					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Set					13	-	7.00		-	-	-		6.00		13.00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					7352	133.84	1.750	22.32	1.200.00	14.15	1.300.00	14.52	1.116.00	49.23	5.366.00	100.21					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					119	-	24.00		25.00		23.00		20.00		92.00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					49525	333.76	1.050.00	2.63	785.00	1.35	3.600.00	8.70	44.090.00	52.90	49.525.00	65.57					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					51	8.00	13.00	2.30	2.00	0.60	-	-	-	-	15.00	2.90					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang	Kali					99	605.13	25.00	74.97	24.00	43.96	22.00	30.92	26.00	123.92	97.00	273.78					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang	Kali					68	-	-	-	-	-	24.00	-	23.00	-	47.00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**1.450,32**	**-**	**396,43**	**-**	**225,07**	**-**	**326,74**	**-**	**299,62**	**-**	**1.247,86**					**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					1300	7.33	325.00	1.30	325.00	-	325.00	2.60	325.00	2.10	1.300.00	6.00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					480	528.40	480.00	134.95	480.00	59.85	480.00	106.88	480.00	96.27	480.00	397.95					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa penggunaan Gedung Kantor	Unit					6	914,59	-	260,18	1,00	165,22	1,00	217,26	-	201,25	2,00	843,91					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					144	-	144,00		144,00		144,00		144,00		144,00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					36	-	-		-		-		36.00		36.00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					44	-	44.00	-	44.00	-	44.00	-	44.00		44.00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**304,40**	**-**	**57,81**	**-**	**22,15**	**-**	**49,99**	**-**	**117,30**	**-**	**247,24**					**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipellihara dan dipepanjang Perizinannya	Unit					38	115,00	10,00	12,72	8,00	11,80	10,00	2,47	10,00	62,62	38,00	89,60					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					27	54.40	6.00	31.14	7.00	3.89	7.00	8.57	7.00	10.54	27.00	54.14					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara/Service	Unit					18	-	4.00		4.00		4.00		6.00		18.00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Ruang					13	60,00		-	-	-		-	13,00	40,00	13,00	40,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.02.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	Set					3	75,00	-	13,95	1,00	6,46	1,00	38,95	1,00	4,14	3,00	63,50					BADAN PENDAPATAN DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***94,37***	***72,81***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***S***					
		5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap pendapatan**	**Persen**					**9,61**	**3.650,46**	**-**	**188,09**	**-**	**208,57**	**-**	**534,99**	**-**	**1.274,41**	**8,45**	**2.206,05**					**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.04.02.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**	**Persen**					**4**	**3.650,46**	**-**	**188,09**	**-**	**208,57**	**-**	**534,99**	**-**	**1.274,41**	**-**	**2.206,05**					**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.04.02.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Peraturan Pendapatan Daerah yang diterbitkan	Jenis					9	160,18	3,00	31,45	3,00	26,33	3,00	61,17	-	-	9,00	118,94					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.02.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan Promosi dan Publikasi Pajak	Jenis					5	45,00	-	-	-	5,39	-	34,98	-	-	-	40,37					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Wajib Pajak BPHTB, Mineral Bukan Logam dan	WP					256	-	80.00		80.00		80.00				240.00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.02.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi	Jenis					2	299.71	1.00	51.18	-	20.00	-	35.59	1.00	116.15	2.00	222.92					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Space Iklan	Unit					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.02.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan Promosi dan Publikasi Pajak	Jenis					5	617.89	-	39.28	-	27.90	-	57.63	-	172.12	-	296.92					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Penetapan dan penyampaian SPPT PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	WP					48076	-	-		-		-		138.091		138.091,00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Wajib Pajak BPHTB, Mineral Bukan Logam dan	WP					256	-	-		-		-		291		291.00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Wajib Pajak Hotel dan Restoran	WP					186	-	-		-		-		193		193.00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Wajib Pajak Pajak Hiburan, Parkir dan Sarang	WP					375	-	-		-		-		381		381.00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Wajib Pajak PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	WP					4423	-	-		-		-		5.880	-	5.880.00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.02.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Wajib Pajak Daerah	WP					150	597,00	-	6,02	-	21,34	-	97,45	150,00	80,65	150,00	205,45					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Wajib Pajak Daerah	WP					2669	-	-		-		-		817		817.00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Wajib Pajak PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	WP					14366	-	-		-		-		5.880		5.880.00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.02.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan dan penyampaian SPPT PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	WP					48076	661,40	-	13,50	-	3,90	-	109,14	138.091	218,34	138.091,00	344,88					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Wajib Pajak Hotel dan Restoran	WP					186	-	-		-		-		193.00		193.00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Wajib Pajak Pajak Hiburan, Parkir dan Sarang	WP					375	-	-		-		-		381,00		381,00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Wajib Pajak PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	WP					4423	-	-		-		-		5.880,00		5.880,00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.02.01.010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Frekuensi Rekonsiliasi, Pengumpulan dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Kali					17	226,32	5,00	28,88	3,00	31,09	5,00	23,40	4,00	83,14	17,00	166,52					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah pelaksanaan Verifikasi dan Pelaporan Pendapatan dan Penerimaan Daerah	kali					21	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6,00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Pendapatan Daerah yang telah sesuai	Jenis					203	-	-	-	-	-	-		12	-	12.00	-					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.02.01.011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah	WP					2669	727,46	-	7	-	47	-	84	27.340	453,71	27.340,00	591,25					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.02.01.012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah	WP					1451	105.71	-	9.35	-	18.52	-	18.78	733	17.73	733.00	64.38					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.02.01.013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan target dan realisasi	Persen					94	209.78	-	1.52	-	7.03	-	13.30	94	132.57	94.00	154.42					BADAN PENDAPATAN DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***87,93***	***60,43***					
											Predikat kinerja :									***T***	***R***					

		5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								**-**															**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.	**KEUANGAN**								**311.612,83**															**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**					**19**	**15.248,35**		**3556,00**		**586,40**		**3552,00**		**3568,30**	**0,00**	**11262,70**					**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verifikasi Dokren dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan**	**Persen**					**100**	**16,37**	**37,50**	**4,50**	**12,50**	**2,00**	**12,50**	**2,00**	**37,50**	**6,30**	**100**	**14,80**					**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun.	Dokumen					2	8,45	1	3,5	0	0	0	0	1	4,3	2	7,8					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen					72	7,92	18	1	18	2	18	2	18	2	72	7					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**12.851,65**	**12,5**	**3001,50**	**37,5**	**31,00**	**12,5**	**3000,00**	**37,5**	**3002,00**	**100**	**9.034,50**					**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	12.846,15	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	12000					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	Dokumen					60	5,50	0	1,5	30	2	0	0	30	2	60	5,5					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Persen**					**100**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang					0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	Kali					0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**1.028,73**	**20,29**	**240,50**	**36,20**	**243,90**	**21,92**	**240,50**	**21,10**	**240,50**	**99,51**	**965,40**	**0,00**	**17,18**	**20,32**	**36,20**	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					11	30,00	11	7,5	11	7,5	11	7,5	11	7,5	11	30					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Jenis					6	114,59	6	27	6	27	6	27	6	27	6	108					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis					4	5,65			4	3,4					4	3,4					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Jenis					6	132,88	6	31	6	31	6	31	6	31	6	124					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Jenis					12	40,52	12	10	12	10	12	10	12	10	12	40					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					3200	18,00	800	4	800	4	800	4	800	4	3200	16					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Kali					176	687,10	30	161	50	161	50	161	40	161	170	644					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.07.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen					100	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	Unit					0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**					**100**	**515,00**	**25,00**	**111,00**	**25,00**	**111,00**	**25,00**	**111,00**	**25,00**	**111,00**	**100,00**	**444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terlayani	Persen					100	5,00	25	1	25	1	25	1	25	1	100	4					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					3	162,00	3	33	3	33	3	33	3	33	3	132					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang di bayarkan	Orang					19	348,00	19	77	19	77	19	77	19	77	19	308					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**836,61**	**18,87**	**198,50**	**21,09**	**198,50**	**21,09**	**198,50**	**24,90**	**208,50**	**85,94**	**804,00**					**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/operasional/lapangan yang dipelihara	Unit					42	566,87	10	141	10	141	10	141	12	141	42	564					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset teatp lainnya yang dipelihara	Unit					75	239,74	10	50	15	50	15	50	20	60	60	210					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disellihara/direhabilitasi	Unit					0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					257	30,00	50	7,5	50	7,5	50	7,5	50	7,5	200	30					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***97,09***	***87,38***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu**	**Persen**					**100**	**294.794,22**	**14,46**	**3461,00**	**39,56**	**116115,00**	**14,56**	**58.466,00**	**31,43**	**115238,00**	**100,00**	**293280,00**					**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.02.02.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**1.417,99**	**10**	**75,00**	**38**	**650,00**	**18**	**80,00**	**34**	**370,00**	**100**	**1.175,00**					**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.02.02.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Nota kesepakatan KUA/PPAS yang ditbritkan	Dokumen					2	75,94	1	25	1	25	0	0	0	0	2	50					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Nota Kesepakatan Perubahan KUPA/PPAS yang diterbitkan	Dokumen					2	69,52	0	0	0	0	1	25	1	25	2	50					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kesala Daerah tentanf Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kesala Daerah tentanf Penjabaran APBD vang disusun	Dokumen					8	763,13	0	30	8	600	0	30	0	30	8	690					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Dokumen					2	409,21	0	10	0	10	0	10	2	300	2	330					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang dilaksanakan	Kali					5	100,20	0	10	2	15	2	15	1	15	5	55					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**884,36**	**12,28**	**166,00**	**37,28**	**15,00**	**12,28**	**166,00**	**38,15**	**188,00**	**100,00**	**535,00**					**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.02.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang	Kali					29	130,36	7	26	7	26	7	26	8	28	29	106					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan / pemotongan dan penyetoran	Dokumen					24	380,50	6	90	6	90	6	90	6	90	24	360					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Realisasi Pengeluaran Kas berdasarkan SP2D yang dapat diselenggarakan	Kali					2	62,24	0	10	0	10	0	10	2	30	2	60					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.02.010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegatan	Jumlah Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	Dokumen					2	311,26	0	40	2	150	0	40	0	40	2	270					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**845,68**	**0**	**100,00**	**62,5**	**330,00**	**0**	**100,00**	**37,5**	**260,00**	**100**	**790,00**					**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.02.02.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semeteran vang disusun	Dokumen					4	95,00	0	10	2	30	0	10	2	30	4	80					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah vang disusun	Dokumen					2	385,29	0	60	0	60	0	60	2	200	2	380					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen					4	252,02	0	20	4	180	0	20	0	20	4	240					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang	Dokumen					1	113,37	0	10	1	60	0	10	0	10	1	90					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**291.065,84**	**25**	**3.000,00**	**35**	**115.000,00**	**18**	**58.000,00**	**23**	**114.300,00**	**100**	**290300,00**					**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.02.02.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah persentase anggaran penyusunan kebijakan dan alokasi subsiditerhadap total APBD Kabunaten	Persen					100	2.000,00	50	1.000	50	1.000	-	-	-	-	100	2.000					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah persentase anggaran dana desa dan alokasi dana desa terhadap total APBD Kabupaten Indragiri	Persen					100	280.271,00	-	-	40	112.000	20	56.000	40	112.000	100	280.000					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah persentase anggaran dana darurat dan mendesak terhadap total APBD Kabupaten Indragiri	Persen					100	4.025,35	25	1.000	25	1.000	25	1.000	25	1.000	100	4.000					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.04.010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah persentase anggaran dana bagi hasil terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir	Persen					100	4.769,48	25	1.000	25	1.000	25	1.000	25	1.300	100	4.300					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.02.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Linekun Keuanaan Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**580,35**	**25**	**120,00**	**25**	**120,00**	**25**	**120,00**	**25**	**120,00**	**100**	**480,00**					**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.02.02.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang diimplementasikan dan	Aplikasi					2	580,35	2	120	2	120	2	120	2	120	2	480					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***84,13***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu**	**Persen**					**80**	**1.570,26**	**22,67**	**475,00**	**16,44**	**270,00**	**13,78**	**255,00**	**27,11**	**455,00**	**80,00**	**1455,00**					**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.03.02.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**1.570,26**	**28,33**	**475,00**	**20,56**	**270,00**	**17,22**	**255,00**	**33,89**	**455,00**	**100,00**	**1455,00**					**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.03.02.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah yang disusun	Dokumen					2	347,47	2	250	0	30	0	30	0	30	2	340					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.03.02.01.05	Pesatausahaan Barang Milik Daerah	persentase aset /barang daerah yang terdata dan terpelihara.	Persen					70	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.03.02.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diinventarisasi	Dokumen					10	55,30	2	10	4	25	2	10	2	10	10	55					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.03.02.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	terlaksananya pengamanan barang milik daerah	Unit					4	257,20	4	60	4	60	4	60	4	60	4	240					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.03.02.01.010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangnan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah penggunaaan, pemanfaatan, pemindahtangnan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jenis					2	230,23	2	55	2	55	2	55	2	55	2	220					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.03.02.01.011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi laporan barang milik daerah yang disusun	Dokumen					10	448,03	0	50	0	50	0	50	10	250	10	400					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.03.02.01.013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabunaten/Kota	Jumlah pengelolaan barang milik daerah pemerintah Kabunaten/Kota vang dilakukan oembinaan	Kali					3	232,03	0	50	1	50	1	50	1	50	3	200					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***92,66***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							-																
		5.03.	**KEPEGAWAIAN**							**8.182,94**																
		5.03.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**					**19**	**5.888,88**	-	**941,65**	**0**	**1.486,06**	**0**	**1.056,15**	**0**	**1.354,02**	**0**	**4.837,89**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.03.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja dan pelaporan kinerja yang di susun Sesuai Standar**	**Persen**					**90**	**30,00**	45	-	**0**	**6,10**	**0**	**9,27**	45	**13,13**	**90**	**28,50**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.03.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen					5	12,00	0	-	0	3,55	0	4,20	5	4,25	5	12,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan					5	18,00	5	-	0	2,55	0	5,07	0	8,88	5	16,50					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**4.366,35**	**100**	**816,51**	**100**	**1.247,96**	**100**	**836,15**	**100**	**854,26**	**100**	**3.754,88**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.03.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	4.366,35	1	816,51	1	1.247,96	1	836,15	1	854,26	1	3.754,88					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		5.03.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti Sosialisasi dalam rangka Pengembangan Kompetensi**	**Persen**					**40**	**280,92**	**0**	**0,35**	**12**	**42,30**	**19,2**	**48,23**	**69**	**129,62**	**40**	**220,50**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.03.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan yang disediakan	Stel					42	-		-		-		-	0	-	0	-					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah anggota Korpri yang terbantu dalam proses pemakaman	Persen					20	47,46	-	0,35	-	2,30	-	2,73	20	23,71	20	29,09					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi yang mendapatkan pemahaman tentang peraturan Perundang - Undangan	orang					652	233,46	0	-	150	40,00	250	45,50	252	105,91	652	191,41					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**823,38**	**100**	**92,91**	**100**	**122,62**	**100**	**88,70**	**100**	**210,26**	**100**	**514,49**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.03.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	unit					248	16,50	0	-	25	1,60	30	2,86	16	1,78	71	6,24					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis kebutuhan ATK	Jenis					30	70,68	0	-	4	8,80	3	7,88	10	24,38	17	41,06					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	unit					4	-									0	-					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan bakar yang digunakan	Liter					3008	60,21	772	5,91	1242	10,55	908	10,60	86	18,30	3008	45,36					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Jumlah Jamuan makan dan minum	Kali					32	-		-							0	-					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaaan	Lembar					65000	31,90	-	-	25435	12,20	12400	4,40	27165	15,11	65000	31,71					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan	Eksemplar					150	15,00	0	-	27	2,82	31	3,58	50	4,78	108	11,18					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali					147	629,09	23	87,00	39	86,65	50	59,38	30	145,91	142	378,94					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**					**100**	**24,75**	**0**	-	**0**	-	**0**	**23,45**	**100**	**0,29**	**100**	**23,74**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.03.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	Unit					1	24,75	0	-	0	-	1	23,45	0	0,29	1	23,74					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dibangun	Unit					1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor**	**Persen**					**100**	**149,96**	**0**	**26,07**	**0**	**33,57**	**0**	**36,21**	**100**	**36,11**	**100**	**131,96**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.03.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis benda pos yang disediakan	Jenis					4	4,37	4	0,07	4	1,84	4	0,02	4	1,81	4	3,74					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening/tahun)	Rekening					48	103,60	12	20,90	12	22,16	12	24,24	12	22,10	48	89,40					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibayarkan	Orang					3	41,99	3	5,10	3	9,57	3	11,95	3	12,20	3	38,82					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**					**100**	**213,53**	**13,6**	**5,81**	**24,89**	**33,52**	**30,95**	**37,59**	**30,5**	**110,64**	**99,94**	**187,56**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.03.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit					33	188,93	9	5,81	7	27,98	11	31,74	6	101,09	33	166,62					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan kerja yang diperbaiki/Service	Unit					42	24,60	0	-	12	5,54	12	5,85	18	9,55	42	20,94					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Ruang					2	-	0	-	0	-		-	0	-	0	-					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***84,82***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***T***					
		5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Hasil Penilaian Tim Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN**	**Nilai**					**270**	**2.294,05**	**0**	**128,58**	**0**	**350,22**	**0**	**501,50**	**281,5**	**2.654,42**	**281,5**	**3.634,72**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.03.02.02.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang di angkat melalui Seleksi Pengadaan ASN**	**Persen**					**60**	**1.122,09**	**0**	**36,44**	**0**	**88,49**	**0**	**100,26**	**60**	**709,26**	**60**	**934,45**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.03.02.02.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang diseleksi sesuai dengan kebutuhan formasi ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dilakukan secara terbuka (oranat)	Orang					286	754,94	-	13,81	-	46,47	-	54,05	304	543,62	304	657,95					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan Sumpah/ Janji	Orang					0	-									**0**	-					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.03.02.02.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah administrasi ASN yang memasuki BUP yang terkelola dan terselesaikan	orang					233	112,77	69	8,47	24	17,80	32	11,51	27	49,52	152	87,30					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.02.02.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Kesegaran Jasmani dan Rekreasi anggota Korpri	Kali					0	140,05	0	8,92	0	7,10	0	5,80	1	68,54	1	90,36					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Jumlah pembinaan rohani dan silaturahmi yang dilakukan	kali					2	-									**0**	-					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.03.02.02.01.011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Penerbitan Kartu PNS	Orang					350	31,58	363	5,24	22	5,93	49	5,60		6,20	434	22,97					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.02.02.01.012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data Elektronik Kepegawaian terkelola secara update	orang					623	82,76	623	-	623	11,19	623	23,30	623	41,38	623	75,87					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.02.02.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase aparatur yang menjabat sesuai dengan syarat kompetensi jabatannya**	**Persen**					**70**	**357,07**	**70**	**16,72**	**70**	**46,12**	**70**	**49,44**	**70**	**119,01**	**70**	**231,29**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.03.02.02.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase usulan Mutasi ASN yang ditindaklanjuti	Person					80	199,54	80	8,20	80	20,90	80	11,18	80	73,32	80	113,60					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.02.02.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah administrasi kenaikan pangkat yang terkelola dan terselesaikan	orang					2136	157,54	504	8,52	996	25,22	118	38,26	816	45,69	2434	117,69					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.02.02.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi ASN**	**Persen**					**48**	**672,26**	**48**	**11,14**	**48**	**25,65**	**48**	**82,77**	**48**	**435,52**	**48**	**555,08**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.03.02.02.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yg mengikuti seleksi kompetensi di lingkungan pemkab. Inhil	orang					200	334,12	-	11,14	-	14,48	17	39,95	158	191,39	175	256,96					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.02.02.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti izin belajar dan tugas belajar	orang					150	338,14	55	-	50	11,17	31	42,82	22	244,13	158	298,12					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.02.02.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik**	**Persen**					**90**	**142,63**	**0**	-	**0**	**14,85**	**0**	**18,28**	**90**	**63,42**	**90**	**96,55**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.03.02.02.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan	Laporan					4	-		-		-			0		0	-					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
												K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		5.03.02.02.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS berprestasi yang diberi penghargaan	orang					523	66,86	-	-	523	3,20	0	8,71	0	24,89	523	36,80					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.02.02.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase kasus pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	Persen					100	75,76	0	-	0	11,65	0	9,57	100	38,53	100	59,75					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.03.02.02.04.010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	kecamatan					0	-		-		-			15		15	-					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*74,58*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*S*					
		5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								**2.766,69**															**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**Persen**					**45**	**2.766,69**	**0**	**73,66**	**40**	**419,04**	**20**	**1.722,96**	**45**	**274,59**	**105**	**2.490,25**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.04.02.02.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis**	**Persen**					**80**	**408,06**	**0**	**3,88**	**80**	**54,17**	**0**	**52,04**	**0**	**190,14**	**80**	**300,23**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.04.02.02.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Struktural	Orang					11	408,06	-	3,88	11	54,17	0	52,04	0	190,14	11	300,23					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		5.04.02.02.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi**	**Persen**					**40**	**2.358,62**	**0**	**69,78**	**0**	**364,87**	**40**	**1.670,92**	**40**	**84,45**	**80**	**2.190,02**					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
		5.04.02.02.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Prajabatan	orang					304	2.358,62	0	69,78	0	364,87	304	1.670,92	0	84,45	304	2.190,02					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti diklat teknis/fungsional	Orang					20	-							20		20	-					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*150*	*83,21*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		6.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**								**-**															**INSPEKTORAT DAERAH**
		6.01.	**INSPEKTORAT DAERAH**								**10.129,51**															**INSPEKTORAT DAERAH**
		6.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**					**98**	**7.884,70**	**20,11**	**1.321,09**	**20,16**	**2.241,44**	**20,65**	**1.732,64**	**22,35**	**1.721,14**	**83,27**	**7.016,30**					**INSPEKTORAT DAERAH**
		6.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun**	**Persen**					**90**	**25,61**	**42,86**	**-**	**14,29**	**1,50**	**28,57**	**4,86**	**14,29**	**16,70**	**100,00**	**23,06**					**INSPEKTORAT DAERAH**
		6.01.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan					7	25,61	3	-	1	1,50	2	4,86	1	16,70	7	23,06					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun**	**Persen**					**100**	**6.472.48**	**25.00**	**1.199.25**	**25.00**	**1.904.05**	**25.00**	**1.377.11**	**25.00**	**1.371.33**	**100**	**5.851.73**					**INSPEKTORAT DAERAH**
		6.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	6.472,48	0,25	1.199,25	0,25	1.904,05	0,25	1.377,11	0,25	1.371,33	1	5.851,73					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran**	**Persen**					**100**	**84,82**	**10,53**	**20,78**	**10,53**	**30,25**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**21,05**	**51,03**					**INSPEKTORAT DAERAH**
		6.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang	Lembar					100	32.50	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan kantor	orang					68	52.32									0	-					INSPEKTORAT DAERAH
				Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					19	-	4	20.78	4	30.25	-	-	-	-	8	51.03					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kali					3	-		-		-		-		-	0	-					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**746,00**	**14,86**	**53,10**	**29,49**	**234,11**	**13,21**	**107,14**	**24,78**	**173,80**	**82,34**	**568,15**					**INSPEKTORAT DAERAH**
		6.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen yang disediakan	Buah					80	3.53	13	0.89	11	0.78	17	1.06	10	0.80	51	3.52					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					15	175.68	-	-	-	-	-	-	15	30.07	15	30.07					INSPEKTORAT DAERAH
				Jumlah Furniture dan Interior Gedung Kantor yang	Set					2										0	-					INSPEKTORAT DAERAH
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Unit					30				44.00	145.22					44.00	145.22					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					7903	65.31	352.9	6.18	666.6	5.10	735.3	7.97	334.6	4.11	2089.4	23.36					INSPEKTORAT DAERAH
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					39		18.00	16.51	9.00	8.02	5.00	4.72	12.00	11.67	44	40.92					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					216	16.00	132	2.11	132	2.54	132	3.66	132	4.65	528	12.96					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang	Kali					36	485.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					INSPEKTORAT DAERAH
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang	Kali					243		14.00	27.415	30.00	72.45	35.00	89.74	35.00	122.49	114.00	312.09					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																							INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler yang disediakan	Set					6	-		-		-		-		-	0	-					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang**	**Persen**					**100**	**268.66**	**23.11**	**44.50**	**22.66**	**62.16**	**21.87**	**53.68**	**23.65**	**80.82**	**91.29**	**241.16**					**INSPEKTORAT DAERAH**
		6.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					4722	3.96	734	0.69	628	0.55	442	0.60	862	0.80	2666	2.64					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					8	96.70	8	18.14	8	23.67	8	18.48	8	27.13	8	87.41					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					4	168.00	4.00	6	4.00	7.00	4.00	6	4.00	17	4.00	36					INSPEKTORAT DAERAH
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					7		7.00	13.94	7.00	22.67	7.00	21.68	7.00	27.95	7.00	86.24					INSPEKTORAT DAERAH
				Jumlah tenaga kebersihan	Orang					4		4.00	5.73	4.00	8.27	4.00	6.92	4.00	7.94	4.00	28.86					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan**	**Persen**					**100**	**287,14**	**4,31**	**3,46**	**19,01**	**9,38**	**35,26**	**189,85**	**46,36**	**78,49**	**104,94**	**281,17**					**INSPEKTORAT DAERAH**
		6.01.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	Unit					6	14,60	1	1,85	3	3,80	3	5,43	3	3,45	10	14,52					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipellihara dan dipepanjang Perizinannya	Unit					25	11,50	-	-	7	2,14	5	2,01	8	3,39	20	7,54					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					82	15.00	4	1.61	14	3.45	7	1.61	39	7.57	64	14.22					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Unit					1	186.04	-	-	-	-	0.98	180.80	0.02	4.14	1	184.94					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Unit					1	60,00	-	-	-	-	-	-	1	59,94	1	59,94					INSPEKTORAT DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*97,94*	*88,86*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-**	**Persen**					**74**	**1.966,40**	**9,83**	**247,18**	**3,85**	**380,82**	**10,68**	**342,57**	**45,73**	**778,64**	**70,08547009**	**1.749,21**					**INSPEKTORAT DAERAH**
		6.01.02.02.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Pengawasan Internal yang dilaksanakan**	**Persen**					**74**	**1.609.37**	**9.83**	**206.34**	**3.85**	**338.48**	**10.68**	**321.03**	**45.73**	**554.74**	**70.09**	**1.420.59**					**INSPEKTORAT DAERAH**
		6.01.02.02.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Auditi	laporan					100	232.41	0	95.42	2	69.86	0	1.32	3	31.56	5	198.16					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.02.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil audit	Laporan					100	131.20	0	2.30	3	27.35	2	39.87	4	46.67	9	116.20					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.02.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen yang direviu	Dokumen					4	348.45	22	77.76	4	59.84	23	16.38	93	192.23	142	346.22					INSPEKTORAT DAERAH
				Jumlah dokumen yang direviu	dokumen					5		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.02.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen yang direviu	Dokumen					1	21.11	1	16.15	0	-	0	0.77	0	-	1	16.92					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.02.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil audit	Laporan					100	126.04	0	-	0	10.24	0	30.88	7	52.13	7	93.25					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.02.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil audit	Laporan					100	342.40	0	-	0	84.94	0	167.12	1	83.94	1	336.00					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.02.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan	laporan					1	407,76	3	14,71	5	86,24		64,69	4	148,19	12	313,84					INSPEKTORAT DAERAH
				Jumlah laporan Pengawalan dan Pengamanan	laporan					1		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					INSPEKTORAT DAERAH
				Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan gratifikasi	laporan					1		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					INSPEKTORAT DAERAH
				Persentase penyelesaian tindak lanjut.	Persen					56		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Nilai rencana aksi program pemberantasan korupsi**	**Nilai**					**85**	**357.04**	**-**	**40.84**	**-**	**42.34**	**-**	**21.54**	**-**	**223.90**	**0**	**328.62**					**INSPEKTORAT DAERAH**
		6.01.02.02.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase penyelesaian kerugian negara/daerah	Persen					5	100.80	87.51	-	87.94	29.94	87.94	20.47	87.94	26.75	87.94	77.16					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.02.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	Laporan					6	256.24	2	40.84	6	12.40	5	1.07	24	197.15	37	251.46					INSPEKTORAT DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*94,71*	*88,27*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Opd Yang Dilaksanakan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Yang**	**Persen**					**21**	**278,41**	**-**	**9,63**	**-**	**-**	**-**	**116,10**	**-**	**122,01**	**0**	**247,74**					**INSPEKTORAT DAERAH**
		6.01.03.02.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Cakupan Pendampingan dan Asistensi**	**Laporan**					**40**	**278.41**	**0**	**9.63**	**-**	**-**	**-**	**116.10**	**-**	**122.01**	**0**	**247.74**					**INSPEKTORAT DAERAH**
		6.01.03.02.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang mencapai maturitas SPIP level III	OPD					12	9.38	0	-	17	-	0	-	0	3.01	17	3.01					INSPEKTORAT DAERAH
				Persentase ketaatan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan LHKPN/ LHKASN dan LP2P	Persen					75	-	0	-	-		-	-	-	-	0	-					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.03.02.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan gratifikasi	Laporan					1	258,61	0	9,63		-	-	116,10	1	113,26	1	238,99					INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.03.02.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan	Laporan					1	10,43	0	-		-	-	-	1	5,74	1	5,74					INSPEKTORAT DAERAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*114*	*59,84*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*R*					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								**-**															**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.	**KECAMATAN**								**9.224,88**		**1.403,83**		**2.216,42**		**1.861,78**		**2.386,37**	**-**	**7.868,40**					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**7.720,44**		**1.256,02**		**1.969,44**		**1.658,96**		**1.601,30**	**-**	**6.485,72**					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**					**1**	**2,09**	-	-	-	-	100,00	2,09	-	-	100,00	2,09					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	Dokumen					5	2,09	-	-	-	-	5	2,09	-	-	5	2,092					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**					**1**	**7.335,28**	**100**	**1.187,54**	**100**	**1.860,76**	**100**	**1.575,06**	**100**	**1.533,36**	**100**	**6.156,71**					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	orang					68	7.335,28	68	1.187,54	68	1.860,76	68	1.575,06	68	1.533,36	68	6.156,71					KECAMATAN TEMBILAHAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
												K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 ÷ 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah**	**orang**					**2**	**14,40**	**100**	3,60	**100**	3,60	**100**	3,60	**100**	3,60	**100**	**14,40**					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Petugas Keamanan yang disediakan	orang					2	14,40	2	3,6	2	3,6	2	3,6	2	3,6	2	14,4					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**					**100**	**201,23**	27,60	28,22	21,95	64,52	47,10	37,94	40,25	32,78	27,60	20,43					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					3	1,85	-	-	-	-	3	1,85	-	-	3	1,85					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					23	56,07	23	5,13	23	6,77	23	8,92	23	8,25	23	29,07					KECAMATAN TEMBILAHAN
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set					5	-	-	-	5	27					5	27					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					760	42,40		2,25		1,71		3,10		0,54	0	7,6					KECAMATAN TEMBILAHAN
				Jumlah Makan Minum Rapat yang disediakan	Porsi					24		3	3,6	3	7,2	9	10,8	9	13,2	24	34,8					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Lembar					12042	11,40		0,7		2,5	-	4,605		3,599	0	11,40					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					2	2,40	2	0,6	-	-	2	0,8	2	1,00	2	2,400					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					21	87,10	7	15,94	8	19,34	3	7,86	2	6,20	20	49,336					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**					**100**	-	**62,94**	**34,56**	**64,446**	**35,56**		**31,72**		**26,40**	**127,39**	**128,25**					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	Unit					28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**20**	**130,76**									0	0					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					848	2,32	30	0,3	132	1,32	70	0,7	-	-	232	2,32					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					2	24,00	2	6,32	2	6,84	2	5,94	2	4,90	2	24,00					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas Operator yang dibayarkan	Orang					11	104,44	11	19,8	11	19,5	9	16,2	9	13,8	10	69,3					KECAMATAN TEMBILAHAN
				Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang					1	-	1	3	1	3	1	3	1	3	1	12					KECAMATAN TEMBILAHAN
				Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					11	-	11	0,65	11	0,40	11	1,39	11	0,2	11	2,634					KECAMATAN TEMBILAHAN
				Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan	Orang					1	-	1	4,5	1	4,5	1	4,5	1	4,5	1	18					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**					**100**	**38,89**	**100**	**2,1**	**100**	**5**	**100**	**8,55**	**100**	**5,152**	100	20,802					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					5	22,20	5	2,1	5	5	5	8,55	5	5,2	5	20,802					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Unit					1	8,69	-								0	0					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					13	8,00	-								0	0					KECAMATAN TEMBILAHAN
																				92,04	***82,18***					
																				ST	***T***					
		7.01.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**Persen**					**90**	**1.251,37**	**11,27**	140,45	19,72	245,68	15	186,91	43,29	539,38	**89,28**	**1.112**					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	**Persen**					**90**	**1.245,83**	**11,27**	140,45	19,72	245,68	15	186,91	43,29	539,38	89,28	1.112					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Pekan Arba	Persen					90	1.245,83	11,27	140,45	19,72	245,68	15	186,91	43,29	539,38	89,28	1.112					KECAMATAN TEMBILAHAN
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Seberang Tembilahan	Persen					90	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	0					KECAMATAN TEMBILAHAN
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Seberang Tembilahan Barat	Persen					90	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	0					KECAMATAN TEMBILAHAN
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan	Persen					90	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	0					KECAMATAN TEMBILAHAN
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Sungai Beringin	Persen					90	-	1	-	1	-	1	-	1	0AA47:T87	4	#VALUE!					KECAMATAN TEMBILAHAN
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Sungai Perak	Persen					90	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	0					KECAMATAN TEMBILAHAN
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Tembilahan Hilir	Persen					90	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	0					KECAMATAN TEMBILAHAN
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Tembilahan Kota	Persen					90	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	0					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Dokumen**					**100**	**5,54**	-	-	-	2,19	-	-	-	3,35	0	5,54					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilavah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Rekomendasi					751	5,54	-	-	-	2,19	-	-	751,00	3,35	751	5,54					KECAMATAN TEMBILAHAN
																				89,28	***80,36***					
																				T	***T***					
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		-	-	-	-	-	-	**100,00**	-	-	-	-	-	-	-	100,00	**0**	**100**					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.04.02.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		-	-	-	-	-	-	**100,00**	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0	100					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0	100					KECAMATAN TEMBILAHAN
																				-	-					
																				ST	***ST***					
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum**	-	-	-	-	-	1	**128,14**	-	-	-	-											**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	-	-	-	-	-	1	**128,14**	-	-	-	-	-	-	**100**	**127,74**	100,00	127,74					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional. dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali					1	128,14	-	-	-	-	-	-	1	127,74	1	127,74					KECAMATAN TEMBILAHAN
																				100,00	***99,69***					
																				ST	***ST***					
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**24,94**															**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Dokumen**					**100**	**24,94**	50,00	**7,96**	-	-	50,00	8,24	50,00	4,80	50,00	21,00					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok					1	14,42	-	-	-	-	1	8,24	1	4,8	1	13,04					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Dokumen					9	10,52	9	7,96	-	-	-	-	-	-	9,00	7,96					KECAMATAN TEMBILAHAN
																				100,00	***83,04***					
																				ST	***T***					
		7.0.0.0	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-															**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.1.0.0	**KECAMATAN**								**560,00**															**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa/kelurahan yang Tertib Administrasi**							**560,00**				11,20	48,33	9,745	109,17	54,175	346,93	75,1	504,415				**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.0	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan**							**560,00**	-	-	**11,20**	**48,33**	**9,745**	**109,17**	**54,175**	**346,93**	**75,1**	**504,415**				**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan	Persen					90	344,30	-	-	-	-	-	-	88	303,11	88	303,11					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Seberang Tembilahan Selaan	Persen					90	215,70	-	-	22,4	48,33	19,49	109,17	20,31	43,82	62	201,31					KECAMATAN TEMBILAHAN
																				75,12	***81,61***					
																				S	***T***					
		7.0.0.0	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-															**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.1.0.0	**KECAMATAN**								**560,00**															**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa/kelurahan yang Tertib Administrasi**	Persen					90	**560,00**			8,53	58,56	10	68,36	7,93	48,91	26,415	175,83					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.0	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Seberang Tembilahan Barat**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Seberang Tembilahan Barat**	**Persen**					**90**	**560,00**			**8,53**	**58,56**	**10**	**68,36**	**7,93**	**48,91**	**26,415**	**175,83**					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persen					90	216,71	-	-	-	-	-	-	4,4	9,5	4,4	9,5					KECAMATAN TEMBILAHAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Seberang Tembilahan Barat	Persen					90	343,29	-	-	17,06	58,56	19,91	68,36	11,5	39,46	48,47	166,38					KECAMATAN TEMBILAHAN
					Rata-rata capaian kinerja (%)															*26,42*	*23,77*						
					Predikat kinerja															*SR*	*SR*						
		7.0.0.0	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-									-	-					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.0.0	**KECAMATAN**								**560,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa/kelurahan yang Tertib Administrasi**	Persen					90	**560,00**			12,52	111,5	19,79	176,6	10,70	6,73	43,01	294,83					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.0	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tembilahan Hilir**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tembilahan Hilir**	**Persen**					**90**	**560,00**	-	-	**12,52**	**111,5**	**19,79**	**176,6**	**10,70**	**6,73**	**43,01**	**294,83**					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tembilahan Hilir	Persen					90	114,78	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tembilahan Hilir	Persen					90	445,22	-	-	25,04	111,5	39,58	176,6	13,46	59,95	78,08	348,05					KECAMATAN TEMBILAHAN
					Rata-rata capaian kinerja (%)															*78,08*	*70,36*						
					Predikat kinerja															*T*	*S*						
		7.0.0.0	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-									-	-					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.0.0	**KECAMATAN**								**560,00**															**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa/kelurahan yang Tertib Administrasi**	Persen					90	**560,00**			13,10	73,25	12,70	71	23,24	130,122	49,03	274,372					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.0	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Beringin**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Beringin**	**Persen**					**90**	**560,00**			**13,10**	**73,25**	**12,70**	**71**	**23,24**	**130,122**	**49,03**	**274,372**					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Beringin	Persen					90	280,35	-	-	-	-	-	-	19,29	54,07	19,3	54,1					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Beringin	Persen					100	279,65			26,19	73,25	25,39	71	27,19	76,05	78,77	220,30					KECAMATAN TEMBILAHAN
					Rata-rata capaian kinerja (%)															*49,03*	*48,07*						
					Predikat kinerja															*SR*	*SR*						
		7.0.0.0	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-									-	-					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.0.0	**KECAMATAN**								**560,00**															**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa/kelurahan yang Tertib Administrasi**	Persen					90	**560,00**			11,34	63,5	18,595	90,1	43,22	238,76	73,16	392,36					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.0	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Perak**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Perak**	**Persen**					**90**	**560,00**	-	-	**11,34**	**63,5**	**18,595**	**90,1**	**43,22**	**238,76**	**73,16**	**392,36**					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Perak	Persen					90	317,70	-	-	-	-	-	-	63,95	317,7	63,95	317,7					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Perak	Persen					90	242,30	-	-	-	63,5	37,19	90,1	22,49	54,49	59,68	208,09					KECAMATAN TEMBILAHAN
					Rata-rata capaian kinerja (%)															*61,82*	*83,65*						
					Predikat kinerja															*R*	*T*						
		7.0.0.0	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-									-	-					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.0.0	**KECAMATAN**								**560,00**															**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa/kelurahan yang Tertib Administrasi**	Persen					90	**560,00**			12,75	80,975	11,66	74,04	53,93	308,17	78,335	463,1818					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.0	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pekan Arba**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pekan Arba**	**Persen**					**90**	**560,00**			**12,75**	**80,975**	**11,66**	**74,04**	**53,93**	**308,17**	**78,335**	**463,1818**					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pekan Arba	Persen					90	242,48							87,17	211,38	87,17	211,378					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Desa/keluhan yang Tertib Administrasi	Persen					90	317,52			25,5	80,975	23,32	74,04	20,68	65,68	69,5	220,6923					KECAMATAN TEMBILAHAN
					Rata-rata capaian kinerja (%)															*78,34*	*70,51*						
					Predikat kinerja															*T*	*S*						
		7.0.0.0	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-									-	-					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.0.0	**KECAMATAN**								**560,00**															**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa/kelurahan yang Tertib Administrasi**	Persen					90	**560,00**			14,30	72,985	14,51	74,041	40,97	278,36	69,78	425,384					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.0	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Seberang Tembilahan**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Seberang Tembilahan**	**Persen**					**90**	**560,00**			**14,30**	**72,985**	**14,51**	**74,041**	**40,97**	**278,36**	**69,78**	**425,384**					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Seberang Tembilahan	Persen					90	304,80							70,67	215,406	70,67	215,406					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Seberang Tembilahan	Persen					90	255,20			28,6	72,985	29,01	74,041	11,27	28,755	68,88	175,781					KECAMATAN TEMBILAHAN
											-									0	0					KECAMATAN TEMBILAHAN
					Rata-rata capaian kinerja (%)															*69,78*	*62,80*						
					Predikat kinerja															*S*	*R*						
		7.0.0.0	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-									-	-					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.0.0	**KECAMATAN**								**560,00**															**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa/kelurahan yang Tertib Administrasi**	Persen					90	**560,00**			14,52	136,38	14,52	135,04	30,46	121,01	59,50	392,425					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.0	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tembilahan Kota**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tembilahan Kota**	**Persen**					**90**	**560,00**			**14,52**	**136,38**	**14,52**	**135,04**	**30,46**	**121,01**	**59,50**	**392,425**					**KECAMATAN TEMBILAHAN**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tembilahan Kota	Persen					90	101,02							44,3	44,755	44,3	44,755					KECAMATAN TEMBILAHAN
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tembilahan Kota	Persen					90	458,98			29,71	136,38	29,04	135,04	16,61	76,255	75,362	347,67					KECAMATAN TEMBILAHAN
											-									0	0					KECAMATAN TEMBILAHAN
					Rata-rata capaian kinerja (%)															*59,83*	*54,02*						
					Predikat kinerja															*R*	*R*						
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-															**KECAMATAN TEMBILAHAN HULU**
		7.01.	**KECAMATAN**								**4.544,16**															**KECAMATAN TEMBILAHAN HULU**
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi**							**3.839,63**		**729**		**1.245**		**794**		**850**	**0**	**3.618**					**KECAMATAN TEMBILAHAN HULU**
		7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan**	**Persen**					**100**	**3.461,08**	**18**	**623**	**33**	**1.130**	**21**	**743**	**22**	**753**	**94**	**3.249**					**KECAMATAN TEMBILAHAN HULU**
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	3.461,08		623	1	1.130	1	743	1	753	1	3.249					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Penelola yang terpelihara**	**Persen**					**100**	**48,00**	8	4	58	28	17	8	17	8	100	48					**KECAMATAN TEMBILAHAN HULU**
		7.01.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					3	48,00	3	4	3	28	3	8	3	8	3	48					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Persen**					**100**	**10,00**	100	10							100	10					**KECAMATAN TEMBILAHAN HULU**
		7.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Stel					45	10,00	45	10							45	10					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**153,28**	40	62	16	25	12	18	26	40	94	144					**KECAMATAN TEMBILAHAN HULU**
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					24	52,04	1	43							1	43					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set					4	-									-	-					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					870	23,45	112	3	354	10	134	4	270	7	870	23					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					11	-									-	-					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Lembar					14489	17,92	2.628	3	2.223	3	1.463	2	8.175	10	14.489	18					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					96	9,60	18	2	30	3	18	2	30	3	96	10					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					15	50,27	3	11	3	9	3	11	6	19	15	50					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					6	-									-	-					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan	Persen					100	-									-	-					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dibangun	Unit					1	-									-	-					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen					100	128,56	16	21	75	59	20	25	18	24	130	129					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					350	4,00	175	2	0	1			127	1	302	4					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					12	30,50	3	7	2	4	3	7	5	12	12	31					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					7	94,06	1	12	4	54	1	19	1	10	7	94					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen					100	38,70	24	9	8	3	1	1	66	25	99	38					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipenuhinya Perizinannya	Unit					12	22,70	3	5	2	3	0	1	7	13	12	22					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					10	-									-	-					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					7	16,00	2	4					5	12	7	16					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
											Rata-rata capaian kinerja (%)									***92,42***	***98,36***					
											Predikat kinerja									***ST***	***ST***					
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen					100	350,30		63							**0**	62,62082					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen					100	293,68	19	55	29	84	32	94	20	59	99	291					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Kegiatan					4	293,68	1	55	1	84	1	94	1	59	4	291					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.02.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Persen					100	56,63	14	8	46	26	28	16	12	7	100	57					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Rekomendasi					8	56,63	1	8	4	26	2	16	1	7	8	57					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Tembilahan Barat	Persen					90	-									-	-					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Tembilahan Hulu	Persen					90	-									-	-					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
											Rata-rata capaian kinerja (%)									***100***	***100***					
											Predikat kinerja									***ST***	***ST***					
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen					100	16,03									**0**	**0**					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen					100	16,03	14	2	86	14					100	16					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.03.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	Jenis					2	16,03	0	2	2	14					2	16					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
				Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba desa/kelurahan	Jenis					4	-									-	-					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
											Rata-rata capaian kinerja (%)									***100***	***100***					
											Predikat kinerja									***ST***	***ST***					
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persen					100	100,00									**0**	**0**					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
				Persentase Penurunan Kejadian Bencana Alam dan Non Alam	Persen					100	-									-	-					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.04.02.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tokoh Masyarakat dan tokoh Agama Berperan Aktif Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen					100	100,00					100	100			100	100					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	Kali					6	100,00					6	100			6	100					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
											Rata-rata capaian kinerja (%)									***100***	***100***					
											Predikat kinerja									***ST***	***ST***					
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen					100	58,95									**0**	**0**					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.05.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen					100	58,95							100	59	100	59					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali					3	58,95							3	59	3	59					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
											Rata-rata capaian kinerja (%)									***100***	***100***					
											Predikat kinerja									***ST***	***ST***					
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen					100	179,25									**0**	**0**					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.06.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen					100	179,25	12	21	11	20	7	13	70	125	100	179					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Desa					1	109,00							1	109	1	109					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok					3	53,40	0	4	1	20	1	13	1	16	3	53					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Dokumen					1	16,85	1	17							1	17					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
											Rata-rata capaian kinerja (%)									***100***	***100***					
											Predikat kinerja									***ST***	***ST***					
		7.0.0.0	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan							-															KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.0.0	KECAMATAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen					90	560,00			15	91	19	117	23	146	57	354					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.03.0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen					90	560,00			15	91	19	117	23	146	57	354					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.03.02.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen					90	560,00			15	91	19	117	23	146	57	354					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.03.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluruhan Tembilahan Barat	Persen					100	205,64									-	-					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Tembilahan Barat	Persen					90	354,36			23	91	30	117	37	146	90	354					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
											Rata-rata capaian kinerja (%)									***100***	***100***					
											Predikat kinerja									***ST***	***ST***					
		7.0.0.0	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan							-															KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.0.0	KECAMATAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen					90	560,00			26	128	30	149	34	166	90	443					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.03.0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen					90	560,00			26	128	30	149	34	166	90	443					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.03.02.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen					90	560,00			26	128	30	149	34	166	90	443					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.03.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluruhan Tembilahan Hulu	Persen					100	116,60									-	-					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Tembilahan Hulu	Persen					90	443,40			26	128	30	149	34	166	90	443					KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
											Rata-rata capaian kinerja (%)									***100***	***100***					
											Predikat kinerja									***ST***	***ST***					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN TEMPULING
		7.01.	KECAMATAN								5.701,90															KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai					22	4.704,80	34	742	47	1189	67	950	44	1047	48	3929					KECAMATAN TEMPULING

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Persen**					**100**	**22,42**	**0**	**0,00**	**100**	**11,43**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100,00**	**11,43**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen					2	10,94	0	0,00	2	10,94	0	0,00	0	0,00	2	10,94					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan					6	11,48	0	0,00	6	11,43	0	0,00	0	0,00	6	11,43					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Anaratur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**4.225,18**	**25**	**697,05**	**25**	**1136,81**	**25**	**803,05**	**25**	**839,48**	**100,00**	**3476,39**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TERPENUHINYA GAJI ASN	TAHUN					1	4.225,18	0,25	697,05	0,25	1136,81	0,25	803,05	0,25	839,48	1	3476,39					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ penurembanaan kompetensi**	**Persen**					**100**	**10,25**	**50**	**5,00**	**50**	**5,25**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100,00**	**10,25**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	Stel					18	10,25	9	5,00	9	5,25	0	0,00	0	0,00	18	10,25					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang					6	-									0	0					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**86,70**	**34,91**	**10,28**	**39,02**	**11,17**	**115,95**	**45,01**	**50,23**	**97,37**	**240,11**	**163,83**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					5	3,00	1	0,50	2	1,00	1	1,00	1	0,50	5	3,00					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					30	99,25	5	3,00	5	3,00	10	34,58	10	58,08	30	98,66					KECAMATAN TEMPULING
				Jumlah Meubeler yang disediakan	Jenis					1	-	0		0		7		0		7	0					KECAMATAN TEMPULING
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit					2	-	0		0		0		3		3	0					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					177	12,40	40	1,96	70	2,35	70	5,23	35	2,61	215	12,15					KECAMATAN TEMPULING
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Orang					25	-	25		25		25		25		25	0					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Lembar					3040	5,48	550	0,90	550	0,90	1540	2,80	400	0,75	3040	5,35					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Jenis					3	4,20	3	0,70	3	0,70	3	1,40	3	1,40	3	4,20					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					19	46,05	7	3,23	7	3,23	0	0,00	3	34,03	17	40,48					KECAMATAN TEMPULING
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					6	-							8		8	0					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penuniane Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**					**100**	**62,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**200**	**57,77**	**0**	**3,15**	**200,00**	**60,92**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	Unit					1	62,00	0	0,00	0	0,00	2	57,77	0	3,15	2	60,92					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**					**100**	**137,67**	**116,53**	**23,73**	**115,14**	**22,82**	**127,49**	**44,29**	**199,41**	**46,06**	**139,64**	**136,90**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					73	58,20	30	9,30	30	9,30	68	18,60	270	20,70	390	57,90					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					36	16,27	9	3,74	7	2,83	10	4,31	10	4,96	36	15,84					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruangan					10	63,20	10	10,69	10	10,69	10	21,38	10	20,40	10	63,16					KECAMATAN TEMPULING
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					2	-	6		6		6		6		6	0					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**					**100**	**76,91**	**11,11**	**6,00**	**1,39**	**1,96**	**0**	**0,00**	**33,33**	**60,91**	**45,83**	**68,86**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lananaan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dinenaniana Perizinannva	Unit					12	8,50	0	0,00	1	1,955	0	0,00	8	5,15	9	7,10					KECAMATAN TEMPULING
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					9	-									0	0,00					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	Unit					1	6,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,40	1	3,40					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Ruang					5	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	48,76	1	48,76					KECAMATAN TEMPULING
				Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Ruang					3	-									0	0,00					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					3	11,43	2	6,00	0	0,00	0	0,00	1	3,60	3	9,60					KECAMATAN TEMPULING
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									***132,23***	***95,32***					
										Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**610,57**	**18,34**	**107,23**	**18,31**	**106,00**	**29,67**	**171,19**	**32,38**	**169,98**	**24,67**	**554,405**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Layanan Pemerintah Umum yang tertangani**	**Persen**					**100**	**539,91**	**23,25**	**97,18**	**23,19**	**95,95**	**25,75**	**151,09**	**25,21**	**139,62**	**24,35**	**483,85**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Pangkalan Tujuh	Persen					100	539,91	18,00	97,18	17,77	95,95	27,98	151,09	25,86	139,62	89,62	483,85					KECAMATAN TEMPULING
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Sungai Salak	Persen					100		25		25		25		25		100	0					KECAMATAN TEMPULING
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Taniune Pedada	Persen					100	-	25		25		25		25		100	0					KECAMATAN TEMPULING
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Temouling	Persen					100	-	25		25		25		25		100	0					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani**	**Persen**					**100**	**70,66**	**13,43**	**10,05**	**13,43**	**10,05**	**33,58**	**20,10**	**39,55**	**30,36**	**25,00**	**70,56**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Rekomendasi					134	70,66	18	10,05	18,00	10,05	45	20,10	53	30,36	134	70,56					KECAMATAN TEMPULING
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									***24,67***	***189,47***					
										Predikat kinerja :									***SR***	***ST***					
		7.01.03.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Layanan Pemerintah Umum yang tertangani**	**Persen**					**100**	-									**0**	**0**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.03.02.01.0	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persen**					**100**	-									**0**	**0**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.03.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	Jenis					6	-									0	0					KECAMATAN TEMPULING
				Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba desa/kelurahan	Jenis					2	-									0	0					KECAMATAN TEMPULING
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									***0,00***	***0,00***					
										Predikat kinerja :									***SR***	***SR***					
		7.01.04.0	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum**	**Persen**					**100**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**25**	**100**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.04.02.03.0	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**					**100**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**100,00**	**0**	**0,00**	**25**	**100**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sosialisasi bersama tokoh agama dan masyarakat	Persen					100	100,00	0	0,00	0	0,00	100	100,00	0	0,00	100	100,00					KECAMATAN TEMPULING
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100,00***	***0,00***					
										Predikat kinerja :									***ST***	***SR***					
		7.01.05.0	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**	**Persen**					**100**	**77,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**77,12**	**100**	**77,1247**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.05.02.01.0	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**	**Persen**					**100**	**77,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**77,12**	**25,00**	**77,1247**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelakanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali					1	77,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	77,12	1	77,12					KECAMATAN TEMPULING
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100,00***	***100,00***					
										Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.06.0	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**Persen**					**100**	**209,41**	**33,33**	**16,842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68,42**	**192,5645**	**25,44**	**209,4065**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.06.02.01.0	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa/Keluruhan**	**persen**					**100**	**209,41**	**33,33**	**16,84**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**68,42**	**192,56**	**25,44**	**209,4065**					**KECAMATAN TEMPULING**
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Desa					95	159,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	159,26	9	159,26					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok					9	33,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	33,30	9	33,30					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Dokumen					10	16,84	10	16,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	16,84					KECAMATAN TEMPULING
										Rata-rata capaian kinerja (%) :									***25,44***	***100,00***					
										Predikat kinerja :									***SR***	***ST***					
		7.0.0.0	**UNSUR KEWILAYAHAN**							-																**KECAMATAN TEMPULING**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.0.0	KECAMATAN								560,00															KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen					95	560,00	0	0	17,85	117,58	10,45	69,075	14,73	203,991	10,76	390,641					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.02.02.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di keluruhan	Persen					95	560,00	0	0,00	17,85	117,58	10,45	69,08	14,73	203,99	10,76	390,641					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluruhan Sungai Salak	Persen					95	213,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50,00	106,94	50,00	106,94					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Keluruhan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Sungai Salak	Persen					95	346,70	0	0,00	33,91	117,58	19,92	69,08	27,99	97,05	81,83	283,70					KECAMATAN TEMPULING
																				69,38	*65,98*					
																				S	*R*					
		7.0.0.0	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN TEMPULING
		7.01.0.0	KECAMATAN								560,00															KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen					95	560,00	0	0,00	14,18	61,85	12,42	51,53	11,57	274,37	9,54	387,7495					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.02.02.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di keluruhan	Persen					95	560,00	0	0,00	14,18	61,85	12,42	51,53	11,57	274,37	9,54	387,75					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluruhan Tempuling	Persen					95	341,59	0	0,00	0	3,00	0	0,00	60	226,34	60,00	229,34					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Keluruhan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Temouling	Persen					95	218,41	0	0,00	26,94	58,85	23,59	51,53	21,99	48,03	72,53	158,41					KECAMATAN TEMPULING
																				69,75	*69,83*					
																				S	*S*					
		7.0.0.0	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN TEMPULING
		7.01.0.0	KECAMATAN								557,76															KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen					95	557,76	0	0,00	8,77	50,00	11,04	62,91	22,2	381,21	10,50	494,1218					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.02.02.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di keluruhan	Persen					95	557,76	0	0,00	8,77	50,00	11,04	62,91	22,2	381,21	10,50	494,1218					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluruhan Pangkalan Tujuh	Persen					95	257,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	254,69	100	254,69					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Keluruhan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Pangkalan Tujuh	Persen					95	299,96	0	0,00	16,67	50,00	20,97	62,91	42,18	126,52	79,82	239,43					KECAMATAN TEMPULING
																				94,64	*89,31*					
																				ST	*T*					
		7.0.0.0	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN TEMPULING
		7.01.0.0	KECAMATAN								560,00															KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen					95	560,00	0	0,00	12,4	49,77	14,19	56,95	22,25	194,03	12,21	300,75					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.02.02.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembanunan di keluruhan	Persen					95	560,00	0	0,00	12,40	49,77	14,19	56,95	22,25	194,03	12,21	300,749619					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluruhan Tanjung Pedada	Persen					95	348,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33,33	104,75	33,33	104,75					KECAMATAN TEMPULING
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Keluruhan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Tanjung Pidada	Persen					95	211,20	0	0,00	23,57	49,77	26,96	56,95	42,27	89,28	92,80	196,00					KECAMATAN TEMPULING
																				66,39	*61,42*					
																				S	*R*					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															
		7.01.	KECAMATAN								3.254,74															
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								2.634,41															
		7.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.356,70															
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	2.356,70															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								63,10															
		7.01.01.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipergunjang Perizinannya	Unit					13	34,30															KECAMATAN BATANG TUAKA
				Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					18	-															
		7.01.01.02.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					3	28,80															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								124,07															
		7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					100	5,50															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Meubeler yang disediakan	Jenis					5	2,00															KECAMATAN BATANG TUAKA
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Set					10	-															
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					900	24,82															KECAMATAN BATANG TUAKA
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					823	-															
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Lembar					7409	8,00															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					2160	3,60															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang	Kali					29	80,15															KECAMATAN BATANG TUAKA
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang	Kali					5	-															
		7.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								22,77															
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Iasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					100	5,20															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Iasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Jenis					3	7,26															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					37	10,31															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								67,76															
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					1	5,00															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					34	62,76															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN								165,52															
		7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat								135,82															
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								135,82															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.02.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								29,75															
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								29,75															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN								30,00															
		7.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								30,00															
		7.01.03.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								30,00															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN								100,00															
		7.01.04.02.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban								100,00															
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								100,00															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								127,49															
		7.01.05.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								127,49															
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-						00	127,49															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN								197,27															
		7.01.06.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								197,27															
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								135,00															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga								53,76															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembanaunan Partisipatif								8,51															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															
		7.01.	KECAMATAN								560,00															
		7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN								560,00															
		7.01.03.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								560,00															

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Piring	Persen					100	355,10															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Piring	Persen					100	204,90															KECAMATAN BATANG TUAKA
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN CONCONG
		7.01	KECAMATAN								2.657.60		476.02		612.52		637.56		1202.83							KECAMATAN CONCONG
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persen					100	2.171,98	23	365,07	28	579,91	28	456,59	33	494,61	112	1896,19					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen					100	1.791,65	25	317,79	25	495,29	25	339,30	25	371,26	100	1523,64					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	1.791.65	1	317.79	1	495.29	1	339.30	1	371.26	1	1523.64					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor Dibayarkan	Orang					2	16.80	25	2.80	25	4.20	25	5.60	25	4.20	100	16.80					KECAMATAN CONCONG
				Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen					100	-									-	0					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	orang					2	16.80	2	2.80	2	4.20	2	5.60	2	4.20	2	16.80					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis					26	248.52	40.47	25.07	61.37	56.78	65.11	82.22	66.12	83.24	233	247.31					KECAMATAN CONCONG
				Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Persen					100	-		-							-	0					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Set					5	32,54	1	3,54	1	9,98	1	0,00	2	17,82	5	31,34					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas/Instansi yang	Set					0	-		-		-					-	0					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					1332	28.21	1017	7.32	915	6.59	750	5.40	1237	8.90	3.918	32.80					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					13942	9,33	5335,4	1,33	10775	2,69	3213	0,80	17996,6	4,50	37.320	9,33					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang	Kali					78	178,44	21	12,88	62	37,51	125,6528926	76,02	2	52,02	211	178,43					KECAMATAN CONCONG
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang	Kali					7										-	0					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang	Persen					100	105.11	20.99	17.61	20.77	22.80	17.72	28.72	17.72	35.91	77	105.04					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					1294	2.66	64	0.64	50	0.50	83	0.83	68	0.68	265	2.65					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					3	3,48	3	2,32	3	0,60	1	0,29	1	0,22	2	3,43					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					2	98,98	2	14,65	2	21,70	2	27,60	2	35,01	2	98,96					KECAMATAN CONCONG
				Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					12	-	12		12		12		12		12	0					KECAMATAN CONCONG
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					1	-	1		1		1		1		1	0					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persen					100	9.90	2.08	1.8	6.25	0.85	6.25	0.75		0.00	15	3.4					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					8	1,60		-	1	0,85	1	0,75		-	2	1,60					KECAMATAN CONCONG
		7.01.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					24	8,30	1	1,80		-		-		-	1	1,80					KECAMATAN CONCONG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*105*	*89,70*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN		Persen					95	127,75	15	20,21	23	32,61	29	34,18	33	40,07	100	127,06					KECAMATAN CONCONG
		7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat		Persen					95	59.70	14	9.21	21	14.98	32	17.68	32.14	17	100	59.02					KECAMATAN CONCONG
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan	Kali					28	59.70	4	9.21	6	14.98	9	17.68	9	17.15	28	59.02					KECAMATAN CONCONG
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan	Persen					95	-									-	0					KECAMATAN CONCONG
		7.01.02.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Rekomendasi					12	68,05	17	11,00	25	17,63	25	16,50	33	22,92	100	68,05					KECAMATAN CONCONG
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Rekomendasi					12	68,05	2	11,00	3	17,63	3	16,50	4	22,92	12	68,05					KECAMATAN CONCONG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*99,43*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		Persen					100	100,00		0,00		0,00		0,00	100	100,00	100	100,00					KECAMATAN CONCONG
		7.01.04.02.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban		Persen					100	100.00		-		-		-	100	100.00	100	100.00					KECAMATAN CONCONG
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kegiatan					1	100.00		-		-		-	1	100.00	1	100.00					KECAMATAN CONCONG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*100*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persen					100	57.55		0.00		0.00		0.00	86.97	50.05	86.97	50.05					KECAMATAN CONCONG
		7.01.05.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Tahun					1	57,55		-		-		-	100	50,05	100	50,05					KECAMATAN CONCONG
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelakanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	Kegiatan					1	57,55		-		-		-	1	50,05	1	50,05					KECAMATAN CONCONG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*86,97*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN		Persen					100	200,32	67	20,25		0,00	8	30,79	42	147,48	117	198,52					KECAMATAN CONCONG
		7.01.06.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persen					100	200,32	67	20,25		0,00	8	30,79	42	147,48	117	198,52					KECAMATAN CONCONG
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan	Desa					3	135.00		-		-		-	3	134.00	3	134.00					KECAMATAN CONCONG
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang	Kelompok					2	50,29	2	6,02		-	2	30,79	2	13,48	2	50,29					KECAMATAN CONCONG
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada	Dokumen					6	15,03	6	14,23		-		-		-	6	14,23					KECAMATAN CONCONG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*97,98*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN CONCONG
		7.01.	KECAMATAN								560,00															KECAMATAN CONCONG
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN		Persen					100	560,00	13,74	70,50		-	21,05	116,00	69,91	370,62	105	557					KECAMATAN CONCONG
		7.01.03.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persen					100	560,00	13,74	70,50		-	21,05	116,00	69,91	370,62	105	557					KECAMATAN CONCONG
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Concong Luar	Persen					95	290,00		-			40,00	116,00	60,00	174,00	100,00	290,00					KECAMATAN CONCONG
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Concong Luar	Persen					95	270,00	26,11	70,50		-		-	72,82	196,62	98,93	267,12					KECAMATAN CONCONG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*105*	*99,47*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN ENOK
		7.01.	KECAMATAN								4.866,75		673,57		1.379,01		1.265,32		2.148,71	-	5.466,60					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen					100	3.757,98	14	539,82	25	950,94	18	680,10	25	942,31	83	3.113,17					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Tahun					1	3.265,02	100	492,81	100	872,08	100	641,99	100	639,26	100	2.646,14					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	3.265,02	1	492,81	1	872,08	1	641,99	1	639,26	1	2.646,14					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen					100	350,97	32	26,38	25	18,60	19	15,00	22	269,21	98	329,20					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					27	252,95	9	2,37	6	1,19	5	0,26	7	245,02	27	248,84					KECAMATAN ENOK
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set					1	-		-		-		-	1	-	1	-					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					342	15,66	120	5,50	125	3,76	55	1,29	15	4,99	315	15,54					KECAMATAN ENOK
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					7	-		-		-		-		-	-	-					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					8348	6,30	3.500	2,73	1.800	1,24	1.500	1,00	1.548	1,28	8.348	6,25					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					600	3,00	150	0,75	150	0,75	150	0,75	150	0,75	600	3,00					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					32	73,07	8	15,03	6	11,66	6	11,71	12	17,18	32	55,57					KECAMATAN ENOK
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					7	-		-		-		-		-	-	-					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen					100	42,00	-	-	100,00	41,75		-		-	100,00	41,75					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Ruang					50	42,00	-	-	50	41,75	-	-	-	-	50	41,75					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen					100	92,18	27,25	19,33	20,11	18,11	8,33	20,50	19	31,75	75,00	89,69					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					630	2,34	200	1,08	65	0,41		0,35	50	0,50	315	2,34					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					2	27,52	2	5,02	2	4,94		4,83	2	10,47	2	25,25					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					5	62,32	5	13,23	5	12,77	5	15,32	5	20,79	5	62,11					KECAMATAN ENOK
				Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					KECAMATAN ENOK
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen					100	7,80	25,00	1,30	25,00	0,40	25,00	2,60	25,00	2,08	100,00	6,38					KECAMATAN ENOK
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipellihara dan dipepanjang Perizinannya	Unit					1	7,80	1	1,30	1	0,40	1	2,60	1	2,08	1	6,38					KECAMATAN ENOK
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					KECAMATAN ENOK
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*96,35*	*90,80*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
												K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran							702,14		123,98		106,66		139,75		288,03	-	658,42					KECAMATAN ENOK
		7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen					100	643,62	17	109,44	14	92,25	19	125,09	42	273,13	93	599,92					KECAMATAN ENOK
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Enok	Persen					90	643,62	15	109,44	13	92,25	17	125,09	38	273,13	84	599,92					KECAMATAN ENOK
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Pantai Seberang Makmur	Persen					90	-									-	-					KECAMATAN ENOK
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Pusaran	Persen					90	-									-	-					KECAMATAN ENOK
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Teluk Medan	Persen					90	-									-	-					KECAMATAN ENOK
		7.01.02.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen					100	58,52	25	14,53	25	14,41	25	14,66	25	14,90	100	58,51					KECAMATAN ENOK
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Rekomendasi					119	58,52	19	14,53	50	14,41	27	14,66	23	14,90	119	58,51					KECAMATAN ENOK
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*96,60*	*96,59*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1,85						1,45		0,40	-	1,85					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen					100	1,85		-		-	67	1,45	33	0,40	100	1,85					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	Jenis					3	1,85		-		-	2	1,45	1	0,40	3	1,85					KECAMATAN ENOK
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*100*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	cakupan peran serta masyarakat terhadap							100,00		-		-	37	37,32	59	58,80	96	96,13					KECAMATAN ENOK
		7.01.04.02.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan sumber daya manusia dan insrastruktur	Persen					100	100,00		-		-	37	37,32	59	58,80	96	96,13					KECAMATAN ENOK
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen					100	100,00						37	37,32	59	58,80	96	96,13					KECAMATAN ENOK
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*96,13*	*96,13*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan							49,30		-		-		48,20		1,10	-	49,30					KECAMATAN ENOK
		7.01.05.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen					100	49,30		-		-	98	48,20	2	1,10	100	49,30					KECAMATAN ENOK
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali					3	49,30					2	48,20	1	1,10	3	49,30					KECAMATAN ENOK
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*100*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi							255,48		9,77		-		87,03		154,29	-	251,10					KECAMATAN ENOK
		7.01.06.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen					100	255,48	33	9,77	-	-	33	87,03	33	154,29	100	251,10					KECAMATAN ENOK
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Desa					7	205,00		-		-	7,00	52,07	7,00	151,17	7	203,24					KECAMATAN ENOK
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok					4	43,71		3,00		-	2,00	34,97	2,00	3,12	4	41,09					KECAMATAN ENOK
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrembang Kecamatan	Dokumen					1	6,77	1,00	6,77		-		-		-	1	6,77					KECAMATAN ENOK
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*97,72*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN ENOK
		7.01.	KECAMATAN								560,00			9	55,64	9	50,47	22	130,75	40	236,86					KECAMATAN ENOK
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan							560,00			9	55,64	9	50,47	22	130,75	40	236,86					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persen					90	560,00			9	55,64	9	50,47	22	130,75	40	236,86					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluarahan Teluk Medan	Persen					90	294,43							2	7,63	2	7,63					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluarahan Teluk Medan	Persen					90	265,57			19	55,64	17	50,47	42	123,12	78	229,24					KECAMATAN ENOK
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*44,45*	*44,45*					
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN																							KECAMATAN ENOK
		7.01.	KECAMATAN								560,00			11	63,82	7	43,95	24	159,61	42	267,37					KECAMATAN ENOK
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persen					90	560,00			11	63,82	7	43,95	24	159,61	42	267,37					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persen					90	560,00			11	63,82	7	43,95	24	159,61	42	267,37					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluarahan Pantai Seberang Makmur	Persen					90	281,00							3	7,85	3	7,85					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluarahan Pantai Seberang Makmur	Persen					90	279,00			21	63,82	14	43,95	49	151,76	84	259,52					KECAMATAN ENOK
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*47,91*	*47,91*					
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN ENOK
		7.01.	KECAMATAN								560,00			23	145,06	15	93,90	19	296,15	56	535,11					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persen					90	560,00			23	145,06	15	93,90	19	296,15	56	535,11					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.02.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persen					90	560,00			34	145,06	22	93,90	28	296,15	84	535,11					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluarahan Enok	Persen					90	176,00								175,21	-	175,21					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluarahan Enok	Persen					90	384,00			34	145,06	22	93,90	28	120,94	84	359,90					KECAMATAN ENOK
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*62,48*	*96,28*					
											Predikat kinerja :									*R*	*ST*					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN																							KECAMATAN ENOK
		7.01.	KECAMATAN								560,00			17	56,89	25	83,14	36	117,25	78	257,28					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persen					90	560,00			17	56,89	25	83,14	36	117,25	78	257,28					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.02.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persen					90	560,00			17	56,89	25	83,14	36	117,25	78	257,28					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluarahan Pusaran	Persen					90	262,78								0,00	-	0,00					KECAMATAN ENOK
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluarahan Pusaran	Persen					90	297,22			17	56,89	25	83,14	36	117,25	78	257,28					KECAMATAN ENOK
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*57,71*	*44,17*					
											Predikat kinerja :									*R*	*SR*					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN GAUNG
		7.01.	KECAMATAN								560,00															KECAMATAN GAUNG
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Anaratur Perkantoran	Persen					100	2.772,31										-					KECAMATAN GAUNG
		7.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Persen					100	2.377,86									-						KECAMATAN GAUNG
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	2.377,86	0	35	0	634	0	454	0	5	0	1.938					KECAMATAN GAUNG
		7.01.01.02.06.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen					100	336,35		30		15		17		92	-	155					KECAMATAN GAUNG
		7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					15	9,10	15	9	-	-	-	-	-	-	15	9					KECAMATAN GAUNG
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK Yang Dikeluarkan	Jenis					30	188,27	2	13	-	-	-	-	-	-	2	13					KECAMATAN GAUNG
				Jumlah Meubeler yang disediakan	Jenis					6	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					KECAMATAN GAUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set					1	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					KECAMATAN GAUNG
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					2018	60,00	-	-	168	5	168	5	1.682	50	2.018	60					KECAMATAN GAUNG
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					48	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					KECAMATAN GAUNG
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Jenis					4	3.13	-	-	-	-	4	3	-	-	4	3					KECAMATAN GAUNG
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					55	75,86	6	8	8	10	7	9	30	42	51	70					KECAMATAN GAUNG
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					4	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					KECAMATAN GAUNG
		7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**					**100**	**35,10**		**9**		**6**		**8**		**12**	-	**35**					**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					394	3,31	250	2	-	-	-	-	144	1	394	3					KECAMATAN GAUNG
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					4	10.19	1	1	0	1	1	2	2	5	4	10					KECAMATAN GAUNG
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					12	21,60	3	5	3	5	3	5	3	5	12	22					KECAMATAN GAUNG
		7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persen**					**100**	**23,00**		-		**6**		**5**		**12**	-	**23**					**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipanjangkan Perizinannya	Unit					4	3,00	-	-	4	3	-	-	-	-	4	3					KECAMATAN GAUNG
		7.01.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					7	20,00	-	-	1	3	2	5	4	12	7	20					KECAMATAN GAUNG
				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					KECAMATAN GAUNG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***85,52***	***80,62***					
											Predikat kinerja :									***T***	***T***					
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**178,73**									**0,00**	**0,00**					**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Layanan Pemerintah Umum yang tertangani**	**Persen**					**100**	**145,09**		**12**		**30**		**15**		**63**	**82**	**119**					**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Kuala Lahang	Persen					100	145,09	8	12	20	30	10	15	44	63	82	119					KECAMATAN GAUNG
		7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								**33,65**		**9**		**6**		**6**		**12**	**57**	**34**					**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen/ Perizinan Yang Dikeluarkan	Rekomendasi					57	33,65	15	9	11	6	11	6	21	12	57	34					KECAMATAN GAUNG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***91,01***	***91,01***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**							**42,50**									**0,00**	**0,00**					**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.03.02.01	**Koordinasi Keeiatan Pemberdavaan Desa**	**Iumlah Masvarakat vane dibina**	**Persen**					**100**	**42,50**		**10**		-		**4**		**16**	**2**	**30**					**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.03.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	Jenis					3	42,50	1	10	-	-	0	4	1	16	2	30					KECAMATAN GAUNG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***70,59***	***70,59***					
											Predikat kinerja :									***S***	***S***					
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**100,00**									**0,00**	**0,00**					**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.04.02.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**								**100,00**				-		-		**100**	**1**	**100**					**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							1	100,00	-	-	-	-	-	-	1	100	1	100					KECAMATAN GAUNG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100,00***	***100,00***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**113,98**									**0,00**	**0,00**					**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**	**Persen**					**100**	**113,98**															**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali					3	113,98	0	4	0	4	0	14	2	93	3	114					KECAMATAN GAUNG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100,00***	***100,00***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**							**343,82**									**0,00**	**0,00**					**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik**	**Persen**					**100**	**343,82**		**26**		**2**		**34**		**460**		**523**					**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Desa					3	164,98	-	-	-	-	-	-	6	344	6	344					KECAMATAN GAUNG
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok					3	154,40	0	2	0	2	1	34	2	117	3	154					KECAMATAN GAUNG
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Dokumen					17	24,44	17	24	-	-	-	-	-	-	17	24					KECAMATAN GAUNG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***136,13***	***136,13***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**							-	-															**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.	**KECAMATAN**								**560.00**															**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**Persen**					**100**	**449,08**									**0**	**0**					**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam**	**Persen**					**100**	**449,08**		-		**147**		**83**		**124**	**127**	**354**					**KECAMATAN GAUNG**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kuala Lahang	Persen					100	112,00	-	-	-	-	33	37	-	-	33	37					KECAMATAN GAUNG
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kuala Lahang	Persen					100	337,08	-	-	44	147	14	47	37	124	94	317					KECAMATAN GAUNG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***63,35***	***63,35***					
											Predikat kinerja :									***R***	***R***					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**							-																**KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA**
		7.01.	**KECAMATAN**																							**KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA**
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**								**47**	**151**	**38**	**239**	**40**	**170**	**61**	**170**	**185,52**	**731**					**KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA**
		7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**3.081**	**100**	**533**	**100**	**916**	**100**	**622**	**100**	**617**	**100**	**2.687**					**KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA**
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	3.081	1	533	1	916	1	622	1	617	1	2.687			100	87,21	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**Stell**					**30**	**18**	**48**	**36**		-	**52**	**8**		-	**100**	**44**					**KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA**
		7.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang	Stel					27	18	13	10		-	14	8		-	27	18			100	100,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Jenis**					**29**	**133**	**15**	**17**	**14**	**18**	**18**	**27**	**34**	**36**	**82,08**	**99**					**KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA**
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	knis					29	37	5	5	5	6	10	14	9	12	29	37			100	100,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan /Dinas yang	Jenis					1	4		-		-		-	1	4	1	4			100	100,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					400	13	100	4	70	1	100	4	100	5	370	13			92,5	98,70	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Lembar					36000	7	9.000	0,9	9.000	1,3	9.000	2	9.000	3	36000	7			100	100,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang	Kali					59	70	15	8	15	9	15	7	14	12	59	36			100	51,69	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang	Kali					6	-									0	-					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**96**	**25,01**	**20**	**25,01**	**23**	**25,01**	**23**	**24,98**	**26**	**100**	**92**					**KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA**
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					4	5	1	0,5	1	-	1	-	1	3	4	4			100	81,72	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					1039	18	260	1	260	5	260	4	259	4	1039	15			100	82,05	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Tenaga Kebersihan kantor yang	orang					4	74	1	18	1	18	1	19	1	19	4	74			100	100,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**84**		-	**12,5**	**7**	**4,2**	**1**	**83,33**	**71**	**100,0**	**79**					**KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA**
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					8	24		-	3	7	1	1	4	12	8	20			100	80,65	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Ruang					1	60		-		-		-	1	59	1	59			100	99,71	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
				Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Ruang					4	-							4		4	-			100	#DIV/0!	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Jenis					3	-									0	-			0	#DIV/0!	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***91,08***			***99***	***90***	
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen					100	402	25	35	25	134	25	99	25	77	100	344					KECAMATEN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Pemerintah Umum yang tertangani	Persen					100	402	8,3	35	8,3	134	8,3	99	78,70	77	104	344					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitorina, Evaluasi dan	Kali					20	402	5	35	5	134	5	99	5	77	20	344			100	85,54	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan	Persen					90	-							0		0	-					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan	Persen					90	-							95		95	-					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan	Persen					90	-							95		95						KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.02.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Persen					100	7,02		-		-		-	100	7	100	7			100		KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Persen					100	7,02		-		-		-	100	7	100	7			100	94,52	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*102*	*61,51*			100	90,03	
											Predikat kinerja :									*ST*	*R*					
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen					100	5		-		-	100	5		-	100	5					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen					100	5		-		-	100	5		-	100	5					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.03.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	Jenis					4	5		-		-	4	5		-	4	5			100	100	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*100*			100	100	
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								100		-		-		-	100	98	100	98					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.04.02.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								100		-		-		-	100	98	100	98					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kegiatan					1	100		-		-		-	1	98	1	98			100	98,04	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*98,04*			100	98,04	
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen					100	119,58		-		-		-	50	54	50	54					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.05.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang	Persen					100	119,58		-		-		-	50	54	50	54					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali					2	120		-		-		-	1	54	1	54			50	45,07	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*50,00*	*45,07*			50	45,07	
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen					100	174	33	6		-	33	49	33	53	99	107					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.06.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen					100	174	33,3	6		-	33,3	49	33,3	53	100	107					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan	Desa					2	128		-		-	1	31	1	51	2	82			100	64,03	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Funasi, dan Kewaiiban Lembaga	Jumlah Organisasi, kelembaaan dan masyarakat yang	Kelompok					4	34		-		-	2	17	2	2	4	19			100	57,09	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada	Dokumen					12	11,60	12	6		-		-		-	12	6			100	47,41	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*56,18*			100	56,18	
											Predikat kinerja :									*ST*	*R*					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.	KECAMATAN								565															KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen					100	565		-	16,67	40	22,22	45	61,11	454	100	539					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.03.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen					100	565		-	16,67	40	22,22	45	61,11	454	100	539					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Empat	Persen					90	337		-		-	10	5	80	327	90	332			100	98,71	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Empat	Persen					90	228		-	30	40	30	40	30	127	90	206			100	90,28	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*94,49*			100	94,49	
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.	KECAMATAN								560															KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen					100	560		-	16,67	62	16,67	66	66,667	412	100	541					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.03.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen					100	560		-	16,67	62	16,67	66	66,667	412	100	541					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Teluk Pinang	Persen					90	246,56		-		-		-	90	242	90	242			100	98,11	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Teluk Pinang	Persen					90	313,44		-	30	62	30	66	30	170	90	299			100	95,27	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*96,69*			100	96,69	
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.	KECAMATAN								560,00															KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen					100	560,00		-	16,67	23	16,67	23	66,667	493	100	539					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.03.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen					100	560,00		-	16,67	23	16,67	23	66,667	493	100	539					KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Harapan	Persen					90	402,84		-		-		-	90	398	90	398			100	98,89	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tanjung Harapan	Persen					90	157,16		-	30	23	30	23	30	94	90	141			100	89,69	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*94,29*			100	94,29	
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATEN KATEMAN
		7.01.	KECAMATAN								560,00															KECAMATEN KATEMAN
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA								2.878,46	18	439	26	817	19	646	30	651	93,47854504	2553					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Persen					100	2.535,60	25	386	25	704	25	572	25	551	100	2212					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Gaji ASN	Tahun					1	2.535,60	1	386	1	704	1	572	1	551	1	2212					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen					100	263,74	9	34	36	89	15	49	40	90	100	263					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					17	82,77	1	3	6	29	0		10	50	17	82					KECAMATAN KATEMAN
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set					1	-									0	0					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					17103	18,42	743	1	6591	7	3063	3	6613	7	17010	18					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					44	162,55	8	30	14	53	12	46	9	33	44	162					KECAMATAN KATEMAN
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					9	-									0	0					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen					100	79,12	21	19	18	24	17	25	26	9	81	78					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					736	4,40	90	1	204	2		0	200	2	494	4					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					3	14,62	3	2	3	3	3	7	3	2	3	14					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					7	60,10	7	16	7	20	7	18	7	5	7	59					KECAMATAN KATEMAN
				Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					12	-									0	0					KECAMATAN KATEMAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*94,93*	*97,91*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan							414,39	9	55	29	187	49	163	3	9	90	413					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Pemerintah Umum yang tertangani	Persen					100	305,69	9,2	55	29	187	49	163	3	9	90	413					KECAMATAN KATEMAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Amal Bhakti	Persen					94	305,69	12	46	44	174	19	78	1	6	76	304					KECAMATAN KATEMAN
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Bandar Sri Gemilang	Persen					94	-									0	0					KECAMATAN KATEMAN
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Taga Raja	Persen					94	-									0	0					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.02.02.02.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								108,70									0	0					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Rekomendasi					18	108,70	1	8	2	13	14	84	1	3	18	109					KECAMATAN KATEMAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***90,21***	***100***					
											Predikat kinerja :									***T***	***ST***					
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**					**100**	**100,00**							**100**	**100**	**100**	**100**					**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.04.02.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Masyarakat yang dibina**	**Persen**					**100**	**100,00**							**100**	**100**	100	100					**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang dibina	kelompok					9	100,00							9	100	9	100					KECAMATAN KATEMAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***100***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**							**116,02**					**50**	**61**	**50**	**55**	**100**	**116**					**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**	**Persen**					**100**	**116,02**					**50**	**61**	**50**	**55**	100	116					**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali					1	116,02					1	61	1	55	1	116					KECAMATAN KATEMAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***100***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**							**203,58**	**4**	**3**	**10**	**16**	**31**	**75**	**56**	**110**	**102**	**204**					**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik**	**Persen**					**100**	**203,58**	**4**	**3**	**10**	**16**	**31**	**75**	**56**	**110**	102	204					**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Desa					1	135,47					0	44	1	91	1	135					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok					9	50,37	1	3	3	16	6	31	0	1	9	50					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Dokumen					1	17,74							1	18	1	18					KECAMATAN KATEMAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***100***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-															**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.	**KECAMATAN**								**560,00**															**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembanunan dikecamatan**							**560,00**									**0**	**0**					**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembanunan di keluruhan**	**Persen**					**100**	**433.100,00**					**98**	**432**			**98**	**432**					**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluruhan Bandar Sri Gemilang	Persen					93	204,71					90	203			90	203					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Keluruhan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Bandar Sri Gemilang	Persen					95	228,39					95	228			95	228					KECAMATAN KATEMAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***98,39***	***100***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-															**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.	**KECAMATAN**								**560,00**															**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**							**560,00**					**96**	**522**			**96**	**522**					**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di keluruhan**	**Persen**					**100**	**560,00**					**96**	**522**			96	522					**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluruhan Taga Raja	Persen					92	144,02					80	106			80	106					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Keluruhan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Taga Raja	Persen					96	415,98					100	416			100	416					KECAMATAN KATEMAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***95,56***	***86,90***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***T***					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-															**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.	**KECAMATAN**								**560,00**															**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**							**560,00**					**100**	**476**			**100**	**476**					**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembanunan di keluruhan**	**Persen**					**100**	**560,00**					**100**	**476**			100	476					**KECAMATAN KATEMAN**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluruhan Amal Bhakti	Persen					93	276,95					90	242			90	242					KECAMATAN KATEMAN
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Keluruhan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Amal Bhakti	Persen					96	234,30					100	234			100	234					KECAMATAN KATEMAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***93,61***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-															**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.	**KECAMATAN**								**560,00**															**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**3.122,56**	**17,50**	**503**	**17,33**	**828**	**17,33**	**583**	**17,33**	**651**	**69,5**	**2565,047**					**KECAMATAN KEMPAS**
				Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen					80	-									0	0					KECAMATAN KEMPAS
				Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai					19	-									0	0					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan**	**Orang**					**19**	**2.834,35**	**25**	**456**	**25**	**757**	**25**	**534**	**25**	**567**	**100**	**2.314**					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Orang					19	2.834,35	19	456	19	757	19	534	19	567	19	2.314					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan**	**Stel**					**18**	**14,96**	-	-	-	-	-	-	-	14,96	18	14,96					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Stel					18	14,96	-	-	-	-	-	-	-	14,96	18	14,96					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan**	**Jenis**					**30**	**166,44**	**20**	**31**	**19**	**54**	**19**	**36**	**19**	**45**	**78**	166,047					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Jenis					30	27,54	30	13	30	8	30	5	30	2	30	27					KECAMATAN KEMPAS
				Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	unit					1	-									-	-					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak	Liter					1586	51,94	1586	4	1586	12	1586	11	1586	26	1586	52					KECAMATAN KEMPAS
				Jumlah kegiatan yang disediakan makanan dan minuman	Kegiatan					3	-									0	0					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak / digandakan	Lembar					9600	3,00	9600	0,5	9600	1	9600	-	9600	1,5	9600	3					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					4	1,20	4	0,3	4	0,2	4	0,6	4	0,1	4	1,2					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas ke Pekanbaru/ kota lainnya di luar Kabunaten	Kali					4	82,76	4									0					KECAMATAN KEMPAS
				Jumlah perjalanan dinas ke tembilahan/daerah lainnya di dalam kabupaten	Kali					66	-	66	13	66	33	66	20	66	16	66	82					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan**	**Unit**					**1**	-									0	0					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kenderaan dinas yang terbeli	Unit					1	-									0	0					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan**	**Orang**					**4**	**76,80**	**25**	**16**	**25**	**17**	**25**	**13**	**25**	**29**	**100**	**75**					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terlayani	Lembar					685	3,60	685	1	685	1	685		685	2	685	4					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	jenis					3	14,40	3	3	3	2	3	1	3	7	3	13					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa penggunaan gedung x bulan	Bulan					12	58,80	12	12	12	14	12	12	12	21	12	59					KECAMATAN KEMPAS
				Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran yang terbayarkan x bulan	Orang					3	-									0	0					KECAMATAN KEMPAS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara**	**Unit**					**23**	**30,00**	**23**	-	**23**	-	**23**	-	**23**	**10**	92	10					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan disewa/sarana Perizinannya	Unit					1	30,00									0	0					KECAMATAN KEMPAS
				Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Unit					23	-	23	-	23	-	23	-	23	10	23	10					KECAMATAN KEMPAS
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***76,65***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***T***					
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**235,79**	**100**	**30**	**100**	**20**	**100**	**54**	**100**	**54**	**400**	**158**					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persen**					**90**	**181,39**	**90**	**30**	**90**	**20**	**90**	**54**	**90**	**50**	**90**	**154**					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Keluruhan Harapan Tani	Kegiatan					90	181,39	90	30	90	20	90	54	90	50	90	153					KECAMATAN KEMPAS
				Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Keluruhan Kemoas Jaya	Kegiatan					90	-									0	0					KECAMATAN KEMPAS
				Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Kali					1	-									0	0					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**Jenis**					**1**	**54,40**	-	-	-	-	-	-	**60**	**54**	**60**	54					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen / Berkas yang dikeluarkan oleh kecamatan	dokumen					60	54,40	-	-	-	-	-	-	60	54	60	54					**KECAMATAN KEMPAS**
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***90,00***	***94,77***					
											Predikat kinerja :									***T***	***ST***					
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**					**100**	**34,53**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**					**KECAMATAN KEMPAS**
				Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen					100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/keluruhan yang dilaksanakan**	**Kegiatan**					**1**	**34,53**	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.03.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Olahraga yang terakomodir seperti Kegiatan Bupati Cup	Kegiatan					1	34,53	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0					KECAMATAN KEMPAS
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***0***	***0***					
											Predikat kinerja :									***SR***	***SR***					
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**100,00**	-	-	-	-	-	-	-	**100**	-	**100**					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.04.02.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**								**100,00**	-	-	-	-	-	-	-	**100**	-	**100**					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								100,00	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100					KECAMATAN KEMPAS
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***0***	***0***					
											Predikat kinerja :									***SR***	***SR***					
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum vang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**59,83**	-	-	-	-	-	-	**100**	55	**100**	**55**					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan**	**Kegiatan**					**3**	**59,83**	-	-	-	-	-	-	**3**	55	3	55					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional. dan Nasional	Jumlah peserta MTQ yang mewakili kecamatan (orang) serta jumlah Lembaga Adat yang berpartisipasi pada kegiatan Grebeg Suro	Orang					3	59,83	-	-	-	-	-	-	3	55	3	55					KECAMATAN KEMPAS
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***92,65***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**					**100**	**170,20**	**100**	**10**	**100**	-	**100**	**25**	**100**	**134**	**100**	**169**					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina**	**Kelompok**					**2**	**170,20**	**2**	**10**	-	-	2	**25**	**2**	**134**	2	**169**					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Desa					4	125,00	-	-	-	-	-	-	4	124	4	124					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Organisasi yang kegiatan nya terakomodir diantaranya kegiatan PKK, Bansos Rastra, serta kegiatan Hari Kemerdekaan	Kegiatan					2	35,20	-	-	-	-	1	25	1	10	2	35					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Usulan / rekomendasi Perencanaan Pembangunan yang diusulkan oleh Desa dan Kelurahan	Kegiatan					800	10,00	800	10	-	-	-	-	-	-	800	10					KECAMATAN KEMPAS
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***100***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-															**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.	**KECAMATAN**								**560,00**	-	-													**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**					**100**	**560,00**	-	-	**100**	**119**	**100**	**16**	**100**	**371**	**100**	**506**					**KECAMATAN KEMPAS**
				Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen					100	-	-	-							0	0					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Kempas Jaya**	**Persen**					**90**	**560,00**	-	-	**90**	**119**	**90**	**16**	**90**	**371**	**90**	**506**					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluruhan Kempas Jaya	Persen					90	44,40	-	-	-	-	-	-	90	44	90	44					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Keluruhan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Kemoas Jaya	Persen					90	515,60	-	-	90	119	90	16	90	327	90	462					KECAMATAN KEMPAS
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***90,00***	***85,14***					
											Predikat kinerja :									***T***	***T***					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-									**0**	**0**					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.	**KECAMATAN**								**560,00**									-	-					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**					**100**	**560,00**	-	-	**100**	**75**	**100**	**60**	**100**	**292**	300	427					**KECAMATAN KEMPAS**
				Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen					100	-	-	-							-	-					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Kempas Jaya**	**Persen**					**90**	**560,00**	-	-	**90**	**75**	**90**	**60**	**90**	**292**	**90**	427					**KECAMATAN KEMPAS**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluruhan Harapan Tani	Persen					90	155,60	-	-	-	-	-	-	90	121	90	121					KECAMATAN KEMPAS
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Keluruhan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Harapan Tani	Persen					90	404,40	-	-	90	75	90	60	90	172	90	307					KECAMATAN KEMPAS
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***90,00***	***69,01***					
											Predikat kinerja :									***T***	***S***					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-															**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.	**KECAMATAN**								**560,00**															**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**2.754,94**	**33**	**638**	**30**	**686**	**21**	**632**	**23**	**690**	**107**	**2646**					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan**							**2.409,57**	**25**	**602**	**25**	**602**	**25**	**602**	**25**	**602**	100	2410					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunianaan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	2.409,57	1	602	1	602	1	602	1	602	1	2410					KECAMATAN KEMUNING
		7.01.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**12.00**	**25**	**3**	**25**	**4**	**25**	**3**	**25**	**2**	100	12					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas keamanan yang dibayarkan	Orang					1	12.00	1	3		4		3		2	1	12					KECAMATAN KEMUNING
		7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**							**141,87**	**22**	**17,7**	**28**	**54,5**	**17**	**6,8**	**34**	**62,9**	100	142					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hilnlah ATK yang disediakan	Jenis					25	22,18	5	5,2	8	17		0	12	0	8	22					KECAMATAN KEMUNING
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set					2	-									0	0					KECAMATAN KEMUNING
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Loistik Kantor	Jumlah loistik vane disediakan	Liter					728	17.18	100	1.70	264	6.49	100	1.49	264	7.50	182	17					KECAMATAN KEMUNING
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					233	-	58	0	59	0	58	0	58	0	58	0					KECAMATAN KEMUNING
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					9845	6,98	2461	3	2462	2	2461	0	2461	1	9845	7					KECAMATAN KEMUNING
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					28	95,53	6	8	6	29	4	5	12	54	28	96					KECAMATAN KEMUNING
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					4	-	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0					KECAMATAN KEMUNING
		7.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**							**108,90**									0	0					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	Unit					1	108,90									0	0					KECAMATAN KEMUNING
		7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**71,59**	**61**	**15**	**22**	**22**	**12**	**19**	**5**	**16**	100	72					**KECAMATAN KEMUNING**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					297	5,85	69	1	74	1	74	2	80	2	297	6					KECAMATAN KEMUNING
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					3	7,60	3	2		1		5		0	3	8					KECAMATAN KEMUNING
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah netuaan Keamanan yang dibayarkan	Orang					1	58,14	1	13		19		13		14	1	58					KECAMATAN KEMUNING
				Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					3	-	1	0	1	0	1	0		0	3	0					KECAMATAN KEMUNING
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					2	-	1	0	1	0		0		0	2	0					KECAMATAN KEMUNING
		7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**11,00**			**50**	**3**	**25**	**1**	**25**	**7**	100	11					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dioeoanians Perizinannva	Unit					4	11,00	0	2	3	1	1	1	7	4	11					KECAMATAN KEMUNING
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					2	-									0	0					KECAMATAN KEMUNING
		7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Ruang					1	-									0	0					KECAMATAN KEMUNING
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***84,52***	***71,43***					
											Predikat kinerja :									***T***	***S***					
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**258,99**		**26**		**40**		**43**		**28**	**100**	**136,05**					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Layanan Pemerintah Umum yang tertangani**							**136,05**		**26**		**40**	**100**	**43**		**28**	100	136,05					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Selensen	Persen					100	136,05		26		40	100	43		28	100	136					KECAMATAN KEMUNING
		7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								**122,94**		**19**		**18**	**50**	**87**	**50**	**0**	100	123					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Rekomendasi					2	122,94		19		18	1	87	1	0	2	123					KECAMATAN KEMUNING
											-									0	0					**KECAMATAN KEMUNING**
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100,00***	***100,00***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**					**95**	**100,00**				**100**	**100**				**100**	**100**					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.04.02.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Masyarakat yang dibina							100,00				100	100				100	100					KECAMATAN KEMUNING
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persen					95	100,00				95	100				100	95					KECAMATAN KEMUNING
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100,00***	***90,25***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***T***					
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**100,76**									**0**	**0**					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah**	**Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**							**100,76**									0	0					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	kali					1	100,76									0	0					KECAMATAN KEMUNING
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***0,00***	***0,00***					
											Predikat kinerja :									***SR***	***SR***					
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**					**100**	**246,88**						**246,88**			**0**	**246,88**					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik**							**246,88**					**75**	**247**	**38**	**0**	113	247					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.06.02.01.06	**Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**	**Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa**	**Desa**					**5**	**191,29**		**0**		**0**	**5**	**191**		**0**	5	191					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok					6	37,93		0		0	3	38	3	0	6	38					KECAMATAN KEMUNING
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Dokumen					1	17,66		0		0		18	1	0	1	18					KECAMATAN KEMUNING
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100,00***	***100,00***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**																							**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.	**KECAMATAN**								**560,00**															**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**Persen**					**100**	**560,00**		**140**		**140**		**140**		**140**	**0**	**560**					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan**							**560,00**		**140**		**140**		**140**		**140**	0	560					**KECAMATAN KEMUNING**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Selensen	Persen					100	211,96		53	0	53	0	53	0	53	0	212					KECAMATAN KEMUNING
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Selensen	Persen					100	348,04		87	0	87	0	87	0	87	0	348					KECAMATAN KEMUNING
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***0,00***	***100,00***					
											Predikat kinerja :									***SR***	***ST***					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-															**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.	**KECAMATAN KERITANG**								3.532,89															**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**	**100**	**3475,25**			**100**	**2.957,79**	**17**	**477**	**43**	**844**	**66**	**714**	**99**	**2676**	**90.49**	**2676**					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.01.02.02	**Administrasi Keuannan Perangkat Daerah**	**Cakupan ketersediaan Gaji dan Tunianean ASN**	**Orang**	**27**	**3108.76**			**26**	**2.668,22**	**100**	**446**	**100**	780	**100**	606	**100**	571	100	2404					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji ASN	Tahun	1	3108,76			1	2.668,22	1	446	1	780	1	606	1	571	1	2404					KECAMATAN KERITANG
		7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran Di Kantor Camat Keritang dan Kelurahan Kotabaru Reteb**	**Persen**	**100**	**162,37**			**100**	**155,60**	**6**	**19**	**29**	**45**	**34**	**72**	**31**	**143**	**100**	**143**					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis	2	2.59			2	2.10			2	2	2	1			2	2					KECAMATAN KERITANG
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan ATK, Pengadaan Peralatan dan	Jenis	8	50,00			6	41,47		1	3	3	3	5		32	6	41					KECAMATAN KERITANG
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter		14,74			100	10,60	0	1	0	2	30	1	78	6	100	10					KECAMATAN KERITANG
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					240	-		0													KECAMATAN KERITANG
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	Lembar		3,00			6422	4,38	1000	1	2000	0	2000	1	1422	3	6422	4					KECAMATAN KERITANG
		7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemolar	12	1,32			24	1,68		0	4	1	5	1	15	0	24	2					KECAMATAN KERITANG
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	Kali	116	90,73			151	95,37	29	15	37	22	37	20	45	27	148	83					KECAMATAN KERITANG
		7.01.01.02.07	**Penuadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	-							**77,68**		**0**		**0**		**0**		**100**	**77**	**100**					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Ruang					3	77,68	0	0	0	0	0	0	3	77	3	77					KECAMATAN KERITANG
		7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Anaratur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**56,30**	**17**	**12**	**30**	**20**	**30**	**36**	**23**	**53**	**100**	**53**					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyuratmenyurat vang terlavani	Persen	100	3,30			100	1,80	0	0	40	1	40	1	20	1	100	2					KECAMATAN KERITANG
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	jenis	2	17,16			2	14,50	2	3	2	2	2	4	2	6	2	14					KECAMATAN KERITANG
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	orang	8	76,56			6	40,00	6	9	6	6	6	12	6	11	6	38					KECAMATAN KERITANG
		7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemeliharaan/Rehab Kantor dan Rumah Dinas**	**Kegiatan**					**2**	-		**0**		**0**		**0**		**0**							**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit	1	50,00			15	-	0	0	0	0	0	0	0								KECAMATAN KERITANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***96,12***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**111,14**		**9**		**14**		**62**		**101**	**91**	**101**					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Persen**	**100**	**11,55**			**100**	**82,58**	**2**	2	**1**	2	**46**	**40**	**40**	**73**	**88**	**73**					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PersentaCakupan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatanse pelaksanaan operasional Kantor	Persen	100	11,55			100	82,58	2	2	1	1	46	38	40	33	88	73					KECAMATAN KERITANG
		7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**28,56**		**7**		**11**		**22**	**100**	**29**	**99.91**	**29**					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkanperijinan dan Non Perizinan yang	Rekomendasi					748	28,56		7		5		10	748	7	748	29					KECAMATAN KERITANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***94,06***	***94,02***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan**	**Persen**					**100**	**9,70**		**0**		**0**		**0**	**100**	**10**	**100**	**10**					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Pembinaan dan Pelaksanaan Olahraga yang**	**Persen**					**100**	**9,70**		**0**		**0**		**0**	**100**	**10**	100	10					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.03.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	Jenis					1	9,70		0		0		0	1	10	1	10					KECAMATAN KERITANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***100***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**	**Cakupan Penyelenggaraaan Ketentraman dan**	**Persen**					**100**	**100,00**		**0**		**0**		**0**	**100**	**78**	**100**	**78**					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.04.02.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah**	**Persen**					**100**	**100,00**		**0**		**0**		**0**	**100**	**78**	100	78					**KECAMATAN KERITANG**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksana Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah	jenis					3	100,00		0		0		0	3	78	3	78					KECAMATAN KERITANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*78,05*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**65,46**		**0**		**0**		**0**	**100**	**57**	**87**	**57**					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Seni dan Budaya yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**51,92**			**100**	**65,46**		**0**		**0**		**0**	**100**	**57**	100	57					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakanpelaksanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	kegiata	1	51,92			1	65,46		0		0		0	1	57	1	57					KECAMATAN KERITANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*87,35*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib**	**Persen**					**100**	**288,80**		**5**		**5**		**34**		**282**	**98**	**282**					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan penyelolaan Pemerintahan Desa/Kelurahan secara**	**Persen**					**100**	**288,80**		**5**		**5**		**34**	**100**	**282**	**100**	**282**					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan	Desa					5	269,72		0				30	5	236	5	266					KECAMATAN KERITANG
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Funasi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Organisasi, kelembaaan dan masyarakat yang	Kegiatan	2	46,42			1	11,45		0		0		0	1	11	1	11					KECAMATAN KERITANG
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan nada	Dokumen	17	9			17	7,63		1		1		1	17	1	17	5					KECAMATAN KERITANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*87,73*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	**0**	**0**					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.	**KECAMATAN**								**560,00**									0	0					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluruhan**	**Persen**					**100**	**560,01**		**0**		64		**161**	**100**	**502**	**100**	**502**					**KECAMATAN KERITANG**
		7.01.03.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Keluruhan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Kotaboru Reteh	Persen					100	560,01		0		64		161	100	502	100	502					KECAMATAN KERITANG
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluruhan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluruhan Kotaboru Reteh	Persen					90	167,64		0				0	90	164	90	164					KECAMATAN KERITANG
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Keluruhan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Kotaboru Reteh	Persen					100	392,38				64		96	100	178	100	338					KECAMATAN KERITANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*91,95*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-																
		7.01.	**KECAMATAN**	**121.092.617**							**560**																
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**Persen**					**80**	**2.393**	**18**	**420**	**25**	**579**	**17**	**418**	**20**	**431**	**80**	**1.846**					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan**	**orang**					**17**	**2.156**	**100**	**383**	**100**	**548**	**100**	**383**	**100**	**383**	**100**	**1.697**					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang					17	2.156	17	383	17	548	17	383	17	383	17	1.697					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pakaian Korpri yang disediakan**	**orang**					**20**	**8**	-	-	-	-	-	-	**100**	**6**	**100**	**6**					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang	Stel					20	8	-	-	-	-	-	-	20	6	20	6					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persen**					**100**	**137**	**19**	**27**	**17**	**22**	**18**	**25**	**18**	**30**	**72**	**105**					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					3	3	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					23	8	23	4	23	2	23	2	23	1	23	9					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					2459	22	200	3	290	3	270	2	285	3	1.145	11					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Lembar					3518	3	450	1	450	1	450	1	450	1	1.800	4					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemolar					360	2	40	0	40	0	40	0	48	0	168	1					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang	Kali					58	99	10	19	15	16	15	18	10	25	50	78					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kebar daerah yang	Kali					3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**oersen**					**100**	**43**	**18**	**9**	**18**	**8**	**18**	**9**	**18**	**11**	**73**	**38**					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					600	1	28	0	28	0	28	0	31	0	115	1					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					2	3	2	1	2	-	2	-	2	1	2	2					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					12	39	12	8	12	8	12	9	12	10	12	35					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Jumlah Gedung yang akan di desian**	**gedung**					**1**	**50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi	Buang					1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*86,21*	*79,98*					
											Predikat kinerja :									*T*	*T*					
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**136**	**100**	**25**	**100**	**15**	**100**	**16**	**100**	**46**	**100**	**102**					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat**	**Cakupan kegiatan pemerintahan di kecamatan**	**kegiatan**					**1**	**95**		15		15		16		16	-	62					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.02.02.01.02	Peninukatan Efektifitas Kestatan Pemerintahan di Tinukat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitorine. Evaluasi dan	Kali					12	95	3	15	3	15	3	16	3	16	12	62					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Keluruhan	Persen					100	-									-	-					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Rekomendasi**					**200**	**40**	**25**	**10**	**25**	-	**25**	-	**25**	**30**	**100**	**40**					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Rekomendasi					200	40	50	10	50	-	50	-	50	30	200	40					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*82,00*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**	**Cakupan ketersediaan peralatan dan penaneanan**	**Persen**					**100**	**100**	-	-	-	-	**100**	**45**	-	-	**100**	**45**					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.04.02.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan**	**kegiatan**					**2**	**100**	-	-	-	-	**100**	**45**	-	-	**100**	**45**					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan					2	100	-	-	-	-	2	45	-	-	2	45					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*45,00*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*SR*					
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persen**					**100**	**42**	-	-	-	-	**100**	**41**	-	-	**100**	**41**					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**kegiatan**					**1**	**42**	-	-	-	-	**100**	**41**	-	-	**100**	**41**					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali					1	42	-	-	-	-	1	41	-	-	1	41					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*96,58*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN**								**254**									-	-					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persen**					**100**	**249**	**42**	**10**	**8**	**8**	**42**	**154**	**8**	**7**	**100**	**179**					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan	Desa					5	188	-	-	-	-	5	130	-	-	5	130					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Organisasi, kelembaaan dan masyarakat yang	Kelompok					4	54	1	4	1	8	1	24	1	7	4	43					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan nada	Dokumen					8	-	8	6	-	-	-	-	-	-	8	6					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*80,06*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-																
		7.01.	**KECAMATAN**								**560**																
		7.01.03.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan**	**Persen**					**100**	**560**	**17**	**48**	**22**	**60**	**21**	**59**	**28**	**68**	**88**	**235**					**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**
		7.01.03.02.02.0	Kegiatan Pemberdayaan Keluruhan	Jumlah kegiatankemasyarakatandesa/keluruhan	kegiatan					1	560	17	48	22	60	21	59	28	68	88	235					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluruhan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keluruhan Sanat	Persen					100	226									-	-					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Keluruhan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keluruhan Sanat	Persen					100	334	17	48	22	60	21	59	28	68	88	235					KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*88,00*	*70,36*					
											Predikat kinerja :									*T*	*S*					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-															**KECAMATAN MANDAH**	
		7.01.	**KECAMATAN**								**560,00**	**17,63**	**499,98**	**16,25**	**1475,86**	**17,14**	**913,96**	**37,66**	**1107,42**	**88,68**	**3997,22**					**KECAMATAN MANDAH**	
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Anaratur Perkantoran**							**2.546,50**	**17,63**	**500**	**16,25**	**1.476**	**17,14**	**914**	**37,66**	**1.107**	**88,67900997**	**3997,22**					**KECAMATAN MANDAH**	
		7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan**							**2.329,43**	**25,00**	**222**	**25,00**	**702**	**25,00**	**428**	**25,00**	**480**	100,00	1831,78					**KECAMATAN MANDAH**	
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SEMUA GAJI ASN	TAHUN					1	2257,23	1	222	1	702	1	428	1	480	1	1832					KECAMATAN MANDAH	
		7.01.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**14,40**	**25**	**4**	**25**	**4**	**25**	**4**	**25**	**4**	100	14					**KECAMATAN MANDAH**	
		7.01.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					2	14,4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	14					KECAMATAN MANDAH	
		7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**							**176,97**	**2**	**21**	**5**	**27**	**13**	**22**	**13**	**58**	32	128					**KECAMATAN MANDAH**	
		7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					100	-															KECAMATAN MANDAH	
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					22	8,45	22	3	22	2	22	2	22	2	22	8					KECAMATAN MANDAH	
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set					4	-															KECAMATAN MANDAH	
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					1831	12,50	100	2	100	1	-		500	3	700	6					KECAMATAN MANDAH	
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					15	6,40	-		-		15	6	-		15	6					KECAMATAN MANDAH	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					5164	1,91	-		34	1	30	1	37	1	101	2					KECAMATAN MANDAH
		7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					24	2,40	24	1	24	1	24	0	24	1	24	2					KECAMATAN MANDAH
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					72	99,45	72	15	72	21	72	13	72	47	72	96					KECAMATAN MANDAH
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					4	14,86	-		1	2	-		3	5	4	7					KECAMATAN MANDAH
		7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**							**20,70**	**19**	**4**	**10**	**5**	**6**	**4**	**26**	**7**	60	20					KECAMATAN MANDAH
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					480	1,50	-		60	1	-		40	1	100	2					KECAMATAN MANDAH
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					24	4,80	9	1		0		0	12	3	21	4					KECAMATAN MANDAH
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					11	14,40	2	4	2	4	2	4	2	4	8	14					KECAMATAN MANDAH
		7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5,00**							**100**	**5**	100	5					KECAMATAN MANDAH
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					5	5,00	-		-		-		5	5	5	5					KECAMATAN MANDAH
		7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Ruang					100	-									0	0					KECAMATAN MANDAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*78,56*	*88,45*					
											Predikat kinerja :									*T*	*T*					
		7.01.02.0	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**							**139,64**	**1,00**	**3,60**	**1,00**	**18,80**	**1,00**	**24,40**	**1,00**	**24,74**	**4**	**71,54**					KECAMATAN MANDAH
		7.01.02.02.01.0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Pemerintah Umum yang tertangani							80,14	**1,00**	**3,60**	**1,00**	**18,80**	**1,00**	**24,40**	**1,00**	**24,74**	4	71,54					KECAMATAN MANDAH
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah desa /kelurahan yang di monitoring evaluasi	Kelurahan					1	80,14	1,00	3,60	1,00	18,80	1,00	24,40	1,00	24,74	1	71,54					KECAMATAN MANDAH
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Khairiah Mandah	Persen					90	-									0	0					KECAMATAN MANDAH
		7.01.02.02.02.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								59,50									0	0					KECAMATAN MANDAH
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Rekomendasi					349	59,50	80,00	11,40	50,00	13,05	30,00	13,50	80,00	21,55	240	59,50					KECAMATAN MANDAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*84,38*	*94,63*					
											Predikat kinerja :									*T*	*ST*					
		7.01.03.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**-**									**0**	**0**					KECAMATAN MANDAH
		7.01.03.02.01.0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								560,00	-		-							0					KECAMATAN MANDAH
		7.01.03.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	Jenis					2	-										0					KECAMATAN MANDAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*0,00*	*0,00*					
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					
		7.01.04.0	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**							**100,00**							100,00	100	**100**	**100**					KECAMATAN MANDAH
		7.01.04.02.03.0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Masyarakat yang dibina							100,00	-		-		-		100,00	100	100	100					KECAMATAN MANDAH
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							100,00									0	0					KECAMATAN MANDAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*0,00*	*100,00*					
											Predikat kinerja :									*SR*	*ST*					
		7.01.05.0	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**							**119,40**			**33,33**	**12,00**	**33,33**	**35,70**	**33,33**	**68,70**	**100**	**116,4**					KECAMATAN MANDAH
		7.01.05.02.01.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan							119,40			33,33	12,00	33,33	35,70	33,33	68,70	100	116,4					KECAMATAN MANDAH
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelakanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali					3	119,40	-		1,00	12,00	1,00	35,70	1,00	68,70	3	116,4					KECAMATAN MANDAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100,00*	*97,49*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.01.06.0	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**							**271,11**	**13,7254902**	**3,4**	**13,7254902**	**3,16**		**0**	**70,5882353**	**261,71**	**98,03921569**	**268,27**					
		7.01.06.02.01.0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik							271,11	13,73	3,4	13,73	3,16		0	70,59	261,71	98,03921569	268,27					
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Desa					7	225,00	-		-		-		7,00	225	7	225					KECAMATAN MANDAH
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok					4	36,21	-		-		-		4,00	36,21	4	36,21					KECAMATAN MANDAH
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Dokumen					17	9,90	7,00	3,40	7,00	3,16	-		2,00	0,50	16	7,06					KECAMATAN MANDAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*98,04*	*90,44*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								**-**															
		7.01.	**KECAMATAN**								**560,00**															
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**							**560,00**			**10,90274749**	**60**	**19,53954063**	**107,53**	**46,89028**	**263,5**	**77,33256814**	**431,03**					
		7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan**							**560,00**			**10,90**	**60**	**19,54**	**107,53**	**46,89**	**263,50**	77,33256814	431,03					
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Khairiah Mandah	Persen					90	284,84	-		-		-		56,34	160,47	56,33689089	160,47					KECAMATAN MANDAH
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Khairiah Mandah	Persen					90	275,16	-		21,81	60,00	39,08	107,53	37,44	103,03	98,32824538	270,56					KECAMATAN MANDAH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*77,33*	*69,60*					
											Predikat kinerja :									*T*	*S*					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								**-**															KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.	**KECAMATAN**								**560.00**															KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**Persen**					**80**	**2.730,64**	**59,55**	**473**	**58,76**	**818**	**51,17**	**554**	**56,50**	**597**	**225,99**	**2441,226081**					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan**	**Persen**					**100**	**2.488,99**	**100**	**456**	**100**	**789**	**100**	**547**	**100**	**562,6**	100	2355					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	2.488.99	1	456	1	789	1	547	1	562.6	1	2355					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Orang**					**1**	**6.00**	**100**	**1.5**	**100**	**1.5**	**100**	**1.5**			100	4.5					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Orang					1	6,00	1	1,5	1	1,5	1	1,5			1	4,5					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pakaian Korpri yang disediakan**	**orang**					**20**	**-**									0	0					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang	Stel					27	-									0	0					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat**	**persen**					**100**	**195,20**	**18,78**	**13,0**	**18,38**	**24,4**	**0,96**	**3,8**	**29,23**	**31,6**	**67,35**	**72,73**					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					23	52,88	23	1,9	23	1,8			23	3,0	23	6,64					KECAMATAN PELANGIRAN
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Set					3	-									0	0					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					3099	9.99	312	1.65	312	1.65			1266	6.70	1890	10.0					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					7987	2.61	1.815	0.6	1.177	0.38			1.672	0.55	4664	1.5					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang	Kali					78	129,72	7	8,82	12	20,55	3	3,78	17	21,42	39	54,57					KECAMATAN PELANGIRAN
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang	Kali					7	-									0	0					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat**	**persen**					**100**	**31,56**	**19,4**	**2,7**	**16,7**	**2,5**	**3,7**	**1,5**	**40,3**	**2,6**	**80,1**	**9,31**					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	lembar					910	2.40	228	0.6	152	0.4			531	1.4	910	2.40					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	jenis					3	9.96	2	0.6	2	0.6			2	1,21	2	2,41					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					3	19.20	1	1.5	1	1.5	1	1.5			1	4.5					KECAMATAN PELANGIRAN
				Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					10	-									0	0					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**persen**					**100**	**8,90**									0	0					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					2	1,25									0	0					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Kegiatan					10	7.65									0	0					KECAMATAN PELANGIRAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*83,50*	*68,02*					
											Predikat kinerja :									*T*	*S*					
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**91,26**	**36**	**23**	**25**	**16**				**20**	**61**	**59**					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat**	**Cakupan kegiatan pemerintahan di kecamatan**	**kegiatan**					**1**	**77,31**	**18**	**16**	**12**	**10**			**24**	**20**	54	46					KECAMATAN PELANGIRAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan	Persen					90	77.31	18	16	12	10			24	20	54	46					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**Rekomendasi**					**100**	**13,94**	**54**	**7**	**38**	**5**					92	13					**KECAMATAN PELANGIRAN**
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Rekomendasi					100	13,94	54	7	38	5					92	13					KECAMATAN PELANGIRAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*76,05*	*76,05*					
											Predikat kinerja :									*T*	*T*					
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif**	**Persen**					**100**	**-**									**0**	**0**					**KECAMATAN PELANGIRAN**
		7.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**-**									0	0					**KECAMATAN PELANGIRAN**
		7.01.03.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	Jenis					4	-									0	0					KECAMATAN PELANGIRAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :															
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**								**100.00**									**0**	**0**					**KECAMATAN PELANGIRAN**
		7.01.04.02.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban**		**Kegiatan**					**1**	**100.00**									0	0					**KECAMATAN PELANGIRAN**
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								100,00								100	0	100					KECAMATAN PELANGIRAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :															
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persen**					**100**	**94.97**									**0**	**0**					**KECAMATAN PELANGIRAN**
		7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**kegiatan**					**1**	**94,97**							**100**	**74**	100	74					**KECAMATAN PELANGIRAN**
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelakanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali					1	94,97							1	74	1	74					KECAMATAN PELANGIRAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*78,15*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**					**100**	**350.31**									**0**	**0**					**KECAMATAN PELANGIRAN**
		7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik**	**Kegiatan**					**1**	**350,31**			**36**	**37**			**167**	**269**	203	306					**KECAMATAN PELANGIRAN**
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan	Desa					2	279,10							10	269	10	269					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang	Kelompok					11	51,44			1	17					1	17					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada	usulan					149	19.78			149	20					149	20					KECAMATAN PELANGIRAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*203*	*76,52*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								**-**									**0**	**0**					**KECAMATAN PELANGIRAN**
		7.01.	**KECAMATAN**								**560.00**									0	0					**KECAMATAN PELANGIRAN**
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan**	**Persen**					**100**	**560.00**			**21**	**90**	**37**	**155**	**26**	**112**	**85**	**357**					**KECAMATAN PELANGIRAN**
		7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam**	**Persen**					**100**	**560.00**			**21**	90	**37**	155	**26**	112	85	357					**KECAMATAN PELANGIRAN**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pelangiran	Persen					90	137,73									0	0					KECAMATAN PELANGIRAN
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pelangiran	Persen					90	422,27			19	90	33	155	24	112	76	357					KECAMATAN PELANGIRAN
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*42,28*	*42,28*					
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								**-**															**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.	**KECAMATAN**								**560.00**															**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**2.539,96**	**50,68**	**452,8**	**44,23**	**576,4**	**48,86**	**683,9**	**47,73**	**556,8**	**47,87**	**2269,8145**					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang**	**persen**					**100**	**2.332,62**	**100**	**414,04**	**100**	**537,43**	**100**	**641,73**	**100**	**502,07**	**100**	**2095,27**					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	2.332.62	1	414.04	1	537.43	1	641.73	1	502.07	1	2.095.27					KECAMATAN PULAU BURUNG
		7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat**	**persen**					**100**	**171,97**	**32,04**	**29,0**	**19,34**	**34,0**	**33,97**	**34,6**	**20,78**	**42,6**	**106**	**140,2**					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					10	1,00	10	1,0							10	1,0					KECAMATAN PULAU BURUNG
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	jenis					20	19,19	7	5,17	4	3,35	4	6,1	5	1,31	20	15,93					KECAMATAN PULAU BURUNG
		7.01.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan rumah jabatan dinas yang	Set					1	-									0	0					KECAMATAN PULAU BURUNG
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					336	7.86			140	1.2	84	0.7	112	1.00	336	2.90					KECAMATAN PULAU BURUNG
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					1057	5,95	8	1,6	14	0,2	1000	0,25	39	3,9	1061	5,95					KECAMATAN PULAU BURUNG
		7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					360	-									0	0					KECAMATAN PULAU BURUNG
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali					86	137,98	21	21,21	29	29,29	27	27,52	36	36,36	113	114,38					KECAMATAN PULAU BURUNG
		7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat**	**persen**					**100**	**33,37**	**20**	**9,76**	**13,33**	**4,88**	**12,6**	**7,58**	**22,4**	**10,28**	**68**	**32,49**					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					1000	3,00	100	1,00	25	0,25	3	0,03	172	1,72	300	3,00					KECAMATAN PULAU BURUNG
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					2	4,78	2	1,71	1	0,65	1	0,03	2	2,18	1,5	4,57					KECAMATAN PULAU BURUNG
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	orang					2	25,59	2	7,05	2	3,98	2	7,52	2	6,38	2	24,93					KECAMATAN PULAU BURUNG
		7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**persen**					**100**	**2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**1,89**	**100**	**1,89**					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipellihara dan dipepanjang Perizinannya	Unit					3	2,00	0	0	0	0	0	0	3	1,89	3	1,89					KECAMATAN PULAU BURUNG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*93,67*	*90,64*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**14,53**	**13,3**	**3,5**	**13,3**	**3,5**	**13,3**	**4**			**13,33**	**11**					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan**	**persen**					**100**	**-**									0	0					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang Yang di Evaluasi	Desa					14	-									0	0					KECAMATAN PULAU BURUNG
		7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**JENIS**					**6**	**14,53**	**13,3**	**3,5**	**13,3**	**3,5**	**13,3**	**4**			**40**	11					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	jenis					15	14,53	6	3,5	6	3,5	6	4			6	11					KECAMATAN PULAU BURUNG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*40,00*	*75,71*					
											Predikat kinerja :									*SR*	*S*					
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif**	**Persen**					**100**	**-**									**0**	**0**					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan**	**persen**					**100**	**-**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.03.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	kegiatan					1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					KECAMATAN PULAU BURUNG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :															
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**cakupan peran serta masyarakat terhadap pembang**	**persen**					**100**	**100**									**0**	**0**					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.04.02.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan - Ketentraman dan Ketertiban di**	**persen**					**100**	**100,00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang	persen					100	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					KECAMATAN PULAU BURUNG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :															
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan U**	**Persen**					**100**	**89,36**							**100**	**61,6**	**100**	**61,6**					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah pelakanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan**	**KEGIATAN**					**1**	**89,36**							**1**	**61,6**	**1**	**61,6**					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
				PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	**persen**					**100**	**-**									**0**	**0**					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelakanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali					1	89,36							1	61,6	1	61,6					KECAMATAN PULAU BURUNG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*69*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*S*					
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**					**100**	**276.96**	**33.33**	**10.5**	**0**	**0**	**16.67**	**25.27**	**33.33**	**221.67**	**83**	**257.44**					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan**	**persen**					**100**	**276,96**	**33,33**	**10,5**	**0**	**0**	**16,67**	**25,27**	**33,33**	**221,67**	**83**	**257,44**					**KECAMATAN PULAU BURUNG**
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan	Desa					6	225,00							6	221,67	6	221,67					KECAMATAN PULAU BURUNG
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang	Kelompok					2	41.46					1	25.27			1	25.27					KECAMATAN PULAU BURUNG
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada	usulan					700	10.50	700	10.5							700	10.5					KECAMATAN PULAU BURUNG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*83*	*86*					
											Predikat kinerja :									*T*	*T*					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								**-**															**KECAMATAN RETEH**
		7.01.	**KECAMATAN**								**560.00**															**KECAMATAN RETEH**
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**							**3.629,83**	**35**	**517**	**31**	**826**	**41**	**632**	**46**	**760**	**152**	**2735**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan**							**3.279,63**	**25**	**469**	**25**	**774**	**25**	**566**	**25**	**609**	**100**	**2418**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	3.279,63	1	469	1	774	1	566	1	609	1	2418					KECAMATAN RETEH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Pakaian Korpri yang disediakan**						**14,40**		**38**	**4**	**75**	**4**	**75**	**4**	**75**	**4**	263	14					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang					14,40		3	4	3	4	3	4	3	4	3	14					KECAMATAN RETEH
		7.01.01.02.05	**Administrasi Kenegawaian Perangkat Daerah**							**5,40**		**100**	**5**							100	5					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	Stel					14	5,40	14	5	0	0	0	0	0	0	14	5					KECAMATAN RETEH
		7.01.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang					2	-									0	0					KECAMATAN RETEH
		7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**						**233,95**		**44**	**8,8**	**13**	**3,01**	**25**	**4,98**	**19**	**3,27**	100	20,06					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkanan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					16	20.13	7	8.8	2	3.01	4	4.98	3	3.27	16.00	20.06					KECAMATAN RETEH
				Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit					1	-	8	2,43	10	2,97	53	15,56	29	8,5	100	29,46					KECAMATAN RETEH
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					850	29.56	71	2.43	86	2.97	448	15.56	245	8.5	850.00	29.46					KECAMATAN RETEH
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					307	-	12	20,61	22	29,91	29	33,84	33	76,72	96	161					KECAMATAN RETEH
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Lembar					12000	4.95	2836	1.17	3030	1.25	2424	1	3684	1.52	11974.00	4.94					KECAMATAN RETEH
		7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					12	2,50	0	0	3	0,6	6	1,2	3	0,6	12	2,4					KECAMATAN RETEH
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					78	176,81	9	19,44	12	28,06	14	31,64	33	74,6	68,00	153,74					KECAMATAN RETEH
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					2	-									0	0					KECAMATAN RETEH
		7.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**50,00**								**100**	**49,78**	100	49,78					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dibangun	Unit					1	50,00	0	0	0	0	0	0	1	49,78	1	49,78					KECAMATAN RETEH
		7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**						**37,15**		**20**	**7,05**	**21**	**6,82**	**36**	**7,72**	**37**	**7,89**	114,2579365	29,48					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					420	1,80	0	0	20	0,2	76	0,76	84	0,84	180	1,8					KECAMATAN RETEH
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					3	10.80	1	0.5	1	0.62	2	0.96	2	1.05	1.50	3.13					KECAMATAN RETEH
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					12	24,55	3	6,55	3	6	3	6	3	6	11,99	24,55					KECAMATAN RETEH
		7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**						**9,30**				**50**	**6,22**			**50**	**0,6**	100	6,82					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan diperanjang Perizinannya	Unit					1	9,30	0	0	1	6,22	0	0	1	0,6	1	6,82					KECAMATAN RETEH
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit					1	-									0	0					KECAMATAN RETEH
		7.01.01.02.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	Unit					1	-									0	0					KECAMATAN RETEH
		7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Ruang					5	-									0	0					KECAMATAN RETEH
		7.01.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					4	-									0	0					KECAMATAN RETEH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***101***	***90,52***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***T***					
		7.01.02.0	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**						**390,03**		**22**	**80**	**17**	**109**	**15**	**80**	**17**	**114**	**71**	**383**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.02.02.01.0	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Layanan Pemerintah Umum yang tertangani**						**320,86**		**21**	**64**	**8**	**92**	**6**	**62**	**9**	**96**	**44**	**314**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Madani	Persen					90	320,86	17	63,65	25	91,5	17	62,3	26	96,45	85	314					KECAMATAN RETEH
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Metro	Persen					90	-									0,00	0					KECAMATAN RETEH
				Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Pulau Kijang	Persen					90	-									0,00	0					KECAMATAN RETEH
		7.01.02.02.02.0	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**							**69,17**		**24**	**16,39**	**26**	**17,79**	**25**	**17,42**	**25**	**17,57**	**99**	**69**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis					2	69,17	0	16,39	1	17,79	1	17,42	1	17,57	2	69					KECAMATAN RETEH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***97,83***	***99,46***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.03.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Layanan Pemerintah Umum yang tertangani**						**2,25**				**100**	**2,25**					**100**	**2,25**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.03.02.01.0	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**2,25**				**100**	**2,25**					**100**	**2,25**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.03.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	Jenis					1	2,25	0	0	1	2,25	0	0	0	0	1	2,25					KECAMATAN RETEH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***100***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.04.0	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia**						**100,00**										**0**	**0**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.04.02.03.0	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat**						**100,00**										**0**	**0**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan - Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	Laporan					1	100,00	0	0	0	0	1	99,55	0	0	1	99,55					KECAMATAN RETEH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***100***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.05.0	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**						**102,23**								**100**	**57,68**	**100**	**58**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.05.02.01.0	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**						**102,23**								**100**	**57,68**	**100**	**57,68**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional. dan Nasional	Jumlah pelakanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali					2	102,23	0	0	0	0	0	0	2	57,68	2	57,68					KECAMATAN RETEH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***56,42***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***R***					
		7.01.06.0	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**						**260,57**		**41**	**18**	**11**	**18**	**124**	**88**	**39**	**133**	**216**	**256**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.06.02.01.0	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik**						**260,57**		**41**	**18**	**11**	**18**	**124**	**88**	**39**	**133**	**216**	**256**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Desa					2	205,00	0	0	0	0	7	79,76		123,76	7,00	203,52					KECAMATAN RETEH
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok					5	36,83	1	8,92	2	13	1	8	1	6,85	5,00	36,71					KECAMATAN RETEH
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Dokumen					1	18,73	1	9,22	0	5	0	0	1	1,92	1	16,14					KECAMATAN RETEH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***183***	***95,03***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**																							**KECAMATAN RETEH**
		7.01.	**KECAMATAN**							**560,00**				**24**				**74**		**98**	**0**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.03.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keharahan**						**560,00**				**24**				**74**		**98**	**0**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.03.02.0.0	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**560,00**				**24**				**74**		**98**	**0**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keharahan Pulau Kijang	Persen					90	150,00	0	0	0	0	0	0	89	149,44	89,06	149,44					KECAMATAN RETEH
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keharahan Pulau Kijang	Persen					90	410,00	0	0	43	196,33	0	0	45	204,34	88	400,67					KECAMATAN RETEH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***98,37***	***98,68***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**																							**KECAMATAN RETEH**
		7.01.	**KECAMATAN**							**560,00**				**20,56**				**76,14**		**96,69**	**0,00**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.03.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keharahan**						**560,00**				**20,56**				**76,14**		**96,69**	**0**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.03.02.02.0	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**560,00**				**20,56**				**76,14**		**96,69**	**0**					**KECAMATAN RETEH**
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Keharahan Madani	Persen					90	322,00	0	0	0	0	0	0	89	321,45	89,05	321,45					KECAMATAN RETEH
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Keharahan Madani	Persen					90	238,00	0	0	37	97,78	0	0	48	128,1	85	225,88					KECAMATAN RETEH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***96,69***	***97,37***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
												K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN RETEH
		7.01.	KECAMATAN								560.00			41.74	75.14			79.17	468.27	120.91	543.41					KECAMATAN RETEH
		7.01.03.0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan							560,00			41,74	75,14			79,17	468,27	120,91	543,41					KECAMATAN RETEH
		7.01.03.02.02.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								560.00			41.74	75.14			79.17	468.27	120.91	543.41					KECAMATAN RETEH
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Metro	Persen					90	340,00	0	0	0	0	0	0	90	339,26	89,50	339,26					KECAMATAN RETEH
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Metro	Persen					90	220,00	0	0	31	75,14	0	0	53	129,01	84	204,15					KECAMATAN RETEH
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*96,39*	*96,29*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.	KECAMATAN								560.00															KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun	Persen					100	2.330,26	26	280,62	23	570,35	23	410,43	26	423,13	98,72443182	1.684,53					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang					18	2.060,51	25	280,62	25	570,35	25	410,43	25	423,13	100	1.684,53					KECAMATAN SUNGAI BATANG
				Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai	Persen					100	-									0	0					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang					18	2.060.51	18	280.62	18	570.35	18	410.43	18	423.13	18	1.684.53					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen					100	6,00	25	0,60	25	1,80	25	2,40	25	1,20	100	6,00					KECAMATAN SUNGAI BATANG
				Persentase ketersediaan jasa Penunjang	Perse					100	-									0	0					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Orang					1	6.00	1	0.60	1	1.80	1	2.40	1	1.20	1	6.00					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang	Persen					100	217.79	30	32.08	19	63.03	18	39.55	28	48.38	95	183.03					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang	Jenis					7	1,53	4	0,85	0	0	0	0	3	0,66	7	1,51					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Jenis					40	99,09	37	6,59	40	39,71	40	18,71	40	21,99	39	86,99					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis					3	13.70	3	5.50	3	3.30	3	1.40	3	3.00	3	13.20					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Jenis					3	9.04	3	1.07	3	2.91	3	3.46	3	1.54	3	8.99					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali					55	94,43	11	18,08	10	17,10	9	15,98	12	21,19	42	72,34					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang	Persen					100	43,51	25	4,62	25	16,80	25	16,40	25	4,31	100	42,12					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen					100	2,94	100	0,35	100	0,87	100	0,37	100	1,00	100	2,59					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					2	10.02	2	0.93	2	0.93	2	3.82	2	3.31	2	8.99					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang					5	30.55	5	3.34	5	15.00	5	12.21	0	0	5	30.55					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen					100	2,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit					4	2,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0					KECAMATAN SUNGAI BATANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*98,72*	*91,51*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen					100	197,47	25	27,68	25	34,73	26	35,41	24	27,55	100	125,37					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Persentase Layanan Pemerintah Umum yang	Persen					90	127.15	25	27.68	25	34.73	26	35.41	24	27.55	100	125.37					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan	Persen					100	127.15	100	22.28	100	29.33	100	28.21	100	23.22	100	103.04					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.02.02.02.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Persen					90	70,32	100	5,40	100	5,40	100	7,20	100	4,33	100	22,33					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Rekomendasi					120	70,32	30	5,40	29	5,40	35	7,20	27	4,33	121	22,33					KECAMATAN SUNGAI BATANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*104*	*48,18*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*SR*					
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Layanan Pemerintah Umum yang	Persen					100	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Persen					90	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.03.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	Jenis					1	12,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					KECAMATAN SUNGAI BATANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :															
											Predikat kinerja :									*SR*	*SR*					
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembang	Persen					100	100	0	0,00	0	0,00	50	40,57	50	41,84	100	82,411					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.04.02.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persen					100	100,00	0	0,00	0	0,00	50	40,57	50	41,84	100	82,41					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan - Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang	Persen					100	100,00	0	0,00	0	0	100	40,57	100	41,84	100	82,41					KECAMATAN SUNGAI BATANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*82,41*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen					100	86,11	0	0,00	50	1,50	0	23,85	50	51,79	100	77,13					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.05.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang	Persen					90	86,11	0	0,00	50	1,50	0	23,85	50	51,79	100	77,13					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelakanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali					2	86,11	0	0,00	1	1,50	0	23,85	1	51,79	2	77,13					KECAMATAN SUNGAI BATANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*89,57*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*T*					
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen					100	172,21	25	9,95	25	5,56	25	50,27	25	93,30	100	159,08					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.06.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen					90	172,21	25	9,95	25	5,56	25	50,27	25	93,30	100	159,08					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan	Desa					2	135,00	0	0,00	0	0,00	0	37,47	2	84,66	2	122,13					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang	Kelompok					2	30,00	2	4,35	2	5,56	2	12,80	2	6,74	2	29,45					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada	Dokumen					1	7.20	1	5.60	0	0.00	0	0.00	0	1.90	1	7.50					KECAMATAN SUNGAI BATANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*100*	*97,58*					
											Predikat kinerja :									*ST*	*ST*					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.	KECAMATAN								560.00															KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.03.0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Persen					100	560.00	0	0	25	145	25	190	40	723	90	1057.90					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.03.02.02.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam	Persen					90	560.00	0	0	100	72	100	95.00	100	361.59	75	528.95					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Benteng	Persen					90	183,52	0	0	0	0	0	0	100	182,17	100	182,17					KECAMATAN SUNGAI BATANG
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Benteng	Persen					100	376,48	0	0,00	100	72	100	95,00	100	179,42	75	346,78					KECAMATAN SUNGAI BATANG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									*89,81*	*95,28*					
											Predikat kinerja :									*T*	*ST*					
		7.	UNSUR KEWILAYAHAN								-															KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.	KECAMATAN								2.966															KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen					100	2.269	16	363	29	647	19	425	20	459	83	1.894					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen					100	2.032	16	324	28	573	19	395	18	368	82	1.660					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang					19	2.032	19	324	19	573	19	395	19	368	19	1.660					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen						6	-	-		6	-	-	-	-		6					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Stel					15	6	-	-	15	6	-	-	-	-	15	6					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen					100	156	14	22	34	53	10	15	41	64	98	154					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					17	67	17	7	17	3	17	1	17	55	17	67					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Porsi					180	7	-	-	123	5	57	2	-	-	180	7					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					22.738	6	1.178	0	8.276	2	7.314	2	5.970	1	22.738	6					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					12	1	-	-	12	1	12	0	12	0	12	1					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Kali					84	75	17	15	47	42	11	9	7	6	82	73					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran	Persen					100	71	21	15	19	13	21	15	39	28	100	71					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					677	5	142	1	143	1	-	-	392	3	677	5					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					4	15	4	3	4	2	4	4	4	7	4	15					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					8	50	8	11	8	11	8	11	8	18	8	50					KECAMATAN TANAH MERAH
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen					100	4	36	2	45	2	19	1	-	-	100	4					KECAMATAN TANAH MERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 ÷ 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit					18	4	6	2	9	2	3	1	-	-	18	4					KECAMATAN TANAH MERAH
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															*100*	*96,20*					
					Predikat kinerja :															*ST*	*ST*					
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**206**	**20**	**41**	**32**	**65**	**19**	**40**	**26**	**53**	**100**	**198**					**KECAMATAN TANAH MERAH**
		7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Keluruhan**	**Persen**					**100**	**136**	**17**	24	**34**	46	**17**	23	**30**	41	**100**	133					**KECAMATAN TANAH MERAH**
		7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Kuala Enok	Persen					100	136	17	24	34	46	17	23	30	41	98	133					KECAMATAN TANAH MERAH
											-		-		-		-		-						**KECAMATAN TANAH MERAH**
		7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani**	**Persen**					**100**	**70**	**25**	17	**28**	**19**	**25**	**17**	**16**	**12**	**93**	**65**					**KECAMATAN TANAH MERAH**
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Rekomendasi					170	70	42	17	47	19	42	17	28	12	159	65					KECAMATAN TANAH MERAH
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															*95,73*	*95,59*					
					Predikat kinerja :															*ST*	*ST*					
		7.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**Persen**					**100**	**58**	-	-	-	-	**86**	**50**	**14**	**8**	**100**	**58**					**KECAMATAN TANAH MERAH**
		7.01.04.02.03	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif**	**Persen**					**100**	**58**	-	-	-	-	**86**	**50**	**14**	**8**	**100**	**58**					**KECAMATAN TANAH MERAH**
		7.01.04.02.03.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	kegiatan					4	58	-	-	-	-	2	50	2	8	4	58					KECAMATAN TANAH MERAH
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															*100*	*100*					
					Predikat kinerja :															*ST*	*ST*					
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan ketersediaan peralatan dan penanganan bencana**	**Persen**					**100**	**100**	-	-	-	-	**56**	**56**	**44**	**44**	**100**	**100**					**KECAMATAN TANAH MERAH**
		7.01.04.02.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan**	**kegiatan**					**6**	**100**	-	-	-	-	**3**	**56**	**3**	**44**	**6**	**100**					**KECAMATAN TANAH MERAH**
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan					6	100	-	-	-	-	3	56	3	44	6	100					KECAMATAN TANAH MERAH
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															*100*	*100*					
					Predikat kinerja :															*ST*	*ST*					
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum**	**Persen**					**100**	**78**	-	-	-	-	-	-	**99**	**77**	**99**	**77**					**KECAMATAN TANAH MERAH**
		7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan**	**kegiatan**					**1**	**78**	-	-	-	-	-	-	**1**	**77**	**1**	**77**					**KECAMATAN TANAH MERAH**
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelakanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali					3	78	-	-	-	-	-	-	3	77	3	77					KECAMATAN TANAH MERAH
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															*100*	*98,72*					
					Predikat kinerja :															*ST*	*ST*					
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**					**100**	**255**	**6**	**15**	**4**	**9**	**34**	**87**	**56**	**143**	**100**	**254**					**KECAMATAN TANAH MERAH**
		7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Keluruhan**	**Persen**					**100**	**255**	**6**	**15**	**4**	**9**	**34**	**87**	**56**	**143**	**100**	**254**					**KECAMATAN TANAH MERAH**
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Desa					2	205	-	-	-	-	2	82	2	123	2	205					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok					3	36	3	5	3	5	3	5	3	20	3	36					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrembang Kecamatan	Dokumen					10	14	7	10	3	4	-	-	-	-	10	14					KECAMATAN TANAH MERAH
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															*100*	*100*					
					Predikat kinerja :															*ST*	*ST*					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-		-		-		-		-						**KECAMATAN TANAH MERAH**
		7.01.	**KELURAHAN**								**560**		-		-		-		-						**KECAMATAN TANAH MERAH**
		7.01.03.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**					**100**	**560**	-	-	**12**	**68**	**9**	**51**	**75**	**418**	**96**	**536**					**KECAMATAN TANAH MERAH**
		7.01.03.02.02.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatankemasyarakatandesa/kelurahan yangdilaksanakan	kegiatan					1	560	17	-	22	68	21	51	28	418	88	536					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.03.02.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kuala Enok	Persen					100	300		-		-		-	93	280	93	280					KECAMATAN TANAH MERAH
		7.01.03.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kuala Enok	Persen					100	260	-	-	26	68	19	51	53	137	99	256					KECAMATAN TANAH MERAH
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															*95,96*	*95,96*					
					Predikat kinerja :															*ST*	*ST*					
		7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-															**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
		7.01.	**KECAMATAN**								**560,00**															**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Anaratur Perkantoran**	**Persen**					**100**	**1.857,25**	**17**	**313**	**27**	**510**	**20**	**367**	**22**	**408**	**86**	**1.598**					**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
				Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen					80	-	15	277	24	448	17	316	20	378	76	1.419					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
				Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai					19	-	2	36	3	61	3	51	2	31	10	179					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
		7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan**	**Persen**					**100**	**1.670,92**	**1**	**274**	**1**	**448**	**1**	**316**	**1**	**378**	4	1.415					**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	1.670,92	1	274	1	448	1	316	1	378	1	1.415					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
											-									-	-					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
		7.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah**	**Persen**					**80**	**3,50**	**80**	**4**	-	-		-	-	-	80	4					**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
		7.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Stel					14	3,50	14	4	-	-	-	-	-	-	14	4					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
		7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kecamatan yang terlaksana dengan baik**	**Persen**					**80**	**142,52**	**15**	**27**	**29**	**52**	**23**	**41**	**11**	**20**	79	140					**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis					19	27,53	4	3	5	4	5	3	5	1	19	11					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	set					2	-	-	-	2	15	-	-	-	-	2	15					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter					1594	17,08	192	2	335	4	425	5	294	3	1.246	13					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali					176	-	44	1	-	-	44	1	44	1	132	4					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Lembar					4241	3,29	806	1	1.244	1	1.863	1	328	0	4.241	3					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali					83	94,62	18	13	23	18	31	26	10	10	82	67					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali					10	-	3	7	3	9	2	5	2	5	10	26					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
		7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Administrasi Kecamatan yang terlaksana dengan baik**	**Persen**					**80**	**40,32**	**16**	**8**	**19**	**10**	**21**	**11**	**21**	**10**	77	39					**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
		7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar					432	4,32	60	1	100	1	180	2	92	1	432	4					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Jenis					2	12,00	0	2	1	3	1	3	1	3	2	11					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang					7	24,00	2	4	1	2	1	2	3	6	7	14					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
				Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	Orang					12	-	3	2	5	4	5	4	-	-	12	10					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
					Rata-rata capaian kinerja (%) :															*93,21*	*51,69*					
					Predikat kinerja :															*ST*	*R*					
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**54,80**	**13**	**9**	**27**	**13**	**27**	**14**	**33**	**18**	**100**	**55**					**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
		7.01.02.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Keluruhan	Persen					100	54,80	13	9	27	13	27	14	33	18	100	55					KECAMATAN TELUK BELENGKONG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabpuaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Rekomendasi					15	54,80	2	9	4	13	4	14	5	18	15	55					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***100***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**					**100**	**45,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
				Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen					100	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
		7.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan**	**Persen**					**100**	**45,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0					**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
		7.01.03.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	Jenis					1	45,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***0***	***0***					
											Predikat kinerja :									***SR***	***SR***					
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Peran serta masyarakat terhadap pembangunan - Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan**						**100**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**					**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
		7.01.04.02.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan - Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat**	**Tema**					**6**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**100**	6	100					**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
		7.01.04.02.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	peran serta masyarakat terhadap pembangunan - Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen					100	100,00	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***100***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**	**Persen**					**100**	**67,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**11**	**83**	**53**	**100**	**65**					**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
		7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan**	**Persen**					**100**	**67,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	17	**11**	83	**53**	100	65					**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
		7.01.05.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional. dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali					1	67,08	0	0	0	0	0	11	1	53	1	65					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***96,35***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**					**100**	**364,93**	**4**	**16**	-	-	**31**	**115**	**57**	**209**	**93**	**340**					**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
		7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan**	**Persen**					**100**	**364,93**	**4**	**16**	-	-	**31**	**115**	**57**	**209**	93	340					**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**
		7.01.06.02.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Desa					11	281,21	-	-	-	-	2	50	9	208	11	259					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
		7.01.06.02.01.012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok					2	65,59	-	-	-	-	2	64	0	1	2	65					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
		7.01.06.02.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Dokumen					13	18,12	13	16	-	-	-	-		-	13	16					KECAMATAN TELUK BELENGKONG
											Rata-rata capaian kinerja (%) :									***100***	***93,85***					
											Predikat kinerja :									***ST***	***ST***					
		8.	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								-															**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**10.414,67**															**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**Persen**					**90**	**7.982,77**	**11,7967263**	**777,63**	**16,88**	**1.527,35**	**13,19**	**2.250,18**	**39,26**	**2.515,85**	**81,13**	**7.071,01**					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**90**	**90,16**	**11,25**	**8,64**	**11,25**	**14,88**	**22,5**	**31,17**	**50**	**34,67**	95	89,36					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen					8	90,16	1	8,64	1	14,88	2	31,17	4	34,67	8	89,36					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar**	**Persen**					**100**	**4.217,42**	25	**696,59**	**25**	**1.200,56**	**25**	**821,10**	**25**	**800,89**	100	3.519,14					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun					1	4.217,42	1	696,59	1	1.200,56	1	821,10	1	800,89	1	3.519,14					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**Persen**					**100**	**37,79**	**0**	-	**25**	**7,98**	**0**	**8,62**	**0**	**6,14**	25	22,74					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Hari-Hari tertentu yang disediakan	stel					0	-		-		-		-			0	-					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	Diklat					4	37,79	0	-	1	7,98	0	8,62	0	6,14	1	22,74					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**					**100**	**643,41**	**23,39**	**42,18**	**26,46**	**188,66**	**19,95**	**100,38**	**25,30**	**209,87**	95,10	541,09					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis					44	9,17	15	-	9	-	12	6,31	8	2,86	44	9,17					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis					67	318,15	15	4,48	21	139,10	13	57,97	18	115,00	67	316,55					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis					1	44,20	1	7,54	1	13,55	1	7,70	1	15,40	1	44,19					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	Jenis					7	6,00	1	1,35	1	-	2	0,75	3	3,88	7	5,98					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					221	28,16	78	2,50	78	6,00	0	6,40	0	-	156	14,90					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Dilakukan	Kali					108	237,73	10	26,31	35	30,01	21	21,25	42	72,73	108	150,30					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah**	**Persen**					**100**	**2.008,15**	**0**	-	**0**	**59,51**	**0**	**734,15**	**100**	**1.160,92**	100	1.954,58					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	unit					5	2.008,15	-	-	-	59,51	-	734,15	5	1.160,92	5	1.954,58					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor**	**persen**					**100**	**153,42**	**22,94**	**30,22**	**30,45**	**30,96**	**24,90**	**34,09**	**21,7148148**	**26,20**	100	121,47					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen					90	3,60	16,94	0,61	37,22	1,34	22,22	0,80	13,63	0,79	90,01	3,54					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening					2	117,20	2	23,61	2	23,62	2	23,52	2	23,56	2	94,31					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang					2	32,62	2	6,00	2	6,00	2	9,77	2	1,85	2	23,62					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**					**100**	**832,42**	**0**	-	**0**	**24,80**	**0**	**520,67**	**52,78**	**277,16**	52,78	822,63					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												TW I		TW II		TW III		TW IV								
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 (15/7)*100%		17
		8.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit					18	45,42	-	-	-	1,03	-	4,54	1	36,81	1	42,38					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					4	787,00	-	-	-	23,77	-	516,13	4	240,35	4	780,25					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
										Rata-rata capaian kinerja (%) :											*82,64*	*86,02*				
										Predikat kinerja :											*T*	*T*				
		8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persen**					**100**	**438,36**	**0**	**35,83**	**13,33**	**49,72**	**0**	**96,26**	**6,67**	**179,62**	**20**	**361,43**					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.02.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Cakupan pelaksanaan Bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**Persen**					**100**	**438,36**	**0**	**35,83**	**13,33**	**49,72**	**0**	**96,26**	**6,67**	**179,62**	20	361,43					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.02.02.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah yang diselenggarakan	Kegiatan					3	233,17	0	12,30	2	12,30	0	55,95	1	109,45	3	190,00					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.02.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan	Peserta					50	70,00	0	17,23	0	19,83	0	11,70	0	10,70	0	59,46					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebanesaan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan	kali					10	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	6,30					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebanesaan	Jumlah Peserta Seminar Pembauran Kebangsaan & Rapat FPK yang dilaksanakan	Orang					50	95,79	0	6,30	0	14,90	0	21,21		46,14	0	82,25					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.02.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi bela negara	Peserta					50	39,40	0	-	0	2,69	0	7,40	0	13,33	0	23,42					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
										Rata-rata capaian kinerja (%) :											*20,00*	*82,45*				
										Predikat kinerja :											*SR*	*T*				
		8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat**	**Persen**					**100**	**1.264,36**	**0**	**5,05**	**0**	**40,50**	**36,36**	**873,27**	**13,63**	**1.092,22**	**49,99**	**2.011,04**					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.03.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala**	**Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat**	**Persen**					**100**	**1.264,36**	**0**	**5,05**	**0**	**40,50**	**36,36**	**873,27**	**13,63**	**1.092,22**	49,99	2.011,04					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.03.02.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Parpol yang dikembangkan Kapasitasnya	Parpol					11										0	-					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03.02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Partai Politik yang di bina	Parpol					11	1.189,40	0	2,05	0	18,77	8	863,20	3	1.073,17	11	1.957,19					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03.02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat yang mengikuti pembinaan	Masyarakat					30	74,96	0	3,00	0	21,73	0	10,07	0	19,05	0	53,85					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
										Rata-rata capaian kinerja (%) :											*49,99*	*159,06*				
										Predikat kinerja :											*SR*	*ST*				
		8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	**Persen**					**100**	**226,61**	**0**	**25,37**	**0**	**19,19**	**7,76**	**48,01**	**20,41**	**67,80**	**28,17**	**160,37**					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.04.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi**	**Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	**Persen**					**100**	**226,61**	**0**	**25,37**	**0**	**19,19**	**7,76**	**48,01**	**20,41**	**67,80**	28,17	160,37					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.04.02.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terciptanya Kemandirian ormas dan Terpenuhinya Peningkatan Pengetahuan Bagi Ormas	ormas					2	-									0	-					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.04.02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas/LSM yang mengikuti pembinaan	OrmasLSM					245	226,61	-	25,37	-	19,19	19	48,01	50	67,80	69	160,37					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
										Rata-rata capaian kinerja (%) :											*28,17*	*70,77*				
										Predikat kinerja :											*SR*	*S*				
		8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	**Cakupan ketahanan sosial dan budaya**	**Persen**					**100**	**132,41**	**0**	**13,22**	**0**	**26,33**	**0**	**24,87**	**100**	**54,20**	**100**	**118,62**					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.05.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Cakupan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persen**					**100**	**132,41**	**0**	**13,22**	**0**	**26,33**	**0**	**24,87**	**100**	**54,20**	**100**	**118,62**					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.05.02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penahavat Kenercavaan di Daerah	Jumlah Hisorarium 1 Kali yang diselenggarakan	Kegiatan					1	132,41		13,22		26,33		24,87	1	54,20	1	118,62					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah Kegiatan sosialisai yang diselenggarakan	Kegiatan					1	-									0	-					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.05.02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penahavat Kenercavaan di Daerah	Persentase Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	persen					100	-									0	-					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
										Rata-rata capaian kinerja (%) :											*100*	*89,58*				
										Predikat kinerja :											*ST*	*T*				
		8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN**	**Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persen**					**100**	**370,17**	**5**	**22,14**	**17,5**	**98,78**	**37,5**	**111,16**	**40**	**100,11**	**100**	**332,19**					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.06.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Cakupan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persen**					**100**	**370,17**	**5**	**22,14**	**17,5**	**98,78**	**37,5**	**111,16**	**40**	**100,11**	100	332,19					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.06.02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Konflik di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang difasilitasi	Kasus					4	98,71	0	9,84	0	11,35	2	35,49	2	19,99	4	76,67					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewasnadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dipantau	Kecamatan					20	271,46	2	12,30	7	87,43	5	75,67	6	80,12	20	255,52					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
										Rata-rata capaian kinerja (%) :											*100*	*89,74*				
										Predikat kinerja :											*ST*	*T*				
										Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%) :											*84,13*	*80,42*				
										Predikat kinerja :											*T*	*T*				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen semua pemangku kepentingan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) Pandemi Covid-19 (2) Kesalahan Penentuan Target Kinerja (3) refocusing anggaran (4) Tunda Bayar (5) Gagal Tender

Tindak lanjut yang disertakan dalam triwulan : -

Tindak lanjut yang disertakan dalam RKPD beri : (1) Perlu dilakukan Penajaman dalam penentuan target kinerja (2) Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Tembilahan, 24 Mei 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

Keberhasilan pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2021 memberikan implikasi dalam pencapaian target-target indikator pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Target dan capaian indikator pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 serta Provinsi Riau dan Nasional ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.61
Pencapaian Indikator Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Indonesia Tahun 2021

No.	Indikator	Target Kab. Indragiri Hilir	Capaian Kab. Indragiri Hilir	Capaian Provinsi Riau	Capaian Nasional
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,6-4,3	4,4	3,36	3,69
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta/Kapita/Tahun)	63,34	111,43	130,13	62,2
3	Inflasi (%)	3,60	1,09	1,54	1,87
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,30	6,18	7,12	9,71
5	IPM	68,08	66,63	72,94	72,29
6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,40	67,98	71,67	73,5
7	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,38	7,24	9,19	8,54
8	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,96	11,93	13,28	13,08
9	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	11.677,10	9.945	10.736	12.410
10	Gini Ratio	0,32	0,297	0,327	0,381
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,9-5,2	2,66	4,42	6,49

Sumber: BPS Indragiri Hilir (2022), BPS Provinsi Riau (2022) dan BPS (2022)

Pada tahun 2021, target indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir pada range 3,6-4,3% dengan capaian berada diatas target yaitu sebesar 4,44% sehingga realisasi kinerja sebesar 102,3% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 ini yaitu sebesar 4,44% relatif lebih tinggi dibanding capaian indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau

(3,36%), dan capaian pertumbuhan ekonomi nasional (3,69%). Kondisi ini tidak terlepas dampak meredanya pandemi COVID-19. Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku PDRB Kabupaten Indragiri Hilir menurut harga berlaku pada tahun 2021 adalah 73.324.096,96 rupiah. Sedangkan sektor yang memberikan konstribusi terbesar adalah sektor pertanian perikanan dan kehutanan yaitu sebesar 47,54 persen diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan masing-masing 24,65 persen dan 14,99 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 adalah sebesar 4,44 persen. Angka ini maik dari tahun sebelumnya (2020: 0,34 persen).

Pada tahun 2021, target PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 63,34 juta/kapita/tahun. Realisasi indikator PDRB per kapita sebesar Rp 111,43 juta/kapita/tahun sehingga realisasi kinerja sebesar 175,9% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian indikator PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hilir ini relatif lebih rendah dibanding capaian PDRB per kapita Provinsi Riau (Rp 130,13 juta/kapita/tahun), namun lebih tinggi dibanding capaian PDRB per kapita Nasional (Rp 62,2 juta/kapita/tahun). Relatif tingginya capaian kinerja indikator PDRB ini tidak terlepas dari relatif rendahnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir yang hanya sebesar 0,36%, dibawah pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 4,44%. Upaya mengairahkan sektor pertanian yang didukung oleh industri pengolahan akan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi, karena kedua sektor ini merupakan tumpuan pertumbuhan sektor - sektor lainnya.

Pada tahun 2021, indikator inflasi ditargetkan sebesar 3,60%. Capaian indikator ini jauh lebih baik yaitu sebesar 1,09% (inflasi ringan). Capaian inflasi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 ini, relatif lebih rendah dibanding dengan inflasi Provinsi Riau (1,54%) dan juga Nasional di angka (1,87%). Upaya terus mempertahakan tingkat inflasi yang rendah perlu terus dilakukan dengan terus memperhatikan dan mengantisipasi

faktor penyebabnya seperti kelancaran distribusi barang dan jasa, sistem tata niaga, peran pemerintah dan perilaku sektor keuangan.

Pada tahun 2021, target tingkat kemiskinan di Kabupaten Hilir sebesar 7,30%, sementara realisasi tingkat kemiskinan sebesar 6,18%. Capaian indikator tingkat kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 6,18% lebih baik dibanding capaian Provinsi Riau (7,12%) dan Nasional (9,71%) Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten Indragiri Hilir melalui Program/kegiatan pembangunan oleh Pemerintah dan *stakeholder* lainnya cukup sinergis dan berhasil.

Pada tahun 2021, target indikator IPM Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 68,08 dengan capaian indikator sebesar 66,63. Capaian indikator IPM Indragiri Hilir ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Riau diangka (72,94) dan Nasional diangka (72,29). Rendahnya capaian indikator IPM Indragiri Hilir ini disebabkan rendahnya capaian komponen pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Capaian keempat komponen pembentuk IPM Kabupaten Hilir lebih rendah dibanding Provinsi Riau dan Nasional. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan percepatan pencapaian indikator IPM adalah dengan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan keempat komponen IPM diatas.

Pada tahun 2021, target indikator gini ratio Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 0,32 dengan realisasi capaian sebesar 0,297 yang berarti bahwa pemerataan pembangunan tinggi di Kabupaten Indragiri Hilir (ketimpangan rendah). Capaian indikator gini ratio Kabupaten Indrgairi Hilir lebih baik dibandingkan Provinsi Riau (0,327) dengan Nasional (0,38 atau pemerataan sedang).

Pada tahun 2021, target indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Indragiri Hilir di range 4,9-5,2% dengan realisasi capaian

sebesar 2,66%. Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir ini relatif lebih baik dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau (4,42%) dan Nasional (6,49%). Capaian yang baik dalam indikator Tingkat Pengangguran Terbuka harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah terdiri dari rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan yang diuraikan pada sub bahasan ini merupakan permasalahan yang memiliki nilai prioritas dan berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan di tahun rencana serta prioritas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dan Nasional

1. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

2. Pemerataan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya.

Panjang jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, serta perumahan perlu penanganan yang lebih baik lagi. Hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, serta infrastruktur dasar lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi pertanian yang juga masih belum optimal, luas perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terluas di Indonesia, namun belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah harga kelapa yang cenderung rendah. Kondisi - kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, serta berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Tahun 2020, dimana pandemi COVID-19 menambah berat pertumbuhan ekonomi karena untuk memutus mata rantai penyebaran, kita dipaksa untuk membatasi kegiatan, sehingga roda perekonomian berjalan sangat lambat, walaupun dapat tumbuh secara positif dengan nilai yang sangat kecil yaitu 0,34%. Diperlukan adanya sebuah terobosan untuk pemulihan pertumbuhan ekonomi.

4. Kemiskinan dan Pengangguran.

Akses pelayanan sosial dasar bagi PPKS di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lambat. Kondisi - kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PPKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial dan akses lapangan pekerjaan perlu ditingkatkan.

5. Kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing.

Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Indragiri Hilir sampai pada tahun 2020 teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal seperti layanan PAUD dan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non - fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

6. Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan mayarakat di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya daerah perdesaan dan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Pengelolaan potensi sumber daya alam dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Produksi Perikanan, hasil perkebunan kelapa sawit, kelapa dan tanaman kelapa ini perlu didukung dengan industri hilir sehingga nilai tambah dapat diperoleh oleh Kabupaten Kabupaten Hilir.

Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti (i) agriwisata yang berupa hamparan ladang padi dan kelapa, (ii) Bukit berbunga indragiri Hilir, (iii) Pantai Solop, (iv) Air Terjun Tembulan Rusa dan (v) Makam Syekh Abdurrahman Siddiq Al Banjari. Namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif belum berkembang, dimana objek - objek wisata

yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana-prasarana yang memadai.

8. Kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

Upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial (kemiskinan dan pengangguran), disiplin dan kesadaran masyarakat serta penegakan aturan. Tantangan yang akan dihadapi ke depan yaitu meningkatkan profesionalisme aparat, optimalisasi fungsi institusi - institusi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat.

9. Pembangunan ekonomi perdesaan

Pada periode sebelumnya Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan Program yang bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Pada perkembangannya, dengan melihat progres positif yang telah dicapai oleh Desa terutama pada program pembangunan fisik dan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, maka dinilai perlu untuk menambah serta mengevaluasi apa saja yang bisa menjadi nilai tambah dari program ini maka diluncurkanlah yang disebut dengan Program DMIJ Plus Terintegrasi.

Program ini sebagai wadah bagi seluruh *Stakeholder* untuk memberikan perhatiannya ke Desa dan Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai porosnya. Setelah rampung pada pembangunan infrastruktur, membuka akses Desa untuk jalannya perekonomian Desa maka Desa diminta untuk mampu mengelola serta mengontrol potensi lokal Desa sehingga memiliki nilai ekonomis. Desa diharapkan menjadi pilar kuat Daerah dimana Desa memiliki sumber PADes sendiri dan pengelolaan nya secara efektif dan efisien dengan SDM yang berkualitas.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada sub bahasan ini merupakan permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan urusan dasar dan tugas /fungsi tiap perangkat daerah.

2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- Selama periode 2016 – 2020, APM SD/MI Indragiri Hilir berkisar antara 94,62% - 96,20% yang berarti ada sekitar 3,80% - 5,38% penduduk umur pendidikan SD/MI yang belum sekolah. Capaian ADM SD/MI Indragiri Hilir tahun 2019 lebih rendah dibanding capaian APM Indragiri Hulu (98,44%) dan Provinsi Riau (97,32%).
- Selama periode 2016 – 2020, APM SMP/MTs Indragiri Hilir berkisar antara 79,96% - 82,39%, yang berarti ada sekitar 17,61% - 20,04% penduduk usia 13 - 15 yang yang belum sekolah.
- Selama periode 2016 – 2020, APS 7 – 12 tahun Indragiri Hilir trendnya meningkat yaitu dari 98,43% pada tahun 2016 menjadi 99,75% pada tahun 2020, yang berarti sebesar 0,25% - 1,57% penduduk umur 7 – 12 tahun Indragiri Hilir yang tidak berpartisipasi pada pendidikan di SD/MI.
- APS 13 – 15 tahun Indragiri Hilir selama periode 2016 – 2020 berkisar antara 90,77% - 92,13%, yang menggambarkan bahwa penduduk umur 13 – 15 tahun Indragiri Hilir yang tidak berpartisipasi pada pendidikan SMP/MTs sebesar 7,87% - 9,23%.
- Persentase bangunan SD/MI dengan kondisi baik hanya sebesar 24,61%. Persentase bangunan SD/MI dalam kondisi baik hanya

sebesar 23,53%, lebih rendah dibanding Indragiri Hulu (28,40%), Pelalawan (34,00%) dan Provinsi Riau 29%).

- Persentase bangunan SMP/MTs di Indragiri Hilir dengan kondisi baik hanya sebesar 19,70%. Bangunan SMP/MTS dengan kondisi baik di Indragiri Hilir hanya 20,15%, lebih rendah dibanding Indragiri Hulu (25,15%), Pelalawan (39,76%) dan Provinsi Riau (28,54%).
- Masih terdapat sekitar 28,18% guru yang belum berkualifikasi S1/D.IV sehingga yang bersangkutan belum tersertifikasi sebagai guru.
- APK SD/MI Indragiri Hilir sebesar 104,31%, terendah dibandingkan APK SD/MI kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (115,35%) dan Pelalawan (110,74%) pada tahun 2018. Selama periode 2016 - 2020, kinerja indikator APK SD/MI trennya berfluktuatif meningkat.
- APK SMP/MTs Indragiri Hilir sebesar 98,33%, tertinggi dibanding kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (88,28%) dan Pelalawan (87,87%) pada tahun 2018, namun capaian APK ini masih dibawah target RPJMD. Namun, pada tahun 2020 APK SMP/MTs telah melebih target yang telah ditetapkan dengan kinerja sebesar 100,72%.
- Pada tahun 2020, Harapan lama sekolah (HLS) sebesar 11,91 tahun adalah terendah dibanding kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (12,36 tahun) dan Pelalawan (12,24 tahun). Selama periode 2016 – 2020, kinerja indikator harapan lama sekolah trennya mengalami peningkatan tetapi masih dibawah target RPJMD.

- Pada tahun 2020, rata - rata lama sekolah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 7,23 tahun adalah yang terendah dibanding kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (8,38 tahun) dan Pelalawan (8,50 tahun). Selama periode 2016 – 2020, kinerja indikator rata - rata lama sekolah trendnya mengalami peningkatan namun masih dibawah target RPJMD.

2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- Rasio ideal daya tampung rumah sakit adalah setiap 1.000 penduduk : 1 tempat tidur. Pada tahun 2020, Indragiri Hilir kekurangan sekitar 398 tempat tidur lagi.
- Rasio dokter spesialis per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu sebesar 0,032 (norma 0,15) pada tahun 2020, lebih rendah dibandingkan capaian rasio dokter Indragiri Hulu tahun 2020 yang sebesar 0,041. Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih mebutuhkan sebanyak 52 dokter spesialis sehingga rasionya ideal.
- Rasio dokter umum per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu sebesar 0,064 (norma 0,40). Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan tambahan dokter umum sebanyak 205 orang dokter umum.
- Rasio dokter gigi per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu 0,032 (norma 0,11). Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan 48 orang dokter gigi.
- Rasio perawat per 1.000 penduduk masih dibawah norma yaitu 0,97 (norma 1,1), Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan perawat sekitar 200 orang lagi.
- Rasio Bidan per 1.000 penduduk masih dibawah norma yaitu 0,59 (norma 1,0). Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan sebanyak 693 orang Bidan.

- Pada tahun 2020, Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 67,85 tahun adalah yang terendah dibanding angka harapan hidup kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (70,25 tahun) dan Pelalawan (71,16 tahun). Selama periode 2016 – 2020, realisasi kinerja indikator ini trennya berfluktuatif mengalami peningkatan.
- Prevalensi balita gizi sebesar 4,30% (Tahun 2017), lebih tinggi dibanding prevalensi Provinsi Riau yang sebesar 1,64%. Namun, untuk tahun 2020 capaian indikator ini sebesar 0,03 dengan kinerja 196,67%.

2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Proporsi jalan Kabupaten dengan kondisi Baik (4,52%) dan Mantap (57,84%), masih dibawah target dan standar Nasional (80%).
- Proporsi jembatan dengan kondisi Baik (58,32%) dan Mantap (43,36%), masih dibawah standar Nasional.
- Proporsi irigasi dalam kondisi baik sebesar 30%, masih dibawah target yang ditetapkan (32%)
- Rendahnya kualitas insfrastruktur yang dibangun dan kondisi lahan gambut dan rawa pasang surut mengakibatkan tingginya frekuensi pemeliharaan terhadap insfrastruktur tersebut.

2.3.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- Rendahnya rumah tangga pengguna air bersih sampai tahun 2019 hanya sebesar 21,49% dari total rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Masih terbatasnya pembangunan rumah layak huni di Indragiri Hilir yaitu berkisar antara 20 unit – 162 unit per tahun selama

periode 2009 – 2017. Disisi lain, jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 16.868 unit rumah.

- Masih adanya permukiman kumuh di perkotaan yaitu sebesar 22%.
- Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dasar di wilayah permukiman.
- Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Permendagri 20 % dari Luas Perkotaan.

2.3.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- Rasio rumah ber IMB baru 2,30% dari total rumah yang ada di Indragiri Hilir.
- Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk masih rendah yaitu 0,04 sehingga penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kurang optimal.
- Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat masih rendah dengan kinerja 10% sebagai konsekuensi kurangnya tenaga Satpol PP.
- Belum tersedianya data Daerah Rawan Bencana dimasing-masing Kecamatan secara menyeluruh di Kabupaten indragiri Hilir sebagai acuan identifikasi bencana.
- Dukungan anggaran pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana masih rendah.
- Pengalokasian dana siap pakai tidak berada di BPBD Kabupaten Indragiri Hilir sehingga sulit diakses ketika terjadi bencana dalam rangka penanggulangan bencana.
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah terdampak bencana belum terlaksana dengan baik karena terbentuk anggaran.

- Kurangnya keterlibatan multi pihak dalam penanggulangan bencana dan membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

2.3.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- Belum optimalnya pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui sistem layanan dan rujukan terpadu dan SINK-NG menuju penyediaan Basis Data Terpadu (BDT).
- Belum optimalnya penangan bencana alam dan bencana sosial karena kekurangan penyediaan logistik bencana dan biaya operasional.
- Belum optimal penanganan anak bermasalah sosial.

2.3.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indragiri Hilir adalah yang terendah dibanding Kabupaten sekitar dan Provinsi Riau dengan capaian kinerja yang terus menurun.
- Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir sebesar 3,89%.
- Kegiatan pemberian pelatihan kewirausahaan kepada tenaga kerja pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan anggaran akibat di *recofussing* untuk penanganan COVID-19.
- Tidak berjalannya peranan dan fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah dibentuk di perusahaan.
- Pada tahun 2020, Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 4,35%. Capaian tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 ini lebih baik dibanding capaian Kabupaten tetangga Indragiri Hulu (4,91%), Pelalawan (5,99%) dan Provinsi

Riau (6,32%). Selama periode 2016 – 2020, realisasi kinerja indikator pengangguran terbuka trennya berfluktuatif menurun, dalam artian jumlah pengangguran terbuka semakin mengalami peningkatan.

2.3.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Indeks pembangunan gender (IPG) Indragiri Hilir sebesar 82,34% adalah yang terendah dibandingkan IPG kabupaten tetangga dan Provinsi Riau.
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indragiri Hilir yaitu sebesar 61,05% juga termasuk yang terendah dibanding kabupaten tetangga dan Provinsi Riau.
- Masih lemahnya kelembagaan/institusi yang mendukung pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, kurangnya pemahaman tentang kota layak anak serta terbatasnya sarana dan prasarana dalam menuju kota layak anak.

2.3.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- Selama periode 2016 – 2020, belum tersedia regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir.

2.3.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- Belum memiliki laboraturium limgkungan dan perlengkapannya guna memberikan hasil sampel yang cepat untuk disampaikan dalam waktu dan tempat tertentu
- Belom adanya pejabat Fungsional PPLHD DAN PPNS Lingkungan dalam upaya melakukan pemantauan dan pengawasan serta pembinaan pengelolaan lingkungan.
- Kurangnya sarana dan prasarana umtuk pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan

- Masing tingginya pencemaran lingkungan hidup.
- Masih tingginya kerusakan lingkungan hidup, kerusakan DAS, degradasi kawasan pesisir, abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan.
- Persentase penangan sampah masih belum belum optimal, baru sekitar 81,49%.
- Tingginya alih fungsi hutan dan lahan.
- Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) sesuai standar (*Sanitary landfill/controll landfill*).

2.3.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- Cakupan penerbitan kartu keluarga mencapai 226%
- Kepemilikan KTP (e-KTP) hanya 99% dari total penduduk Indragiri Hilir yang harus ber KTP.
- Kepemilikan akte kelahiran hanya sebanyak 556 per 1.000 penduduk Indragiri Hilir. Masih ada 456 penduduk dari 1.000 penduduk yang belum ada akta kelahiran.
- Keterbatasan peralatan untuk mendukung kegiatan administrasi kependudukan.
- Tidak sinkronnya data penduduk baik jumlah penduduk ataupun LAMPID (Lahir, Mati, Pindah, Datang) karena tidak dilaporkan secara berkala dari Kecamatan.

2.3.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- Program DMIJ telah berhasil meningkatkan ketersediaan insfrastruktur desa namun belum mendorong secara signifikan ekonomi masyarakat desa.
- Capaian desa maju masih sangat rendah yaitu hanya 79 desa, nihil desa dengan status desa Mandiri dan masih ada sebanyak 17 desa dengan status Sangat Tertinggal.

- Masih sangat lemahnya kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaaan Desa memananeg kegiatan - kegiatan desa.
- Masih rendahnya pengelolaan admisnistrasi keuangan desa.

2.3.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- Cakupan peserta KB aktif masih 64,10%.
- Cakupan PUS peserta KB masih 77,82%.
- Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh anak, remaja dan bina lansia.
- Belum optimalnya peran masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKB/PK) serta pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian peserta KB.
- Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian peserta KB.
- Masih kurangnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
- Masih kurangnya tenaga (petugas lapangan), sarana dan prasarana.

2.3.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- Kurangnya SDM Teknis Perhubungan baik Kualitas Maupun Kuantitas dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Kurangnya Ketersediaaan Produk Hukum baik peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.
- Kurangnya sarana Prasarana perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir.
- Belum beroperasi secara maksimal UPT pengujian kendaraan bermotor , terminal dan perpakiran pada Dinas Perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir.

- Kurangnya Pemeliharaan dan atau peningkatan Prasarana perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir.
- Masih rendahnya pemenuhan standar layanan angkutan di kabupaten Indragiri Hilir.

2.3.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

- Masih lemahnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.
- Sebagian besar penduduk Indragiri Hilir belum dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi.

2.3.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

- Koperasi aktif di Indragiri Hilir sebesar 67,00%.
- Usaha mikro dan kecil persentasenya sebesar 72,00%.
- Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang mengakibatkan tertinggalnya kinerja koperasi, dan kurang baiknya citra koperasi.
- Kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, sebagian besar masih sangat rendah.
- Sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah relatif rendah kualitas.
- Kebanyakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.
- Terbatasnya jaringan pasar dan pemasaran koperasi dan UKM, Kebanyakan hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal dan sedikit yang melakukan ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.

2.3.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- Realisasi PMDN masih rendah yaitu Rp 449 milyar, dibawah target Rp 11.112 milyar tahun 2020.

- Realisasi PMA jauh masih rendah yaitu USD 274,38 juta, dibawah target USD 108 juta.
- Belum maksimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal (pemantauan pembinaan dan pengawasan).
- Terbatasnya kompetensi SDM dan sarana dan prasarana penunjang kegiatan BP2MPD.
- Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi kecamatan dan kelurahan dalam pengurusan perijinanan penanaman modal.
- Masih kurangnya upaya promosi daerah melalui kegiatan berskala regional, nasional maupun internasional.

2.3.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

- Masih rendah persentase wirausaha muda.
- Masih rendah cakupan pembinaan olahraga.
- Masih rendah cakupan pelatih yang bersertifikat.
- Masih rendah cakupan pembinaan atlet muda.
- Pembinaan olahraga belum beroreantasi prestasi.
- Semakin berkurangnya perhatian generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam grup-grup kesenian.
- Masih lemahnya pembinaan olahraga sehingga belum berkembang klub – klub olahraga di masyarakat yang berorientasi pada prestasi.

2.3.2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- Data-data untuk pengukuran indikator kinerja pada RPJMD banyak yang tidak tersedia di Indragiri Hilir Dalam Angka, kecamatan dalam Angka, PDRB, Statistik Daerah dan Indikator kesejahteraan serta terbitan lainnya.
- Koordinasi dan sinergi antara Pemerintahan Kabupaten khususnya SKPD dengan BPS Kabupaten Indragiri Hilir masih lemah.

2.3.2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- Urusan persandian ini belum mendapat perhatian cukup oleh pemerintah daerah.

2.3.2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya masih terbatas.
- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya masih terbatas kuantitas dan kualitasnya.
- Mulai ditinggalkannya nilai - nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan masyarakat.
- Belum optimalnya pemeliharaan cagar budaya dan bangunan bersejarah.
- Relatif stagnannya cakupan fasilitas seni yang sekaligus menggambarkan masih lemahnya pembinaan dan pengelolaan grup kesenian.

2.3.2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- Jumlah perpustakaan yang masih terbatas yaitu sebanyak 4.972 orang.
- Koleksi buku perpustakaan yang masih terbatas dengan pelayanan yang belum baik.

2.3.2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- Masih relatif rendahnya pengelolaan arsip secara baku yaitu sebesar 30,36%.
- Terbatasnya jumlah SDM yang berkualitas untuk pengelola kearsipan yaitu sebanyak 3 orang.

2.3.2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- Produksi perikanan Indragiri Hilir masih mengandalkan perikanan tangkap dan sangat terbatas pada perikanan budidaya.

- Konsumsi ikan penduduk Indragiri Hilir yang rata - ratanya sebesar 39,69 ton/kapita perlu didorong meningkat menjadi 50,80 ton/kapita/tahun.
- Masih terdapatnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun dan alat terlarang.
- Terjadinya konflik antara sesama nelayan dalam hal menentukan lokasi penangkapan.
- Rendahnya kemampuan petani pembudidaya tambak dalam hal merevitalisasi tambaknya.

2.3.2.25 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- Pandemi COVID-19 memaksa semua orang untuk mengurangi interaksi guna mencegah penyebaran sehingga jumlah kunjungan wisatawan ke Indragiri Hilir mengalami penurunan menjadi 22.047 wisatawan pada tahun 2020.
- Belum memadai sarana dan prasarana pendukung objek wisata yang ada.

2.3.2.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- Produksi beras Indragiri Hilir belum mencukupi konsumsi penduduk Indragiri Hilir.
- Produktivitas kelapa masih rendah yaitu 1,217 ton kopra/hektar.
- Produktivitas kelapa sawit rakyat masih rendah yaitu 2,515 ton CPO/hektar, diibawah produktivitas perkebunan besar Indragiri Hilir (4,24 ton CPO/hektar).
- Pembangunan infrastruktur kebun terutama pembangunan tanggul mekanik dan normalisasi saluran yang masih jauh dibawah kebutuhan.
- Kegiatan rehabilitasi/peremajaan kebun kelapa belum dapat menyentuh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Harga kelapa petani PIR maupun petani non PIR berfluktuatif dan cenderung rendah.

2.3.2.27 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- Nilai ekspor bersih perdagangan Indragiri Hilir yang cenderung terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 mencapai USD 409,15 juta.
- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2.3.2.28 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- Nilai produksi usaha menengah kecil masih rendah dibawah target yang telah ditetapkan.
- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB relatif masih rendah yaitu 24,05%.
- Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah dan kewirausahaan masyarakat.
- Masih rendahnya jumlah industri pengolahan, bahkan industri pengolahan kelapa terus menurun jumlahnya.
- Rendahnya daya saing industri kecil menengah di Kabupaten Indragiri Hilir.

2.3.2.29 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

- Kegiatan-kegiatan ketransmigrasian secara terbatas pada transmigrasi lokal.

2.3.2.30 Penunjang Urusan

- **Perencanaan Pembangunan**
  - Terbatasnya Sumber daya kuantitas (fungsional) dan kualitas perencana pembangunan.
  - Hasil Evaluasi (RPJMD, RKPD dan lainnya) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan berikutnya.

- Terbatasnya sumber data yang lengkap dan akurat, yang dapat dipedomani dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

- **Keuangan**
  - Realisasi Pendapataan daerah yang kurang tercapai.
  - Masih rendahnya pendapatan asli daerah.
  - Masih kurangnya petugas yang memiliki kompetensi dibidang pemeriksaan pajak daerah.
  - Pemerintah Indragiri Hilir belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

- **Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan**
  - Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi jabatan.
  - Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, baik diklat struktural, fungsional maupun teknis.
  - Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai oleh sebagian pejabat struktural kepada PNS bawahannya yang indisipliner, sementara peraturan disiplin PNS telah memberikan kewenangan sesuai dengan jenjang jabatannya.

- **Kesatuan Bangsa dan Politik**
  - Pendidikan politik masyarakat masih rendah dapat dilihat dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir.
  - Krisis kepercayaan terhadap pemerintah, permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurang kewajiban pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuasa kepentingan kelompok atau golongan, krisis kepercayaan terhadap pemerintahan dapat dilihat dari

tingkat penegakan hukum dan terjadinya demontrasi yang memprotes pemerintah.

- Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dikarenakan Hetrogenitas dan Multikultural yang terjadi perkembangan dinamika kehidupan masyarakat juga arus globalisasi khususnya dibidang teknologi, informasi, budaya dan ekonomi memunculkan akses – akses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional.
- Meningkatnya Penyakit Masyarakat seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan, berupa kasus pecandu narkoba yang semakin meresahkan ketika pelajar dan remaja mulai terlibat di dalamnya.

- **Penelitian dan Pengembangan**
  - Masih sedikit pemanfaatan hasil peneltian untuk pembangunan di Indragiri Hilir.
  - Penelitian yang dilakukan spasial dan tidak komprehensif sehingga sukar diterapkan.
- **Pengawasan**
  - Masih banyak temuan APIP yang belum ditindak lanjuti. Persentase APIP yang ditindaklajuti sebesar 70,96%.
  - Masih terbatas jumlah personel APIP yang hanya 12 orang dan idealnya sebanyak 45 orang.
  - Lemahnya penegakan hasil temuan APIP sehingga kejadian serupa berulang kembali.
- **Sekretariat Dewan**
  - Rasio pembahasan prolegda yang semakin meningkat, dimana pada tahun 2016 sebesar 98,31% menjadi 100% tahun 2020.

BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Indragiri Hilir, baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain kondisi perekonomian pada masa pandemi COVID-19, perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisis yang diberikan terkait

rancangan kerangka ekonomi Tahun 2023 diharapkan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021 dan awal tahun 2022, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2022 dan 2023. Pada triwulan-I 2020, dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang membuat kondisi ekonomi global memburuk hingga turut berdampak pada terkontraksinya perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir.

Implikasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia telah merenggut korban jiwa serta kerugian material sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut tentunya mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi yang berfokus pada belanja di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta penanganan dampak ekonomi yang didalamnya termasuk dunia usaha dan masyarakat terdampak. Pada tahun 2023 kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 diprediksi membaik sehingga perekonomian Indragiri Hilir diperkirakan sudah mulai bangkit. Prediksi

perbaikan kondisi perekonomian berdasarkan kepada asumsi telah terdistribusinya vaksin COVID-19, meningkatnya aktivitas di beberapa sektor lapangan usaha, dimulainya kembali pembangunan proyek–proyek infrastruktur berbasis padat karya dan digitalisasi perdagangan.

Terkait Visi dan Misi Daerah pada tahun 2023 yang terkait pada bidang ekonomi adalah pada misi kedelapan yaitu Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah dengan Sasaran dan target yang akan dicapai pada tahun 2023 dengan indikator kinerja utama Kabupaten Indragiri Hilir antara lain ; pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 4,78%, tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 5,59%, IPM diproyeksikan sebesar 67,92, Gini ratio diproyeksikan sebesar 0,28 dan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 2,51%. Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana sasaran dan target yang harus dicapai sesuai RKPD pada tahun 2023, secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator Makro	Satuan	INDRAGIRI HILIR			
			2020	2021	Target 2022	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,34	4,44	4,90	4,78
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,93	6,18	4,97	5,59
3	IPM	Indeks	66,54	66,63	70,69	67,92
4	Gini Ratio	Indeks	0,310	0,297	0,32	0,28
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,35	2,66	3,84	2,51

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku PDRB Kabupaten Indragiri Hilir menurut harga berlaku pada tahun 2021 adalah 73.324.096,96 rupiah. Sedangkan sektor yang memberikan konstribusi terbesar adalah sektor pertanian perikanan dan kehutanan yaitu sebesar 47,54 persen diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan masing-masing 24,65 persen dan 14,99 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 adalah sebesar 4,44 persen. Angka ini maik dari tahun sebelumnya (2020: 0,34 persen).

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017 — 2021, dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017 — 2021

Kategori	INDRAGIRI HILIR				
	2017	2018	2019	2020	2021
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48,03	44,74	44,68	46,78	47,54
B Pertambangan dan Penggalian	0,83	1,97	0,96	0,79	1,03
C Industri Pengolahan	24,48	24,11	23,59	24,05	24.65
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F Konstruksi	5,57	6,12	6,27	5,88	5,77
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,50	16,91	17,53	16,14	14,99

Kategori	INDRAGIRI HILIR				
	2017	2018	2019	2020	2021
H Transportasi dan Pergudangan	1,08	1,14	1,15	0,93	0,90
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,44	0,48	0,47	0,38	0,39
J Informasi dan Komunikasi	0,56	0,61	0,64	0,65	0,62
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,55	0,60	0,59	0,58	0,56
L Real Estat	0,80	0,86	0,88	0,86	0,79
M,N Jasa Perusahaan	0.003	0,0034	0,0035	0,00	0,00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,73	1,78	1,76	1,66	1,53
P Jasa Pendidikan	0,56	0,61	0,63	0,62	0,57
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,15	0,16	0,18	0,18
R,S,T,U Jasa lainnya	0,46	0,52	0,53	0,42	0,39
Produk Domestik Regional Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2022

Perkiraan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 yaitu sebesar 4,78% ini masih dibawah target pertumbuhan ekonomi nasional pada target RKP (5,3% - 5,9%), pasca Pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir mulai naik diangka berkisar 4,44% pada tahun 2021. Harga komoditas andalan Kabupaten Indragiri Hilir seperti produk kelapa dan kelapa sawit selalu berfluktuatif menurun pada level yang rendah. Kondisi ini diperparah juga kedepannya dengan semakin menguatnya 'perang dagang' antara China dan USA sehingga turut menekan komoditas andalan Indragiri di Pasar Dunia. Meski perkiraan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir masih dibawah target, namun telah memberikan pertumbuhan positif sehingga juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada bulan April 2022, Kota Tembilahan mengalami inflasi sebesar 0,55 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,92. Tingkat inflasi tahun kalender April 2022 sebesar 2,33 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2022 terhadap April 2021) sebesar 2,91 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh meningkatnya sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,86 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,69 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,32 persen; kelompok transportasi sebesar 1,38 persen; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,36 persen. Sementara kelompok lainnya mengalami deflasi, antara lain kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,69 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,11 persen. Kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; dan kelompok pendidikan relatif stabil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut ini :

Tabel 3.3.
IHK dan Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Tembilahan April 2022, Tahun Kalender 2022, dan tahun ke tahun menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK April 2021	IHK Desember 2021	IHK April 2022	Tingkat Inflasi April 2022 [1] (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 [2] (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun [3] (%)	Andil Inflasi April 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	106,81	107,42	109,92	0,55	2,33	2,91	0,5500
Makanan, Minuman, dan Tembakau	109,76	108,43	111,84	0,86	3,14	1,90	0,2785
Pakaian dan Alas Kaki	102,20	102,20	102,79	0,15	0,58	0,58	0,0085
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,67	106,73	107,53	0,69	0,75	3,72	0,1400
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,20	105,44	108,25	0,32	2,67	4,89	0,0160
Kesehatan	102,35	102,51	102,51	0,00	0,00	0,16	0,0000
Transportasi	101,89	101,82	105,25	1,38	3,37	3,30	0,1243
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97,44	97,80	96,47	-0,69	-1,36	-1,00	-0,0322
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,50	104,19	109,74	0,00	5,33	7,06	0,0000
Pendidikan	106,41	110,92	110,92	0,00	0,00	4,24	0,0000
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	112,50	112,50	117,20	0,36	4,18	4,18	0,0316
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	119,45	121,38	126,04	-0,11	3,84	5,52	-0,0086

Keterangan:
[1] Persentase perubahan IHK April 2022 terhadap IHK Maret 2022.
[2] Persentase perubahan IHK April 2022 terhadap IHK Desember 2021.
[3] Persentase perubahan IHK April 2022 terhadap IHK April 2021.

Tingkat inflasi tahun kalender April 2022 sebesar 2,33 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2022 terhadap April 2021) sebesar 2,91 persen. Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 0,52 persen dan 1,13 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun untuk April 2021 terhadap April 2020 dan April 2020 terhadap April 2019 masing-masing sebesar 2,67 persen dan 2,63 persen. Target inflasi Kabupaten Indragiri Hilir ini akan dapat dicapai

apabila dapat mengendalikan atau menjamin ketersediaan dan distribusi ketiga kelompok yang memberi andil inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

3.1.2. Kemiskinan, IPM, Gini Ratio dan Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2021, angka kemiskinan Indragiri Hilir sebesar 6,18% atau naik sebesar 0,25% dari tahun 2020, dan Target RKPD pada tahun 2022, diperkirakan angka kemiskinan 5,56-4,97%, sedangkan proyeksi pada tahun 2023 sebesar 5,59%. Data diatas dapat dlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir

Indikator Makro	Realisasi		Target RKPD 2022	Target RKPD 2023
	Tahun 2020	Tahun 2021		
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,93	6,18	5,65-4,97	5,59

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

Pada tahun 2021 angka IPM Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 66,63. Target IPM RKPD Tahun 2022 sebesar 68,9. Proyeksi IPM Tahun 2023 sebesar 67,92. Oleh karena itu, untuk peningkatkan IPM Kabupaten Indragiri Hilir perlu komitmen yang kuat untuk peningkatan 4 komponen utama pembentuk IPM : Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Riil Per Kapita. Data IPM diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir

Indikator Makro	Realisasi		Target RKPD 2022	Target RKPD 2023
	Tahun 2020	Tahun 2021		
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	66,54	66,63	70,69	67,92

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

Pada tahun 2021 gini ratio Indragiri Hilir sedikit menurun 0,013 dari Tahun 2020 sebesar 0,301. Target RKPD tahun 2022 masih pada nilai sebesar 0,32 dan proyeksi 2023 sebesar 0,28.

Tabel 3.6
Gini Ratio Kabupaten Indragiri Hilir

Indikator Makro	Realisasi		Target RKPD 2022	Target RKPD 2023
	Tahun 2020	Tahun 2021		
Gini Ratio	0,310	0,297	0,32	0,28

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

Pada tahun 2020, pengangguran terbuka di kabupaten Indragiri Hilir menurun menjadi 4,35%. Pada tahun 2021 pengangguran terbuka di kabupaten Indragiri Hilir menurun menjadi 2,66%, Target tahun 2022, diperkirakan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 3,84%, namun akibat Pandemi COVID-19 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir bekisar 5,2 – 5,7%. Proyeksi tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,51%. Data diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir

Indikator Makro	Realisasi		Target RKPD 2022	Target RKPD 2023
	Tahun 2020	Tahun 2021		
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,35	2,66	3,84	2,51

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi kebijakan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dasar Hukum Pendapatan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terhimpun dan diterima di kas daerah serta tercatat sesuai

sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yang berasal dari pusat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

a. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD). Upaya intensifikasi pendapatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penyempurnaan sistem dan prosedur pungutan melalui peningkatan pelayanan masyarakat (*one day service*).
3. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah.

4. Peningkatan koordinasi antar-instansi terkait serta sosialisasi terhadap wajib pajak.
5. Melakukan Kajian Potensi Daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
6. Pembentukan Tim Yustisi dalam rangka penagihan pajak daerah yang terdiri dari Kejaksaan, Bagian Hukum, Inspektorat, Satpol PP serta Badan Pendapatan Daerah.

b. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya yang dilakukan antara lain adalah:

1. Pengkajian dan Pengusulan perubahan tarif pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi.
2. Melakukan kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan penerimaan dari Dana Perimbangan.
3. Pembentukan Tim Kajian untuk menggali potensi pendapatan daerah dari sub sektor Perkebunan.

Dalam implementasinya, kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memperlihatkan bahwa pada Tahun Anggaran 2020-2024 rata-rata realisasi Pendapatan Daerah cenderung mengalami penurunan (lihat Tabel 3.8). Pada tahun 2020 Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 1.984.556.950.189

menurun menjadi Rp.1.576.380.107.786 pada tahun 2022. Penurunan ini terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan dari Rp. 180.933.541.320 pada tahun 2020 menjadi Rp.226.601.412.440 pada tahun 2021.

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh komponen Lain-lain PAD yang Sah, komponen Pendapatan Pajak Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan, serta komponen Pendapatan Retribusi Daerah juga mengalami kenaikan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan dari Rp.112.493.318.523 pada tahun 2020 menjadi Rp. 160.428.034.743 pada tahun 2021. Sedangkan Pendapatan Pajak Daerah terjadi penuruan dari Rp. 55.499.238.207 pada tahun 2020 menjadi Rp. 44.024.750.419 pada tahun 2021.

Pendapatan Retribusi Daerah naik dari Rp. 2.991.279.434 pada tahun 2020 menjadi Rp. 5.360.066.600 pada tahun 2021. Selanjutnya Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan dari Rp. 9.949.705.156 pada tahun 2020 menjadi Rp. 16.788.560.678 pada tahun 2021.

Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan Kabupaten Indragiri Hilir menurun dari Rp. 1.707.840.440.112 pada tahun 2020 menjadi Rp.

1.659.989.777.970 pada tahun 2021. Seluruh komponen Dana Perimbangan, yakni: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami kenaikan kecuali Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam mengalami penurunan. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menurun dari Rp. 201.787.887.000 pada tahun 2020 menjadi Rp. 194.185.797.000 pada tahun 2021.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan dari Rp. 95.782.968.757 pada tahun 2020 menjadi Rp. 88.246.125.900 pada tahun 2021.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
4.	**PENDAPATAN DAERAH**					
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**180.933.541.320**	**226.601.412.440**	**182.522.701.764**	**200.558.143.550**	**220.613.957.905,00**
4.1.01	Pajak Daerah	55.499.238.207	44.024.750.419	44.372.729.622	47.475.457.247	52.223.002.971,70
4.1.02	Retribusi Daerah	2.991.279.434	5.360.066.600	4.240.022.500	4.993.272.500	5.492.599.750,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.949.705.156	16.788.560.678	11.925.469.840	14.500.000.000	15.950.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	112.493.318.523	160.428.034.743	121.984.479.802	133.589.413.803	146.948.355.183,30
4.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.707.840.440.112**	**1.659.989.777.970**	**1.322.139.006.022**	**1.366.835.727.290**	**1.503.519.300.019,00**
4.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.599.047.295.747	1.531.836.976.306	1.221.202.388.000	1.252.214.022.000	1.377.435.424.200,00
4.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.793.144.365	128.152.801.664	100.936.618.022	114.621.705.290	126.083.875.819,00
4.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**95.782.968.757**	**88.246.125.900**	**71.718.400.000**	**-**	**-**
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	95.782.968.757	88.246.125.900	71.718.400.000	-	-
	Jumlah Pendapatan	**1.984.556.950.189**	**1.974.837.316.310**	**1.576.380.107.786**	**1.567.393.870.840**	**1.724.133.257.924,00**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024 (diolah) dan Hasil Proyeksi

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu terus dilakukan dan untuk sumber-sumber lainnya perlu ditingkatkan. Penerapan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya perlu terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kemandirian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah

Mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024 ditunjukkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
5.	BELANJA					
5.1.	BELANJA OPERASI	1.369.383.454.984	1.408.986.978.397	1.432.316.775.873	1.438.541.160.865	1.582.395.276.951,50
5.1.01	Belanja Pegawai	772.661.201.566	764.273.215.126	759.346.953.393	732.355.890.225	805.591.479.247,50
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	535.532.315.991	597.142.175.024	616.464.369.350	637.144.139.245	700.858.553.169,50
5.1.04	Belanja Subsidi	4.000.000.000	2.000.000.000	-	-	
5.1.05	Belanja Hibah	56.176.452.427	42.848.164.879	54.173.573.130	67.958.131.395	74.753.944.534,50
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.013.485.000	2.723.423.368	2.331.880.000	1.083.000.000	1.191.300.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	264.520.277.990	182.879.144.563	140.139.735.807	233.756.188.579	257.131.807.436,90
5.2.01	Belanja Modal Tanah	88.500.000	5.000.000	450.000.000	-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.885.138.656	58.949.799.755	30.951.893.307	47.154.657.187	51.870.122.905,70
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.172.866.481	66.495.788.423	36.934.508.500	78.054.831.542	85.860.314.696,20
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.429.112.768	51.767.648.371	65.403.624.000	107.724.700.000	118.497.170.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.118.163.397	5.660.908.012	4.849.710.000	770.999.850	848.099.835,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.826.496.687	-	1.550.000.000	51.000.000	56.100.000,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.292.987.673	485.920.558	43.000.000.000	25.960.000.000	28.556.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.292.987.673	485.920.558	43.000.000.000	25.960.000.000	28.556.000.000,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	307.794.824.193	283.738.550.710	284.931.021.637	293.254.369.676	322.579.806.643,60
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.905.377.893	4.753.886.623	4.660.017.137	5.246.872.975	5.771.560.272,50
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	302.889.446.300	278.984.664.087	280.271.004.500	288.007.496.701	316.808.246.371,10
	Jumlah Belanja	1.962.991.544.840	1.876.090.594.228	1.900.387.533.317	1.991.511.719.120	2.190.662.891.032,00
	Total Surplus/(Defisit)	21.565.405.349	98.746.722.081	(324.007.425.531)	(424.117.848.280)	(466.529.633.108,00)
Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024 (diolah) dan Hasil Proyeksi						

Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada periode yang berkenaan cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu upaya meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir paling tidak selaras dengan peningkatan kebutuhan (biaya) yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari Tabel 3.9 dapat dilihat bahwa jumlah Belanja Daerah penurunan dari Rp. 1.962.991.544.840 pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.876.090.594.228 pada tahun 2021. Jumlah Belanja Operasi mengalami kenaikan dari Rp. 1.369.383.454.984 pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.408.986.978.397 pada tahun 2021. Jumlah Belanja Modal mengalami penurunan dari Rp. 264.520.277.990 pada tahun 2020 menjadi Rp. 182.879.144.563 pada tahun 2021. Belanja Transfer mengalami penurunan dari Rp. 307.794.824.193 pada tahun 2020 menjadi Rp. 283.738.550.710 pada tahun 2021.

Pada tahun 2023 jumlah Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan hasil dari kesepakatan Musrenbang yang berasal dari usulan masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan dan telah dibahas bersama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Rencana program prioritas tahun 2023 mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dan memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Riau tahun 2023. Peningkatan anggaran untuk program-program prioritas yang diikuti dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

yang baik maka diharapkan tingkat pencapaian indikator pembangunan pada tahun 2023 akan terwujud.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos

pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Tabel 3.10 memperlihatkan Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024. Dari tabel tersebut dapat dinyatakan Pembiayaan Netto, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan berfluktuatif dengan kecenderungan menurun.

Tabel 3.10.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi 2020	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
6	**PEMBIAYAAN**					
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**97.164.787.818**	**116.209.613.684**	**324.007.425.531**	**424.117.848.280**	**466.529.633.108**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	97.164.787.818	116.209.613.684	324.007.425.531	424.117.848.280	466.529.633.108
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**97.164.787.818**	**116.209.613.684**	**324.007.425.531**	424.117.848.280	**466.529.633.108**
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3.700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.700.000.000	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.700.000.000	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	**93.464.787.818**	**116.209.613.684**	**324.007.425.531**	**424.117.848.280**	**466.529.633.108**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**115.030.193.167**	**214.956.335.766**	-	**-**	-

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024 (diolah) dan Hasil Proyeksi

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang didominasi oleh penggunaan SILPA cenderung meningkat dari Rp. 97.164.787.818 pada tahun 2020 menjadi Rp 116.209.613.684 pada tahun 2021. Sebaliknya Pengeluaran Pembiayaan Daerah dari Rp. 3.700.000.000 pada tahun 2020 menjadi Rp. 0 pada tahun 2021. Konsekuensi dari penurunan Penerimaan Daerah dan Peningkatan Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Netto yang cenderung meningkat. Penerimaan Netto Kabupaten Indragiri Hilir meningkat dari Rp. 93.464.787.818 pada tahun 2020 menjadi Rp.116.209.613.684 pada tahun 2021.

BAB

4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: (1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; (2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD; (3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/ bidang yang

terkait keunggulan kompetitif daerah; dan (4) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 adalah;

"KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT"

Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

- KEJAYAAN INHIL artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapkan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- Semakin Maju berarti Melanjutkan pembangunan yang NYATA HASILNYA DAN BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.

- Bermarwah pengertiannya Pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan SPIRIT yang terus bergelora, BERKARYA NYATA UNTUK BERJAYA dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.
- Bermartabat artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Alur pemikiran dalam penyusunan misi tersebut berdasarkan isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena paling aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, dengan memperhitungkan segala peluang yang dimiliki. Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJMD ini merupakan hasil telaahan dan analisis terhadap

visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun Misi Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut:

Misi 1 : Menjaga tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum.

Misi 2 : Menjaga pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.

Misi 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.

Misi 4 : Menjaga Pembangunan SDM Yang Semakin Berkualitas Dan Berdaya Saing, Serta Meningkatkan Iman Dan Taqwa.

Misi 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Misi 6 : Menjaga kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.

Misi 7 : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada misi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun 2023.

Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 di samping mengacu pada visi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023, juga mengacu pada tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2023 dan Rancangan RKP Nasional Tahun 2023. Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Indragiri Hilir terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Indragiri Hilir yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun tujuan dan sasaran tahun (2023) dapat kami sajikan pada Tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran, Stretegi dan Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum						
1.1	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	Persentase	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	• Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengukuran , Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
			Nilai LPPD	Nilai		• Meningkatkan kualitas Pengawasan Daerah
			Opini BPK atas LKPD	Predikat		• Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase		• Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	Peningkatkan penerapan standar pelayanan publik	• Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan • Peningkatan integritas, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja Aparatur
Misi 2: Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah						
1.1	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar		Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	Indeks		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya kualitas pelayanan insfrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih (%)	Persentase	Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih	• Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)		Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	• Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat
		Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Persentase Penyediaan Infrastruktur (%)	Persentase	Peningkatan infrastruktur pekerjaan umum	• Meningkatkan fasilitas infrastruktur dasar masyarakat
		Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara per tahun (%)	Persentase	Peningkatan pergerakan orang/barang	• Menjamin ketersediaan pergerakan orang/barang melalui terminal dan dermaga
Misi 3: Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat						
1.1	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam		Persentase capaian pengelolaan sumber daya alam (%)	Persentase		
		Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	Persentase	peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan	• Dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perikanan
1.2	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan hidup	Persentase		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Udara b. Indeks Kualitas Air c. Indeks Kualitas Tutupan lahan	Indeks	Menjamin keberlangsungan pembangunan dengan tetap menjaga indeks kualitas lingkungan hidup	• Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara • Meningkatkan kualitas tutupan lahan
Misi 4: Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa						
1.1	Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	(Indeks)		
		Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	Menyelenggarakan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	• Peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan • Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan • Peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya derajad Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	• Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak • Pencegahan dan penanganan penyakit menular • Standarisasi pelayanan Kesehatan • Pengendalian dan pengawasan produksi alat kesehatan dan produk makanan yang higienis
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita	(Rp per kapita per tahun)	Meningkatan pendapatan masyrakat terutama masyrakat miskin	• Membuka Peluang usaha • Meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha mikro, usaha

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
						menengah, dan (usaha) besar • Peningkatan Bantuan sosial
Misi 5: Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan						
1.1	Meningkatkan Partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan daerah		Indeks Partisipasi Sosial	Indeks		
		Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi kelembagaan Masyarakat (%)	Persen	Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat	• Peningkatan partisipasi sosial kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah
1.2	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan		Status Indeks Desa Membangun			
		Meningkatnya keikutsertakan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat	Tingkat Keberdayaan Masyarakat	Indeks	Peningkatan Keberdayaan masyarakat dalam membangun Desa	• Menjamin tingkat keber dayaan masyarakat dalam pembangunan desa dalam rangka program DMIJ Plus Terintegrasi
		Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Menciptakan Ruang Perempuan dalam Pembangunan	• Kebijakan Responsif Gen-der dalam Pembangunan • Peningkatan akses perempuan dalam pembangunan
Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial						
1.1	Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentraman sosial		Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)			
		Meningkatnya keamanan, ketertiban dan keten-traman sosial masyarakat	Indeks Rasa Aman	(indeks)	• Meningkatkan rasa aman bagi masyarakat • Mengurangi Risiko Bencana	• Menjamin rasa aman masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari • Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
						kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	Persen	• Menguatkan Peran Keluarga dan Kesetaraan Gender • Pemenuhan hak anak dan perempuan secara berkesinambungan	• Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak • Peningkatkan cakupan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
Misi 7: Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran						
1.1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		PDRB per kapita (Rp)	Rp		
		Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	(%)	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan	• Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan/atau terdampak COVID-19 • Peningkatan Kemampuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin terdampak COVID-19
		Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(%)	Memperluas Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha	• Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja • membuka lapangan kerja sektor unggulan daerah
Misi 8: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah						
1.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya produksi sektor potensial	PDRB	(Milyar Rupiah)	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor potensial	• Peningkatan daya saing dan produktivitas industri unggulan • Peningkatan keunggulan daya tarik dan promosi wisata
		Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai investasi PMDN	(Milyar Rupiah)	Meningkatkan Daya tarik investasi masyarakat	• Peningkatan angka nilai investasi didaerah
		Meningkatnya nilai ekspor daerah	Nilai ekspor	(Milyar Rupiah)	Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri	• Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Tema tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen RKP Tahun 2023, telah ditetapkan sasaran dan Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

1. Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional Tahun 2023
    a. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
    b. Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan Pendidikan;
    c. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job;*
    d. Mendorong pemulihan dunia usaha;
    e. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
    f. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim;
    g. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi;
    h. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
2. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023
    a. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;

b. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;

c. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;

d. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

e. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

f. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan

g. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Beberapa hal penting terkait Sasaran dan prioritas pembangunan RKP 2023 dengan dokumen perencanaan daerah adalah :

1. Menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Sinergi perencanaan pembangunan antara RKPD dengan RKP;
3. Penguatan koordinasi tingkat pusat dan daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional =>Tematik Holistik Integratif dan Spasial (THIS)
4. Integrasi sumber pendanaan dari APBD, BUMD dan Swasta untuk kegiatan prioritas;
5. Kesiapan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan *Major Projec*t untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023

Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan Tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2023 di samping mengacu pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024, juga mengacu pada tema RKP Nasional Tahun 2023, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2023 sesuai dengan tema yaitu **"Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik Dan Daya Saing Daerah Yang Kompetitif".**

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kesejahteraan Masyarakat;
    a. Pendidikan
        1) Kebijakan
            - Peningkatan aksesbilitas pendidikan
            - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan tenaga pendidikan
            - Peningkatan mutu serta pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
            - Peningkatan mutu peserta didik, relevansi pendidikan menengah dan vokasi
        2) Fokus Pembangunan
            - Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan
            - Meningkatkan sarana prasarana dan operasional pendidikan
            - Meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang pendidikan

- Meningkatkan sarana prasaranan penunjang mutu pendidikan
- Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan
- Meningkatkan mutu peserta didik
- Meningkatkan kualitas serta relevansi pendidikan menengah dan vokasi

a. Kesehatan

1) Kebijakan

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan
- Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa.

2) Fokus Pembangunan

- Peningkatan sarana dan prasarana unit instalasi kesehatan di rumah sakit
- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup sehat
- Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
- Penurunan stunting.

b. Kemiskinan

1) Kebijakan

- Pemenuhan kebutuhan dasar pokok masyarakat

- Penyediaan jaminan kesehatan dan pendidikan masyarakat
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat

2) Fokus Pembangunan

- Intervensi terhadap penanganan kemiskinan ekstrim
- Penyediaan pendidikan gratis bagi masyarakat dan akses layanan kesehatan
- Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok
- Bantuan permodalan
- Optimalisasi dana desa.

c. Ketenagakerjaan

1) Kebijakan

- Mendorong peningkatan nilai tambah produk.
- Optimalisasi kegiatan program padat karya
- Peningkatan kualitas tenaga kerja.

2) Fokus Pembangunan

- Peningkatan nilai tambah produk (Hilirisasi)
- Peningkatan kegiatan yang bersifat padat karya
- Peningkatan sekolah formal dan informal.

2. Pelayanan Publik (Good Governance);
3. Daya Saing Daerah:

Pengembangan sektor :

b. Industri

1) Kebijakan

- Peningkatan nilai tambah dan output industri
- Peningkatan inovasi teknologi

2) Fokus Pembangunan

- Peningkatan kompetensi tenaga kerja
- Fasilitasi akses permodalan
- Fasilitasi akses pasar
- Peningkatan kualitas produk

c. Pertanian;

1) Kebijakan

- Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan (Padi), tanaman holtikultura dan perkebunan rakyat
- Meningktkan produksi daging sapi
- Pengembangan SDM Pertanian
- Meningkatkan kemitraan petani dan swasta

2) Fokus Pembangunan :

- Pengembangan penangkar benih/bibit
- Pengembangan inseminasi buatan (sapi)
- Penyediaan bibit bermutu
- Peningkatan sarana dan prasarana (aksesibilitas jalan dan tata air/irigasi)
- Peningkatan luas panen
- Pengembangan pasar lelang

- Pembangunan perkebunan kelapa terpadu
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM Pertanian dan Peternakan

d. Perikanan

1) Kebijakan

- Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan

2) Fokus Pembangunan

- Penyediaan benur bermutu
- Peningkatan sarana dan prasaranan budidaya perilanan laut/pesisir
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM Perikanan

e. Perdagangan

1) Kebijakan

- Peningkatan daya beli masyarakat
- Penumbuhan pusat distribusi logistik daerah
- Efisiensi jalur logistik

2) Fokus Pembangunan

- Mendorong peningkatan produk ekonomi kreatif
- Menjamin ketersediaan bahan pokok
- Pengendalian inflasi khususnya pada komponen perdagangan besar dan eceran
- Menjaga kelancaran jalur distribusi barang

f. Pariwisata

1) Kebijakan

- Meningkatkan jumlah kunjungan dan kenyamanan tamu hotel

2) Fokus Pembangunan

- Pengembangan destinasi wisata strategis

- Pengembangan kawasan khusus kuliner daerah

- Meningkatkan event-event pariwisata

- Mice (*Meeting, Incentive, Convention, and Exibition*)

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

Sejalan dengan Rancangan Tema RKP Tahun 2023 dan Tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2023, maka Tema RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 adalah **"Penguatan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Dan Optimalisasi Pelayanan Publik Untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Dalam Menjaga Marwah Dan Martabat Indragiri Hilir"**. Sasaran dan target yang akan dicapai pada tahun 2023 antara lain ; pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 4,78%, tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 5,59%, IPM diproyeksikan sebesar 67,92, Gini ratio diproyeksikan sebesar 0,28 dan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 2,51%.

Isu strategis di Kabupaten Indragiri Hilir dengan permasalahan pembangunan yang paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional, sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

   Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir terus ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik akan terus ditingkatkan.

2. Pemantapan pemerataan pembangunan.

   Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, serta perumahan perlu penanganan yang lebih baik lagi. hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, serta infrastruktur dasar lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

   Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi pertanian yang juga masih belum optimal, luas perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terluas di Indonesia, namun belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah harga kelapa yang

cenderung rendah. Kondisi-kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, serta berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal.

4. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

   Akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lambat. Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PMKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial dan akses lapangan pekerjaan perlu ditingkatkan.

5. Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing.

   Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Indragiri Hilir sampai pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal Seperti layanan PAUD dan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non-fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

6. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

   Pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan mayarakat di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya daerah perdesaan dan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Pengelolaan potensi sumberdaya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan.

   Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Produksi Perikanan, hasil perkebunan kelapa sawit, kelapa dan tanaman kelapa ini perlu didukung dengan industri hilir sehingga nilai tambah dapat diperoleh oleh Kabupaten Kabupaten Hilir.

   Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti (i) agriwisata yang berupa hamparan ladang padi dan kelapa, (ii) Bukit berbunga indragiri Hilir, (iii) Pantai Solop, (iv) Air Terjun Tembulan Rusa dan (v) Makam Syek Abdurrahman Siddiq Al Banjari. namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif belum berkembang, dimana objek-objek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana-prasarana yang memadai.

8. Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

   Upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial (kemiskinan dan pengangguran), disiplin dan kesadaran masyarakat serta penegakan aturan. Tantangan yang akan dihadapi ke depan yaitu meningkatkan profesionalisme aparat, optimalisasi fungsi institusi-institusi di

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat.

9. Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi

   Pada periode sebelumnya Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan Program yang bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Pada perkembangannya, dengan melihat progres positif yang telah dicapai oleh Desa terutama pada program pembangunan fisik dan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, maka dinilai perlu untuk menambah serta mengevaluasi apa saja yang bisa menjadi nilai tambah dari program ini maka diluncurkanlah yang disebut dengan Program DMIJ Plus Terintegrasi.

   Program ini sebagai wadah bagi seluruh Stakeholder untuk memberikan perhatiannya ke Desa dan Kelurahan.Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai porosnya. Setelah rampung pada pembangunan infrastruktur, membuka akses Desa untuk jalannya perekonomian Desa maka Desa diminta untuk mampu mengelola serta mengontrol potensi lokal Desa sehingga memiliki nilai ekonomis . Desa diharapkan menjadi pilar kuat Daerah dimana Desa memiliki sumber PADes sendiri dan pengelolaan nya secara efektif dan efisien dengan SDM yang berkualitas.

Dalam rangka kebijakan terkait penanganan dan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 untuk tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Indragiri

Hilir dan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2023 dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Peningkatan pelayanan dasar sarana prasarana kesehatan dan pendidikan;
2. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan segala aspek mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam;
3. Peningkatan ketahanan pangan, baik peningkatan produksi dalam rangka swasembada dan memperlancar akses pasar terhadap pangan;
4. Pemulihan Produktivitas Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM);
5. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM dan IKM yang terdampak;
6. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi sektor industri dan penguatan kesehatan masyarakat;
7. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
8. Fokus pada upaya penanganan masalah sosial dan kemisikinan yang diantaranya sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*;
9. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

10. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk fungsi kesehatan.

Adapun Arah Penanganan pasca *Covid*-19 Di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi
    a. Pembangunan infrastruktur, aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi;
    b. Pembangunan & perbaikan fasilitas layanan sektor tertentu dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja;
    c. Perbaikan sistem pelayanan investasi daerah.
2. Peningkatan Belanja Infrastruktur Daerah
    a. Pemanfaatan *creative financing*, seperti pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).
    b. Pembangunan infrastruktur melalui mekanisme kerja sama antar Daerah.
    c. Dukungan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (KDD) untuk pelaksanaan *creative financing* melalui skema pendanaan terintegrasi (*integrated funding*).
3. Peningkatan kemampuan pelayanan Rumah Sakit Daerah dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Adapun Strategi Arah Kebijakan RPJMD dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, dapat dilihat pada table 4.2 Berikut :

Tabel 4.2

Strategi Arah Kebijakan RPJMD dan

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OPD
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengukuran , Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatkan kualitas Pengawasan Daerah	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Inspektorat Daerah
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Badan Pendapatan Daerah
		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik

		Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	
Peningkatkan penerapan standar pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat Daerah
		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD
		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia

		Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	
		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kecamatan
	Peningkatan integritas, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja Aparatur	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kecamatan
Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Peningkatan infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatkan fasilitas infrastruktur dasar masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Peningkatan pergerakan orang/barang	Menjamin ketersediaan pergerakan orang/barang melalui terminal dan dermaga	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Dinas Perhubungan
peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan	Dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perikanan	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
		Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Dinas Perikanan
		Optimalisasi Lahan	Dinas

		Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Perkebunan,Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
		Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
		Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
		Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
		Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Dinas Perkebunan
		Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Menjamin keberlangsungan pembangunan dengan tetap menjaga indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Meningkatkan kualitas tutupan lahan	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Menyelenggarakan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah

		Kecamatan	
Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD Puri Husada Tembilahan, RSUD Tengku Sulung, RSUD Raja Musa
	Pencegahan dan penanganan penyakit menular	Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD Puri Husada Tembilahan, RSUD Tengku Sulung, RSUD Raja Musa
	Standarisasi pelayanan Kesehatan	Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Pengendalian dan pengawasan produksi alat kesehatan dan produk makanan yang higienis	Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD Puri Husada Tembilahan, RSUD Tengku Sulung, RSUD Raja Musa
		Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatan pendapatan masyrakat terutama masyrakat miskin	Membuka Peluang usaha	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, dan (usaha) besar	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Peningkatan Bantuan sosial	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat	Peningkatan partisipasi sosial kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah	Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta	Kecamatan

		Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	
Peningkatan Keberdayaan masyarakat dalam membangun Desa	Menjamin tingkat keber dayaan masyarakat dalam pembangunan desa dalam rangka program DMIJ Plus Terintegrasi	Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Menciptakan Ruang Perempuan dalam Pembangunan	Kebijakan Responsif Gen-der dalam Pembangunan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Peningkatan akses perempuan dalam pembangunan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatkan rasa aman bagi masyarakat	Menjamin rasa aman masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja
Mengurangi Risiko Bencana	Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kecamatan
		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Memperkuat Stabilitas	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

		Trantibunlinmas	
		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Menguatkan Peran Keluarga dan Kesetaraan Gender	Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pemenuhan hak anak dan perempuan secara berkesinambungan	Peningkatkan cakupan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Mempercepat Penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan/atau terdampak COVID-19	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Dinas Sosial
	Peningkatan Kemampuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin terdampak COVID-19	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Dinas Sosial
Memperluas Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha	Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
	membuka lapangan kerja sektor unggulan daerah	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor potensial	Peningkatan daya saing dan produktivitas industri unggulan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Peningkatan	Penyediaan	Dinas Pariwisata,

	keunggulan daya tarik dan promosi wisata	Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Meningkatkan Daya tarik investasi masyarakat	Peningkatan angka nilai investasi didaerah	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Adapun Program yang mendukung Prioritas Pembangunan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.3.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Kabupaten	**Program**
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pendaftaran Penduduk
	Program Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
	Program Aplikasi Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Pengelolaan Arsip
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Kepegawaian Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Perlindungan Perempuan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga

	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Program Perlindungan Khusus Anak
	Program Pengendalian Penduduk
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Penataan Bangunan Gedung
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Kawasan Permukiman
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Program Pengelolaan Pelayaran
Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Program Penanggulangan Bencana
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Program Penanganan Bencana
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian

	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi	Program Penataan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Pengembangan Umkm
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Dalam rangka mengatasi permasalahan di Kabupaten Indragiri Hilir, melalui pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang diperoleh dari hasil reses para anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun 2023, dapat dibagi pada beberapa Urusan, sebagaimana tabel 4.4. berikut :

Tabel : 4.4.

Urusan Pemerintahan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Kabupaten Indragiri Hilir

Urusan	Permasalahan
Pendidikan	Sarana Dan Prasarana Pendidikan Yang Masih Belum Memenuhi Standar Nasional Pendidikan
	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pelayanan Pendidikan Yang Belum Sesuai Dengan Kebutuhan
	Kurangnya Monitoring Dan Konsultasi Dari Fasilitas Pendidikan Di Daerah
	Kurangnya Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan
Kesehatan	Belum Adanya Kesadaran Masyarakat Tentang Pola Hidup Bersih Dan Sehat
	Kurangnya Penyediaan Layanan Ambulance Untuk Evakuasi Warga Yang Sakit
	Minimnya Pengetahuan Kader Posyandu
	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Yang Belum Sesuai Dengan Kebutuhan
	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Imunisasi Dasar Dan Lanjutan Bagi Masyarakat
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kondisi Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Yang Masih Kurang Dan Rusak
	Rendahnya Ketersediaan Air Bersih
	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pemerintah Yang Belum Sesuai Dengan Kebutuhan
	Kurangnya Infrastruktur Drainase Yang Memadai
	Perlunya Penanggulangan Longsoran Tanah Di Sekitar Jalan, Tebing Dan Sungai
	Terjadinya Pendangkalan Dan Penyempitan Badan Sungai
	Perlunya Peningkatan Akses Jalan Di Daerah Rawa/Sungai
	Perlunya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Umum Bagi Masyarakat
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni
	Kondisi Prasarana, Sarana Dan Utilitas (Psu) Lingkungan Permukiman Yang Kurang Memadai Dan Rusak
Lingkungan Hidup	Terbatasnya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
	Masih Terdapatnya Kerusakan Lingkungan Hidup
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Dukungan Sdm Untuk Trantibum
Kesatuan Bangsa Dan Politik	Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Instansi Vertikal
Sosial	Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan
	Kurangnya Kemampuan Yayasan Untuk Memenuhi Kebutuhan Operasional
	Meningkatnya Permasalahan Sosial Di Lingkungan

	Masyarakat
	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Panti
Ketenagakerjaan	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran
	Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Kependudukan
	Terbatasnya Akses Pelayanan Kependudukan
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Pengelolaan Bumdes Dan Pengelolaan Keuangan Desa
	Berkurangnya Nilai-Nilai Kegotong Royongan Di Masyarakat
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Tingginya Tingkat Ketimpangan Gender
	Perlunya Peningkatan Kapasitas Ibu-Ibu Rumah Tangga
Perhubungan	Masih Terbatasnya Infrastruktur Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika	Rendahnya Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Perlunya Bantuan Permodalan Usaha Bagi Masyarakat
	Minimnya Pengembangan Umkm
Perpustakaan	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Budaya Membaca
Kearsipan	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Arsip
Kelautan Dan Perikanan	Masih Rendahnya Produksi Perikanan Tangkap
	Kurangnya Penguatan Dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Perikanan
	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Budidaya Perikanan
	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Pariwisata	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Kepariwisataan
	Kurangnya Event Kepariwisataan Penunjang Promosi Wisata Daerah
	Kurangnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Sebagai Penggerak Industri Pariwisata
Kepemudaan Dan Olahraga	Masih Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Olahraga
	Perlunya Pelaksanaan Event Olahraga
	Kurangnya Pengembangan Pemuda Dalam Kewirausahaan
	Perlunya Pemupukan Semangat Kepemudaan
Kebudayaan	Belum Optimalnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya
	Masih Kurangnya Sarana Dan Prasarana Kebudayaan
Pertanian	Masih Rendahnya Produksi Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan
	Kurangnya Pendampingan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Penumbuhkembangkan Usaha Tani
	Kurangnya Teknologi Alat Pengolah Hasil Pertanian Pasca Panen

	Kurangnya Penyediaan Bibit Dan Sarana Prasarana Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan
	Kurangnya Penyediaan Bibit Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Untuk Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan
	Belum Tersedia Pengaturan Air Di Lahan Pertanian Dan Perkebunan
	Kurangnya Sarana Prasarana Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan
	Minimnya Sarana Prasarana Perbenihan Pertanian
	Kurangnya Penyediaan Neraca Bahan Makanan Dan Informasi Harga Pangan
Perdagangan	Minimnya Sarana Dan Prasarana Perdagangan
Perindustrian	Kurangnya Usaha Industri Kecil Dan Menengah / Home Industries
Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Terbatasnya Sdm Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Maupun Fungsional
Penanggulangan Bencana	Minimnya Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana
Kepala Daerah	Perlunya Penyediaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Ibadah Yang Memadai
	Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan Kapasitas Dewan
Kecamatan	Minimnya Sdm Kecamatan
	Sarana Dan Prasarana Kantor Atau Gedung Publik Belum Memadai

Tabel : 4.5

Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran

DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

PRIORITAS PEMBANGUNAN	**PERMASALAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN**
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendidikan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan
	Kurangnya monitoring dan konsultasi dari fasilitas pendidikan di daerah
	Kurangnya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan

Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Belum adanya kesadaran masyarakat tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat
	Kurangnya Penyediaan Layanan Ambulance untuk Evakuasi Warga yang Sakit
	Minimnya Pengetahuan Kader Posyandu
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan
	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan Imunisasi dasar dan lanjutan bagi masyarakat
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Masih Kurang dan Rusak
	Rendahnya Ketersediaan Air Bersih
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan
	Kurangnya Infrastruktur Drainase yang Memadai
	Perlunya Penanggulangan Longsoran Tanah di Sekitar Jalan, Tebing dan Sungai
	Terjadinya Pendangkalan dan Penyempitan Badan Sungai
	Perlunya Peningkatan Akses Jalan di Daerah Rawa/Sungai
	Perlunya Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Bagi Masyarakat
	Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni
	Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman yang Kurang Memadai dan Rusak
	Terbatasnya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
	Masih Terdapatnya Kerusakan Lingkungan Hidup
Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Dukungan SDM untuk Trantibum
	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Instansi Vertikal
Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan
	Kurangnya Kemampuan Yayasan Untuk Memenuhi Kebutuhan Operasional
	Meningkatnya Permasalahan Sosial di Lingkungan Masyarakat
	Kurangnya Sarana dan Prasarana Panti

	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran
	Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan dan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Terbatasnya sarana dan prasarana kependudukan
	Terbatasnya akses pelayanan kependudukan
Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Desa terhadap Pengelolaan BUMDes dan Pengelolaan Keuangan Desa
	Berkurangnya nilai-nilai kegotong royongan di masyarakat
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Tingginya Tingkat Ketimpangan Gender
	Perlunya Peningkatan Kapasitas Ibu-Ibu Rumah Tangga
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Masih Terbatasnya Infrastruktur Perhubungan
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Rendahnya Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Perlunya Bantuan Permodalan Usaha Bagi Masyarakat
	Minimnya Pengembangan UMKM
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Budaya Membaca
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Arsip
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Masih Rendahnya Produksi Perikanan tangkap
	Kurangnya Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Kurangnya Sarana dan Prasarana Perikanan
	Kurangnya Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
	Kurangnya Sarana dan Prasarana Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kepariwisataan

	Kurangnya Event Kepariwisataan Penunjang Promosi Wisata Daerah
	Kurangnya Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai Penggerak Industri Pariwisata
	Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Olahraga
	Perlunya Pelaksanaan Event Olahraga
	Kurangnya Pengembangan Pemuda dalam kewirausahaan
	Perlunya pemupukan semangat kepemudaan
	Belum Optimalnya Pelestarian Nilai-nilai Budaya
	Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Masih Rendahnya Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Kurangnya Pendampingan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Penumbuhkembangkan Usaha Tani
	Kurangnya Teknologi Alat Pengolah Hasil Pertanian Pasca Panen
	Kurangnya Penyediaan Bibit dan Sarana Prasarana Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Kurangnya Penyediaan Bibit Pertanian, Peternakan dan Perkebunan untuk Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Belum tersedia pengaturan air di lahan pertanian dan perkebunan
	Kurangnya Sarana Prasarana Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Minimnya Sarana Prasarana Perbenihan Pertanian
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Kurangnya Penyediaan Neraca Bahan Makanan dan Informasi Harga Pangan
	Minimnya Sarana dan Prasarana Perdagangan
	Kurangnya Usaha Industri Kecil dan Menengah / Home Industries
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Terbatasnya SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional

Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Minimnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
	Perlunya Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah yang Memadai
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan
	Peningkatan Kapasitas Dewan
	Minimnya SDM Kecamatan
	Sarana dan Prasarana Kantor atau gedung publik belum memadai

Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel 4.6. berikut :

Tabel 4.6.

Sandingan Antara Sasaran/Indikator Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH				INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	RPJMD 2018-2023		RANHIR RKPD 2023 (JUTA RUPIAH)
									TARGET	PAGU RPJMD 2023 (JUTA RUPIAH)	
			Misi 1 :								
			Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum								
			1.1.	**Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerah**			**Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)**		**3,29**		
				1.1.1.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**Nilai AKIP (Predikat)**		**BB**		
							Nilai LPPD (Nilai)		Sangat Tinggi		
							Opini BPK atas LKPD (predikat)		WTP		
							Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3		
5	1	2				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	1.190	1.590

5	1	3				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD,RENSTRA RKPD dan RENJA)	Persen	100	2.180	3.264
5	5	2				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	90	1.060	1.200
5	2	2				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persen	100	331.857	325.822
5	2	3				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	Persen	100	3.030	3.190
5	2	4				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	10,02	3.647	4.480
6	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti pada tahun berkenaan	Persen	100	2.548	3.653
6	1	3				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	Nilai	80	386	700
2	16	2				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi	Persen	100	3.573	
2	16	3				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Diskominfopers Kab.Inhil	Persen	100	451	922
							Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Persen	100	-	
2	20	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase documen data statistik sektoral daerah yang tepat waktu	Persen	100	51	118
2	21	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase PD yang menggunakan sistem persandian	Persen	100	51	51

				1.1.2.	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)**		**89,22**		
2	12	2				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	93	203	457
2	12	3				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	92,5	35	105
2	12	4				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan	Persen	90	146	340
2	18	4				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Penanaman Modal	Angka	3.80	1.910	1.270
2	18	5				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kedisiplinan pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha	Persen	80	517	218
2	18	6				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai	3.00	57	559
2	24	2				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	43	54	350
4	1	2				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan	Persen	100	27.790	33.651
4	1	3				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	100	5.075	4.541
4	2	2				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang di Fasilitasi	Persen	100	42.273	53.103
5	3	2				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yg Terselesaikan	Persen	100	2.019	3.839

5	4	2				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	52	1.370	1.281
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	90	8	18
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	11	35
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	36	53
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	17	274
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	0	-	
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	30	9
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	11	18
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	12	36
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	0	-	

7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	0	-	
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	34	98
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	5	4
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	2	22
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	19	34
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	13	25
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	-	0
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	11	22
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	9	19
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100		

						PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	28	58
		3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen			2.273
		3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen			740
		3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen			932
		3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen			223
		3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen			180
		3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen			879
		3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen			250
		3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen			809
		3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen			728
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	311	659
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	87	151

						KELURAHAN	dikecamatan				
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	156	348
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	110	218
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	207	227
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	146	344
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	5	3
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	364	836
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	125	262
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	157	265
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	23	
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	38	129
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	23	126
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	0		

7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	66	129
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	44	114
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	14	99
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	47	95
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	23	102
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	26	131
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	49	138
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	24	65
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	23	117
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	44	50
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	38	112
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	41	93
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	43	85

						PEMERINTAHAN UMUM	yang di selesaikan				
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	43	93
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	58	76
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	51	203
										-	
			Misi 2 :								
			Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah								
			2.1.	**Peningkatan kualitas infrastruktur dasar**			**Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur (%)**		**54,71**		
				2.1.1.	**Meningkatnya kualitas pelayanan insfrastruktur permukiman**		**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih (%)**		**52**		
							Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)		65,56		
1	4	2				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan	Persen	0,79	947	1.482
1	4	3				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	1,02	547	1.023
1	4	4				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh	Persen	1,02	271	477
1	4	5				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan Kualitas PSU di Lingkungan Perumahan	Persen	5,18	19.411	55.952

				2.1.2.	**Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum**		**Persentase Penyediaan Infrastruktur (%)**		**70,1**		
1	3	2				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Pengelolaan SDA Dalam Kondisi Baik	Persen	1	14.646	17.815
1	3	3				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	Persen	14,29	6.598	7.708
1	3	8				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan yang memiliki izin PBG per satuan bangunan	Persen	90	8.094	26.621
1	3	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	57	40.171	79.628
1	3	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM jasa Konstruksi yang terlatih	Persen	90	222	500
1	3	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	Persen	80	909	2.580
				2.1.3.	**Meningkatnya pelayanan transportasi**		**Persentase Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara per tahun (%)**		**100**		
2	15	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar	Persen	90,17	2.355	6.400
2	15	3				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	92,47	2.066	4.660
			Misi 3 :								
			Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat								
			3.1.	**Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam**			**Persentase capaian pengelolaan sumber daya alam (%)**		**65,54**		

				3.1.1.	**Meningkatnya produktivitas sektor pertanian**		**Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)**		**49,61**		
2	9	2				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan inprastruktur dan seluruh kemandirian pangan yang tersedia	Persen	75,71	8.012	1.330
2	9	3				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Persen	83,29	1.854	1.190
2	9	4				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan pangan Utama	Persen	66,67	155	338
2	9	5				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	Persen	85	32	100
3	25	3				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	ton	83000	6.191	4.355
3	25	4				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5500	5.010	1.739
3	25	6				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun	Kg/Kapita /Th	40,2	139	184
3	27	2				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persen	45,75	2.078	5.877
3	27	2				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Persen	90,95	2.606	2.415
3	27	3				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Persen	45,22	9.978	11.989
3	27	3				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persen	75,56	3.365	2.245
3	27	4				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,utuh dan	Persen	100	479	390

						VETERINER	Halal)				
3	27	5				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen	70	42	50
3	27	5				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen	42,5	1.227	1.852
3	27	6				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang di terbitkan dan evaluasi	Persen	90	126	500
3	27	7				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Persen	65	896	2.184
3	27	7				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Persen	73,04	796	1.201
				3.1.2.	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Indeks Kualitas Lingkungan hidup**		**60,05**		
							Indeks Kualitas Udara		93,98		
							Indeks Kualitas Air		53,78		
							Indeks Kualitas Tutupan Lahan		52,22		
2	11	2				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	Dokumen	2	252	299
2	11	3				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Indeks	92,5	398	1.003
2	11	4				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	Persen	35	134	1.250
2	11	5				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	Persen	100	39	

2	11	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	102	295
2	11	8				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			0	-	
2	11	9				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Persen	100	32	170
2	11	10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen	100	18	70
2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	Persen	90	6.678	7.511
			Misi 4 :								
			Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa								
			4.1.	**Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa**			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)**		**68,04**		
				4.1.1.	**Meningkatnya kualitas pendidikan**		**Indeks Pendidikan**		**7,38**		
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	100	146.460	41.836
							APK SD	Persen	106,17	-	
							APK SMP	Persen	104,14	-	
							APM SD	Persen	100	-	

							APM SMP	Persen	100	-	
1	1	3				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	Persen	99	344	621
							Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	Persen	70	-	
2	19	2				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing	Persen	55	540	1.395
2	19	3				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Atlit Berprestasi yang Meningkat	Persen	100	3.222	11.788
2	19	4				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan Kepramukaan	Persen	100	429	650
2	23	2				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Persen	45	80	2.743
				4.1.2.	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**		**Indeks Kesehatan**		**68,05**		
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	82.501	
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan Obat-obatan dan pendukungnya	Persen	100	995	878
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	165	231
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	253	866

1	2	3				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumberdaya Kesehatan (SDM_K) Yang Kompoten	Persen	98	3.160	1.469
1	2	4				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan sesuai Standard	Persen	100	534	1.261
1	2	5				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis	Persen	97	658	603
							Masyarakat (UKBM) Aktif				
1	2	5				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Pemberdayaan tentang perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	100	38	10
2	14	2				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk terhadap Program KKBPK	Persen	20,5	231	57
2	14	3				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	Persen	36,92	3.509	614
2	14	4				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB	Persen	75	3.351	320
				4.1.3.	**Meningkatnya daya beli masyarakat**		**Pengeluaran per kapita (Rp per kapita per tahun)**		**11604,12**		
2	17	2				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cakupan rekomendasi teknis Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	Persen	33	50	150
2	17	3				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	Persen	53,65	63	105
2	17	4				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	Unit	65	70	116
2	17	5				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan koperasi yang memiliki Kompetensi berdaya saing	Persen	78,53	125	74
2	17	6				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	Jumlah Koperasi Produksi yang diberdayakan	Unit	5	-	

						KOPERASI					
2	17	7				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan Usaha Mikro yang didata dan difasilitasi	Persen	72	867	2.010
2	17	8				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Skala UMKM yang meningkat	Unit	1407	584	610
			Misi 5 :								
			Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan								
			5.1.	**Meningkatkan Partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan daerah**			**Indeks partisipasi sosial**		**49**		
				5.1.1.	**Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan**		**Tingkat Partisipasi kelembagaan Masyarakat (%)**		**28**		
2	13	3				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan pelaksanaan Kerjasama antar desa	Persen	100	100	161
2	13	4				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel	Persen	100	7.425	20.569
2	13	5				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persen	100	1.259	1.288
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	24	21
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	48	146
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	27	59

7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	23	117
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	33	139
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	25	65
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	51	100
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	36	60
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	42	89
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	25	84
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	41	62
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	24	64
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	48	102
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	21	19
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	40	113
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	35	61

						PEMERINTAHAN DESA					
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	14	31
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	16	29
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	95	91
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	48	189
			5.2.	**Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan**			**Status Indeks Desa Membangun**	**Status**	**Maju**		
				5.2.1	**Meningkatnya keikutsertakan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat**		**Tingkat Keberdayaan Masyarakat**	**Persen**	**80**		
2	13	2				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	Persen	50,76	2.432	505
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	1.074	2.273
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	323	740
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	416	932
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	105	223
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	101	180

						KELURAHAN	dikecamatan				
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	403	879
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	99	250
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	371	809
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	338	728
				5.2.2	**Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan**		**Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)**	**Indeks**	**85**		
2	8	2				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	Persen	1,81	396	638
2	8	4				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam upaya peningkatan kuallitas keluarga	Persen	60	121	96
			Misi 6 :								
			Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial								
			6.1.	**Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentraman sosial**			**Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)**		**61,62**		
				6.1.1.	**Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial masyarakat**		**Indeks Rasa Aman**		**100**		

1	5	2				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan KDH	Persen	100	2.244	7.955
1	5	3				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	2.226	3.988
1	5	3				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan	Persen	0,011	1.579	4.714
1	5	4				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warganegara yg memperoleh pelayanan kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100	75	753
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	

7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan	Persen	0	-	

						KETERTIBAN UMUM	ketertiban umum				
8	1	2				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	455	625
8	1	3				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Persen	100	811	4.117
8	1	4				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persen	100	326	457
8	1	5				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	Persen	100	139	360
8	1	6				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	Persen	100	158	2.103
				6.1.2.	**Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak**		**Persentase Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)**		**100**		
2	8	3				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan	Persen	69	275	82
2	8	5				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	Persen	70	46	37
2	8	6				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak	Persen	85	202	136
2	8	7				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pendampingan dn Perlindungan Anak	Persen	70	516	104

			Misi 7 :								
			Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran								
			7.1.	**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**			**PDRB per kapita (Rp)**		**92,35**		
				7.1.1.	**Menurunnya tingkat kemiskinan**		**Persentase Angka Kemiskinan (%)**		**5**		
1	6	2				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial	Persen	100	2.143	1.387
1	6	3				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase korban Tindak Kekerasan yang menerima bantuan sosial	Persen	100	59	267
1	6	4				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	Persen	100	1.729	2.199
1	6	5				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	Persen	100	449	378
1	6	6				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	146	265
1	6	7				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	Persen	100	38	230
				7.1.2.	**Menurunnya tingkat pengangguran**		**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)**		**4,05**		
2	7	3				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	36.96	2.383	2.215
2	7	4				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja Yang ditempatkan	Persen	6,87	2.501	2.747
2	7	5				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	39	76	390

3	32	3				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi	Persen	100	67	586
3	32	4				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	Persen	100	34	294
			Misi 8 :								
			Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah								
			8.1.	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah**			**Laju pertumbuhan ekonomi (%)**		**4,66**		
				8.1.1.	**Meningkatnya produksi sektor potensial**		**PDRB (Milyar Rupiah)**		**28,71**		
2	22	2				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Keragaman Budaya yang Berkembang	Jenis	4	605	3.295
2	22	3				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Kesenian Tradisional yang Berkembang	Persen	40	38	477
2	22	5				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Cagar Budaya	4	31	1.150
3	26	2				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Meningkat	Persen	50	1.652	3.245
3	26	3				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Persen	50	528	885
3	26	5				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang	Persen	40	101	100
				8.1.2.	**Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah**		**Nilai investasi PMDN (Milyar Rupiah)**		**68521**		
2	18	2				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tingkat Pengembangan Penanaman Modal	Persen	60	1.150	1.228
2	18	3				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi	Pelaku Usaha	93	323	338

				8.1.3.	**Meningkatnya nilai ekspor daerah**		**Nilai ekspor (Milyar Rupiah)**		**415,35**		
3	30	2				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang Direkomendasikan	Persen	100	88	59
3	30	3				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif	Persen	100	1.553	1.494
3	30	4				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Harga Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kecamatan yang Dipantau	Persen	100	320	339
3	30	5				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	US Dolar	522,32	1.013	938
3	30	6				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang	Persen	93,65	795	612
3	30	7				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Persen	95	132	98
3	31	2				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Industri Kecil dan Menengah yang Dibina	Persen	100	2.904	2.951
3	31	3				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan Verifikasi Lapangan Izin Usaha Industri	Persen	100	36	29
3	31	4				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	100	27	25

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, maka penyusunan RKPD tahun 2023 tetap memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, meliputi :

Tabel 4.7.

Sinkronisasi Prioritas Nasional, Prioritas Propinsi dan Prioritas Kabupaten Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2023
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan
Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan
Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan
Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Daya Saing Daerah	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas
Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Kesejahteraan Masyarakat	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian

Tabel 4.8.

Keselarasan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD 2023 dengan PN RKP 2023

Prioritas Nasional	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Persen	100	Dinas Pendidikan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	Persen	106,2	Dinas Pendidikan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SMP	Persen	104,1	Dinas Pendidikan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	Persen	100	Dinas Pendidikan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SMP	Persen	100	Dinas Pendidikan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Sesuai Standar	Persen	99	Dinas Pendidikan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum Sesuai Standar	Persen	70	Dinas Pendidikan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	Dinas Kesehatan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumberdaya Kesehatan (Sdm_K) Yang Kompoten	Persen	98	Dinas Kesehatan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Obat-Obatan Dan Alat Kesehatan Sesuai Standard	Persen	100	Dinas Kesehatan

Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	Persen	97	Dinas Kesehatan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Obat-Obatan Dan Pendukungnya	Persen	100	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan Tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	Persen	100	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Pengelolaan Sda Dalam Kondisi Baik	Persen	1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Pedesaan	Persen	14,29	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Yang Memiliki Izin Pbg Per Satuan Bangunan	Persen	90	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	57	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Sdm Jasa Konstruksi Yang Terlatih	Persen	90	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	Persen	80	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Pengembangan Perumahan	Persen	0,79	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Kawasan Permukiman	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	1,02	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh	Persen	1,02	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Kualitas Psu Di Lingkungan Perumahan	Persen	5,18	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda Dan Perkada / Kebijakan KDH	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warganegara Yg Memperoleh Pelayanan Kebakaran Dan Non Kebakaran	Persen	100	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan	Persen	0,011	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	Persen	100	Dinas Sosial
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Korban Tindak Kekerasan Yang Menerima Bantuan Sosial	Persen	100	Dinas Sosial
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	Persen	100	Dinas Sosial
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	Persen	100	Dinas Sosial
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Persen	100	Dinas Sosial

Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terkelola	Persen	100	Dinas Sosial
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan	Persen	36.96	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Persen	6,87	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	39	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan	Persen	1,81	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Persen	69	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Pembinaan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Upaya Peningkatan Kuallitas Keluarga	Persen	60	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Bahan Informasi Terkait Gender Dan Anak Serta Perlindungan Dan Pemenuhan Anak	Persen	70	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak	Persen	85	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Pendampingan Dn Perlindungan Anak	Persen	70	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk Terhadap Program KKBPK	Persen	20,5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	Persen	36,92	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB	Persen	75	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cakupan Inprastruktur Dan Seluruh Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Persen	75,71	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Yang Memanfaatkan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Keluarga	Persen	83,29	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan

Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	66,67	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	Persen	85	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Yang Disusun	Dokumen	2	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	92,5	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Indeks	35	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pemenuhan Rth Yang Memenuhi Standar	Persen	35	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan Usaha Yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Dari Izin Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Yang Ditangani	Persen	90	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	93	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	92,5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah Yang Menggunakan Data Kependudukan	Persen	90	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Tertata Dengan Baik	Persen	50,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan Secara Akuntabel	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Sarana Dan Prasarana Fasilitas Llaj Yang Sesuai Standar	Persen	90,17	Dinas Perhubungan
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persen	92,47	Dinas Perhubungan
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi	Persen	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah Yang Jaringan Aplikasinya Diawasi Oleh Diskominfopers	Persen	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan

		Kab.Inhil			Statistik
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Aplikasi Informatika	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi Berbasis TIK	Persen	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Documen Data Statistik Sektoral Daerah Yang Tepat Waktu	Persen	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase PD Yang Menggunakan Sistem Persandian	Persen	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diterbitkan	Persen	33	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diawasi Dan Diperiksa	Persen	53,65	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya	Unit	65	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Cakupan Koperasi Yang Memiliki Kompetensi Berdaya Saing	Persen	78,53	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Produksi Yang Diberdayakan	Unit	5	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan Usaha Mikro Yang Didata Dan Difasilitasi	Persen	72	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Pengembangan Umkm	Jumlah Skala UMKM Yang Meningkat	Unit	1407	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tingkat Pengembangan Penanaman Modal	Persen	60	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Berminat Melakukan Investasi	Pelaku Usaha	93	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Penanaman Modal	Angka	3.80	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kedisiplinan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal Oleh Pelaku Usaha	Persen	80	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Terhadap Layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai	3.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Yang Meningkat	Persen	50	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Persen	50	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berkembang	Persen	40	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Berdaya Saing	Persen	55	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Atlit Berprestasi Yang Meningkat	Persen	100	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	Persen	100	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan

					Kebudayaan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Keragaman Budaya Yang Berkembang	Jenis	4	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Kesenian Tradisional Yang Berkembang	Persen	40	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Cagar Budaya	4	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Persen	45	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	43	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	83000	Dinas Perikanan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5500	Dinas Perikanan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun	Kg/Kapita /Th	40,2	Dinas Perikanan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persen	45,75	Dinas Perkebunan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Persen	45,22	Dinas Perkebunan

Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen	42,5	Dinas Perkebunan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Yang Di Terbitkan Dan Evaluasi	Persen	90	Dinas Perkebunan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	65	Dinas Perkebunan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	90,95	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian	Persen	75,56	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ketersediaan Produk Pangan Asal Hewan Yang Asuh(Aman,Sehat,Utuh Dan Halal)	Persen	100	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen	70	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	73,04	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Yang Direkomendasikan	Persen	100	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Distribusi Perdagangan Yang Representatif	Persen	100	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan Harga Barang Pokok Dan Barang Penting Lainnya Di Kecamatan Yang Dipantau	Persen	100	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	Us Dolar	522,3	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Standar Tera/Tera Ulang	Persen	93,65	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	95	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Industri Kecil Dan Menengah Yang Dibina	Persen	100	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Verifikasi Lapangan Izin Usaha Industri	Persen	100	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	100	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Bina Transmigrasi	Persen	100	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Bina Transmigrasi Dan Penempatan Transmigrasi Lokal	Persen	100	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Pemerintahan Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	Persen	100	Sekretariat Daerah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Perekonomian Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persen	100	Sekretariat Daerah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Di Fasilitasi	Persen	100	Sekretariat Dprd
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pengkoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Perangkat Daerah (RPJPD, RPJMD,RENSTRA RKPD Dan RENJA)	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Apbd Tepat Waktu	Persen	100	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD Yang Menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	Persen	100	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pad Terhadap Pendapatan	Persen	10,02	Badan Pendapatan Daerah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Asn Yg Terselesaikan	Persen	100	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Asn Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Persen	52	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Temuan Apip Yang Ditindak Lanjuti Pada Tahun Berkenaan	Persen	100	Inspektorat Daerah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	Nilai	80	Inspektorat Daerah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Ketahanan Sosial Dan Budaya	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	90	Kecamatan Tembilahan
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Tembilahan
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Tembilahan
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Tembilahan
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Tembilahan Hulu
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Tembilahan Hulu
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Tembilahan Hulu
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Tembilahan Hulu
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Tempuling

Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Tempuling
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Tempuling
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Tempuling
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Batang Tuaka
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Batang Tuaka
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Batang Tuaka
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Batang Tuaka
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	0	Kecamatan Concong
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Concong
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Concong
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Concong
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Enok
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Enok

Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Enok
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Enok
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Gaung
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Gaung
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Gaung
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Gaung
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Gaung Anak Serka
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Gaung Anak Serka
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Gaung Anak Serka
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Gaung Anak Serka
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	0	Kecamatan Kateman
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Kateman
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Kateman

Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Kateman
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	0	Kecamatan Kempas
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Kempas
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Kempas
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Kempas
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Kemuning
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Kemuning
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Kemuning
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Kemuning
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Keritang
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Keritang
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Keritang
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Keritang

Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Kuala Indragiri
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Kuala Indragiri
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Kuala Indragiri
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Kuala Indragiri
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Mandah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Mandah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Mandah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Mandah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Pelangiran
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Pelangiran
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Pelangiran
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Pelangiran
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Pulau Burung

Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Pulau Burung
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Pulau Burung
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Pulau Burung
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Reteh
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Reteh
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Reteh
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Reteh
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Sungai Batang
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Sungai Batang
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Sungai Batang
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Sungai Batang
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Tanah Merah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Tanah Merah

Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Tanah Merah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Tanah Merah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Teluk Belengkong
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Teluk Belengkong
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	Persen	0	Kecamatan Teluk Belengkong
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Teluk Belengkong

Tabel 4.9.

Konsistensi Prioritas Dan Sasaran Pembangunan pada RKPD tahun 2023 dengan

Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi 2023

Prioritas Propinsi	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	Perangkat Daerah
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Persen	100	Dinas Pendidikan
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	Persen	106,2	Dinas Pendidikan
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SMP	Persen	104,1	Dinas Pendidikan
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	Persen	100	Dinas Pendidikan
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SMP	Persen	100	Dinas Pendidikan
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	Persen	99	Dinas Pendidikan
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	Persen	70	Dinas Pendidikan
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	Dinas Kesehatan

Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumberdaya Kesehatan (SDM_K) Yang Kompoten	Persen	98	Dinas Kesehatan
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan sesuai Standard	Persen	100	Dinas Kesehatan
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	Persen	97	Dinas Kesehatan
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan ketersediaan Obat-obatan dan pendukungnya	Persen	100	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan tentang perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	100	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio Pengelolaan SDA Dalam Kondisi Baik	Persen	1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	Persen	14,29	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pembangunan Infrastruktur	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan yang memiliki izin PBG per satuan bangunan	Persen	90	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pembangunan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	57	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Pembangunan Infrastruktur	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase SDM jasa Konstruksi yang terlatih	Persen	90	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pembangunan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	Persen	80	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pembangunan Infrastruktur	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan	Persen	0,79	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Infrastruktur	Program Kawasan Permukiman	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	1,02	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Infrastruktur	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh	Persen	1,02	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Infrastruktur	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase peningkatan Kualitas PSU di Lingkungan Perumahan	Persen	5,18	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan KDH	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase warganegara yg memperoleh pelayanan kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan	Persen	0,011	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial	Persen	100	Dinas Sosial

Pelayanan Publik Yang Prima					
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase korban Tindak Kekerasan yang menerima bantuan sosial	Persen	100	Dinas Sosial
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	Persen	100	Dinas Sosial
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	Persen	100	Dinas Sosial
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	Dinas Sosial
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	Persen	100	Dinas Sosial
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	36.96	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja Yang ditempatkan	Persen	6,87	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	39	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	Persen	1,81	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan	Persen	69	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam upaya peningkatan kuallitas keluarga	Persen	60	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	Persen	70	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak	Persen	85	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Pendampingan dn Perlindungan Anak	Persen	70	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk terhadap Program KKBPK	Persen	20,5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	Persen	36,92	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB	Persen	75	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pengembangan Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cakupan inprastruktur dan seluruh kemandirian pangan yang tersedia	Persen	75,71	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengembangan Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Persen	83,29	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengembangan Pertanian	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Ketersediaan pangan Utama	Persen	66,67	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengembangan Pertanian	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	Persen	85	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pembangunan Infrastruktur	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	Dokumen	2	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pembangunan Infrastruktur	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	92,5	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pembangunan Infrastruktur	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Indeks	35	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	Persen	35	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pembangunan Infrastruktur	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan	Persentase Kegiatan Usaha yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

	Beracun (Limbah B3)				
Pembangunan Infrastruktur	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pembangunan Infrastruktur	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pembangunan Infrastruktur	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pembangunan Infrastruktur	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	Persen	90	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	93	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	92,5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan	Persen	90	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	Persen	50,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan pelaksanaan Kerjasama antar desa	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pembangunan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar	Persen	90,17	Dinas Perhubungan
Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	92,47	Dinas Perhubungan
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi	Persen	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Diskominfopers Kab.Inhil	Persen	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Aplikasi Informatika	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Persen	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik

Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase documen data statistik sektoral daerah yang tepat waktu	Persen	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase PD yang menggunakan sistem persandian	Persen	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan rekomendasi teknis Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	Persen	33	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	Persen	53,65	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	Unit	65	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Cakupan koperasi yang memiliki Kompetensi berdaya saing	Persen	78,53	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Produksi yang diberdayakan	Unit	5	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Cakupan Usaha Mikro yang didata dan difasilitasi	Persen	72	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Tata Kelola Pemerintahan Dan	Program Pengembangan Umkm	Jumlah Skala UMKM yang meningkat	Unit	1407	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Pelayanan Publik Yang Prima					
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tingkat Pengembangan Penanaman Modal	Persen	60	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi	Pelaku Usaha	93	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Penanaman Modal	Angka	3.80	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat kedisiplinan pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha	Persen	80	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai	3.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengembangan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Meningkat	Persen	50	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Pengembangan Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Persen	50	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Pengembangan Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang	Persen	40	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Pengembangan Pariwisata	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing	Persen	55	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan

Pengembangan Pariwisata	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Atlit Berprestasi yang Meningkat	Persen	100	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Pengembangan Pariwisata	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pembinaan Kepramukaan	Persen	100	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Pengembangan Pariwisata	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Keragaman Budaya yang Berkembang	Jenis	4	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Pengembangan Pariwisata	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Kesenian Tradisional yang Berkembang	Persen	40	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Pengembangan Pariwisata	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Cagar Budaya	4	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Persen	45	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	43	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Pengembangan Pertanian	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton	83000	Dinas Perikanan
Pengembangan Pertanian	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5500	Dinas Perikanan
Pengembangan Pertanian	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun	Kg/Kapita/Th	40,2	Dinas Perikanan
Pengembangan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persen	45,75	Dinas Perkebunan
Pengembangan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Persen	45,22	Dinas Perkebunan

Pengembangan Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen	42,5	Dinas Perkebunan
Pengembangan Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang di terbitkan dan evaluasi	Persen	90	Dinas Perkebunan
Pengembangan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	Persen	65	Dinas Perkebunan
Pengembangan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Persen	90,95	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengembangan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persen	75,56	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengembangan Pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,utuh dan Halal)	Persen	100	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengembangan Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen	70	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengembangan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	Persen	73,04	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengembangan Industri	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang Direkomendasikan	Persen	100	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pengembangan Industri	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif	Persen	100	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pengembangan Industri	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan Harga Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kecamatan yang Dipantau	Persen	100	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pengembangan Industri	Program Pengembangan	Ekspor Bersih Perdagangan	US Dolar	522,3	Dinas Perdagangan Dan

	Ekspor				Perindustrian
Pengembangan Industri	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat standar tera/tera ulang	Persen	93,65	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pengembangan Industri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Persen	95	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pengembangan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Industri Kecil dan Menengah yang Dibina	Persen	100	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pengembangan Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Verifikasi Lapangan Izin Usaha Industri	Persen	100	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pengembangan Industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	100	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan bina transmigrasi	Persen	100	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	Persen	100	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan	Persen	100	Sekretariat Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	100	Sekretariat Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang di Fasilitasi	Persen	100	Sekretariat Dprd

Prima					
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD,RENSTRA RKPD dan RENJA)	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persen	100	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	Persen	100	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	10,02	Badan Pendapatan Daerah
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan ASN yg Terselesaikan	Persen	100	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	52	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti pada tahun berkenaan	Persen	100	Inspektorat Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	Nilai	80	Inspektorat Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	90	Kecamatan Tembilahan

Prima					
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Tembilahan
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Tembilahan
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Tembilahan
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Tembilahan Hulu
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Tembilahan Hulu
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Tembilahan Hulu
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Tembilahan Hulu
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Tempuling

Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Tempuling
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Tempuling
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Tempuling
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Batang Tuaka
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Batang Tuaka
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Batang Tuaka
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Batang Tuaka
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	0	Kecamatan Concong
Tata Kelola Pemerintahan Dan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	Kecamatan Concong

Pelayanan Publik Yang Prima	Kelurahan	dikecamatan			
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Concong
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Concong
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Enok
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Enok
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Enok
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Enok
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Gaung
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Gaung

Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Gaung
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Gaung
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Gaung Anak Serka
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Gaung Anak Serka
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Gaung Anak Serka
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Gaung Anak Serka
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	0	Kecamatan Kateman
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Kateman
Tata Kelola Pemerintahan Dan	Program Koordinasi Ketentraman Dan	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan	Persen	0	Kecamatan Kateman

Pelayanan Publik Yang Prima	Ketertiban Umum	ketertiban umum			
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Kateman
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	0	Kecamatan Kempas
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Kempas
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Kempas
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Kempas
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Kemuning
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Kemuning
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Kemuning

Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Kemuning
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Keritang
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Keritang
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Keritang
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Keritang
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Kuala Indragiri
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Kuala Indragiri
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Kuala Indragiri
Tata Kelola Pemerintahan Dan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Kuala Indragiri

Pelayanan Publik Yang Prima	Desa				
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Mandah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Mandah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Mandah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Mandah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Pelangiran
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Pelangiran
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Pelangiran
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Pelangiran

Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Pulau Burung
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Pulau Burung
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Pulau Burung
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Pulau Burung
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Reteh
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Reteh
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Reteh
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Reteh
Tata Kelola Pemerintahan Dan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Sungai Batang

Pelayanan Publik Yang Prima	Pelayanan Publik				
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Sungai Batang
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Sungai Batang
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Sungai Batang
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Tanah Merah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Tanah Merah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Tanah Merah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Tanah Merah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan Teluk Belengkong

Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	Kecamatan Teluk Belengkong
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kecamatan Teluk Belengkong
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	Kecamatan Teluk Belengkong

Tabel 4.8.

Persandingan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Program Prioritas,

Serta Perangkat Daerah Penanggungjawab

Prioritas Propinsi	Prioritas Kabupaten	Program	Perangkat Daerah
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan

Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, RSUD Puri Husada Tembilahan, RSUD Tengku Sulung, RSUD Raja Musa
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD Puri Husada Tembilahan, RSUD Tengku Sulung, RSUD Raja Musa
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD Puri Husada Tembilahan, RSUD Tengku Sulung, RSUD Raja Musa
Daya Saing Daerah	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Daya Saing Daerah	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Daya Saing Daerah	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Daya Saing Daerah	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Daya Saing Daerah	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Daya Saing Daerah	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Daya Saing Daerah	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Daya Saing Daerah	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Daya Saing Daerah	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Daya Saing Daerah	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Penanggulangan Bencana	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kesejahteraan Masyarakat	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
Kesejahteraan Masyarakat	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
Kesejahteraan Masyarakat	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
Kesejahteraan Masyarakat	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
Kesejahteraan Masyarakat	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
Kesejahteraan Masyarakat	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial

Kesejahteraan Masyarakat	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Kesejahteraan Masyarakat	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Kesejahteraan Masyarakat	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Hubungan Industrial	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Daya Saing Daerah	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
Daya Saing Daerah	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan

Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Kesejahteraan Masyarakat	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan

Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan,Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Perkebunan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Daya Saing Daerah	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Kesejahteraan Masyarakat	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Kesejahteraan Masyarakat	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah
Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan

Tabel 4.10.
Sandingan Program Prioritas Dengan Program Penanggulangan Kemisikinan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	KURANG BEBAN	PAGU	OPD
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	41.836.032.303	Dinas Pendidikan
Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	87.687.329.854	Dinas Kesehatan, RSUD Puri Husada Tembilahan, RSUD Tengku Sulung, RSUD Raja Musa
Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.468.779.800	Dinas Kesehatan, RSUD Puri Husada Tembilahan, RSUD Tengku Sulung, RSUD Raja Musa
Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	602.600.000	Dinas Kesehatan, RSUD Puri Husada Tembilahan, RSUD Tengku Sulung, RSUD Raja Musa
TOTAL		**131.594.741.957**	
PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	**TINGAKATAN PENDAPATAN**		**OPD**
Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.215.056.900	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.747.410.000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	390.000.000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1.330.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.190.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	338.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan

Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	585.548.000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	294.452.000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.355.338.300	Dinas Perikanan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.738.845.850	Dinas Perikanan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	183.864.300	Dinas Perikanan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.877.080.400	Dinas Perkebunan,Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11.989.486.573	Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.183.572.000	Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
TOTAL		**35.418.654.323**	
PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	**KEMBANG USAHA**		**OPD**
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	338.551.500	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.951.176.800	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
TOTAL		**3.289.728.300**	
PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	**Pembanguan Masyarakat UKM**		**OPD**
Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi	PROGRAM PENATAAN DESA	505.498.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	160.770.850	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	20.569.406.380	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.287.931.450	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	73.727.600	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.010.399.050	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	610.264.700	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
TOTAL		**25.217.998.330**	
GRAND TOTAL		**195.521.122.910**	

BAB

5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan merupakan rencana kegiatan prioritas Kabupaten Indragiri Hilir yang berasal dari hasil rumusan dari berbagai forum pembahasan terhadap usulan masyarakat hasil musrenbang dan reses DPRD yang disinergikan dengan rencana kerja perangkat daerah. Pada Baba ini disajikan rekapitulasi rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 beserta pagu indikatif masing-masing program yang direncanakan. Selanjutnya juga diberikan daftar program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam penyusunan rencana kerja ini, program pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir mempedomani visi misi dan program Kepala Daerah terpilih yang dimuat pada Dokumen Perubahan RPJMD 2018-2023 sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 disajikan dalam beberapa Tabel berikut ini :

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Pagu Menurut Urusan Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp.)	Penanggung Jawab
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	3	12	57	383,132,011,753	Dinas Pendidikan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	23	93	224,484,006,068	Dinas Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	3	9	16	93,364,266,282	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	2	7	19	8,676,941,704	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	2	7	13	19,359,116,421	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7	18	46	157,568,151,162	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5	15	33	66,520,692,102	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2	10	31	25,043,801,398	Satuan Polisi Pamong Praja
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3	14	29	11,395,122,754	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2	10	27	11,090,176,188	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7	14	28	11,826,084,640	Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4	8	23	12,229,426,536	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6	12	15	1,092,896,122	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	4	6	11	2,958,000,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	8	14	30	17,447,125,918	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4	11	21	9,443,816,002	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5	10	31	29,264,600,369	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	13	37	7,106,574,783	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	3	15	27	20,261,230,784	Dinas Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	11	33	18,514,448,175	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	8	15	31	9,499,018,606	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	12	23	14,845,578,979	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4	15	34	22,167,556,581	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	1	117,900,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	50,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3	4	5	4,921,616,000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	7	19	7,914,263,905	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1	1	3	349,996,800	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	4	15	32	14,054,679,810	Dinas Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	5	5	4,230,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	6	14	40	33,092,289,625	Dinas Perkebunan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	6	18	36	21,602,219,933	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	7	15	29	9,823,298,023	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	3	4	3,005,157,350	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	2	2	6	880,000,000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Sekretariat Daerah	3	19	69	97,309,520,766	Sekretariat Daerah
Sekretariat Dprd	2	16	37	113,875,069,880	Sekretariat Dprd
Perencanaan	3	13	37	13,631,948,971	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Keuangan	3	13	44	348,253,102,746	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Keuangan	2	8	35	17,707,264,838	Badan Pendapatan Daerah
Kepegawaian	2	10	30	10,146,407,907	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pendidikan Dan Pelatihan	1	2	2	1,280,763,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Penelitian Dan Pengembangan	1	2	6	1,200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Inspektorat Daerah	3	10	27	12,823,681,043	Inspektorat Daerah
Kecamatan	5	10	17	10,548,243,647	Kecamatan Tembilahan
Kecamatan	6	12	21	4,978,111,145	Kecamatan Tembilahan Hulu
Kecamatan	5	10	21	5,708,770,644	Kecamatan Tempuling
Kecamatan	4	7	15	3,528,645,749	Kecamatan Batang Tuaka
Kecamatan	4	6	9	2,322,136,089	Kecamatan Concong
Kecamatan	5	8	15	4,508,200,167	Kecamatan Enok
Kecamatan	5	9	15	3,090,946,456	Kecamatan Gaung
Kecamatan	5	9	17	4,298,458,633	Kecamatan Gaung Anak Serka
Kecamatan	4	6	11	3,825,617,696	Kecamatan Kateman
Kecamatan	4	7	14	4,135,058,191	Kecamatan Kempas
Kecamatan	5	10	15	3,323,511,687	Kecamatan Kemuning

Kecamatan	5	10	19	3,508,762,436	Kecamatan Keritang
Kecamatan	5	10	18	2,710,432,079	Kecamatan Kuala Indragiri
Kecamatan	5	8	14	3,076,695,567	Kecamatan Mandah
Kecamatan	5	9	14	3,260,985,008	Kecamatan Pelangiran
Kecamatan	6	10	19	2,627,388,205	Kecamatan Pulau Burung
Kecamatan	5	9	16	4,429,372,357	Kecamatan Reteh
Kecamatan	5	8	15	2,716,541,667	Kecamatan Sungai Batang
Kecamatan	4	9	16	2,836,018,677	Kecamatan Tanah Merah
Kecamatan	4	6	12	2,425,649,863	Kecamatan Teluk Belengkong
Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	12	26	20,091,849,233	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	261	**645**	**1,515**	**1,991,511,719,120**	

Tabel 5.2.
Rekapitulasi Pagu Prioritas Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

NO	PRIORITAS DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp.)	Persentase (%)
1	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	137	322	758	1.128.455.820.728	56,66
2	Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	12	46	141	345.884.330.475	17,37
3	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	15	48	106	244.350.074.048	12,27
4	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	13	46	113	67.620.949.573	3,40
5	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	13	24	57	24.935.511.176	1,25
6	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	20	49	96	39.518.643.486	1,98
7	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2N)	28	67	149	89.154.315.286	4,48
8	Pemantapan DMIJ Plus Terintegrasi	5	10	31	29.264.600.369	1,47

9	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	18	33	64	22.327.473.979	1,12
	Total	**261**	**645**	**1515**	**1.991.511.719.120**	

Tabel 5.3
Sandingan Prioritas Daerah dan Indikator Kinerja Program
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

Prioritas Pembangunan	Program RKPD	Kinerja Program RKPD	Target Dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	100 Persen	Dinas Pendidikan
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	106,2 Persen	Dinas Pendidikan
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SMP	104,1 Persen	Dinas Pendidikan
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	100 Persen	Dinas Pendidikan
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SMP	100 Persen	Dinas Pendidikan
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Sesuai Standar	99 Persen	Dinas Pendidikan
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum Sesuai Standar	70 Persen	Dinas Pendidikan
Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	Dinas Kesehatan
Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumberdaya Kesehatan (Sdm_K) Yang Kompoten	98 Persen	Dinas Kesehatan
Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Obat-Obatan Dan Alat Kesehatan Sesuai Standard	100 Persen	Dinas Kesehatan
Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis	97 Persen	Dinas Kesehatan
Peningkatan Aksesibilitas Dan	Program Pemberdayaan	Masyarakat (Ukbm) Aktif		Dinas Kesehatan

Layanan Bidang Kesehatan	Masyarakat Bidang Kesehatan			
Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Obat-Obatan Dan Pendukungnya	100 Persen	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan Tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	100 Persen	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio Pengelolaan Sda Dalam Kondisi Baik	1 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Pedesaan	14,29 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Yang Memiliki Izin Pbg Per Satuan Bangunan	90 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	57 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Sdm Jasa Konstruksi Yang Terlatih	90 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (Rtrw/Rdtr)	80 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Pengembangan Perumahan	0,79 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman	Persentase Areal Kawasan Kumuh	1,02 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh	1,02 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Peningkatan Kualitas Psu Di Lingkungan Perumahan	5,18 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda Dan Perkada / Kebijakan Kdh	100 Persen	Satuan Polisi Pamong Praja
Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warganegara Yg Memperoleh Pelayanan Kebakaran Dan Non Kebakaran	100 Persen	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 Persen	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan	0,011 Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Ppks Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	100 Persen	Dinas Sosial
Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Korban Tindak Kekerasan Yang Menerima Bantuan Sosial	100 Persen	Dinas Sosial
Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Ppks Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	100 Persen	Dinas Sosial
Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Ppks Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	100 Persen	Dinas Sosial
Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100 Persen	Dinas Sosial
Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terkelola	100 Persen	Dinas Sosial
Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan	36.96 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	6,87 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (Pb)	39 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan	1,81 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	69 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Pembinaan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Upaya Peningkatan Kuallitas Keluarga	60 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Bahan Informasi Terkait Gender Dan Anak Serta Perlindungan Dan Pemenuhan Anak	70 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak	85 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Pendampingan Dn Perlindungan Anak	70 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan

				Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk Terhadap Program Kkbpk	20,5 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	36,92 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-Kb	75 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cakupan Inprastruktur Dan Seluruh Kemandirian Pangan Yang Tersedia	75,71 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Yang Memanfaatkan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Keluarga	83,29 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	66,67 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	85 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Yang Disusun	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	92,5 Indeks	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	35 Indeks	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pemenuhan Rth Yang Memenuhi Standar	35 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan Usaha Yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan Puu Lh Dari Izin Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Yang Ditangani	90 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	93 Persen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	92,5 Persen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Opd/Lembaga Pengguna Daerah Yang Menggunakan Data Kependudukan	90 Persen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pemantapan Dmij Plus Terintegrasi	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Tertata Dengan Baik	50,76 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pemantapan Dmij Plus Terintegrasi	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pemantapan Dmij Plus Terintegrasi	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan Secara Akuntabel	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pemantapan Dmij Plus Terintegrasi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Sarana Dan Prasarana Fasilitas Llaj Yang Sesuai Standar	90,17 Persen	Dinas Perhubungan
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	92,47 Persen	Dinas Perhubungan
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah Yang Jaringan Aplikasinya Diawasi Oleh Diskominfopers Kab.Inhil	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall	Program Aplikasi Informatika	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi Berbasis Tik	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika,

Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan				Persandian Dan Statistik
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Documen Data Statistik Sektoral Daerah Yang Tepat Waktu	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pd Yang Menggunakan Sistem Persandian	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diterbitkan	33 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diawasi Dan Diperiksa	53,65 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Jumlah Ksp/Usp Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya	65 Unit	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Cakupan Koperasi Yang Memiliki Kompetensi Berdaya Saing	78,53 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Produksi Yang Diberdayakan	5 Unit	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Cakupan Usaha Mikro Yang Didata Dan Difasilitasi	72 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pengembangan Umkm	Jumlah Skala Umkm Yang Meningkat	1407 Unit	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tingkat Pengembangan Penanaman Modal	60 Persen	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Berminat Melakukan Investasi	93 Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Terhadap Layanan Penanaman Modal	3.80 Angka	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kedisiplinan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal Oleh Pelaku Usaha	80 Persen	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Terhadap Layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	3.00 Nilai	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Yang Meningkat	50 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	50 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berkembang	40 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Berdaya Saing	55 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Atlit Berprestasi Yang Meningkat	100 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan

Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	100 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Keragaman Budaya Yang Berkembang	4 Jenis	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Kesenian Tradisional Yang Berkembang	40 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Penyediaan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	4 Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	45 Persen	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	43 Persen	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	83000 Ton	Dinas Perikanan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	5500 Ton	Dinas Perikanan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun	40,2 Kg/Kapita/Th	Dinas Perikanan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Dan Pengembangan Sarana Perkebunan	45,75 Persen	Dinas Perkebunan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	45,22 Persen	Dinas Perkebunan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan Opt	42,5 Persen	Dinas Perkebunan

Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Yang Di Terbitkan Dan Evaluasi	90 Persen	Dinas Perkebunan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani	65 Persen	Dinas Perkebunan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	90,95 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian	75,56 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ketersediaan Produk Pangan Asal Hewan Yang Asuh(Aman,Sehat,Utuh Dan Halal)	100 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan Opt	70 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani	73,04 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Yang Direkomendasikan	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Distribusi Perdagangan Yang Representatif	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan Harga Barang Pokok Dan Barang Penting Lainnya Di Kecamatan Yang Dipantau	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	522,3 Us Dolar	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Standar Tera/Tera Ulang	93,65 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	95 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Industri Kecil Dan Menengah Yang Dibina	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Verifikasi Lapangan Izin Usaha Industri	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Bina Transmigrasi	100 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Bina Transmigrasi Dan Penempatan Transmigrasi Lokal	100 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Pemerintahan Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100 Persen	Sekretariat Daerah
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Perekonomian Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100 Persen	Sekretariat Daerah
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Di Fasilitasi	100 Persen	Sekretariat Dprd
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program Rpjmd Kedalam Rkpd	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pengkoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan		Perangkat Daerah (Rpjpd, Rpjmd,Renstra Rkpd Dan Renja)		
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	90 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Apbd Tepat Waktu	100 Persen	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Opd Yang Menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	100 Persen	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pad Terhadap Pendapatan	10,02 Persen	Badan Pendapatan Daerah
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Asn Yg Terselesaikan	100 Persen	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Asn Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	52 Persen	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Temuan Apip Yang Ditindak Lanjuti Pada Tahun Berkenaan	100 Persen	Inspektorat Daerah

Masyarakat Di Kecamatan				
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	80 Nilai	Inspektorat Daerah
Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Ketahanan Sosial Dan Budaya	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	90 Persen	Semua Kecamatan
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Semua Kecamatan
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	100 Persen	Semua Kecamatan

Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan				
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Di Selesaikan	100 Persen	Semua Kecamatan
Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Semua Kecamatan
Penunjang Prioritas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi	100 Persen	Semua Opd

Tabel 5.4
Sandingan Prioritas Daerah Untuk Indikator Sasaran Dan Indikator Kinerja program Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengelolaan Pendidikan	APS SD
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengelolaan Pendidikan	APS SMP
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Lembaga Paud Yang Menerapkan Pendidikan Muatan Lokal
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan

	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Obat-Obatan Dan Pendukungnya
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Obat-Obatan Dan Pendukungnya
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan Dalam Kondisi Baik
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan Dalam Kondisi Baik
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan/Gedung Dalam Kondisi Baik
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Sdm Jasa Konstruksi Yang Terlatih
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (Rtrw/Rdtr)
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Program Kawasan Permukiman	Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan

	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Peningkatan Psu
	Angka Pelanggaraan Trantibmas	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda Dan Perkada / Kebijakan Kdh
	Angka Pelanggaraan Trantibmas	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan
	Angka Pelanggaraan Trantibmas	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran
	Angka Pelanggaraan Trantibmas	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Dan Non Kebakaran
	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Korban Tindak Kekerasan Yang Menerima Bantuan Sosial
	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terkelola
	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peresentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan
	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (Pb)
	Indeks Inovasi Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Yang Memanfaatkan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Keluarga
	Indeks Inovasi Daerah	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan
	Indeks Inovasi Daerah	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Yang Disusun

	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pemenuhan Rth Yang Memenuhi Standar
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Limbah B3 Dan Bahan Berbahaya Lainnya Yang Dikelola
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan,Izin Pplh Dan Puu Lh Dari Izin Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah
	Indeks Inovasi Daerah	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
	Indeks Inovasi Daerah	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Lingkungan Yang Ditindaklanjuti
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Yang Ditangani
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Rata-Rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Prediket)	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk Ber-Ktp Per Satuan Penduduk
	Rata-Rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Prediket)	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan
	Rata-Rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Prediket)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Opd/Lembaga Pengguna Daerah Yang Menggunakan Data Kependudukan
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	Partisipasi Lembaga Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Tertata Dengan Baik

	Partisipasi Lembaga Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa
	Partisipasi Lembaga Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan Secara Akuntabel
	Partisipasi Lembaga Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Dan Masyarakat Dalam Membangun Desa
Peningkatan Fungsi Terminal Bandar Laksamana Indragiri Menjadi Terminal Penumpang Dan Barang	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Presentase Sarana Dan Prasarana Fasilitas Llaj Yang Sesuai Standar
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
	Rata-Rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Prediket)	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi
	Rata-Rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Prediket)	Program Aplikasi Informatika	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi Berbasis Tik
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif
	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berdaya Saing
	Nilai Investasi Daerah (Rp.Milyar)	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Terhadap Layanan Penanaman Modal

	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan Kepramukaan
	Rata-Rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Prediket)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Dan Statistik Yang Terintegrasi
	Rata-Rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Prediket)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pd Yang Menggunakan Sistem Persandian
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Keragaman Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan Festival Budaya
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Penyelenggaraan Festival Kesenian Tradisional
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan
	Nilai Akip (Predikat)	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip Daerah Yang Disimpan Dan Dilestarikan Pada Lkd
	Nilai Akip (Predikat)	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Prasarana Pariwisata Yang Terpenuhi
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pembinaan Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Indeks Inovasi Daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertani an	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Indeks Inovasi Daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian

	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ketersediaan Produk Pangan Asal Hewan Yang Asuh(Aman,Sehat,Utuh Dan Halal)
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan Opt
	Indeks Inovasi Daerah	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Yang Difasilitasi
	Indeks Inovasi Daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Distribusi Perdagangan Yang Representatif
	Indeks Inovasi Daerah	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Lainnya
	Indeks Inovasi Daerah	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Standar Tera/Tera Ulang
	Indeks Inovasi Daerah	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Indeks Inovasi Daerah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Usaha Industri
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Pemanfaatan Sistem Inforamsi Industri Nasional
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Pemerintahan Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan
	Indeks Inovasi Daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Perekonomian Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
	Nilai Akip (Predikat)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Difasilitasi
	Nilai Akip (Predikat)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program Rpjmd Kedalam Rkpd

	Nilai Akip (Predikat) Nilai Akip (Predikat)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pengkoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Perangkat Daerah (Rpjpd, Rpjmd,Renstra Rkpd Dan Renja) Persentase Laporan Keuangan Opd Tepat Waktu Sesuai Sop
	Nilai Akip (Predikat)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Apbd Tepat Waktu
	Nilai Akip (Predikat)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Opd Yang Menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu
	Nilai Akip (Predikat)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pad Terhadap Pendapatan
	Nilai Akip (Predikat)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Inovasi Daerah Yang Diikutkan Dalam Iga
	Nilai Akip (Predikat)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	Angka Pelanggaraan Trantibmas	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	Angka Pelanggaraan Trantibmas	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat
	Angka Pelanggaraan Trantibmas	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Angka Pelanggaraan Trantibmas	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Ketahanan Sosial Dan Budaya
	Angka Pelanggaraan Trantibmas	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial
	Nilai Akip (Predikat)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aparatur Yang Mengikuti Diklat/ Pengembangan Kompetensi

Tabel 5.5
Data Program/Kegiatan RKPD Kab. Inhil Tahun 2023 Penunjang Program/Kegiatan RKPD Prov. Riau Tahun 2023

Prioritas Provinsi	Program Pada RKPD Kab. Indragiri Hilir	Program Provinsi Riau
Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sumber Daya Manusia	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Infrastruktur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Infrastruktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Infrastruktur	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung
Infrastruktur	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
Infrastruktur	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Infrastruktur	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
Infrastruktur	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
Infrastruktur	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Sumber Daya Manusia	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
Sumber Daya Manusia	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial

Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Sumber Daya Manusia	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana
Sumber Daya Manusia	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Sumber Daya Manusia	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
Sumber Daya Manusia	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan
Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Pertanian	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
Pertanian	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pertanian	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
Pertanian	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Pertanian	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Sumber Daya Manusia	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa
Sumber Daya Manusia	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Sumber Daya Manusia	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Sumber Daya Manusia	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk
Sumber Daya Manusia	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Sumber Daya Manusia	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Infrastruktur	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
Tata Kelola Pemerintahan Dan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan Publik Yang Prima		
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Pariwisata	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Pariwisata	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
Pariwisata	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Sumber Daya Manusia	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip
Pertanian	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Pertanian	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Pertanian	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata

Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian
Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
Industri	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
Industri	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Industri	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Industri	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Industri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
Tata Kelola Pemerintahan Dan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelayanan Publik Yang Prima		
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Selanjutnya untuk rencana program, kegiatan dan pagu per kegiatan dari setiap perangkat daerah disajikan pada Tabel 5.6 berikut :

Tabel 5.6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														DINAS PENDIDIKAN
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						383,132,011,753							684,656,800,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen		0 Persen	100 Persen	340,674,536,050						100 Persen	505,285,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	85 persen		0 persen	85 persen	224,658,000						85 persen	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	224,658,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	5 Dokumen	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100 persen		0 persen	100 persen	331,759,081,850						100 persen	500,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	331,759,081,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	12 Bulan	500,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
									DAK Non Fisik-TPG PNSD						DINAS PENDIDIKAN
									DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD						DINAS PENDIDIKAN
									DAK Non Fisik-TKG PNSD						DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100 persen		0 persen	100 persen	1,079,003,000						100 persen	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	1,079,003,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	5 Dokumen	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100 persen		0 persen	100 persen	5,993,675,600						100 persen	2,725,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	3 Paket	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	4,238,916,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	24 Paket	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	140,039,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	4 Paket	180,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	11 Paket	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				135 Laporan	522,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	135 Laporan	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				35 Dokumen	449,237,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	35 Dokumen	650,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	557,502,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	4 Dokumen	700,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	100 persen		0 persen	100 persen	1,055,617,600						100 persen	970,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	175,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	3 Laporan	270,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	880,417,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	2 Laporan	700,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**100 persen**		**0 persen**	**100 persen**	**562,500,000**						**100 persen**	**740,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN**
1.01.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	72,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	7 Unit	90,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	4 Unit	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	445,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	2 Unit	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK PAUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**41,836,032,303**						**100 Persen**	**178,371,800,000**	**DINAS PENDIDIKAN**
		APK SD	106.17 Persen		0 Persen	106.17 Persen							106.17 Persen		DINAS PENDIDIKAN
		APK SMP	104.14 Persen		0 Persen	104.14 Persen							104.14 Persen		DINAS PENDIDIKAN
		APM SD	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		DINAS PENDIDIKAN
		APM SMP	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Jumlah warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**	**100 persen**		**0 persen**	**100 persen**	**22,714,488,403**						**100 persen**	**115,549,800,000**	**DINAS PENDIDIKAN**
1.01.02.02.01.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				41 Ruang	5,165,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	41 Ruang	8,165,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.01.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				34 Unit	3,850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	34 Unit	4,900,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.01.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				18 Ruang	5,310,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	18 Ruang	6,310,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				8551 Paket	3,000,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	8551 Paket	10,124,800,000	DINAS PENDIDIKAN
															DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				510 Peserta Dic	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	510 Peserta Didik	1,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				519 Satuan Pen	147,491,353		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	519 Satuan Pendidikan	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				126 Satuan Pen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	126 Satuan Pendidikan	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				206 Peserta Dic	219,650,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	206 Peserta Didik	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				2062 Orang	2,897,288,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	2062 Orang	8,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan				0 Orang	664,529,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	0 Orang	700,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				100 Satuan Pen	278,767,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	100 Satuan Pendidikan	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				400 Orang	481,762,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	400 Orang	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah Pertama**	**100 persen**		**0 persen**	**100 persen**	**10,908,865,550**						**100 persen**	**41,212,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN**
1.01.02.02.02.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				24 Ruang	3,699,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	24 Ruang	4,580,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				11 Unit	1,270,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	11 Unit	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
									DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP						DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Unit	950,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	8 Unit	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2860 Paket	1,270,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	2860 Paket	2,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Dic	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	500 Peserta Didik	1,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				6255 Peserta D	420,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	6255 Peserta Didik	520,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				28 Peserta Didi	223,709,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	28 Peserta Didik	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0 Orang	1,524,731,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	0 Orang	3,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan				0 Orang	534,034,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	0 Orang	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				29 Satuan Pend	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penidikan	0	29 Satuan Pendidikan	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.02.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				140 Satuan Pen	266,240,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	140 Satuan Pendidikan	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0 Orang							0 Orang		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang**	**40 persen**		**0 persen**	**40 persen**	**7,356,736,100**						**40 persen**	**18,860,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN**
1.01.02.02.03.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				21 Unit	1,708,306,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	21 Unit	2,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
									Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus						DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.03.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				17 Unit	2,500,366,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	17 Unit	2,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
									Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus						DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.03.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	850,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	5 Unit	1,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
									Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus						DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.03.7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	1 Paket	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				162 Peserta Dic	98,162,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	162 Peserta Didik	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				162 Satuan Pen	202,912,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	162 Satuan Pendidikan	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				700 Orang	792,838,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	700 Orang	4,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan				600 Orang	337,451,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	600 Orang	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				120 Satuan Pen	664,870,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	120 Satuan Pendidikan	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				0 Orang	151,828,450		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	0 Orang	160,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan**	**25 persen**		**0 persen**	**25 persen**	**855,942,250**						**25 persen**	**2,750,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN**
1.01.02.02.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan				70 Orang	597,092,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	70 Orang	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				23 Satuan Pend	132,204,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	23 Satuan Pendidikan	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.02.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				0 Orang	126,644,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	0 Orang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum**	**70 Persen**		**46.43 Persen**	**70 Persen**	**621,443,400**						**70 Persen**	**1,000,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan	99 Persen		0 Persen	99 Persen							99 Persen		DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.02.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Jumlah SD dan SMP yang Menerapkan Pendidikan**	**100 persen**		**0 persen**	**100 persen**	**250,000,000**						**100 persen**	**400,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN**
1.01.03.02.01.4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				120 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	120 Orang	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.02.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Menerapkan Pendidikan Muatan**	**100 persen**		**0 persen**	**100 persen**	**371,443,400**						**100 persen**	**600,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN**
1.01.03.02.02.2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	371,443,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	0	1 Dokumen	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**187,990,862,611**							**244,074,501,621**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**98,946,407,003**						**100 Persen**	**104,308,793,428**	
1.02.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**796,650,400**						**100 Persen**	**1,020,000,000**	
1.02.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	363,753,900	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	9 Dokumen	700,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	432,896,500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	3 Laporan	320,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**81,060,227,403**						**100 Persen**	**81,693,365,915**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3006 ORANG/BI	80,820,227,403	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	3006 ORANG/BULAN	81,453,365,915	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	240,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	1 Laporan	240,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**320,000,000**						**100 Persen**	**320,000,000**	
1.02.01.02.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	320,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	1 Laporan	320,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang Mendapatkan Pelatihan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,024,752,700**						**100 Persen**	**2,588,241,200**	
1.02.01.02.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	627,718,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	1 Dokumen	736,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	397,034,700	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	15 Orang	1,852,241,200	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Administrasi Yang Terlaksana**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,173,947,000**						**100 Persen**	**2,186,114,640**	
1.02.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	325,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	17 Paket	1,572,400,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	179,254,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	8 Paket	87,393,600	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	66,849,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	17 Paket	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	1 Dokumen	120,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	562,344,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	1 Laporan	346,321,040	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**292,500,000**						**100 Persen**	**4,860,808,073**	
1.02.01.02.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Unit	545,920,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	232,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Unit	186,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terlaksana**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**13,785,429,500**						**100 Persen**	**9,698,743,600**	
1.02.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	120,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	680,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	560,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	103,552,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	82,842,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12,981,877,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	1 Laporan	8,935,901,600	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**492,900,000**						**100 Persen**	**1,941,520,000**	
1.02.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				170 Unit	168,900,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	170 Unit	433,520,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	248,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit	348,000,000	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				223 Unit							223 Unit		
1.02.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Ruang	76,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	9 Ruang	1,160,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**85,711,699,608**						**100 Persen**	**135,540,182,353**	
1.02.02.02.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perangkat Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**36,093,979,697**						**100 Persen**	**77,548,090,213**	
		Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan sesuai standar	Puskesmas		Puskesmas	30 Puskesmas							30 Puskesmas		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02.02.01.3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				20 Unit	298,758,240	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Puskesmas	20 Unit	3,128,275,200	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.01.4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	336,560,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Puskesmas	2 Unit	3,628,800,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.01.6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	21,829,458,460	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Puskesmas	1 Unit	21,767,986,160	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.01.9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				6 Unit	460,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	Puskesmas	6 Unit	800,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas				42 Unit	1,118,661,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Puskesmas	42 Unit	8,223,972,800	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30 puskesmas	969,586,400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Puskesmas	30 puskesmas	2,371,336,064	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas				30 puskesmas							30 puskesmas		
1.02.02.02.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				21 Puskesmas	1,190,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Puskesmas	21 Puskesmas	3,820,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	2,589,200,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Puskesmas	30 Unit	12,400,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	3,920,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Puskesmas	1 Paket	8,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	2,459,200,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Puskesmas	1 Paket	10,338,279,631	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				30 Unit	679,088,597	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Puskesmas	30 Unit	355,299,400	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan				30 puskesmas	242,867,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Puskesmas	30 puskesmas	422,377,600	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan Perangkat Daerah**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**47,149,582,400**						**100 Persen**	**53,770,043,940**	
1.02.02.02.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12335 Orang	276,377,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	12335 Orang	656,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11774 Orang	268,400,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	11774 Orang	672,000,080	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11214 Orang	48,527,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	11214 Orang	656,000,160	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55307 Orang	214,872,950	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	55307 Orang	632,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				42514 Orang	134,604,500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	42514 Orang	642,103,960	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				368969 Orang	245,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	368969 Orang	600,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				108461 Orang	249,600,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	108461 Orang	608,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1074 Orang	227,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1074 Orang	600,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2020 Orang	422,078,050	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	2020 Orang	600,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				17440 Orang	472,642,500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	17440 Orang	665,483,880	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				1 Dokumen	322,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	240,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	548,360,100	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	4 Dokumen	1,127,582,880	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	198,999,950	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	520,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	945,351,350	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	1,849,307,120	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				78 Dokumen	1,545,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	78 Dokumen	1,056,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional				1 Dokumen	464,392,100	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	338,073,640	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	693,380,950	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	315,788,960	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	327,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	0 Orang	600,000,000	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 persen							100 persen		
1.02.02.02.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Persen	373,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	100 Persen	680,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1 Dokumen	192,930,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	279,999,920	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	132,183,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	90,183,520	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	524,003,500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	1,360,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				36 Dokumen	33,510,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	36 Dokumen	33,546,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang				1 Paket	117,409,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	1 Paket	235,495,440	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	199,132,500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	346,321,040	DINAS KESEHATAN
		Persentase Desa/Kelurahan Sehat				60 Persen							60 Persen		
1.02.02.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan				100 Persen	289,198,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	100 Persen	579,127,140	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Persen	1,060,134,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	100 Persen	643,948,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				100 Persen	151,007,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	100 Persen	450,447,600	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				0 Unit	1,623,541,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	0 Unit	1,438,189,440	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				30 unit							30 unit		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				30 Unit							30 Unit		
1.02.02.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan				100 Persen	127,646,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	100 Persen	221,993,560	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini				100 Persen	1,115,808,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	100 Persen	479,997,600	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	130,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Unit	1,040,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Persentase Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,100,851,011**						**100 Persen**	**3,591,924,520**	
1.02.02.02.03.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	704,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	1 Dokumen	640,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.03.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	611,414,811		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	680,904,920	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.03.3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				1 Unit	785,436,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	2,271,019,600	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Sesuai Standar Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**367,286,500**						**100 Persen**	**630,123,680**	
1.02.02.02.04.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				28 Dokumen	172,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	28 Dokumen	248,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.04.4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				3 Dokumen	194,686,500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Dokumen	369,889,600	DINAS KESEHATAN
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumberdaya Kesehatan (SDMK) Yang Kompeten**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**1,468,779,800**						**100 Persen**	**1,805,322,480**	
1.02.03.02.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di**	**Persentase Kebutuhan dan Pendayaagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**1,330,389,400**						**100 Persen**	**1,564,635,360**	
1.02.03.02.02.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	150,276,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	262,869,600	DINAS KESEHATAN
1.02.03.02.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Sarana/				100 Persen	280,397,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	100 Persen	523,128,960	DINAS KESEHATAN
1.02.03.02.02.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	899,716,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	778,636,800	DINAS KESEHATAN
1.02.03.02.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**138,390,400**						**100 Persen**	**240,687,120**	
1.02.03.02.03.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Persen	138,390,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	240,687,120	DINAS KESEHATAN
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan sesuai Standard**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**1,261,376,200**						**100 Persen**	**1,236,203,520**	
1.02.04.02.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Tersedianya Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**542,799,400**						**100 Persen**	**425,600,040**	
1.02.04.02.01.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro				30 Sarana	392,799,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	30 Sarana	120,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.02.01.3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang				1 Sarana	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	1 Sarana	200,000,040	DINAS KESEHATAN
1.02.04.02.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase Produk Yang Tersertifikasi Industri Pangan dan Rimah Tangga Sebagai Izin Produksi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**170,380,000**						**100 Persen**	**122,400,000**	
1.02.04.02.03.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				30 Dokumen	170,380,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	30 Dokumen	122,400,000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.02.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi pada Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**234,196,800**						**100 Persen**	**438,603,480**	
1.02.04.02.04.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	234,196,800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	1 Dokumen	438,603,480	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		persentase sertifikasi laik higiene sanitasi pada tempat pengelolaan makanan (TPM), restoran dan depot air minum (DAM)				70 Persen							70 Persen		
1.02.04.02.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**						**150,000,000**							**120,000,000**	
1.02.04.02.05.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				30 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Dokumen	120,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.02.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**164,000,000**						**100 Persen**	**129,600,000**	
1.02.04.02.06.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut				0 Unit	164,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	0 Unit	129,600,000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Masyarakat (UKBM) Aktif**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**602,600,000**						**100 Persen**	**1,183,999,840**	
		Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
1.02.05.02.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**300,600,000**						**100 Persen**	**728,000,000**	
1.02.05.02.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				39 Dokumen	300,600,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	39 Dokumen	728,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.02.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Promosi Kesehatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**102,000,000**						**100 Persen**	**120,000,000**	
1.02.05.02.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	102,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	4 Dokumen	120,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.02.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**200,000,000**						**100 Persen**	**335,999,840**	
1.02.05.02.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				30 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	30 Dokumen	335,999,840	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,928,706,480**							**1,928,706,480**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,928,706,480**						**100 Persen**	**1,928,706,480**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,928,706,480**						**100 Persen**	**1,928,706,480**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	1,928,706,480		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	1,928,706,480	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,524,972,074**							**1,524,972,074**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,524,972,074**						**100 Persen**	**1,524,972,074**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,524,972,074**						**100 Persen**	**1,524,972,074**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	1,524,972,074		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	1,524,972,074	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,202,096,688**							**3,202,096,688**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**3,202,096,688**						**100 Persen**	**3,202,096,688**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**3,202,096,688**						**100 Persen**	**3,202,096,688**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	3,202,096,688		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	3,202,096,688	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,212,807,774**							**2,212,807,774**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,212,807,774**						**100 Persen**	**2,212,807,774**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,212,807,774**						**100 Persen**	**2,212,807,774**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	2,212,807,774		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	2,212,807,774	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,760,100,492**							**2,760,100,492**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,760,100,492**						**100 Persen**	**2,760,100,492**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,760,100,492**						**100 Persen**	**2,760,100,492**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	2,760,100,492		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	2,760,100,492	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,722,465,095**							**1,722,465,095**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,722,465,095**						**100 Persen**	**1,722,465,095**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,722,465,095**						**100 Persen**	**1,722,465,095**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	1,722,465,095		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	1,722,465,095	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,208,360,885**							**1,208,360,885**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,208,360,885**						**100 Persen**	**1,208,360,885**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,208,360,885**						**100 Persen**	**1,208,360,885**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	1,208,360,885		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	1,208,360,885	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,758,672,800**							**1,758,672,800**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,758,672,800**						**100 Persen**	**1,758,672,800**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,758,672,800**						**100 Persen**	**1,758,672,800**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	1,758,672,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	1,758,672,800	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,034,700,893**							**1,034,700,893**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,034,700,893**						**100 Persen**	**1,034,700,893**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,034,700,893**						**100 Persen**	**1,034,700,893**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	1,034,700,893		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	1,034,700,893	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,127,741,595**							**1,127,741,595**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,127,741,595**						**100 Persen**	**1,127,741,595**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,127,741,595**						**100 Persen**	**1,127,741,595**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	1,127,741,595		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	1,127,741,595	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,584,883,161**							**1,584,883,161**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,584,883,161**						**100 Persen**	**1,584,883,161**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,584,883,161**						**100 Persen**	**1,584,883,161**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				50 Persen	1,584,883,161		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	50 Persen	1,584,883,161	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**770,460,241**							**770,460,241**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**770,460,241**						**100 Persen**	**770,460,241**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**770,460,241**						**100 Persen**	**770,460,241**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	770,460,241		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	100 Persen	770,460,241	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,563,280,419**							**2,563,280,419**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,563,280,419**						**100 Persen**	**2,563,280,419**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,563,280,419**						**100 Persen**	**2,563,280,419**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	2,563,280,419		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	2,563,280,419	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,088,191,690**							**1,088,191,690**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,088,191,690**						**100 Persen**	**1,088,191,690**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,088,191,690**						**100 Persen**	**1,088,191,690**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				64 Persen	1,088,191,690		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	64 Persen	1,088,191,690	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**758,202,889**							**758,202,889**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**758,202,889**						**100 Persen**	**758,202,889**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**758,202,889**						**100 Persen**	**758,202,889**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	758,202,889		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	100 Persen	758,202,889	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,286,840,000**							**1,286,840,000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,286,840,000**						**100 Persen**	**1,286,840,000**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,286,840,000**						**100 Persen**	**1,286,840,000**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	1,286,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	100 Persen	1,286,840,000	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,207,600,000**							**2,207,600,000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,207,600,000**						**100 Persen**	**2,207,600,000**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,207,600,000**						**100 Persen**	**2,207,600,000**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	2,207,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	2,207,600,000	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**646,577,552**							**646,577,552**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**646,577,552**						**100 Persen**	**646,577,552**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**646,577,552**						**100 Persen**	**646,577,552**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	646,577,552		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	646,577,552	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,034,888,185**							**1,034,888,185**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,034,888,185**						**100 Persen**	**1,034,888,185**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,034,888,185**						**100 Persen**	**1,034,888,185**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	1,034,888,185		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	1,034,888,185	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,437,459,045**							**1,437,459,045**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,437,459,045**						**100 Persen**	**1,437,459,045**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,437,459,045**						**100 Persen**	**1,437,459,045**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	1,437,459,045		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	1,437,459,045	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**407,590,280**							**407,590,280**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**407,590,280**						**100 Persen**	**407,590,280**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**407,590,280**						**100 Persen**	**407,590,280**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	407,590,280		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	407,590,280	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,068,324,695**							**1,068,324,695**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,068,324,695**						**100 Persen**	**1,068,324,695**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,068,324,695**						**100 Persen**	**1,068,324,695**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	1,068,324,695		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	1,068,324,695	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,562,301,090**							**1,562,301,090**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,562,301,090**						**100 Persen**	**1,562,301,090**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,562,301,090**						**100 Persen**	**1,562,301,090**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	1,562,301,090		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	1,562,301,090	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,116,471,870**							**1,116,471,870**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,116,471,870**						**100 Persen**	**1,116,471,870**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,116,471,870**						**100 Persen**	**1,116,471,870**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	1,116,471,870		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	1,116,471,870	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**479,447,564**							**479,447,564**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**479,447,564**						**100 Persen**	**479,447,564**	
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**479,447,564**						**100 Persen**	**479,447,564**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	479,447,564		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	479,447,564	DINAS KESEHATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**93,364,266,282**							**108,389,832,464**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**92,475,926,116**						**100 Persen**	**97,174,832,464**	
1.02.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**27,500,000**						**100 Persen**	**40,000,000**	
1.02.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				6 Laporan	27,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	Karyawan/Karyawati RSUD Puri Husada	6 Laporan	40,000,000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Rumah Sakit**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**25,947,788,152**						**100 Persen**	**26,803,321,152**	
1.02.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				229 Orang/bula	25,947,788,152	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Karyawan/Karyawati Rumah Sakit	229 Orang/bulan	26,803,321,152	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1.02.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Rumah Sakit**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**52,474,000**						**100 Persen**	**210,150,000**	
1.02.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	52,474,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	20 Orang	210,150,000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya Administrasi Umum**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**414,542,324**						**100 Persen**	**1,216,464,000**	
1.02.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				19 Paket	87,810,324	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Karyawan/Karyawati dan	19 Paket	126,024,000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1.02.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	260,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Karyawan/Karyawati dan	5 Paket	900,000,000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1.02.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	66,732,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Karyawan/Karyawati dan	10 Laporan	190,440,000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**6,033,621,640**						**100 Persen**	**8,904,897,312**	
1.02.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				120 laporan	527,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Karyawan/karyawati dan	120 laporan	3,500,000,000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1.02.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				192 laporan	5,506,121,640	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Karyawan/karyawati dan	192 laporan	5,404,897,312	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan Pelaksanaan BLUD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**60,000,000,000**						**100 Persen**	**60,000,000,000**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	60,000,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Pendapatan dari BLUD			Karyawan/karyawati dan	1 Unit Kerja	60,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan ketersediaan Obat-obatan dan pendukungnya**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**878,340,166**						**100 Persen**	**11,015,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02.02.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Ketersediaan Sarana, prasarana dan penunjang medik sesuai standar**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**588,160,166**						**100 Persen**	**4,500,000,000**	
1.02.02.02.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				0 Paket	457,760,166	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Paket	1,500,000,000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		Jumlah Obat Rumah Sakit yang di adakan				1 Jenis							1 Jenis		
1.02.02.02.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				0 Paket	130,400,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Paket	1,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai Medis				1 Paket							1 Paket		
1.02.02.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**290,180,000**						**100 Persen**	**6,515,000,000**	
1.02.02.02.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	14,030,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Orang	15,000,000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi HIV yang di adakan				100 Orang							100 Orang		
1.02.02.02.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Pelayanan Penyakit menular dan tidak menular yang terlaksana				100 Persen	276,150,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	100 Persen	6,500,000,000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Pemberdayaan tentang perilaku Hidup Bersih dan Sehat**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**10,000,000**						**100 Persen**	**200,000,000**	
1.02.05.02.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan kebijakan PHBS dan berwawasan kesehatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**10,000,000**						**100 Persen**	**200,000,000**	
1.02.05.02.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0 Dokumen	10,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Karyawan/Karyawati dan Pengunjung RSUD Puri Husada	0 Dokumen	200,000,000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		Jumlah promosi Kesehatan Orang yang di lakukan promkes di Rumah Sakit				20 Kali							20 Kali		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**8,676,941,704**							**12,426,000,000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**8,445,637,704**						**100 Persen**	**11,531,000,000**	
1.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah**	**100 Orang**		**0 Orang**	**100 Orang**	**4,038,533,704**						**100 Orang**	**5,000,000,000**	
1.02.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	4,038,533,704	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	37 Orang/bulan	5,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Paket**		**0 Paket**	**100 Paket**	**104,464,000**						**100 Paket**	**470,000,000**	
1.02.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,688,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	1 Paket	30,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,056,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	1 Paket	40,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.01.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	50,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	80,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,400,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	10,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.01.02.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	34,680,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	60,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Kali	25,640,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	50 Kali	200,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor**	**100 Paket**		**0 Paket**	**100 Paket**	**2,197,000,000**						**100 Paket**	**3,041,000,000**	
1.02.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Unit	8,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1000 Unit	15,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Rekening	115,200,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Rekening	155,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				62 Orang	2,073,800,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	62 Orang	2,871,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Aset Daerah dan Barang Milik Daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara**	**100 Paket**		**0 Paket**	**100 Paket**	**5,640,000**						**100 Paket**	**20,000,000**	
1.02.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5,640,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Unit	20,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**	**100 Kegiatan**		**0 Kegiatan**	**100 Kegiatan**	**2,100,000,000**						**100 Kegiatan**	**3,000,000,000**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Kegiatan	2,100,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Insentif Daerah			0	1 Kegiatan	3,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**231,304,000**						**100 Persen**	**895,000,000**	
1.02.02.02.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Penunjang Medik sesuai Standar**	**100 Kegiatan**		**0 Kegiatan**	**1000 Kegiatan**	**190,304,000**						**1000 Kegiatan**	**585,000,000**	
1.02.02.02.01.8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	20,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	1 Unit	180,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.02.02.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	80,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	200,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.02.02.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				2 Kegiatan	74,304,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Kegiatan	170,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
									Dana Insentif Daerah						
1.02.02.02.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Kegiatan	16,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	1 Kegiatan	35,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.02.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat**	**100 Kegiatan**		**0 Kegiatan**	**100 Kegiatan**	**41,000,000**						**100 Kegiatan**	**310,000,000**	
1.02.02.02.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Kegiatan	1,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	10,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	40,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Pateh, Madani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	1 Kegiatan	300,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**19,359,116,421**							**22,700,000,000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**18,493,130,341**						**100 Persen**	**21,300,000,000**	
1.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**5,456,819,141**						**100 Persen**	**6,000,000,000**	
1.02.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bulan	5,456,819,141	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	59 Orang/bulan	6,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.02.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**160,000,000**						**100 Persen**	**250,000,000**	
1.02.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				32 Orang	160,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	32 Orang	250,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana Prasarana Aparatur Perkantoran**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**439,610,000**						**100 Persen**	**700,000,000**	
1.02.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	320,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	2 Paket	500,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.02.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53 Laporan	119,610,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	53 Laporan	200,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,936,701,200**						**100 Persen**	**4,350,000,000**	
1.02.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	240,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	1 Laporan	350,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.02.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan				15 Orang	2,696,701,200	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	15 Orang	4,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.02.01.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan Pelaksanaan BLUD**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**9,500,000,000**						**100 Persen**	**10,000,000,000**	
1.02.01.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	9,500,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	1 Unit Kerja	10,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Terpenuhi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**865,986,080**						**100 Persen**	**1,400,000,000**	
1.02.02.02.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Obat Rumah Sakit yang diadakan**	**Jenis**		**Jenis**	**1 Jenis**	**825,986,080**						**1 Jenis**	**1,300,000,000**	
1.02.02.02.01.8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Pemerintah				1 Unit	160,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	1 Unit	250,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.02.02.02.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	96,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	1 Unit	150,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.02.02.02.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Provinsi/Kabupaten/Kota				1 Paket	120,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	1 Paket	200,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.02.02.02.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat yang tersedia				1 Jenis	209,986,080	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Jenis	350,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.02.02.02.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	240,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	1 Paket	350,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.02.02.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**40,000,000**						**100 Persen**	**100,000,000**	
1.02.02.02.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				8 Dokumen	40,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	0	8 Dokumen	100,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**157,568,151,162**							**137,429,523,943**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**36.35 Persen**		**0 Persen**	**36.35 Persen**	**22,716,483,914**						**36.35 Persen**	**24,876,662,841**	
1.03.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**104,653,664**						**100 Persen**	**100,467,517**	
1.03.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	104,653,664		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	100,467,517	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**6,956,750,276**						**100 Persen**	**9,970,128,149**	
1.03.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				70 Orang	6,929,882,276	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	70 Orang	9,944,334,869	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan							0 Orang/bulan		
1.03.01.02.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				10 Dokumen	26,868,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	25,793,280	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**124,582,000**						**100 Persen**	**119,598,720**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	124,582,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	119,598,720	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				25 Diklat							25 Diklat		
1.03.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**12,949,217,650**						**100 Persen**	**12,431,248,944**	
1.03.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				90 Jenis	12,069,224,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	90 Jenis	11,586,455,664	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.03.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Jenis	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Jenis	153,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.03.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				10 Jenis	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Jenis	57,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.03.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				40 Eksemplar	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	40 Eksemplar	3,456,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.03.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				168 Kali	656,393,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	168 Kali	630,137,280	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
1.03.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,890,740,324**						**100 Persen**	**1,592,301,111**	
1.03.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersiaan kebutuhan surat menyurat				90 Persen	11,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	90 Persen	11,040,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
1.03.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	486,680,324		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	467,213,111	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Rekening yang dibayarkan				10 Rekening							10 Rekening		
1.03.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1,392,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	1,114,048,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah tenanga pelaksana yang dibayarkan				86 Orang							86 Orang		
1.03.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**690,540,000**						**100 Persen**	**662,918,400**	
1.03.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Unit	57,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	32 Unit	105,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Unit	24,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Ruang	220,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Ruang	211,718,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				89 Unit	275,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	89 Unit	264,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio Pengelolaan SDA Dalam Kondisi Baik**	**1 Persen**		**0 Persen**	**1 Persen**	**17,814,999,950**						**1 Persen**	**18,340,799,952**	
1.03.02.02.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik**	**1 Persen**		**0 Persen**	**1 Persen**	**11,612,258,250**						**1 Persen**	**12,386,167,920**	
1.03.02.02.01.4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sektoral dan Dokumen Perencanaan yang disusun				13 Dokumen	864,802,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Dokumen	398,210,544	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.03.02.02.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0 KM	520,456,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 KM	499,637,760	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Panjang Turap/Talud/Bronjong yang dibangun				30 meter							30 meter		
1.03.02.02.01.27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi				0 KM	10,177,771,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 KM	9,626,660,736	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Panjang saluran yang dinormalisasi				90000 meter							90000 meter		
1.03.02.02.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dikaji				0 Dokumen	49,228,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	47,258,880	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumla rekomendasi pengelolaan air baku/air permukaan yang dikeluarkan				5 Izin							5 Izin		
1.03.02.02.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik**	**1 Persen**		**0 Persen**	**1 Persen**	**6,202,741,700**						**1 Persen**	**5,954,632,032**	
1.03.02.02.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa (DIR) yang Direhabilitasi				10000 Meter	2,014,772,700		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	10000 Meter	1,934,181,792	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				0 KM							0 KM		
1.03.02.02.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang irgasi rawa (DIR) yang direhabilitasi				15000 Meter	4,187,969,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15000 Meter	4,020,450,240	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 KM							0 KM		
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Proporsi jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan**	**14.29 Persen**		**0 Persen**	**14.29 Persen**	**7,707,700,800**						**14.29 Persen**	**7,619,378,200**	
1.03.03.02.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SR SPAM Kabupaten dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**14.29 Persen**	**7,707,700,800**						**14.29 Persen**	**7,619,378,200**	
1.03.03.02.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen sektoral dan dokumen perencanaan yang tersedia				8 Dokumen	129,730,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Dokumen	1,015,050,300	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.03.03.02.01.3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR perkotaan dalam kondisi baik				3500 SR	5,988,111,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3500 SR	4,453,847,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				0 Liter/Detik			Dana Insentif Daerah				0 Liter/Detik		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.03.02.01.4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				0 SR	773,257,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 SR	1,300,480,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah SR perdesaan dalam kondisi baik				165 SR							165 SR		
1.03.03.02.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan				8 Rumah Tangg	816,601,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Rumah Tangga	850,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio bangunan yang memiliki izin PBG per satuan bangunan**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**26,620,754,450**						**90 Persen**	**7,908,000,000**	
1.03.08.02.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan**	**Persentase Gedung Pemerintah yang memiliki IMB/PBG**	**57 Persen**		**0 Persen**	**57 Persen**	**26,620,754,450**						**57 Persen**	**7,908,000,000**	
1.03.08.02.01.2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah				0 Dokumen	26,567,107,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	7,866,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Gedung Pemerintah yang memiliki izin PBG				5 Unit							5 Unit		
1.03.08.02.01.9	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan				0 Unit	53,647,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	42,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Bangunan yang memiliki izin PBG				74 Unit							74 Unit		
1.03.010	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap**	**57 Persen**		**0 Persen**	**57 Persen**	**79,628,211,948**						**57 Persen**	**75,777,600,000**	
1.03.010.02.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap**	**57 Persen**		**0 Persen**	**57 Persen**	**79,628,211,948**						**57 Persen**	**75,777,600,000**	
1.03.010.02.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	JJumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun				21 Dokumen	2,569,736,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	21 Dokumen	2,764,546,560	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.03.010.02.01.3	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				0 Dokumen	1,022,432,948		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	981,451,200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Dokumen Sektoral yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
1.03.010.02.01.5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				0 KM	299,523,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 KM	438,742,080	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.010.02.01.8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan dalam kondisi mantap				678.639 KM	45,863,388,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	678.639 KM	43,846,452,480	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				0 KM			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0 KM		
1.03.010.02.01.9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				5 KM	13,706,658,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 KM	13,158,391,680	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.010.02.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun				15 Unit	12,410,058,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Unit	11,661,175,680	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Panjang Jembatan yang Dibangun				0 M							0 M		
1.03.010.02.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi				10 Unit	3,024,002,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	2,231,041,920	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				0 M							0 M		
1.03.010.02.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				0 Dokumen	732,414,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	695,798,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jalan/Jembatan yang dilaksanakan				2 Dokumen							2 Dokumen		
1.03.011	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase SDM jasa Konstruksi yang terlatih**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**500,000,100**						**90 Persen**	**430,282,950**	
1.03.011.02.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Persentase tenaga terampil konstruksi yang terlatih**	**Persen**		**Persen**	**72 Persen**	**203,298,850**						**72 Persen**	**217,058,400**	
1.03.011.02.01.4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				0 Orang	203,298,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	217,058,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi				30 Orang							30 Orang		
1.03.011.02.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan sistem informasi jasa konstruksi yang dikelola**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**196,409,450**						**100 Persen**	**150,923,670**	
1.03.011.02.02.7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				0 Dokumen	196,409,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	150,923,670	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Data HSBU yang di update				1 Dokumen							1 Dokumen		
1.03.011.02.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Persentase badan Usaha yang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100,291,800**						**100 Persen**	**62,300,880**	
1.03.011.02.04.3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				0 Laporan	100,291,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	62,300,880	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan				1 Laporan							1 Laporan		
1.03.012	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)**	**80 Persen**		**0 Persen**	**80 Persen**	**2,580,000,000**						**80 Persen**	**2,476,800,000**	
1.03.012.02.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang yang dikeluarkan**	**Rumusan Kebijakan**		**Rumusan Kebijakan**	**1 Rumusan Ke**	**503,637,200**						**1 Rumusan Kebijakan**	**483,491,712**	
1.03.012.02.01.4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				0 Dokumen	503,637,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	483,491,712	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Penataan Ruang yang dilaksanakan				2 Dokumen							2 Dokumen		
1.03.012.02.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Tata Ruang yan disusun**	**Dokumen**		**Dokumen**	**1 Dokumen**	**1,222,121,900**						**1 Dokumen**	**1,173,237,024**	
1.03.012.02.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	1,222,121,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	1,173,237,024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Dokumen RRTR yang tersedia				1 Dokumen							1 Dokumen		
1.03.012.02.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data dan Dokumen Pemanfaatan Ruang**	**KKPR**		**KKPR**	**1 KKPR**	**464,726,700**						**1 KKPR**	**446,137,632**	
		Jumlah Dokumen Inventarisasi Pemanfaatan dan pengembangan lahan terkait investasi dan pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
1.03.012.02.03.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi Pemanfaatan dan pengembangan lahan terkait investasi dan pembangunan Daerah				1 Dokumen	464,726,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	446,137,632	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				0 Dokumen							0 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.012.02.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomendasi Informasi Tata Ruang yang dikeluarkan**	**Rekomendasi**		**Rekomendasi**	**180 Rekomend**	**389,514,200**						**180 Rekomendasi**	**373,933,632**	
1.03.012.02.04.3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				0 Kasus	328,198,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Kasus	315,070,176	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Laporan Berita Acara Audit Pemanfaatan Tata Ruang				30 Laporan							30 Laporan		
1.03.012.02.04.4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				0 Dokumen	61,316,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	58,863,456	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Informasi Pemanfaat Tata Ruang				25 Dokumen							25 Dokumen		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**66,520,692,102**							**28,665,158,085**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedahi**	**82.85 Persen**		**0 Persen**	**82.85 Persen**	**7,586,401,302**						**82.85 Persen**	**6,829,224,123**	
1.04.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun**	**Dokumen**		**Dokumen**	**3 Dokumen**	**5,593,627,098**						**3 Dokumen**	**5,837,012,460**	
1.04.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN				1 Tahun	5,433,877,098		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Aparatur	1 Tahun	5,737,012,460	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan							0 Orang/bulan		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan							41 Orang/bulan		
1.04.01.02.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3 Dokumen	159,750,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah	Aparatur	3 Dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun				3 Laporan							3 Laporan		
1.04.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang tersalihara**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**139,783,200**						**100 Persen**	**121,200,000**	
1.04.01.02.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	139,783,200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		OPD	0 Dokumen	121,200,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Tenaga Keamanan				9 Orang							9 Orang		
1.04.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan**	**Orang**		**Orang**	**5 Orang**	**50,000,000**						**5 Orang**	**10,000,000**	
1.04.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				5 Orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	OPD	5 Orang	10,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan**	**Jenis**		**Jenis**	**6 Jenis**	**701,468,500**						**6 Jenis**	**215,111,663**	
1.04.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan				6 Jenis	17,422,500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah	OPD	6 Jenis	20,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.04.01.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terciptanya Kenyamanan dan Kebersihan Gedung Kantor				100 Persen	15,537,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah	OPD	100 Persen	10,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jamuan makan minum rapat yang tersedia				15 Kali	81,050,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	15 Kali	30,800,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket							8 Paket		
1.04.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan yang disediakan				26 Ls	31,318,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	26 Ls	20,711,663	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40000 Lembar							40000 Lembar		
1.04.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				14 Media	33,600,000					OPD	14 Media	33,600,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.04.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan				69 Kali	522,540,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	69 Kali	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
1.04.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Pengadaan Barang Milik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**70,000,000**						**100 Persen**	**70,000,000**	
1.04.01.02.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		OPD	2 Unit	70,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**892,511,000**						**100 Persen**	**449,900,000**	
1.04.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan lainnya yang mendukung administrasi perkantoran				2550 Buah	22,450,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	2550 Buah	22,900,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
1.04.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	255,660,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	0 Laporan	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan				5 Rekening							5 Rekening		
1.04.01.02.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				26 Jenis	45,344,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	26 Jenis	13,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
1.04.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa tenaga supir yang dibayarkan				1 Orang	569,056,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	1 Orang	314,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
		Jumlah Petugas Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan				4 Orang							4 Orang		
		Jumlah tenaga jasa administrasi/Teknis yang dibayarkan				37 Orang							37 Orang		
1.04.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**139,011,504**						**100 Persen**	**88,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara				25 Unit	73,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	25 Unit	20,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							0 Unit		
		Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara				5 Unit							5 Unit		
1.04.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	30,000,000					OPD	0 Unit	20,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipertanggung Perizinannya				20 Unit							20 Unit		
1.04.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	23,011,504	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	0 Unit	20,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara/Service				4 Jenis							4 Jenis		
1.04.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara				2 Jenis	13,000,000					OPD	2 Jenis	13,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan**	**0.79 Persen**		**0 Persen**	**0.79 Persen**	**1,482,297,450**						**0.79 Persen**	**696,875,000**	
1.04.02.02.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Cakupan Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Dokumen**		**Dokumen**	**0 Dokumen**	**591,698,500**						**0 Dokumen**	**150,000,000**	
1.04.02.02.01.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				0 Dokumen	591,698,500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	0	0 Dokumen	150,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang teridentifikasi				100 Unit							100 Unit		
1.04.02.02.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Cakupan layanan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang dilaksanakan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**839,057,200**						**100 Persen**	**496,773,400**	
1.04.02.02.03.2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				7 Dokumen	139,424,100	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	7 Dokumen	250,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.04.02.02.03.5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi yang dibangun				10 Unit	699,633,100	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	Masyarakat	10 Unit	246,773,400	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				0 Unit Rumah							0 Unit Rumah		
1.04.02.02.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Cakupan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**51,541,750**						**100 Persen**	**50,101,600**	
1.04.02.02.05.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				0 Dokumen	51,541,750			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	0 Dokumen	50,101,600	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Laporan Pemanfaatan Rumah Susun dan atau Rumah Khusus				1 Laporan							1 Laporan		
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Areal Kawasan Kumuh**	**1.02 Persen**		**0 Persen**	**1.02 Persen**	**1,022,723,400**						**1.02 Persen**	**1,129,002,450**	
1.04.03.02.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Terwujudnya Penataan dan Peningkatan kawasan pemukiman kumuh yang ditata**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**704,501,200**						**100 Persen**	**802,269,750**	
1.04.03.02.02.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				9 Dokumen	122,620,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	9 Dokumen	131,110,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.02.02.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				5 Dokumen	352,588,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Dokumen	364,900,700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.02.02.3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				1 Laporan	229,292,550	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	306,259,050	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat Penerima Program KOTAKU				1 BKM							1 BKM		
1.04.03.02.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase Kawasan Permukiman yang memiliki akses Sarana dan Prasarana yang layak**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**318,222,200**						**100 Persen**	**326,732,700**	
1.04.03.02.03.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun/diperbaiki				10 Unit	318,222,200	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Unit	326,732,700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				10 Unit Rumah							10 Unit Rumah		
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh**	**1.02 Persen**		**0 Persen**	**1.02 Persen**	**477,276,600**						**1.02 Persen**	**598,939,600**	
1.04.04.02.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**477,276,600**						**100 Persen**	**598,939,600**	
1.04.04.02.01.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (BSRLH) yang diberikan				20 Unit	477,276,600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	0	20 Unit	598,939,600	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				20 Unit Rumah							20 Unit Rumah		
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase peningkatan Kualitas PSU di Lingkungan Perumahan**	**5.18 Persen**		**0 Persen**	**5.18 Persen**	**55,951,993,350**						**5.18 Persen**	**19,411,116,912**	
1.04.05.02.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Cakupan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**55,951,993,350**						**100 Persen**	**19,411,116,912**	
1.04.05.02.01.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				0 Dokumen	2,989,983,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	20 Kecamatan	0 Dokumen	2,223,906,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				21 Dokumen							21 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Dokumen Sektoral				3 Dokumen							3 Dokumen		
1.04.05.02.01.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Cakupan Ketersediaan PSU dalam Menunjang Fungsi Hunian				20 Kawasan	52,117,010,350	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	20 Kecamatan	20 Kawasan	16,512,210,912	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				20 Kawasan							20 Kawasan		
1.04.05.02.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Peningkatan PSU				2 Dokumen	845,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		20 Kecamatan	2 Dokumen	675,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum				1 Laporan							1 Laporan		
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				0 Laporan							0 Laporan		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**25,043,801,398**							**27,651,924,760**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**17,088,361,798**						**100 Persen**	**18,051,924,760**	
1.05.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**18,000,000**						**90 Persen**	**25,000,000**	
1.05.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				24 Laporan	18,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja	24 Laporan	25,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
											Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas				
1.05.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar Persentase Pelaporan Keuangan yang**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**12,232,049,286**						**100 Persen**	**12,431,692,760**	
1.05.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				166 Orang/bula	12,232,049,286	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	166 Orang/bulan	12,431,692,760	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**95 Persen**		**0 Persen**	**95 Persen**	**196,623,000**						**95 Persen**	**400,000,000**	
1.05.01.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	122,097,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja	10 Paket	250,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				166 Orang	74,526,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Satuan Polisi Pamong Praja	166 Orang	150,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,276,506,912**						**100 Persen**	**1,548,232,000**	
1.05.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	8,156,800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	10 Paket	20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	43,300,900	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	50 Paket	70,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	71,259,616	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	5 Paket	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	25,347,596	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	7 Paket	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	92,400,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja	10 Dokumen	120,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				288 Laporan	1,036,042,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja	288 Laporan	1,188,232,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**95 Persen**		**0 Persen**	**95 Persen**	**671,866,000**						**95 Persen**	**850,000,000**	
1.05.01.02.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	423,606,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja	6 Unit	500,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	29,360,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	16 Unit	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	218,900,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	40 Unit	300,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**95 Persen**		**0 Persen**	**95 Persen**	**2,413,376,600**						**95 Persen**	**2,130,000,000**	
1.05.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	10,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	113,707,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Satuan Polisi Pamong Praja	36 Laporan	120,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				177 Laporan	2,295,669,600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Satuan Polisi Pamong Praja	177 Laporan	2,000,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**95 Persen**		**0 Persen**	**95 Persen**	**279,940,000**						**95 Persen**	**667,000,000**	
1.05.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	104,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Satuan Polisi Pamong Praja	41 Unit	442,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	20,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Satuan Polisi Pamong Praja	30 Unit	30,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	155,940,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Satuan Polisi Pamong Praja	1 Unit	195,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan KDH**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**7,955,439,600**						**100 Persen**	**9,600,000,000**	
1.05.02.02.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten**	**95 Persen**		**0 Persen**	**95 Persen**	**6,295,875,100**						**95 Persen**	**7,200,000,000**	
1.05.02.02.01.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,				1000 Kasus	1,789,422,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	1000 Kasus	3,000,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.02.01.2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan				500 Kasus	746,350,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	500 Kasus	1,000,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.02.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				20 Dokumen	216,534,250	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	20 Dokumen	250,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.02.01.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman				20 Dokumen	184,410,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	20 Dokumen	500,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.02.01.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				339 Orang	567,873,850	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	339 Orang	700,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.02.01.6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan				24 Dokumen	1,092,216,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	24 Dokumen	1,000,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.02.01.7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				104 Unit	1,643,519,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	104 Unit	500,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.02.01.8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan				4 Dokumen	15,550,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja	4 Dokumen	200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.02.01.9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				10 Laporan	40,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	10 Laporan	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.02.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Penegakkan Perda dan Perkada**	**144 Kasus**		**0 Kasus**	**144 Kasus**	**1,068,826,500**						**144 Kasus**	**1,700,000,000**	
1.05.02.02.02.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				365 Laporan	476,127,500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	365 Laporan	700,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.02.02.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				24 Laporan	592,699,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	24 Laporan	1,000,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.02.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah PPNS Kabupaten yang dibina**	**8 Orang**		**0 Orang**	**8 Orang**	**590,738,000**						**8 Orang**	**700,000,000**	
1.05.02.02.03.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				12 Laporan	590,738,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Laporan	700,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**11,395,122,754**							**14,020,000,000**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**6,653,431,604**						**100 Persen**	**8,350,000,000**	
		rata rata nilasi Aspek Perencanaan Kinerja dan Pelaporan kinerja dan AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	70 Nilai							70 Nilai		
1.05.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisai Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan iktisar**	**dokumen**		**dokumen**	**6 dokumen**	**88,400,000**						**6 dokumen**	**200,000,000**	
		Persentase Perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
1.05.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				0 Laporan	88,400,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Laporan	0 Laporan	200,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		Jumlah laporan Kinerja SKPD yang disusun				6 Dokumen							6 Dokumen		
1.05.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**orang**		**orang**	**49 orang**	**4,665,097,558**						**49 orang**	**5,000,000,000**	
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesaui standar	0 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
1.05.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan Tunjangan				49 orang	4,665,097,558	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,			Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	ASN yang diberikan gaji	49 orang	5,000,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan ketersedian administrasi dan sarana prasarana perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**104,708,000**						**100 Persen**	**200,000,000**	
		Persentase Aparatur yang berkinerja Baik	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
1.05.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	104,708,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Administrasi Umum	0 Orang	200,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				19 Orang							19 Orang		
1.05.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**781,798,700**						**100 Persen**	**1,040,000,000**	
		Tertip Administrasi dan Kelengkapan sarana dan Prasarana	jenis		jenis	16 jenis							16 jenis		
1.05.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 jenis	12,409,300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Tertip Administrasi dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor	15 jenis	10,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
											Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				10 Jenis	137,873,400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tertip Administrasi dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor	10 Jenis	300,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.05.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan				2 jenis	139,945,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tertip Administrasi dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor	2 jenis	300,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	40,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tertip Administrasi dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor	15 Paket	20,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	2,760,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tertip Administrasi dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor	3 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				146 kali	448,811,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tertip Administrasi dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor	146 kali	400,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat**	**laporan**		**laporan**	**70 laporan**	**591,743,600**						**70 laporan**	**560,000,000**	
		Persentase ketersediaan jasa pendukung operasional kantor	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
1.05.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat				70 Laporan	5,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			sarana dan prasarana aparatur	70 Laporan	10,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	90,600,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			sarana dan prasarana aparatur	3 Laporan	150,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Laporan	496,143,600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			sarana dan prasarana aparatur	19 Laporan	400,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		pengelolaan administrasi yang baik				19 orang							19 orang		
1.05.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah sarana dan prasarana dan pemeliharaanya**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**421,683,746**						**100 Persen**	**450,000,000**	
		Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
1.05.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				40 unit	180,720,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Sarana dan Prasaraan Operasional	40 unit	200,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				40 unit	15,063,746	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasaraan Operasional	40 unit	200,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau yang direhabilitasi				1 unit	225,900,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasaraan Operasional	1 unit	50,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**3,988,361,900**						**100 Persen**	**4,950,000,000**	
		Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
1.05.03.02.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang dilayani**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**3,925,306,900**						**100 Persen**	**4,500,000,000**	
		Persentasi kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	persen		persen	100 persen							100 persen		
1.05.03.02.02.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				3 Dokumen	2,082,284,900	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Kesiapsiagaan petugas dan sarana prasarana	3 Dokumen	3,000,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		Jumlah sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan yang disediakan				60 jenis							60 jenis		
1.05.03.02.02.5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan Resiko Bencana yang tertangai				100 Persen	1,843,022,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kesiapsiagaan petugas dan sarana prasarana	100 Persen	1,500,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.03.02.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah dokumen tata kelola Kelembagaan Bencana daerah**	**Kelompok**		**Kelompok**	**20 Kelompok**	**63,055,000**						**20 Kelompok**	**150,000,000**	
1.05.03.02.04.2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah mitra kelembagaan penanganan kebakaran				20 kelempok	63,055,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Mitra Kelembagaan Penanganan Kebakaran yang dibentuk	20 kelempok	150,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan pelayanan bencana Kebakaran dan Non Kebakaran**	**Kejadian**		**Kejadian**	**125 Kejadian**	**753,329,250**						**125 Kejadian**	**720,000,000**	
1.05.04.02.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase warga Negara yang terlayani**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**349,999,850**						**100 Persen**	**120,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.04.02.01.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				2 Dokumen	349,999,850	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Pencegahan dan penyelamatan	2 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		Jumlah evakuasi kebakaran dan non kebakaran yang tertangani				125 kejadian							125 kejadian		
1.05.04.02.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase efektifitas Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, dan non Kebakaran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**94,828,800**						**100 Persen**	**200,000,000**	
1.05.04.02.02.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah pralatan proteksi kebakaran yang didata				550 Unit	94,828,800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Bahan berbahaya dan beracun kebakaran	550 Unit	100,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.02.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Jumlah Dokumen yang membuat Hasil Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi lanjutan**	**Dokumen**		**Dokumen**	**15 Dokumen**	**250,000,000**						**15 Dokumen**	**200,000,000**	
1.05.04.02.03.1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				15 Dokumen	250,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Kejadaian Kebakaran yang diinvestigasi	15 Dokumen	200,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.02.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah warga negara yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan pennaggulangan kebakran**	**orang**		**orang**	**100 orang**	**58,500,600**						**100 orang**	**200,000,000**	
		Persentase partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
1.05.04.02.04.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				100 Orang	58,500,600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	masyarakat dan kelompok	100 Orang	200,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**11,090,176,188**							**6,673,108,190**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**97.14 Persen**		**0 Persen**	**97.14 Persen**	**6,376,435,518**						**97.14 Persen**	**5,094,114,590**	
1.05.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**352,649,700**						**100 Persen**	**374,118,500**	
1.05.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	331,230,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Dokomen Perencaan, anggaran, dan dokumen lainnya	9 Dokumen	307,547,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				29 Dokumen							29 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun				25 Dokumen							25 Dokumen		
1.05.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	21,418,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Dokomen Perencaan, anggaran, dan dokumen lainnya	9 Laporan	66,571,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**3,845,251,940**						**100 Persen**	**3,797,135,840**	
1.05.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				37 Orang	3,767,304,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Gaji dan Tunjangan ASN, dan Laporan Keuangan dan Aset Kantor	37 Orang	3,765,091,840	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang							37 Orang		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan							37 Orang/bulan		
1.05.01.02.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				9 Dokumen	77,947,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Gaji dan Tunjangan ASN, dan Laporan Keuangan dan Aset Kantor	9 Dokumen	32,044,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**101,900,000**						**100 Persen**	**70,590,000**	
1.05.01.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan				37 Stell	101,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pakaian Dinas Harian ASN dan Pakaian Kaos	37 Stell	70,590,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah pakaian Lapangan				100 Lembar							100 Lembar		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				37 Paket							37 Paket		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				37 Paket							37 Paket		
1.05.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**1,225,685,078**						**100 Persen**	**398,944,700**	
1.05.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				8 Jenis	7,899,745		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Jenis	3,057,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket							8 Paket		
1.05.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	272,896,333		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	11 Paket	55,230,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	239,976,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	191,980,800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	12,630,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	3,508,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				816 Dokumen	6,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	816 Dokumen	4,300,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Kali	685,483,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	70 Kali	140,867,900	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan							70 Laporan		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83 Laporan							83 Laporan		
1.05.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**279,680,000**						**100 Persen**	**195,415,000**	
1.05.01.02.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				13 Unit	279,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas Opersional	13 Unit	195,415,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**125,600,800**						**100 Persen**	**56,820,550**	
1.05.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120 Laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	120 Laporan	1,350,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	68,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Laporan	31,250,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan							48 Laporan		
1.05.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	53,200,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Laporan	24,220,550	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen sektoral yang tersedia**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**445,668,000**						**100 persen**	**201,090,000**	
1.05.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	350,988,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aset Milik Daerah	30 Unit	164,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aset Milik Daerah	25 Unit	3,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	84,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aset Milik Daerah	1 Unit	33,090,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan**	**0.011 Persen**		**0 Persen**	**0.011 Persen**	**4,713,740,670**						**0.011 Persen**	**1,578,993,600**	
1.05.03.02.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen sektoral yang tersedia**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**569,999,700**						**100 Persen**	**30,000,000**	
1.05.03.02.01.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				2 Dokumen	569,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah dokumen sektoral yang tersedia	2 Dokumen	30,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.02.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase penurunan warga yang terdampak bencana**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**1,608,949,620**						**100 Persen**	**212,031,400**	
1.05.03.02.02.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				60 Orang	288,999,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat daerah rawan bencana	60 Orang	30,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				60 Orang							60 Orang		
1.05.03.02.02.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				4 Dokumen	490,298,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat daerah rawan bencana	4 Dokumen	60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				90 Dokumen							90 Dokumen		
		Jumlah Sarana dan Prasarana penanggulangan Bencana yang tersedia				50 Unit							50 Unit		
1.05.03.02.02.5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis kerusakan yang diakibatkan oleh bencana				4 Dokumen	296,762,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat daerah rawan bencana	4 Dokumen	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Masyarakat Bencana				4 Dokumen							4 Dokumen		
1.05.03.02.02.6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah dokumen mitigasi bencana				4 Dokumen	256,599,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat daerah rawan bencana	4 Dokumen	9,531,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				4 Kawasan							4 Kawasan		
1.05.03.02.02.7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					5	256,290,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat daerah rawan bencana	5	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah dokumen analisis kerusakan yang diakibatkan oleh bencana				5 Dokumen							5 Dokumen		
1.05.03.02.02.8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				51 Orang	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat daerah rawan bencana	51 Orang	12,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.02.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Penyelamatan dan evakuasi yang berhasil terlaksana**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**2,534,791,350**						**100 Persen**	**1,336,962,200**	
1.05.03.02.03.2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				55 Dokumen	2,054,287,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat terdampak Bencana	55 Dokumen	1,276,962,200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Kejadian Bencana yang di tanggulangi				40 Kejadian							40 Kejadian		
1.05.03.02.03.4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				200 Orang	480,504,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat terdampak Bencana	200 Orang	60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Penyediaan Logistik Korban Bencana yang disediakan				100 Paket							100 Paket		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**11,826,084,640**							**13,495,160,330**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**7,101,004,320**						**100 Persen**	**8,346,317,770**	
1.06.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**162,416,600**						**100 persen**	**178,682,952**	
1.06.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	162,416,600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Dokumen Rencana kegiatan dan Anggaran	6 Laporan	178,682,952	DINAS SOSIAL
1.06.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**orang**		**orang**	**36 orang**	**3,997,656,734**						**36 orang**	**4,714,815,824**	
1.06.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	3,997,656,734	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	36 Orang/bulan	4,714,815,824	DINAS SOSIAL
1.06.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**tercapainya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas**	**perseb**		**perseb**	**100 perseb**	**206,738,000**						**100 perseb**	**222,395,280**	
1.06.01.02.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	206,738,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	3 Unit	222,395,280	DINAS SOSIAL
1.06.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**1,363,620,586**						**100 persen**	**1,642,418,040**	
1.06.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Jenis	8,595,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	9 Jenis	7,907,400	DINAS SOSIAL
1.06.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	370,209,600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	30 Paket	553,008,320	DINAS SOSIAL
1.06.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	191,672,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	8 Paket	220,422,800	DINAS SOSIAL
1.06.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Jenis	127,475,986	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	14 Jenis	161,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	9,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	15 Dokumen	8,280,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				221 Laporan	656,668,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	221 Laporan	691,799,520	DINAS SOSIAL
1.06.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**708,952,800**						**100 persen**	**665,116,576**	
1.06.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	12,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	1200 Laporan	18,400,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	146,544,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	10 Laporan	140,340,480	DINAS SOSIAL
1.06.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				31 Laporan	550,408,800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	31 Laporan	506,376,096	DINAS SOSIAL
1.06.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**661,619,600**						**100 persen**	**922,889,098**	
1.06.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	315,379,600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	6 Unit	395,949,232	DINAS SOSIAL
1.06.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	79,100,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	40 Unit	112,056,000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	267,140,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	2 Unit	414,883,866	DINAS SOSIAL
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,386,852,600**						**100 Persen**	**1,490,918,420**	
1.06.02.02.01	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Jumlah masyarakat miskin, perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil yang di bantu dan didampingi**	**100 persen**		**0 persen**	**100 persen**	**364,931,000**						**100 persen**	**375,129,080**	
		Jumlah masyarakat miskin, perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil yang di bantu dan didampingi	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
1.06.02.02.01.2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Keluarga	364,931,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Komunitas Adat Terpencil	27 Keluarga	375,129,080	DINAS SOSIAL
											Penyiapan Tenaga Kerja Terampil				
1.06.02.02.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS)**	**100 persen**		**0 persen**	**100 persen**	**1,021,921,600**						**100 persen**	**1,115,789,340**	
		Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS)	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
1.06.02.02.03.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS, Keluarga Pahlawan, Veteran dan Keluarga Veteran Pejuang maupun Pembela Kemerdekaan yang diberi Tali Asih				68 orang	283,390,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	68 orang	290,232,860	DINAS SOSIAL
1.06.02.02.03.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Lembaga	535,022,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	20 Lembaga	603,883,400	DINAS SOSIAL
1.06.02.02.03.5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Sertifikat	203,509,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	27 Sertifikat	221,673,080	DINAS SOSIAL
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase korban Tindak Kekerasan yang menerima bantuan sosial**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**267,158,500**						**100 Persen**	**424,624,160**	
1.06.03.02.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke**	**Cakupan Penanganan orang terlantar**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**267,158,500**						**100 Persen**	**424,624,160**	
1.06.03.02.01.1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan				80 Orang	267,158,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Orang Terlantar	80 Orang	424,624,160	DINAS SOSIAL
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,199,021,700**						**100 Persen**	**2,174,908,842**	
1.06.04.02.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**207,936,000**						**100 Persen**	**239,126,400**	
1.06.04.02.01.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan				100 Orang	207,936,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Penyandang Disabilitas	100 Orang	239,126,400	DINAS SOSIAL
1.06.04.02.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,991,085,700**						**100 Persen**	**1,935,782,442**	
1.06.04.02.02.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				82 Orang	1,103,569,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	82 Orang	928,521,178	DINAS SOSIAL
1.06.04.02.02.7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	190,304,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	100 Orang	205,467,280	DINAS SOSIAL
1.06.04.02.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	697,212,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	90 Orang	801,793,984	DINAS SOSIAL
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**377,832,500**						**100 Persen**	**437,799,250**	
1.06.05.02.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Data Fakir Miskin**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**377,832,500**						**100 Persen**	**437,799,250**	
1.06.05.02.02.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				20000 Orang	228,153,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	20000 Orang	269,492,840	DINAS SOSIAL
1.06.05.02.02.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				280 Orang	149,679,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	280 Orang	168,306,410	DINAS SOSIAL
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**264,627,500**						**100 Persen**	**356,566,240**	
1.06.06.02.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**100 persen**		**0 persen**	**100 persen**	**264,627,500**						**100 persen**	**356,566,240**	
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
1.06.06.02.02.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Orang	264,627,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Masyarakat yang terkena dampak Bencana	36 Orang	356,566,240	DINAS SOSIAL
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**229,587,520**						**100 Persen**	**264,025,648**	
1.06.07.02.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase Taman makam Pahlawan yang terpelihara**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**229,587,520**						**100 Persen**	**264,025,648**	
1.06.07.02.01.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	229,587,520	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Taman Makam Pahlawan	1 Makam	264,025,648	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**12,229,426,536**							**12,402,028,128**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**6,876,959,636**						**100 Persen**	**7,452,028,128**	
2.07.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan KInerja yang disusun Sesuai Standar**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**102,860,000**						**100 persen**	**110,000,000**	
2.07.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	51,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	7 Dokumen	50,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				20 Laporan	50,880,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	20 Laporan	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan**	**orang**		**orang**	**32 orang**	**4,449,828,128**						**32 orang**	**4,562,028,128**	
2.07.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				31 Orang/bulan	4,449,828,128		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Disnakertrans	31 Orang/bulan	4,562,028,128	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**1,153,787,000**						**100 persen**	**1,780,000,000**	
2.07.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Jenis	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	6 Jenis	20,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				23 jenis	500,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	23 jenis	950,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan				8 jenis	35,113,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	8 jenis	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	2 Jenis	45,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan				35 exampler	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	35 exampler	5,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				120 Kali	573,624,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	120 Kali	700,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**699,380,950**						**100 persen**	**710,000,000**	
2.07.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 persen	43,980,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	100 persen	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan				3 Rekening	198,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	3 Rekening	200,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				28 Orang	456,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	28 Orang	450,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**471,103,558**						**100 persen**	**290,000,000**	
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
2.07.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional/Lapangan yang dipelihara				2 Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	2 Unit	35,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional/Lapangan yang dipelihara				13 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	13 Unit	20,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	26,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	50 Unit	35,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	410,103,558		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	4 Unit	200,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan**	**36.96 Persen**		**0 Persen**	**36.96 Persen**	**2,215,056,900**						**36.96 Persen**	**2,100,000,000**	
2.07.03.02.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Besaran pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**Persen**		**Persen**	**57 Persen**	**2,215,056,900**						**57 Persen**	**2,100,000,000**	
2.07.03.02.01.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				256 Orang	1,744,423,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat Pencari Kerja	256 Orang	2,000,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.03.02.01.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kerjasama lintas lembaga yang dilaksanakan				3 lembaga	470,633,750			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat Pencari Kerja	3 lembaga	100,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja Yang ditempatkan**	**0 Persen**		**0 Persen**	**6.87 Persen**	**2,747,410,000**						**6.87 Persen**	**2,400,000,000**	
2.07.04.02.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pencari kerja yang ditempatkan**	**Persen**		**Persen**	**18 Persen**	**2,747,410,000**						**18 Persen**	**2,400,000,000**	
2.07.04.02.01.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui sistem permagangan				5 orang	137,410,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat Pencari Kerja	5 orang	500,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.04.02.01.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam bentuk kelompok kerja				1232 orang	2,610,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat Pencari Kerja	1232 orang	1,900,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**	**39.00 Persen**		**0 Persen**	**39.00 Persen**	**390,000,000**						**39.00 Persen**	**450,000,000**	
2.07.05.02.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kasus yang diselesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**390,000,000**						**100 Persen**	**450,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.07.05.02.02.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus ketenegakerjaan yang ada di Kab. Inhil				10 kasus	92,294,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Tenaga Kerja di Kab. Inhil	10 kasus	150,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.05.02.02.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Survey KHL yang dilakukan				5 kali	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Tenaga Kerja di Kab. Inhil	5 kali	150,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.05.02.02.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang terdafar di Jamsostek				31534 Orang	97,706,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Tenaga Kerja di Kab. Inhil	31534 Orang	150,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.032	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**880,000,000**							**420,000,000**	
3.032.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Cakupan bina transmigrasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**585,548,000**						**100 Persen**	**295,000,000**	
3.032.03.02.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen pengelolaan penempatan transmigrasi**	**1 dokumen**		**0 dokumen**	**1 dokumen**	**585,548,000**						**1 dokumen**	**295,000,000**	
3.032.03.02.01.2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah dokumen/laporan kondisi sarana prasan wilayah transmigrasi				1 Laporan	75,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat Transmigrasi	1 Laporan	50,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3.032.03.02.01.4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi transmigrai yang dikelola				1 Lokasi	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat Transmigrasi	1 Lokasi	50,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3.032.03.02.01.5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah lokasi yang diberikan penyuluhan/pengerahan				1 lokasi	215,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat Transmigrasi	1 lokasi	45,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3.032.03.02.01.7	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang dibina				225 KK	95,548,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat Transmigrasi	225 KK	150,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3.032.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**294,452,000**						**100 Persen**	**125,000,000**	
3.032.04.02.01	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Jumlah lokasi Transmigrasi yang dikelola**	**1 lokasi**		**0 lokasi**	**1 lokasi**	**294,452,000**						**1 lokasi**	**125,000,000**	
3.032.04.02.01.1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan penguatan SDM				225 KK	96,365,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat Transmigrasi	225 KK	75,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3.032.04.02.01.2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan Penguatan Infrasturktur sosal, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman				225 KK	198,087,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat Transmigrasi	225 KK	50,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**1,092,896,122**							**1,719,438,044**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan**	**1.81 Persen**		**0 Persen**	**1.81 Persen**	**637,520,000**						**1.81 Persen**	**820,325,000**	
2.08.02.02.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PUG dengan kategori baik**	**Persen**		**Persen**	**75 Persen**	**89,060,000**						**75 Persen**	**120,325,000**	
2.08.02.02.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				380 Dokumen	89,060,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	OPD dan Mitra Kerja terkait	380 Dokumen	120,325,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.02.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi**	**Persen**		**Persen**	**65 Persen**	**68,460,000**						**65 Persen**	**90,000,000**	
2.08.02.02.02.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	68,460,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Mitra Kerja terkait	1 Dokumen	90,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.02.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**480,000,000**						**100 Persen**	**610,000,000**	
2.08.02.02.03.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	480,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	50 Orang	610,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan**	**69 Persen**		**0 Persen**	**69 Persen**	**82,255,000**						**69 Persen**	**178,045,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.03.02.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelaksanaan Upaya Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**41,200,000**						**100 Persen**	**60,000,000**	
2.08.03.02.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	41,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Mitra Kerja terkait	3 Dokumen	60,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.02.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**41,055,000**						**100 Persen**	**118,045,000**	
2.08.03.02.02.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				15 Orang	41,055,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perempuan Korban Kekerasan	15 Orang	53,045,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam upaya peningkatan kuallitas keluarga**	**60 Persen**		**0 Persen**	**60 Persen**	**95,608,000**						**60 Persen**	**128,623,044**	
2.08.04.02.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengembangan Kualitas Keluarga**	**Persen**		**Persen**	**75 Persen**	**56,808,000**						**75 Persen**	**78,623,044**	
2.08.04.02.01.2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	29,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Mitra Kerja terkait	2 Dokumen	41,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.02.01.3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	27,208,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Mitra Kerja terkait	1 Dokumen	37,423,044	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.02.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya**	**Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persen**		**Persen**	**75 Persen**	**38,800,000**						**75 Persen**	**50,000,000**	
2.08.04.02.02.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	38,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Penyedia Layanan	10 Orang	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak**	**70 Persen**		**0 Persen**	**70 Persen**	**37,065,222**						**70 Persen**	**50,000,000**	
2.08.05.02.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Dukungan Penyajian Data Gender dan Anak**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**37,065,222**						**100 Persen**	**50,000,000**	
2.08.05.02.01.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Dokumen	37,065,222		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Mitra Kerja terkait	50 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak**	**85 Persen**		**0 Persen**	**85 Persen**	**136,000,000**						**85 Persen**	**210,000,000**	
2.08.06.02.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**Persen**		**Persen**	**50 Persen**	**136,000,000**						**50 Persen**	**210,000,000**	
2.08.06.02.02.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	136,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak	3 Dokumen	210,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan Pendampingan dn Perlindungan Anak**	**70 Persen**		**0 Persen**	**70 Persen**	**104,447,900**						**70 Persen**	**332,445,000**	
2.08.07.02.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sesuai Standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**104,447,900**						**100 Persen**	**182,445,000**	
2.08.07.02.02.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	25,198,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelayanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	15 Orang	32,445,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.02.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Layanan	79,249,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelayanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	35 Layanan	150,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**7,106,574,783**							**12,635,112,827**	
2.014.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**99.3 Persen**		**0 Persen**	**99.3 Persen**	**6,115,679,783**						**99.3 Persen**	**6,674,392,177**	
2.014.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Akuntabilitas Kinerja SKPD**	**Persen**		**Persen**	**50 Persen**	**153,946,000**						**50 Persen**	**200,000,000**	
2.014.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	153,946,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN di Lingkungan DP2KBP3A Kab. Inhil	11 Laporan	200,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**4,461,953,338**						**100 Persen**	**4,785,139,593**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.014.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	4,461,953,338		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	39 Orang/bulan	4,785,139,593	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**905,956,735**						**100 Persen**	**945,996,193**	
2.014.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	41,824,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DP2KBP3A Kab. Inhil	5 Paket	2,996,193	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	114,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DP2KBP3A Kab. Inhil	3 Paket	200,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	24,018,335		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DP2KBP3A Kab. Inhil	5 Paket	35,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	52,958,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DP2KBP3A Kab. Inhil	4 Paket	68,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	197,180,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DP2KBP3A Kab. Inhil	30 Dokumen	210,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105 Laporan	475,216,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DP2KBP3A Kab. Inhil	105 Laporan	430,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**414,813,710**						**100 Persen**	**362,655,531**	
2.014.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4,875,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DP2KBP3A Kab. Inhil	4 Laporan	7,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DP2KBP3A Kab. Inhil	4 Laporan	110,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				25 Laporan	309,938,710		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur DP2KBP3A Kab. Inhil	25 Laporan	245,655,531	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**179,010,000**						**100 Persen**	**380,600,860**	
2.014.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	39,110,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Perkantoran	34 Unit	64,078,360	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Perkantoran	50 Unit	26,522,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	119,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sarana dan Prasarana Perkantoran	3 Unit	290,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk terhadap Program KKBPK**	**20.50 Persen**		**0 Persen**	**20.50 Persen**	**56,960,000**						**20.50 Persen**	**252,434,650**	
2.014.02.02.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas**	**Jumlah Mitra dalam Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Program KKBPK**	**Mitra**		**Mitra**	**2 Mitra**	**56,960,000**						**2 Mitra**	**85,200,000**	
2.014.02.02.01.1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))				1 Dokumen	32,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD dan Mitra Kerja terkait	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.02.02.01.6	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Dokumen	24,960,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD dan Mitra Kerja terkait	1 Dokumen	35,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.014.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana**	**36.92 Persen**		**0 Persen**	**36.92 Persen**	**613,775,000**						**36.92 Persen**	**2,283,526,000**	
2.014.03.02.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai**	**Cakupan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**180,000,000**						**100 Persen**	**1,245,000,000**	
2.014.03.02.01.4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				6 Dokumen	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD, Mitra Kerja terkait serta Masyarakat	6 Dokumen	200,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.03.02.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas**	**Cakupan Pendayagunaan bagi Tenaga Lini Lapangan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**157,675,000**						**100 Persen**	**90,000,000**	
2.014.03.02.02.4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				25 Orang	157,675,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kader Kelompok Kegiatan	25 Orang	90,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.03.02.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di**	**Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi Kebutuhan Fasilitas**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**154,590,000**						**100 Persen**	**778,526,000**	
2.014.03.02.03.3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				175 Orang	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Mitra Kerja terkait	175 Orang	75,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.03.02.03.9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				80 Orang	40,430,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Mitra Kerja terkait	80 Orang	53,045,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.03.02.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				6 Laporan	74,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Mitra Kerja terkait	6 Laporan	95,481,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.03.02.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan**	**Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persen**		**Persen**	**65 Persen**	**121,510,000**						**65 Persen**	**170,000,000**	
2.014.03.02.04.1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				2 Organisasi	84,455,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi dan Mitra kerja terkait	2 Organisasi	110,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.03.02.04.3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				20 Kampung	37,055,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi dan Mitra kerja terkait	20 Kampung	60,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persen**		**Persen**	**65 Persen**	**320,160,000**						**65 Persen**	**3,424,760,000**	
2.014.04.02.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Cakupan Pembinaan Anggota Kelompok Kegiatan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**243,000,000**						**100 Persen**	**3,324,760,000**	
2.014.04.02.01.2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1143 Unit	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	Kader Kelompok Kegiatan	1143 Unit	120,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.04.02.01.4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				420 Orang	240,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	Kader Kelompok Kegiatan	420 Orang	310,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.014.04.02.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100 0**		**0 0**	**100 0**	**77,160,000**						**100 0**	**100,000,000**	
2.014.04.02.02.3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Organisasi	77,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Aksesibilitas Layanan Penididikan	Organisasi dan Mitra Kerja terkait	2 Organisasi	100,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.011	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**17,447,125,918**							**22,789,370,134**	
2.011.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**6,849,636,549**						**100 Persen**	**7,699,200,000**	
2.011.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**118,459,950**						**100 Persen**	**150,000,000**	
2.011.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	OPD	2 Dokumen	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				11 Laporan	98,459,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	OPD	11 Laporan	125,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**4,917,440,826**						**100 Persen**	**5,500,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.011.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bular	4,917,440,826		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	ASN Kantor DLHK	39 Orang/bulan	5,500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**230,042,400**						**100 Persen**	**229,200,000**	
2.011.01.02.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	230,042,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	229,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**722,176,773**						**100 Persen**	**830,000,000**	
2.011.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sarana dan Prasarana di OPD	1 Paket	20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	123,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sarana dan Prasarana di OPD	3 Paket	200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sarana dan Prasarana di OPD	3 Paket	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	101,710,773		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sarana dan Prasarana di OPD	2 Paket	35,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	11,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sarana dan Prasarana di OPD	1 Dokumen	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	391,306,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sarana dan Prasarana di OPD	3 Laporan	500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**523,516,600**						**100 Persen**	**545,000,000**	
2.011.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	OPD DLHK	1 Laporan	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	103,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	OPD DLHK	2 Laporan	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	412,636,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	OPD DLHK	1 Laporan	420,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**338,000,000**						**100 Persen**	**445,000,000**	
2.011.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sarana dan Prasarana OPD	6 Unit	70,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	28,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sarana dan Prasarana OPD	39 Unit	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sarana dan Prasarana OPD	28 Unit	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sarana dan Prasarana OPD	1 Unit	300,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun**	**Dokumen**		**Dokumen**	**2 Dokumen**	**298,608,000**						**2 Dokumen**	**328,608,000**	
2.011.02.02.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen PPLH yang disusun**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**298,608,000**						**100 Persen**	**328,608,000**	
2.011.02.02.01.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	298,608,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Dokumen	1 Dokumen	328,608,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Air**	**Indeks**		**Indeks**	**63,02 Indeks**	**1,003,045,588**						**63,02 Indeks**	**2,836,562,134**	
		Indeks Kualitas Udara	Indeks		Indeks	92,50 Indeks							92,50 Indeks		
2.011.03.02.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemantauan Titik Lokasi Kualitas Udara dan Air Permukaan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**833,045,588**						**100 Persen**	**2,636,562,134**	
2.011.03.02.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	357,866,425		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Air dan Udara	1 Dokumen	392,866,425	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.03.02.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	77,315,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Air dan Udara	1 Dokumen	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.03.02.01.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	397,863,413		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Air dan Udara	1 Dokumen	2,143,695,709	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.03.02.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi**	**Dokumen**		**Dokumen**	**1 Dokumen**	**170,000,000**						**1 Dokumen**	**200,000,000**	
2.011.03.02.03.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				1 Dokumen	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar**	**35 Persen**		**0 Persen**	**35 Persen**	**1,250,258,200**						**35 Persen**	**1,500,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.011.04.02.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase Luas RTH yang ditangani**	**Persen**		**Persen**	**35 Persen**	**1,250,258,200**						**35 Persen**	**1,500,000,000**	
2.011.04.02.01.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Ha	1,250,258,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	RTH	22 Ha	1,500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**	**Persentase Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**294,767,250**						**100 Persen**	**370,000,000**	
2.011.06.02.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perusahaan yang taat aturan lingkungan secara administrasi maupun teknis**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**294,767,250**						**100 Persen**	**370,000,000**	
2.011.06.02.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				4 Dokumen	142,889,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Izin Usaha	4 Dokumen	170,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.06.02.01.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah				10 Laporan	151,878,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Izin Usaha	10 Laporan	200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**169,840,500**						**100 Persen**	**180,000,000**	
2.011.09.02.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penerima Penghargaan Peduli Lingkungan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**169,840,500**						**100 Persen**	**180,000,000**	
2.011.09.02.01.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				6 Entitas	169,840,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sekolah	6 Entitas	180,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.010	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**69,990,000**						**100 Persen**	**75,000,000**	
2.011.010.02.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**69,990,000**						**100 Persen**	**75,000,000**	
2.011.010.02.01.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				4 Dokumen	69,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Pengaduan Masyarakat terhadap dugaan Pencemaran Kerusakan Lingkungan	4 Dokumen	75,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.011	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan sampah yang ditangani**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**7,510,979,831**						**90 Persen**	**9,800,000,000**	
2.011.011.02.01	**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan yang terpelihara dan berfungsi baik**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**7,510,979,831**						**90 Persen**	**9,800,000,000**	
2.011.011.02.01.3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				19093 Ton	5,096,701,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Timbulan Sampah yang ditangani	19093 Ton	5,200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.011.02.01.4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Kelompok	130,605,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Timbulan Sampah yang ditangani	1 Kelompok	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.011.011.02.01.7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				44 Unit	2,283,672,081		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Timbulan Sampah yang ditangani	44 Unit	4,500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.012	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**9,443,816,002**							**8,955,447,500**	
2.012.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**97.60 Persen**		**0 Persen**	**97.60 Persen**	**8,541,725,952**						**97.60 Persen**	**8,502,455,425**	
2.012.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kinerja SKPD**	**7 Dokumen**		**0 Dokumen**	**7 Dokumen**	**10,000,000**						**7 Dokumen**	**13,650,000**	
2.012.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	10,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Laporan Kinerja Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	4 Laporan	13,650,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**6,193,132,436**						**100 Persen**	**6,236,108,390**	
2.012.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	6,193,132,436	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	PNS Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	47 Orang/bulan	6,236,108,390	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**645,784,816**						**100 Persen**	**560,174,035**	
2.012.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9,826,700	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	1 Paket	10,318,035	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	91,921,500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	5 Paket	100,506,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	41,580,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	5 Paket	105,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	35,048,616	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	2 Paket	24,150,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	3,600,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	24 Dokumen	3,700,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	463,808,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	35 Laporan	316,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**1,647,808,700**						**90 Persen**	**1,635,023,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.012.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	6,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	2 Laporan	6,300,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	139,800,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	4 Laporan	130,284,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				110 Laporan	1,502,008,700	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	110 Laporan	1,498,439,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**45,000,000**						**90 Persen**	**57,500,000**	
2.012.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	20,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	8 Unit	31,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	1 Unit	5,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	20,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	50 Unit	21,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**93 Persen**		**0 Persen**	**93 Persen**	**457,146,750**						**93 Persen**	**226,033,950**	
2.012.02.02.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang tertayani Sesuai SOP**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**250,366,750**						**90 Persen**	**150,000,000**	
2.012.02.02.01.4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				15 Laporan	250,366,750	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Penduduk Kab. Inhil	15 Laporan	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.02.02.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Blangko KIA yang diadakan**	**36000 Keping**		**0 Keping**	**36000 Keping**	**206,780,000**						**36000 Keping**	**76,033,950**	
2.012.02.02.02.2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai				1 Dokumen	206,780,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penduduk Kab. Inhil	1 Dokumen	76,033,950	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**92.50 Persen**		**0 Persen**	**92.50 Persen**	**104,915,000**						**92.50 Persen**	**35,337,375**	
2.012.03.02.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dapat memiliki Akta Kelahiran**	**4000 Dokumen**		**0 Dokumen**	**4000 Dokume**	**104,915,000**						**4000 Dokumen**	**35,337,375**	
2.012.03.02.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	104,915,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penduduk Kab. Inhil	4 Layanan	35,337,375	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**340,028,300**						**90 Persen**	**191,620,750**	
2.012.04.02.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Adminstrasi Kependudukan yang dilakukan**	**7 PKS**		**0 PKS**	**7 PKS**	**112,665,000**						**7 PKS**	**14,700,000**	
2.012.04.02.01.2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				7 Dokumen	112,665,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas/Instansi Terkait	7 Dokumen	14,700,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.04.02.02	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Kecamatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi tentang administrasi kependudukan**	**20 Kecamatan**		**0 Kecamatan**	**20 Kecamatan**	**64,065,000**						**20 Kecamatan**	**63,120,750**	
2.012.04.02.02.1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				2 Dokumen	64,065,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan	2 Dokumen	63,120,750	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.04.02.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Ketersediaan database kependudukan**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**163,298,300**						**90 Persen**	**113,800,000**	
2.012.04.02.03.4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				7 Dokumen	90,698,300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas/Instansi Terkait	7 Dokumen	30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.012.04.02.03.8	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 Dokumen	72,600,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas/Instansi Terkait	2 Dokumen	83,800,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.013	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**29,264,600,369**							**41,139,632,737**	
2.013.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**6,740,993,389**						**90 Persen**	**6,460,458,607**	
2.013.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**100 persen**		**0 persen**	**100 persen**	**84,096,000**						**100 persen**	**84,000,000**	
2.013.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	84,096,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	8 Dokumen	84,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**cangkupan ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran**	**100 persen**		**0 persen**	**100 persen**	**3,943,742,289**						**100 persen**	**4,290,299,827**	
2.013.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bular	3,943,742,289	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			cangkupan ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur	12 Orang/bulan	4,290,299,827	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase sarana dan prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**100 persen**		**0 persen**	**100 persen**	**1,687,452,400**						**100 persen**	**1,120,861,200**	
2.013.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Jenis	79,800,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			aparatur perkantoran	6 Jenis	79,800,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	70,266,400	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				aparatur perkantoran	7 Paket	91,821,200	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	49,425,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				aparatur perkantoran	3 Paket	49,425,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	26,960,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				aparatur perkantoran	6 Paket	22,910,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	788,800,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				aparatur perkantoran	12 Dokumen	91,360,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.013.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	672,201,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				aparatur perkantoran	1 Laporan	785,545,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah**	**100 persen**		**0 persen**	**100 persen**	**162,680,000**						**100 persen**	**162,850,780**	
2.013.01.02.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	162,680,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		BMD Penunjang urusan PD	2 Unit	162,850,780	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa penunjang operasional kantor**	**100 persen**		**0 persen**	**100 persen**	**602,522,700**						**100 persen**	**626,226,800**	
2.013.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				Jasa PD	1 Laporan	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	78,300,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				Jasa PD	1 Laporan	78,300,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	519,222,700	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				Jasa PD	4 Laporan	542,926,800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik**	**100 persen**		**0 persen**	**100 persen**	**260,500,000**						**100 persen**	**176,220,000**	
2.013.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	148,400,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Cangkupan Ketersediaan Administrasi dan	8 Unit	112,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	112,100,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Cangkupan Ketersediaan Administrasi dan	1 Unit	16,540,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertata dengan Baik**	**50.76 Persen**		**0 Persen**	**50.76 Persen**	**505,498,300**						**50.76 Persen**	**2,830,038,984**	
2.013.02.02.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase Desa yang Tertata dengan Baik**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**505,498,300**						**100 Persen**	**2,830,038,984**	
2.013.02.02.01.6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				1 Unit	505,498,300	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Desa yang Tertata Dengan Baik	1 Unit	2,830,038,984	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Cakupan pelaksanaan Kerjasama antar desa**	**100 Persen**		**N/A Persen**	**100 Persen**	**160,770,850**						**100 Persen**	**406,881,850**	
2.013.03.02.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**Persentase Kerjasama antar desa yang terlaksana**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**160,770,850**						**100 Persen**	**406,881,850**	
2.013.03.02.01.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	160,770,850	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Dokumen	406,881,850	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**20,569,406,380**						**100 Persen**	**28,646,628,536**	
2.013.04.02.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa dengan Administrasi Baik**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**20,569,406,380**						**100 Persen**	**28,646,628,536**	
2.013.04.02.01.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	3,148,528,780	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				Desa	1 Dokumen	3,643,170,780	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.04.02.01.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				0 Dokumen	249,999,900	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				Desa	0 Dokumen	991,359,100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.04.02.01.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				50 Orang	1,243,456,600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				Desa	50 Orang	1,306,167,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.04.02.01.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				1 Laporan	85,495,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				Desa	1 Laporan	68,396,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.04.02.01.7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				1 Dokumen	148,310,300	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				Desa	1 Dokumen	248,524,300	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.04.02.01.8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	132,998,800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				Desa	1 Dokumen	1,053,532,300	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.04.02.01.9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	5,996,576,200	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				Desa	1 Laporan	7,157,031,206	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.04.02.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	149,255,800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				Desa	1 Dokumen	463,685,800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.04.02.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	9,412,835,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Desa	1 Dokumen	13,354,727,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah pendampingi program desa maju inhil jaya plus terintegrasi				230 Orang							230 Orang		
2.013.04.02.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1,950,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,				Desa	1 Dokumen	360,035,050	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,287,931,450**						**100 Persen**	**2,795,624,760**	
2.013.05.02.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam**	**Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dlam pembangunan desa**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,287,931,450**						**100 Persen**	**2,795,624,760**	
2.013.05.02.01.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang				10 Lembaga	199,999,850	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Lembaga Kemasyarakatan Desa	10 Lembaga	965,889,305	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.05.02.01.5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	92,187,200	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 Dokumen	430,268,550	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.013.05.02.01.6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	135,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 Laporan	385,512,800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.013.05.02.01.9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	860,744,400	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 Dokumen	1,013,954,105	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.015	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**20,261,230,784**							**18,537,068,989**	
2.015.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**99.94 Persen**		**0 Persen**	**99.94 Persen**	**9,200,910,584**						**99.94 Persen**	**9,702,224,759**	
2.015.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**210,408,500**						**90 Persen**	**192,304,750**	
		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen							90 Persen		
2.015.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	103,008,500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten	5 Dokumen	40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	107,400,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten	8 Laporan	152,304,750	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**6,094,217,434**						**100 Persen**	**6,070,423,559**	
		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
2.015.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	6,066,528,434	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Gaji dan Tunjangan ASN beserta Dokumen Laporan	60 Orang/bulan	6,062,544,559	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.01.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	27,689,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Gaji dan Tunjangan ASN beserta Dokumen Laporan	1 Laporan	7,879,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**231,955,000**						**100 Persen**	**141,320,000**	
2.015.01.02.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	231,955,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Penataan Manajemen Aset Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	1 Laporan	141,320,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**55,750,000**						**90 Persen**	**381,238,000**	
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	90 Persen							90 Persen		
2.015.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	55,750,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dishub Kab. Inhil	20 Orang	381,238,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**757,145,500**						**100 Persen**	**1,088,941,100**	
2.015.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	99,574,050	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sarana prasarana administrasi perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	5 Paket	212,463,100	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	85,501,700	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sarana prasarana administrasi perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	3 Paket	113,576,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	63,539,750	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sarana prasarana administrasi perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	1 Paket	127,450,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3,850,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sarana prasarana administrasi perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	3 Dokumen	3,850,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.015.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				269 Laporan	504,680,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sarana prasarana administrasi perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	269 Laporan	631,602,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**1,585,934,150**						**100 Persen**	**1,576,797,350**	
2.015.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,900,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Jasa Penunjang Operasional kantor Dinas Perhubungan Kabupaten	1 Laporan	7,900,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	291,300,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Jasa Penunjang Operasional kantor Dinas Perhubungan Kabupaten	1 Laporan	291,300,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,286,734,150	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Jasa Penunjang Operasional kantor Dinas Perhubungan Kabupaten	1 Laporan	1,277,597,350	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**265,500,000**						**90 Persen**	**251,200,000**	
2.015.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	105,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aset-aset Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	4 Unit	105,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	90,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aset-aset Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	9 Unit	89,700,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	70,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aset-aset Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	10 Unit	56,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar**	**90.17 Persen**		**0 Persen**	**90.17 Persen**	**6,400,098,500**						**90.17 Persen**	**4,763,587,750**	
		Presentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar	Persen		Persen	90,17 Persen							90,17 Persen		
2.015.02.02.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia**	**40 Persen**		**0 Persen**	**40 Persen**	**186,621,400**						**40 Persen**	**373,242,800**	
		Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia	Persen		Persen	40 Persen							40 Persen		
2.015.02.02.02.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				7 Unit	186,621,400	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat dan Rambu-Rambu Lalu Lintas Lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir	7 Unit	373,242,800	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.02.02.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi standard**	**40 Persen**		**0 Persen**	**40 Persen**	**1,796,469,300**						**40 Persen**	**1,445,338,900**	
		Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi standard	Persen		Persen	40 Persen							40 Persen		
2.015.02.02.03.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	1,796,469,300	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	Terminal	5 Unit	1,445,338,900	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.02.02.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase uji kir angkutan umum yang terlaksana**	**85 Persen**		**0 Persen**	**85 Persen**	**3,103,934,300**						**85 Persen**	**1,450,193,250**	
		Persentase uji kir angkutan umum yang terlaksana	Persen		Persen	85 Persen							85 Persen		
2.015.02.02.05.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	3,053,934,300	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan	1 Unit	1,387,014,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.02.02.05.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12 Laporan	50,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan	12 Laporan	63,179,250	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.02.02.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Cakupan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**40 Persen**		**0 Persen**	**40 Persen**	**283,852,500**						**40 Persen**	**376,490,000**	
		Cakupan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persen		Persen	40 Persen							40 Persen		
2.015.02.02.08.4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				50 Laporan	283,852,500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	Pengemudi Kendaraan Bermotor Beserta Pemilik	50 Laporan	376,490,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.02.02.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**Persentase layanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi**	**85 Persen**		**0 Persen**	**85 Persen**	**1,029,221,000**						**85 Persen**	**1,018,322,800**	
		Persentase layanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persen		Persen	85 Persen							85 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.015.02.02.09.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				34 Unit	1,029,221,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	Pengguna Angkutan	34 Unit	1,018,322,800	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan**	**Persen**		**Persen**	**92,47 Persen**	**4,660,221,700**						**92,47 Persen**	**4,071,256,480**	
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	92.47 Persen		0 Persen	92.47 Persen							92.47 Persen		
2.015.03.02.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**80 Persen**		**0 Persen**	**80 Persen**	**4,660,221,700**						**80 Persen**	**3,991,256,480**	
		Persentase Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen		Persen	80 Persen							80 Persen		
2.015.03.02.12.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				50 Dokumen	58,321,750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	5 Wilayah	50 Dokumen	116,643,530	DINAS PERHUBUNGAN
2.015.03.02.12.2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				35 Unit	4,601,899,950	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	5 Wilayah	35 Unit	3,874,612,950	DINAS PERHUBUNGAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.016	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**18,514,448,175**							**21,892,945,562**	
2.016.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**8,265,134,360**						**100 Persen**	**10,092,945,562**	
2.016.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar, Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**21,519,000**						**90 Persen**	**26,523,750**	
2.016.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	21,519,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	7 Laporan	26,523,750	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar, Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**3,974,731,162**						**100 Persen**	**4,080,262,412**	
2.016.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3,967,731,162	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	30 Orang/bulan	4,072,742,412	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	1 Laporan	7,520,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang Terpelihara**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**34,828,200**						**100 Persen**	**37,994,400**	
2.016.01.02.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	34,828,200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	3 Dokumen	37,994,400	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi, Persentase aparatur yang berdisiplin baik**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**85,460,000**						**100 Persen**	**40,650,000**	
2.016.01.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	64,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	30 Paket	20,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	20,960,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	4 Orang	20,650,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran Dalam Kondisi Baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**888,310,903**						**100 Persen**	**1,305,015,000**	
2.016.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4,035,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	3 Paket	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	394,522,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	8 Paket	500,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	78,220,903	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	2 Paket	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	16,012,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	2 Paket	20,015,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.016.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				250 Dokumen	12,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	250 Dokumen	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	383,521,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	75 Laporan	650,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**3,107,133,095**						**100 Persen**	**3,502,500,000**	
2.016.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	2,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	20 Laporan	2,500,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1,820,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	4 Laporan	2,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,285,133,095	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	12 Laporan	1,500,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan Baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**153,152,000**						**100 Persen**	**350,000,000**	
2.016.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	50,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	4 Unit	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	92,752,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	2 Unit	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	10,400,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD Diskominfopers Kab. Inhil	100 Unit	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**9,327,521,815**						**100 Persen**	**7,200,000,000**	
2.016.02.02.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Tersampaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**9,327,521,815**						**100 Persen**	**7,200,000,000**	
2.016.02.02.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				20 Dokumen	896,700,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD	20 Dokumen	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.02.02.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				80 Dokumen	8,099,492,015	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD	80 Dokumen	6,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.02.02.01.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				20 Dokumen	88,139,900	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD	20 Dokumen	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.02.02.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				5 Dokumen	243,189,900	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD	5 Dokumen	700,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Jumlah Aplikasi PD yang jaringan Aplikasinya di awasi oleh Dinas Kominfo Pers**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**921,792,000**						**100 Persen**	**4,600,000,000**	
		Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
2.016.03.02.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Jumlah Sub Domain lingkup pemda yang dikelola**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**265,292,000**						**90 Persen**	**1,150,000,000**	
2.016.03.02.01.1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				14 Domain	30,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD	14 Domain	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.03.02.01.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				7 Dokumen	205,292,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD	7 Dokumen	650,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.016.03.02.01.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				5 Unit	30,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD	5 Unit	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.03.02.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sistem Informasi Perangkat Daerah yang telah terintegrasi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**656,500,000**						**100 Persen**	**3,450,000,000**	
2.016.03.02.02.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD	1 Dokumen	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.03.02.02.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				2 Unit	296,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD	2 Unit	1,400,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.03.02.02.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				4 Unit	30,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD	4 Unit	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.03.02.02.8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Layanan	30,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD	3 Layanan	700,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.03.02.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD	1 Dokumen	500,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.016.03.02.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				2 Dokumen	200,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD	2 Dokumen	400,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.020	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**117,900,000**							**1,000,000,000**	
2.020.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Dokumen Data Statistik Sektoral Daerah yg Tepat Waktu**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**117,900,000**						**100 Persen**	**1,000,000,000**	
2.020.02.02.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Data Statistik Sektoral yang Tersedia**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**117,900,000**						**100 Persen**	**1,000,000,000**	
2.020.02.02.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				35 Dokumen	117,900,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	35 Dokumen	1,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.021	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**50,500,000**							**1,000,000,000**	
2.021.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase PD yang Menggunakan Sistem Persandian**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**50,500,000**						**100 Persen**	**1,000,000,000**	
2.021.02.02.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sistem Persandian**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**50,500,000**						**100 Persen**	**1,000,000,000**	
2.021.02.02.01.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				2 Laporan	50,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	2 Laporan	1,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.017	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**9,499,018,606**							**8,476,821,600**	
2.017.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**80.80 Persen**		**0 Persen**	**80.80 Persen**	**6,433,881,256**						**80.80 Persen**	**6,510,321,600**	
2.017.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah**	**8 Dokumen**		**0 Dokumen**	**8 Dokumen**	**148,607,350**						**8 Dokumen**	**210,000,000**	
2.017.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	93,865,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		OPD	5 Dokumen	125,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.017.01.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	54,741,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		OPD	3 Laporan	85,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.017.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**4,915,135,363**						**100 Persen**	**5,220,000,000**	
2.017.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bular	4,915,135,363		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		ASN	30 Orang/bulan	5,220,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.017.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang tercatatkan**	**0 Persen**		**0 Persen**	**0 Persen**	**43,394,400**						**0 Persen**	**50,000,000**	
2.017.01.02.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD				4 Dokumen	43,394,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	4 Dokumen	50,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.017.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**0 Persen**		**0 Persen**	**0 Persen**	**6,250,000**						**0 Persen**	**37,836,000**	
2.017.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	6,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	0 Orang	22,336,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan				1 Diklat							1 Diklat		
2.017.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**857,003,743**						**100 persen**	**520,580,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.017.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				12 Unit	35,298,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana Prasarana Perkantoran	12 Unit	25,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.017.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan				2 Unit	54,153,323		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana Prasarana Perkantoran	2 Unit	68,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.017.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				8 Paket	30,118,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana Prasarana Perkantoran	8 Paket	15,500,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.017.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan				12 eksemplar	432,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana Prasarana Perkantoran	12 eksemplar	22,080,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.017.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan				328 Kali	305,353,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana Prasarana Perkantoran	328 Kali	390,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
2.017.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**0 Persen**		**0 Persen**	**0 Persen**	**408,570,400**						**0 Persen**	**359,685,600**	
2.017.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	1,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa	100 Persen	2,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
2.017.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	103,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa	0 Laporan	91,540,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Rekening yang dibayarkan				3 Rekening							3 Rekening		
2.017.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	303,890,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa	0 Laporan	266,145,600	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				21 Orang							21 Orang		
2.017.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Pegangkat Daerah**	**0 Persen**		**0 Persen**	**0 Persen**	**54,920,000**						**0 Persen**	**62,220,000**	
2.017.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara dan diperpanjang perizinannya (Roda 4 dan Roda 2)				28 Unit	39,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang	28 Unit	41,120,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit							0 Unit		
2.017.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				37 Unit	8,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang	37 Unit	11,600,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.017.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				17 Unit	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang	17 Unit	9,500,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
2.017.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Cakupan rekomendasi teknis Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan**	**33 Persen**		**0 Persen**	**33 Persen**	**150,000,000**						**33 Persen**	**50,000,000**	
2.017.02.02.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang Direkomendasikan**	**20 lembar**		**0 lembar**	**20 lembar**	**150,000,000**						**20 lembar**	**50,000,000**	
2.017.02.02.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi yang direkomendasikan				20 Lembar	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Koperasi	20 Lembar	50,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit Usaha							0 Unit Usaha		
2.017.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang diawasi dan di periksa**	**Persen**		**Persen**	**53,65 Persen**	**105,200,000**						**53,65 Persen**	**126,000,000**	
2.017.03.02.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/**	**Jumlah Koperasi yang Di-monitoring dan Dievaluasi**	**30 Koperasi**		**0 Koperasi**	**30 Koperasi**	**105,200,000**						**30 Koperasi**	**126,000,000**	
2.017.03.02.01.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Unit Usaha	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Koperasi	0 Unit Usaha	61,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap koperasi dan usaha mikro yang dilakukan				30 Kali							30 Kali		
2.017.03.02.01.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa				15 Koperasi	55,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Koperasi	15 Koperasi	65,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				0 Unit Usaha							0 Unit Usaha		
2.017.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya**	**65 Unit**		**0 Unit**	**65 Unit**	**115,546,000**						**65 Unit**	**140,000,000**	
2.017.04.02.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi Kriteria Penilaian**	**50 Koperasi**		**0 Koperasi**	**50 Koperasi**	**115,546,000**						**50 Koperasi**	**140,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.017.04.02.01.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam yang dinilai				60 Koperasi	49,244,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Koperasi	60 Koperasi	71,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				0 Unit Usaha							0 Unit Usaha		
2.017.04.02.01.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				0 Unit Usaha	66,302,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Koperasi	0 Unit Usaha	69,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan melalui pelaksanaan RAT tepat waktu				3 Koperasi							3 Koperasi		
2.017.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Cakupan Koperasi yang memiliiki Kompetensi berdaya saing**	**Persen**		**Persen**	**78,53 Persen**	**73,727,600**						**78,53 Persen**	**125,000,000**	
2.017.05.02.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Dilaksanakan**	**1 Kali**		**0 Kali**	**1 Kali**	**73,727,600**						**1 Kali**	**125,000,000**	
2.017.05.02.01.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang dilaksanakan				1 Kali	73,727,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Koperasi	1 Kali	125,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				0 Orang							0 Orang		
2.017.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Cakupan Usaha Mikro yang didata dan difasilitasi**	**72 Persen**		**0 Persen**	**72 Persen**	**2,010,399,050**						**72 Persen**	**870,500,000**	
2.017.07.02.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para**	**Persentase Usaha Mikro yang Terdaftar dalam Online Data System (ODS)**	**72 Persen**		**0 Persen**	**72 Persen**	**2,010,399,050**						**72 Persen**	**870,500,000**	
2.017.07.02.01.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				0 Dokumen	123,637,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Usaha Mikro	0 Dokumen	146,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam online data system (ODS)				5000 usaha mikro							5000 usaha mikro		
2.017.07.02.01.2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				0 Unit Usaha	34,645,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Usaha Mikro	0 Unit Usaha	137,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah usaha mikro yang bermitra				15 usaha mikro							15 usaha mikro		
2.017.07.02.01.3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perizinannya				100 usaha mikr	58,806,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Usaha Mikro	100 usaha mikro	134,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				0 Unit Usaha							0 Unit Usaha		
2.017.07.02.01.4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah sosisalisasi pengembangan usaha mikro yang dilaksanakan				10 Kali	1,793,310,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Usaha Mikro	10 Kali	248,500,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				0 Unit Usaha							0 Unit Usaha		
2.017.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Jumlah Skala UMKM yang meningkat**	**1407 Unit**		**0 Unit**	**1407 Unit**	**610,264,700**						**1407 Unit**	**655,000,000**	
2.017.08.02.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil**	**15 Kelompok UMKM**		**0 Kelompok UMKM**	**15 Kelompok**	**610,264,700**						**15 Kelompok UMKM**	**655,000,000**	
2.017.08.02.01.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah kelompok usaha mikro yang difasilitasi				25 Kelompok U	610,264,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	UMKM	25 Kelompok UMKM	655,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				0 Unit Usaha							0 Unit Usaha		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.018	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**14,845,578,979**							**13,764,924,264**	
2.018.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tercapai**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**11,231,664,773**						**100 Persen**	**9,664,924,264**	
2.018.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**394,450,000**						**100 Persen**	**350,000,000**	
2.018.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	394,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	7 Laporan	350,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.018.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**79 Persen**		**0 Persen**	**22 Persen**	**4,970,118,272**						**22 Persen**	**4,655,924,264**	
2.018.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				408 Orang/bula	4,970,118,272		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	408 Orang/bulan	4,655,924,264	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.018.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**51 Persen**		**0 Persen**	**51 Persen**	**269,983,000**						**51 Persen**	**350,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.018.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				18 Orang	269,983,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	18 Orang	350,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.018.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**3,684,823,901**						**100 Persen**	**2,150,000,000**	
2.018.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Jenis	2,091,326,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	4 Jenis	800,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.018.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	261,212,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	250,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.018.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	209,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.018.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				111 Laporan	1,123,285,001		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	111 Laporan	1,000,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.018.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,656,289,600**						**100 Persen**	**1,859,000,000**	
2.018.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	9,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.018.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	382,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	850,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.018.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,266,889,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	1,000,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.018.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**256,000,000**						**100 Persen**	**300,000,000**	
2.018.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	177,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Unit	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.018.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	78,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	33 Unit	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.018.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**ingkat Pengembangan Penanaman Modal**	**60 Persen**		**0 Persen**	**60 Persen**	**1,228,256,200**						**60 Persen**	**600,000,000**	
2.018.02.02.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan fasilitas/insentif penanaman modal yang terlaksana**	**1 Kegiatan**		**0 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**451,261,000**						**1 Kegiatan**	**600,000,000**	
2.018.02.02.01.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				4 Dokumen	451,261,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	600,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.018.02.02.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten Indragiri Hilir yang tersedia**	**2 Dokumen**		**0 Dokumen**	**2 Dokumen**	**776,995,200**						**2 Dokumen**	**0**	
2.018.02.02.02.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	388,785,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.018.02.02.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	388,210,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.018.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi**	**93 Pelaku Usaha**		**0 Pelaku Usaha**	**93 Pelaku Usal**	**338,449,600**						**93 Pelaku Usaha**	**600,000,000**	
		Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi	93 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha	93 Pelaku Usaha							93 Pelaku Usaha		
2.018.03.02.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal Kabupaten Indragiri Hilir**	**1 Kegiatan**		**0 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**338,449,600**						**1 Kegiatan**	**600,000,000**	
2.018.03.02.01.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	338,449,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	600,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.018.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Penanaman Modal**	**3.8 Angka**		**0 Angka**	**3.80 Angka**	**1,270,108,100**						**3.80 Angka**	**1,450,000,000**	
2.018.04.02.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal yang terlaksana**	**13 Kegiatan**		**0 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**1,270,108,100**						**3 Kegiatan**	**1,450,000,000**	
2.018.04.02.01.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara				575 Pelaku Usa	933,210,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	575 Pelaku Usaha	1,000,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
									Dana Insentif Daerah						
2.018.04.02.01.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				1 Kegiatan Usal	249,897,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan Usaha	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.018.04.02.01.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				20 Orang	87,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Orang	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.018.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Tingkat kedisiplinan pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha**	**80 Persen**		**0 Persen**	**80 Persen**	**217,896,206**						**80 Persen**	**450,000,000**	
2.018.05.02.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana**	**11 Kegiatan**		**0 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**217,896,206**						**3 Kegiatan**	**450,000,000**	
2.018.05.02.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan				3 Kegiatan Usal	73,774,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Kegiatan Usaha.	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.018.05.02.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				40 Pelaku Usah	68,000,206		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	40 Pelaku Usaha	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
									DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.018.05.02.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				3 Kegiatan	76,122,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Kegiatan	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
									DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal						
2.018.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**3.00 Nilai**		**0 Nilai**	**3.00 Nilai**	**559,204,100**						**3.00 Nilai**	**1,000,000,000**	
2.018.06.02.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi penanaman modal yang terlaksana**	**5 Kegiatan**		**0 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**559,204,100**						**1 Kegiatan**	**1,000,000,000**	
2.018.06.02.01.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan				1 Kegiatan	559,204,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	1,000,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.019	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**22,167,556,581**							**35,980,673,193**	
2.019.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**70 Persen**		**0 Persen**	**70 Persen**	**8,334,556,581**						**70 Persen**	**9,730,673,193**	
2.019.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**881,680,750**						**90 Persen**	**1,222,138,400**	
2.019.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	616,680,750	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		ASN Disparporabud	4 Dokumen	922,138,400	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				5 Dokumen	265,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Disparporabud Kab. Inhil	5 Dokumen	300,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2.019.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**5,140,875,730**						**100 Persen**	**5,408,534,793**	
2.019.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	5,100,875,730	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		ASN Disparporabud	35 Orang/bulan	5,348,534,793	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.01.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		ASN Disparporabud	1 Dokumen	30,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.01.02.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	25,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		ASN Disparporabud	0 Dokumen	30,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen							1 Dokumen		
2.019.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**30,000,000**						**90 Persen**	**30,000,000**	
2.019.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	30,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		ASN Disparporabud	0 Orang	30,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Diklat							2 Diklat		
2.019.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**1,170,000,000**						**100 Persen**	**1,790,000,000**	
2.019.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Disprporabud	1 Paket	110,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	150,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Disprporabud	5 Paket	450,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	80,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Disprporabud	1 Paket	100,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Disprporabud	1 Paket	260,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Disprporabud	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	575,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Disprporabud	40 Laporan	600,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Disprporabud	1 Dokumen	250,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**817,000,000**						**100 Persen**	**820,000,000**	
2.019.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	30,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Disparporabud	3 Laporan	20,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	175,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Disparporabud	3 Laporan	180,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	612,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Disparporabud	6 Laporan	620,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**		**Persen**	**10 Persen**	**295,000,101**						**10 Persen**	**430,000,000**	
2.019.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	95,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		ASN Disparporabud	4 Unit	100,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	100,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		ASN Disparporabud	5 Unit	250,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	100,000,101	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		ASN Disparporabud	5 Unit	80,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Pemuda yang Berdaya Saing**	**55 Persen**		**0 Persen**	**55 Persen**	**1,395,000,000**						**55 Persen**	**1,800,000,000**	
2.019.02.02.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan**	**Cakupan Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan**	**Organisasi**		**Organisasi**	**7 Organisasi**	**1,145,000,000**						**7 Organisasi**	**1,450,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.019.02.02.01.6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 unit	45,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Pemuda/i Kabupaten	1 unit	200,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.02.02.01.8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				50 Orang	250,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemuda/i Kabupaten Indragiri Hilir	50 Orang	250,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2.019.02.02.01.9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan				30 orang	850,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Pemuda/i Kabupaten	30 orang	1,000,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.02.02.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan**	**Organisasi**		**Organisasi**	**5 Organisasi**	**250,000,000**						**5 Organisasi**	**350,000,000**	
2.019.02.02.02.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				10 Orang	100,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pemuda/i Kabupaten Indragiri Hilir	10 Orang	100,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2.019.02.02.02.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Pemuda/i Kabupaten	1 Dokumen	250,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Atlit Berprestasi yang Meningkat**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**11,788,000,000**						**100 Persen**	**23,350,000,000**	
2.019.03.02.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan**	**Cakupan Olahraga Pendidikan yang didibina dan dikembangkan**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**6,998,000,000**						**80 Persen**	**10,000,000,000**	
2.019.03.02.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				10 unit	6,998,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kab. Inhil	10 unit	10,000,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2.019.03.02.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan/dikuti**	**Persen**		**Persen**	**70 Persen**	**2,052,250,000**						**70 Persen**	**1,500,000,000**	
2.019.03.02.02.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1,060,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Masyarakat Kab. Inhil	2 Dokumen	500,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.03.02.02.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				50 Orang	992,250,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Masyarakat Kab. Inhil	50 Orang	1,000,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.03.02.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan Olahraga Prestasi yang dibina dan dikembangkan**	**orang**		**orang**	**35 orang**	**567,750,000**						**35 orang**	**1,550,000,000**	
2.019.03.02.03.1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				50 Orang	250,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Pemuda/i Kab. Inhil	50 Orang	600,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.03.02.03.2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				5 Pelatda	317,750,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Pemuda/i Kab. Inhil	5 Pelatda	950,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.03.02.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Cakupan Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan**	**Organisasi**		**Organisasi**	**3 Organisasi**	**1,920,000,000**						**3 Organisasi**	**10,000,000,000**	
2.019.03.02.04.2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 Organisasi	1,920,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi keolahragaan	1 Organisasi	10,000,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.03.02.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Cakupan Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan**	**Jenis**		**Jenis**	**2 Jenis**	**250,000,000**						**2 Jenis**	**300,000,000**	
2.019.03.02.05.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	250,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Indragiri Hilir	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Cakupan pembinaan Kepramukaan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**650,000,000**						**100 Persen**	**1,100,000,000**	
2.019.04.02.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Cakupan Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**650,000,000**						**100 Persen**	**1,100,000,000**	
2.019.04.02.01.2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	500,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Kelompok Organisasi	1 Organisasi	700,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.019.04.02.01.7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	150,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Kelompok Organisasi	1 Unit	400,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.022	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**4,921,616,000**							**7,256,000,000**	
2.022.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Keragaman Budaya yang Berkembang**	**4 Jenis**		**0 Jenis**	**4 Jenis**	**3,295,000,000**						**4 Jenis**	**5,256,000,000**	
2.022.02.02.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan**	**Jenis**		**Jenis**	**1 Jenis**	**700,000,000**						**1 Jenis**	**2,000,000,000**	
2.022.02.02.02.3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				3 Sertifikat	700,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kab. Inhil	3 Sertifikat	2,000,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2.022.02.02.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Lembaga Adat yang dibina**	**lembaga**		**lembaga**	**1 lembaga**	**2,595,000,000**						**1 lembaga**	**3,256,000,000**	
2.022.02.02.03.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Adat yang dilaksanakan				10 orang	320,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Lembabaga Adat	10 orang	400,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				0 Orang							0 Orang		
2.022.02.02.03.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	2,275,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Lembabaga Adat	1 Unit	2,856,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.022.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Cakupan Kesenian Tradisional yang Berkembang**	**40 Persen**		**0 Persen**	**40 Persen**	**476,616,000**						**40 Persen**	**500,000,000**	
2.022.03.02.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**476,616,000**						**90 Persen**	**500,000,000**	
2.022.03.02.01.3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	476,616,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kab. Inhil	3 Lembaga	500,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
2.022.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan**	**4 Cagar Budaya**		**0 Cagar Budaya**	**4 Cagar Buday**	**1,150,000,000**						**4 Cagar Budaya**	**1,500,000,000**	
2.022.05.02.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dikelola**	**Persen**		**Persen**	**60 Persen**	**1,150,000,000**						**60 Persen**	**1,500,000,000**	
2.022.05.02.02.2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	1,150,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Situs Cagar Budaya Kab. Inhil	2 Objek	1,500,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.026	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**4,230,000,000**							**4,848,800,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.026.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Cakupan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Meningkat**	**50 Persen**		**0 Persen**	**50 Persen**	**3,245,000,000**						**50 Persen**	**3,848,800,000**	
3.026.02.02.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**975,000,000**						**90 Persen**	**1,212,800,000**	
3.026.02.02.01.3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang,				3 Lokasi	975,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Masyarakat Kab. Inhil	3 Lokasi	1,212,800,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
3.026.02.02.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Prasarana Pariwisata yang Memenuhi Standar**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**2,270,000,000**						**80 Persen**	**2,536,000,000**	
3.026.02.02.03.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	2,270,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Destinasi Pariwisata Kab. Inhil	3 Unit	2,536,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
3.026.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata**	**50 Persen**		**0 Persen**	**50 Persen**	**885,000,000**						**50 Persen**	**800,000,000**	
3.026.03.02.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata**	**Persentase Ketertarikan atas Destinasi Pariwisata yang Dipromosikan**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**885,000,000**						**80 Persen**	**800,000,000**	
3.026.03.02.01.1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam				1 Dokumen	885,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kab. Inhil	1 Dokumen	800,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
3.026.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Cakupan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang**	**40 Persen**		**0 Persen**	**40 Persen**	**100,000,000**						**40 Persen**	**200,000,000**	
3.026.05.02.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula yang Diberikan Pelatihan**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**100,000,000**						**80 Persen**	**200,000,000**	
3.026.05.02.01.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				30 Orang	100,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Kepariwistaan dan Ekonomi Kreatif Kab. Inhil	30 Orang	200,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.023	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**7,914,263,905**							**0**	
2.023.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-rat nilai aspek perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja dalam Akip Perangkat Daerah**	**Nilai**		**Nilai**	**22 Nilai**	**5,171,532,385**						**22 Nilai**	**0**	
2.023.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase perenanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**Persent**		**Persent**	**100 Persent**	**84,345,100**						**100 Persent**	**0**	
2.023.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				3 Dokumen	84,345,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pelaporan Kinerja SKPD	3 Dokumen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dibayarkannya gaji ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah**	**Persent**		**Persent**	**100 Persent**	**2,655,173,985**						**100 Persent**	**0**	
2.023.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bular	2,655,173,985		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	22 Orang/bulan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang operasinal kantor**	**Persent**		**Persent**	**100 Persent**	**936,475,700**						**100 Persent**	**0**	
2.023.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Disediakan				10 Jenis	7,213,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	10 Jenis	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Jenis	494,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	15 Jenis	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Jenis	104,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3 Jenis	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Jenis	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	8 Jenis	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan				12 Bulan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				10 Kali	312,562,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	10 Kali	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dala kondisi baik**	**Persent**		**Persent**	**100 Persent**	**1,351,037,600**						**100 Persent**	**0**	
2.023.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Administrasi Perkantoran	100 Persen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.023.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan				2 Rekening	731,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Administrasi Perkantoran	2 Rekening	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				58 Orang	616,517,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Administrasi Perkantoran	58 Orang	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara**	**Persent**		**Persent**	**100 Persent**	**144,500,000**						**100 Persent**	**0**	
2.023.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas /operasional/lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kendaraan dinas kantor	14 Unit	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	44,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kendaraan dinas kantor	15 Unit	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Tenaga Pengelolaan Perpustakaan Pendidikan Dasar, Khusus, Desa, Kelurahan dan Kecamatan**	**Persent**		**Persent**	**70 Persent**	**2,742,731,520**						**70 Persent**	**0**	
2.023.02.02.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah bahan bacaan perpustakaan dan Peningkatan Gedung Perpustakaan**	**Persent**		**Persent**	**70 Persent**	**716,507,550**						**70 Persent**	**0**	
2.023.02.02.01.4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pustakawan, tenaga teknis dan penilai pada satuan pendidikan dasar yang memiliki sertifikat				5 Perpustakaan	114,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Perpustakaan Pendidikan Dasar, Khusus, Desa, Kelurahan dan Kecamatan	5 Perpustakaan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.02.02.01.5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai pada Perpustakaan khusus yang memiliki sertifikat				30 Pengelola Pe	85,900,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Perpustakaan Pendidikan Dasar, Khusus, Desa, Kelurahan dan Kecamatan	30 Pengelola Perpustakaan Sekolah/Madrasah	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.02.02.01.7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung perpustakaan agar gemar membaca				65000 Orang	430,507,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Perpustakaan Pendidikan Dasar, Khusus, Desa, Kelurahan dan Kecamatan	65000 Orang	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.02.02.01.9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan perpustakaan				430 Eksemplar	86,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Perpustakaan Pendidikan Dasar, Khusus, Desa, Kelurahan dan Kecamatan	430 Eksemplar	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.02.02.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Baca dan Literasi yang dilaksanakan**	**Persent**		**Persent**	**100 Persent**	**2,026,223,970**						**100 Persent**	**0**	
2.023.02.02.02.1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah sosialisasi budaya baca dan lieterasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat yang dilaksanakan				1 kegiatan	139,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat se Kab. Inhil	1 kegiatan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.023.02.02.02.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perpustakaan yang dibangun/dipelihara				1 Unit	1,887,223,970		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat se Kab. Inhil	1 Unit	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.024	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**349,996,800**							**0**	
2.024.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku**	**43 Persen**		**0 Persen**	**43 Persen**	**349,996,800**						**43 Persen**	**0**	
2.024.02.02.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Arsip Dinamis yang terpelihara**	**Persent**		**Persent**	**100 Persent**	**349,996,800**						**100 Persent**	**0**	
2.024.02.02.01.1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah SDM Pengelola Arsip yang dilatih				25 OPD	99,997,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Arsip se Kabupaten Indragiri Hilir	25 OPD	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.024.02.02.01.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Daerah yang dipelihara				5 OPD	99,999,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Arsip se Kabupaten Indragiri Hilir	5 OPD	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.024.02.02.01.3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD di Audit dan dibina				20 OPD	149,999,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Arsip se Kabupaten Indragiri Hilir	20 OPD	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.025	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**14,054,679,810**							**20,578,920,000**	
3.025.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**7,776,631,360**						**100 Persen**	**6,978,920,000**	
3.025.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan dan pelaporan Capaian kinerja yang disusun sesuai standar**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**469,270,950**						**100 Persen**	**250,000,000**	
3.025.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	296,590,950	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	5 Dokumen	150,000,000	DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.025.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				4 Laporan	172,680,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	4 Laporan	100,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Aset dan Keuangan yang dimuat sesuai standar**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**4,641,542,320**						**100 Persen**	**4,755,000,000**	
3.025.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	4,641,542,320	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	34 Orang/bulan	4,755,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik dan yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**50 Persen**		**0 Persen**	**50 Persen**	**30,500,000**						**50 Persen**	**50,000,000**	
3.025.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	30,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	5 Orang	50,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**95 Persen**		**0 Persen**	**95 Persen**	**1,464,082,815**						**95 Persen**	**1,043,920,000**	
3.025.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	115,339,600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	2 Paket	50,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	184,283,800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	4 Paket	150,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	360,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	3 Paket	160,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	30,853,415	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	3 Paket	20,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				9 Dokumen	13,920,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	9 Dokumen	13,920,000	DINAS PERIKANAN
3.025.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	759,686,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	180 Laporan	650,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**106,340,000**						**100 Persen**	**150,000,000**	
3.025.01.02.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	106,340,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	3 Unit	150,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**404,895,275**						**100 Persen**	**405,000,000**	
3.025.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	5,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	600 Laporan	5,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	103,800,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	48 Laporan	100,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				240 Laporan	296,095,275	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	240 Laporan	300,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**660,000,000**						**100 Persen**	**325,000,000**	
3.025.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	210,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	5 Unit	150,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	250,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	1 Unit	100,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	200,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten	65 Unit	75,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap**	**Ton**		**Ton**	**83000 Ton**	**4,355,338,300**						**83000 Ton**	**7,450,000,000**	
3.025.03.02.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/**	**Persentase KUB/Kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan Sapras Penangkapan ikan**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**4,140,000,000**						**90 Persen**	**7,200,000,000**	
3.025.03.02.01.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah jenis data perikanan tangkap yang dihasilkan				3 Jenis	70,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	3 Jenis	200,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.03.02.01.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				55 Kelompok	4,070,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	55 Kelompok	3,000,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.03.02.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemberdayaan Nelayan Kecil**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**100,000,000**						**100 Persen**	**100,000,000**	
3.025.03.02.02.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				15 Kelompok	100,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha Perikanan	15 Kelompok	100,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.03.02.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase TPI sesuai standard**	**80 Persen**		**0 Persen**	**80 Persen**	**115,338,300**						**80 Persen**	**150,000,000**	
3.025.03.02.03.2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				5 Layanan	115,338,300	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha Perikanan	5 Layanan	150,000,000	DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.025.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**Ton**		**Ton**	**5500 Ton**	**1,738,845,850**						**5500 Ton**	**5,850,000,000**	
3.025.04.02.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pembudidayaan ikan yang memiliki izin usaha budidaya perikanan**	**80 Persen**		**0 Persen**	**80 Persen**	**84,755,000**						**80 Persen**	**0**	
3.025.04.02.01.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau					0 Rekomendasi	84,755,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	0 Rekomendasi	0	DINAS PERIKANAN
		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				2 Rekomendasi							2 Rekomendasi		
		Persentase Pembudidaya Ikan yang memiliki Izin Usaha Budidaya Perikanan				100 %							100 %		
		Produksi Perikanan Budidaya				5000 ton							5000 ton		
3.025.04.02.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Cakupan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**162,000,000**						**100 Persen**	**150,000,000**	
3.025.04.02.02.1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				3 Kelompok	162,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	3 Kelompok	150,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.04.02.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Cakupan sapras Pembudidayaan Ikan yang tersedia**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**1,492,090,850**						**90 Persen**	**5,700,000,000**	
3.025.04.02.04.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Data Perikanan				3 Jenis	188,466,800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	3 Jenis	150,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.04.02.04.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	254,088,450	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	5 Unit	2,500,000,000	DINAS PERIKANAN
									Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
3.025.04.02.04.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				15 Unit	699,624,250	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	15 Unit	2,000,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.04.02.04.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				4 Pokdakan	105,739,550	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	4 Pokdakan	300,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.04.02.04.5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				8 Kelompok	50,302,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	8 Kelompok	250,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.04.02.04.6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				9.466 Ha	193,869,100	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	9.466 Ha	500,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**ketersediaan pangan dan Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun**	**Kg/Kapita/Th**		**Kg/Kapita/Th**	**40,20 Kg/Kapi**	**183,864,300**						**40,20 Kg/Kapita/Th**	**300,000,000**	
3.025.06.02.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Persentase pembudidayaan ikan Skala Mikro dan Kecil yang memiliki Usaha Pengolahan Hasil Perikanan serta Cakupan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan**	**70 Persen**		**0 Persen**	**70 Persen**	**126,439,500**						**70 Persen**	**100,000,000**	
3.025.06.02.01.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	126,439,500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku Usaha Perikanan Tangkap/Budida	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERIKANAN
3.025.06.02.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pembudidayaan ikan Skala Mikro dan Kecil yang memiliki Usaha Pengolahan Hasil Perikanan serta Cakupan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**57,424,800**						**90 Persen**	**200,000,000**	
3.025.06.02.03.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				48 Ton	57,424,800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha Perikanan Tangkap/Budida	48 Ton	200,000,000	DINAS PERIKANAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.027	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**33,092,289,625**							**55,685,955,865**	
3.027.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**76.16 Persen**		**0 Persen**	**76.16 Persen**	**10,690,538,652**						**76.16 Persen**	**11,119,310,579**	
3.027.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan yang disusun**	**Dokumen**		**Dokumen**	**14 Dokumen**	**393,978,514**						**14 Dokumen**	**635,044,000**	
3.027.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	286,413,514	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Aparatur Dinas Perkebunan	6 Dokumen	500,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				4 Laporan	28,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Perkebunan	4 Laporan	29,114,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	79,405,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Perkebunan	4 Laporan	105,930,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah gaji ASN**	**Tahun**		**Tahun**	**1 Tahun**	**7,203,491,779**						**1 Tahun**	**7,353,933,779**	
3.027.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bular	7,198,541,779	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Dinas Perkebunan	75 Orang/bulan	7,346,933,779	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Dinas Perkebunan	1 Laporan	7,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada pengelola yang tercatatkan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**713,798,400**						**100 Persen**	**890,997,000**	
3.027.01.02.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	57,974,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Dinas Perkebunan	4 Dokumen	60,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	655,824,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Aparatur Dinas Perkebunan	5 Laporan	830,997,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**1,273,654,759**						**100 Persen**	**1,197,153,650**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.027.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	25,628,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Dinas Perkebunan	3 Paket	50,050,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	240,127,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Dinas Perkebunan	20 Paket	300,599,900	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	125,754,609	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Dinas Perkebunan	2 Paket	105,909,500	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	17,237,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Dinas Perkebunan	5 Paket	22,237,250	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Dinas Perkebunan	13 Dokumen	25,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	739,907,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Dinas Perkebunan	200 Laporan	693,357,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah tenaga operator dan tenaga kebersihan yang dibayar**	**Orang**		**Orang**	**28 Orang**	**698,011,200**						**28 Orang**	**619,011,200**	
3.027.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Dinas Perkebunan	3 Laporan	3,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	222,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Dinas Perkebunan	4 Laporan	142,500,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				27 Laporan	473,511,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Dinas Perkebunan	27 Laporan	473,511,200	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**396,904,000**						**100 Persen**	**412,470,950**	
3.027.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	124,604,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Dinas Perkebunan	3 Unit	115,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 jenis	38,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Dinas Perkebunan	10 jenis	47,500,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	234,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER		Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Aparatur Dinas Perkebunan	2 Unit	249,970,950	DINAS PERKEBUNAN
3.027.01.02.13	**Penataan Organisasi**	**Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang disusun**	**Dokumen**		**Dokumen**	**2 Dokumen**	**10,700,000**						**2 Dokumen**	**10,700,000**	
3.027.01.02.13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	10,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Dinas Perkebunan	2 Dokumen	10,700,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan**	**45.75 Persen**		**0 Persen**	**45.75 Persen**	**5,877,080,400**						**45.75 Persen**	**16,505,529,400**	
3.027.02.02.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah varietas bibit unggul dan blok penghasil tinggi yang ada ditanakan**	**Komoditas**		**Komoditas**	**3 Komoditas**	**5,455,428,400**						**3 Komoditas**	**16,004,871,400**	
3.027.02.02.01.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan				2 Laporan	132,117,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER		Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Petani dan Kelompok Tani	2 Laporan	176,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.02.02.01.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				11 Laporan	5,323,311,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Petani dan Kelompok Tani	11 Laporan	15,828,871,400	DINAS PERKEBUNAN
3.027.02.02.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan**	**Jumlah bibit unggul yang disediakan**	**batang**		**batang**	**8000 batang**	**421,652,000**						**8000 batang**	**500,658,000**	
		Luas lahan pangan yang diremajakan	Ha		Ha	4 Ha							4 Ha		
3.027.02.02.02.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	113,562,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Petani, Kelompok Tani dan Penangkar	2 Dokumen	200,658,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.02.02.02.3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	308,090,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Petani, Kelompok Tani dan Penangkar	3 Dokumen	300,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan**	**45.22 Persen**		**0 Persen**	**45.22 Persen**	**11,989,486,573**						**45.22 Persen**	**22,776,515,886**	
3.027.03.02.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Dokumen kawasan pembangunan komoditas perkebunan**	**Dokumen**		**Dokumen**	**5 Dokumen**	**330,872,000**						**5 Dokumen**	**373,600,000**	
		Jumlah lahan pangan perkebunan yang dibangun	Ha		Ha	10 Ha							10 Ha		
3.027.03.02.01.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang				1 Dokumen	79,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Petani dan Kelompok Tani	1 Dokumen	79,100,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.03.02.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2 Laporan	151,772,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Petani dan Kelompok Tani	2 Laporan	194,500,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.03.02.01.4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Petani dan Kelompok Tani	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.03.02.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**11,658,614,573**						**90 Persen**	**22,402,915,886**	
3.027.03.02.02.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				35 Unit	8,378,579,773	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Petani dan Kelompok Tani	35 Unit	13,627,181,086	DINAS PERKEBUNAN
									Dana Insentif Daerah						
3.027.03.02.02.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				20 lokasi	1,631,876,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Petani dan Kelompok Tani	20 lokasi	4,180,636,900	DINAS PERKEBUNAN
									DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian						
3.027.03.02.02.6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				20 Unit	1,042,128,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Petani dan Kelompok Tani	20 Unit	3,329,328,400	DINAS PERKEBUNAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian						
3.027.03.02.02.9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				8 Unit	606,029,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Petani dan Kelompok Tani	8 Unit	1,265,769,500	DINAS PERKEBUNAN
3.027.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penurunan Serangan OPT**	**Persen**		**Persen**	**42 Persen**	**1,851,612,000**						**42 Persen**	**2,484,600,000**	
3.027.05.02.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase Penurunan Serangan OPT**	**persen**		**persen**	**56.25 persen**	**1,851,612,000**						**56.25 persen**	**2,484,600,000**	
3.027.05.02.01.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				200 Ha	154,090,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		petani dan kelompok tani	200 Ha	200,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.05.02.01.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				50 Ha	116,372,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	petani dan kelompok tani	50 Ha	150,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.05.02.01.5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				14 Laporan	1,581,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		petani dan kelompok tani	14 Laporan	2,134,600,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang di terbitkan dan evaluasi**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**500,000,000**						**90 Persen**	**150,000,000**	
3.027.06.02.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi izinnya**	**Perusahaan**		**Perusahaan**	**26 Perusahaan**	**500,000,000**						**26 Perusahaan**	**150,000,000**	
3.027.06.02.01.3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi				7 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Perusahaan	7 Laporan	150,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan bina kelompok petani**	**65 Persen**		**0 Persen**	**65 Persen**	**2,183,572,000**						**65 Persen**	**2,650,000,000**	
3.027.07.02.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan petani**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**2,183,572,000**						**80 Persen**	**2,650,000,000**	
3.027.07.02.01.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Unit	1,539,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Petani, Kelompok Tani	8 Unit	2,000,000,000	DINAS PERKEBUNAN
		Jumlah Penyuluh perkebunan yangdi bayarkan dan ditingkatkan kapasitasnya				75 orang							75 orang		
3.027.07.02.01.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Unit	365,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Petani, Kelompok Tani	3 Unit	150,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.07.02.01.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				20 Unit	198,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Petani, Kelompok Tani	20 Unit	300,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3.027.07.02.01.5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				6 Unit	79,952,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN TRANSFER			Petani, Kelompok Tani	6 Unit	200,000,000	DINAS PERKEBUNAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**2,958,000,000**							**4,010,000,000**	
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Cakupan inprastruktur dan seluruh kemandirian pangan yang tersedia**	**75.71 Persen**		**0 Persen**	**75.71 Persen**	**1,330,000,000**						**75.71 Persen**	**1,720,000,000**	
2.09.02.02.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan**	**Persen**		**Persen**	**91.9 Persen**	**1,330,000,000**						**91.9 Persen**	**1,720,000,000**	
2.09.02.02.01.1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				5 Unit	650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani	5 Unit	720,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2.09.02.02.01.3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				5 Unit	680,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani	5 Unit	1,000,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga**	**83.29 Persen**		**0 Persen**	**83.29 Persen**	**1,190,000,000**						**83.29 Persen**	**1,810,000,000**	
2.09.03.02.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan**	**Cakupan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang tersedia dan disalurkan**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**169,000,000**						**90 Persen**	**600,000,000**	
2.09.03.02.01.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				12 Laporan	69,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani dan Masyarakat	12 Laporan	360,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2.09.03.02.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani dan Masyarakat	1 Laporan	120,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2.09.03.02.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Ketersediaan Pangan Daerah**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**211,000,000**						**80 Persen**	**550,000,000**	
2.09.03.02.02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	211,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani dan Masyarakat	1 Laporan	300,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2.09.03.02.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi**	**Persen**		**Persen**	**93.2 Persen**	**810,000,000**						**93.2 Persen**	**660,000,000**	
2.09.03.02.04.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani,	1 Dokumen	120,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2.09.03.02.04.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				10 Laporan	710,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani,	10 Laporan	540,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Ketersediaan pangan Utama**	**66.67 Persen**		**0 Persen**	**66.67 Persen**	**338,000,000**						**66.67 Persen**	**360,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.09.04.02.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah daerah rawan pangan yang di beri bantuan**	**Kecamatan**		**Kecamatan**	**2 Kecamatan**	**338,000,000**						**2 Kecamatan**	**360,000,000**	
2.09.04.02.02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	338,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Masyarakat	12 Laporan	360,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan**	**85 Persen**		**0 Persen**	**85 Persen**	**100,000,000**						**85 Persen**	**120,000,000**	
2.09.05.02.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Monev Pengawasan Keamanan Pangan segar**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**100,000,000**						**90 Persen**	**120,000,000**	
2.09.05.02.01.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Masyarakat	1 Dokumen	120,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.027	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**21,602,219,933**							**24,740,797,840**	
3.027.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**15,301,694,219**						**100 Persen**	**17,879,597,840**	
3.027.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja dan Pelaporan kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**631,399,300**						**90 Persen**	**952,662,800**	
3.027.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	308,301,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	6 Dokumen	500,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	323,098,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	9 Laporan	452,662,800	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**12,004,088,219**						**100 Persen**	**14,000,000,000**	
3.027.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/bula	12,004,088,219	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN dan PPPK	130 Orang/bulan	14,000,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang tervalidasi**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**166,539,200**						**90 Persen**	**138,000,000**	
3.027.01.02.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	59,659,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	4 Dokumen	18,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	106,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	12 Laporan	120,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**15,000,000**						**90 Persen**	**120,000,000**	
3.027.01.02.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	4 Dokumen	18,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**923,576,700**						**80 Persen**	**926,040,000**	
3.027.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	265,384,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	16 Paket	180,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	69,982,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	8 Paket	96,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	27,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	5 Paket	38,040,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	12 Dokumen	12,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95 Laporan	550,410,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	95 Laporan	600,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**530,880,000**						**90 Persen**	**0**	
3.027.01.02.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	530,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	1 Unit	0	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.027.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**647,270,800**						**90 Persen**	**998,895,040**	
3.027.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	1 Laporan	4,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	136,549,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	12 Laporan	163,859,040	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	506,721,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	12 Laporan	831,036,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**382,940,000**						**90 Persen**	**744,000,000**	
3.027.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	71,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	2 Unit	102,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	5 Unit	120,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	206,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	5 Unit	480,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN, PPPK dan Non ASN	20 Unit	42,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri**	**90.95 Persen**		**0 Persen**	**90.95 Persen**	**2,414,908,714**						**90.95 Persen**	**2,100,000,000**	
3.027.02.02.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Cakupan Monev Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**553,322,500**						**90 Persen**	**480,000,000**	
3.027.02.02.01.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	553,322,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani	2 Laporan	480,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.02.02.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembibitan Ternak**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**185,000,000**						**80 Persen**	**120,000,000**	
3.027.02.02.02.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	185,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani dan Masyarakat	1 Dokumen	120,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.02.02.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengendalian dan pengawasan peredaran bibit ternak**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**1,676,586,214**						**80 Persen**	**1,500,000,000**	
3.027.02.02.05.1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar				1100 Ekor	1,676,586,214	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani, Kelompok Ternak	1100 Ekor	1,500,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian**	**75.56 Persen**		**0 Persen**	**75.56 Persen**	**2,244,770,500**						**75.56 Persen**	**2,958,000,000**	
3.027.03.02.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Cakupan Prasarana Pertanian yang dikembangkan**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**927,831,000**						**80 Persen**	**740,000,000**	
3.027.03.02.01.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang				1 Dokumen	326,831,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani, Masyarakat	1 Dokumen	180,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.03.02.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	601,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani, Masyarakat	1 Laporan	560,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.03.02.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Cakupan Prasarana Pertanian yang dibangun**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**1,316,939,500**						**80 Persen**	**2,218,000,000**	
3.027.03.02.02.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				7 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani, Masyarakat	7 Unit	1,288,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.03.02.02.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani, Masyarakat	5 Unit	180,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.03.02.02.9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	616,939,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani, Masyarakat	3 Unit	150,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH/Aman sehat utuh dan halal)**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**390,000,000**						**100 Persen**	**594,400,000**	
3.027.04.02.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Pada daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**190,000,000**						**80 Persen**	**134,400,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.027.04.02.01.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				5 Laporan	190,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Masyarakat dan Kelompok Tani	5 Laporan	134,400,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.04.02.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Cakupan Monev Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**200,000,000**						**80 Persen**	**360,000,000**	
3.027.04.02.04.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				3 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Masyarakat, Pedagang Bahan Pangan Asal Hewan dan Juru Sembelih Hewan	3 Laporan	360,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penurunan Serangan OPT**	**70 Persen**		**0 Persen**	**70 Persen**	**50,000,000**						**70 Persen**	**180,000,000**	
3.027.05.02.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan OPT**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**50,000,000**						**80 Persen**	**180,000,000**	
3.027.05.02.01.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				5 Ha	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kelompok Tani	5 Ha	180,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan bina kelompok petani**	**73.04 Persen**		**0 Persen**	**73.04 Persen**	**1,200,846,500**						**73.04 Persen**	**1,028,800,000**	
3.027.07.02.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan bina kelompoktani**	**Persen**		**Persen**	**70 Persen**	**1,200,846,500**						**70 Persen**	**1,028,800,000**	
3.027.07.02.01.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Unit	448,303,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Penyuluh Pertanian ASN, PPPK dan Non ASN dan Lembaga Petani	2 Unit	480,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.027.07.02.01.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Unit	752,543,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Penyuluh Pertanian ASN, PPPK dan Non ASN dan Lembaga Petani	2 Unit	132,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.030	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**9,823,298,023**							**14,072,138,131**	
3.030.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**6,283,166,131**						**100 Persen**	**7,915,899,431**	
		Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai							22 Nilai		
3.030.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**252,139,850**						**100 Persen**	**475,000,000**	
3.030.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	153,090,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Perdagangan dan	6 Dokumen	300,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				6 Laporan	99,049,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Perdagangan dan	6 Laporan	175,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**5,009,849,431**						**100 Persen**	**5,160,899,431**	
3.030.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	4,980,699,431		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	49 Orang/bulan	5,100,899,431	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	29,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 Laporan	60,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ penambahan kompetensi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**26,072,000**						**100 Persen**	**100,000,000**	
3.030.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	26,072,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	5 Orang	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**580,012,850**						**100 Persen**	**1,255,000,000**	
3.030.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24,814,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		OPD	1 Paket	60,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	168,390,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		OPD	3 Paket	350,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	49,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		OPD	3 Paket	150,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		OPD	2 Paket	70,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	5,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		OPD	10 Dokumen	25,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	307,108,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		OPD	50 Laporan	600,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**188,823,200**						**100 Persen**	**345,000,000**	
3.030.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	1 Laporan	15,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	3 Laporan	180,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	83,383,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	1 Laporan	150,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**226,268,800**						**100 Persen**	**580,000,000**	
3.030.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	73,859,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	20 Unit	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	22,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	30 Unit	80,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	130,409,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	1 Unit	300,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.030.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang Direkomendasikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**59,224,250**						**100 Persen**	**150,000,000**	
3.030.02.02.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Persentase Peningkatan Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan**	**Dokumen**		**Dokumen**	**3 Dokumen**	**35,404,250**						**3 Dokumen**	**100,000,000**	
3.030.02.02.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				3 Dokumen	35,404,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	3 Dokumen	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.02.02.07	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**	**Cakupan Penerbitan SKA**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**23,820,000**						**100 Persen**	**50,000,000**	
3.030.02.02.07.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				3600 Dokumen	23,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	3600 Dokumen	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Cakupan Harga Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kecamatan yang Dipantau**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,494,112,992**						**100 Persen**	**2,600,000,000**	
3.030.03.02.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik**	**0 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,182,242,592**						**100 Persen**	**2,000,000,000**	
3.030.03.02.01.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	945,332,042	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	Masyarakat	5 Unit	1,500,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.03.02.01.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				8 Unit	236,910,550	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	Masyarakat	8 Unit	500,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.03.02.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**Dokumen**		**Dokumen**	**24 Dokumen**	**311,870,400**						**24 Dokumen**	**600,000,000**	
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kali		Kali	4 Kali							4 Kali		
3.030.03.02.02.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				24 Dokumen	311,870,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	Masyarakat	24 Dokumen	600,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Cakupan Harga Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kecamatan yang Dipantau**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**338,551,500**						**100 Persen**	**550,000,000**	
3.030.04.02.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**328,861,500**						**100 Persen**	**500,000,000**	
3.030.04.02.01.3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				240 Laporan	328,861,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	240 Laporan	500,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.04.02.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Cakupan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Dimonitoring dan Dievaluasi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**9,690,000**						**100 Persen**	**50,000,000**	
3.030.04.02.02.2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				20 Laporan	9,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	20 Laporan	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Ekspor Bersih Perdagangan**	**0 US Dolar**		**0 US Dolar**	**522.32 US Dol**	**938,175,000**						**522.32 US Dolar**	**1,500,000,000**	
3.030.05.02.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah**	**Jumlah Promosi Dagang yang di ikuti**	**Kali**		**Kali**	**5 Kali**	**938,175,000**						**5 Kali**	**1,500,000,000**	
3.030.05.02.01.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				5 Pelaku Usaha	938,175,000		PENDAPATAN TRANSFER			Masyarakat	5 Pelaku Usaha	1,500,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat standar tera/tera ulang**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**611,995,050**						**100 Persen**	**1,156,238,700**	
3.030.06.02.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan yang dilaksanakan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**611,995,050**						**100 Persen**	**1,156,238,700**	
3.030.06.02.01.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				832 Unit	361,514,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	832 Unit	706,238,700	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.06.02.01.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				730 Orang	134,770,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	730 Orang	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.06.02.01.3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				5 Unit	115,710,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	5 Unit	250,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.030.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri**	**95 Persen**		**0 Persen**	**95 Persen**	**98,073,100**						**95 Persen**	**200,000,000**	
3.030.07.02.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri**	**0 Persen**		**0 Persen**	**85 Persen**	**98,073,100**						**85 Persen**	**200,000,000**	
3.030.07.02.01.3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				1 Dokumen	98,073,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.031	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**3,005,157,350**							**4,545,000,000**	
3.031.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan Industri Kecil dan Menengah yang Dibina**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,951,176,800**						**100 Persen**	**4,345,000,000**	
3.031.02.02.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,951,176,800**						**100 Persen**	**4,345,000,000**	
3.031.02.02.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				3 Dokumen	481,651,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat IKM	3 Dokumen	875,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.031.02.02.01.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				30 Dokumen	2,469,525,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat IKM	30 Dokumen	3,470,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.031.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Cakupan Verifikasi Lapangan Izin Usaha Industri**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**28,768,750**						**100 Persen**	**100,000,000**	
3.031.03.02.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Direkomendasikan**	**Dokumen**		**Dokumen**	**25 Dokumen**	**28,768,750**						**25 Dokumen**	**100,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.031.03.02.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Dokumen	28,768,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Masyarakat	25 Dokumen	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.031.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**25,211,800**						**100 Persen**	**100,000,000**	
3.031.04.02.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Industri yang Sudah Terdaftar dalam SIINas**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**25,211,800**						**100 Persen**	**100,000,000**	
3.031.04.02.01.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				6 Dokumen	25,211,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian	Masyarakat	6 Dokumen	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**97,309,520,766**							**112,037,488,700**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**59,118,037,071**						**100 Persen**	**73,008,652,700**	
4.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**833,200,339**						**90 Persen**	**1,025,000,000**	
4.01.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	266,354,353	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	2 Dokumen	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
											Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan				
4.01.01.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	233,309,503	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	1 Dokumen	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	68,572,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	1 Dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	40,104,646	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	1 Dokumen	45,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	28,464,884	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	1 Dokumen	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	64,838,653	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	2 Laporan	70,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	131,555,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	2 Laporan	180,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana Prasarana Aparatur Pelaksanaan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**19,370,726,612**						**100 Persen**	**21,382,000,000**	
4.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				173 Orang/bula	17,892,328,337	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	173 Orang/bulan	19,700,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	425,703,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	12 Dokumen	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	389,370,630	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	12 Dokumen	450,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	275,557,951	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	2 Laporan	278,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.01.02.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	68,135,565	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	1 Dokumen	74,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	248,891,306	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	3 Laporan	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	70,739,523	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	2 Dokumen	80,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**103,264,000**						**90 Persen**	**131,000,000**	
4.01.01.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	30,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	1 Paket	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	72,664,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	6 Orang	81,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**16,553,763,200**						**100 Persen**	**20,750,854,200**	
4.01.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	2 Paket	243,750,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	658,606,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	2 Paket	842,008,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	259,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	3 Paket	324,375,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	3,648,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	2 Paket	4,560,625,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	139,651,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	14 Paket	174,564,700	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	1,242,152,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	3 Laporan	1,552,690,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8000 Laporan	10,346,353,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	8000 Laporan	12,932,941,500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	79,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	6 Dokumen	119,900,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**3,580,946,200**						**100 Persen**	**4,287,073,000**	
4.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	4 Laporan	44,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	1,702,938,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	48 Laporan	2,128,673,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	414,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	6 Laporan	334,400,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				132 Laporan	1,424,008,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	132 Laporan	1,780,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,987,059,600**						**100 Persen**	**3,820,034,000**	
4.01.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	330,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	2 Unit	437,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	1,778,630,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	50 Unit	2,285,787,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	619,829,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	150 Unit	812,287,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	57,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	1 Unit	62,986,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	201,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	6 Unit	221,474,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,010,325,620**						**100 Persen**	**1,120,918,500**	
4.01.01.02.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	176,072,620	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	2 Orang/Bulan	194,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.11.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	155,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	1 Paket	180,268,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.11.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	78,773,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	2 Orang	86,650,500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.11.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	2 Orang/Bulan	660,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase peningkatan pelayanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretariat Daerah**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**4,760,974,000**						**100 Persen**	**5,600,000,000**	
4.01.01.02.12.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				21 Paket	3,010,310,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	21 Paket	3,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.12.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				17 Paket	1,750,663,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	17 Paket	2,100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.13	**Penataan Organisasi**	**Persentase perangkat daerah dengan IKM minimal 80**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**817,777,500**						**100 Persen**	**979,273,000**	
4.01.01.02.13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				8 Dokumen	342,310,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	8 Dokumen	450,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.13.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	51,349,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	1 Dokumen	56,485,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.13.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	178,670,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	2 Dokumen	205,327,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.01.02.13.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	245,446,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	1 Dokumen	267,461,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase acara kedinasan yang terlaksana melalui keprotokolan sesuai standar**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**9,100,000,000**						**100 Persen**	**13,312,500,000**	
4.01.01.02.14.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				862 Laporan	3,274,903,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	FORKOPIMDA, Masyarakat, 54 OPD, dan 20 Kecamatan	862 Laporan	4,734,750,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.14.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				360 Laporan	2,821,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	FORKOPIMDA, Masyarakat, 54 OPD, dan 20 Kecamatan	360 Laporan	4,187,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.14.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				845 Laporan	3,003,286,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	FORKOPIMDA, Masyarakat, 54 OPD, dan 20 Kecamatan	845 Laporan	4,390,750,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**33,650,897,695**						**100 Persen**	**33,317,476,000**	
4.01.02.02.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Capaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,981,000,000**						**100 Persen**	**4,187,500,000**	
4.01.02.02.01.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				8 Dokumen	1,359,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	FORKOPIMDA, Masyarakat, 54 OPD, dan 20 Kecamatan	8 Dokumen	1,917,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.02.01.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	323,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	FORKOPIMDA, Masyarakat, 54 OPD, dan 20 Kecamatan	1 Dokumen	403,750,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.02.01.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	1,299,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	FORKOPIMDA, Masyarakat, 54 OPD, dan 20 Kecamatan	5 Dokumen	1,866,250,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.02.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan keagamaan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**29,138,084,045**						**100 Persen**	**26,993,476,000**	
4.01.02.02.02.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				12 Dokumen	8,869,452,430	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, dan Mahasiswa Tidak	12 Dokumen	10,084,445,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.02.02.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				9 Dokumen	3,619,925,730	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, dan Mahasiswa Tidak	9 Dokumen	3,119,536,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.02.02.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				8 Dokumen	16,648,705,885	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, dan Mahasiswa Tidak	8 Dokumen	13,789,495,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.02.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Cakupan Pelayanan Produk Hukum dan Bantuan Hukum**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**944,573,850**						**100 Persen**	**1,387,500,000**	
4.01.02.02.03.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				150 Dokumen	277,252,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi, dan Informasi Hukum	150 Dokumen	437,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.02.03.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	447,779,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi, dan Informasi Hukum	1 Kasus	637,500,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.02.02.03.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				150 Dokumen	219,542,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi, dan Informasi Hukum	150 Dokumen	312,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.02.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase peningkatan kerjasama daerah yang difasilitasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**587,239,800**						**100 Persen**	**749,000,000**	
4.01.02.02.04.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				8 Dokumen	410,429,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Daerah-Daerah yang berada di Wilayah Perbatasan	8 Dokumen	524,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.02.04.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	176,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Daerah-Daerah yang berada di Wilayah Perbatasan	1 Laporan	225,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**4,540,586,000**						**100 Persen**	**5,711,360,000**	
4.01.03.02.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase rekomendasi / kebijakan Perekonomian Daerah daerah yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**840,000,000**						**100 Persen**	**1,155,000,000**	
4.01.03.02.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				12 Dokumen	440,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), dan Usaha Kecil Mikro (UKM)	12 Dokumen	605,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.02.01.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	198,548,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), dan Usaha Kecil Mikro (UKM)	1 Laporan	275,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.02.01.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	201,452,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), dan Usaha Kecil Mikro (UKM)	1 Dokumen	275,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.02.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Cakupan Fasilitasi Rapat Koordinasi TAPD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**799,020,000**						**100 Persen**	**1,069,000,000**	
4.01.03.02.02.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				162 Dokumen	248,225,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD dan Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir	162 Dokumen	330,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
									Dana Insentif Daerah						
4.01.03.02.02.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				27 Laporan	316,693,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD dan Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir	27 Laporan	415,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.02.02.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	234,101,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	OPD dan Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir	1 Laporan	324,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
									Dana Insentif Daerah						
4.01.03.02.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,485,566,000**						**100 Persen**	**2,915,360,000**	
4.01.03.02.03.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				130 Dokumen	1,428,032,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab.Inhil, Rekanan/Penyed	130 Dokumen	1,703,570,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.02.03.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				5 Dokumen	696,722,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab.Inhil, Rekanan/Penyed	5 Dokumen	777,730,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.03.02.03.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Orang	360,812,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab.Inhil, Rekanan/Penyed	4 Orang	434,060,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.02.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Kebijakan Penggelolaan potensi sumber daya alam**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**416,000,000**						**100 Persen**	**572,000,000**	
4.01.03.02.04.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kelompok Penerima Manfaat (KPM)	2 Dokumen	275,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.02.04.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 Dokumen	216,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kelompok Penerima Manfaat (KPM)	2 Dokumen	297,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**113,875,069,880**							**113,919,796,372**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**60,771,642,630**						**100 Persen**	**60,870,059,772**	
4.02.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar**	**100**		**0**	**100**	**424,487,700**						**100**	**424,487,700**	
4.02.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	50,462,600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	4 Dokumen	50,462,600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	374,025,100	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	6 Laporan	374,025,100	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun Sesuai Standar**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**6,381,918,630**						**100 persen**	**6,676,968,630**	
4.02.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	5,276,743,880	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	63 Orang/bulan	5,571,793,880	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	578,059,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	578,059,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	527,115,750	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	20 Laporan	527,115,750	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terfidusi**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**1,373,665,700**						**100 persen**	**1,373,665,700**	
4.02.01.02.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				61 Orang	1,373,665,700	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	61 Orang	1,373,665,700	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Aparatur yang berkinerja Baik**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,552,023,000**						**100 Persen**	**1,521,933,000**	
4.02.01.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				510 Paket	571,190,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	510 Paket	571,190,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	269,620,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	20 Orang	239,372,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				45 kali	711,213,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	45 kali	711,371,000	SEKRETARIAT DPRD
											Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan				
4.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**10,142,445,708**						**100 Persen**	**9,863,627,850**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				66 Paket	199,490,950	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	66 Paket	199,490,950	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	1,461,540,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	31 Paket	1,979,040,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				26 Paket	323,840,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	26 Paket	834,580,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50640 Paket	774,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	50640 Paket	654,580,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				68 Paket	810,267,950	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	68 Paket	810,267,950	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				27 Dokumen	426,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	27 Dokumen	426,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1383 Laporan	6,146,806,808	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	1383 Laporan	4,959,668,950	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,375,080,000**						**100 Persen**	**1,623,870,000**	
4.02.01.02.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	853,640,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	5 Unit	853,640,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	521,440,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	5 Unit	770,230,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,314,225,290**						**100 Persen**	**2,314,225,290**	
4.02.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Rekening/bu	1,104,880,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	25 Rekening/bulan	1,104,880,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				114 Orang	1,209,345,290	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sekretariat DPRD	114 Orang	1,209,345,290	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**3,656,148,460**						**100 Persen**	**3,650,958,460**	
4.02.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	480,900,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	7 Unit	480,900,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				157 Unit	694,155,200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	157 Unit	694,155,200	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	303,419,200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	150 Unit	303,419,200	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	1,404,314,060	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	11 Unit	1,404,314,060	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	617,720,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	5 Unit	617,720,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				116 Unit	155,640,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	116 Unit	150,450,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Layanan Keuangan DPRD yang terselenggarakan sesuai SOP**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**25,497,838,892**						**100 Persen**	**25,497,838,892**	
4.02.01.02.15.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bular	24,126,638,892	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Orang/Bulan	24,126,638,892	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.15.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	1,371,200,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Orang	1,371,200,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan sesuai ketentuan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**8,053,809,250**						**100 Persen**	**7,922,484,250**	
4.02.01.02.16.3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				436 kali	4,966,848,550	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pimpinan dan Anggota DPRD	436 kali	4,966,978,350	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.02.16.4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				7300 Paket	3,086,960,700	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pimpinan dan Anggota DPRD	7300 Paket	2,955,505,900	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang di Fasilitasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**53,103,427,250**						**100 Persen**	**53,049,736,600**	
4.02.02.02.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Pesentase Rapat-rapat pembahasan Ranperda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**3,889,947,250**						**100 Persen**	**3,660,473,000**	
4.02.02.02.01.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				9 Dokumen	3,889,947,250	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Panitia Khusus Pembahasan Perda dan Peraturan DPRD	9 Dokumen	3,660,473,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.02.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Rapat-rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,058,168,000**						**100 Persen**	**1,058,168,000**	
4.02.02.02.02.3	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD				88 kali	1,058,168,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah	88 kali	1,058,168,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.02.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,868,274,050**						**100 Persen**	**1,868,274,050**	
4.02.02.02.04.2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD				2 kali	1,868,274,050	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 kali	1,868,274,050	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.02.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**6,717,707,550**						**100 Persen**	**6,718,225,550**	
4.02.02.02.05.3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses				3 kali	6,717,707,550	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Konstuen	3 kali	6,718,225,550	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.02.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Persentase Pembahasan kerjasama daerah yang difasilitasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,596,577,000**						**100 Persen**	**1,597,149,000**	
4.02.02.02.07.2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				70 Dokumen	1,596,577,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Media Massa	70 Dokumen	1,597,149,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.02.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase rekomendasi yang dihasilkan dari kunjungan kerja DPRD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**37,972,753,400**						**100 Persen**	**38,147,447,000**	
4.02.02.02.08.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				4273 kali	34,016,338,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pimpinan Dan Anggota DPRD	4273 kali	34,227,977,000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.02.08.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan				1374 kali	3,956,415,400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pimpinan Dan Anggota DPRD	1374 kali	3,919,470,000	SEKRETARIAT DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5.01	**PERENCANAAN**						**13,631,948,971**							**13,560,644,859**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**8,778,164,774**						**100 Persen**	**8,735,343,789**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen PeRencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**8 Dokumen**		**0 Dokumen**	**8 Dokumen**	**148,969,050**						**8 Dokumen**	**64,619,800**	
5.01.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	59,477,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	5 Dokumen	39,377,800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Dokumen	89,491,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	3 Dokumen	25,242,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Laporan**		**Laporan**	**1 Laporan**	**5,824,849,074**						**1 Laporan**	**6,086,313,939**	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	49 Orang							49 Orang		
		Persentase terlaksanannya Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
5.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang	5,729,852,374	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	49 Orang	5,991,717,239	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	94,996,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	0 Laporan	94,596,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
5.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Sesuai Dengan Perencanaan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**175,783,550**						**100 Persen**	**175,783,550**	
5.01.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				17 Orang	175,783,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	17 Orang	175,783,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakani yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				23 Diklat							23 Diklat		
5.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**Paket**		**Paket**	**2 Paket**	**1,736,793,800**						**2 Paket**	**1,544,982,000**	
		Persentase Pemenuhan Barang, Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Dikelola Dengan Baik	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
5.01.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	21,599,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	2 Paket	23,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	336,578,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Bappeda Kabupaten	6 Paket	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	128,883,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Bappeda Kabupaten	4 Paket	127,982,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	38,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Bappeda Kabupaten	3 Paket	35,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	30 Dokumen	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	1,151,687,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	110 Laporan	1,000,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				8 Dokumen	29,296,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	8 Dokumen	29,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**73,780,000**						**100 Persen**	**73,780,000**	
5.01.01.02.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	73,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	2 Unit	73,780,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**364,184,500**						**100 Persen**	**395,864,500**	
5.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	1 Laporan	6,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	208,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	48 Laporan	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				46 Laporan	149,864,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	46 Laporan	189,864,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**453,804,800**						**100 Persen**	**394,000,000**	
5.01.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	139,064,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	41 Unit	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.02.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	1 Unit	24,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				338 Unit	293,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	338 Unit	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,589,999,800**						**100 Persen**	**1,795,301,070**	
5.01.02.02.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada**	**3 Dokumen**		**0 Dokumen**	**3 Dokumen**	**1,248,410,900**						**3 Dokumen**	**1,324,870,750**	
5.01.02.02.01.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	483,895,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Seluruh Perangkat Daerah	3 Dokumen	503,895,250	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.02.01.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	16,139,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Seluruh Perangkat	1 Berita Acara	40,400,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.02.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				54 Berita Acara	3,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Seluruh Perangkat Daerah	54 Berita Acara	50,913,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.02.01.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	156,358,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Seluruh Perangkat	1 Berita Acara	262,337,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.02.01.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	588,217,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Seluruh Perangkat	2 Dokumen	467,325,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.02.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Cakupan Pembinaan dan Pemanfataan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD sesuai Standar**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**107,146,900**						**100 Persen**	**89,717,520**	
5.01.02.02.02.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				3 Orang	107,146,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	3 Orang	89,717,520	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.02.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**234,442,000**						**100 Persen**	**380,712,800**	
5.01.02.02.03.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	95,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Seluruh Perangkat Daerah	4 Laporan	302,110,050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.02.03.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	138,962,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Seluruh Perangkat	4 Laporan	78,602,750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD,RENSTRA RKPD dan RENJA)**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**3,263,784,397**						**100 Persen**	**3,030,000,000**	
5.01.03.02.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**1,249,999,850**						**100 Persen**	**1,130,000,000**	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
5.01.03.02.01.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	204,955,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	38 OPD Kabupaten Indragiri Hilir	3 Dokumen	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.02.01.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Dokumen	160,824,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	38 OPD Kabupaten Indragiri Hilir	1 Dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.02.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Dokumen	183,612,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	38 OPD Kabupaten Indragiri Hilir	1 Dokumen	160,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.01.03.02.01.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	184,970,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		38 OPD Kabupaten Indragiri Hilir	3 Dokumen	160,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.02.01.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Dokumen	186,005,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	38 OPD Kabupaten Indragiri Hilir	2 Dokumen	160,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.02.01.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen yang disusun				1 Dokumen	329,631,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	38 OPD Kabupaten Indragiri Hilir	1 Dokumen	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan							3 Laporan		
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				31 Laporan							31 Laporan		
5.01.03.02.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir**	**Dokumen**		**Dokumen**	**3 Dokumen**	**1,103,784,547**						**3 Dokumen**	**1,000,000,000**	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen							5 Dokumen		
5.01.03.02.02.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	569,284,301		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya	3 Dokumen	500,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.02.02.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	534,500,246		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya	5 Dokumen	500,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.02.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur**	**Laporan**		**Laporan**	**32 Laporan**	**910,000,000**						**32 Laporan**	**900,000,000**	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan		Laporan	31 Laporan							31 Laporan		
5.01.03.02.03.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				32 Laporan	626,057,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	32 Laporan	650,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.02.03.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				31 Laporan	283,942,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	31 Laporan	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1,200,000,000**							**1,020,000,000**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**1,200,000,000**						**90 Persen**	**1,020,000,000**	
5.05.02.02.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian**	**Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**564,010,350**						**100 Persen**	**480,000,000**	
5.05.02.02.01.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	164,010,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Seluruh OPD di Kabupaten Indragiri Hilir	1 Laporan	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.02.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	183,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Seluruh OPD di Kabupaten	1 Laporan	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.02.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan				1 Rekomendasi	216,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Seluruh OPD di Kabupaten	1 Rekomendasi	180,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.02.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase inovasi daerah yang diikutkan dalam IGA**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**635,989,650**						**100 Persen**	**540,000,000**	
5.05.02.02.04.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	209,358,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		54 OPD di Kabupaten	1 Dokumen	170,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.02.04.3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan				1 Laporan	190,641,650	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		54 OPD di Kabupaten	1 Laporan	170,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.02.04.4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				3 Laporan	235,989,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	54 OPD di Kabupaten Indragiri Hilir	3 Laporan	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5.02	**KEUANGAN**						**17,707,264,838**							**21,478,260,000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**Persen**		**Persen**	**93 Persen**	**13,227,752,088**						**93 Persen**	**15,853,260,000**	
5.02.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**		**Nilai**	**22 Nilai**	**63,810,000**						**22 Nilai**	**90,150,000**	
5.02.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	43,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	0 Dokumen	65,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen							2 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				5 Laporan	20,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	5 Laporan	25,150,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**8,719,548,500**						**100 Persen**	**11,150,110,000**	
5.02.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/bular	8,657,198,500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	71 Orang/bulan	11,075,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	62,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	18 Laporan	75,110,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**196,900,000**						**100 Persen**	**145,000,000**	
5.02.01.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				63 Paket	69,590,000					0	63 Paket	85,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	127,310,000					0	10 Orang	60,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**1,913,493,285**						**100 Persen**	**1,984,000,000**	
5.02.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	28,081,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	1 Paket	35,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	611,054,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	14 Paket	650,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	165,562,500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	4 Paket	170,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	238,138,385			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	3 Paket	260,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	10,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	6 Dokumen	19,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				297 Laporan	860,657,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	297 Laporan	850,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**93 Persen**	**48,900,000**						**93 Persen**	**100,000,000**	
5.02.01.02.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	48,900,000					0	2 Unit	100,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**93 Persen**	**1,823,980,303**						**93 Persen**	**1,859,000,000**	
5.02.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,400,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	1 Laporan	9,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	789,745,803		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	12 Laporan	650,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,026,834,500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	1 Laporan	1,200,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**93 Persen**	**461,120,000**						**93 Persen**	**525,000,000**	
5.02.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	155,000,000					0	40 Unit	160,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	88,000,000					0	50 Unit	85,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	138,120,000					0	1 Unit	180,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	80,000,000					0	3 Unit	100,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah**	**Persen**		**Persen**	**10.02 Persen**	**4,479,512,750**						**10.02 Persen**	**5,625,000,000**	
5.02.04.02.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah**	**Persen**		**Persen**	**10.02 Persen**	**4,479,512,750**						**10.02 Persen**	**5,625,000,000**	
5.02.04.02.01.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	20,000,000					0	1 Dokumen	80,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.02.01.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	440,144,600					0	1 Dokumen	450,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.02.01.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	340,985,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	350,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.02.01.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	272,693,000					0	1 Unit	280,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.02.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	287,537,350					0	12 Laporan	400,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.02.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	21,000,000					0	1 Laporan	35,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.02.01.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				10000 Obyek P	584,676,700					0	10000 Obyek Pajak	850,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.02.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				160000 Dokum	702,933,000					0	160000 Dokumen	820,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.02.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3000 Layanan	597,488,500					0	3000 Layanan	650,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.02.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	185,141,000					0	12 Dokumen	190,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.02.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				36175 Dokume	419,930,000					0	36175 Dokumen	800,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.02.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1300 Dokumen	334,200,000					0	1300 Dokumen	360,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.04.02.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				230 Dokumen	189,883,700					0	230 Dokumen	240,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.02.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	51,399,900					0	2 Laporan	70,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.02.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	31,500,000					0	2 Laporan	50,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5.02	**KEUANGAN**						**348,253,102,746**							**378,354,193,522**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**Persen**		**Persen**	**95 Persen**	**19,241,561,300**						**95 Persen**	**24,088,000,000**	
5.02.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verifikasi Dokren dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**65,584,000**						**100 Persen**	**70,000,000**	
5.02.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	27,992,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	2 Dokumen	30,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				0 Laporan	37,592,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Laporan	40,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				72 Dokumen							72 Dokumen		
5.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**11,898,966,975**						**100 Persen**	**16,173,000,000**	
5.02.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN				100 Persen	11,876,476,975		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Persen	16,150,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	22,490,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	23,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun				60 Dokumen							60 Dokumen		
5.02.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**393,611,300**						**100 Persen**	**350,000,000**	
5.02.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	271,924,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	200,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				24 Kali							24 Kali		
5.02.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	121,687,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	150,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
5.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**3,248,322,425**						**100 Persen**	**3,270,000,000**	
5.02.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11 Jenis	101,757,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	11 Jenis	150,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
5.02.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6 Jenis	612,494,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Jenis	500,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
5.02.01.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga				5 Jenis	105,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Jenis	150,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
5.02.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Logistik Kantor				6 Jenis	395,043,425		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Jenis	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
5.02.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Jenis	76,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	11 Jenis	100,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
5.02.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3200 Eksemplar	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3200 Eksemplar	20,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
5.02.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1,927,327,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	2,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan				100 Persen							100 Persen		
5.02.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**102,130,000**						**100 Persen**	**150,000,000**	
5.02.01.02.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	102,130,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	150,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**662,796,000**						**100 Persen**	**675,000,000**	
5.02.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat				100 Persen	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Persen	25,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
5.02.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Jenis	248,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Jenis	250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
5.02.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Jenis	392,796,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Jenis	400,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
5.02.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,870,150,600**						**100 Persen**	**3,400,000,000**	
5.02.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Jenis	802,570,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis	900,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit							0 Unit		
5.02.01.02.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jenis Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Jenis	952,840,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis	1,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit							0 Unit		
5.02.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	645,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	1,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Jenis	469,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis	500,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**325,821,635,376**						**100 Persen**	**350,616,193,522**	
5.02.02.02.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**1,806,019,950**						**100 Persen**	**1,900,000,000**	
5.02.02.02.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				0 Dokumen	98,739,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	100,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Dokumen Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang diterbitkan				2 Dokumen							2 Dokumen		
5.02.02.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Nota Kesepakatan KUPA/PPAS yang diterbitkan				2 Dokumen	95,935,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	100,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				0 Dokumen							0 Dokumen		
5.02.02.02.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				0 Dokumen	925,639,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	1,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun				8 Dokumen							8 Dokumen		
5.02.02.02.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				0 Dokumen	493,783,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	500,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang Disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		
5.02.02.02.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				0 Dokumen	191,923,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	200,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang dilaksanakan				5 Kali							5 Kali		
5.02.02.02.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,474,698,500**						**100 Persen**	**2,600,000,000**	
5.02.02.02.02.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer				0 Dokumen	456,254,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	500,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang				29 Kali							29 Kali		
5.02.02.02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				0 Laporan	665,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	700,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang disusun				24 Dokumen							24 Dokumen		
5.02.02.02.02.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				0 Dokumen	583,879,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	600,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
5.02.02.02.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				0 Dokumen	769,305,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	800,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen							1 Dokumen		
5.02.02.02.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**1,714,269,350**						**100 Persen**	**1,900,000,000**	
5.02.02.02.03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				0 Laporan	157,985,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	200,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun				4 Dokumen							4 Dokumen		
5.02.02.02.03.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun				2 Dokumen	974,145,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	1,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				0 Laporan							0 Laporan		
5.02.02.02.03.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				0 Dokumen	402,583,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	500,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen							4 Dokumen		
5.02.02.02.03.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				0 Dokumen	179,555,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	200,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang				1 Dokumen							1 Dokumen		
5.02.02.02.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**319,214,369,676**						**100 Persen**	**343,566,193,522**	
5.02.02.02.04.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				0 Laporan	288,007,496,701		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	288,007,496,701	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah persentase anggaran Dana Desa dan Alokasi dana Desa terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir				100 Persen							100 Persen		
5.02.02.02.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				0 Laporan	25,960,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	50,311,823,846	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Persentase Anggaran Dana Darurat dan Mendesak terhadap Total APBD Kabupaten Indragiri Hilir				100 Persen							100 Persen		
5.02.02.02.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				0 Laporan	5,246,872,975		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	0 Laporan	5,246,872,975	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah persentase anggaran Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir				100 Persen							100 Persen		
5.02.02.02.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**612,277,900**						**100 Persen**	**650,000,000**	
5.02.02.02.05.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				0 Dokumen	612,277,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	650,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang diimplementasikan dan				2 Aplikasi							2 Aplikasi		
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**3,189,906,070**						**100 Persen**	**3,650,000,000**	
5.02.03.02.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**3,189,906,070**						**100 Persen**	**3,650,000,000**	
5.02.03.02.01.2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				0 Dokumen	835,150,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	950,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		
5.02.03.02.01.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diinventarisasi				10 Dokumen	169,639,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	200,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
5.02.03.02.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				0 Laporan	1,215,952,170		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	1,350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Jenis							4 Jenis		
5.02.03.02.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jenis Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan				2 Jenis	264,753,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis	300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan				0 Dokumen							0 Dokumen		
5.02.03.02.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				0 Laporan	544,167,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	600,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah yang disusun				10 Dokumen							10 Dokumen		
5.02.03.02.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0 Orang	160,243,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan				3 Kali							3 Kali		
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5.03	**KEPEGAWAIAN**						**10,146,407,907**							**9,325,884,288**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**6,307,806,412**						**100 Persen**	**5,844,089,793**	
5.03.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja dan pelaporan kinerja yang disusun Sesuai standar**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**240,540,000**						**100 Persen**	**30,000,000**	
5.03.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	12,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	BKPSDM KAB. INHIL	5 Dokumen	12,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	228,540,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	BKPSDM KAB. INHIL	5 Laporan	18,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**4,321,755,005**						**100 Persen**	**4,466,232,788**	
5.03.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	4,321,755,005	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	BKPSDM KAB. INHIL	45 Orang/bulan	4,466,232,788	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti Sosialisasi dalam rangka Pengembangan Kompetensi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**158,320,500**						**100 Persen**	**158,320,500**	
5.03.01.02.05.7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				2 Laporan	69,061,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN KAB. INHIL	2 Laporan	69,061,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				250 Orang	89,259,500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN KAB. INHIL	250 Orang	89,259,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**1,080,932,207**						**100 Persen**	**705,801,500**	
5.03.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM KAB. INHIL	1 Paket	15,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	393,061,500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM KAB. INHIL	3 Paket	27,381,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	57,260,707	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM KAB. INHIL	1 Paket	52,810,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	31,900,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM KAB. INHIL	1 Paket	31,900,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	15,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM KAB. INHIL	2 Dokumen	15,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	573,710,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM KAB. INHIL	2 Laporan	563,710,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**147,693,900**						**100 Persen**	**147,693,900**	
5.03.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	4,370,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM KAB. INHIL	2 Laporan	4,370,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	103,602,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM KAB. INHIL	2 Laporan	103,602,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	39,721,900	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM KAB. INHIL	2 Laporan	39,721,900	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**358,564,800**						**100 Persen**	**336,041,105**	
5.03.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	133,964,800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BKPSDM KAB. INHIL	35 Unit	101,441,105	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	24,600,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BKPSDM KAB. INHIL	48 Unit	24,600,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BKPSDM KAB. INHIL	1 Unit	210,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Pelayanan ASN yg Terselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**3,838,601,495**						**100 Persen**	**3,481,794,495**	
5.03.02.02.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang di angkat melalui Seleksi Pengadaan ASN**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,263,653,750**						**100 Persen**	**922,656,750**	
5.03.02.02.01.4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				2 Laporan	716,743,750	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KAB. INHIL	2 Laporan	525,746,750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.02.01.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				2 Dokumen	124,421,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KAB. INHIL	2 Dokumen	124,421,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.02.01.8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	169,564,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KAB. INHIL	1 Lembaga	169,564,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.02.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	96,139,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KAB. INHIL	2 Dokumen	43,889,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.02.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Laporan	156,786,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KAB. INHIL	2 Laporan	59,036,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.02.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase aparatur yang menjabat sesuai dengan syarat kompetensi jabatannya**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**421,681,250**						**100 Persen**	**421,681,250**	
5.03.02.02.02.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana				2 Dokumen	251,681,250	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KAB. INHIL	2 Dokumen	251,681,250	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.02.02.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	170,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KAB. INHIL	2 Dokumen	170,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.02.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,621,232,495**						**100 Persen**	**1,603,892,495**	
5.03.02.02.03.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				150 Orang	1,016,624,295	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KAB. INHIL	150 Orang	999,284,295	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.02.03.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				150 Orang	604,608,200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KAB. INHIL	150 Orang	604,608,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.02.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**532,034,000**						**100 Persen**	**533,564,000**	
5.03.02.02.04.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	350,016,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KAB. INHIL	2 Dokumen	264,546,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.02.04.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				285 Orang	86,918,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KAB. INHIL	285 Orang	86,918,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.02.04.8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				2 Laporan	95,100,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KAB. INHIL	2 Laporan	95,100,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**1,280,763,000**							**665,818,727**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**Persen**		**Persen**	**52 Persen**	**1,280,763,000**						**52 Persen**	**665,818,727**	
5.04.02.02.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**380,763,000**						**100 Persen**	**174,459,000**	
5.04.02.02.01.3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				30 Orang	380,763,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN KAB. INHIL	30 Orang	174,459,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.04.02.02.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**900,000,000**						**100 Persen**	**491,359,727**	
5.04.02.02.02.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan				9 Laporan	900,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KAB. INHIL	9 Laporan	491,359,727	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**														
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**12,823,681,043**							**15,653,605,307**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi**	**Persen**		**Persen**	**98 Persen**	**8,471,017,143**						**98 Persen**	**9,747,268,307**	
6.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**7,368,000**						**90 Persen**	**12,800,000**	
6.01.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7,368,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	7 Laporan	12,800,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**6,630,047,503**						**100 Persen**	**7,196,838,307**	
6.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	6,630,047,503		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	51 Orang/bulan	7,196,838,307	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan ketersediaan administrasi sarana dan prasarana aparatur perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**177,373,500**						**100 Persen**	**350,000,000**	
6.01.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	177,373,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Orang	350,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**1,131,216,700**						**100 Persen**	**1,621,730,000**	
6.01.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,447,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	6,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	140,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	4 Paket	193,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	102,062,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Paket	110,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	8 Dokumen	15,730,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	870,586,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	45 Laporan	1,297,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Penunjang Urusan kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**132,000,000**						**100 Persen**	**180,000,000**	
6.01.01.02.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	132,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	4 Unit	180,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**293,011,440**						**100 Persen**	**275,900,000**	
6.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	6,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	130,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	101,900,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	158,611,440		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	168,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100,000,000**						**100 Persen**	**110,000,000**	
6.01.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	11 Unit	40,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	16,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	30 Unit	20,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	50,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**Persen**		**Persen**	**74 Persen**	**3,652,809,700**						**74 Persen**	**4,940,089,000**	
6.01.02.02.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Pengawasan Internal yang dilaksanakan**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**2,650,777,100**						**80 Persen**	**3,792,789,000**	
6.01.02.02.01.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				15 Laporan	192,472,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	15 Laporan	320,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.02.01.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				8 Laporan	258,939,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	8 Laporan	470,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.02.01.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				60 Laporan	433,214,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	60 Laporan	699,300,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.02.01.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	29,045,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	1 Laporan	38,500,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.02.01.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				24 Laporan	476,538,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	24 Laporan	712,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.02.01.6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				3 Kesepakatan	660,879,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	3 Kesepakatan	862,500,000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.01.02.02.01.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				120 Dokumen	599,689,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	120 Dokumen	690,489,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah/negara**	**Persen**		**Persen**	**77 Persen**	**1,002,032,600**						**77 Persen**	**1,147,300,000**	
6.01.02.02.02.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				0 Laporan	237,042,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Laporan	297,300,000	INSPEKTORAT DAERAH
		Persentase Penyelesaian Penanganan Kerugian Negara/Daerah				78 Persen							78 Persen		
6.01.02.02.02.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				10 Laporan	764,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Laporan	850,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi**	**80 Nilai**		**0 Nilai**	**80 Nilai**	**699,854,200**						**80 Nilai**	**966,248,000**	
6.01.03.02.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Laporan hasil monitoring**	**40 Laporan**		**0 Laporan**	**40 Laporan**	**699,854,200**						**40 Laporan**	**966,248,000**	
6.01.03.02.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				17 perangkat d	69,052,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	17 perangkat daerah	126,248,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.02.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Laporan	624,422,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	3 Laporan	780,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.02.02.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				4 perangkat da	6,380,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	4 perangkat daerah	60,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**8,274,746,647**							**8,229,997,531**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**8,131,911,681**						**100 Persen**	**8,229,997,531**	
7.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**45,741,850**						**100 Persen**	**0**	
7.01.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24 Dokumen	45,741,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	24 Dokumen	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**7,795,910,751**						**100 Persen**	**8,229,997,531**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bular	7,795,910,751		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	70 Orang/bulan	8,229,997,531	KECAMATAN TEMBILAHAN
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**151,309,400**						**100 Persen**	**0**	
7.01.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen kelistrikan yang disediakan				1 paket	624,9		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 paket	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	38,429,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Paket	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan				760 liter	56,240,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	760 liter	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket							2 Paket		
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	5,545,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Paket	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan				6 kali	50,470,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 kali	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**130,949,680**						**100 Persen**	**0**	
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Laporan	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
		jumlah surat menyurat yang terlayani				150 lembar							150 lembar		
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	26,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Laporan	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
		jumlah rekening yang dibayar				2 rekening							2 rekening		
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	103,349,680		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Laporan	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
		jumlah petugas keamanan yang dibayarkan jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan				14 orang							14 orang		
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**8,000,000**						**100 Persen**	**0**	
7.01.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
		jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				5 unit							5 unit		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**18,014,966**						**90 Persen**	**0**	
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase penyelengaraan kegiatan pemerintahan yang terkoordinir dengan baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**11,161,000**						**100 Persen**	**0**	
7.01.02.02.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 Dokumen	11,161,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Dokumen	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**6,853,966**						**100 Persen**	**0**	
7.01.02.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	6,853,966		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**104,120,000**						**100 Persen**	**0**	
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**104,120,000**						**100 Persen**	**0**	
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	104,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Orang	0	KECAMATAN TEMBILAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan seni dan budaya yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**20,700,000**						**100 Persen**	**0**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa/Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**200 Persen**	**20,700,000**						**200 Persen**	**0**	
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				0 Dokumen	15,350,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
		jumlah organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang di bina				1 kelompok							1 kelompok		
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				0 Dokumen	5,350,000					0	0 Dokumen	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
		Jumlah Rekomendasi usulan kecamatan pada musrenbang kecamatan				9 dokumen							9 dokumen		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**157,200,000**							**0**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**157,200,000**						**100 Persen**	**0**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**157,200,000**						**100 Persen**	**0**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan seberang tembilahan selatan				90 persen	157,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	90 persen	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**166,000,000**							**136,800,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**166,000,000**						**100 Persen**	**136,800,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**166,000,000**						**100 Persen**	**136,800,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan seberang tembilahan barat				90 persen	166,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	90 persen	136,800,000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**382,677,000**							**0**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**382,677,000**						**100 Persen**	**0**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**382,677,000**						**100 Persen**	**0**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan Tembilahan Hilir				90 persen	382,677,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	90 persen	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**288,800,000**							**231,040,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**288,800,000**						**100 Persen**	**231,040,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**288,800,000**						**100 Persen**	**231,040,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan sungai beringin				90 persen	288,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	90 persen	231,040,000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**232,220,000**							**198,880,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**232,220,000**						**100 Persen**	**198,880,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**232,220,000**						**100 Persen**	**198,880,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan sungai perak				90 persen	232,220,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	90 persen	198,880,000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**306,200,000**							**0**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**306,200,000**						**100 Persen**	**0**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**306,200,000**						**100 Persen**	**0**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan pekan arba				90 persen	306,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	90 persen	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**199,200,000**							**0**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**199,200,000**						**100 Persen**	**0**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**199,200,000**						**100 Persen**	**0**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Orm	199,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**541,200,000**							**432,960,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**541,200,000**						**100 Persen**	**432,960,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**541,200,000**						**100 Persen**	**432,960,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan kota				90 persen	541,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	90 persen	432,960,000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**4,271,311,145**							**4,302,375,530**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Orang**		**Orang**	**34 Orang**	**3,927,001,645**						**34 Orang**	**3,816,079,530**	
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**3,566,611,145**						**90 Persen**	**3,494,079,530**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bular	3,566,611,145	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara	32 Orang/bulan	3,494,079,530	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**14,400,000**						**100 Persen**	**24,000,000**	
7.01.01.02.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	14,400,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	12 Dokumen	24,000,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**15,000,000**						**100 Persen**	**10,000,000**	
7.01.01.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	15,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		ASN dan Non ASN	20 Paket	10,000,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**196,999,000**						**100 Persen**	**140,600,000**	
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	68,596,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah	ASN, Non ASN dan Masyarakat	2 Paket	56,000,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	24,813,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		ASN, Non ASN dan Masyarakat	2 Paket	7,000,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	22,750,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		ASN, Non ASN dan Masyarakat	8 Paket	18,000,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	9,600,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		ASN, Non ASN dan Masyarakat	4 Dokumen	9,600,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	71,240,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		ASN, Non ASN dan Masyarakat	45 Laporan	50,000,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**96,991,500**						**100 Persen**	**107,400,000**	
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	6,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara, Non ASN dan	200 Laporan	4,500,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	29,700,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara, Non ASN dan	24 Laporan	27,900,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	61,291,500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Sipil Negara, Non ASN dan Masyarakat	6 Laporan	75,000,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**37,000,000**						**100 Persen**	**40,000,000**	
7.01.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	19,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sarana dan Prasarana Milik Daerah	6 Unit	10,000,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	17,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sarana dan Prasarana Milik Daerah	6 Unit	30,000,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**35,494,400**						**100 Persen**	**64,000,000**	
7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**35,494,400**						**100 Persen**	**64,000,000**	
7.01.02.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	35,494,400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Persentase Pelayanan yang diselesaikan	12 Laporan	64,000,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**33,469,400**						**100 Persen**	**21,296,000**	
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**33,469,400**						**100 Persen**	**21,296,000**	
		Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.03.02.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	33,469,400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Lembaga Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Hulu	12 Laporan	21,296,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**129,068,100**						**100 Persen**	**110,000,000**	
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**129,068,100**						**100 Persen**	**110,000,000**	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	129,068,100	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Kegiatan Keagamaan dan MTQ	50 Orang	110,000,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**146,277,600**						**100 Persen**	**191,000,000**	
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**146,277,600**						**100 Persen**	**191,000,000**	
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4 Dokumen	134,777,600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Masyarakat dan ASN	4 Dokumen	100,000,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				6 Dokumen	11,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Masyarakat dan ASN	6 Dokumen	16,000,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**213,600,000**							**199,300,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**213,600,000**						**100 Persen**	**199,300,000**	
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**213,600,000**						**100 Persen**	**199,300,000**	
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Orm	213,600,000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Kelurahan Tembilahan	6 Pokmas / Ormas	199,300,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**493,200,000**							**433,900,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**493,200,000**						**100 Persen**	**433,900,000**	
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**493,200,000**						**100 Persen**	**433,900,000**	
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Orm	493,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Tembilahan Hulu	6 Pokmas / Ormas	433,900,000	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**4,777,200,644**							**4,839,176,644**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**4,539,323,644**						**100 Persen**	**4,593,176,644**	
7.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**33,925,000**						**100 Persen**	**35,000,000**	
7.01.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	17,675,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kecamatan Tempuling	2 Dokumen	18,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7.01.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				5 Laporan	16,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Tempuling	5 Laporan	17,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**4,225,176,644**						**100 Persen**	**4,225,176,644**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bular	4,225,176,644	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai di Lingkungan Kantor Camat	34 Orang/bulan	4,225,176,644	KECAMATAN TEMPULING
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**74,277,200**						**100 Persen**	**113,500,000**	
7.01.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,755,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tempuling	12 Paket	3,500,000	KECAMATAN TEMPULING
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	11,139,200	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kantor Camat Tempuling	6 Paket	44,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	6,789,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tempuling	3 Paket	7,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4,592,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tempuling	2 Paket	5,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	49,002,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kantor Camat Tempuling	33 Laporan	50,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**192,044,800**						**100 Persen**	**193,500,000**	
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	147,536,800	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pelayanan Kantor Camat Tempuling	1 Laporan	148,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	16,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelayanan Kantor Camat	3 Laporan	17,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	28,008,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelayanan Kantor Camat	2 Laporan	28,500,000	KECAMATAN TEMPULING
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**13,900,000**						**100 Persen**	**15,500,000**	
7.01.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	7,900,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aset Kantor Camat	14 Unit	8,500,000	KECAMATAN TEMPULING
7.01.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	6,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aset Kantor Camat	4 Unit	7,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**53,200,000**						**100 Persen**	**54,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang**	**Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**53,200,000**						**100 Persen**	**54,000,000**	
7.01.02.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	53,200,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan	1 Laporan	54,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**126,027,000**						**100 Persen**	**127,000,000**	
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**126,027,000**						**100 Persen**	**127,000,000**	
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				75 Orang	126,027,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Tempuling	75 Orang	127,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**58,650,000**						**100 Persen**	**65,000,000**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa/Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**58,650,000**						**100 Persen**	**65,000,000**	
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	49,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Tempuling	1 Dokumen	55,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	9,150,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Tempuling	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**355,000,000**							**370,000,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**355,000,000**						**100 Persen**	**370,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**355,000,000**						**100 Persen**	**370,000,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Or	355,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	370,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**220,000,000**							**230,000,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**220,000,000**						**100 Persen**	**230,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**220,000,000**						**100 Persen**	**230,000,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Or	220,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Tempuling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	230,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**177,570,000**							**190,000,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**177,570,000**						**100 Persen**	**190,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**177,570,000**						**100 Persen**	**190,000,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Or	177,570,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Pangkalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	190,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**179,000,000**							**199,000,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**179,000,000**						**100 Persen**	**199,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**179,000,000**						**100 Persen**	**199,000,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Or	179,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	199,000,000	KECAMATAN TEMPULING
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**3,305,240,149**							**3,762,638,713**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**2,913,690,149**						**100 persen**	**3,296,606,113**	
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,585,479,949**						**100 Persen**	**2,902,499,763**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bular	2,543,845,849	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	21 Orang/bulan	2,855,641,413	KECAMATAN BATANG TUAKA
7.01.01.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	41,634,100	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	12 Dokumen	46,858,350	KECAMATAN BATANG TUAKA
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**136,401,200**						**100 persen**	**173,667,450**	
7.01.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 buah	546	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	12 buah	600.6	KECAMATAN BATANG TUAKA
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Jenis	12,746,350	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	12 Jenis	16,514,850	KECAMATAN BATANG TUAKA
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis	5,600,000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	2 Jenis	7,700,000	KECAMATAN BATANG TUAKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan				12 bahan bacaa	3,600,000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	12 bahan bacaaan	3,960,000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan yang dilakukan				12 Laporan	113,908,850	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	12 Laporan	144,892,000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**173,809,000**						**100 persen**	**195,589,900**	
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang dibayarkan				3 Jenis	7,200,000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Jenis	9,900,000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7.01.01.02.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				3 Unit	103,285,000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	113,833,500	KECAMATAN BATANG TUAKA
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pelayanan umum kantor yang disediakan				1 jenis	63,324,000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 jenis	71,856,400	KECAMATAN BATANG TUAKA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**18,000,000**						**100 persen**	**24,849,000**	
7.01.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara				1 Unit	18,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	1 Unit	24,849,000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase kegiatan pemerintahan dan/atau pelayanan publik yang diselesaikan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**274,200,000**						**100 persen**	**311,416,600**	
		Persentase Pelayanan Publik dan/atau Kegiatan Pemerintahan yang diselesaikan	persen		persen	100 persen							100 persen		
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaika	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase penyelengaraan kegiatan pemerintahan yang terkoordinir dengan baik**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**274,200,000**						**100 persen**	**311,416,600**	
7.01.02.02.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	274,200,000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Dokumen	311,416,600	KECAMATAN BATANG TUAKA
		Tingkat kenaikan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan				100 persen							100 persen		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi dalam urusan penyelenggaraan pemerintahannya**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**117,350,000**						**100 Persen**	**154,616,000**	
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya	persen		persen	100 persen							100 persen		
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa/Kelurahan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**117,350,000**						**100 persen**	**154,616,000**	
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kelompok atau lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya				2 kelompok	78,550,000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	2 kelompok	110,946,000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah jenis dokumen penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif yang difasilitasi				3 Jenis	38,800,000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	3 Jenis	43,670,000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**223,405,600**							**246,395,105**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**223,405,600**						**100 persen**	**246,395,105**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**223,405,600**						**100 persen**	**246,395,105**	
		Persentase peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 persen	223,405,600	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 persen	246,395,105	KECAMATAN BATANG TUAKA
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**2,322,136,089**							**2,419,118,291**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,874,636,089**						**100 Persen**	**1,992,330,291**	
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**1,597,464,089**						**100 Persen**	**1,743,518,291**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bular	1,597,464,089	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kantor Camat Concong	13 Orang/bulan	1,743,518,291	KECAMATAN CONCONG
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**262,172,000**						**100 Persen**	**233,812,000**	
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	56,910,000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat Kecamatan Concong	5 Paket	50,000,000	KECAMATAN CONCONG
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	35,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Concong	5 Paket	30,000,000	KECAMATAN CONCONG
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	170,262,000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Concong	80 Laporan	153,812,000	KECAMATAN CONCONG
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**15,000,000**						**100 Persen**	**15,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	Sarana dan prasarana Penunjang Urusan	1 Unit	15,000,000	KECAMATAN CONCONG
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keberhasilan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**180,000,000**						**100 Persen**	**187,000,000**	
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Keberhasilan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**180,000,000**						**100 Persen**	**187,000,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Orm	180,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	5 Pokmas / Ormas	187,000,000	KECAMATAN CONCONG
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**129,000,000**						**100 Persen**	**128,000,000**	
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan**	**Kegiatan**		**Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**129,000,000**						**1 Kegiatan**	**128,000,000**	
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Diselesaikan				100 Persen	129,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan	Kelompik Masyarakat, Umat Beragama, Ras dan	100 Persen	128,000,000	KECAMATAN CONCONG
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**138,500,000**						**100 Persen**	**111,788,000**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**138,500,000**						**100 Persen**	**111,788,000**	
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				2 Dokumen	96,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok/Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan	2 Dokumen	95,000,000	KECAMATAN CONCONG
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				6 Dokumen	42,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok/Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan	6 Dokumen	16,788,000	KECAMATAN CONCONG
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**3,629,200,167**							**3,621,953,817**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**3,441,590,167**						**100 Persen**	**3,512,295,167**	
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan**	**Orang**		**Orang**	**25 Orang**	**3,190,200,167**						**25 Orang**	**3,360,295,167**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bular	3,190,200,167	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		PNS Kantor Camat Enok	25 Orang/bulan	3,360,295,167	KECAMATAN ENOK
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**162,521,800**						**100 Persen**	**70,000,000**	
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Jenis	69,109,800	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	19 Jenis	5,000,000	KECAMATAN ENOK
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				900 Liter/Porsi	15,825,000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	900 Liter/Porsi	8,000,000	KECAMATAN ENOK
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9960 Meter/Ler	7,465,000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	9960 Meter/Lembar	4,000,000	KECAMATAN ENOK
7.01.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 eksemplar	3,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	30 eksemplar	3,000,000	KECAMATAN ENOK
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	67,122,000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	56 Laporan	50,000,000	KECAMATAN ENOK
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**77,083,200**						**100 Persen**	**72,000,000**	
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	2,000,000	KECAMATAN ENOK
		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Lembar							150 Lembar		
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	19,800,000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	10,000,000	KECAMATAN ENOK
		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Rekening							3 Rekening		
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	55,783,200	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	60,000,000	KECAMATAN ENOK
		Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				7 Orang							7 Orang		
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**11,785,000**						**100 Persen**	**10,000,000**	
7.01.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	11,785,000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	10,000,000	KECAMATAN ENOK
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**9,100,000**						**100 Persen**	**29,658,650**	
7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Lain di Kecamatan**	**Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani**	**Dokumen**		**Dokumen**	**100 Dokumen**	**9,100,000**						**100 Dokumen**	**29,658,650**	
7.01.02.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100 Laporan	9,100,000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Laporan	29,658,650	KECAMATAN ENOK
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**113,900,000**						**100 Persen**	**50,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**	**Kegiatan**		**Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**113,900,000**						**2 Kegiatan**	**50,000,000**	
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan				2 Kegiatan	113,900,000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Kegiatan	50,000,000	KECAMATAN ENOK
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang							0 Orang		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kelurahan/Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**64,610,000**						**100 Persen**	**30,000,000**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**64,610,000**						**100 Persen**	**30,000,000**	
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				0 Dokumen	55,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	20,000,000	KECAMATAN ENOK
		Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				2 Organisasi							2 Organisasi		
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				0 Dokumen	9,310,000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN ENOK
		Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				700 Usulan							700 Usulan		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**166,200,000**							**300,000,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**166,200,000**						**100 Persen**	**300,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Teluk Medan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**166,200,000**						**100 Persen**	**300,000,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Orm	166,200,000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Telukmedan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Pokmas / Ormas	300,000,000	KECAMATAN ENOK
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Teluk Medan				100 Persen							100 Persen		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**229,000,000**							**300,000,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**229,000,000**						**100 Persen**	**300,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pantai Seberang Makmur**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**229,000,000**						**100 Persen**	**300,000,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Orm	229,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Pantaiseberang Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Pokmas / Ormas	300,000,000	KECAMATAN ENOK
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pantai Seberang Makmur				100 Persen							100 Persen		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**251,200,000**							**300,000,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**251,200,000**						**100 Persen**	**300,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Enok**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**251,200,000**						**100 Persen**	**300,000,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Orm	251,200,000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Pokmas / Ormas	300,000,000	KECAMATAN ENOK
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Enok				100 Persen							100 Persen		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**232,600,000**							**300,000,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**232,600,000**						**100 Persen**	**300,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pusaran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**232,600,000**						**100 Persen**	**300,000,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Orm	232,600,000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Pusaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Pokmas / Ormas	300,000,000	KECAMATAN ENOK
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pusaran				100 Persen							100 Persen		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**2,888,153,456**							**2,754,173,111**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,623,850,362**						**100 Persen**	**2,588,565,851**	
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,363,155,687**						**100 Persen**	**2,377,863,687**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2,363,155,687	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Gaung	20 Orang/bulan	2,377,863,687	KECAMATAN GAUNG
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**116,900,275**						**100 Persen**	**66,257,764**	
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,261,025	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kecamatan Gaung	1 Paket	10,142,450	KECAMATAN GAUNG
											Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan				
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Kali	50,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Gaung	25 Kali	20,000,000	KECAMATAN GAUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Kali	10,999,250	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Gaung	30 Kali	10,999,750	KECAMATAN GAUNG
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	45,640,000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Gaung	55 Laporan	25,115,564	KECAMATAN GAUNG
7.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**110,000,000**						**100 Persen**	**110,000,000**	
7.01.01.02.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	110,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Kuala Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Gaung	3 Unit	110,000,000	KECAMATAN GAUNG
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**33,794,400**						**100 Persen**	**34,444,400**	
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Gaung	1 Laporan	3,650,000	KECAMATAN GAUNG
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	9,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Gaung	2 Laporan	9,000,000	KECAMATAN GAUNG
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	21,794,400	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Gaung	0 Laporan	21,794,400	KECAMATAN GAUNG
		Jumlah Tenaga Kebersihan				3 Orang							3 Orang		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**17,500,000**						**100 Persen**	**11,110,000**	
7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Lain di Kecamatan**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**17,500,000**						**100 Persen**	**11,110,000**	
7.01.02.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	17,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			kecamatan Gaung	10 Laporan	11,110,000	KECAMATAN GAUNG
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**47,500,000**						**100 Persen**	**99,131,297**	
7.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**47,500,000**						**100 Persen**	**99,131,297**	
7.01.03.02.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	47,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Laporan	99,131,297	KECAMATAN GAUNG
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**99,264,994**						**100 Persen**	**14,493,500**	
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**99,264,994**						**100 Persen**	**14,493,500**	
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelakanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan				2 Kali	99,264,994	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Gaung	2 Kali	14,493,500	KECAMATAN GAUNG
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**100,038,100**						**100 Persen**	**40,872,463**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100,038,100**						**100 Persen**	**40,872,463**	
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat Yang Dibina				3 Organisasi	86,779,700	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Organisasi	27,614,039	KECAMATAN GAUNG
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Usulan Pada Kegiatan Musrenbang				20 Usulan	13,258,400	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	20 Usulan	13,258,424	KECAMATAN GAUNG
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**202,793,000**							**313,600,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**202,793,000**						**100 Persen**	**313,600,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kuala Lahang**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**202,793,000**						**100 Persen**	**313,600,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan				100 Persen	202,793,000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Kuala Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Persen	313,600,000	KECAMATAN GAUNG
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**3,492,858,633**							**3,527,274,883**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**3,298,658,633**						**100 Persen**	**3,370,954,883**	
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**3,080,858,633**						**100 Persen**	**3,169,674,883**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bular	3,080,858,633	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	25 Orang/bulan	3,169,674,883	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**94,437,200**						**100 Persen**	**102,589,760**	
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	18,299,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket	22,639,960	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	12,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket	10,320,000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	9,567,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket	7,028,200	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	54,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	62,601,600	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**97,762,800**							**78,210,240**	
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	2,400,000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	20,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	16,464,000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	74,182,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	59,346,240	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**25,600,000**						**100 Persen**	**20,480,000**	
7.01.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	16,000,000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7.01.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	3,200,000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	1,280,000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**36,200,000**						**100 Persen**	**31,120,000**	
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**36,200,000**						**100 Persen**	**31,120,000**	
7.01.02.02.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	36,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	31,120,000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**3,000,000**						**100 Persen**	**2,400,000**	
7.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**3,000,000**						**100 Persen**	**2,400,000**	
7.01.03.02.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	2,400,000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**94,990,000**						**100 Persen**	**74,792,000**	
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**94,990,000**						**100 Persen**	**74,792,000**	
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	94,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	74,792,000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**60,010,000**						**100 Persen**	**48,008,000**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**60,010,000**						**100 Persen**	**48,008,000**	
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				0 Dokumen	53,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	42,968,000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				0 Dokumen	6,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	5,040,000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**260,400,000**							**208,320,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**260,400,000**						**100 Persen**	**208,320,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**260,400,000**						**100 Persen**	**208,320,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Orm	260,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Pokmas / Ormas	208,320,000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**390,400,000**							**312,320,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**390,400,000**						**100 Persen**	**312,320,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**390,400,000**						**100 Persen**	**312,320,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Orm	390,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Pokmas / Ormas	312,320,000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**154,800,000**							**123,840,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**154,800,000**						**100 Persen**	**123,840,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**154,800,000**						**100 Persen**	**123,840,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Orm	154,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Pokmas / Ormas	123,840,000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**3,097,217,696**							**2,860,052,089**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan Administrasi dan Sarana Prasarana Anggatan Pekerjaan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,906,702,396**						**100 Persen**	**2,795,151,762**	
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,574,097,487**						**100 Persen**	**2,666,286,089**	
		Persentase Pelaporan Keuangan yang di susun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bular	2,574,097,487	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	23 Orang/bulan	2,666,286,089	KECAMATAN KATEMAN
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**212,910,284**						**100 Persen**	**61,505,673**	
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	93,936,384	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Kecamatan	17 Paket	18,447,000	KECAMATAN KATEMAN
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40 Paket	18,913,900	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	40 Paket	10,058,673	KECAMATAN KATEMAN
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	100,060,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	65 Laporan	33,000,000	KECAMATAN KATEMAN
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**119,694,625**						**100 Persen**	**67,360,000**	
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	9,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	0 Laporan	7,360,000	KECAMATAN KATEMAN
		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				736 Lembar							736 Lembar		
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				3 Rekening	14,620,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	3 Rekening	30,000,000	KECAMATAN KATEMAN
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	96,074,625	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	7 Laporan	30,000,000	KECAMATAN KATEMAN
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**101,920,000**						**100 Persen**	**23,179,500**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Seni dan Budaya yang dilaksanakan**	**Kegiatan**		**Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**101,920,000**						**1 Kegiatan**	**23,179,500**	
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				100 Persen	101,920,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan dan Masyarakat	100 Persen	23,179,500	KECAMATAN KATEMAN
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**88,595,300**						**100 Persen**	**41,720,827**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Melaksanakan Pemerintahan Desa Secara Baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**88,595,300**						**100 Persen**	**41,720,827**	
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				3 Dokumen	71,134,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	3 Dokumen	24,720,827	KECAMATAN KATEMAN
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	17,461,300	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	17,000,000	KECAMATAN KATEMAN
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**186,200,000**							**168,960,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**186,200,000**						**100 Persen**	**168,960,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan di Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**186,200,000**						**100 Persen**	**168,960,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Orm	186,200,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Bandar Sri Gemilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	0 Pokmas / Ormas	168,960,000	KECAMATAN KATEMAN
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Persen							100 Persen		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**390,000,000**							**320,000,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**390,000,000**						**100 Persen**	**320,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan di Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**390,000,000**						**100 Persen**	**320,000,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Orm	390,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	0 Pokmas / Ormas	320,000,000	KECAMATAN KATEMAN
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Persen							100 Persen		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**152,200,000**							**107,000,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**152,200,000**						**100 Persen**	**107,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan di Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**152,200,000**						**100 Persen**	**107,000,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan				100 Persen	152,200,000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Amal Bakti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	100 Persen	107,000,000	KECAMATAN KATEMAN
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**3,476,082,391**							**4,219,443,200**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**3,261,676,391**						**100 Persen**	**4,079,043,200**	
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**3,008,858,191**						**100 Persen**	**3,700,000,000**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bular	3,008,858,191	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	0	21 Orang/bulan	3,700,000,000	KECAMATAN KEMPAS
											Penyiapan Tenaga Kerja Terampil				
											Penyiapan Tenaga Kerja Terampil				
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**154,065,400**						**100 Persen**	**212,500,000**	
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	41,065,400	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Paket	65,000,000	KECAMATAN KEMPAS
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	18,700,000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyiapan Tenaga Kerja Terampil	0	1 Paket	25,000,000	KECAMATAN KEMPAS
7.01.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	1,200,000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN KEMPAS
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				69 Laporan	93,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	69 Laporan	120,000,000	KECAMATAN KEMPAS
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**87,952,800**						**100 Persen**	**116,543,200**	
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4,224,000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Laporan	8,000,000	KECAMATAN KEMPAS
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	11,040,000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Laporan	13,800,000	KECAMATAN KEMPAS
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	72,688,800	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Laporan	94,743,200	KECAMATAN KEMPAS
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**10,800,000**						**100 Persen**	**50,000,000**	
7.01.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	10,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit	50,000,000	KECAMATAN KEMPAS
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**130,630,000**						**100 Persen**	**70,000,000**	
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**130,630,000**						**100 Persen**	**70,000,000**	
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	130,630,000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Orang	70,000,000	KECAMATAN KEMPAS
		Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				5 Laporan							5 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**83,776,000**						**100 Persen**	**70,400,000**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**83,776,000**						**100 Persen**	**70,400,000**	
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				0 Dokumen	73,376,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	60,000,000	KECAMATAN KEMPAS
		jumlah organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				2 Kelompok							2 Kelompok		
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				0 Dokumen	10,400,000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	10,400,000	KECAMATAN KEMPAS
		jumlah rekomendasi usulan kecematan pada musrenbang kecamatan				800 Dokumen							800 Dokumen		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**352,068,000**							**750,000,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**352,068,000**						**100 Persen**	**750,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kempas Jaya**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**352,068,000**						**100 Persen**	**750,000,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Orm	352,068,000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Kempas Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Masyarakat	0 Pokmas / Ormas	750,000,000	KECAMATAN KEMPAS
		Persentase Pelaksanaan Kegiataan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Persen							100 Persen		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**306,907,800**							**750,000,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**306,907,800**						**100 Persen**	**750,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kempas Jaya**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**306,907,800**						**100 Persen**	**750,000,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Orm	306,907,800	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Pokmas / Ormas	750,000,000	KECAMATAN KEMPAS
		Persentase Pelaksanaan Kegiataan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Persen							100 Persen		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**3,172,791,687**							**3,256,091,125**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,874,561,687**						**100 Persen**	**2,938,311,125**	
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan**	**orang**		**orang**	**20 orang**	**2,432,973,437**						**20 orang**	**2,508,873,225**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bular	2,432,973,437	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,508,873,225	KECAMATAN KEMUNING
7.01.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**jumlah jasa keamanan gedung kantor di bayarkan**	**orang**		**orang**	**2 orang**	**12,000,000**						**2 orang**	**2,000,000**	
7.01.01.02.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah jasa keamanan gedung kantor di bayarkan				2 orang	12,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Pengamanan barang Milik Daerah SKPD	2 orang	2,000,000	KECAMATAN KEMUNING
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**jumlah bahan logistik kantor yang disediakan**	**jenis**		**jenis**	**2 jenis**	**88,975,050**						**2 jenis**	**89,755,400**	
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	13,718,800	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	14,000,000	KECAMATAN KEMUNING
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	14,231,250	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	14,730,400	KECAMATAN KEMUNING
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan				30 kali	61,025,000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 kali	61,025,000	KECAMATAN KEMUNING
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah tenaga pelakana yang dibayarkan**	**orang**		**orang**	**10 orang**	**334,013,200**						**10 orang**	**331,082,500**	
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				85 persen	252,082,500	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		0	85 persen	252,082,500	KECAMATAN KEMUNING
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayarkan				2 rekening	23,800,000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		0	2 rekening	24,000,000	KECAMATAN KEMUNING
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	58,130,700	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		0	0 Laporan	55,000,000	KECAMATAN KEMUNING
		jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				3 Orang							3 Orang		
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah kendaraan dinas jabatan/lapangan yang dipelihara**	**unit**		**unit**	**11 unit**	**6,600,000**						**11 unit**	**6,600,000**	
7.01.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	6,600,000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		0	10 Unit	6,600,000	KECAMATAN KEMUNING
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**98,170,000**						**100 Persen**	**110,170,000**	
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**jumlah pelayanan rekomendasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan**	**jenis**		**jenis**	**2 jenis**	**48,000,000**						**2 jenis**	**60,000,000**	
7.01.02.02.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	48,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	60,000,000	KECAMATAN KEMUNING
7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**jumlah pelayanan rekomendasi perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan**	**kali**		**kali**	**2 kali**	**50,170,000**						**2 kali**	**50,170,000**	
7.01.02.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	50,170,000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	1 Laporan	50,170,000	KECAMATAN KEMUNING
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**138,110,000**						**100 Persen**	**138,860,000**	
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, seni, dan budaya yang dilaksanakan**	**kegiatan**		**kegiatan**	**3 kegiatan**	**138,110,000**						**3 kegiatan**	**138,860,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				3 kegiatan	138,110,000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	3 kegiatan	138,860,000	KECAMATAN KEMUNING
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**61,950,000**						**100 Persen**	**68,750,000**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Peresentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**61,950,000**						**100 persen**	**68,750,000**	
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	51,950,000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peresentase Desa/Kelurahan yang tertib	1 Dokumen	53,750,000	KECAMATAN KEMUNING
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peresentase Desa/Kelurahan yang tertib	2 Dokumen	15,000,000	KECAMATAN KEMUNING
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**150,720,000**							**150,720,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**150,720,000**						**100 Persen**	**150,720,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kelurahan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**150,720,000**						**100 persen**	**150,720,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	presentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan selensen				100 persen	150,720,000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tingkat Partisipasi Masyarakat di	100 persen	150,720,000	KECAMATAN KEMUNING
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**3,160,746,436**							**3,210,863,594**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**3,027,718,436**						**100 Persen**	**3,152,363,594**	
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,658,087,936**						**100 Persen**	**2,826,143,594**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	2,658,087,936	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,				ASN	0 Orang/bulan	2,826,143,594	KECAMATAN KERITANG
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan							26 Orang/bulan		
7.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan**	**Stel**		**Stel**	**28 Stel**	**10,080,000**						**28 Stel**	**15,000,000**	
7.01.01.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Stel	10,080,000					Pegawai Kantor Camat	28 Stel	15,000,000	KECAMATAN KERITANG
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan**	**jenis**		**jenis**	**4 jenis**	**193,550,500**						**4 jenis**	**176,620,000**	
7.01.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	4,570,000					Administrasi Kantor Camat	0 Paket	4,000,000	KECAMATAN KERITANG
		Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 rekening							2 rekening		
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Jenis	56,417,000					Administrasi Kantor Camat	8 Jenis	51,920,000	KECAMATAN KERITANG
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Jenis	13,050,000					Administrasi Kantor Camat	2 Jenis	15,600,000	KECAMATAN KERITANG
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				4 Paket	3,933,500					Administrasi Kantor Camat	4 Paket	3,500,000	KECAMATAN KERITANG
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7.01.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				12 eksemplar	960					Administrasi Kantor Camat	12 eksemplar	1,600,000	KECAMATAN KERITANG
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				116 Kali	114,620,000					Administrasi Kantor Camat	116 Kali	100,000,000	KECAMATAN KERITANG
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
7.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kendaraan yang Disediakan**	**Unit**		**Unit**	**1 Unit**	**75,000,000**						**1 Unit**	**27,500,000**	
7.01.01.02.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan				1 Unit	75,000,000					0	1 Unit	27,500,000	KECAMATAN KERITANG
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit							0 Unit		
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan**	**Orang**		**Orang**	**8 Orang**	**84,000,000**						**8 Orang**	**98,100,000**	
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	2,400,000					0	100 Persen	3,400,000	KECAMATAN KERITANG
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	14,400,000					0	0 Laporan	16,700,000	KECAMATAN KERITANG
		Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 rekening							2 rekening		
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	67,200,000					0	0 Laporan	78,000,000	KECAMATAN KERITANG
		Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				8 Orang							8 Orang		
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**7,000,000**						**100 Persen**	**9,000,000**	
7.01.01.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	4,000,000					Operasional Kantor	100 Persen	3,700,000	KECAMATAN KERITANG
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							0 Unit		
7.01.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	3,000,000					Operasional Kantor	100 Persen	5,300,000	KECAMATAN KERITANG
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**4,000,000**						**100 Persen**	**5,900,000**	
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**4,000,000**						**100 Persen**	**5,900,000**	
7.01.02.02.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	4,000,000					17 Desa/Kelurahan	0 Dokumen	5,900,000	KECAMATAN KERITANG
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan				100 Persen							100 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**65,330,000**						**100 Persen**	**25,800,000**	
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**65,330,000**						**100 Persen**	**25,800,000**	
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Seni dan Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan		
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	65,330,000					Khafilah MTQ Kecamatan Keritang	0 Orang	25,800,000	KECAMATAN KERITANG
		Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**jumlah organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**63,698,000**						**100 Persen**	**26,800,000**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**63,698,000**						**100 Persen**	**26,800,000**	
		jumlah organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok		Kelompok	2 Kelompok							2 Kelompok		
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				0 Dokumen	54,398,000					Musrembang Kecamatan, Kegiatan HUT RI Kecamatan dan Kegiatan PKK	0 Dokumen	20,300,000	KECAMATAN KERITANG
		jumlah organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				2 Kelompok							2 Kelompok		
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				0 Dokumen	9,300,000					Musrembang Kecamatan, Kegiatan HUT RI Kecamatan dan Kegiatan PKK	0 Dokumen	6,500,000	KECAMATAN KERITANG
		jumlah rekomendasi usulan kecematan pada musrenbang kecamatan				850 Usulan							850 Usulan		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**348,016,000**							**301,904,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**348,016,000**						**100 Persen**	**301,904,000**	
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan**	**Kegiatan**		**Kegiatan**	**100 Kegiatan**	**348,016,000**						**100 Kegiatan**	**301,904,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Persen	348,016,000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh				Kelurahan Kotabaru Reteh	100 Persen	301,904,000	KECAMATAN KERITANG
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**2,710,432,079**							**3,792,176,169**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**2,252,582,079**						**100 persen**	**2,460,176,169**	
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan**	**orang**		**orang**	**17 orang**	**2,042,832,079**						**17 orang**	**2,155,676,169**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	2,042,832,079	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	ASN	15 Orang/bulan	2,155,676,169	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
											Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas				
7.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan**	**stel**		**stel**	**20 stel**	**10,000,000**						**20 stel**	**12,000,000**	
		Jumlah Pakaian Korpri yang disediakan	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.01.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				20 stel	10,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	ASN	20 stel	12,000,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan**	**jenis**		**jenis**	**23 jenis**	**140,276,000**						**23 jenis**	**212,000,000**	
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				23 jenis	9,037,500	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan prasarana Aparatur	23 jenis	12,000,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 jenis	19,998,500	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Sarana dan prasarana Aparatur	3 jenis	35,000,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2 jenis	12,970,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan prasarana Aparatur	2 jenis	15,000,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				2 paket	98,270,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan prasarana Aparatur	2 paket	150,000,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
7.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan**	**jenis**		**jenis**	**5 jenis**	**12,000,000**						**5 jenis**	**15,000,000**	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.01.02.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Kantor				3 Unit	12,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Penunjang Perkantoran	3 Unit	15,000,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Materai yang diadakan**	**lembar**		**lembar**	**270 lembar**	**40,374,000**						**270 lembar**	**45,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				270 lembar	2,850,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penunjang Perkantoran	270 lembar	3,000,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	3,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penunjang Perkantoran	0 Laporan	3,000,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 Rekening							2 Rekening		
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	34,524,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penunjang Perkantoran	0 Laporan	39,000,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				5 Orang							5 Orang		
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan**	**unit**		**unit**	**5 unit**	**7,100,000**						**5 unit**	**20,500,000**	
7.01.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	2,100,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penunjang Sarana Prasarana Perkantoran	6 Unit	14,000,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7.01.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penunjang Sarana Prasarana Perkantoran	5 Unit	6,500,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**21,600,000**						**100 persen**	**35,000,000**	
7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**jenis**		**jenis**	**5 jenis**	**21,600,000**						**5 jenis**	**35,000,000**	
7.01.02.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	21,600,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemerintahan Aparatur Kecamatan	0 Laporan	35,000,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				5 jenis							5 jenis		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**217,600,000**						**100 persen**	**1,000,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah kegiatankemasyarakatandesa/kelurahan yangdilaksanakan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**217,600,000**						**100 Persen**	**1,000,000,000**	
		Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyrakat dalam Pembangunan Daerah	persen		persen	100 persen							100 persen		
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Orm	217,600,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Masyarakat dan Lembaga di Kelurahan Sapat	0 Pokmas / Ormas	1,000,000,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		Persentase Pelaksanaan Kegiataan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 persen							100 persen		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**116,500,000**						**100 Persen**	**155,000,000**	
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan**	**kegiatan**		**kegiatan**	**1 kegiatan**	**116,500,000**						**1 kegiatan**	**155,000,000**	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	116,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Suku dan Umat Beragama	0 Orang	155,000,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				2 kegiatan							2 kegiatan		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**102,150,000**						**100 Persen**	**142,000,000**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang melaksanakan Pilkades**	**desa**		**desa**	**2 desa**	**102,150,000**						**2 desa**	**142,000,000**	
		Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				0 Dokumen	81,100,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Desa	0 Dokumen	115,000,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		jumlah organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				2 kelompok							2 kelompok		
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				0 Dokumen	21,050,000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Desa	0 Dokumen	27,000,000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		jumlah rekomendasi usulan kecematan pada musrenbang kecamatan				300 usulan							300 usulan		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**2,849,295,567**							**212,552,505**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,746,591,922**						**100 Persen**	**107,834,175**	
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,623,953,638**						**100 Persen**	**2,334,625**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bular	2,623,953,638		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	-	20 Orang/bulan	2,334,625	KECAMATAN MANDAH
											Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan				
											Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan				
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Urusan penunjang pemerintah Daerah yang tercapai**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**97,853,034**						**100 Persen**	**80,515,550**	
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Persen	16,062,284		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	100 Persen	34,000,000	KECAMATAN MANDAH
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Persen	780,75	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	100 Persen	1,105,550	KECAMATAN MANDAH
7.01.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Persen	2,400,000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	-	100 Persen	2,400,000	KECAMATAN MANDAH
											Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan				
											Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan				
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Persen	78,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	100 Persen	43,010,000	KECAMATAN MANDAH
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tercapai**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**24,785,250**						**100 Persen**	**24,984,000**	
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Persen	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	100 Persen	2,400,000	KECAMATAN MANDAH
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Persen	4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	100 Persen	7,059,000	KECAMATAN MANDAH
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	17,585,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	100 Laporan	15,525,000	KECAMATAN MANDAH
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**34,053,613**						**100 Persen**	**39,426,880**	
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**34,053,600**						**100 Persen**	**27,242,880**	
7.01.02.02.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 Persen	34,053,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	100 Persen	27,242,880	KECAMATAN MANDAH
7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Lain di Kecamatan**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**13**						**100 Persen**	**12,184,000**	
7.01.02.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100 Persen	13		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	100 Persen	12,184,000	KECAMATAN MANDAH
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**49,900,032**						**100 Persen**	**43,929,950**	
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Urusan Pemerintah Umum yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**49,900,032**						**100 Persen**	**43,929,950**	
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Persen	49,900,032		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	100 Persen	43,929,950	KECAMATAN MANDAH
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**18,750,000**						**100 Persen**	**21,361,500**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa/kelurahan yang Tertib Adinistrasi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**18,750,000**						**100 Persen**	**21,361,500**	
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				100 Persen	18,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Persen	12,711,500	KECAMATAN MANDAH
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**227,400,000**							**18,920,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**227,400,000**						**100 Persen**	**18,920,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**227,400,000**						**100 Persen**	**18,920,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Persen	227,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	100 Persen	18,920,000	KECAMATAN MANDAH
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**3,260,985,008**							**3,454,344,508**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,665,970,208**						**100 Persen**	**2,824,389,708**	
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tercapai	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,490,548,758**						**100 Persen**	**2,588,985,008**	
		Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang		orang	26 orang							26 orang		
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2,490,548,758	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur Kecamatan	26 Orang/bulan	2,588,985,008	KECAMATAN PELANGIRAN
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan**	**Jenis**		**Jenis**	**2 Jenis**	**160,681,450**						**2 Jenis**	**216,704,700**	
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali		Kali	63 Kali							63 Kali		
		Jumlah Logistik yang Tersedia	Jenis		Jenis	3 Jenis							3 Jenis		
		Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Jenis		Jenis	23 Jenis							23 Jenis		
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100 Persen		100 Persen	100 Persen							100 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	49,589,950	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Aparatur Kecamatan	3 Paket	86,669,700	KECAMATAN PELANGIRAN
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	13,900,000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Trantibunlinmas	Aparatur Kecamatan	2 Paket	16,900,000	KECAMATAN PELANGIRAN
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5,571,500	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	Aparatur Kecamatan	2 Paket	7,515,000	KECAMATAN PELANGIRAN
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	91,620,000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	60 Laporan	105,620,000	KECAMATAN PELANGIRAN
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat**	**Buah**		**Buah**	**240 Buah**	**10,240,000**						**240 Buah**	**13,200,000**	
		Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening		Rekening	2 Rekening							2 Rekening		
		Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang		Orang	2 Orang							2 Orang		
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,040,000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	Aparatur Kecamatan	1 Laporan	4,500,000	KECAMATAN PELANGIRAN
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,200,000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Kecamatan	1 Laporan	8,700,000	KECAMATAN PELANGIRAN
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Unit**		**Unit**	**1 Unit**	**4,500,000**						**1 Unit**	**5,500,000**	
7.01.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	4,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	1 Unit	5,500,000	KECAMATAN PELANGIRAN
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**25,454,800**						**100 Persen**	**37,994,800**	
		Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**25,454,800**						**100 Persen**	**37,994,800**	
		Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.02.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25,454,800	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	1 Laporan	37,994,800	KECAMATAN PELANGIRAN
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**344,000,000**						**100 Persen**	**360,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**344,000,000**						**100 Persen**	**360,000,000**	
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Orm	344,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	Kelurahan Pelangiran	6 Pokmas / Ormas	360,000,000	KECAMATAN PELANGIRAN
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**112,450,000**						**100 Persen**	**115,450,000**	
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**112,450,000**						**100 Persen**	**115,450,000**	
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				55 Orang	112,450,000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat	55 Orang	115,450,000	KECAMATAN PELANGIRAN
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**113,110,000**						**100 Persen**	**116,510,000**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa/Kelurahan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**113,110,000**						**100 Persen**	**116,510,000**	
		Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok		Kelompok	1 Kelompok							1 Kelompok		
		Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Usulan		Usulan	149 Usulan							149 Usulan		
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				2 Dokumen	93,200,000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibiltas dan Layanan Bidang Kesehatan	Aparatur Kecamatan	2 Dokumen	95,500,000	KECAMATAN PELANGIRAN
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	19,910,000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	21,010,000	KECAMATAN PELANGIRAN
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**2,627,388,205**							**2,793,514,946**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,469,002,205**						**100 Persen**	**2,584,202,946**	
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**2,220,772,626**						**100 persen**	**2,334,357,046**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bular	2,220,772,626	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	23 Orang/bulan	2,334,357,046	KECAMATAN PULAU BURUNG
7.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**9,200,000**						**100 persen**	**11,500,000**	
7.01.01.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	9,200,000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	23 Paket	11,500,000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**220,760,079**							**214,240,000**	
7.01.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 jenis	1,675,000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan			Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan		13 jenis	3,000,000	KECAMATAN PULAU BURUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Paket	34,553,600	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan		27 Paket	40,000,000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	13,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan		2 Paket	20,000,000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11,841,479	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan		2 Paket	10,000,000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88 Laporan	159,690,000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan		88 Laporan	140,000,000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**18,269,500**							**24,105,900**	
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	2,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 Laporan	4,000,000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	9,120,000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	9,600,000	KECAMATAN PULAU BURUNG
		Jumlah Rekening yang dibayarkan				24 Rekening							24 Rekening		
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7,149,500	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan		12 Laporan	10,505,900	KECAMATAN PULAU BURUNG
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**0**	**0**		**0**	**0 0**	**986**						**0 0**	**1,512,000**	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan		laporan	150 laporan							150 laporan		
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**986**						**100 persen**	**1,512,000**	
		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen							100 persen		
7.01.02.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	986	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	1,512,000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**3,400,000**						**100 Persen**	**7,250,000**	
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**3,400,000**						**100 persen**	**7,250,000**	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen							100 persen		
7.01.03.02.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3,400,000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	0	1 Laporan	7,250,000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**93,132,000**						**100 Persen**	**100,000,000**	
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**93,132,000**						**100 persen**	**100,000,000**	
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				30 Orang	93,132,000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Orang	100,000,000	KECAMATAN PULAU BURUNG
		Jumlah pelakanaan kegiatan keagamaan,seni dan budaya yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**60,868,000**						**100 Persen**	**100,550,000**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**60,868,000**						**100 persen**	**100,550,000**	
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				2 Dokumen	48,618,000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	2 Dokumen	70,000,000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				14 Dokumen	12,250,000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	14 Dokumen	30,550,000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**3,593,051,357**							**3,592,313,163**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**3,455,096,157**						**100 Persen**	**3,524,895,259**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**3,150,051,357**						**100 Persen**	**3,397,383,264**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				27 Orang	3,150,051,357	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pegawai	27 Orang	3,397,383,264	KECAMATAN RETEH
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan							0 Orang/bulan		
7.01.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**18,194,400**						**100 Persen**	**7,200,000**	
7.01.01.02.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan				3 Orang	18,194,400	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat dan Pegawai	3 Orang	7,200,000	KECAMATAN RETEH
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**236,167,500**						**100 Persen**	**95,836,995**	
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				16 Jenis	70,645,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pegawai	16 Jenis	9,532,000	KECAMATAN RETEH
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 Jenis	9,392,500	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pegawai	3 Jenis	5,362,500	KECAMATAN RETEH
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2 Jenis	3,600,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pegawai	2 Jenis	2,475,000	KECAMATAN RETEH
7.01.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				12 Eksemplar	2,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pegawai	12 Eksemplar	1,250,000	KECAMATAN RETEH
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				123 Kali	150,030,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pegawai	123 Kali	77,217,495	KECAMATAN RETEH
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**38,882,900**						**100 Persen**	**18,575,000**	
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				90 Persen	1,800,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pegawai	90 Persen	900	KECAMATAN RETEH
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 Rekening	18,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pegawai	2 Rekening	5,400,000	KECAMATAN RETEH
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				5 Orang	19,082,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pegawai	5 Orang	12,275,000	KECAMATAN RETEH
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**11,800,000**						**100 Persen**	**5,900,000**	
7.01.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				2 Unit	11,800,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pegawai	2 Unit	5,900,000	KECAMATAN RETEH
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**21,769,000**						**100 Persen**	**10,926,483**	
7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**21,769,000**						**100 Persen**	**10,926,483**	
7.01.02.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				3 Jenis	21,769,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pegawai	3 Jenis	10,926,483	KECAMATAN RETEH
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**84,930,000**						**100 Persen**	**42,788,650**	
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**84,930,000**						**100 Persen**	**42,788,650**	
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				1 Kegiatan	84,930,000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pegawai	1 Kegiatan	42,788,650	KECAMATAN RETEH
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**31,256,200**						**100 Persen**	**13,702,771**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa/Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**31,256,200**						**100 Persen**	**13,702,771**	
		Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				3 Kelompok	18,941,700	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pegawai	3 Kelompok	8,345,521	KECAMATAN RETEH
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah rekomendasi usulan kecematan pada musrenbang kecamatan				70 Usulan	12,314,500	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pegawai	70 Usulan	5,357,250	KECAMATAN RETEH
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**467,057,000**							**368,300,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**467,057,000**						**100 Persen**	**368,300,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**467,057,000**						**90 Persen**	**368,300,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Orm	467,057,000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pegawai	1 Pokmas / Ormas	368,300,000	KECAMATAN RETEH
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**186,600,000**							**165,000,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**186,600,000**						**100 Persen**	**165,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**186,600,000**						**90 Persen**	**165,000,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				90 Persen	186,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Pegawai	90 Persen	165,000,000	KECAMATAN RETEH
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**182,664,000**							**171,000,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**182,664,000**						**100 Persen**	**171,000,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**182,664,000**						**90 Persen**	**171,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiataan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				90 Persen	182,664,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Masyarakat, Pegawai	90 Persen	171,000,000	KECAMATAN RETEH
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**2,454,741,667**							**2,279,682,300**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,313,371,160**						**100 Persen**	**2,211,352,570**	
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan**	**Orang**		**Orang**	**18 Orang**	**2,060,512,300**						**18 Orang**	**2,060,512,300**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				18 Orang	2,060,512,300	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	ASN	18 Orang	2,060,512,300	KECAMATAN SUNGAI BATANG
											Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan				
7.01.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**14,529,600**						**100 Persen**	**14,400,000**	
7.01.01.02.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan				2 Orang	14,529,600	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur	2 Orang	14,400,000	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**162,340,460**						**100 Persen**	**60,951,470**	
7.01.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				4 Jenis	1,631,050	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan sarana prasarana penunjang	4 Jenis	830	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				29 Jenis	108,330,810	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur dan sarana prasarana penunjang	29 Jenis	18,366,900	KECAMATAN SUNGAI BATANG
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 Jenis	12,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan sarana prasarana penunjang	3 Jenis	20,625,900	KECAMATAN SUNGAI BATANG
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				3 Jenis	8,248,600	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan sarana prasarana penunjang	3 Jenis	3,748,670	KECAMATAN SUNGAI BATANG
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				21 Kali	31,630,000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan sarana prasarana penunjang	21 Kali	17,380,000	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**75,988,800**						**100 Persen**	**75,488,800**	
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	2,400,000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	100 Persen	1,000,000	KECAMATAN SUNGAI BATANG
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 Rekening	10,800,000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	2 Rekening	11,700,000	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				6 Orang	62,788,800	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	6 Orang	62,788,800	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**18,829,600**						**100 Persen**	**9,367,750**	
7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Lain di Kecamatan**	**Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani**	**jenis**		**jenis**	**2 jenis**	**18,829,600**						**2 jenis**	**9,367,750**	
7.01.02.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	18,829,600	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur dan Masyarakat	0 Laporan	9,367,750	KECAMATAN SUNGAI BATANG
		Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang ditebitkan				2 Jenis							2 Jenis		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**93,290,907**						**100 Persen**	**43,410,000**	
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**93,290,907**						**100 Persen**	**43,410,000**	
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				2 Kegiatan	93,290,907	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Masyarakat	2 Kegiatan	43,410,000	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**29,250,000**						**100 Persen**	**15,551,980**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**29,250,000**						**100 Persen**	**15,551,980**	
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				2 Kelompok	21,800,000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat	2 Kelompok	8,051,980	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah rekomendasi usulan kecamatan pada musrenbang kecamatan				1 Dokumen	7,450,000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat	1 Dokumen	7,500,000	KECAMATAN SUNGAI BATANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**261,800,000**							**125,442,000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikecamatan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**261,800,000**						**100 Persen**	**125,442,000**	
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikecamatan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**261,800,000**						**100 Persen**	**125,442,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Persen	261,800,000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Aparatur dan masyarakat	100 Persen	125,442,000	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**2,836,018,677**							**2,669,019,177**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,403,967,677**						**100 Persen**	**2,328,519,177**	
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,095,218,677**						**100 Persen**	**2,095,218,677**	
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bular	2,095,218,677	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil	15 Orang/bulan	2,095,218,677	KECAMATAN TANAH MERAH
7.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**6,250,000**						**90 Persen**	**17,500,000**	
7.01.01.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	6,250,000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil	2 Paket	17,500,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**163,111,600**						**90 Persen**	**123,000,500**	
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				6 Jenis	45,714,600	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil	6 Jenis	12,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk rapat				570 Porsi	18,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil	570 Porsi	30,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan				2 Jenis	7,890,000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil	2 Jenis	10,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7.01.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2,880,000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil	12 Dokumen	2,880,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				160 Kali	88,627,000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil	160 Kali	68,120,500	KECAMATAN TANAH MERAH
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**136,887,400**						**100 Persen**	**89,800,000**	
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				500 Buah/Lemb	5,000,000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil	500 Buah/Lembar	9,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	17,045,000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil	0 Laporan	22,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
		Jumlah Rekening yang dibayarkan				3 Rekening							3 Rekening		
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				13 Orang	114,842,400	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil	13 Orang	58,800,000	KECAMATAN TANAH MERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**2,500,000**						**90 Persen**	**3,000,000**	
7.01.01.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	2,500,000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil	10 Unit	3,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**265,050,000**						**100 Persen**	**170,000,000**	
7.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**9,250,000**						**100 Persen**	**60,000,000**	
7.01.03.02.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan	9,250,000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Partisipasi kelembagaan/Organisasi	1 Kegiatan	60,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7.01.03.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**255,800,000**						**100 Persen**	**110,000,000**	
7.01.03.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Orm	255,800,000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Partisipasi kelembagaan/Organisasi	7 Pokmas / Ormas	110,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggkan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**76,263,500**						**100 Persen**	**65,000,000**	
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**76,263,500**						**100 Persen**	**65,000,000**	
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	76,263,500	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Partisipasi kelembagaan/Organisasi	0 Orang	65,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Seni dan Budaya yang dilaksanakan				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**90,737,500**						**100 Persen**	**105,500,000**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**90,737,500**						**100 Persen**	**105,500,000**	
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				0 Dokumen	63,050,000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Partisipasi kelembagaan/Organisasi	0 Dokumen	90,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
		Jumlah Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat yang dibina				2 Kelompok							2 Kelompok		
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				500 Usulan	27,687,500	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Partisipasi kelembagaan/Organisasi	500 Usulan	15,500,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**						**2,425,649,863**							**2,738,008,207**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**1,975,980,763**						**100 Persen**	**2,163,688,327**	
7.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Aset yang di susun sesuai standar**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**1,672,668,863**						**100 persen**	**1,720,368,857**	
		Persentase Pelaporan Keuangan yang di susun sesuai standar	persen		persen	100 persen							100 persen		
		tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 persen		0 persen	100 persen							100 persen		
7.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	1,672,668,863		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Jumlah Gaji ASN	0 Orang/bulan	1,720,368,857	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun							1 tahun		
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**253,132,700**						**100 persen**	**378,302,510**	
		tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 persen		0 persen	100 persen							100 persen		
7.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 paket	24,852,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Desa	24 paket	53,758,510	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 paket	31,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Desa	3 paket	39,000,000	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 paket	5,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Desa	4 paket	6,850,000	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	191,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Desa	2 Laporan	278,694,000	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**50,179,200**						**100 persen**	**65,016,960**	
		tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan umum	100 persen		0 persen	100 persen							100 persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kecamatan , Desa	1 Laporan	5,400,000	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan , Desa	1 Laporan	15,600,000	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	33,859,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Kecamatan , Desa	2 Laporan	44,016,960	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**58,250,000**						**100 Persen**	**72,812,500**	
7.01.02.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Pelayanan yang di selesaikan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**58,250,000**						**100 persen**	**72,812,500**	
		terlaksananya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 persen		0 persen	100 persen							100 persen		
7.01.02.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	58,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Desa dan Kelurahan	1 Laporan	72,812,500	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**202,512,600**						**100 Persen**	**259,366,380**	
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**202,512,600**						**100 persen**	**259,366,380**	
		terterlaksananya kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	100 persen		0 persen	100 persen							100 persen		
7.01.05.02.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 orang	202,512,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Desa, Kelurahan	150 orang	259,366,380	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**188,906,500**						**100 Persen**	**242,141,000**	
7.01.06.02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**188,906,500**						**100 persen**	**242,141,000**	
		tersedianya fasilitasi rekomendasi dalam rangka Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen		0 persen	100 persen							100 persen		
7.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				2 Dokumen	126,682,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Dan Pembangunan Mall Kependudukan Serta Revitalisasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan	Desa	2 Dokumen	164,687,250	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7.01.06.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	62,224,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Desa	1 Dokumen	77,453,750	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**														
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**20,091,849,233**							**15,047,217,621**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**90 Persen**		**0 Persen**	**90 Persen**	**12,429,246,433**						**90 Persen**	**9,847,473,671**	
8.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**339,722,850**						**90 Persen**	**424,653,650**	
8.01.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				10 Dokumen	339,722,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	10 Dokumen	424,653,650	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**4,340,043,571**						**100 Persen**	**4,433,193,571**	
		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
8.01.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				38 Orang	4,340,043,571		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelayanan	38 Orang	4,433,193,571	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang berkinerja baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**179,827,600**						**100 Persen**	**268,068,600**	
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
8.01.01.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan				31 Stel	43,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil (ASN)	31 Stel	54,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				5 Diklat	136,627,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil (ASN)	5 Diklat	214,068,600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**3,361,722,112**						**100 Persen**	**2,373,495,500**	
8.01.01.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				44 Jenis	15,171,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negera (ASN), Instansi Vertikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	44 Jenis	15,929,550	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.01.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				50 Jenis	1,880,369,212		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negera (ASN), Instansi Vertikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	50 Jenis	837,909,800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan				1 Jenis	60,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negera (ASN), Instansi Vertikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	1 Jenis	60,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				7 Jenis	30,995,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negera (ASN), Instansi Vertikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	7 Jenis	15,998,750	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan				221 Eksemplar	340,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negera (ASN), Instansi Vertikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	221 Eksemplar	16,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan				140 Kali	1,034,986,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negera (ASN), Instansi Vertikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	140 Kali	1,427,257,400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**968,552,000**						**100 Persen**	**879,075,750**	
8.01.01.02.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun				3 Unit	968,552,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Instansi Vertikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	3 Unit	879,075,750	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**448,498,300**						**100 Persen**	**535,123,800**	
8.01.01.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				90 Persen	6,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	90 Persen	8,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan				2 rekening	102,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	2 rekening	102,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				3 Orang	340,098,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	3 Orang	425,123,800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,790,880,000**						**100 Persen**	**933,862,800**	
8.01.01.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan/operasional/lapangan yang dipelihara				18 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kendaraan Dinas, Instansi Vertikal	18 Unit	150,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				4 Unit	2,640,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kendaraan Dinas, Instansi Vertikal	4 Unit	783,862,800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**625,221,100**						**100 Persen**	**897,870,000**	
8.01.02.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Cakupan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**625,221,100**						**100 Persen**	**897,870,000**	
8.01.02.02.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah yang diselenggarakan				8 Kegiatan	332,125,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, ASN, Pendidik, Mahasiswa,	8 Kegiatan	401,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.02.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan				250 Peserta	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, ASN, Pendidik, Mahasiswa,	250 Peserta	180,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.02.02.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Seminar Pembauran Kebangsaan & Rapat FPK yang dilaksanakan				100 Orang	141,496,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, ASN, Pendidik, Mahasiswa,	100 Orang	176,870,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.02.01.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi bela negara				50 Peserta	51,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, ASN, Pendidik, Mahasiswa,	50 Peserta	140,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA**	**Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**4,116,839,100**						**100 Persen**	**2,453,047,600**	
8.01.03.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala**	**Cakupan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**4,116,839,100**						**100 Persen**	**2,453,047,600**	
8.01.03.02.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik yang di bina				11 Parpol	3,608,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Partai Politik dan Masyarakat	11 Parpol	1,380,370,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.02.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat yang mengikuti pembinaan				200 Masyarakat	508,639,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Partai Politik dan Masyarakat	200 Masyarakat	1,072,677,600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**457,316,600**						**100 Persen**	**520,198,000**	
8.01.04.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Cakupan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**457,316,600**						**100 Persen**	**520,198,000**	
8.01.04.02.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas/LSM yang mengikuti pembinaan				282 Ormas/LSM	457,316,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		282 Ormas/LSM	282 Ormas/LSM	520,198,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Cakupan Ketahanan sosial dan budaya**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**360,158,400**						**100 Persen**	**585,221,500**	
8.01.05.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Cakupan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**360,158,400**						**100 Persen**	**585,221,500**	
8.01.05.02.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi yang diselenggarakan				6 Kegiatan	360,158,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda, Mahasiswa/Pelaj	6 Kegiatan	585,221,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**2,103,067,600**						**100 Persen**	**743,406,850**	
8.01.06.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Cakupan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**2,103,067,600**						**100 Persen**	**743,406,850**	
8.01.06.02.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rapat Intelijen yang dilaksanakan				4 Kali	197,320,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Ideologi, Politik, Ekonomi sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, di Wilayah Inhil.	4 Kali	200,717,950	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.02.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dipantau				20 Kecamatan	1,905,747,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Ideologi, Politik, Ekonomi sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, di Wilayah Inhil.	20 Kecamatan	542,688,900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL							**1,991,511,719,120**							**2,431,147,507,668**	

BAB 6

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Penetapan indikator kinerja Utama (IKU) Kabupaten Indragiri Hilir ditunjukkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

No	Indikator	Target Tahun 2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	79.00
2	Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur	51,2
3	Persentase capaian pengelolaan sumber daya alam	56.54
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,05
5	Indeks Pembangunan Manusia - IPM	67,92
6	Indeks Partisipasi Sosial	80
7	Tingkat Keberdayaan Masyarakat	80
8	Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial	61,62
9	PDRB per Kapita (Juta per Kapita)	61,62
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,78

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.2 digunakan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada pada tahun 2023.

Tabel 6.2.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja 2023
I	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**	
1.1.	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**	
1.1.1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp Milyar)	58.207,67
1.1.2.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)	7,00
1.1.3.	Inflasi (%)	3,40
1.1.4.	PDRB Per Kapita (Rp Juta/Kap/Tahun)	66,07
1.1.5.	Indeks Gini (Indeks)	0,31
1.1.6.	Indeks Williamson (Indeks)	0,21
1.1.7.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	52,39
1.1.8.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,10
1.2.	**Fokus Kesejahteraan Sosial**	
1.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	69,72
1.2.2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,56
1.2.3.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,86
1.2.3.	APK SD/MI (%)	106,97
1.2.4.	APK SMP/MTs (%)	102,03
1.2.5.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,00
1.2.6.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,60
1.2.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,38
1.2.8.	Nilai AKIP (Prediket)	A
1.2.9.	Nilai LPPD (Prediket)	Sangat Tinggi
1.2.10.	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	79,00
1.2.11.	Keterbukaan Informasi (%)	95,00
1.2.12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	89,22

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja 2023
1.2.13.	Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)	65,00
1.2.14.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (%)	78,00
1.3.	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**	
1.3.1.	Cakupan Fasilitasi Seni (%)	60,00
1.3.2.	Jumlah Prestasi Olahraga (Kejuaraan)	5
II	**Aspek Pelayanan Umum**	
2.1.	**Layanan Urusan Wajib Dasar**	
2.1.1.	**Pendidikan**	
2.1.1.1.	APM SD/MI (%)	100,0000
2.1.1.2.	APM SMP/MTs (%)	80,00
2.1.1.3.	APS 7 - 12 Tahun (%)	100,00
2.1.1.4.	APS 13 - 15 tahun (%)	96,00
2.1.1.5.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,01
2.1.1.6.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,02
2.1.1.7.	Rasio Ketersediaan Sekolah Thd Penduduk Usia 7 - 12 Tahun (%)	82,00
2.1.1.8.	Rasio Ketersediaan Sekolah Thd Penduduk Usia 13 - 15 Tahun (%)	79,00
2.1.1.9.	Rasio ketersediaan Guru Thd Murid SD/MI (Guru Per 10.000 Murid)	810,00
2.1.1.10.	Rasio ketersediaan Guru Thd Murid SMP/MTs (Guru Per 10.000 Murid)	1.011,00
2.1.1.11.	Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV (%)	100,00
2.1.2.	**Kesehatan**	
2.1.2.1.	Rasio Rumah Sakit (Per 1.000 Penduduk)	0,0042
2.1.2.2.	Rasio Puskesmas (Per 1.000 Penduduk)	0,0420
2.1.2.3.	Rasio Dokter Spesialis (Per 1.000 Penduduk)	0,0480
2.1.2.4.	Rasio Dokter Umum (Per 1.000 Penduduk)	0,5000
2.1.2.5.	Rasio Dokter Gigi (Per 1.000 Penduduk)	0,0250
2.1.2.6.	Rasio Perawat (Per 1.000 Penduduk)	0,0860
2.1.2.7.	Rasio Bidan (Per 1.000 Penduduk)	0,6500
2.1.3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
2.1.3.1.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik (%)	30,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja 2023
2.1.3.2.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Mantap (%)	80,23
2.1.3.3.	Proporsi Jembatan Dengan Kondisi Baik (%)	60,00
2.1.3.5.	Proporsi Irigasi Dalam kondisi Baik (%)	38,00
2.1.3.6.	Ratio RTH Per Satuan Wilayah Ber HPL/HGB (%)	81,00
2.1.4.	**Perumahan Rakyat dan Pemukiman**	
2.1.4.1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	28,00
2.1.4.2.	Rumah Tidak Layak Huni (%)	0,25
2.1.4.3.	Persentase luasan pemukiman kumuh diperkotaan (%)	10,00
2.1.5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dam Perlindungan Masyarakat**	
2.1.5.1.	Rasio Rumah Ber IMB (%)	7,00
2.1.5.2.	Rasio Personil Satpol PP (Per 10.000 Penduduk)	0,07
2.1.5.3.	Cakupan Penegakan Peraturan (%)	100,00
2.1.5.4.	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (%)	100,00
2.1.6.	**Sosial**	
2.1.6.1.	Penyandang Cacat Baik Fisik Maupun Mental Serta Lanjut Usia Yang Tidak Potensial Yang telah Menerima Jaminan Sosial (%)	100,00
2.1.6.2.	PMKS penerima bantuan sosial (%)	100,00
2.2.	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**	
2.2.1.	**Tenaga Kerja**	
2.2.1.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,00
	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97,62
2.2.1.2.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)	87,00
2.2.1.3.	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)	90,00
2.2.2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Gender (%)	83,89
2.2.2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	66,78
2.2.2.3.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	96,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja 2023
2.2.3.	**Pangan**	
2.2.3.1.	Ketersediaan Pangan Utama (%)	100,00
2.2.3.2.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	100,00
2.2.4.	**Pertanahan**	
2.2.4.1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	47,00
2.2.5.	**Lingkungan Hidup**	
2.2.5.1.	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100,00
2.2.5.2.	Persentase Penanganan Sampah (%)	86,00
2.2.5.3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	54,30
2.2.6.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
2.2.6.1.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	100,00
2.2.6.2.	Kepemilikan KTP (%)	100,00
2.2.6.3.	Kepemilikan Akta Kelahiran (Per 1.000 Penduduk)	1.000,00
2.2.7.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	
2.2.7.1.	Cakupan Program Desa Maju Inhil Jaya (Desa)	236,00
2.2.7.2.	Pertambahan Jumlah Desa Maju (Desa)	2,00
2.2.7.3.	PKK Aktif (%)	100,00
2.2.7.4.	Posyandu Aktif (%)	100,00
2.2.8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
2.2.8.1.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	80,00
2.2.8.2.	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	83,00
2.2.8.3.	Ratio PPKBD Satu Setiap Desa/Kelurahan (%)	100,00
2.2.9.	**Perhubungan**	
2.2.9.1.	Tersedianya Angkutan Umum Yang melayani Trayek Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten (%)	83,00
2.2.9.2.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten/kota (%)	95,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja 2023
2.2.9.3.	Tersedianya angkutan perairan yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan (%)	97,00
2.2.10	**Komunikasi dan Informatika**	
2.2.10.1	Pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalu website (media online)	100,00
2.2.10.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	100,00
2.2.11.	**Koperasi, Usaha kecil dan Menengah**	
2.2.11.1.	Koperasi Aktif (%)	71,00
2.2.11.2.	Usaha Mikro dan Kecil (%)	72,00
2.2.12.	**Penanaman Modal**	
2.2.11.1.	Realisasi PMDN (Rp Milyar)	15.611,00
2.2.11.2.	Realisasi PMA (USD Juta)	152,00
2.2.13.	**Kepemudaan dan Olahraga**	
2.2.13.1.	Jumlah Prestasi olahraga (Kejuaraan)	9,00
2.2.14	**Statistik**	
2.2.14.1.	Buku "Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka" (Judul)	1,00
2.2.14.1.	Kecamatan Dalam Angka (Judul)	20,00
2.2.15	**Persandian**	
2.2.16	**Kebudayaan**	
2.2.16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Event)	5,00
2.2.16.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Unit)	2,00
2.2.17.	**Perpustakaan**	
2.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	8.472,00
2.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.	23.612,00
2.2.18.	**Kearsipan**	
2.2.18.1	Pengelolaan arsip secara baku (5)	80,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja 2023
2.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang)	8,00
2.3.	**Layanan Pilihan**	
2.3.1.	**Pariwisata**	
2.3.1.	Kunjungan Wisatawan (Orang)	5.500
2.3.2.	**Pertanian**	
2.3.2.1.	Produktivitas Padi (Ton GKG/Hektar)	4,30
2.3.2.2.	Produksi beras (Ton)	69.915,42
2.3.2.3.	Produktivitas Kelapa (Ton Koppa/Hektar)	1,30
2.3.2.4.	Produktivitas kelapa sawit (Ton CPO/Hektar	3,00
2.3.2.5.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	43,72
2.3.3.	**Perdagangan**	
2.3.3.1.	Nilai Ekspor bersih Perdagangan (USD Juta)	330,00
2.3.3.2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	14,60
2.3.4.	**Perindustrian**	
2.3.4.1.	Nilai produksi usaha menengah kecil (Rp Juta)	61.835,22
2.3.4.2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.	28,71
2.3.5.	**Transmigrasi**	
2.3.6.	**Kelautan dan Perikanan**	
2.3.6.1.	Produksi Perikanan (Ton)	62.080,60
2.3.6.2.	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	46,67
2.4.	**Urusan Penunjang**	
2.4.1.	**Perencanaan Pembangunan**	
2.4.1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	0,00
2.4.1.2.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	100,00
2.4.1.3.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,00
2.4.2.	**Keuangan**	
2.4.1.	Opini BPK (Opini)	WTP
2.4.3.	**Kepegawaian Serta Pendidikan dan Latihan**	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja 2023
2.4.3.1.	Pembinaan PNS melalui Pemberian Hukuman Disiplin (Persen)	100
2.4.4.	**Penelitian dan Pengembangan**	
2.4.4.1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100,00
2.4.5.	**Pengawasan**	
2.4.5.1.	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti (%)	100,00
2.4.6.	**Sekretariat Dewan**	
2.4.6.1.	Rasio Pembahasan Prolegda	100,00
III.	**Aspek Daya Saing**	
3.1.	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**	
3.1.1.	Pengeluaran Per Kapita (Rp Ribu)	12.148,86
3.1.2.	Nilai Tukar Petani	115,00
3.2.	**Fokus Fasilitas Wilayh/Infrastruktur**	
3.2.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	75,00
3.3.	**Fokus Iklim Investasi**	
3.3.1.	Angka Kriminalitas (Kasus Tertangani Per 10.000 Penduduk)	3,50
3.4.	**Fokus Sumberdaya Manusia**	
3.4.1.	Rasio Ketergantungan (%)	45,92

BAB 7
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan baik dari Pemerintah Provinsi Riau maupun Kabupaten Indragiri Hilir dan memperhatikan kebijakan nasional khususnya untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Indragiri Hilir serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN